BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2025

Pemerintah Kota Magelang
Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaran pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan terarah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program unggulan dan program prioritas, perlu menyusun rencana jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALI KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Pasal 2

(1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui rencana Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota terpilih serta permasalahan dan kebutuhan Daerah.
(2) Penyusunan RPJMD bertujuan:
    a. memberikan arahan bagi Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah;
    b. memberikan arahan bagi penyusunan RKPD; dan
    c. menyediakan pedoman penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun dan rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 4

RPJMD merupakan penjabaran dari:
a. Visi, Misi, dan program Wali Kota;
b. Tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah;
c. program Perangkat Daerah;
d. program lintas Perangkat Daerah; dan
e. rencana kerja dalam Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

RPJMD berpedoman pada RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota sekitar.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman:
a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 7

(1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut:
   a. BAB I berisi pendahuluan;
   b. BAB II berisi gambaran umum Daerah;
   c. BAB III berisi Visi Misi dan program prioritas Pembangunan Daerah;
   d. BAB IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. BAB V berisi penutup.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada (3) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan lima tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2 NOMOR 2025

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH (2-164/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerahyang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Di samping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum 1-2

1.3 Hubungan antar Dokumen 1-4

1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN 1-4

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Magelang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 1-6

1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kota Magelang 1-7

1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kota Magelang 1-8

1.3.5 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kota Magelang 1-8

1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah 1-8

1.3.7 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya 1-9

1.4 Maksud dan Tujuan 1-10

1.4.1 Maksud 1-10

1.4.2 Tujuan 1-10

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kota Magelang 1-11

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH **2-1**

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-49

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 2-88

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 2-135

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 2-171

2.3 Gambaran Keuangan Daerah 2-185

2.3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 2-185

2.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah 2-208

2.4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 2-214

2.4.1 Permasalahan Pembangunan 2-214

2.4.2 Isu Strategis 2-218

BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH **3-1**

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3-1

3.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-1

3.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-5

3.1.3 Tujuan dan Sasaran 3-15

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan 3-23

3.2.1 Dasar Perumusan Strategi Pembangunan Daerah 3-23

3.2.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang 3-27
3.2.3 Strategi Pengelolaan Persampahan Kota Magelang 3-32
3.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-34
3.2.5 Penahapan Pembangunan 3-45
3.2.6 Program Unggulan Walikota dan Klaster Program Prioritas 3-73
3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Magelang 3-110
3.3.1 Konstelasi Kebijakan Arah Pengembangan Wilayah 3-110
3.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota Magelang 3-120
3.3.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Magelang 3-122
3.3.4 Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Magelang 2025-2029 3-123

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4-1
4.1 Program Perangkat Daerah 4-1
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4-1
4.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 4-4
4.1.3 Urusan Pilihan 4-11
4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4-14
4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 4-14
4.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 4-16
4.1.7 Unsur Kewilayahan 4-16
4.1.8 Unsur Pemerintahan Umum 4-16
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4-43
4.2.1 Indikator Kinerja Utama 4-43
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah 4-43
4.2.3 Indikator Utama Pembangunan 4-54

BAB 5 PENUTUP 5-1
5.1 Kesimpulan 5-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan 5-1
5.3 Pengendalian dan Evaluasi 5-2
5.4 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 5-3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 1-5
Tabel 1.2 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 1-6
Tabel 1.3 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 1-7
Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang 2-1
Tabel 2.2 Rerata Curah Hujan Tahunan di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-9

Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kota Magelang (Ha) 2-10
Tabel 2.4 Daya Dukung Lahan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-12
Tabel 2.5 Daya Dukung Pangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-12
Tabel 2.6 Daya Dukung Air Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-13
Tabel 2.7 Jumlah Pelanggan Zona Air Minum Prima (ZAMP) Tahun 2020-2024 2-14
Tabel 2.8 Indeks Kualitas Udara Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-14
Tabel 2.9 Rasio Elektrifikasi Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-15
Tabel 2.10 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2020-2024 2-15
Tabel 2.11 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi Kota Magelang, 2020-2024 2-16
Tabel 2.12 Luas Panen Padi Kawasan Gelangmanggung (Ha) 2-16
Tabel 2.13 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Magelang 2-17
Tabel 2.14 Produksi Perikanan Tangkap Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-20
Tabel 2.15 Nilai Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-20
Tabel 2.16 Perkembangan Peternakan di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-20
Tabel 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-22
Tabel 2.18 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Aman di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-23
Tabel 2.19 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-23
Tabel 2.20 Infrastruktur Penanganan Sampah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-24
Tabel 2.21 Hasil Inventarisasi GRK Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-25
Tabel 2.22 Potensi Penurunan Emisi di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-26
Tabel 2.23 Indeks Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-29
Tabel 2.24 Kepadatan Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-39
Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Kota Magelang Menurut Kelompok Umur, 2020-2024 2-40
Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kota Magelang, 2020-2024 2-41
Tabel 2.27 Proyeksi Demografi Kota Magelang 2025-2030 2-46
Tabel 2.28 PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-54
Tabel 2.29 Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu Hamil, Melahirkan, dan Anak dan Lansia pada Tahun 2020-2024 2-59
Tabel 2.30 Proyeksi Indikator Kesehatan di Kota Magelang 2-60
Tabel 2.31 Indeks Keluarga Sehat Kota Magelang 2-61
Tabel 2.32 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit di Kota Magelang 2-61
Tabel 2.33 Perbandingan APM dan APK Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 2-66
Tabel 2.34 Proyeksi Penduduk Kota Magelang menurut Angka Partisipasi Sekolah 2-67

Tabel 2.35 Persentase Siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang) Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-68
Tabel 2.36 Indikator Indeks Pilar Adopsi TIK Tahun 2022-2024 2-69
Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2021-2024 2-72
Tabel 2.38 Persentase Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Penempatan Kerja 2-76
Tabel 2.39 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-77
Tabel 2.40 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Magelang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 2-78
Tabel 2.41 Kondisi Kepemudaan dan Olahraga Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-78
Tabel 2.42 Indeks Kota Toleran Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-80
Tabel 2.43 Jumlah Kelompok Kesenian Aktif Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-80
Tabel 2.44 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-81
Tabel 2.45 Kondisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2-86
Tabel 2.46 Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Magelang, 2020-2024 2-87
Tabel 2.47 Indeks Kualitas Keluarga Kota Magelang 2-87
Tabel 2.48 Indeks Perlindungan Anak Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2021-2024 2-88
Tabel 2.49 Angka Beban Ketergantungan Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 2-88
Tabel 2.50 PDRB Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku dan Harga Konstan) Kota Magelang Tahun 2024 2-89
Tabel 2.51 Struktur Ekonomi Sektor Basis dan Non Basis Kota Magelang Berdasarkan Perhitungan LQ Tahun 2024 2-94
Tabel 2.52 Rasio Volume Usaha Koperasi dan Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Daerah terhadap PDRB Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024 2-97
Tabel 2.53 Indikator Indeks Pilar Ekonomi Makro 2-98
Tabel 2.54 Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-100
Tabel 2.55 Kapabilitas Inovasi Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-102
Tabel 2.56 Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Obyek Wisata Kota Magelang Tahun 2021-2024 2-104
Tabel 2.57 Net Ekspor Barang dan Jasa ADHB dan ADHK Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-107
Tabel 2.58 Jumlah Sarana Perhubungan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-107
Tabel 2.59 Perankingan Jalan Terburuk di Kota Magelang Tahun 2024 2-109
Tabel 2.60 Kondisi Saluran Drainase di Kota Magelang 2-112
Tabel 2.61 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Magelang, 2020-2024 2-114
Tabel 2.62 Pemrosesan Sampah di Kota Magelang 2020-2024 2-116

Tabel 2.63 Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak Kota Magelang, 2020-2024 2-118
Tabel 2.64 Pelaku UMKM Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-118
Tabel 2.65 Jenis Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024 2-119
Tabel 2.66 Perkembangan Industri Kecil Kota Magelang, 2020-2024 2-120
Tabel 2.67 Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 2-121
Tabel 2.68 Akreditasi PAUD, SD, SMP, PKMB, dan LKP di Kota Magelang 2-126
Tabel 2.69 Indikator Indeks Infrastruktur 2024 2-127
Tabel 2.70 Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Kesehatan 2-127
Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan 2-128
Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan 2-128
Tabel 2.73 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2030 2-129
Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Wilayah Pelayanan Non Perumda Air Minum 2-130
Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Magelang Tahun 2030 2-131
Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Magelang Tahun 2030 2-132
Tabel 2.77 Angka Kriminalitas Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-135
Tabel 2.78 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024 2-137
Tabel 2.79 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024 2-138
Tabel 2.80 Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Magelang 2-138
Tabel 2.81 Persentase Penegakan Perda Kota Magelang 2-139
Tabel 2.82 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 2-141
Tabel 2.83 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024 2-143
Tabel 2.84 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 2-145
Tabel 2.85 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024 2-146
Tabel 2.86 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024 2-146
Tabel 2.87 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Sosial Tahun 2020-2024 2-147
Tabel 2.88 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 2-148
Tabel 2.89 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 2-149
Tabel 2.90 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pangan Tahun 2020-2024 2-150

Tabel 2.91 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024 2-150
Tabel 2.92 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 2-151
Tabel 2.93 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 2-152
Tabel 2.94 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Kota Magelang Tahun 2022-2024 2-153
Tabel 2.95 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 2-154
Tabel 2.96 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024 2-154
Tabel 2.97 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 2-155
Tabel 2.98 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 2-156
Tabel 2.99 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024 2-156
Tabel 2.100 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 2-156
Tabel 2.101 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Statistik Tahun 2020-2024 2-157
Tabel 2.102 Nilai Komponen Indeks KAMI Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-158
Tabel 2.103 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024 2-158
Tabel 2.104 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024 2-160
Tabel 2.105 Kinerja Urusan Pemerintah Kota Magelang di Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024 2-160
Tabel 2.106 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 2-161
Tabel 2.107 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024 2-161
Tabel 2.108 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pertanian Tahun 2020-2024 2-162
Tabel 2.109 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024 2-162
Tabel 2.110 Kinerja Urusan Bidang Perindustrian Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-163
Tabel 2.111 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-164
Tabel 2.112 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-164
Tabel 2.113 Kinerja Unsur Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-165
Tabel 2.114 Kinerja Unsur Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-165

Tabel 2.115 Kinerja Unsur Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-166
Tabel 2.116 Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-167
Tabel 2.117 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-168
Tabel 2.118 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-168
Tabel 2.119 Kinerja Unsur Kewilayahan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-169
Tabel 2.120 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-169
Tabel 2.121 Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Magelang Tahun 2022-2024 2-171
Tabel 2.122 Perkembangan Realisasi APBD Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-186
Tabel 2.123 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-192
Tabel 2.124 Komposisi Pengeluaran Daerah di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan Juta Rupiah) 2-193
Tabel 2.125 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-194
Tabel 2.126 Neraca Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan Juta Rupiah) 2-198
Tabel 2.127 Analisa Neraca Periode Tahun 2020 - 2024 2-200
Tabel 2.128 Laporan Operasional Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-201
Tabel 2.129 Analisa Laporan Operasional Periode Tahun 2020 - 2024 2-204
Tabel 2.130 Laporan Perubahan Ekuitas Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-207
Tabel 2.131 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 - 2030 (Juta Rp) 2-212
Tabel 2.132 Ringkasan Isu Strategis Kota Magelang 2-232
Tabel 3.1 Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045 3-2
Tabel 3.2 Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 3-4
Tabel 3.3 Persandingan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Magelang 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 3-9
Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan Rekomendasi KLHS 3-12
Tabel 3.5 Unsur Visi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Urusan Penanggungjawab 3-19
Tabel 3.6 Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-34
Tabel 3.7 Keselarasan Tema Kota Magelang dengan Tema Provinsi Jawa Tengah 3-46
Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2026-2030 3-68
Tabel 3.9 Daftar Program Unggulan dan Program Prioritas dengan Konversi Program Nomenklatur 3-73
Tabel 3.10 Program Unggulan dan Program Prioritas berdasarkan Misi 3-79

Tabel 3.11 Kaitan Program Unggulan dan Program Prioritas dengan Asta Cita 3-80
Tabel 3.12 Dukungan Program Unggulan dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap Program Jawa Tengah 3-84
Tabel 3.13 Dukungan Program Unggulan Kota Magelang terhadap Program Prioritas Jawa Tengah 3-85
Tabel 3.14 Korelasi Tujuan, Sasaran, Outcome, Program Prioritas 3-92
Tabel 3.15 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah pada RTRW Kota Magelang 2011-2031 3-114
Tabel 3.16 Konstelasi Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Magelang 3-119
Tabel 3.17 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 3-125
Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030 4-18
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kota Magelang Tahun 2025-2030 4-43
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2030 4-44
Tabel 4.4 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025-2030 4-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1-4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Magelang 2-2
Gambar 2.2 Peta Konstelasi Kota Magelang dengan Kawasan Gelangmanggung 2-3
Gambar 2.3 Persentase Kemiringan Lereng Kota Magelang 2-4
Gambar 2.4 Peta Kelerengan Kota Magelang 2-5
Gambar 2.5 Peta Ketinggian Kota Magelang 2-6
Gambar 2.6 Peta Geologi Kota Magelang 2-7
Gambar 2.7 Peta Hidrologi Kota Magelang 2-8
Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Kota Magelang 2-9
Gambar 2.9 Peta Guna Lahan Kota Magelang 2-11
Gambar 2.10 Perkembangan Luasan per Penggunaan Lahan Kota Magelang Tahun 2020 dan 2023 2-11
Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2020-2024 2-15
Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2020-2024 2-17
Gambar 2.13 Luasan Tingkat Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Magelang 2-18
Gambar 2.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Magelang 2020-2024 2-19
Gambar 2.15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Magelang, 2020-2024 2-19
Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Aman di Kota Magelang 2-22

Gambar 2.17 Alur Penanganan Sampah di Kota Magelang 2-24
Gambar 2.18 Peta Rawan Bencana Longsor Kota Magelang 2-27
Gambar 2.19 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang 2-28
Gambar 2.20 Kejadian Bencana Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-29
Gambar 2.21 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Magelang 2-31
Gambar 2.22 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang 2-34
Gambar 2.23 Peta Pengembangan Eksternal Wilayah Kota Magelang 2-36
Gambar 2.24 Peta Strategi Pengembangan Wilayah 2-38
Gambar 2.25 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-39
Gambar 2.26 Sex Ratio Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-41
Gambar 2.27 Total Fertility Rate (TFR) Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-42
Gambar 2.28 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-43
Gambar 2.29 Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-43
Gambar 2.30 Angka Kematian Berdasarkan Kelompok Umur Kota Magelang 2-44
Gambar 2.31 Perkembangan Migrasi Masuk dan Keluar Kota Magelang, 2020-2024 2-45
Gambar 2.32 Penduduk berdasarkan Pendidikan di Kota Magelang Tahun 2024 2-45
Gambar 2.33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029 2-47
Gambar 2.34 Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto (jiwa/km^2) Kota Magelang Tahun 2025-2029 2-48
Gambar 2.35 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029 (jiwa) 2-48
Gambar 2.36 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Tahun 2025-2029 2-49
Gambar 2.37 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen) 2-50
Gambar 2.38 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Magelang Tahun 2021-2023 2-51
Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-52
Gambar 2.40 Perbandingan Indikator Kemiskinan Kota Magelang dengan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2024 2-52
Gambar 2.41 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskian Tahun 2020-2024 2-53
Gambar 2.42 Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kota Magelang dengan Kota lain, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024 2-54
Gambar 2.43 Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-55
Gambar 2.44 Perbandingan TPAK Kota Magelang terhadap Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024 2-56
Gambar 2.45 Perbandingan Gini Ratio Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024 2-57
Gambar 2.46 IPM Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-58

Gambar 2.47 IPM Nasional, Prov. Jateng, dan Kota-Kota di Jawa Tengah Tahun 2024 2-58
Gambar 2.48 Indeks Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-59
Gambar 2.49 Perkembangan AKB, AKABA, dan AKI Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-60
Gambar 2.50 Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-62
Gambar 2.51 Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Magelang 2020-2024 2-63
Gambar 2.52 Persentase Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan 2-63
Gambar 2.53 Indeks Pendidikan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-64
Gambar 2.54 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-64
Gambar 2.55 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kota Magelang dengan Daerah Lainnya, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023 2-65
Gambar 2.56 Angka Partisipasi Murni Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-65
Gambar 2.57 Angka Partisipasi Kasar Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-66
Gambar 2.58 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024 2-67
Gambar 2.59 Jumlah PMKS Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-70
Gambar 2.60 Jumlah PSKS Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-70
Gambar 2.61 Jenis PSKS Kota Magelang Tahun 2024 2-71
Gambar 2.62 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-71
Gambar 2.63 Persentase Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-76
Gambar 2.64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-77
Gambar 2.65 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Magelang Tahun 2023 2-79
Gambar 2.66 Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Kota Magelang 2-82
Gambar 2.67 IPG Kota Magelang tahun 2020-2024 2-83
Gambar 2.68 IPG Kab/Kota Gelangmanggung dan Kota Lain, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024 2-83
Gambar 2.69 IDG dan Komponen Pembentuknya di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-84
Gambar 2.70 Perbandingan IDG Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional 2-84
Gambar 2.71 IKG Kawasan Gelangmanggung dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2-85
Gambar 2.72 Perbandingan Rasio Ketergantungan Kota Magelang dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2024 2-89
Gambar 2.73 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024 2-91
Gambar 2.74 Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024 2-92
Gambar 2.75 Tingkat Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Magelang 2020-2024 2-92

Gambar 2.76 Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 2-93
Gambar 2.77 Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2023 2-95
Gambar 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-96
Gambar 2.79 Return on Asset (ROA) BUMD Tahun 2020-2023 2-96
Gambar 2.80 Disparitas Harga Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-97
Gambar 2.81 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-99
Gambar 2.82 Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Komoditas 2-99
Gambar 2.83 Inovasi Daerah 2-101
Gambar 2.84 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2020-2024 2-103
Gambar 2.85 Peta Persebaran Potensi Wisata 2-104
Gambar 2.86 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Tahun 2020-2024 2-106
Gambar 2.87 Jumlah Pengguna Angkutan Umum, 2020-2024 2-108
Gambar 2.88 Persentase Kemantapan Jalan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-108
Gambar 2.89 Perbandingan Persentase Kemantapan Jalan Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang Tahun 2024 2-109
Gambar 2.90 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota Magelang 2-110
Gambar 2.91 Pemakaian Listrik Pasca Bayar (kWh) berdasarkan kelompok pelanggan di Kota Magelang tahun 2020-2024 2-111
Gambar 2.92 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Magelang tahun 2020-2024 2-111
Gambar 2.93 Persentase Individu Di Atas 5 tahun yang Menggunakan Internet di Kota Magelang tahun 2020-2024 2-112
Gambar 2.94 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang 2-114
Gambar 2.95 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-115
Gambar 2.96 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-115
Gambar 2.97 Volume Sampah yang Tertangani (ton) Kota Magelang tahun 2021-2024 2-116
Gambar 2.98 Luas Permukiman Kumuh (Ha) Kota Magelang, 2020-2024 2-117
Gambar 2.99 Jumlah Pelaku Usaha dan Serapan Tenaga Kerja UMKM di Kota Magelang tahun 2020-2024 2-119
Gambar 2.100 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Perekonomian 2-120
Gambar 2.101 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian 2-121
Gambar 2.102 Persebaran Ekonomi Kreatif Berdasarkan Kecamatan di Kota Magelang 2-122
Gambar 2.103 Asal Modal Usaha dari Pelaku Ekraf Kota Magelang 2-122
Gambar 2.104 Banyaknya Penginapan/Hotel di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-123
Gambar 2.105 Banyaknya Restoran di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-124

Gambar 2.106 Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-124
Gambar 2.107 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-125
Gambar 2.108 Ketersediaan Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-126
Gambar 2.109 Persentase Kondisi Ruang Kelas Berstatus Baik Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-126
Gambar 2.110 Proyeksi Kebutuhan dan Kapasitas Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2037 2-129
Gambar 2.111 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Magelang Hingga Tahun 2030 2-132
Gambar 2.112 Rasio Pajak Daerah Kota Magelang terhadap PDRB Tahun 2020-2024 2-133
Gambar 2.113 Jumlah Investasi (Juta Rp) yang Ditanamkan Menurut Sektor di Kota Magelang Tahun 2024 2-134
Gambar 2.114 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-136
Gambar 2.115 Indeks SPBE Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-137
Gambar 2.116 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-140
Gambar 2.117 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Gelangmanggung Tahun 2024 2-140
Gambar 2.118 Nilai Indeks Wilayah Gelangmanggung pada Pilar 4, 10, dan 11 Tahun 2024 2-141
Gambar 2.119 Jumlah Pengunjung Perpustakaan (jiwa) di Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-159
Gambar 2.120 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kota Magelang Tahun 2020-2024 2-160
Gambar 2.121 Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-188
Gambar 2.122 Perkembangan Rasio Kemandirian (PAD/TPD) dan Rasio Ketergantungan (TKD/TPD) dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (%) 2-189
Gambar 2.123 Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp) 2-190
Gambar 2.124 Perkembangan Rasio Belanja Operasi (BO) dan Rasio Belanja Pegawai (BP) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (%) 2-191
Gambar 3.1 Struktur Kerangka Pencapaian Visi 3-13
Gambar 3.2 Turunan Tujuan dan Sasaran dari Unsur Visi Kota Magelang 2025-2029 3-15
Gambar 3.3 Penahapan dan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 3-52

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, diperlukan perencanaan yang komprehensif, terukur, dan terarah guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual daerah, kebijakan nasional, serta aspirasi masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sedang dalam pasal 150 ayat 3 huruf e berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam

peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang 2025-2045 sebagai tahapan pembangunan jangka panjang yang lebih terstruktur. RPJMD ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan hidup. RPJPD Kota Magelang menetapkan Visi tahun 2025-2045 **"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (1) Peningkatan pendapatan per kapita; (2) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan; (3) Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa regional; (4) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan (5) Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Wali Kota Magelang, H. Damar Prasetyono, dan Wakil Wali Kota, dr. Sri Harso, M.Kes., Sp.S., resmi dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030. Dalam kepemimpinannya, pasangan pemimpin Magelang ini akan mengusung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2025-2029 dengan visi: **"Magelang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan"**. Misi yang diusung adalah:

1. Menciptakan masyarakat yang bermartabat
2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan
3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas
5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Selain itu, RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, tantangan globalisasi, serta kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pendekatan perencanaan yang berbasis data dan analisis mendalam, dokumen ini menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan daerah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 juga berperan dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan daerah melalui penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan demikian, RPJMD ini akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kota Magelang, serta memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

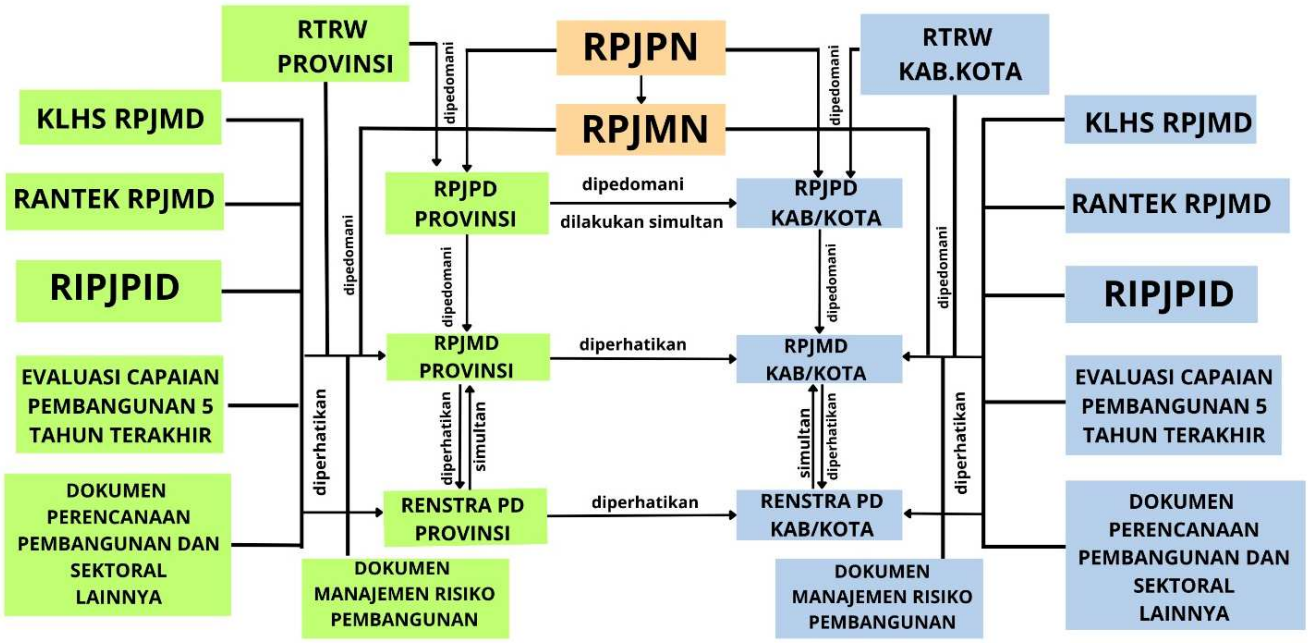
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7).
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55).
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Magelang ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045, dan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan rekomendasi dari KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). RPJMD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Magelang dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD Kota Magelang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1 Hubungan antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional serta target yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kota Magelang juga

memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kota Magelang.

Analisis isu strategis dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi diintegrasikan dengan isu yang diusung oleh Kepala Daerah terpilih sebagai bahan penyusunan isu strategis RPJMD. Hasil analisis tersebut ditindaklanjuti untuk penjabaran visi dan misi dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Magelang tahun 2025-2029. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025-2029		**RPJMN Tahun 2025-2029**	
VISI			
Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis dan Humanis Nyaman dan Berkelanjutan		Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	
MISI			
1	Menciptakan masyarakat yang bermartabat	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
2	Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
3	Menciptakan keharmonisan antar umat beragama	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
		8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5	Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJMN Tahun 2025-2029	
		3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
6	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kota Magelang dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029	
VISI			
Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis dan Humanis Nyaman dan Berkelanjutan		*Ngopeni-Ngelakoni Jateng* Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	
MISI			
1	Menciptakan masyarakat yang bermartabat	1	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global
2	Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
3	Menciptakan keharmonisan antar umat beragama	5	Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan
4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	1	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global

RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029	
5	Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	2	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan
		6	Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi
6	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

1.3.3 Hubungan antara RPJMD dengan RPJPD Kota Magelang

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045 khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu tahun 2025-2029. Dalam RPJPD Kota Magelang, tahapan periode tahun 2025-2029 diarahkan pada **Pembangunan Sumber Daya Manusia modern, inovatif, dan berintegras sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan**. Tahap pertama ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketenteraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Fokus sumber daya manusia menjadi prioritas pertama pembangunan pada tahap 5 tahun pertama dikarenakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah yang berdaya saing maka perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya terlebih dahulu termasuk penguatan kapasitas aparatur daerah untuk penguatan reformasi birokrasi.

Tabel 1.3 Hubungan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045	
VISI			
Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis dan Humanis Nyaman dan Berkelanjutan		Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan	
MISI			
1	Menciptakan masyarakat yang bermartabat	1	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
2	Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	3	Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan
		4	Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan
3	Menciptakan keharmonisan antar umat beragama	1	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	1	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul

RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045	
5	Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	2	Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh dan berdaya saing
6	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD, 2025

1.3.4 Hubungan antara RPJMD dengan RTRW Kota Magelang

Salah satu rujukan penting dalam penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. RTRW tersebut digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa secara substansi RPJMD selaras dengan kebijakan RTRW. Keselarasan kedua dokumen ini bertujuan untuk menjaga arah pembangunan daerah dan arah penataan ruang daerah selalu konsisten. Dengan demikian, pembangunan secara komprehensif akan mencapai tujuan, sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah. Hal ini akan memastikan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan, dan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor. Dalam RTRW Kota Magelang, terdapat beberapa arahan penting untuk diintegrasikan dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memantapkan peran Kota Magelang sebagai **Pusat Kegiatan Wilayah dengan aktivitas utama jasa perkotaan**;
2. Menyinergikan **keterpaduan pengembangan wilayah dan memantapkan kapasitas pelayanan regional** untuk Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung);
3. Mengembangkan **infrastruktur perkotaan yang terintegrasi** dengan sistem infrastruktur regional dan nasional.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD dengan RKPD Kota Magelang

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.6 Hubungan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.7 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain: Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Magelang, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.3.7.1 Hubungan RPJMD Kota Magelang dengan KLHS

Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, kondisi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan kebutuhan untuk upaya tambahan untuk meningkatkan keberlanjutan pembangunan perkotaan. Isu strategis yang menjadi masukan untuk penyusunan RPJMD adalah:

1. **Kemiskinan**

   Isu kemiskinan dalam dokumen KLHS RPJMD muncul berkaitan dengan masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, belum optimalnya alokasi sumberdaya bagi program pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan oleh indeks gini masih cukup tinggi.

2. **Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Dalam analisis pada indikator TPB tampak bahwa kota Magelang memiliki isu terkait kualitas SDM, beberapa kondisi yang perlu menjadi sorotan adalah berkurangnya kebijakan responsif gender, berkurangnya perempuan yang menduduki jabatan manajerial atau sebagai pengambil keputusan, meningkatnya prevalensi anemia ibu hamil, rendahnya bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat asi ekslusif, meningkatnya persentase merokok usia muda, meningkatnya KB yang tidak terpenuhi, serta rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet. Berbagai aspek permasalahan tersebut menunjukkan adanya isu terkait ancaman stagnasi kualitas SDM akibat kurang optimalnya layanan kesehatan dan IPTEK, serta belum optimalnya implementasi PUG.

3. **Sarana Prasarana Permukiman**

   Analisis menunjukkan belum optimalnya layanan sarana dan prasarana guna mendukung SDM dan lingkungan hunian yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan kualitas layanannya maupun kualitas fisik dan jumlahnya, agar mampu mengakomodasi kebutuhan dan mendukung aktivitas masyarakat.

4. **Daya Saing Ekonomi Daerah**

   Permasalahan daya saing daerah di Kota Magelang menunjukkan terancamnya daya saing ekonomi daerah akibat rendahnya laju PDB dan tingginya pengangguran. Peningkatan kinerja pada aspek-aspek tersebut akan memberikan dukungan pada penguatan daya saing perekonomian daerah di Kota Magelang. Misalnya pada perluasan kesempatan kerja agar tingkat pengangguran terbuka turun. Kondisi yang demikian dapat berdampak pada menurunnya persentase penduduk miskin, memperkecil ketimpangan ekonomi, dan pada akhirnya semakin meningkatkan daya saing perekonomian daerah.

5. **Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup**

   Isu lingkungan hidup di Kota Magelang menjadi tidak terlepas dengan isu ketahanan pangan, hal ini terkait dengan daya dukung pangan yang defisit dan layanan jasa ekosistem yang rendah dalam penyediaan bahan pangan. Isu lingkungan hidup di Kota Magelang berkisar pada kerentanan SDA dan lingkungan hidup. Perlindungan kualitas lingkungan hidup harus diarahkan pada upaya mengatasi permasalahan kebencanaan, iklim, perlindungan alam secara menyeluruh, dan efisiensi

pemafaatan SDA. Fokus yang demikian secara simultan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang.

6. **Tata Kelola dan Layanan Pemerintah**

   Secara keseluruhan isu tata kelola dan layanan pemerintah di Kota Magelang berupa belum optimalnya kinerja pemerintah dalam tata kelola dan layanan yang efektif. Optimalisasi kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi perlu untuk dilakukan, sebab indeks reformasi birokrasi merujuk pada kinerja pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

1.3.7.2 Hubungan RPJMD Kota Magelang dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ PID)

RPJMD menjadi acuan RIPJ PID diselaraskan agar kebijakan pembangunan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi, sosial, dan ekonomi masa depan. RIPJ PID menjadi landasan penting dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah, pengembangan sumber daya manusia unggul, serta peningkatan daya saing produk dan layanan publik berbasis IPTEK. RPJMD Kota Magelang disusun mengarusutamakan pemajuan IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3.7.3 Hubungan RPJMD Kota Magelang dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

RPJMD menjadi acuan RPKD supaya seluruh perangkat daerah, sesuai dengan kewenangannya, menjalankan intervensi yang terkoordinasi dan berbasis data, mencakup dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. RPKD mengacu pada RPJMD yang memuat strategi, program, dan kegiatan lintas sektor yang diarahkan secara spesifik untuk menurunkan angka kemiskinan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029.
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kota Magelang

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Proses penyusunan RPJMD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum kondisi Kota Magelang, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, sekaligus mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode RPJMD 2025-2029. Selain itu, bab ini juga menguraikan arah kebijakan serta proyeksi keuangan daerah guna memberikan gambaran kapasitas riil pendanaan pembangunan. Identifikasi permasalahan daerah berdasarkan urusan pemerintahan, tantangan nasional dan global, serta isu strategis daerah sebagai dasar perumusan isu strategis yang akan diselesaikan melalui RPJMD, sehingga pembangunan dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kota Magelang ke dalam tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah 2025-2029, disertai indikator kinerja dan target yang dirancang untuk menjawab isu strategis selama periode RPJMD. Selain itu, bab ini memuat strategi dan arah kebijakan guna memfokuskan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta mengarahkan pengembangan wilayah secara terencana dan berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kebijakan dan program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang menjadi dasar penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD. Setiap program dilengkapi indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan penanggung jawab. Selain itu, ditetapkan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah, terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dievaluasi pada akhir masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, disajikan pedoman transisi dalam penyusunan dokumen perencanaan pasca-RPJMD atau saat terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian, guna memastikan pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan dan adaptif.

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi mencakup karakteristik fisik Kota Magelang, termasuk luas wilayah, batas administratif, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, peran daerah pada wilayah sekitar, dan kondisi penduduk Kota Magelang.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Magelang terletak di Provinsi Jawa Tengah pada koordinat 110°11'56.0112" - 110°14'14.9136" BT dan 7°26'0.6216" - 7°30'21.6972" LS. Secara geografis, kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Magelang, berbatasan langsung dengan Kecamatan Secang di utara, Kecamatan Mertoyudan di selatan, Kecamatan Tegalrejo di timur, dan Kecamatan Bandongan di barat (Gambar 2.1). Luas wilayah Kota Magelang mengalami peningkatan dari 1.812 hektare menjadi 1.856 hektare pada tahun 2018, berdasarkan perhitungan Kantor Pertanahan Kota Magelang yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 mengenai pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Secara administratif, Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.

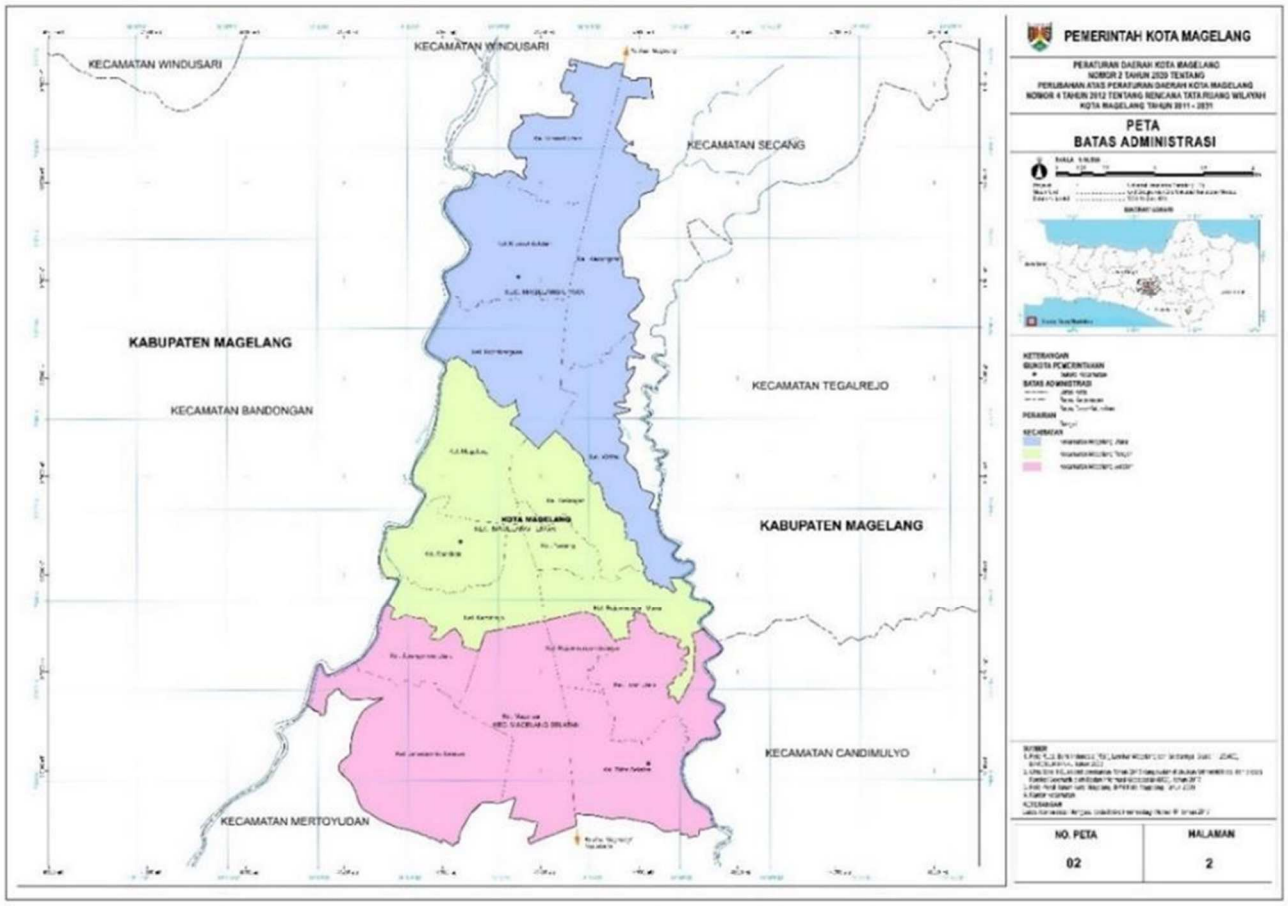
Rincian luas tiap kecamatan dan kelurahan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
1	**Kec. Magelang Selatan**	**7,14**	**38,47**
	1. Kel. Magersari	1,57	8,47
	2. Kel. Rejowinangun Selatan	0,38	2,02
	3. Kel. Jurangombo Utara	0,64	3,44
	4. Kel. Jurangombo Selatan	2,15	11,59
	5. Kel. Tidar Utara	1,09	5,87
	6. Kel. Tidar Selatan	1,31	7,08
2	**Kec. Magelang Tengah**	**5,13**	**27,65**
	1. Kel. Rejowinangun Utara	0,93	4,99
	2. Kel. Kemirirejo	0,87	4,67
	3. Kel. Cacaban	0,86	4,65
	4. Kel. Magelang	1,24	6,70
	5. Kel. Panjang	0,35	1,91
	6. Kel. Gelangan	0,88	4,75
3	**Kec. Magelang Utara**	**6,29**	**33,88**
	1. Kel. Wates	1,18	6,33

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (Km2)	Persentase (%)
	2. Kel. Potrobangsan	1,33	7,18
	3. Kel. Kedungsari	1,32	7,13
	4. Kel. Kramat Utara	0,99	5,35
	5. Kel. Kramat Selatan	1,46	7,88
	Kota Magelang	**18,56**	**100,00**

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2024

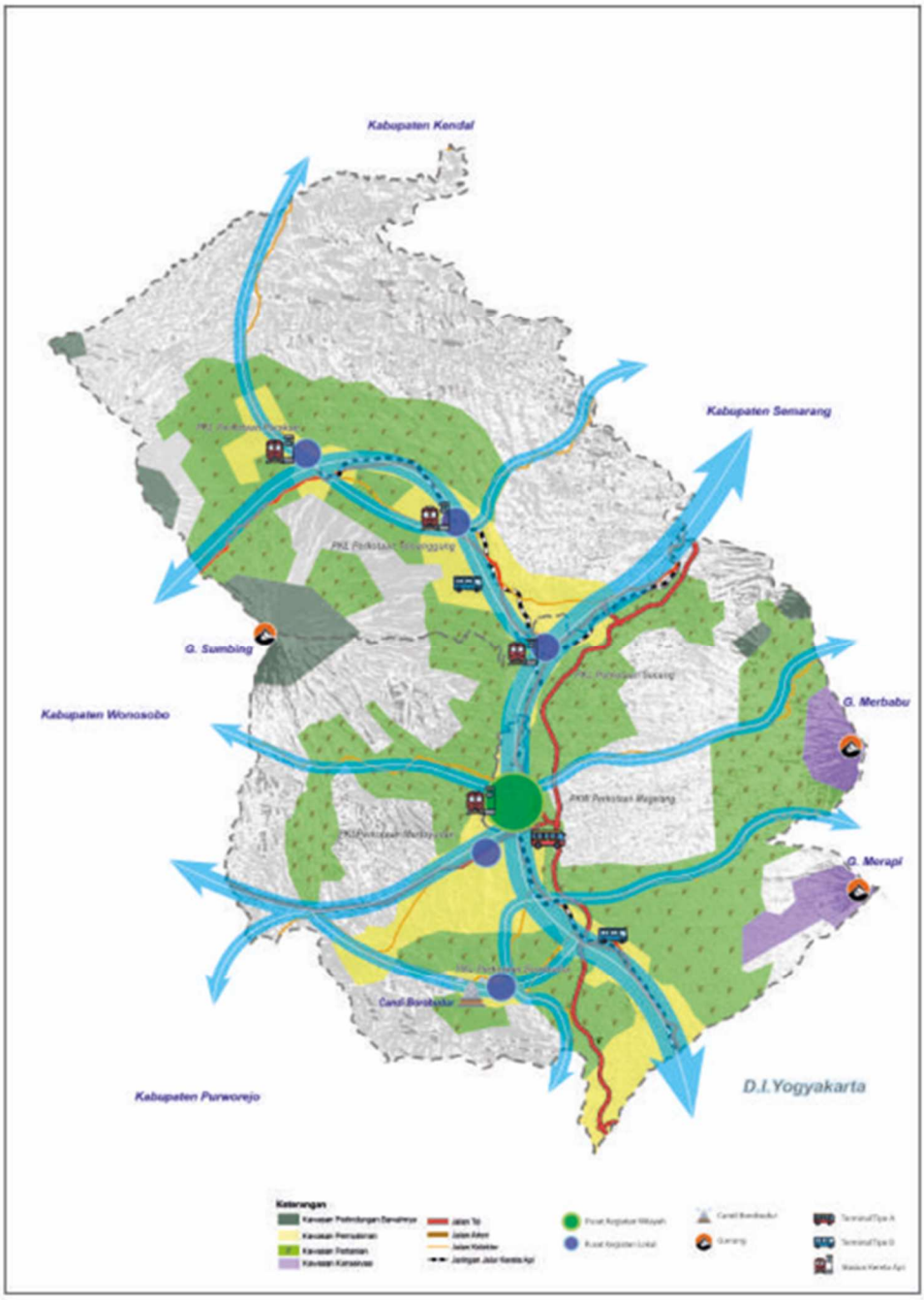


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Magelang

Sumber: Dokumen RTRW Kota Magelang 2011-2031, diolah

2.1.1.1.2 Peran Kota Magelang terhadap Wilayah Sekitar

Berdasarkan konstelasi wilayahnya (Gambar 2.2), Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 juga Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045. Kota ini berada pada simpul utama jalur transportasi di Jawa Tengah, menghubungkan Semarang - Magelang - Yogyakarta serta Purworejo - Magelang - Temanggung. Selain itu, Kota Magelang juga menjadi titik pertemuan berbagai jalur wisata, baik lokal, regional, maupun nasional, seperti Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan Dataran Tinggi Dieng.



Gambar 2.2 Peta Konstelasi Kota Magelang dengan Kawasan Gelangmanggung

Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

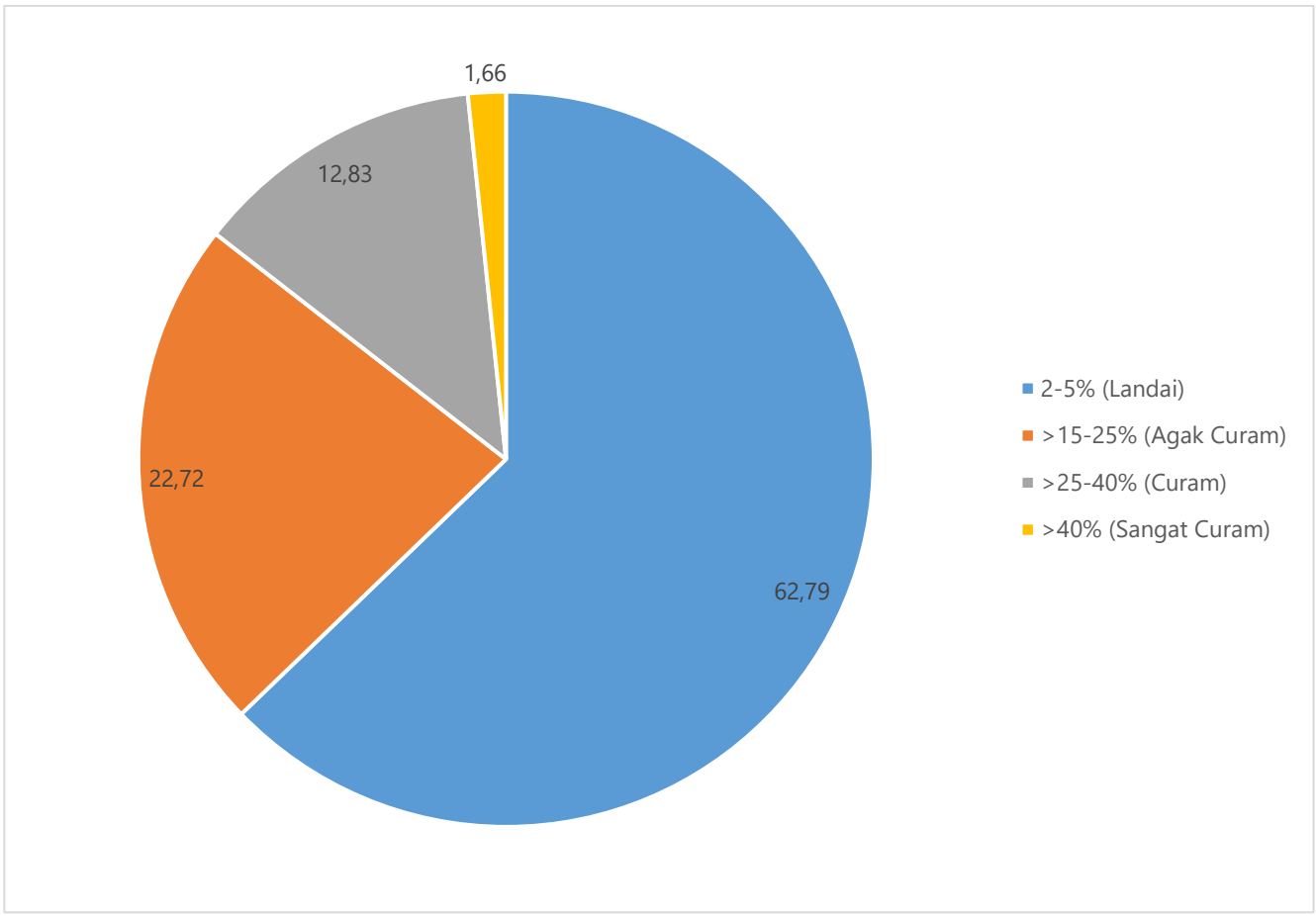
Kota Magelang memiliki peran ekonomi strategis terhadap kawasan sekitarnya karena lokasinya yang menjadi jalur utama konektivitas wilayah sebagai penghubung vital antara Kawasan Borobudur, Kabupaten Temanggung, dan pusat aktivitas di Provinsi DI Yogyakarta ke arah selatan. Kota Magelang berada sangat dekat dengan kawasan inti pariwisata budaya KSPN Borobudur dan berpotensi besar menjadi penyangga aktivitas pariwisata dengan menyediakan layanan akomodasi, transportasi, pusat kuliner, serta kegiatan budaya dan edukatif yang terintegrasi dengan daya tarik KSPN Borobudur. Kota Magelang menyediakan layanan publik untuk skala regional seperti pendidikan tinggi, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan rekreasi. Hal ini mempertegas posisi Kota Magelang sebagai pusat layanan untuk wilayah Gelangmanggung.

Pendekatan spasial menjadi instrumen strategis dalam pengembangan Kota Magelang untuk mengoptimalkan fungsi sebagai *regional service center* sekaligus simpul utama konektivitas antarwilayah, khususnya dalam menghubungkan KSPN Borobudur, Kabupaten Temanggung, dan pusat

kegiatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedekatan spasial dengan kawasan inti pariwisata budaya serta keterkaitan fungsional dalam sistem perkotaan wilayah Gelangmanggung menempatkan Kota Magelang sebagai simpul distribusi layanan dan aktivitas ekonomi yang mencakup sektor pariwisata, perdagangan-jasa, pendidikan tinggi, kesehatan rujukan, serta pusat kegiatan budaya yang terintegrasi secara lintas wilayah.

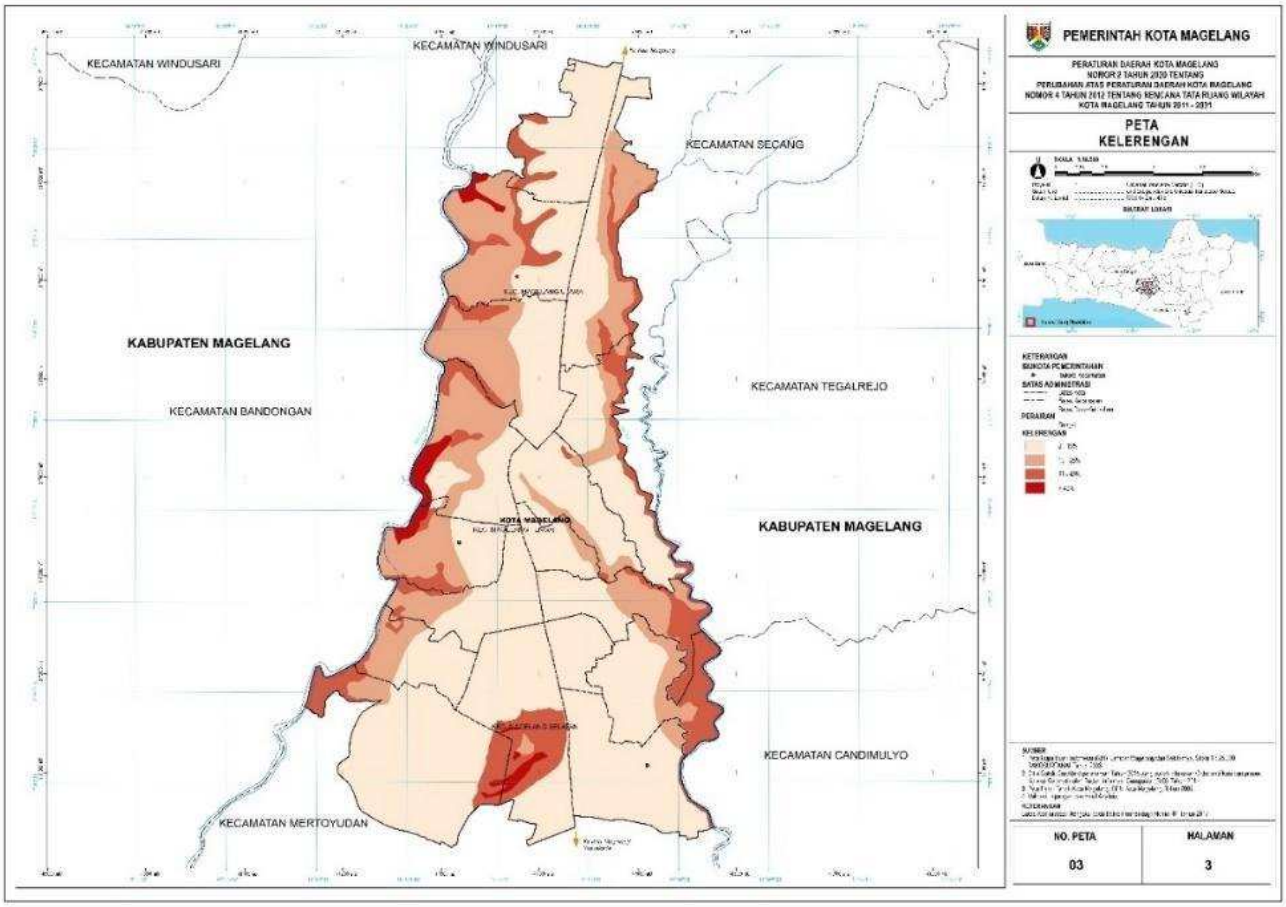
2.1.1.1.3 Topografi

Secara geografis, Kota Magelang berada di dataran rendah yang dikelilingi oleh berbagai pegunungan, seperti Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Gianti, Menoreh, Andong, dan Telomoyo. Topografi kota ini bervariasi, dengan dominasi kemiringan landai (2-15%) yang mencakup 62,79% dari total luas wilayah seperti dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Persentase Kemiringan Lereng Kota Magelang

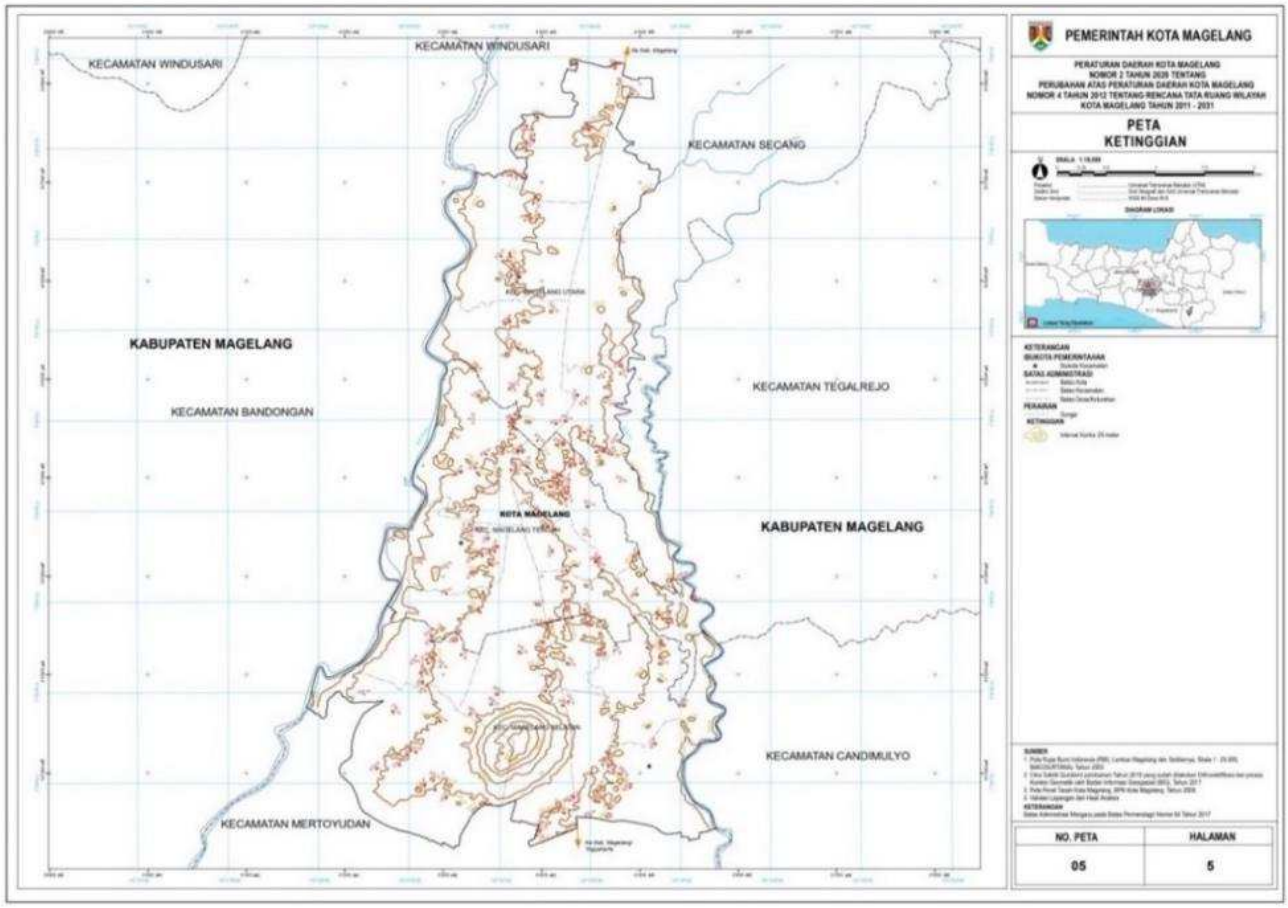
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031



Gambar 2.4 Peta Kelerengan Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kemiringan terjal di Kota Magelang terutama terdapat di sepanjang Sungai Progo di bagian barat dan sekitar Sungai Elo di bagian timur, dengan kemiringan mencapai 15-30%. Sementara itu, di wilayah timur kompleks Akademi Militer (AKMIL) hingga bagian utara, topografi lebih landai dengan kemiringan sekitar 2-5% (Gambar 2.4). Gunung Tidar, yang memiliki kemiringan 30-40%, berperan penting sebagai kawasan lindung, paru-paru kota, serta Kebun Raya yang berkontribusi pada kesejukan iklim Kota Magelang.



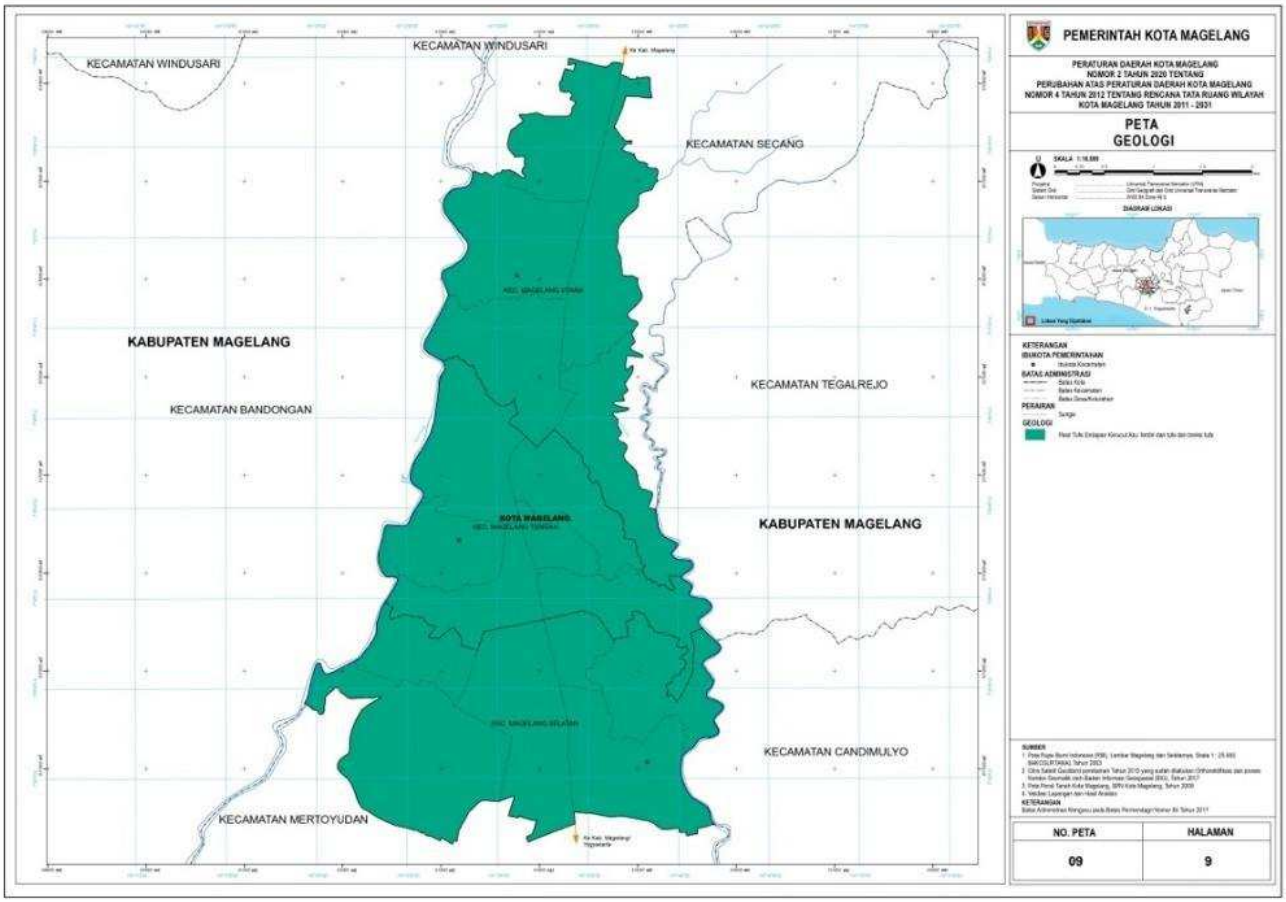
Gambar 2.5 Peta Ketinggian Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Titik tertinggi kota ini berada di Gunung Tidar dengan ketinggian 503 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan secara keseluruhan, wilayah Kota Magelang memiliki ketinggian antara 375-500 mdpl (Gambar 2.5). Secara morfologis, Kota Magelang berkembang mengikuti jaringan jalan arteri, menyebabkan pertumbuhan alami ke arah utara dan selatan. Kawasan terbangun umumnya berkembang di daerah dengan topografi datar, sementara wilayah dengan kontur curam memiliki keterbatasan dalam pengembangan lahan terbangun, terutama untuk permukiman.

2.1.1.1.4 Geologi

Kota Magelang memiliki karakteristik geologi yang didominasi oleh endapan pasir tufa dari kerucut abu, yang terdiri atas tufa dan breksi tufa. Formasi geologi ini tersebar terutama di bagian selatan serta sepanjang aliran Sungai Progo dan Sungai Elo (Gambar 2.6). Batuan tersebut merupakan hasil rombakan dari batuan yang lebih tua, bersifat lepas, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 250 hingga 350 meter dan relief yang cenderung halus dengan kemiringan sekitar 3-8%. Kota Magelang dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo, yang memiliki pola aliran *sum meander*.



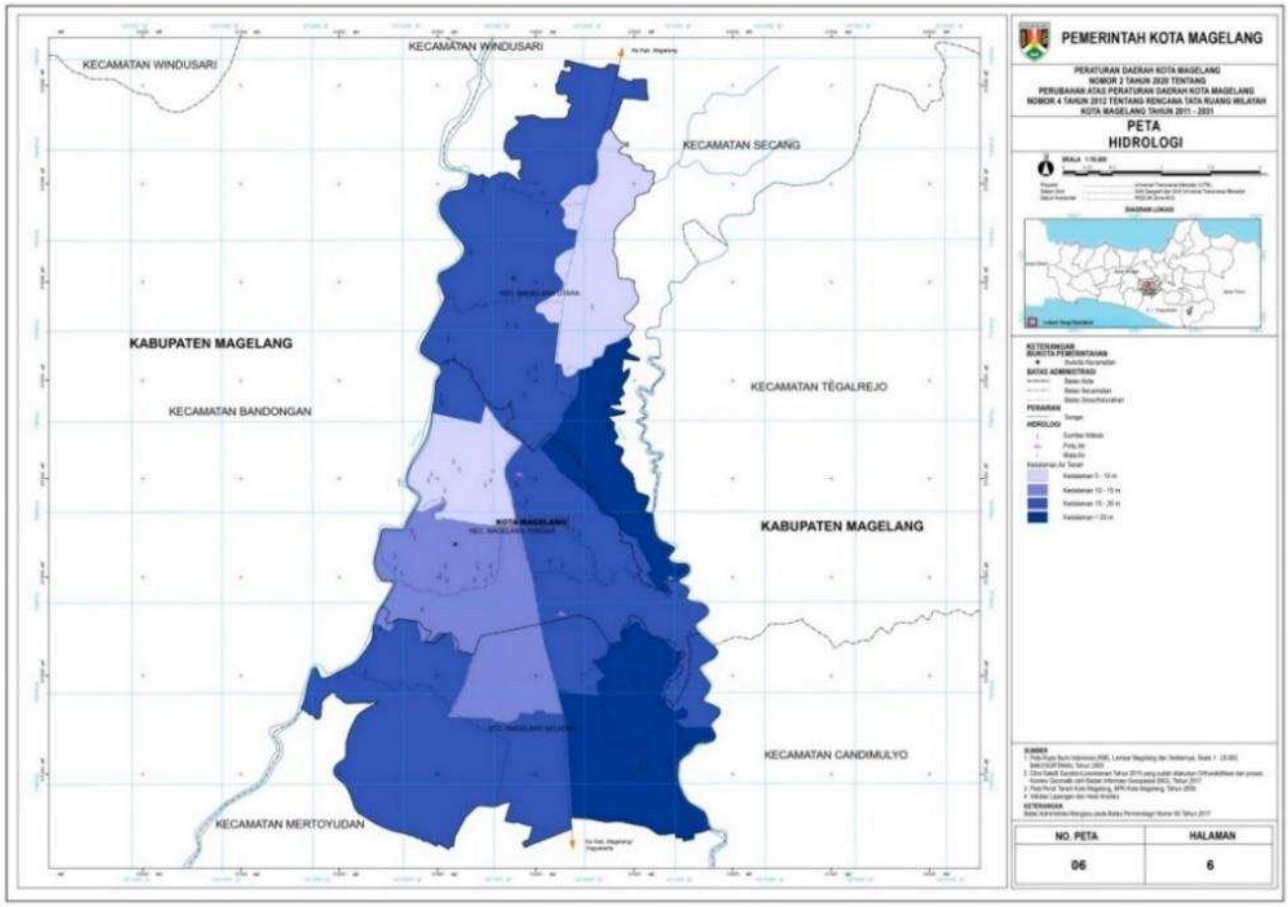
Gambar 2.6 Peta Geologi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Magelang adalah tanah latosol, dengan beberapa variasi seperti latosol coklat kemerahan, dan latosol coklat. Tanah ini memiliki solum yang tebal hingga sangat tebal, kandungan bahan organik sekitar 3-9%, serta tingkat keasaman (pH) antara 4.5-6.5, menunjukkan kondisi dari masam hingga agak masam. Tanah latosol memiliki karakteristik yang peka terhadap erosi, mudah menyerap air, serta mengandung bahan organik yang cukup. Dengan sifat tersebut, tanah ini cocok dimanfaatkan untuk pertanian, termasuk tanaman palawija, padi, kelapa, karet, dan kopi.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Kota Magelang memiliki dua jenis sumber air, yaitu air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berasal dari sungai, saluran irigasi, dan mata air, dengan dua sungai utama yang mengalir di wilayah ini, yakni Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Peta di bawah ini menunjukkan sebaran potensi hidrologi yang ada di Kota Magelang.



Gambar 2.7 Peta Hidrologi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Potensi air tanah di Kota Magelang bervariasi, dengan kedalaman mencapai 5 hingga 20 meter seperti pada Gambar 2.7. Wilayah bagian tengah hingga selatan Kota Magelang didominasi oleh warna biru tua, yang berarti kawasan ini memiliki ketersediaan air permukaan yang tinggi, kemungkinan karena aliran sungai utama atau daerah tangkapan air. Wilayah bagian utara dan timur laut terlihat memiliki ketersediaan air yang lebih rendah. Selain itu, terdapat dua saluran air utama, yaitu Kali Bening (Kali Kota) dan Kali Progo Manggis, yang berfungsi sebagai saluran irigasi teknis. Hal ini mengindikasikan perlunya pengembangan kerjasama pengelolaan air antara Kota Magelang dengan wilayah sekitar.

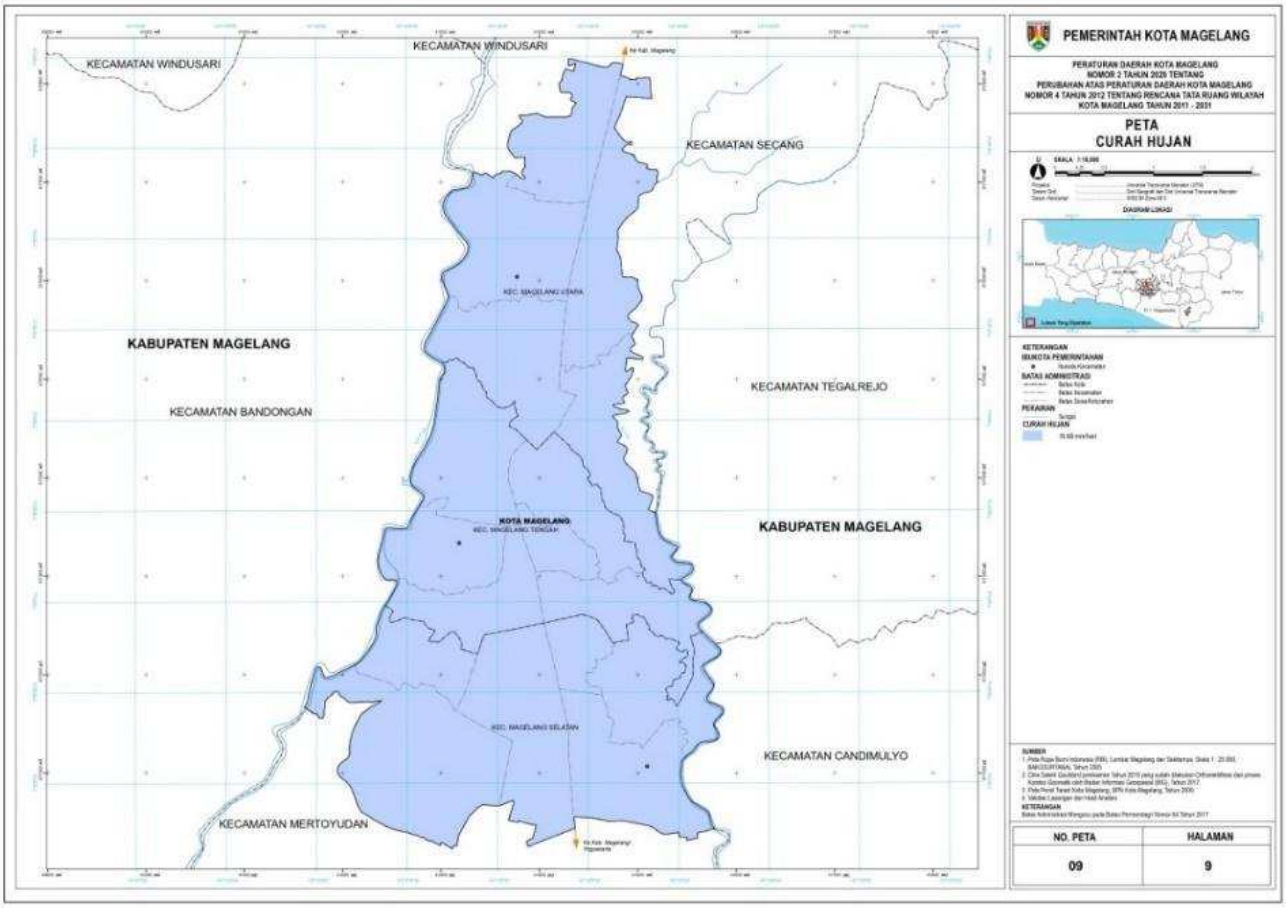
Kota Magelang juga memiliki beberapa sumber mata air, antara lain Mata Air Tuk Pecah I dengan debit 114 liter per detik dan Tuk Pecah II dengan debit 54 liter per detik, dan Sri Punganten dengan debit 35 liter per detik. Mayoritas air tanah di Kota Magelang berada pada kedalaman yang cukup dalam, sehingga sulit untuk dikembangkan. Akibatnya, hingga saat ini Kota Magelang masih bergantung pada sumber air dari luar wilayahnya, khususnya dari Kabupaten Magelang. Produksi sumber-sumber air yang dimanfaatkan Kota Magelang berdasarkan data dari PDAM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mata Air Wulung dengan debit 62 liter per detik;
2. Mata Air Kalimas I dengan debit 110 liter per detik;
3. Mata Air Kalimas II dengan debit 122 liter per detik;
4. Mata Air Kalegen dengan debit 44 liter per detik;
5. Mata Air Kanoman I dengan debit 68 liter per detik; dan
6. Mata Air Kanoman II dengan debit 76 liter per detik.

Hal ini memperkuat urgensi pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan air.

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kota Magelang memiliki iklim sejuk dengan curah hujan yang tinggi. Wilayah ini termasuk dalam iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Suhu maksimum di Kota Magelang mencapai 32°C, sedangkan suhu terendahnya sekitar 20°C, dengan tingkat kelembaban mencapai 88,8%.



Gambar 2.8 Peta Curah Hujan Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Tabel 2.2 Rerata Curah Hujan Tahunan di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Tahun	Curah hujan (mm/tahun)
2020	3.378
2021	3.378
2022	4.020
2023	1.940
2024	3.256

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Rata-rata curah hujan di Kota Magelang tergolong tinggi dan merata pada seluruh wilayah seperti terlihat pada Gambar 2.8. Angka curah hujan tahunan seperti terlihat di Tabel 2.2 berkisar antara 1.940 mm/tahun hingga 3.256 mm/tahun pada periode 2020-2024. Intensitas curah hujan yang tinggi perlu mendapat perhatian khusus, terutama di daerah dengan kemiringan curam, karena berpotensi meningkatkan risiko bencana seperti longsor atau erosi tanah.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.1.1.2.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Magelang didominasi oleh lahan pekarangan sebesar 66,60%, yang mencerminkan tingginya aktivitas perkotaan serta adanya potensi pertanian skala kecil. Selain itu, alokasi lahan untuk sawah sebesar 7,73% dan perkebunan atau hutan rakyat sebesar 3,78% menunjukkan masih berlangsungnya aktivitas pertanian di wilayah ini. Sementara itu, lahan yang diperuntukkan bagi industri sebesar 2,88% dan penggunaan lainnya mencapai 18,09%, yang menandakan adanya proses diversifikasi ekonomi. Hal ini menggambarkan transformasi perkotaan yang terus berlangsung di Kota Magelang seperti yang terlihat dalam Tabel 2.3.

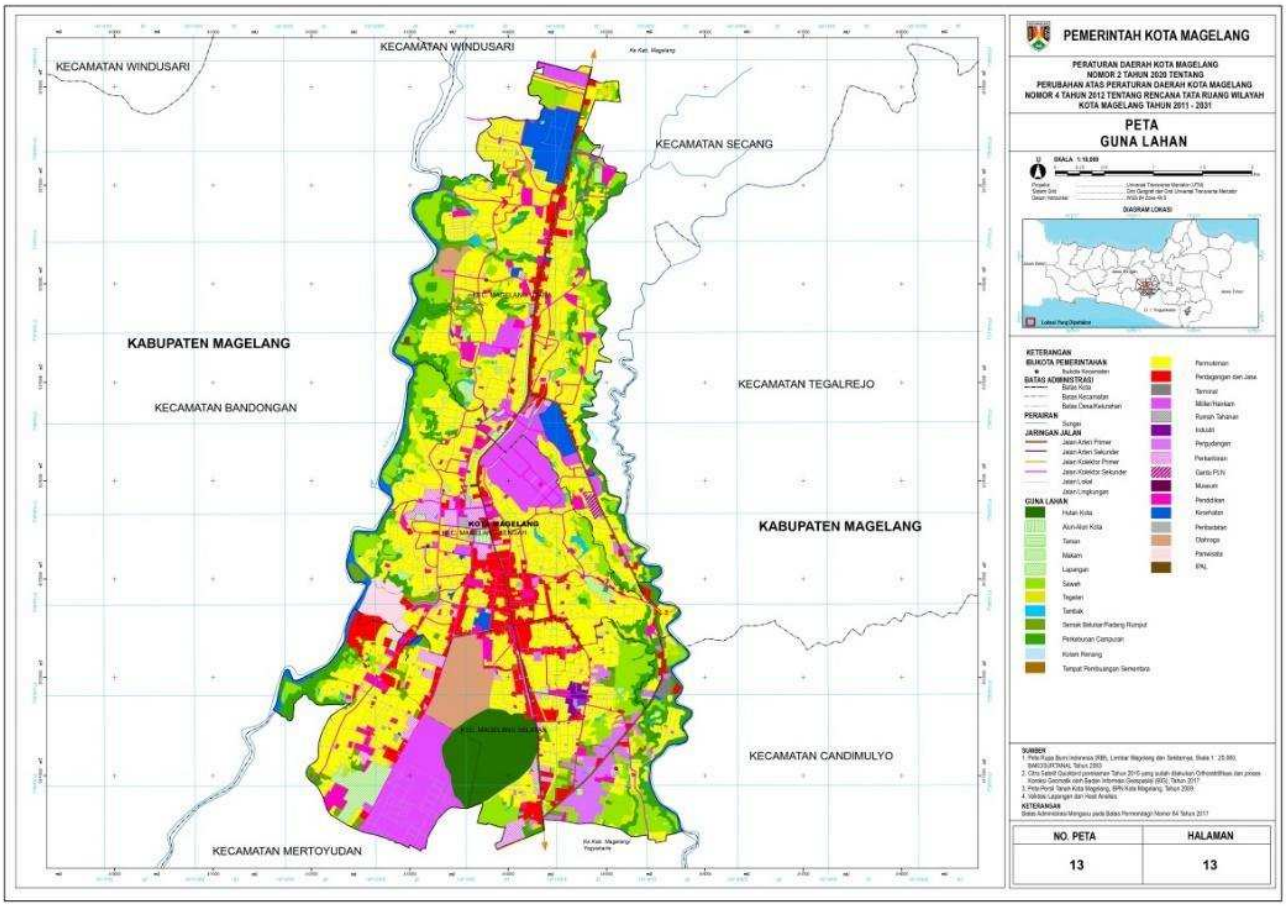
Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kota Magelang (Ha)

Jenis Penggunaan	2020	2021	2022	2023
I. Tanah Sawah	**142,89**	**143,26**	**143,96**	**143,26**
1. Pengairan Teknis	142,89	143,26	143,96	105,55
2. Pengairan ½ Teknis	-	-	-	-
3. Tadah Hujan	-	-	-	-
4. Lainnya	-	-	-	-
II. Tanah Kering	**1.711,11**	**1.710,74**	**1.710,74**	**1.710,74**
1. Pekarangan	1.234,85	1.234,85	1.234,85	1.234,85
2. Tegal/Kebun/Ladang/Huma	19,52	11,68	11,68	11,68
3. Tambak	-	-	-	-
4. Kolam/Tebat/Empang	5,40	5,80	5,90	5,90
5. Perkebunan/Hutan Rakyat	70,00	70,00	70,00	70,00
6. Industri	53,44	53,40	53,40	53,40
7. Lainnya	327,90	335,40	335,41	335,41
Jumlah	**1.854,00**	**1.854,00**	**1.854,70**	**1.854,00**

*Keterangan: * Jumlah luas wilayah tahun 2018-2023 belum baku sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 karena masih dalam proses pelacakan*
Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2021-2024

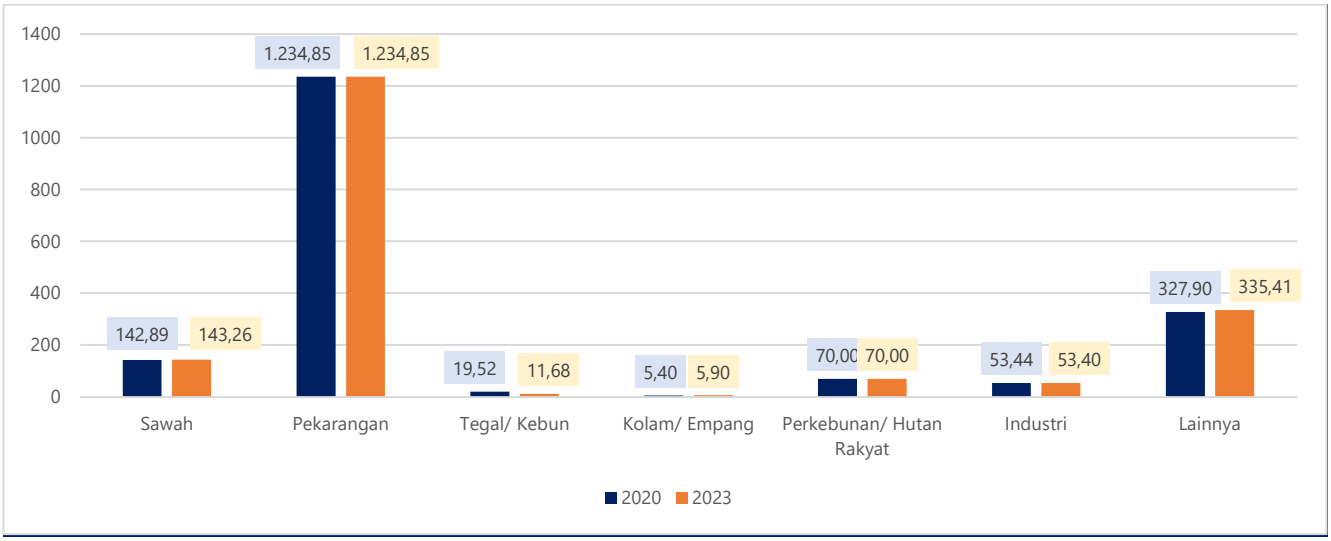
Pada periode 2020-2023, terlihat bahwa luas tanah sawah mengalami penurunan cukup signifikan dari 143,96 hektare pada 2022 menjadi 105,55 hektare pada 2023, seluruhnya berasal dari kategori pengairan teknis. Sebaliknya, luas tanah kering relatif stabil di angka 1.710,74 hektare selama 2021-2023, dengan distribusi terbesar pada pekarangan (1.234,85 hektare) dan kategori "lainnya" yang mencakup 335,41 hektare. Sementara itu, kategori lain (termasuk industri) tidak menunjukkan perubahan berarti sepanjang periode tersebut.

Implikasi terhadap pembangunan jangka menengah adalah bahwa penurunan signifikan luas tanah sawah berpotensi memengaruhi ketahanan pangan lokal dan menggeser orientasi penggunaan lahan ke arah non-pertanian. Hal ini dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan produktif, mendorong perubahan struktur ekonomi, dan menuntut penyesuaian strategi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada optimalisasi lahan kering. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak alih fungsi lahan terhadap ekosistem, ketahanan pangan, dan kualitas lingkungan, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan lahan sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Magelang.



Gambar 2.9 Peta Guna Lahan Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031



Gambar 2.10 Perkembangan Luasan per Penggunaan Lahan Kota Magelang Tahun 2020 dan 2023

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2021-2023

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup merujuk pada kapasitas lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga keseimbangan di antara keduanya.

Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau ditambahkan ke dalamnya.

2.1.1.3.1 Daya Dukung Lahan

Daya Dukung Lahan Kota Magelang pada 2022 seperti dihitung pada KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, dengan jumlah penduduk 121.675 jiwa dan luas wilayah 1.853,71 ha, tercatat sebesar 0,01524 ha/jiwa. Berdasarkan standar Yeates, kebutuhan lahan untuk populasi 100.000 jiwa adalah 0,076 ha/jiwa, sehingga Kota Magelang mengalami defisit daya dukung lahan.

Tabel 2.4 Daya Dukung Lahan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Dukung Lahan	0,05126	0,01525	0,01524	0,01518*	0,01514*

**Hasil Analisis*
Sumber: KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Tren data dari 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa daya dukung lahan terus menurun dan diperkirakan mencapai 0,01191 ha/jiwa pada 2045 (berdasarkan KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029), yang masih jauh di bawah standar kebutuhan lahan.

2.1.1.3.2 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung Pangan berperan dalam memastikan ketersediaan beras sebagai kebutuhan pokok penduduk Kota Magelang. Perhitungan kebutuhan beras didasarkan pada formula tertentu dengan asumsi konsumsi beras 98 kg/tahun per kapita dan Indeks Konversi Padi ke Beras sebesar 62,74%. Pada 2022, jumlah penduduk Kota Magelang tercatat sebanyak 121.675 jiwa dengan kepadatan 6.556 jiwa/km^2. Sementara itu, luas lahan sawah yang tersedia berdasarkan data Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang adalah 181 hektare.

Tabel 2.5 Daya Dukung Pangan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Dukung Pangan	0,099	0,082	0,061	0,041	0,038

Sumber: KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Hasil perhitungan pada dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029 menunjukkan bahwa Daya Dukung Pangan Beras (DDPb) Kota Magelang pada 2022 sebesar 0,061, yang berarti lebih kecil dari 1 dan menandakan kondisi defisit. Kota Magelang hanya mampu memenuhi sekitar 6,1% dari kebutuhan beras penduduknya, dengan defisit mencapai 11.193,29 ton. Dengan demikian, Kota Magelang tidak lagi mampu menyediakan kebutuhan beras secara mandiri. Tren penurunan daya dukung lahan pertanian juga berkontribusi pada kenaikan harga beras, meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari wilayah lain yang lebih murah.

Kondisi defisit pangan beras di Kota Magelang menegaskan pentingnya konektivitas wilayah sebagai faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan. Aksesibilitas yang baik terhadap sentra produksi beras di wilayah sekitar memungkinkan pasokan yang stabil, harga yang lebih terjangkau, dan distribusi yang efisien. Penguatan jaringan transportasi dan logistik antarwilayah menjadi strategi vital untuk mengurangi kerentanan akibat keterbatasan produksi lokal dan tren penurunan daya dukung lahan pertanian.

2.1.1.3.3 Daya Dukung Air

Kota Magelang memiliki dua saluran irigasi induk, yaitu Kali Manggis dan Kali Bening, serta satu saluran sekunder, Kali Kota, yang digunakan untuk mengairi lahan sawah di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan akhir Review Dokumen RISPAM Kota Magelang 2022, debit maksimal ketiga saluran adalah:

1. Saluran Induk Kali Manggis: 4,88 m^3/s
2. Saluran Sekunder Kali Kota: 0,5 m^3/s
3. Saluran Induk Kali Bening: 1,017 m^3/s

Dengan keberadaan ketiga saluran ini, sumber daya air permukaan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan irigasi sawah di Kota Magelang. Selain itu, terdapat mata air Tuk Pecah I dan Tuk Pecah II, yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang, yang pada tahun 2024 memproduksi masing-masing 113,62 lt/d dan 53,55 lt/d, melayani 27.728 KK. Mata air Sri Punganten mulai dimanfaatkan pada tahun 2024 dengan debit 35 liter per detik. Selain itu, terdapat dua sungai yang debitnya juga dimanfaatkan untuk ketersediaan air di Kota Magelang, yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo. Berdasarkan dokumen RISPAM Kota Magelang 2020-2035, debit Sungai Progo berkisar antara 15,61 m^3/detik (musim kemarau) hingga 34,44 m^3/detik (musim hujan). Sementara itu, Sungai Elo memiliki debit berkisar 4,08 m^3/detik (musim kemarau) dan 4,70 m^3/detik (musim hujan). Kondisi air di Sungai Progo dan Sungai Elo dinyatakan keruh dan polutan tinggi, sehingga dibutuhkan perlakuan tambahan untuk dapat digunakan sebagai air bersih untuk konsumsi rumah tangga perkotaan.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, kebutuhan air di Kota Magelang mengalami peningkatan hingga mencapai 15.864.057 m^3/tahun pada 2010-2015, namun menurun terus menerus secara signifikan menjadi 12.791.284 m^3/tahun pada 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lahan padi dan tegalan yang mengurangi kebutuhan irigasi.

Tabel 2.6 Daya Dukung Air Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Daya Dukung Air	NA*	NA*	0,762	0,774	NA*

**perhitungan tidak tersedia*
Sumber: KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Meskipun terdapat tren penurunan kebutuhan air namun pada tahun-tahun mendatang dimungkinkan terjadi kenaikan kebutuhan air karena peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Sementara potensi sumber daya air cenderung menurun seiring konversi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun sehingga dimungkinkan terjadinya penurunan daya dukung air.

Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 32.611 dengan kebutuhan air sebesar 9.550.813 m^3/tahun, sedangkan potensi sumber daya air riil hanya 8.310.250 m^3/tahun, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 1.240.563 m^3/tahun. Potensi Sumber Air (PSA) adalah 9.904.013 m^3/tahun, sedangkan Kebutuhan Air (KA) adalah 12.996.751m3/tahun sehingga DDA terhitung untuk tahun 2022 adalah 0,762. Hal ini menunjukkan daya dukung air telah terlampaui atau mengalami defisit air. Berdasarkan data Laporan Prosentase Cakupan Layanan Perumda Air Minum Kota Magelang pada Desember 2024, tercatat total jumlah pelanggan 28.660 sambungan yang melayani 114.225 jiwa, yang berarti cakupan layanan air bersih mencapai 89,02% pada tahun 2024.

Peningkatan pelayanan oleh Badan Usaha Milik Daerah PDAM dilakukan dengan membangun Zona Air Minum Prima (ZAMP). ZAMP merupakan inovasi air minum yang dapat langsung diminum dari keran. Salah satu penyebab belum semua lokasi dan perumahan terdistribusi ZAMP ini adalah belum semua perumahan memiliki minimal tekanan yang disyaratkan dalam distribusi ZAMP, layanan harus 24 jam dan lingkup pendistribusian minimal 100 SR.

Tabel 2.7 Jumlah Pelanggan Zona Air Minum Prima (ZAMP) Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan ZAMP (KK)	468	468	468	468	578

Sumber: Bapperida Kota Magelang, 2025

Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan melalui program konservasi air, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, dan optimalisasi sistem irigasi untuk pertanian di daerah sekitar. Beberapa sumber air tanah yang berada di Kota Magelang seperti Jurangombo, Bayeman, Tidar, Nambangan, dan Magersari dianggap kurang menguntungkan, karena letak air tanah yang terlalu dalam membuat pemanfaatannya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Defisit ketersediaan air di Kota Magelang membutuhkan pengelolaan sumber daya air yang lebih terintegrasi. Kota Magelang dapat memperkuat konservasi air melalui perlindungan dan rehabilitasi daerah resapan, pembangunan infrastruktur pemanenan air hujan, serta penerapan teknologi hemat air di sektor domestik dan UMKM. Edukasi masyarakat dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik efisiensi air juga penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

2.1.1.3.4 Daya Tampung Udara

Daya Tampung Udara bertujuan untuk menilai kualitas udara berdasarkan analisis beban pencemaran dari transportasi dan industri di Kota Magelang dengan mendasarkan pada skor Indeks Kualitas Udara (IKU). Rata-rata Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Magelang pada 2020-2024 menunjukkan kualitas udara yang baik. Pada 2020, IKU berada pada skor 83,67, dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kesehatan akibat polusi udara masih rendah. Tabel 2.8 di bawah menunjukkan perkembangan IKU di Kota Magelang pada periode 2020-2024.

Tabel 2.8 Indeks Kualitas Udara Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	83,67	81,08	81,16	83,05	86,83

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara Kota Magelang tahun 2020-2024, terlihat bahwa kualitas udara secara umum berada dalam kategori baik dengan nilai indeks di atas 80. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 83,67 pada tahun 2020 menjadi 81,08 pada 2021, kondisi ini kembali membaik secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 86,83 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan lingkungan atau pengendalian emisi yang lebih efektif. Meski demikian, tren positif ini mencerminkan komitmen Kabupaten Magelang dalam menjaga kualitas udara untuk mendukung kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) yang konsisten berada pada kategori baik selama periode 2020-2024, daya tampung udara Kota Magelang masih memadai untuk mendukung pembangunan jangka menengah tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan. Namun, tren penurunan yang sempat terjadi pada 2021 menunjukkan perlunya langkah antisipatif, seperti pengendalian emisi transportasi dan industri, untuk mencegah degradasi kualitas udara di masa mendatang. Pemeliharaan kualitas udara yang baik menjadi modal penting dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kualitas hidup masyarakat, sehingga mendukung tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang terus meningkat, kebutuhan akan energi yang andal dan efisien merupakan hal yang penting bagi Kota Magelang. Rasio elektrifikasi di Kota Magelang sudah hampir mencapai 100%. Tabel 2.9 di bawah ini menunjukkan perkembangan rasio elektrifikasi di Kota Magelang.

Tabel 2.9 Rasio Elektrifikasi Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Elektrifikasi	99,71	99,99	99,99	99,99	99,99

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pada tahun 2020, rasio tersebut tercatat sebesar 99,71%, dengan distribusi listrik sebagian besar disuplai oleh PLN. Perbaikan terus dilakukan hingga mencapai 99,99% sejak tahun 2021 hingga 2024. Dalam hal pemanfaatan energi terbarukan, Pemerintah Kota Magelang telah mulai menerapkan panel surya di sejumlah instansi pemerintah dan pada Penerangan Jalan Umum (PJU). Hingga tahun 2020, panel surya telah dipasang di 142 titik PJU, dengan kapasitas bervariasi antara 5 watt hingga 90 watt.

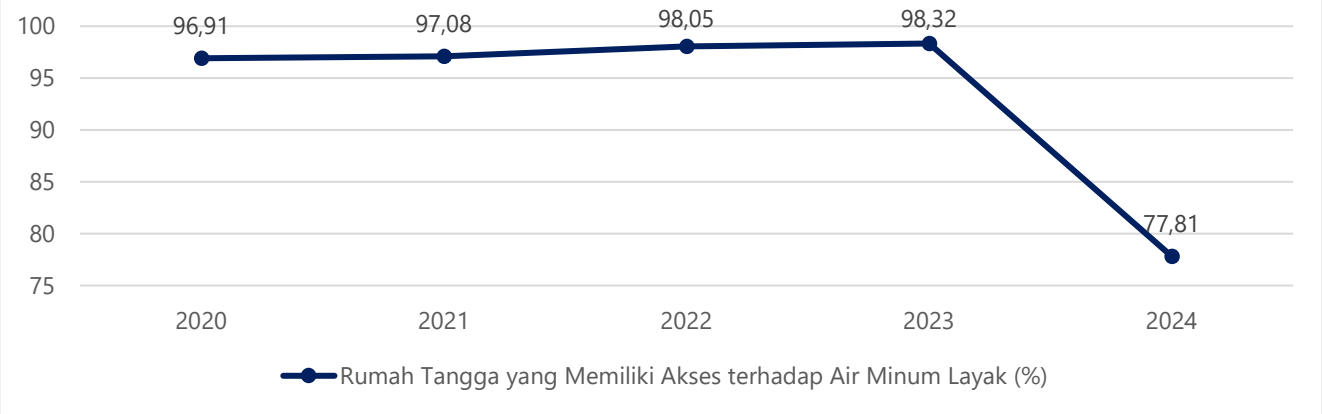
Ketahanan air merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Magelang yang berkelanjutan. Kota Magelang terus berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Tabel 2.10 di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 31.012 rumah tangga di Kota Magelang telah memiliki akses terhadap air minum layak dan terus meningkat hingga pada tahun 2024 sudah terdapat 34.708 rumah tangga yang memiliki akses terhadap kebutuhan primer ini.

Tabel 2.10 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KK dengan Akses Air Minum Layak	31.012	31.066	31.377	31.464	34.708
Jumlah KK	32.001*	32.001*	32.001*	32.001*	44.605**
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Pelayanan Sumber Air Minum Layak	**96,91%**	**97,08%**	**98,05%**	**98,32%**	**89,02%*** **

**: Hasil Survei Pemutakhiran 2019*
***: Data Jumlah Penduduk Kota Magelang Semester 1 Tahun 2024, Data Go Kota Magelang*
****: berdasarkan persentase cakupan pelanggan PDAM*
Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2024; Data Cakupan Layanan PDAM, 2025 (data tahun 2024)

Namun demikian, ketika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kota Magelang, pada tahun 2024 masih sebesar 77,81% yang memiliki akses tersebut.



Gambar 2.11 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Magelang, 2025

Persentase yang ditunjukkan oleh Gambar 2.11 menunjukkan dibandingkan dengan tahun 2023 karena terdapat pembaruan data terkait jumlah rumah tangga yang ada di Kota Magelang. Pemerataan akses layanan air bersih masih menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kota Magelang.

Ketersediaan dan pemerataan akses air bersih memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan pangan, karena air merupakan sumber daya vital dalam proses produksi pangan. Oleh karena itu, upaya perbaikan layanan air bersih akan turut memperkuat fondasi ketahanan pangan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah Kota Magelang, karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial-ekonomi, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketahanan pangan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pangan lokal, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga, serta meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah. Berdasarkan KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030, Kota Magelang masih menghadapi tantangan dalam aspek ini, terutama terkait dengan alih fungsi lahan. Selama periode 2006-2022, lahan sawah yang beralih fungsi mencapai 32%, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan luas tanam tanaman pangan. Selain itu, pemanfaatan lahan yang dialokasikan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) belum optimal dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Magelang.

Tabel 2.11 Luas Tanam, Luas Panen, dan Produksi Padi Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (Ha)	349	299	181	135	NA
Luas Panen (Ha)	364	299	221	126	108,98
Produksi (Ton)	2.230,40	1.844,16	1.386,24	788,50	561,48

Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2021-2025

Berdasarkan Tabel 2.11, luas tanam, luas panen, dan produksi tanaman pangan di Kota Magelang mengalami tren penurunan selama periode 2020-2024. Jika dibandingkan data dasar yaitu tahun 2020 dengan data akhir 2024, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penurunan produksi pangan mencapai 74,83% dengan penurunan luas panen hingga sebesar 70,06%. Berdasarkan dari data BPS Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa tren penurunan produksi tanaman juga dialami dalam lingkup rata-rata Jawa Tengah. Penurunan luasan panen di Kota Magelang berada jauh di atas angka Provinsi Jawa Tengah.

Dalam konstelasi Gelangmanggung, seluruh wilayah dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan luas panen. Hal ini menjadi pengingat bahwa kebelanjutan pangan baik dalam konteks lokal maupun regional membutuhkan perhatian.

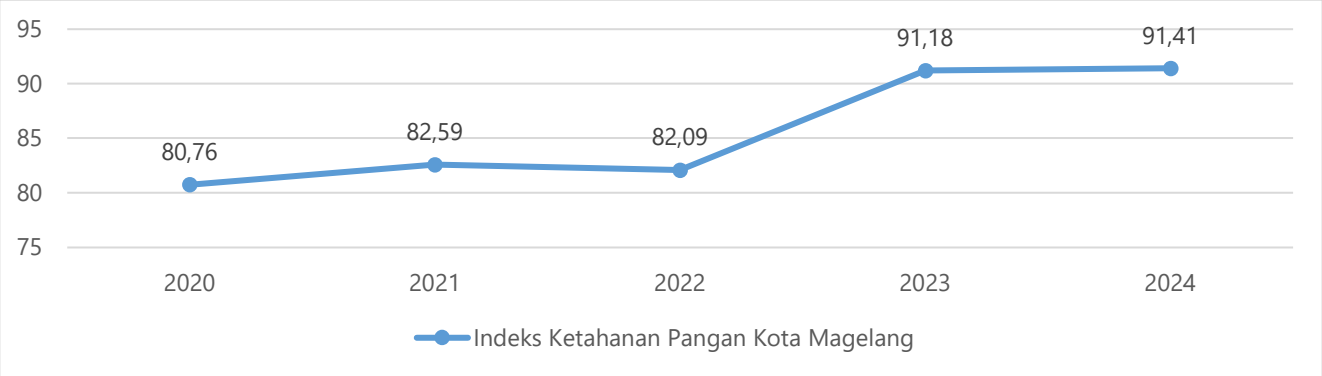
Tabel 2.12 Luas Panen Padi Kawasan Gelangmanggung (Ha)

Prov/ Kabupaten/ Kota	Luas Panen		Perkembangan
	2020	2024	
Kabupaten Temanggung	12.413,34	7.846,30	-36,76%
Kabupaten Magelang	34.634,18	29.938,09	-13,56%
Kota Magelang	162,94	105,27	-35,39%
Jawa Tengah	1.666.931,49	1.554.777,14	-6,73%

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2022 dan 2025

Penurunan luas panen tidak hanya terjadi di Kota Magelang, tetapi juga pada skala kawasan Gelangmanggung hingga Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2024. Hal ini dapat berdampak pada

situasi potensi ketersediaan pangan Kota Magelang, karena ketergantungan pada pasokan daerah sekitar. Selanjutnya kondisi ketahanan pangan Kota Magelang disajikan pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Indeks Ketahanan Pangan Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2025

Menurut DataGo Kota Magelang, dalam kurun waktu 2020-2024, IKP secara umum menunjukkan peningkatan hingga pada tahun 2024 IKP Kota Magelang sebesar 91,41 dengan kategori sangat tahan. Capaian IKP tersebut menempatkan Kota Magelang pada 15 (lima belas) besar nasional serta peringkat tertinggi kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun produksi pangan Kota Magelang bergantung pada luar wilayah, namun dari sisi keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Kota Magelang masih berada pada kondisi yang baik.

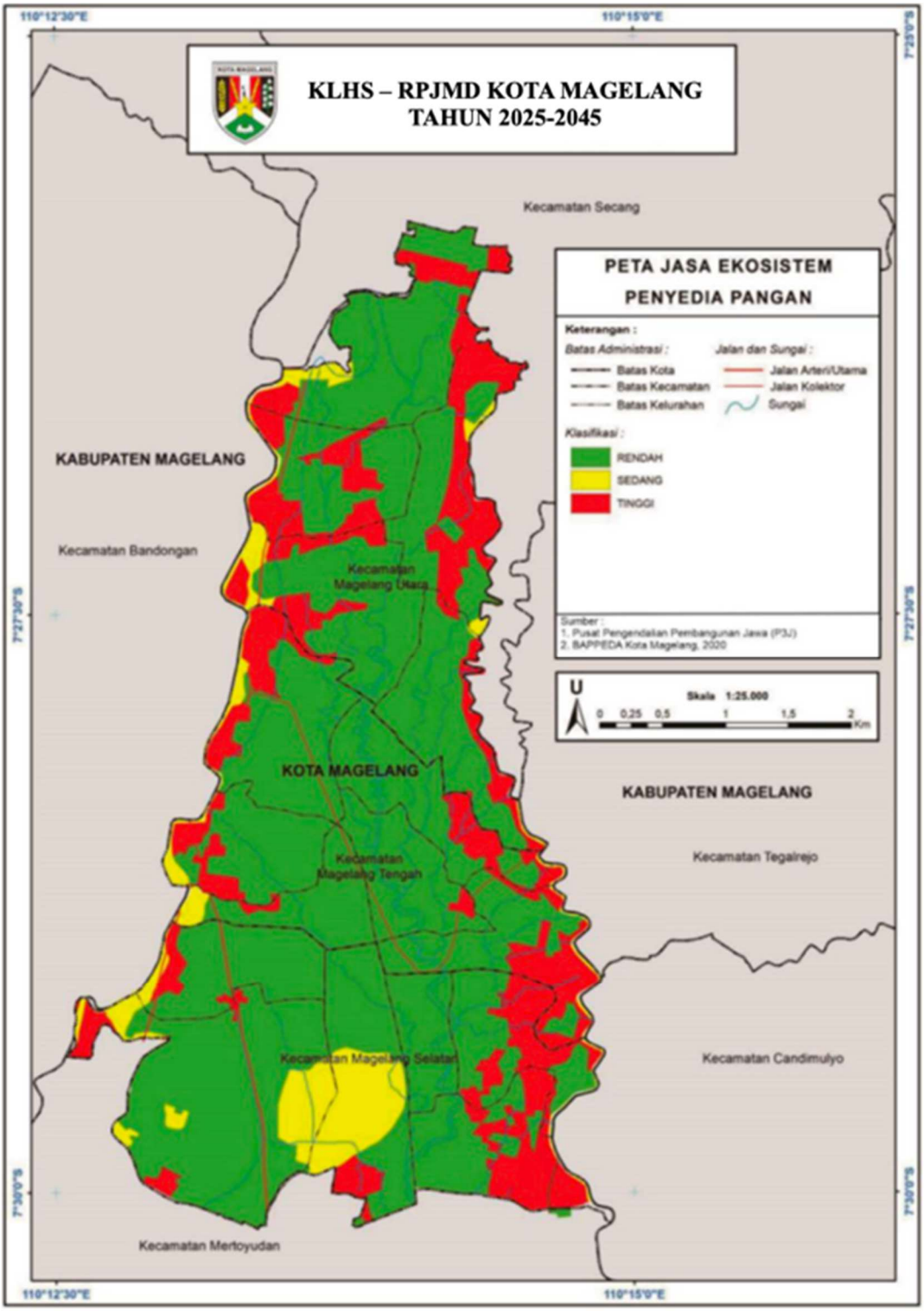
Salah satu variabel dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan terkait dengan ketersediaan lahan. Luas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Magelang tersaji dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Magelang

Kategori	Ha	%
Rendah	1.336,79	72,10
Sedang	136,40	7,36
Tinggi	380,81	20,54
Total	**1.854,00**	**100**

Sumber: KLHS RPJMD Kota Magelang, 2025-2029

Berdasarkan Tabel 2.13, terkait dengan luas dan distribusi spasial jasa penyedia pangan di Kota Magelang, terlihat bahwa sebagian besar wilayah (72,10%) berada pada kategori penyedia pangan rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas lahan Kota Magelang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Adapun wilayah dengan potensi penyediaan pangan kategori tinggi hanya mencakup 20,54% dan umumnya terletak di area pinggiran kota. Distribusinya seperti terlihat di Gambar 2.13.



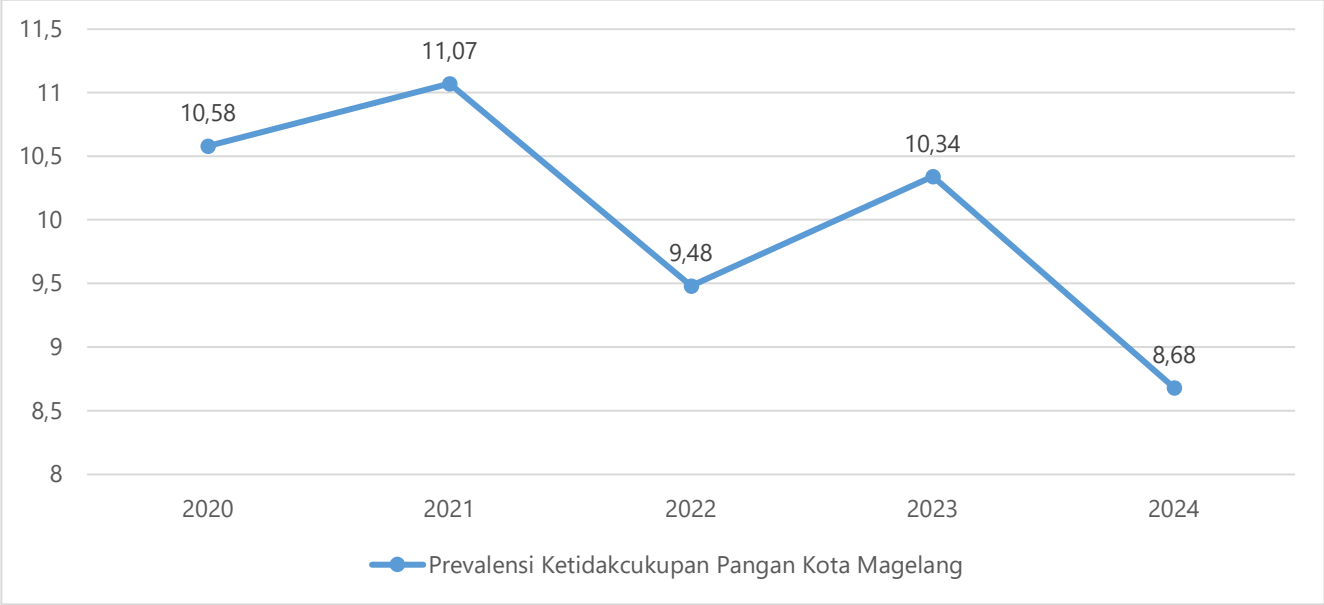
Gambar 2.13 Luasan Tingkat Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kota Magelang

Sumber: KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030

Penurunan luas tanam dan produktivitas tanaman pangan, termasuk hasil panen padi di Kota Magelang, berpotensi terus berlanjut di masa depan akibat meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, perkantoran, dan sektor pariwisata, yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Tantangan ini menuntut Kota Magelang untuk memastikan pasokan pangan yang cukup bagi penduduknya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal guna memenuhi kebutuhan sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain

Selain penurunan produktivitas tanaman pangan, tingkat kecukupan konsumsi pangan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan dan program ketahanan pangan di Kota Magelang. Tantangan penurunan produksi pangan lokal berdampak langsung pada tingkat

kecukupan konsumsi masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya persentase penduduk yang mengonsumsi energi di bawah batas minimal, meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2024.

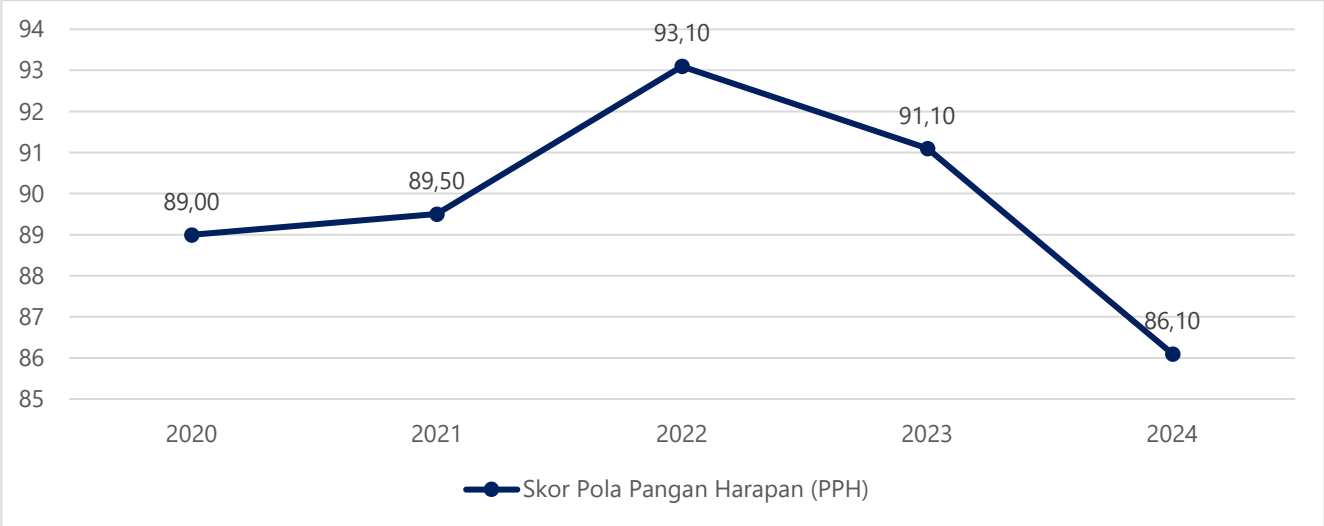


Gambar 2.14 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Magelang 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2020-2024; BPS Indonesia, 2025 (data tahun 2024)

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami fluktuasi dengan angka pada tahun 2023 sebesar 10,34 dan menurun pada tahun 2024 dengan angka 8,68. Artinya, masih ada 8,68% penduduk Kota Magelang di tahun 2024 yang mengkonsumsi energi di bawah batas minimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi asupan gizi dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi seimbang, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat dan stabilisasi harga pangan menjadi penting untuk menekan angka ketidakcukupan konsumsi di masa mendatang.

Belum optimalnya kualitas pangan yang diperoleh oleh masyarakat Kota Magelang juga ditunjukkan melalui penurunan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Magelang dari tahun 2022 ke 2024 sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas konsumsi pangan masyarakat, mencerminkan pola makan yang kurang seimbang dan tidak mencukupi kebutuhan gizi. Upaya untuk meningkatkan

ketahanan pangan di Kota Magelang terus menjadi prioritas, sebagaimana yang ditekankan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Salah satu upaya konkret dalam memperkuat ketahanan pangan adalah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT). Program ini mendorong masyarakat, khususnya perempuan, untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah dalam bercocok tanam guna meningkatkan ketersediaan pangan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan konsep *Urban Farming* di beberapa wilayah Kota Magelang. Keterlibatan generasi milenial dalam sektor pertanian menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan, sehingga dibutuhkan program khusus untuk mendorong keterlibatan mereka dalam sektor ini.

Selain pertanian, sektor perikanan juga memiliki peran penting dalam ketahanan pangan Kota Magelang. Produksi perikanan tangkap menunjukkan nilai relatif stabil pada tahun 2023 dan 2024 dengan nilai produksi mencapai 277,75 juta rupiah.

Tabel 2.14 Produksi Perikanan Tangkap Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (ton)	339	NA*	NA*	11,04	11,11
Nilai produksi (juta rupiah)	100	NA*	NA*	277,00	277,75

**data belum tersedia*
Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Meskipun Kota Magelang memiliki luas wilayah yang kecil dan sumber daya alam yang terbatas, sektor perikanan budidaya masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Tabel 2.15 menunjukkan nilai ikan yang ditebarkan di sawah dan kolam di Kota Magelang.

Tabel 2.15 Nilai Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai ikan (juta rupiah)	1.542,4	NA*	434,71	726,70	4.842,45

**data belum tersedia*
Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Dari Tabel 2.15 terlihat bahwa nilai ikan yang ditebar pada tahun 2024 meningkat signifikan hingga lebih dari 4 Milyar Rupiah pada tahun 2024 dengan memasukkan angka bantuan dari Kementrian Perikanan dan Kelautan. Namun, pengembangannya menghadapi tantangan besar, terutama terkait kebutuhan air yang tinggi. Sumber air utama berasal dari saluran irigasi yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor pertanian, sementara daya dukung air di Kota Magelang masih minim. Selain itu, penggunaan air untuk kolam ikan tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk pertanian, dan sistem pembuangan air limbahnya belum terkelola dengan baik.

Selain perikanan, sektor peternakan di Kota Magelang juga mengalami fluktuasi dalam produktivitas. Tabel 2.16 di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah unggas, jumlah pemotongan ternak, dan jumlah konsumsi protein hewani di Kota Magelang.

Tabel 2.16 Perkembangan Peternakan di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ayam Ras (ekor)	228.300	205.200	180.600	156.884	180.000
Jumlah Produksi Telur Ayam Ras (kg)	9.328	7.934	9.444	10.530	13.634
Jumlah Produksi Telur Ayam Buras (kg)	13.430	12.906	13.496	14.071	12.969
Jumlah Produksi Telur Itik (kg)	25.283	24.209	25.673	23.245	25.293
Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh (kg)	10.201	9.602	10.271	8.868	7.780

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemotongan Ternak Sapi (ekor)	3.325	3.933	3.804	3.769	3.458
Jumlah Produksi Susu Sapi (L)	209.014	212.243	209.489	208.324	187.185
Jumlah Konsumsi Daging (kg/kapita)	NA*	59,27	NA*	69,54	62,54

**data belum tersedia*
Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Berdasarkan data perkembangan peternakan di Kota Magelang tahun 2020-2024, jumlah ayam ras mengalami penurunan signifikan dari 228.300 ekor pada 2020 menjadi 156.884 ekor pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 180.000 ekor di 2024. Produksi telur ayam ras menunjukkan tren positif, naik dari 9.328 kg pada 2020 menjadi 13.634 kg pada 2024. Produksi telur ayam buras relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, sedangkan produksi telur itik dan burung puyuh cenderung stagnan bahkan menurun pada 2024. Jumlah pemotongan ternak sapi berfluktuasi, namun cenderung menurun di akhir periode. Produksi susu sapi yang sempat stabil di kisaran 208-212 ribu liter mengalami penurunan tajam pada 2024 menjadi 187.185 liter. Konsumsi daging per kapita juga mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi 69,54 kg pada 2023 dan menurun menjadi 62,54 kg pada 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada beberapa indikator seperti produksi telur ayam ras, sektor peternakan di Kota Magelang masih menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan produksi dan populasi ternak, khususnya sapi perah dan unggas non-ras. Penurunan produksi susu sapi dan konsumsi daging dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam rantai pasok, penurunan daya beli, atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Implikasi terhadap pembangunan jangka menengah adalah perlunya intervensi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor peternakan, termasuk penguatan teknologi budidaya, peningkatan kapasitas peternak, dan diversifikasi produk peternakan. Upaya ini penting agar sektor peternakan dapat berkontribusi optimal terhadap ketahanan pangan, peningkatan ekonomi lokal, serta pengurangan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Kota Magelang menghadapi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan. Salah satu kendala utamanya adalah minimnya inovasi dan penerapan teknologi yang efektif dalam mendukung pengolahan dan pengembangan produk lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, serta akses pasar bagi hasil produk daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi pengolahan pangan yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Dengan penerapan teknologi yang tepat, Kota Magelang dapat memperkuat sektor pangan dan mendukung ketahanan pangan tidak hanya di dalam kota tetapi juga di wilayah Gelangmanggung pada skala regional. Keterkaitan antara energi, air, dan pangan memerlukan pendekatan terpadu dalam perencanaan pembangunan. Sektor pertanian yang bergantung pada irigasi memerlukan ketersediaan air yang cukup, sementara pengolahan dan distribusi pangan memerlukan energi yang stabil. Oleh karena itu, strategi pembangunan Kota Magelang menekankan pada integrasi ketiga sektor ini untuk mencapai kemandirian dan ketahanan yang berkelanjutan.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan suatu daerah, termasuk kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Selain sebagai indikator lingkungan, IKLH juga mencerminkan sejauh mana pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kurun waktu 2020-2024, IKLH secara keseluruhana terus menunjukkan peningkatan meskipun komponen pembentuknya yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masih berfluktuasi. Sayangnya tren tersebut harus berhenti dimana pada tahun 2024 IKLH secara keseluruhan mengalami penurunan dan berada pada angka 64,33. Angka tersebut tergolong rendah apabila dibandingkan dengan dengan capaian IKLH nasional dimana pada tahun 2024 berada di angka 73,53.

Tabel 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2020-2024

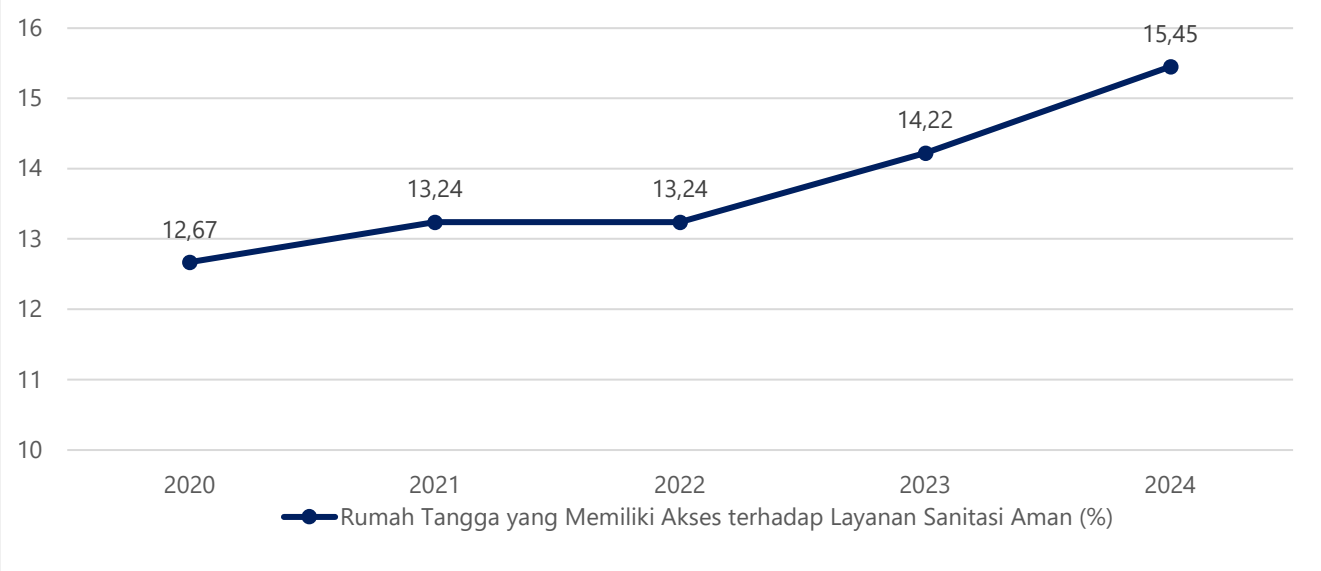
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	83,67	81,08	81,16	83,05	86,83
Indeks Kualitas Air	16,67	30,38	65,00	66,67	58,33
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	31,38	31,48	28,07	27,85	35,88
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**47,03**	**51,32**	**63,46**	**64,80**	**64,96**

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Magelang periode 2020-2024 memperlihatkan tren peningkatan, dari skor 47,03 pada 2020 menjadi 64,96 pada 2024. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada Indeks Kualitas Air, yang mengalami kenaikan dari 16,67 menjadi 58,33, diikuti oleh perbaikan konsisten pada Indeks Kualitas Udara hingga mencapai 86,83 pada 2024. Namun demikian, Indeks Tutupan Lahan menunjukkan pola fluktuatif dan berada pada kategori rendah (35,88 pada tahun 2024), yang merefleksikan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan vegetasi dan ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

Apabila tidak dilakukan intervensi yang tepat, potensi penurunan IKLH di masa mendatang tetap ada, terutama akibat alih fungsi lahan, peningkatan aktivitas pembangunan, dan degradasi sumber daya alam. Untuk mengantisipasinya, diperlukan langkah strategis seperti penguatan regulasi tata ruang, rehabilitasi lahan kritis, penambahan ruang terbuka hijau, serta penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor industri dan transportasi.

Kualitas lingkungan hidup yang terjaga tidak hanya ditentukan oleh faktor air, udara, dan tutupan lahan, tetapi juga oleh kondisi permukiman yang sehat dan layak huni. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah ketersediaan layanan sanitasi aman yang secara langsung memengaruhi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kondisi kualitas permukiman ditunjukkan dengan cakupan layanan sanitasi aman seperti pada Gambar 2.16 dan Tabel 2.18.



Gambar 2.16 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Aman di Kota Magelang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Magelang, 2025

Tabel 2.18 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Aman di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
RT dengan akses terhadap sanitasi aman (%)	12,67	13,24	13,24	14,22	15,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Magelang, 2025

Upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Kondisi tersebut salah satunya mengingat kondisi cakupan layanan sanitasi aman yang masih rendah. Hingga tahun 2024, hanya 15,45% rumah tangga di Kota Magelang yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi aman, pun dalam periode 2020-2024 peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses tersebut tidak meningkat secara signifikan.

Rendahnya capaian pada sektor sanitasi aman mencerminkan tantangan serupa yang juga terjadi pada aspek pengelolaan lingkungan lainnya. Salah satu di antaranya adalah pengelolaan sampah, yang turut menentukan kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan kota. Pengelolaan sampah juga menjadi aspek yang krusial dalam menjaga kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan timbulan sampah di Kota Magelang belum menujukkan konsistensi dan masih mengalami fluktuasi seperti ditunjukkan Tabel 2.19 di bawah ini.

Tabel 2.19 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Volume timbulan sampah yang diangkut (ton)	66,76	62,88	57,64	63,29	80,86
Volume timbulan sampah yang dilakukan pembatasn, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (ton)	5,04	7,73	10,19	10,19	13,75
Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan (ton)	5,04	7,73	9,10	11,26	7,8
Volume timbulan sampah yang diolah (ton)	1,11	1,11	2,01	4,35	8,40
Timbulan sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan sampah (%)	5,96	7,85	19,6	14,93	16,29
Volume timbulan sampah yang diproses akhir (ton)	69,40	67,80	57,64	63,29	62,91

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025; Neraca SIPSN KLH, 2025

Pengelolaan persampahan Kota Magelang dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Volume timbulan sampah yang diangkut mengalami fluktuasi, dari 66,76 ton pada tahun 2020 menurun menjadi 57,64 ton pada 2022, kemudian meningkat tajam hingga mencapai 80,86 ton pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada naiknya jumlah sampah.

Di sisi lain, upaya pengurangan melalui pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali (3R) menunjukkan tren positif. Dari 5,04 ton pada tahun 2020, volume sampah yang dikelola dengan pendekatan 3R meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 13,75 ton pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya keberhasilan program penguatan kesadaran masyarakat dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

Namun, capaian pemilahan sampah masih menghadapi tantangan. Meskipun sempat mencapai 11,26 ton pada 2023, angka ini menurun menjadi 7,8 ton di tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pemilahan dari sumber, baik di tingkat rumah tangga maupun fasilitas umum.

Volume sampah yang diolah mengalami peningkatan signifikan, dari hanya 1,11 ton di 2020–2021 menjadi 8,40 ton pada 2024. Persentase sampah yang diolah di fasilitas pengelolaan juga meningkat

dari 5,96% (2020) menjadi 16,29% (2024). Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kapasitas teknis fasilitas pengolahan sampah, meskipun kontribusinya terhadap pengurangan beban TPA masih terbatas.

Sementara itu, volume timbulan sampah yang diproses akhir tetap mendominasi, berkisar antara 57–69 ton per tahun. Artinya, mayoritas sampah masih berakhir di TPA, sehingga upaya pengurangan di hulu perlu diperkuat agar sejalan dengan target pengelolaan persampahan berkelanjutan. Gambar 2.17 di bawah ini menunjukkan alur rantai penanganan sampah perkotaan di Kota Magelang berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota Magelang 2023-2027.



Gambar 2.17 Alur Penanganan Sampah di Kota Magelang

Sumber: Strategi Sanitasi Kota Magelang 2023-2027

Penanganan sampah di Kota Magelang juga didukung infrastruktur penangananan sampah. Baik untuk pengumpulan sampah, maupun penampungan sementara dan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Tabel 2.20 di bawah ini menyajikan data infrastruktur penanganan sampah di tahun 2020-2024.

Tabel 2.20 Infrastruktur Penanganan Sampah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan (Unit)	35	35	35	35	35
Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan (Unit)	90	90	90	90	90
Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan (Unit)	6	6	6	6	6
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Unit)	23	23	23	23	23
Jumlah TPS (Unit)	15	15	15	15	15
Jumlah TPS-3R (Unit)	6	6	6	6	6
Kapasitas TPA (ton/hari)	70	70	70	70	70

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas TPS (m^3/hari)	402	402	402	402	402
Kapasitas TPS-3R (m^3/hari)	770	770	770	770	770

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025;

Sarana prasarana persampahan di Kota Magelang berada pada kondisi yang relatif stabil tanpa adanya penambahan sarana dan prasarana selama lima tahun terakhir. Jumlah sarana pengangkutan persampahan tetap 35 unit, sarana pewadahan 90 unit, dan sarana pemilahan 6 unit. Fasilitas pengelolaan yang ada terdiri dari 23 unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, dengan rincian 15 unit TPS dan 6 unit TPS-3R. Kapasitas pengolahan juga tidak mengalami perubahan, yakni TPA sebesar 70 ton/hari, TPS sebesar 402 m^3/hari, dan TPS-3R sebesar 770 m^3/hari.

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur persampahan Kota Magelang cenderung stagnan meskipun volume timbulan sampah, seperti pada data sebelumnya, mengalami peningkatan signifikan pada 2024. Hal ini berimplikasi pada potensi ketidakseimbangan antara kapasitas pengelolaan dan jumlah sampah yang harus ditangani, yang dapat memicu penumpukan atau pengelolaan yang kurang optimal. Untuk itu, diperlukan investasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur, baik melalui penambahan sarana pengangkutan, fasilitas pemilahan, maupun pengolahan, agar pengelolaan sampah lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Ada paradigma baru terkait dengan pengelolaan sampah, dari indikator sampah terkelola menjadi sampah terolah. Dimana berdasarkan target RPJPD pada tahun 2045 status capaiannya sebesar 90%. Salah satu bentuk pengolahan sampah adalah "pengurangan sampah". dimana status pengurangan sampah saat ini masih minim karena pengurangan sampah ini menggunakan strategi manual melalui Bank Sampah. Status kelembagaan Bank Sampah yang secara umum masih lemah sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang cukup besar untuk target pengolahan sampah. tapi Bank Sampah ini memiliki nilai edukasi yang cukup besar kepada Masyarakat terkait dengan kepedulian dan pelestarian Lingkungan hidup. mekanisasi dalam pengolahan sampah merupakan prioritas kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pengolahan sampah.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.6.1 Perubahan Iklim

Membangun ketahanan kota memerlukan integrasi antara isu perubahan iklim, sistem perkotaan, dan kerentanan sosial, serta mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung perubahan iklim. Di Indonesia, perubahan iklim berdampak luas pada perkotaan, termasuk kerusakan infrastruktur, berkurangnya sumber air bersih, ketahanan pangan, dan kesehatan. Proses adaptasi dimulai dengan menganalisis bahaya, kerentanan, dan risiko, kemudian mengembangkan strategi ketahanan kota serta mengimplementasikan program prioritas. Langkah ini bertujuan untuk mendorong daerah agar lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan global.

Upaya membangun ketahanan kota tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi salah satu faktor pemicu perubahan iklim. Integrasi antara strategi adaptasi dan mitigasi menjadi penting, mengingat tingginya kontribusi sektor energi dan limbah terhadap total emisi di Kota Magelang. Dengan memahami sumber emisi secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang langkah penurunan emisi yang sejalan dengan tujuan peningkatan ketahanan kota. Emisi GRK di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21 Hasil Inventarisasi GRK Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Pengadaan dan Penggunaan Energi	22.253,02	22.286,31	22.199,53	21.402,65	NA

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
Proses Industri dan Penggunaan Produk	0	0	0	NA	NA
Pertanian	2,94	2,47	3,91	2,28	NA
Kehutanan	-1,84	-1,84	-1,88	-1,88	NA
Pengelolaan Limbah	11,14	10,6	25,1	11,73	NA
Total	**22.265,26**	**22.297,55**	**22.226,66**	**21.414,78**	**NA**

**masih dalam proses perhitungan (rilis bulan Oktober 2025)*
Sumber: Laporan Akhir Inventarisasi GRK Kota Magelang Tahun 2022

Berdasarkan Dokumen Inventarisasi GRK 2022, emisi GRK Kota Magelang meningkat hingga 22.297,55 Gg CO_2e pada 2021, sebelum turun menjadi 22.226,66 Gg CO_2e pada 2022. Berdasarkan KLHS RPJMD 2025-2029 halaman 141, sektor energi menjadi penyumbang terbesar (22.199,53 Gg CO_2e), diikuti oleh sektor pengelolaan limbah (25,10 Gg CO_2e). Selain itu, sampah makanan yang masih mencapai 33,70% turut berkontribusi besar terhadap emisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengurangan emisi guna meningkatkan ketahanan Kota Magelang. Tabel 2.22 di bawah ini menunjukkan potensi penurunan emisi GRK di Kota Magelang dari tahun 2020-2024 berdasarkan situs AKSARA (Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional) Bappenas.

Tabel 2.22 Potensi Penurunan Emisi di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024*
Penurunan Emisi GRK	111,90	NA	NA	NA	NA

**masih dalam proses perhitungan (rilis bulan Oktober 2025)*
Sumber: Aksara Bappenas, 2025

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui berbagai strategi di sektor energi, industri, kehutanan, pertanian, dan pengelolaan limbah sesuai Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011. Data AKSARA menunjukkan potensi penurunan emisi di Kota Magelang stagnan di angka 111,9 selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan urgensi pelaksanaan komitmen pembangunan rendah karbon di Kota Magelang. Selain itu, pengurangan emisi juga dapat dilakukan melalui peralihan penggunaan kendaraan bermotor menuju moda transportasi ramah lingkungan, seperti sepeda atau kendaraan listrik. Pengembangan jalur sepeda yang aman dan nyaman, serta penyediaan fasilitas parkir sepeda di titik-titik strategis, akan mendorong masyarakat untuk lebih memilih moda ini dalam aktivitas sehari-hari. Upaya ini tidak hanya menurunkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

2.1.1.6.2 Risiko Bencana

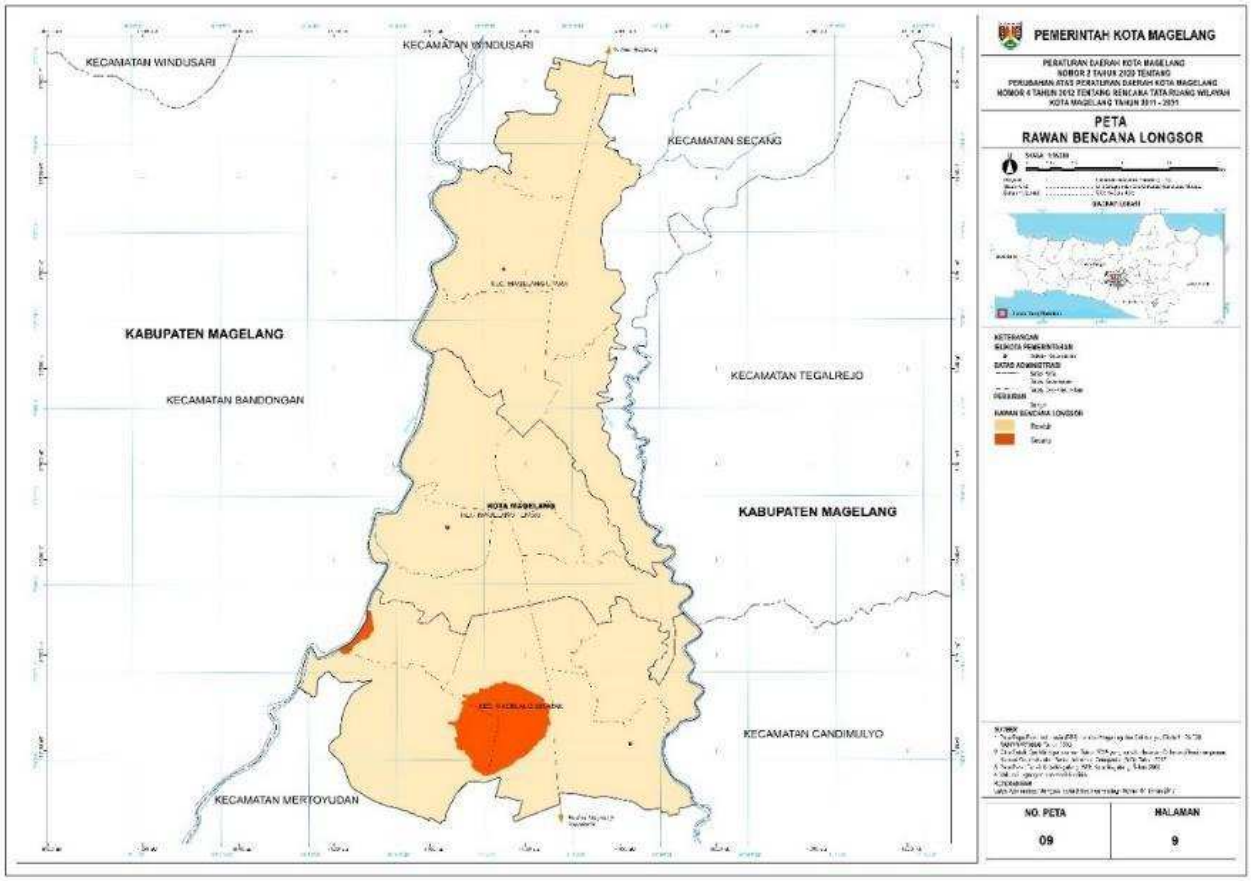
Kota Magelang merupakan wilayah yang menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk tanah longsor, banjir, kebakaran, serta risiko letusan gunung api. Kerentanan ini dipengaruhi oleh kondisi topografi, klimatologi, dan geologi, serta lokasinya yang dikelilingi oleh beberapa gunung berapi aktif. Berikut ini adalah jenis-jenis risiko bencana yang terdapat di Kota Magelang.

1. **Tanah Longsor**

   Berdasarkan kondisi topografi terdapat beberapa daerah di Kota Magelang yang berada dalam kemiringan tergolong curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo, khususnya pada sisi timur dan barat Kota Magelang. Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu wilayah barat Kota Magelang (lihat Gambar 2.18) dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta wilayah timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates. Berdasarkan

kondisi topografi, beberapa wilayah di Kota Magelang memiliki kemiringan yang curam dan termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Elo dan Progo, terutama di sisi timur dan barat kota. Wilayah yang berpotensi mengalami risiko bencana di bagian barat Kota Magelang berada dalam lingkup DAS Progo, mencakup Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Magelang Utara, Potrobangsan, Magelang, dan Cacaban. Sementara itu, di bagian timur Kota Magelang, wilayah yang termasuk dalam DAS Elo dan perlu diwaspadai meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara, dan Wates.

Kontur Kota Magelang yang mirip punggung sapi (di tengah merupakan kontur tertinggi), sehingga potensi banjir cukup minim (banjir < 2jam tidak masuk kategori banjir berdasarkan dokumen strategi sanitasi kota). Tapi drainase Kota yang mengalami pendangkalan mengakibatkan terganggunya daya tampung terhadap air hujan. Selain itu sudut elevasi drainase yang terkadang tidak selaras, akibatnya air yang ada di drainase tersiser tidak mengalir dengan lancar menuju drainase sekunder. Kondisi topografi yang curam pada wilayah-wilayah tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti longsor dan erosi, terutama saat curah hujan tinggi. Kerentanan ini diperparah oleh alih fungsi lahan dan berkurangnya vegetasi penahan tanah yang dapat mempercepat laju erosi. Selain mengancam keselamatan jiwa, risiko bencana ini juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur penting di Kota Magelang.

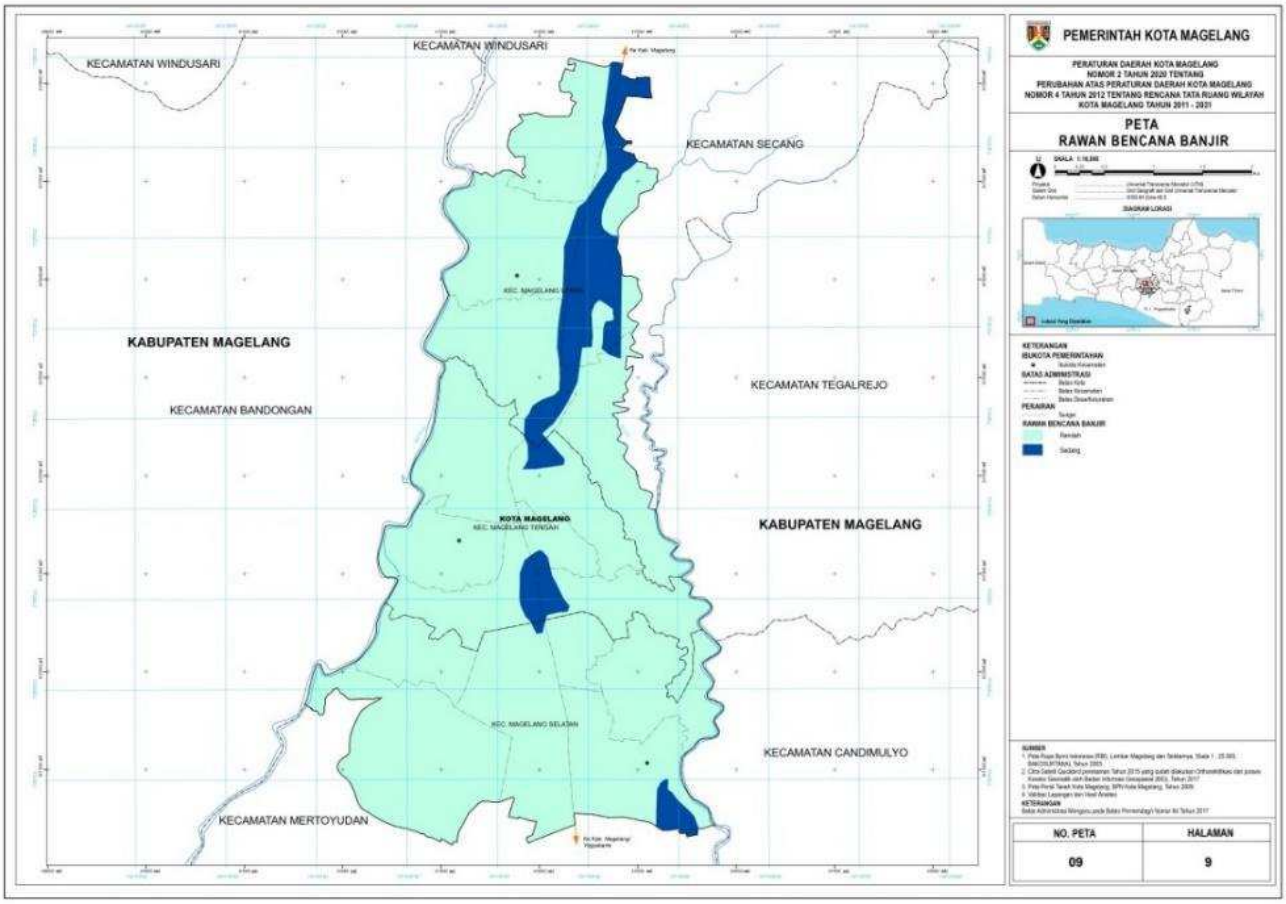


Gambar 2.18 Peta Rawan Bencana Longsor Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

2. Banjir

Selain potensi bencana tanah longsor, Kota Magelang juga menghadapi risiko bencana banjir (Gambar 2.19). Curah hujan yang tinggi, mencapai rata-rata 16,68 mm/hari, serta meningkatnya alih fungsi lahan menjadi area terbangun, menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Hal ini memperburuk potensi banjir di kota. Banjir di Kota Magelang umumnya terjadi akibat sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan, terutama ketika saluran tersumbat oleh sedimen atau limbah, sehingga menyebabkan limpasan air yang berlebihan.



Gambar 2.19 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

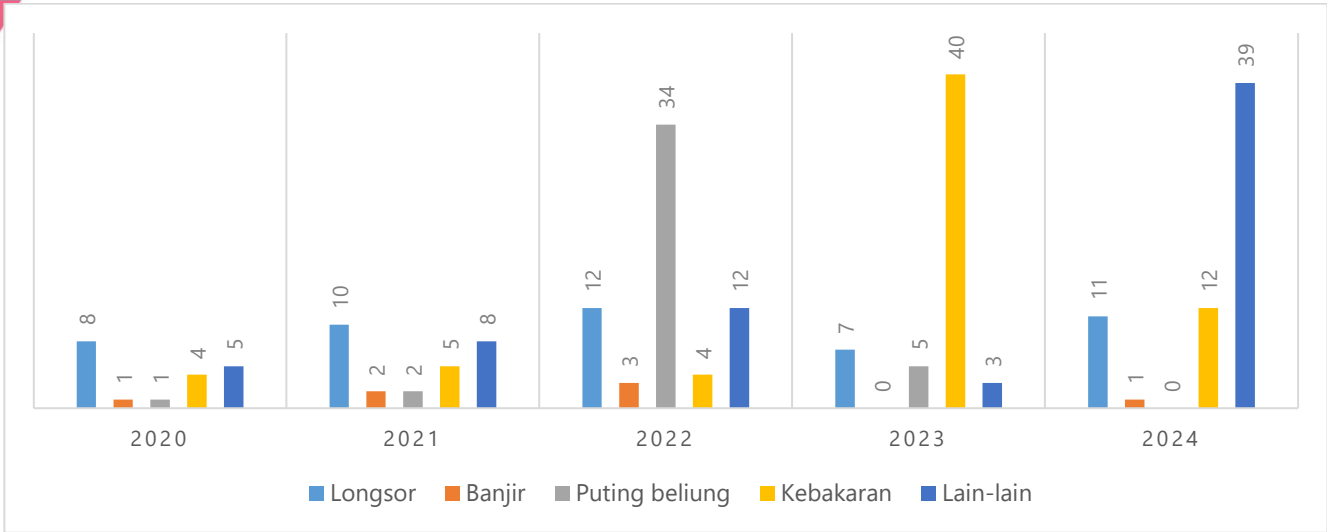
3. Kebakaran

Risiko bencana kebakaran juga menjadi perhatian di Kota Magelang, terutama di kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan akses jalan sempit yang menyulitkan. Kondisi ini dapat memperparah dampak kebakaran serta menyulitkan upaya pemadaman. Beberapa wilayah yang tergolong rawan kebakaran di Kota Magelang antara lain Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, dan Rejowinangun Selatan.

4. Letusan Gunung Api

Kota Magelang juga memiliki risiko bencana akibat letusan Gunung Merapi, mengingat letaknya yang relatif dekat dengan gunung berapi aktif tersebut. Dampak utama dari letusan meliputi hujan abu, gempa bumi, serta potensi gangguan aktivitas masyarakat. Sebagai kota yang berfungsi sebagai lokasi evakuasi bagi wilayah terdampak, Kota Magelang menyediakan berbagai tempat untuk penampungan sementara, seperti lapangan, kantor pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung olahraga.

Berdasarkan data kebencanaan Kota Magelang, kejadian bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti tanah longsor dan puting beliung hampir selalu terjadi setidaknya dalam kurun waktu 2021-2024. Di sisi lain, bencana kebakaran sempat mengalami peningkatan signifikan selama periode 2021-2023 dengan puncaknya 40 (empat puluh) bencana kebakaran di tahun 2023. Peningkatan ini berkaitan dengan terbatasnya lahan permukiman dan meningkatnya kepadatan hunian, yang memperbesar risiko kebakaran di kawasan permukiman padat. Gambar 2.20 di bawah ini menunjukkan angka kejadian bencana di Kota Magelang pada periode 2020-2024.



Gambar 2.20 Kejadian Bencana Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Bagian Kesra Setda (Data tahun 2020), BPBD (Data tahun 2021-2024)

Gambar 2.20 menunjukkan rekapitulasi tren kejadian bencana di Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencakup lima jenis bencana seperti telah dijabarkan di atas, ditambahkan kategori bencana lain. Selama periode ini, jumlah kejadian bencana berfluktuasi dengan lonjakan tertentu, terutama pada tahun 2022, di mana terdapat peningkatan signifikan pada kejadian puting beliung (34 kejadian) dan kebakaran (12 kejadian). Tahun 2023 mencatat lonjakan tajam pada kasus kebakaran, yakni mencapai 40 kejadian (angka tertinggi dalam lima tahun). Sementara itu, jumlah kejadian longsor cenderung stabil namun meningkat secara bertahap, dari 8 kejadian pada 2020 menjadi 11 kejadian pada 2024.

Data ini menunjukkan bahwa kebakaran dan puting beliung menjadi bencana yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir, menandakan kerentanan terhadap kondisi cuaca ekstrem dan potensi masalah dalam pengelolaan lingkungan permukiman. Peningkatan kejadian dalam kategori "lain-lain" pada 2024 hingga 39 kejadian juga mengindikasikan perlunya identifikasi lebih lanjut terhadap jenis bencana non-klasik yang mungkin timbul akibat perubahan iklim atau dinamika urbanisasi. Pola ini menuntut peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana di tingkat lokal, termasuk sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.

Tabel 2.23 Indeks Risiko Bencana Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor	108,00	108,00	108,00	102,08	93,35
Kelas Risiko	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2024/mobile/index.html

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh inarisk BNPB, selama 2020-2024 menunjukan peningkatan kapasitas Kota Magelang dalam mengantisipasi kejadian bencana. Skor IRB pada tahun 2020 sebesar 108,00 telah menurun menjadi 93,35 di tahun 2024 dengan kelas risiko sedang. Estimasi kerugian akibat bencana di Kota Magelang menurut BPBD Kota Magelang mencapai Rp. 1.294.000.000 pada tahun 2022. Angka ini sedikit menurun pada tahun 2024 dengan Rp, 1,145 milyar. Meskipun demikian, guna mewujudkan keberlanjutan kota upaya mitigasi tetap perlu dilakukan untuk terus meningkatkan ketangguhan Kota Magelang terhadap bencana. Tren positif sudah mulai terbentuk diperlihatkan melalui peningkatan Indeks Ketahanan Daerah Kota Magelang dimana pada tahun 2024 telah berada pada kategori ketahanan sedang dengan nilai 0,48; meningkat dari tahun 2023 yang berada pada 0,39 dengan kategori ketahanan rendah. Peningkatan ketahanan daerah perlu untuk terus dilakukan guna mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Menurut RTRW Kota Magelang 2011-2031, tujuan utama penataan ruang Kota Magelang adalah mewujudkan ruang Kota Magelang sebagai Kota Jasa bertaraf Regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara geografis, Kota Magelang berada di jalur transportasi utama Jawa Tengah, menghubungkan kota-kota besar di wilayah tersebut. Letak strategis ini menjadi nilai tambah yang menjadikan Kota Magelang sebagai pusat pengembangan regional. Dengan memanfaatkan keunggulan tersebut, pengembangan wilayah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sekitar untuk mengatasi keterbatasan dan memperkuat daya saing Kota Magelang untuk menjadi Kota Pusat dalam sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk WP GELANGMANGGUNG, yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

2.1.1.7.1 Potensi Pengembangan Internal Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang No. 2 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031, Kota Magelang terbagi menjadi pusat pelayanan dan subpusat pelayanan. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Magelang terletak di Kawasan Alun-Alun atau dikenal sebagai BWP I, dengan luas sekitar 245 ha. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi skala kota, rekreasi wisata perkotaan, serta permukiman dengan kepadatan tinggi.

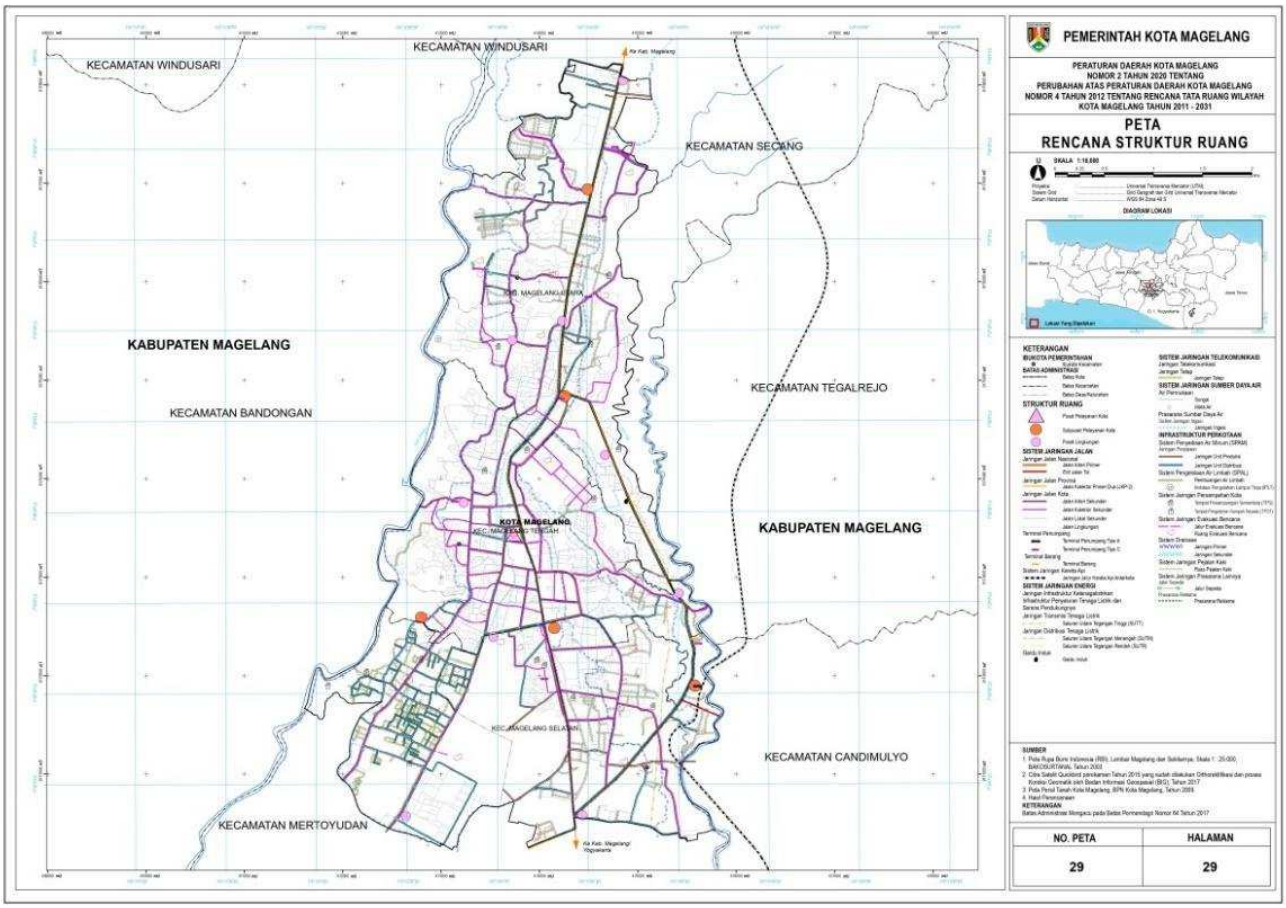
Subpusat Pelayanan Kota (SPK) berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di masing-masing bagian wilayah kota. Kota Magelang memiliki lima SPK yaitu:

1. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada **BWP I** yaitu Kawasan Pasar Rejowinangun sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
2. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada **BWP II** yaitu Kawasan Kebonpolodengan fungsi utama pusat pelayanan Permukiman kepadatan tinggi dan sedang, perdagangan, perguruan tinggi, dan pendidikan angkatan darat.
3. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada **BWP III** yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng dengan fungsi pusat pelayanan rekreasi kota/wisata alam skala regional, pelestarian alam, pendidikan angkatan darat, dan Permukiman dengan kepadatan sedang
4. Sub Pusat Pelayanan Kota berada pada **BWP IV** yaitu Kawasan Sukarno-Hatta dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan kota, pengembangan perdagangan dan jasa, simpul pergerakan barang, jasa dan orang, dan Permukiman kepadatan tinggi
5. Sub Pusat pelayanan kota berada pada **BWP V** yaitu Kawasan Sidotopo dengan fungsi pusat pelayanan perguruan tinggi, perbelanjaan toko modern, kawasan pengembangan sosial budaya, olahraga, dan rekreasi, Permukiman kepadatan sedang.

Berdasarkan rencana struktur ruang, terdapat empat arahan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Magelang meliputi:

1. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung;
2. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;
3. Pengembangan sistem prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional;

4. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan.



Gambar 2.21 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Selain itu, berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, terdapat 10 Wilayah Pengembangan (WP) yang akan dimasukan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, salah satunya yaitu WP Gelangmanggung yang meliputi Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Arahan pengembangan wilayah Gelangmanggung adalah

1. Melestarikan Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata kelas dunia;
2. Kawasan Perkotaan didorong pengembangan pada Koridor Muntilan-Mungkid-Kota Magelang-Secang-Temanggung disertai dengan pengembangan wilayah yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana alam seperti erupsi gunung api dan gempa bumi;
3. Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan wilayah sekitarnya;
4. Pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam;
5. Pada kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-DIY dilakukan penyelarasan pembangunan serta mendorong kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah.

Rencana pola ruang pada RTRW Kota Magelang diklasifikasikan menjadi dua yaitu rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Perincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung Kawasan Lindung terdiri dari 4 (empat) kawasan peruntukan berupa:

a. Kawasan Perlindungan Setempat, memiliki luas kurang lebih 24 ha meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Elo dan sempadan Sungai Progo. Kawasan sempadan irigasi meliputi sempadan saluran Kali Manggis, sempadan Kali Bening, sempadan Saluran Kota, sempadan Saluran Ngaran, sempadan Saluran Gandekan, dan sempadan Saluran Kedali. Kawasan Sempadan jalur kereta api yang dimaksud yaitu sempadan jaringan KA antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

b. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang direncanakan mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah dengan proporsi yaitu RTH publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha dan RTH privat dengan luas paling rendah sebesar 185 ha. RTH publik yang direncanakan meliputi RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar, RTH publik Taman, dan RTH publik fungsi tertentu. Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

c. Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

   1) Kawasan CAT, Kawasan CAT meliputi CAT Magelang-Temanggung.

   2) Sempadan Mata Air, Kawasan sempadan mata air yaitu sempadan mata air Tuk Pecah dengan luas kurang lebih 1 ha.

d. Kawasan Cagar Budaya, menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 yaitu:

   1) Rumah Sakit Soejono;

   2) Menara Air Kota Magelang;

   3) Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;

   4) Kelenteng Liong Hok Bio;

   5) eks-Karesidenan Kedu;

   6) Kepolisian Resor Magelang Kota;

   7) Museum Badan Pemeriksa Keuangan;

   8) Plengkung;

   9) Pondok Sriti;

   10) Wisma Diponegoro;

   11) Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang;

   12) Museum Jend. Sudirman;

   13) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang;

   14) Pasturan St. Ignatius;

   15) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa;

   16) Komando Distrik Militer Magelang;

   17) Gereja St. Ignatius;

   18) Gereja Kristen Jawa Magelang;

   19) Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;

   20) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

   21) eks-Kepolisian Wilayah Kedu;

22) Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;

23) Petilasan Mantyasih;

24) Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Budidaya Pola ruang, di Kota Magelang terdiri dari 7 (tujuh) kawasan peruntukan budidaya meliputi:

   a. Kawasan Permukiman, yang dirinci kedalam 9 (sembilan) rumpun kawasan peruntukan permukiman meliputi:

      1) Kawasan Perumahan, meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 881 ha;

      2) Kawasan Perdagangan dan Jasa, memiliki luas kurang lebih 264 ha;

      3) Kawasan Perkantoran, meliputi kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 42 ha;

      4) Kawasan Sektor Informal; Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau kawasan khusus bagi Pedagang Kaki Lima, yaitu:

         a) Lokasi Binaan Armada Real Estate;

         b) Lokasi Binaan Kauman Barat;

         c) Lokasi Binaan Lembah Tidar;

         d) Lokasi Binaan Sigaluh;

         e) Lokasi Binaan Sejuta Bunga;

         f) Lokasi Binaan Kalingga;

         g) Lokasi Binaan Sriwijaya;

         h) Lokasi Binaan Rejomulyo;

         i) Lokasi Binaan Jenggolo;

         j) Lokasi Binaan Pajajaran;

         k) Lokasi Binaan Daha;

         l) Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;

         m) Lokasi Binaan Jendralan;

         n) Lokasi Binaan Alibasah Sentot;

         o) Lokasi Binaan Tuin Van Java;

         p) Lokasi Binaan Badaan;

         q) Lokasi Binaan Kapten S Parman;

         r) Lokasi Binaan Kartika Sari;

         s) Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.

      5) Kawasan Pendidikan, dengan luas kurang lebih 68 ha;

      6) Kawasan Transportasi, dengan luas kurang lebih 4 ha;

      7) Kawasan Kesehatan, dengan luas kurang lebih 51 ha;

      8) Kawasan Peribadatan, dengan luas kurang lebih 9 ha;

9) Kawasan Olahraga, meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya dengan luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektare).

b. Kawasan Peruntukan Industri, meliputi (1) sentra industri kecil dan menengah, dan (2) perusahaan industri. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang dan perusahaan industr dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang.

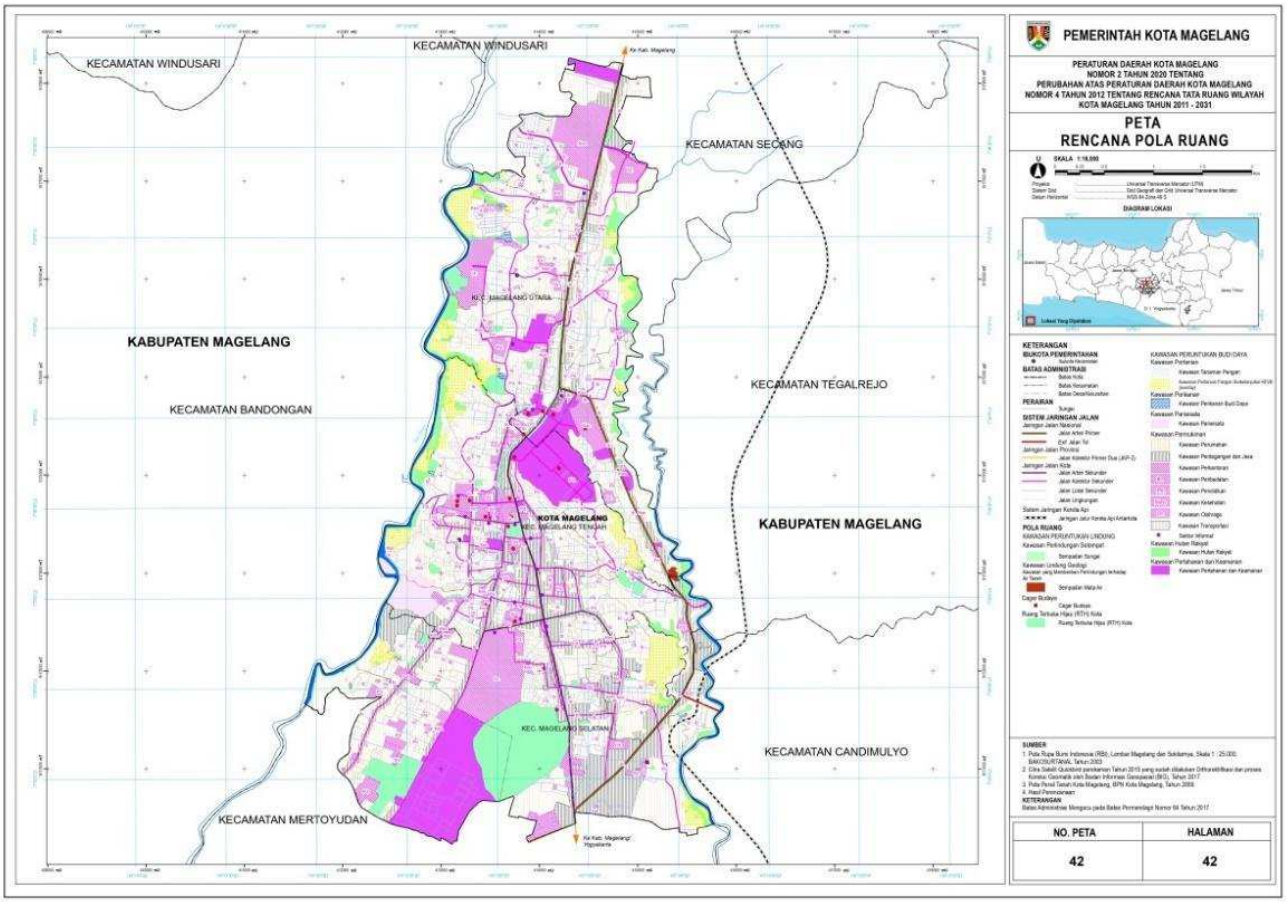
c. Kawasan Pariwisata, terdiri dari Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan luas kurang lebih 17 ha

d. Kawasan Pertanian, meliputi kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas kurang lebih 63 ha

e. Kawasan Perikanan, meliputi perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 3 ha

f. Kawasan Hutan Rakyat, memiliki luas kurang lebih 35 ha

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, memiliki luas kurang lebih 147 ha yang terdiri dari Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.



Gambar 2.22 Peta Rencana Pola Ruang Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Beberapa potensi internal Kota Magelang yang mendorong perkembangan kota antara lain:

1. Akademi Militer (Akmil) sebagai pusat pendidikan kemiliteran berskala nasional yang dikenal luas di seluruh Indonesia. Keberadaannya meningkatkan jumlah kunjungan ke Kota Magelang.

2. Meningkatnya kebutuhan akomodasi, yang menarik minat investor untuk mengembangkan usaha perhotelan dan restoran di kota ini.
3. Pembangunan Universitas Tidar

Berdasarkan RTRW Kota Magelang, pengembangan wilayah dikelompokkan ke dalam beberapa kawasan strategis sebagai berikut:

1. Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, pada kawasan ini direncanakan untuk mewadahi pendirian perguruan tinggi negeri dan kawasan perdagangan dan jasa;
2. Kawasan Sukarno Hatta sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan jasa, pada kawasan ini sudah disiapkan sebidang lahan untuk pembangunan pasar induk yang dipadukan dengan pergudangan dan *integrated station* terminal penumpang dan stasiun kereta api;
3. Kawasan Kebonpolo sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi dan perdagangan;
4. Kawasan Alun-alun sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan perkantoran Regional, juga mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat; Selain itu, terdapat rencana revitalisasi Kawasan Alun-alun dan Pecinan, serta pengembangan kawasan *shopping center* untuk menunjang kegiatan pariwisata di Kota Magelang
5. Kawasan GOR Samapta sebagai pusat pelayanan rekreasi dan olahraga, kelengkapan sarana, seperti lapangan tennis indoor dan outdoor, samapta *aquatic stadium*, Stadion Moch. Soebroto, GOR samapta, dan rencana pelengkap kawasan termasuk RTH Publik, Masjid Kawasan, Kantor Kepemudaan dan Olahraga, BMX dan skater track, dan sebagainya.
6. Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar sebagai pusat pelayanan perdagangan jasa dan kesehatan akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan pendukung pengembangan wisata Kebun Raya Gunung Tidar dengan pembangunan IKM Center;
7. Kawasan Objek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai kawasan pusat pelayanan rekrasi dan olahraga;
8. Kawasan Petilasan Mantyasih sebagai kawasan ilmu pengetahuan dan cagar budaya; dan
9. Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar Magelang sebagai kawasan pelestarian alam.

Pengembangan sembilan Kawasan Strategis di Kota Magelang perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan guna mewujudkan kota yang berdaya saing, kreatif, dan inovatif. Dalam prioritasi pembangunan Kota Mageleng, tiga kawasan strategis membentuk kawasan segitiga prioritas yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan kota yaitu:

1. Kawasan Soekarno-Hatta sebagai Pusat pelayanan transportasi serta perdagangan dan jasa.
2. Kawasan Alun-Alun sebagai Pusat perdagangan dan jasa, perkantoran regional, serta rekreasi.
3. Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai Pusat Konservasi Alam yang juga dikembangkan menjadi pusat rekreasi ramah lingkungan.

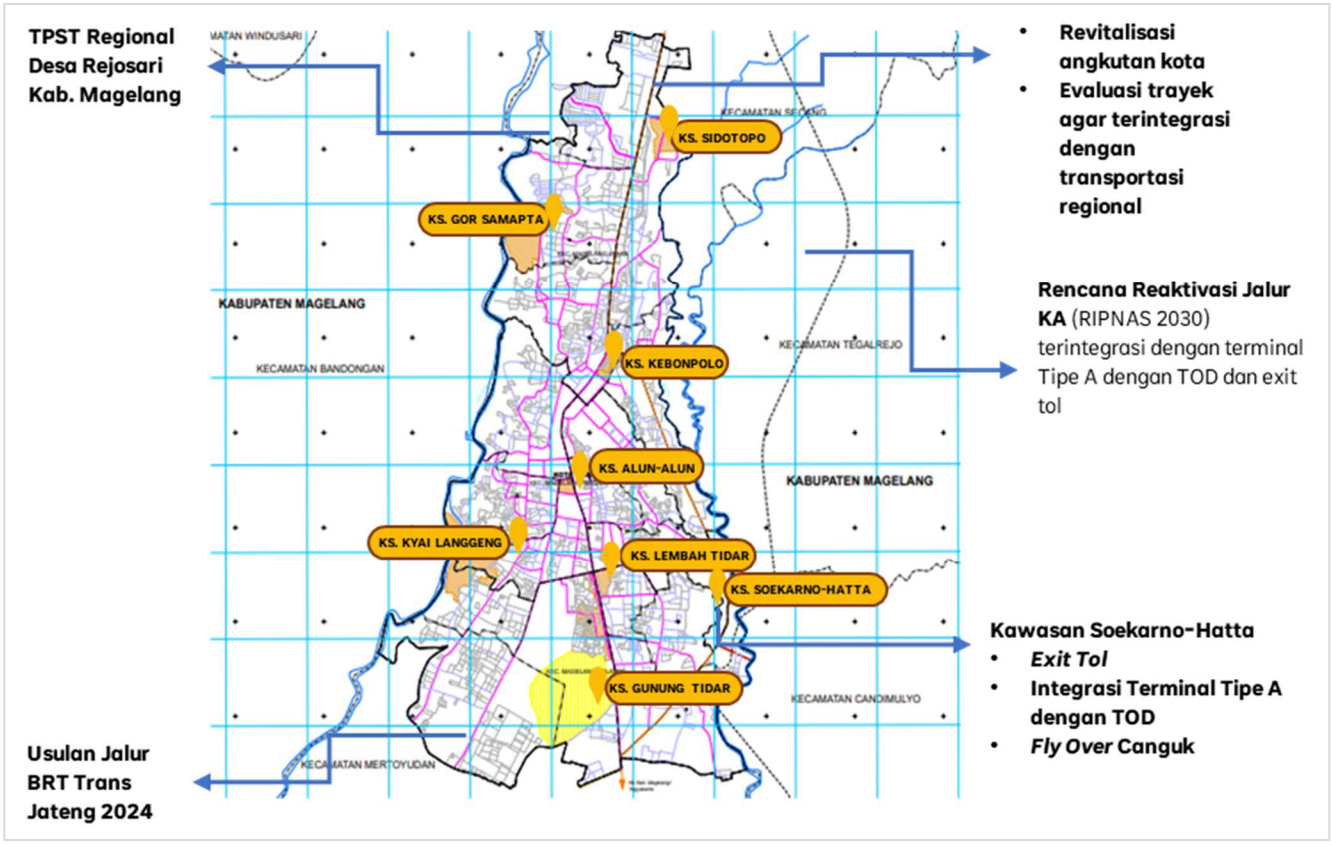
Selain segitiga emas, dikembangkan pula Kawasan Sidotopo sebagai pusat pelayanan pendidikan (Universitas Tidar), perdagangan dan jasa, serta perkantoran. Kawasan Sidotopo dikembangkan sebagai upaya pemerataan pengembangan aktivitas di Kota Magelang.

Pengembangan kawasan-kawasan ini akan menarik lebih banyak pendatang dari daerah lain dan meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Magelang. Namun, perlu diperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan agar kualitas ekosistem tetap terjaga. Selain itu,

pengoptimalan letak strategis Kota Magelang melalui sistem transportasi yang terintegrasi sangat penting untuk meningkatkan konektivitas daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.7.2 Potensi Pengembangan Eksternal Wilayah

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Gelangmanggung yang berperan dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Kota Magelang diharapkan berkontribusi dalam pembangunan koridor pariwisata KSPN Borobudur melalui pengembangan wisata perkotaan, penyediaan infrastruktur pelayanan, serta pengembangan sektor jasa sebagai penunjang aktivitas masyarakat. Kota Magelang telah menginisiasi kerjasama UMKM dan pariwisata di Kawasan Gelangmanggung untuk berkontribusi pada pengembangan KSPN Borobudur. Selain itu, Kota Magelang juga berperan dalam memperkuat konektivitas pergerakan antara wilayah Utara dan Selatan Pulau Jawa. Untuk itu, perannya sebagai penyedia layanan perkotaan berskala regional perlu terus diperkuat.



Gambar 2.23 Peta Pengembangan Eksternal Wilayah Kota Magelang

Sumber: Bahan Paparan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Magelang

Dalam upaya mengembangkan wilayah Kota Magelang, berbagai langkah strategis dilakukan, antara lain meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas melalui pengembangan kawasan perkotaan di sepanjang koridor Muntilan-Mungkid-Kota Magelang-Secang-Temanggung. Salah satu langkah utama adalah reaktivasi jalur Kereta Api Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta yang telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Peningkatan konektivitas juga didukung oleh pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, dengan pintu keluar tol yang terhubung langsung ke Jalan Arteri Primer Soekarno-Hatta, serta pembangunan *flyover* Canguk. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, direncanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Magelang. Usulan jalur BRT Trans Jateng juga diajukan guna memperkuat konektivitas dan aksesibilitas di tingkat regional.

Berikut beberapa penjelasan dari rencana Pembangunan yang ada di Kota Magelang.

1. **Rencana Sistem Jaringan Kereta Api**

   Sistem jaringan pelayanan kereta api direncanakan menurut fungsinya sebagai perkeretaapian umum antarkota yang merupakan jaringan kereta api jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogya, meliputi:

   a. Pengembangan prasarana perkeretaapian. Pengembangan prasarana perkeretaapian berupa jalur rel kereta api Ambarawa-Secang-Magelang-Yogya dalam rencananya melewati wilayah Kota Magelang bagian Selatan dengan dilengkapi infrastruktur perkeretaapian serta infrastruktur perkotaan yang diperlukan.

   b. Pengembangan sarana perkeretaapian. Pengembangan sarana perkeretaapian di Kota Magelang mencakup pembangunan stasiun yang terintegrasi dengan Terminal Tidar Tipe A, pengembangan konsep Bisnis Terintegrasi, serta terhubung dengan exit tol. Stasiun ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting di lapangan.

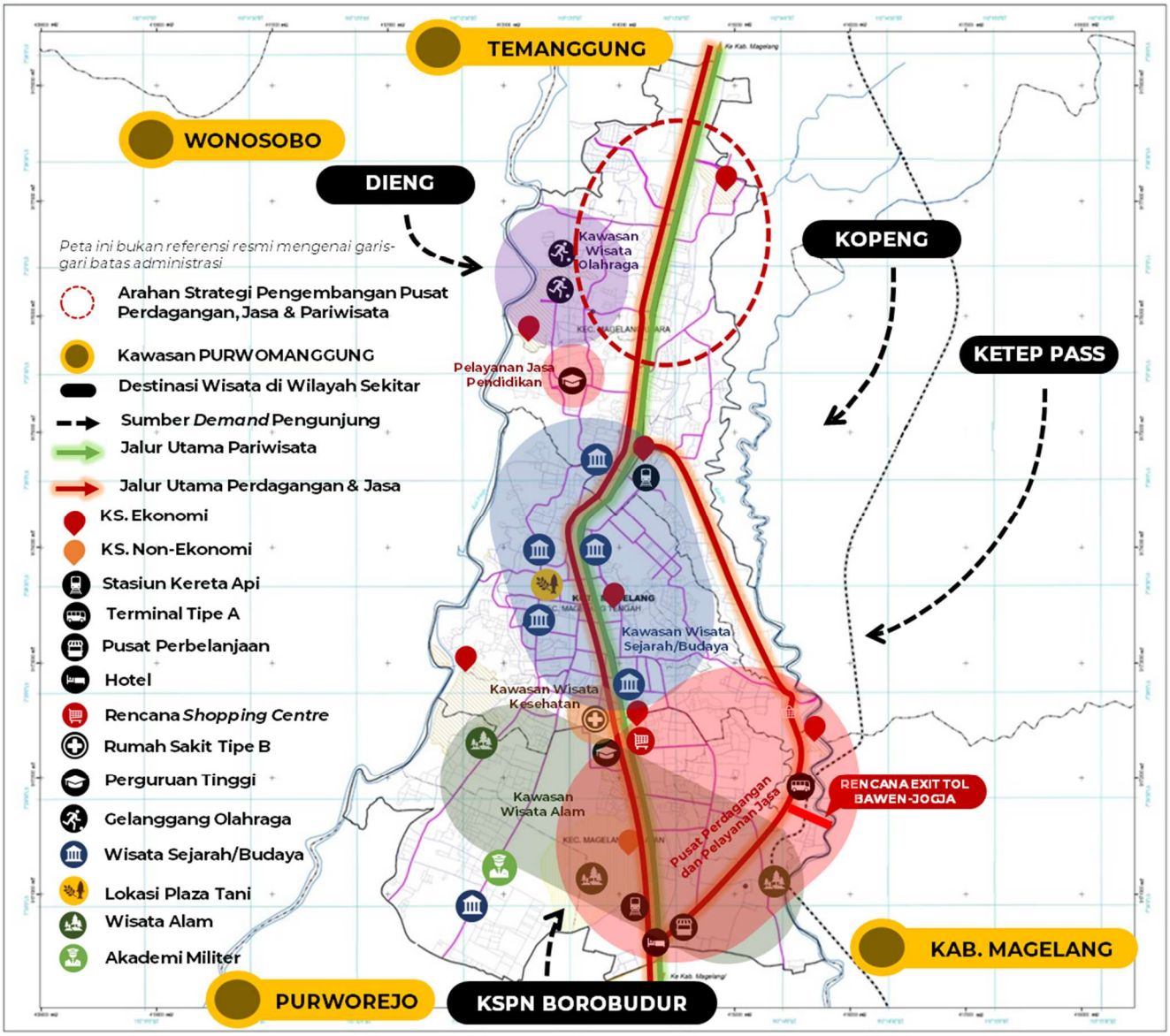
2. **Rencana Pengembangan Exit Jalan Tol Bawen-DIY**

   Pembangunan jalan tol Bawen-DIY, yang merupakan kebijakan pusat dan melintasi Kabupaten Magelang serta berbatasan langsung dengan Kota Magelang, memerlukan antisipasi strategis. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pengembangan exit tol yang terintegrasi dengan Jalan Arteri Primer Soekarno-Hatta. Selain itu, pengembangan terminal tipe A Terminal Tidar sebagai pusat ekonomi dan wisata turut mendukung hal ini. Exit tol ini dirancang untuk menjaga dinamika aktivitas di dalam Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu, jalan layang (fly over) di Simpang Canguk yang terhubung dengan exit tol Bawen-DIY menjadi salah satu gerbang utama kota dari arah selatan dan timur, sehingga penataan kawasan ini menjadi prioritas guna memastikan kualitas ruang kota tetap terjaga.

3. **Rencana Pengembangan Prasarana Persampahan Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST) Regional**

   Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dilakukan melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara Terpadu (TPST) Regional Magelang yang berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Proses ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mencakup penetapan lokasi serta penerapan sistem dan manajemen persampahan secara regional dengan koordinasi antar wilayah. Sementara itu, pemrosesan akhir sampah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dan pemerintah kabupaten di sekitarnya, dengan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi.

Pengembangan jaringan transportasi regional, seperti pembangunan jalan tol dan reaktivasi jalur kereta api, berperan penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas Kota Magelang. Hal ini dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor ekonomi, termasuk pariwisata, UMKM, serta perdagangan dan jasa. Keberadaan jalan tol yang berdekatan dengan destinasi wisata diperkirakan akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Magelang. Selain itu, potensi UMKM yang telah berkembang dapat lebih mudah memperluas pasar dengan adanya pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta dan Tol Wonosobo-Magelang.



Gambar 2.24 Peta Strategi Pengembangan Wilayah

Sumber: RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Berdasarkan arahan pembangunan RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045, posisi strategis Kota Magelang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai sumber utama peningkatan pendapatan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di wilayah tengah dan selatan, tetapi juga diarahkan ke bagian utara Kota Magelang sebagai pusat layanan pariwisata, perdagangan, dan jasa.

Selain itu, arah kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dapat memberikan manfaat limpahan wisatawan bagi Kota Magelang, yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Untuk mengoptimalkan peluang ini, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, serta peningkatan faktor 7A (*Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Aktivitas, Attitude, Ambience,* dan *Akselerator*).

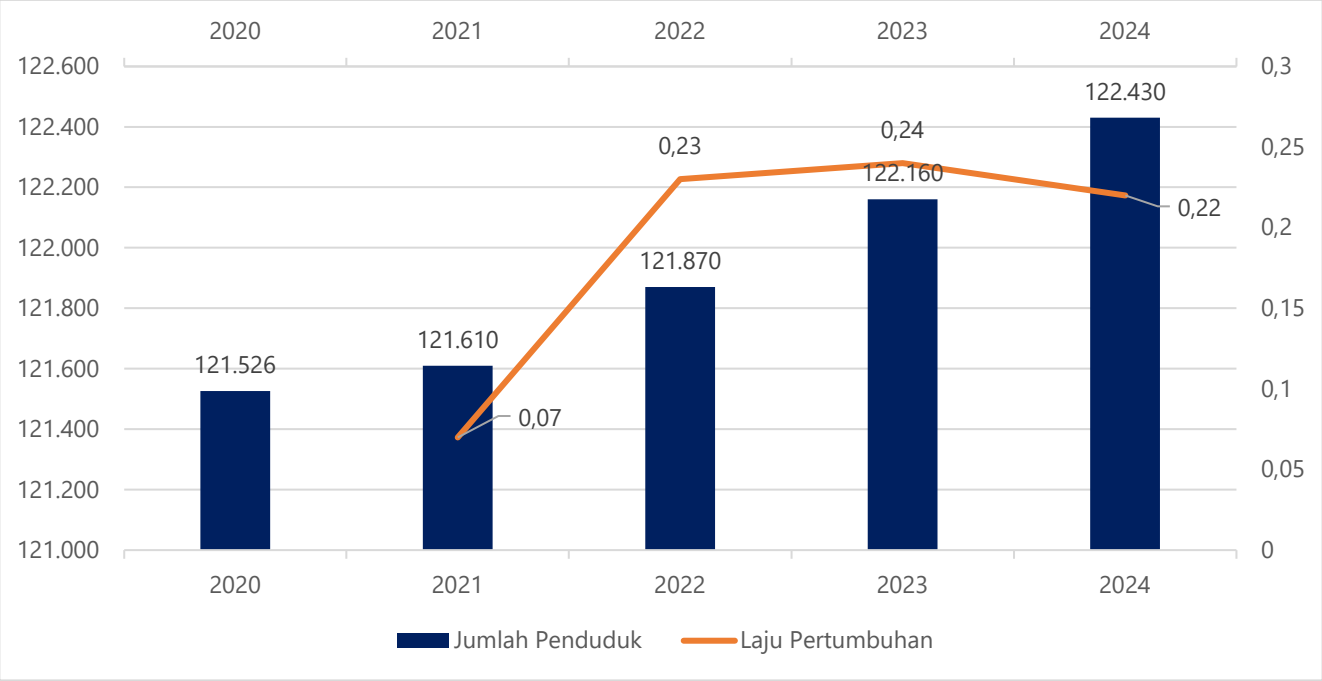
Dengan adanya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, Kota Magelang dapat memanfaatkannya untuk mendukung pengembangan wilayah serta memperkuat perannya sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini perlu didukung oleh peningkatan daya saing daerah, yang dapat dicapai melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), guna memperkuat sektor-sektor potensial di Kota Magelang.

2.1.1.8 Demografi

Aspek demografi mencakup berbagai elemen terkait kependudukan, seperti jumlah dan struktur umur penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin (*sex ratio*), serta dinamika kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Selain itu, aspek ini juga mencakup rasio ketergantungan, yang menggambarkan perbandingan antara penduduk usia non-produktif dan produktif.

2.1.1.8.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Magelang selama periode 2020-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah penduduk tercatat berjumlah 121.500 pada tahun 2020 dan menjadi 122,43 ribu jiwa pada tahun 2024 (catatan pada sumber "Proyeksi penduduk hasil Sensus") seperti ditunjukkan pada Gambar 2.25. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Magelang stabil dalam 3 tahun terakhir pada angka 0,22-0,24 per tahun.



Gambar 2.25 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021 dan 2022 (tahun 2020 dan 2021); BPS Kota Magelang, 2025 (Statistik Kunci tahun 2022-2024)

Gambar 2.25 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan moderat selama periode 2020-2024, dari 121.526 jiwa pada tahun 2020 menjadi 122.430 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk juga menunjukkan tren positif, meskipun relatif rendah, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 0,23%, kemudian sedikit naik menjadi 0,24% di 2023, dan turun tipis menjadi 0,22% di 2024. Kestabilan laju pertumbuhan ini mencerminkan kondisi demografis yang terkendali, dengan implikasi penting bagi perencanaan layanan publik dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan di Kota Magelang.

Tabel 2.24 Kepadatan Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)				
Tahun	**Magelang Selatan**	**Magelang Tengah**	**Magelang Utara**	**Kota Magelang**
2020	5.640	8.638	5.896	**6.555**
2021	5.636	8.643	5.909	**6.559**
2022	5.624	8.630	5.922	**6.556**

Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)				
Tahun	**Magelang Selatan**	**Magelang Tengah**	**Magelang Utara**	**Kota Magelang**
2023	5.638	8.664	5.954	**6.581**
2024	5.643	8.683	5.977	**6.596**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang 2024, Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2024

Kepadatan penduduk Kota Magelang periode 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 6.555 jiwa/km² pada 2020 menjadi 6.596 jiwa/km² pada 2024. Secara wilayah, Kecamatan Magelang Tengah konsisten menjadi daerah dengan kepadatan tertinggi, meningkat dari 8.638 jiwa/km² menjadi 8.683 jiwa/km². Magelang Selatan dan Magelang Utara memiliki kepadatan lebih rendah, namun tetap menunjukkan tren naik tipis, masing-masing dari 5.640 menjadi 5.643 jiwa/km², dan dari 5.896 menjadi 5.977 jiwa/km². Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang moderat dan distribusi penduduk yang relatif tidak berubah secara signifikan.

Meskipun laju peningkatan kepadatan tidak besar, konsentrasi penduduk di Magelang Tengah tetap tinggi dan berpotensi memberikan tekanan terhadap infrastruktur, ruang terbuka hijau, transportasi, dan layanan publik di wilayah tersebut. Untuk pembangunan jangka menengah, pemerintah Kota Magelang perlu mengantisipasi dampak kepadatan tinggi dengan memperkuat infrastruktur perkotaan, mengoptimalkan tata ruang, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ke wilayah dengan kepadatan lebih rendah seperti Magelang Selatan dan Magelang Utara. Upaya ini penting untuk menjaga kualitas hidup dan memastikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai di seluruh wilayah kota.

2.1.1.8.2 Komposisi Penduduk Usia Produktif dan Lanjut Usia

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2024 yang mencapai 70,58% (86.411 jiwa) dari total jumlah penduduk. Tabel 2.25 dan 2.26 di bawah ini menunjukkan perkembangan kelompok usia produktif dan lansia di Kota Magelang.

Tabel 2.25 Jumlah Penduduk Kota Magelang Menurut Kelompok Umur, 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	7.513	7.432	7.355	7.525	7.559
5-9	7.896	7.804	7.720	7.245	7.138
10-14	8.964	8.844	8.721	8.202	7.912
15-19	9.921	9.767	9.630	9.359	9.159
20-24	10.078	9.868	9.660	10.129	10.039
25-29	9.062	8.961	8.851	9.734	9.934
30-34	8.285	8.223	8.151	8.357	8.497
35-39	8.590	8.560	8.533	8.003	7.863
40-44	8.961	8.948	8.918	8.539	8.369
45-49	8.783	8.828	8.878	8.775	8.725
50-54	8.363	8.433	8.484	8.474	8.514
55-59	7.729	7.873	8.014	8.029	8.079
60-64	6.373	6.536	6.692	7.022	7.232

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
65-69	4.962	5.162	5.345	5.493	5.643
70-74	2.793	3.100	3.154	3.739	4.029
75+	3.253	3.401	3.569	3.525	3.739
Jumlah	**121.526**	**121.610**	**121.675**	**122.150**	**122.431**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2021-2025

Tabel 2.26 Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kota Magelang, 2020-2024

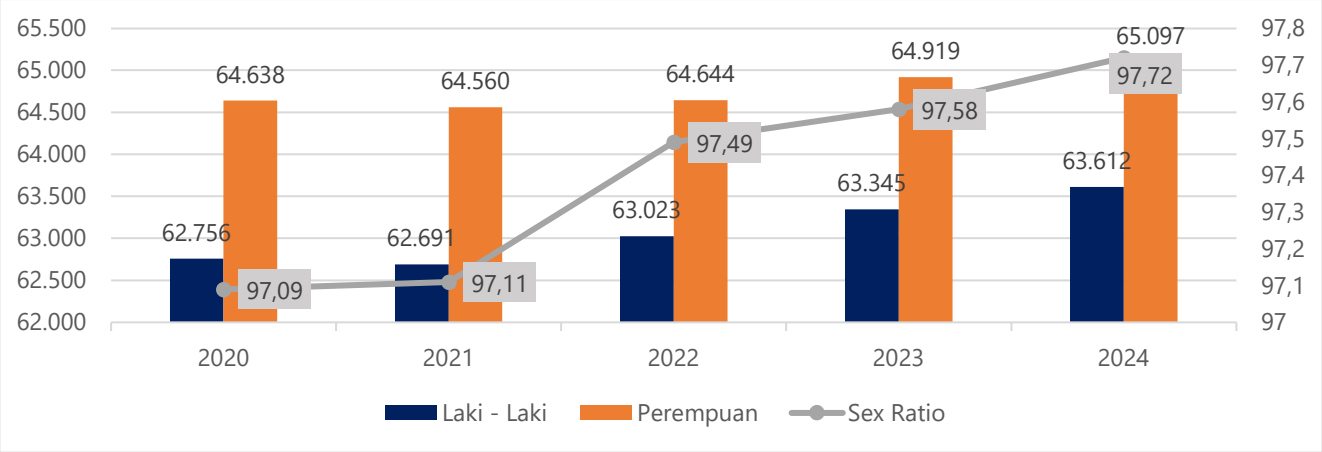
Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
60-64	6.373	6.536	6.692	7.022	7.232
65-69	4.962	5.162	5.345	5.493	5.643
70-74	2.793	3.100	3.154	3.739	4.029
75+	3.253	3.401	3.569	3.525	3.739
Jumlah	**17.381**	**18.199**	**18.760**	**19.779**	**20.643**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2021-2025

Fenomena peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif seperti pada Tabel 2.25 berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi seperti ketersediaan lapangan kerja, kebutuhan infrastruktur, pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Di samping itu, apabila dilihat berdasarkan jumlah penduduk usia lanjut (Tabel 2.26), jumlah lansia di Kota Magelang terus mengalami peningkatan dan proporsinya mencapai 16,86% dari komposisi penduduk Kota Magelang pada tahun 2024. Hal ini juga menjadi perhatian agar Pemerintah Kota Magelang juga mampu mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan yang ramah bagi kebutuhan penduduk lansia.

2.1.1.8.3 Sex Ratio

Gambar 2.26 menyajikan data *sex ratio* penduduk Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan. Selama lima tahun tersebut, jumlah penduduk perempuan konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, tercatat 62.756 laki-laki dan 64.638 perempuan dengan *sex ratio* sebesar 97,09. Jumlah ini meningkat secara bertahap setiap tahun, hingga mencapai 63.612 laki-laki dan 65.097 perempuan pada 2024, dengan *sex ratio* sebesar 97,72.



Gambar 2.26 Sex Ratio Penduduk Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang 2021-2025

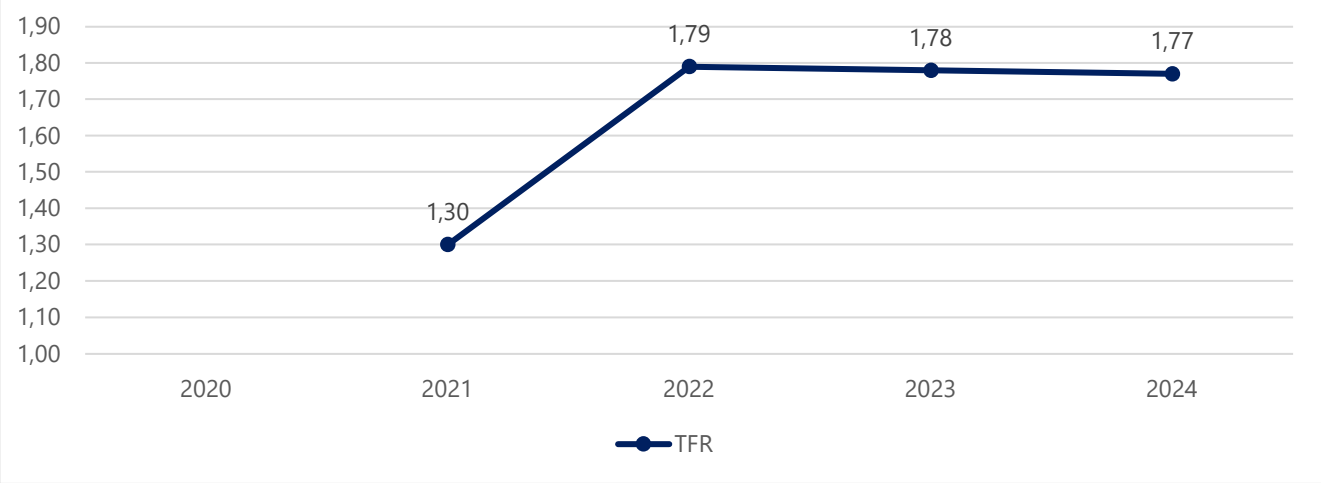
Peningkatan nilai *sex ratio* ini menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan keseimbangan gender dalam komposisi penduduk Kota Magelang, meskipun jumlah perempuan masih lebih tinggi. Tren ini mencerminkan dinamika demografis yang stabil, tanpa lonjakan atau penurunan tajam, yang dapat mempermudah perencanaan pelayanan publik berbasis gender. Selain itu, perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu mencolok mengindikasikan tidak adanya tekanan demografis ekstrem yang perlu direspons secara khusus, namun tetap perlu dipantau untuk memastikan kesetaraan akses layanan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kontribusi perempuan pada bidang ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonominya agar tidak berada pada kelompok yang rentan.

Selain itu, pemberdayaan perempuan juga merupakan langkah penting dalam mencapai ekonomi lokal yang inklusif di Kota Magelang. Pemenuhan akses dan peran perempuan dalam kelembagaan dan ketenagakerjaaan. Salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan pelayanan yang ramah perempuan, seperti: ruang laktasi di tempat umum, program kesehatan ibu dan anak, serta moda transportasi yang ramah perempuan. Selain itu, program-program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang ditujukan khusus untuk perempuan juga dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pemberdayaan perempuan melalui kebijakan dan program juga penting untuk mendukung partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, politik, dan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan membantu meningkatkan peluang ekonomi bagi semua anggota masyarakat, termasuk perempuan.

2.1.1.8.4 Dinamika Penduduk

2.1.1.8.4.1 Angka Kelahiran Penduduk Kota Magelang

Angka kelahiran menjadi variabel penting untuk proyeksi prencaaan Pembangunan. Angka Kelahiran penduduk Kota Magelang tersaji dalam Gambar 2.27 sebagai berikut.



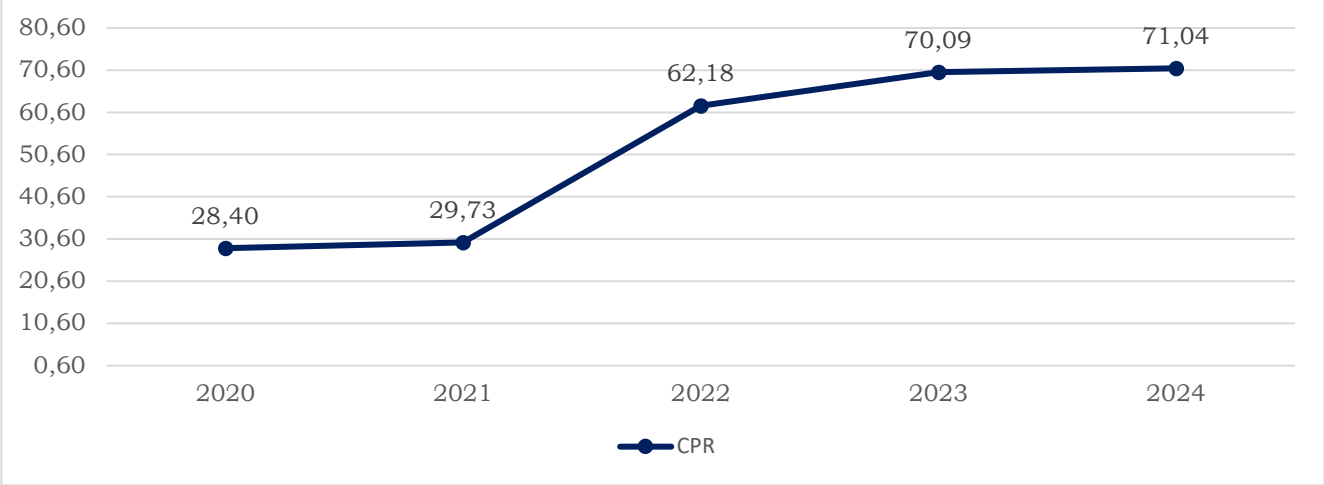
Gambar 2.27 Total Fertility Rate (TFR) Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk, 2025 (data 2020 dan 2021 tidak tersedia)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) Kota Magelang dalam kurun waktu 2022-2024 tidak menujukkan perubahan signifikan dan stabil berada di kisaran angka 1. Pada tahun 2024, TFR Kota Magelang menunjukkan angka 1,77; artinya rata-rata 100 perempuan melahirkan 177 anak selama masa reproduksinya. Jika dibandingkan dengan TFR level nasional maupun provinsi yang pada tahun 2024 berada pada kisaran angka 2, realisasi TFR Kota Magelang sampai tahun 2024 tergolong rendah. Jika di masa depan TFR akan terus stagnan, hal ini memberikan tantangan kepada Kota Magelang mengingat komposisi penduduk usia lanjut yang akan terus bertambah yang berakibat pada bertambahnya angka ketergantungan. Selain itu, kondisi TFR Kota Magelang yang relatif stagnan meskipun secara detail

mengalami penurunan yang tipis salah satunya didukung oleh pemakaian kontrasepsi oleh pasangan usia subur.

Gambar 2.28 di bawah ini menunjukkan perkembangan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) atau angka prevalensi penggunaan kontrasepsi di Kota Magelang selama periode 2020-2024.

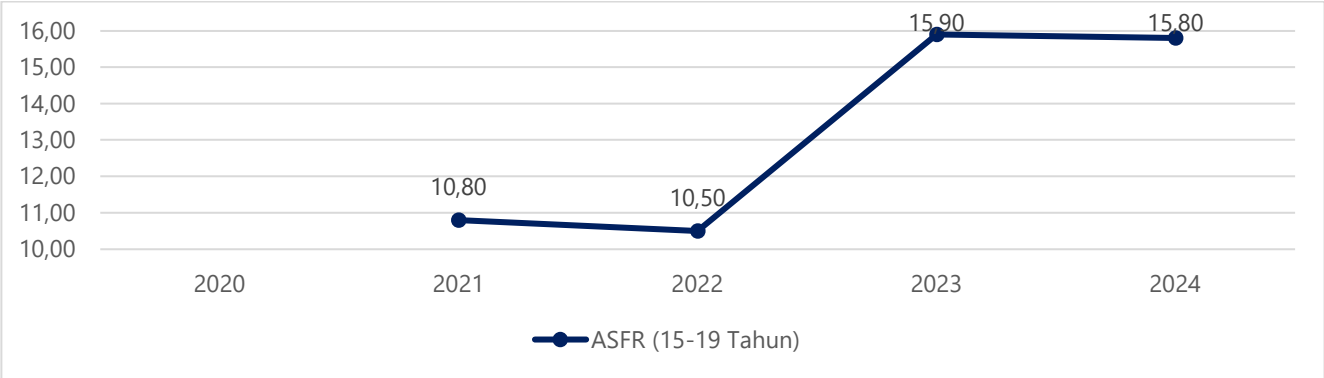


Gambar 2.28 Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025

Gambar 2.28 menunjukkan bahwa angka *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) di Kota Magelang meningkat signifikan dari 28,4% pada tahun 2020 menjadi 71,04% pada tahun 2024. Lonjakan ini menggambarkan keberhasilan program keluarga berencana dalam meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi modern. Hal ini menunjukkan semakin terkendalinya angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan di sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja. Namun, keberlanjutan capaian ini perlu dijaga melalui peningkatan kualitas layanan KB, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta edukasi yang berkelanjutan agar tidak hanya mendorong pencapaian kuantitatif, tetapi juga memastikan terwujudnya keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Sementara itu, berdasarkan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age-Specific Fertility Rate*/ASFR) kelompok usia 15-19 tahun, dalam periode 2021-2024 menujukkan peningkatan seperti dapat dilihat pada Gambar 2.29 di bawah ini.



Gambar 2.29 Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun Kota Magelang Tahun 2020-2024

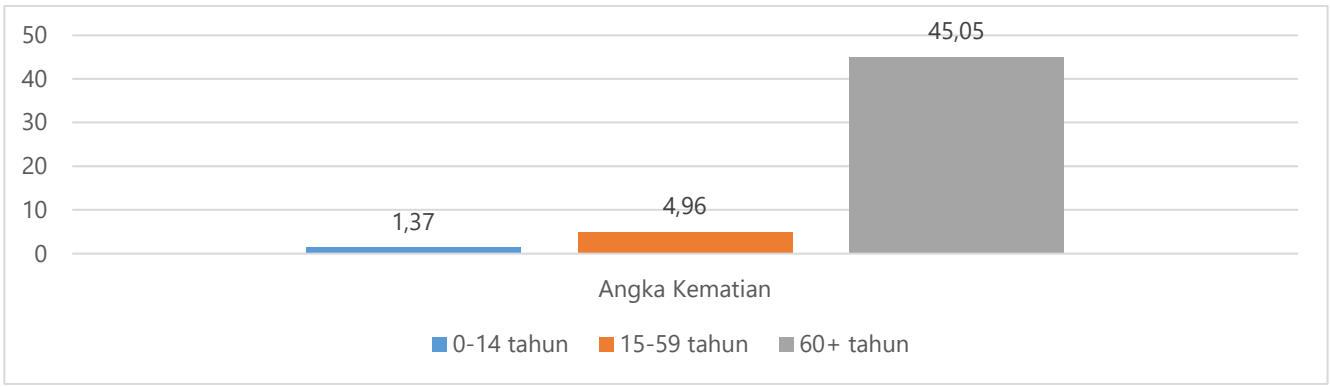
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025 (data tahun 2020 tidak tersedia)

Pada tahun 2021, ASFR kelompok usia 15-19 tahun berada pada angka 10,8; meningkat menjadi 15,8 pada tahun 2024. Artinya, pada setiap 1.000 wanita usia 15-19 tahun, terdapat 15-16 kelahiran hidup. Meskipun capaian ASFR tahun 2024 sudah lebih rendah daripada rata-rata nasional yang sebesar 18; namun angka tersebut masih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka

13,7. Hal ini menjadi sebuah alarm bahwa pernikahan dini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Kota Magelang. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan yang dihasilkan karena pernikahan dini erat kaitannya belum matangnya kondisi fisik, psikologis, maupun ekonomi pelaku.

2.1.1.8.4.2 Angka Kematian Penduduk Kota Magelang

Berdasarkan hasil Long Form SP2020, angka kematian kasar di Kota Magelang tercatat sebesar 10,20, yang berarti terdapat sekitar 10 hingga 11 kematian untuk setiap 1.000 penduduk. Kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) memiliki tingkat kematian tertinggi, mencapai 45,05, atau sekitar sembilan kali lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian pada kelompok usia dewasa (15-59 tahun) yang hanya sekitar 4,96 seperti pada Gambar 2.30 berikut.



Gambar 2.30 Angka Kematian Berdasarkan Kelompok Umur Kota Magelang

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kota Magelang

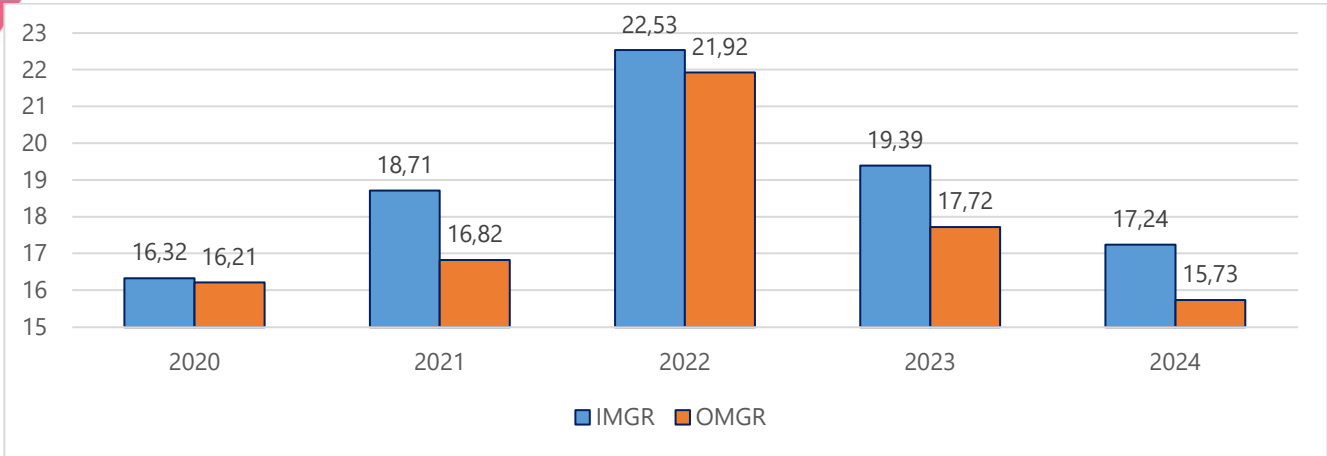
Distribusi angka pada kelompok umur pada Gambar 2.30 menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi lansia guna memperpanjang angka harapan hidup, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Magelang. Selain itu, angka kematian balita di Kota Magelang tercatat sebesar 12,66, yang berarti terdapat sekitar 12 hingga 13 kematian dari setiap 1.000 balita sebelum mencapai usia lima tahun. Kondisi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak oleh pemerintah serta tenaga medis guna menekan angka kematian balita. Upaya ini juga dapat berkontribusi terhadap penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) dan perubahan struktur populasi anak-anak di Kota Magelang.

2.1.1.8.4.3 Migrasi Penduduk

Dalam kurun waktu 2020-2024, migrasi penduduk di Kota Magelang selalu menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang bermigrasi masuk daripada yang bermigrasi keluar. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Magelang memiliki daya tarik yang kuat bagi penduduk luar untuk datang dan menetap di kota ini.

Namun, fenomena ini juga menimbulkan beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah meningkatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan mengakses layanan publik. Penduduk lokal mungkin menghadapi tantangan dalam bersaing dengan pendatang baru dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, Kota Magelang perlu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk masuk dengan penguatan sumber daya manusia lokal agar tetap dapat bersaing. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi krusial agar peningkatan migrasi masuk tidak berujung pada peningkatan angka pengangguran.

Gambar 2.31 di bawah ini menunjukkan perkembangan angka migrasi penduduk di Kota Magelang pada periode 2020-2024.



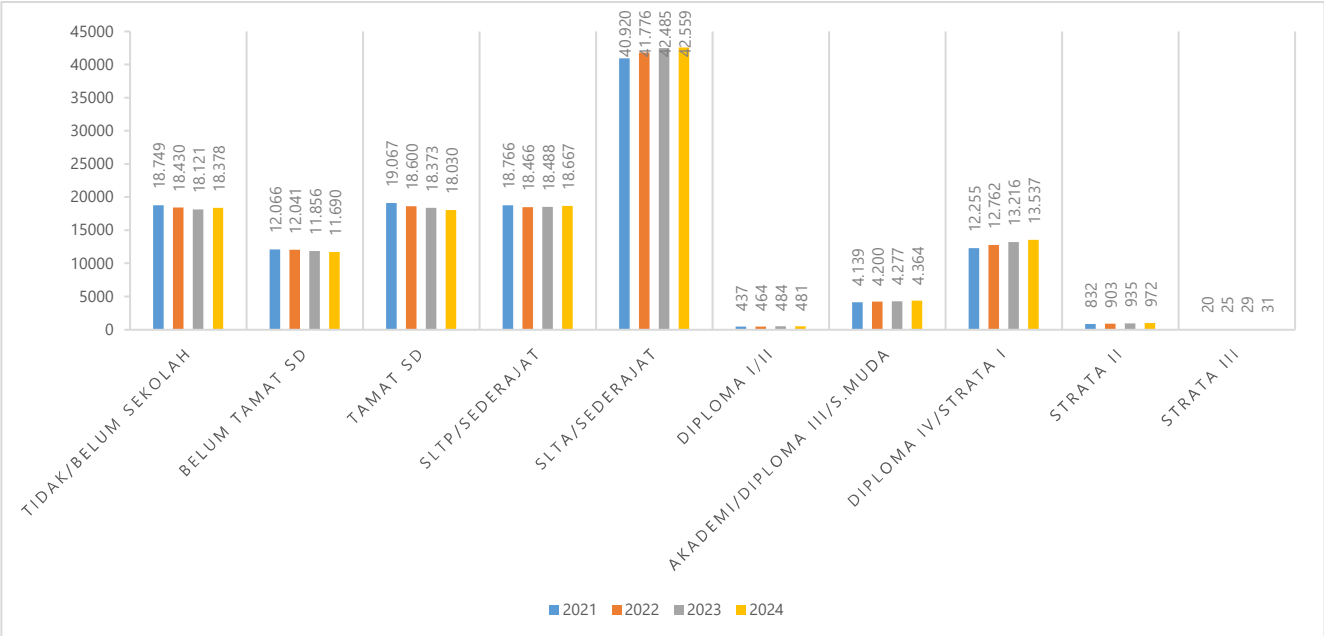
Gambar 2.31 Perkembangan Migrasi Masuk dan Keluar Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2025

Gambar 2.31 menunjukkan tren migrasi masuk (IMGR) dan migrasi keluar (OMGR) di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Kedua jenis migrasi mengalami peningkatan tajam pada tahun 2022, dengan migrasi masuk mencapai puncaknya di angka 22,53 dan migrasi keluar sebesar 21,92. Setelah itu, kedua angka menurun secara bertahap hingga 2024, masing-masing menjadi 17,24 dan 15,73. Selama lima tahun ini, angka migrasi masuk selalu lebih tinggi dibandingkan migrasi keluar, yang menunjukkan adanya daya tarik Kota Magelang sebagai tujuan migrasi. Kondisi ini dapat mencerminkan potensi ekonomi, kenyamanan hunian, atau akses pelayanan publik yang cukup baik sehingga mendorong pertumbuhan penduduk secara netto dari aspek migrasi.

2.1.1.8.4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Gambar 2.32 menunjukkan komposisi penduduk Kota Magelang berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2021 hingga 2024. Selama periode ini, kelompok terbanyak secara konsisten berada pada jenjang pendidikan SLTA/sederajat, yang pada 2024 mencapai 42.559 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk dengan pendidikan tidak atau belum sekolah masih cukup tinggi, yaitu 18.378 jiwa pada 2024. Pada jenjang pendidikan tinggi, jumlah lulusan Strata I meningkat stabil dari 12.255 jiwa (2021) menjadi 13.533 jiwa (2024), sedangkan lulusan Strata II dan III masih relatif sedikit.



Gambar 2.32 Penduduk berdasarkan Pendidikan di Kota Magelang Tahun 2024

Sumber: DKB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

Data ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi pendidikan dasar hingga menengah cukup kuat, masih terdapat tantangan dalam peningkatan akses atau keberlanjutan ke jenjang pendidikan tinggi. Jumlah penduduk yang belum sekolah juga menjadi perhatian dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu intervensi melalui program kejar paket, peningkatan literasi, dan akses pendidikan formal serta nonformal untuk mendukung inklusi pendidikan yang merata.

2.1.1.8.4.5 Proyeksi Demografi Kota Magelang

Berdasarkan Dokumen Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020-2035, jumlah penduduk Kota Magelang diperkirakan terus meningkat sepanjang periode 2025-2030. Namun, dalam periode yang sama, angka kelahiran total (TFR) dan angka kematian bayi (IMR) diprediksi mengalami penurunan. Sementara itu, rasio ketergantungan diproyeksikan meningkat hingga mencapai 46,73 pada tahun 2030, yang mencerminkan tantangan akibat fenomena *aging population*.

Tabel 2.27 Proyeksi Demografi Kota Magelang 2025-2030

Parameter	2025	2030
Penduduk		
Laki-laki	60.890	61.300
Perempuan	61.780	62.220
Total	122.670	123.510
Sex Ratio (%)	98,56	98,52
Komposisi Umur (%)		
0-14	18,18	17,55
15-64	70,34	68,15
65+	11,48	14,30
Penduduk Per Kecamatan		
Magelang Selatan	40.592	40.869
Magelang Tengah	44.640	44.945
Magelang Utara	37.439	37.695
Rasio Ketergantungan (%)	**42,16**	**46,73**
Total Fertility Rate (TFR)	**1,76**	**1,75**
Infran Mortality Rate (IMR)	**9,47**	**8,18**
Migrasi		
Migrasi netto	1,14	1,37
Perpindahan Penduduk Keluar Laki-laki	1.167,28	1.233,97
Perpindahan Penduduk Keluar Perempuan	1.274,04	1.328,15
Total Perpindahan Penduduk Keluar	**2.441,31**	**2.562,12**
Perpindahan Penduduk Masuk Laki-laki	1.728,03	1.959,67
Perpindahan Penduduk Masuk Perempuan	1.850,35	1.975,79
Total Perpindahan Penduduk Masuk	**3.578,39**	**3.935,47**

Sumber: Dokumen Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah 2035

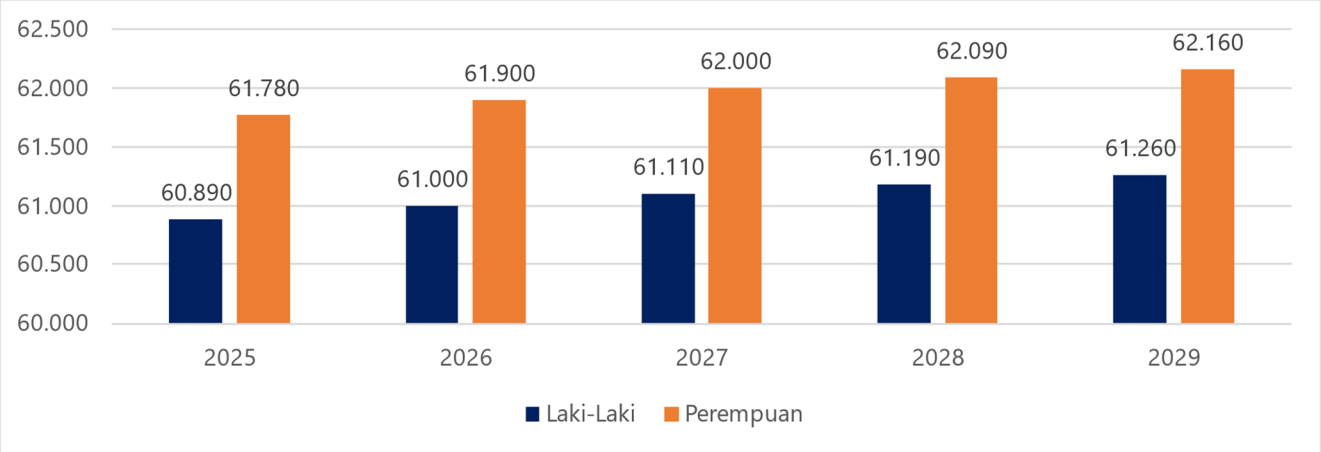
Berdasarkan hasil proyeksi migrasi, diketahui bahwa jumlah penduduk yang bermigrasi masuk ke Kota Magelang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang bermigrasi keluar, sebagaimana telah dijelaskan dalam aspek demografi. Ketimpangan ini dapat meningkatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan serta mengakses layanan publik lainnya. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk akibat migrasi masuk juga berpotensi memberikan tekanan lebih besar terhadap infrastruktur kota, termasuk perumahan, transportasi, dan fasilitas umum.

Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah migran masuk dapat menambah tenaga kerja yang tersedia, yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi, meskipun juga dapat memperketat persaingan di pasar kerja. Kehadiran migran muda dapat membantu mengimbangi fenomena *aging population*, tetapi sekaligus menuntut peningkatan akses layanan bagi lansia yang sudah ada.

Fenomena migrasi masuk yang lebih tinggi dibandingkan migrasi keluar di Kota Magelang memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam hal integrasi sosial, peningkatan kapasitas penduduk lokal, serta pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kota Magelang dapat memanfaatkan potensi migrasi sebagai pendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.1.8.4.6 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Magelang

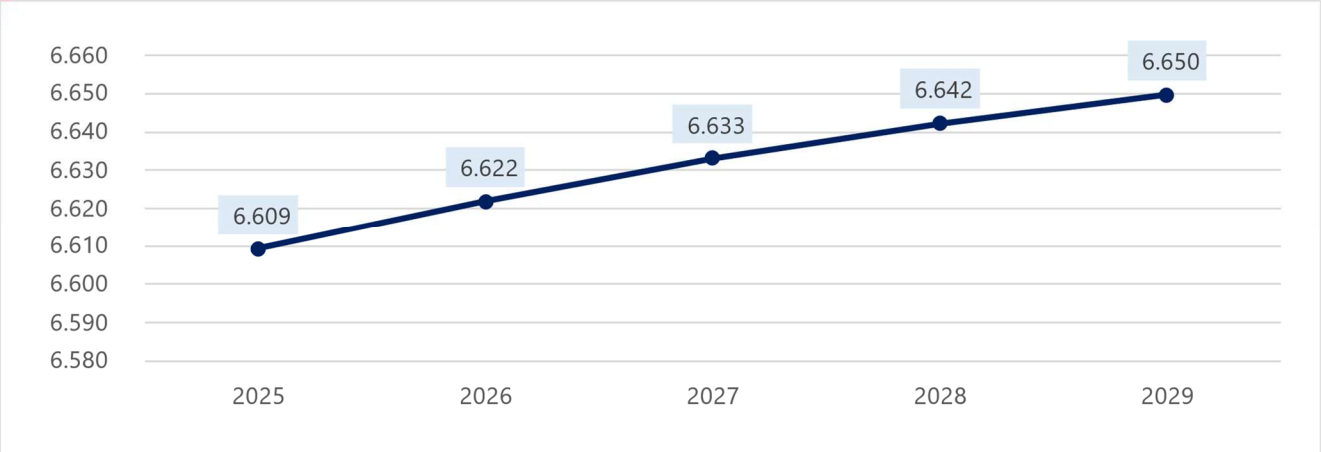
Proyeksi jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2025-2029 menunjukkan tren peningkatan dengan laju pertumbuhan sekitar 0,5% per tahun. Komposisi penduduk masih didominasi oleh perempuan, dan total populasi diperkirakan mencapai 123.420 jiwa pada tahun 2029 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.33 berikut.



Gambar 2.33 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen Proyeksi Penduduk Prov. Jawa Tengah 2035

Gambar 2.33 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk Kota Magelang berdasarkan jenis kelamin untuk periode 2025-2029. Selama lima tahun tersebut, jumlah penduduk perempuan diproyeksikan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan selisih sekitar 800-1.000 jiwa setiap tahunnya. Meskipun demikian, baik jumlah laki-laki maupun perempuan menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Proyeksi ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang moderat dan keseimbangan struktur demografis, yang penting untuk perencanaan kebijakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan berbasis gender.



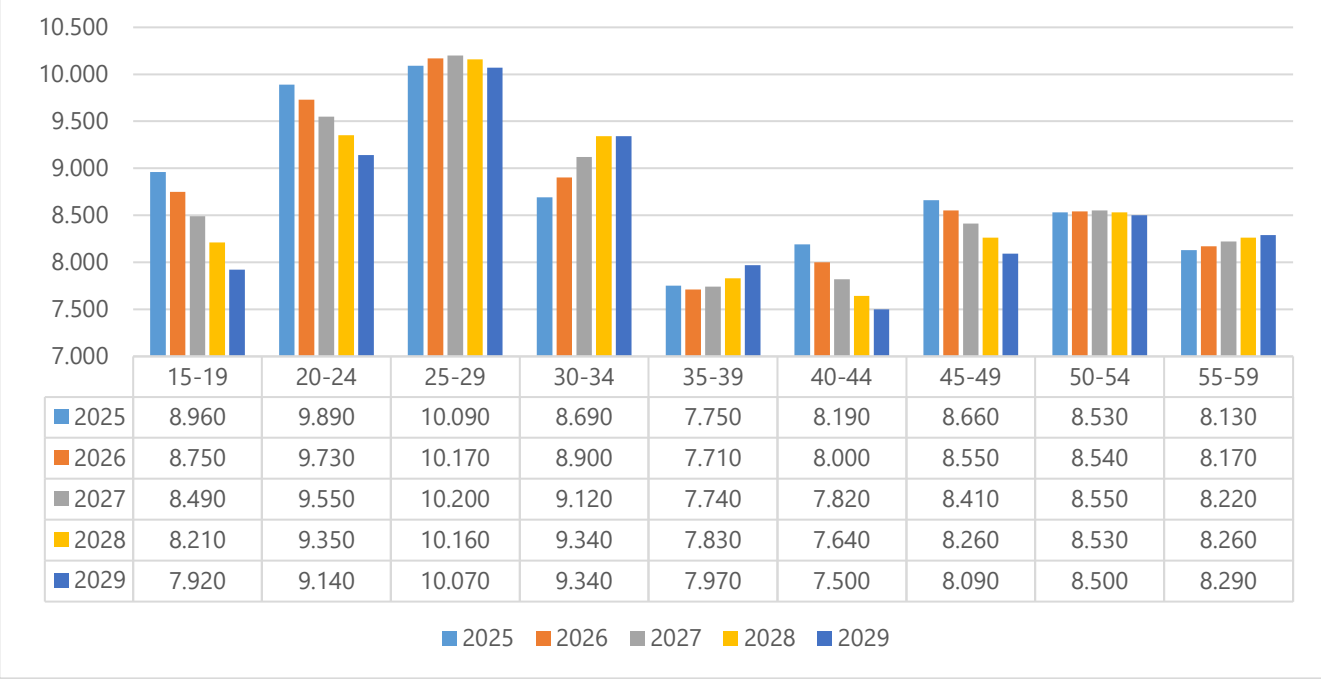
Gambar 2.34 Proyeksi Kepadatan Penduduk Netto (jiwa/km²) Kota Magelang Tahun 2025-2029

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kota Magelang, 2024

Gambar 2.34 menunjukkan proyeksi kepadatan penduduk netto Kota Magelang dari tahun 2025 hingga 2029, yang terus mengalami peningkatan dari 6.609 jiwa/km² pada 2025 menjadi 6.650 jiwa/km² pada 2029. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dalam wilayah yang memiliki keterbatasan lahan. Tren ini mengindikasikan pentingnya pengelolaan ruang kota yang efisien, pengendalian pertumbuhan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai untuk menjaga kualitas hidup masyarakat di tengah peningkatan kepadatan.

2.1.1.8.4.7 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kota Magelang

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.35, jumlah penduduk usia produktif di Kota Magelang diproyeksikan terus menurun hingga tahun 2029, dengan penurunan sekitar 2.000 jiwa (3%). Tren ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peningkatan usia rata-rata penduduk, penurunan angka kelahiran, dan bertambahnya jumlah penduduk yang memasuki usia pensiun. Penurunan jumlah usia produktif dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama karena berkurangnya tenaga kerja yang tersedia, yang berpotensi memengaruhi produktivitas serta laju pertumbuhan ekonomi.



	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59
2025	8.960	9.890	10.090	8.690	7.750	8.190	8.660	8.530	8.130
2026	8.750	9.730	10.170	8.900	7.710	8.000	8.550	8.540	8.170
2027	8.490	9.550	10.200	9.120	7.740	7.820	8.410	8.550	8.220
2028	8.210	9.350	10.160	9.340	7.830	7.640	8.260	8.530	8.260
2029	7.920	9.140	10.070	9.340	7.970	7.500	8.090	8.500	8.290

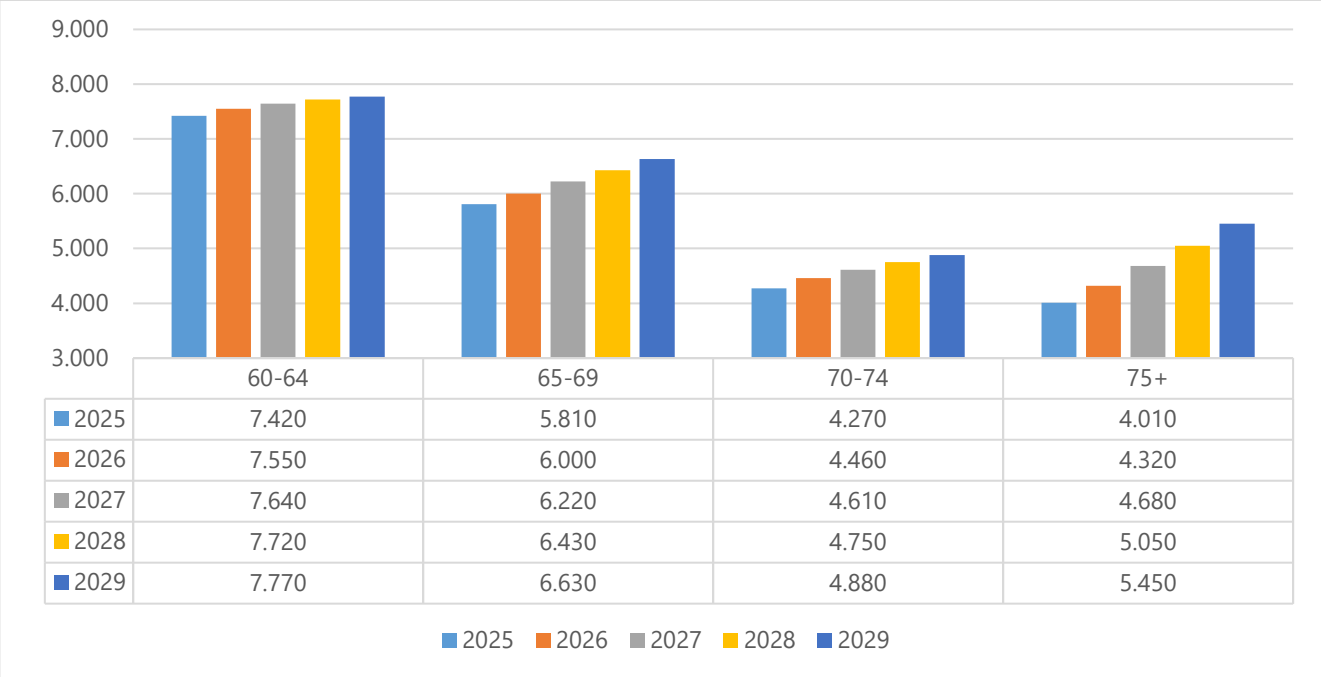
Gambar 2.35 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029 (jiwa)

Sumber: Dokumen Proyeksi Penduduk Prov. Jawa Tengah 2035

Gambar 2.35 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Kota Magelang untuk periode 2025-2029. Data menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk di hampir semua kelompok usia produktif dari tahun ke tahun, terutama pada kelompok usia muda (15-24 tahun). Penurunan ini mengindikasikan tantangan ke depan dalam ketersediaan tenaga kerja dan keberlanjutan produktivitas daerah, sehingga perlu diantisipasi dengan strategi peningkatan kualitas SDM, inovasi ekonomi, serta optimalisasi angkatan kerja yang ada.

2.1.1.8.4.8 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kota Magelang

Proyeksi pertumbuhan penduduk lansia menjadi isu krusial di berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesejahteraan, dan pelayanan sosial. Data pada Gambar 2.36 di bawah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Kota Magelang akan terus meningkat sepanjang periode 2025-2029, dengan kelompok usia 60-64 tahun sebagai yang terbanyak.



	60-64	65-69	70-74	75+
2025	7.420	5.810	4.270	4.010
2026	7.550	6.000	4.460	4.320
2027	7.640	6.220	4.610	4.680
2028	7.720	6.430	4.750	5.050
2029	7.770	6.630	4.880	5.450

Gambar 2.36 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Tahun 2025-2029

Sumber: Dokumen Proyeksi Penduduk Prov. Jawa Tengah 2035

Tren ini mencerminkan fenomena "*aging population*", yang dipicu oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, serta berkurangnya angka kelahiran. Seiring dengan bertambahnya jumlah lansia, diperlukan perencanaan yang matang dalam penyediaan layanan sosial, kesehatan, dan ekonomi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

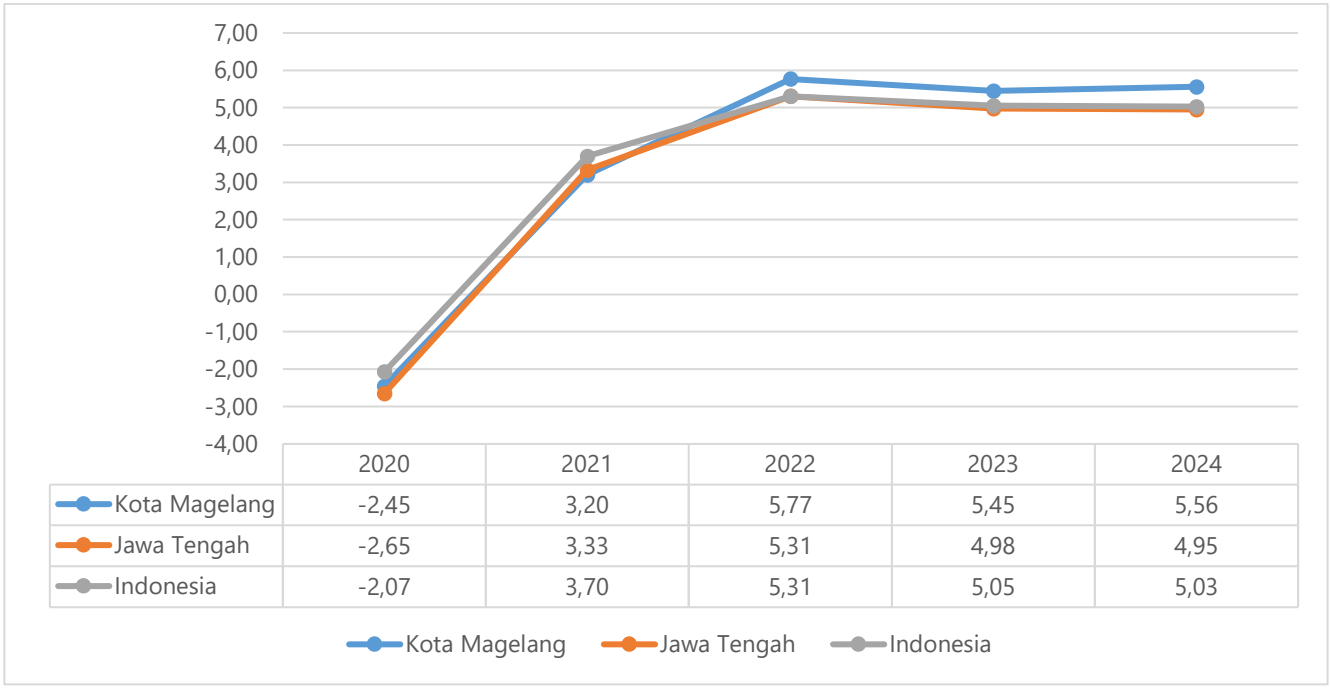
Aspek kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi dan sosial di Kota Magelang. Pembahasan akan dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu (1) kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dan (2) kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu. Perekonomian yang berkembang dengan baik berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini

dapat mendukung terciptanya lingkungan yang lebih kondusif bagi peningkatan kualitas hidup, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kemajuan sosial. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan dan stabilitas sosial.



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	-2,45	3,20	5,77	5,45	5,56
Jawa Tengah	-2,65	3,33	5,31	4,98	4,95
Indonesia	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Gambar 2.37 Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS, 2024; BPS Jawa Tengah, 2024; BPS Kota Magelang, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dalam periode 2020-2024 menunjukkan pola yang tidak stabil namun dengan kinerja yang relatif baik. Dampak pandemi Covid-19 yang melanda tidak hanya Kota Magelang tetapi juga nasional dan global menyebabkan anjloknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Meskipun mengalami kontraksi yang signifikan, perekonomian Kota Magelang mulai bangkit pada 2021-2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,77%. Namun, tren positif ini tidak bertahan lama, karena pada 2023 pertumbuhan ekonomi kembali melemah sebesar 0,32% menjadi 5,45% dan kembali menunjukkan tren positif pada 2024 tumbuh sebesar 0,11%. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Magelang pada tahun 2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari luar maupun dalam daerah. Faktor eksternal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi antara lain ketidakstabilan ekonomi makro. Dalam hal ini, perlambatan ekonomi nasional dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebesar 0,32% pada periode 2022-2023. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan ketidakstabilan sektor keuangan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, faktor internal meliputi minimnya investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Kurangnya keterampilan tenaga kerja serta rendahnya tingkat inovasi di sektor ekonomi juga menjadi tantangan bagi perkembangan daerah, karena dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan daya saing daerah dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.

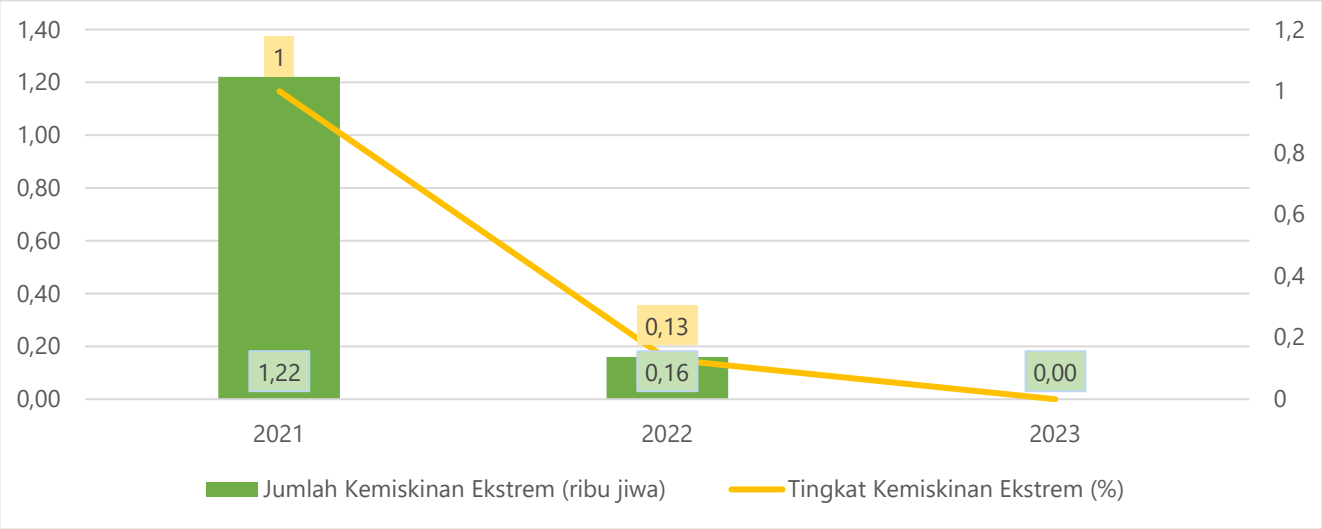
Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (5.03%) dan Provinsi Jawa Tengah (4.95%). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Magelang seiring dengan meningkatnya aktivitas pada beberapa lapangan usaha. Laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, kewirausahaan serta faktor-faktor politik, kelembagaan, sosial, dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, yang tantangan utama adalah menjaga momentum pertumbuhan ini tetap berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Untuk itu, arah RPJMD 2025-2029 perlu difokuskan pada penguatan sektor produktif yang inklusif, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, terutama bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Dengan pendekatan ini, Kota Magelang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu membangun daya tahan dan keadilan sosial dalam jangka panjang.

2.1.2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan menganalisis tren kemiskinan, dapat diketahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan politik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan. Secara umum, tingkat kemiskinan suatu daerah diukur melalui jumlah serta persentase penduduk miskin, di mana penduduk miskin didefinisikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun langkah strategis dalam penyajian data kemiskinan ekstrem berbasis *time series* sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan pembangunan jangka menengah.

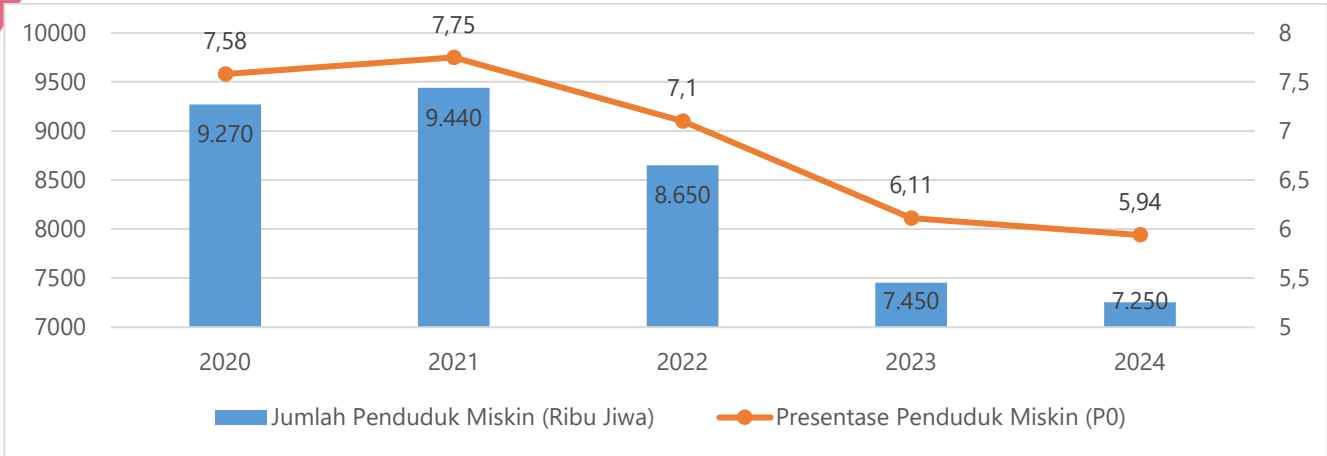


Gambar 2.38 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kota Magelang Tahun 2021-2023

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Meskipun data kemiskinan ekstrem tahun 2024 secara resmi masih dalam proses finalisasi oleh BPS, Kota Magelang telah melakukan koordinasi aktif dengan BPS setempat dan mengintegrasikan pendekatan pengidentifikasian kantong kemiskinan ekstrem dalam proses perumusan kebijakan RPJMD 2025-2029. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi kebijakan diarahkan pada kelompok masyarakat paling rentan secara lebih presisi dan terukur.

Jumlah penduduk miskin tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 2.42.

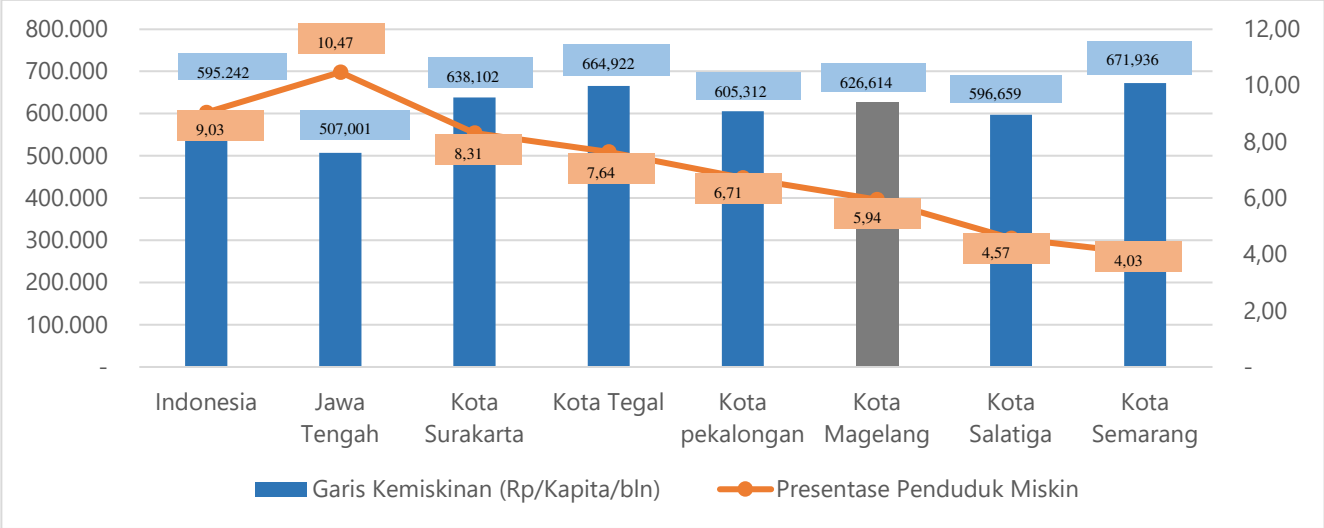


Gambar 2.39 Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Gambar 2.39, jumlah penduduk miskin di Kota Magelang mengalami tren penurunan selama periode 2020-2024, dengan total penurunan mencapai 1,64%. Penurunan ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang hanya turun sebesar 0,94% serta tingkat nasional yang mengalami penurunan sebesar 0,75% dalam periode yang sama. Sejalan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan di Kota Magelang juga menunjukkan penurunan sebesar 2,68% dalam kurun waktu tersebut.

Perbandingan tingkat kemiskinan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah tersaji pada Gambar 2.40.



Gambar 2.40 Perbandingan Indikator Kemiskinan Kota Magelang dengan Nasional dan Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kota Magelang menempati peringkat keempat sebagai daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi setelah Kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Surakarta. Sementara itu, dalam hal persentase penduduk miskin, Kota Magelang berada di posisi keempat setelah Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengentasan kemiskinan yang selaras dengan upaya pengendalian inflasi garis kemiskinan. Hal ini penting karena apabila inflasi garis kemiskinan tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka jumlah serta persentase penduduk miskin berisiko mengalami kenaikan.

Kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan disajikan dalam Gambar 2.41 berikut ini.



Gambar 2.41 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskian Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) di Kota Magelang selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi, namun secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0,20% poin (Gambar 2.41). Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada periode 2020-2022, yaitu sebesar 0,65%. Namun, pada tahun 2023, indeks ini kembali meningkat sebesar 0,27% menjadi 0,74 dan pada 2024 naik sebesar 18% menjadi 0,92. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami kondisi yang lebih berat atau tingkat kemiskinan yang lebih dalam pada periode 2022-2024. Selain indeks kedalaman kemiskinan, perlu dilihat Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2). Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan juga memiliki interpretasi yang sama dengan indeks kedalaman, dimana semakin rendah nilai indeks justru menunjukkan arah yang lebih baik. Sebaliknya semakin tinggi indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2024, indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dari 0,74 menjadi 0,92. Pola penurunan indeks keparahan kemiskinan di Kota Magelang berbeda dengan pola indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah. Jawa Tengah mengalami penurunan dari 1,75 menjadi 1,64, sementara Nasional mengalami kenaikan dari 1,53 menjadi 1,92. Peningkatan indeks keparahan di Kota Magelang ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin sedikit membesar.

Kondisi di mana indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat, sementara jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan di Kota Magelang mengalami penurunan selama periode 2023-2024, mencerminkan situasi yang cukup kompleks. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsentrasi kemiskinan pada kelompok tertentu, yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan semakin dalam bagi kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan. Jika ditinjau lebih lanjut, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja mengalami kenaikan signifikan, dari 45,58 persen pada tahun 2022 menjadi 58,27 persen pada tahun 2023. Kondisi ini kemungkinan menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2).

Untuk memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan lima tahun ke depan, Kota Magelang akan mengimplementasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang mengacu pada Inpres No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020. Pendekatan ini menekankan perbaikan tata kelola kelembagaan dan basis data kemiskinan, penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), serta pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang bersifat kolaboratif dan multisektor. Strategi ini tidak hanya menargetkan penurunan angka statistik kemiskinan, tetapi juga mengintervensi dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan secara komprehensif.

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita digunakan untuk mengukur kesejahteraan rata-rata penduduk suatu daerah. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan akses ekonomi yang lebih besar, meskipun tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Nilai PDRB per kapita Kota Magelang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024, secara nominal terus mengalami kenaikan. Tabel 2.28 di bawah ini menunjukkan angka PDRB perkapita ADHB dan ADHK di Kota Magelang pada tahun 2020-2024.

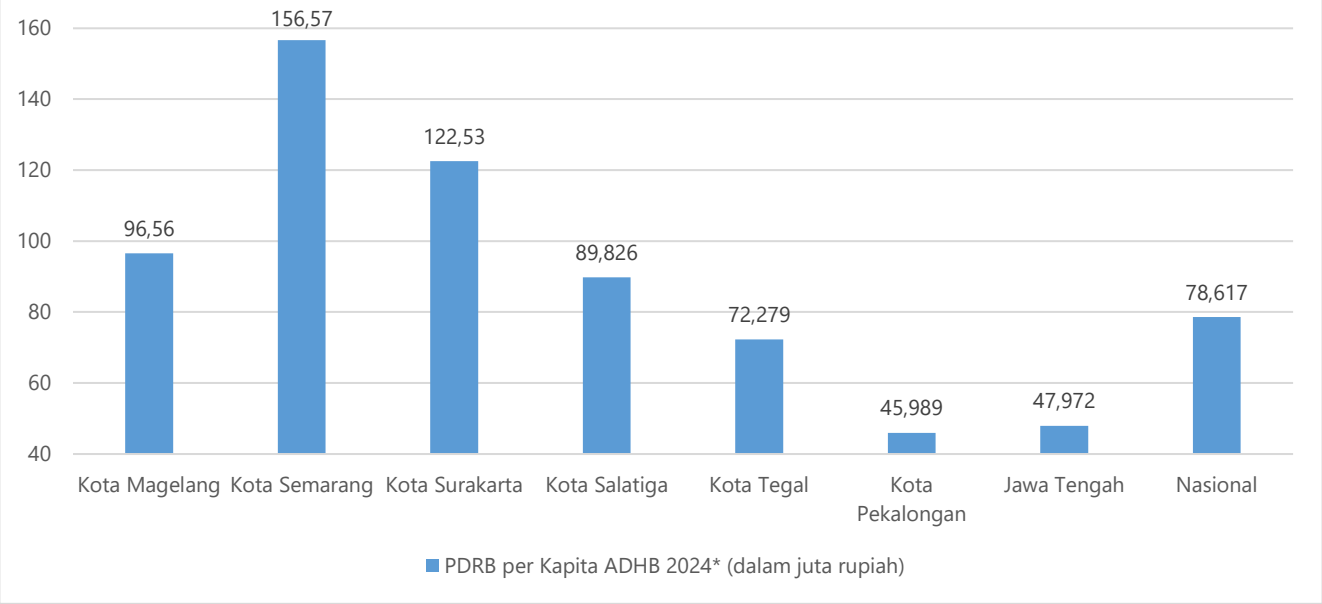
Tabel 2.28 PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per kapita ADHB (juta rupiah)	71,70	75,49	82,66	89.96*	96,56**
PDRB per kapita ADHK (juta rupiah)	51,94	53,58	56,53	59,48*	62,64**

**Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada perekonomian pada tahun 2024, nilai PDRB per kapita pada tahun 2024 juga meningkat dibanding dengan tahun 2023. Nilai PDRB per Kapita ADHB tercatat sebesar 96,56 juta rupiah, meningkat lebih dari 6 juta rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi sejalan dengan pulihnya aktivitas perekonomian dan juga disebabkan karena adanya faktor inflasi. Nilai PDRB per kapita secara riil (berdasarkan harga konstan 2010) selama periode 2020-2024 juga mengalami peningkatan. Tercatat nilai PDRB per kapita ADHK pada tahun 2020 sebesar 51,94 juta rupiah meningkat menjadi 62,64 juta rupiah pada tahun 2024.

Sementara itu, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Magelang (angka sangat sementara) sebesar Rp.96,56 juta per tahun) bila dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, menempati peringkat ke-3 terbesar di antara wilayah perkotaan se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang (Rp. 156,57 juta per tahun) dan Kota Surakarta (Rp. 122,53 juta per tahun). Gambar 2.42 di bawah ini menunjukkan perbandingan tersebut.



Gambar 2.42 Perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kota Magelang dengan Kota lain, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2024

**Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

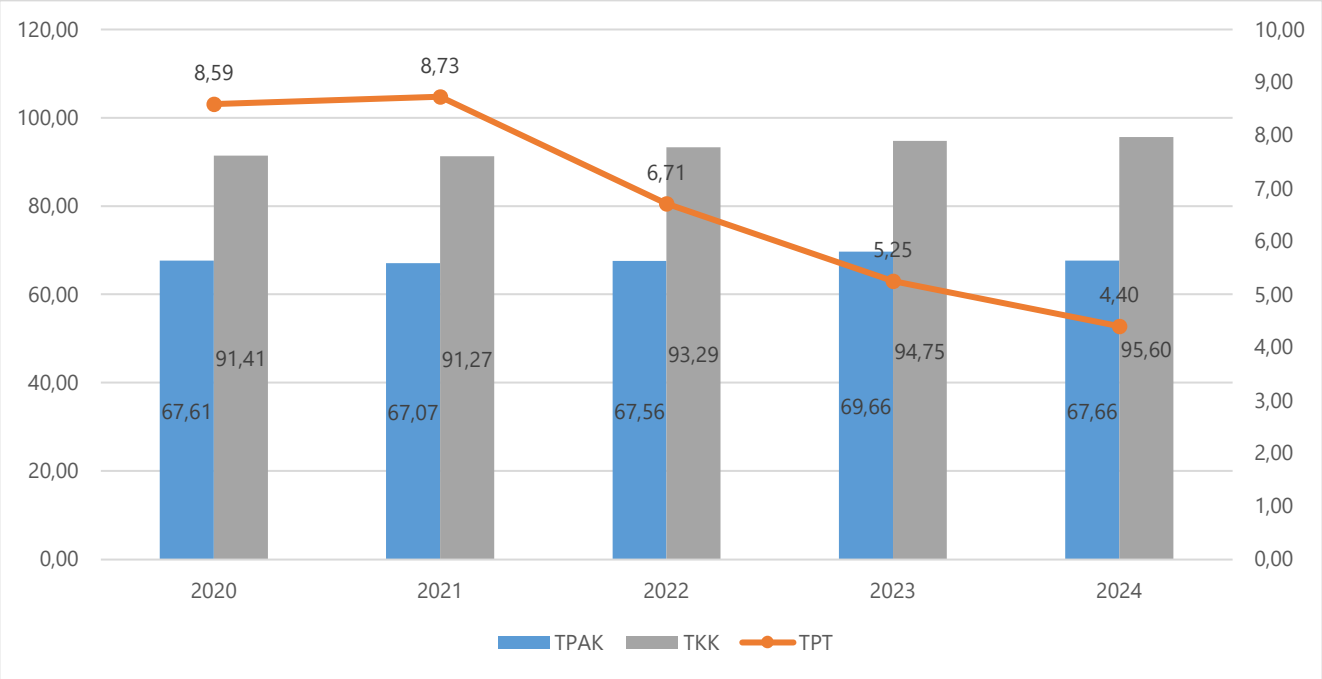
Gambar 2.42 menunjukkan Kota Magelang memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (47,97 juta) dan nasional (78,61 juta), namun masih di bawah Kota

Semarang (156,57 juta) dan Kota Surakarta (122,53 juta). Pencapaian ini menempatkan Kota Magelang di posisi menengah ke atas dalam konteks regional, dan menunjukkan adanya kekuatan ekonomi lokal yang cukup kompetitif.

Pertumbuhan PDRB per kapita serta posisi relatif Kota Magelang mencerminkan potensi peningkatan pendapatan daerah serta kemungkinan penurunan tingkat kemiskinan relatif akibat meningkatnya pendapatan rata-rata masyarakat. Meskipun PDRB per kapita Kota Magelang meningkat pada 2020-2024, tantangan pembangunan tetap ada. Kenaikan ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sehingga ketimpangan ekonomi dapat memburuk tanpa kebijakan distribusi yang adil. Selain itu, pertumbuhan industri dan konsumsi berisiko meningkatkan tekanan lingkungan, seperti polusi dan degradasi ekosistem. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi pembangunan yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.

2.1.2.1.4 Pengangguran

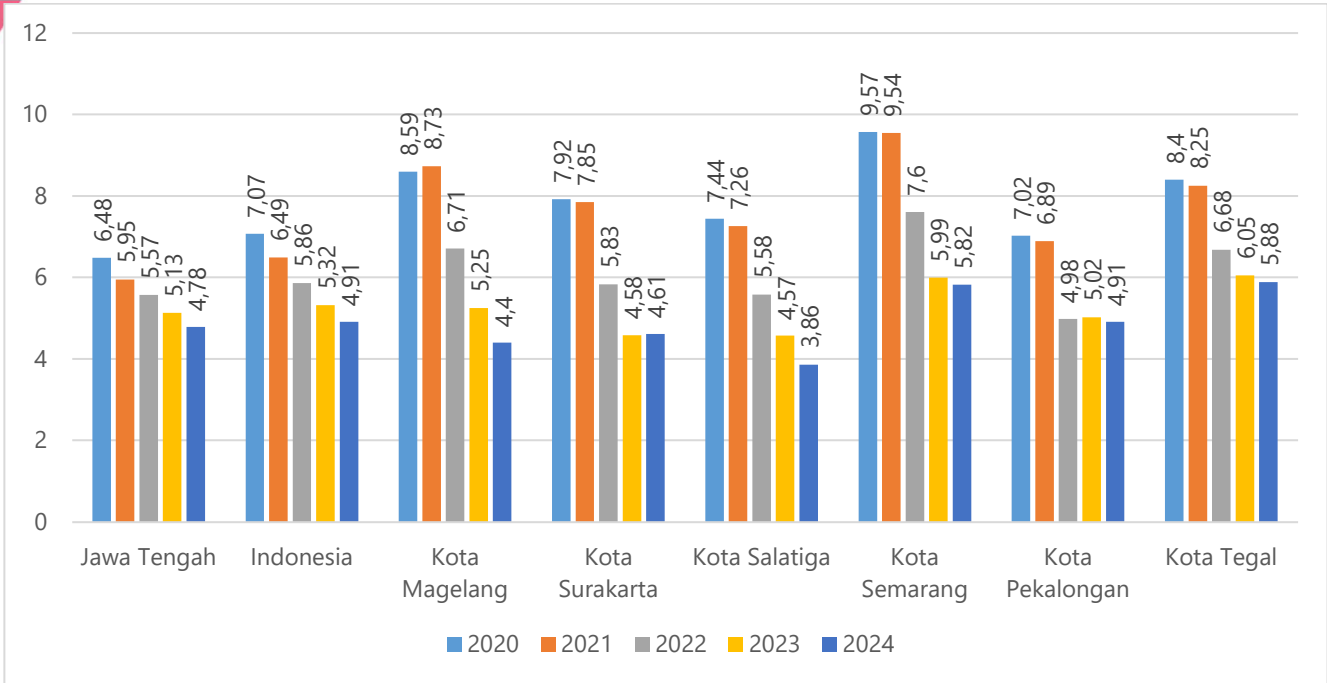
Situasi ketenagakerjaan di Kota Magelang menghadapi tantangan utama berupa masih adanya angka pengangguran serta terbatasnya peluang kerja yang tersedia. Salah satu faktor utama yang memicu permasalahan ini adalah pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Kota Magelang mencakup Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seperti dapat dilihat pada Gambar 2.43 di bawah ini.



Gambar 2.43 Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Magelang menunjukkan perbaikan pada tahun 2024, menurun menjadi 4,40 persen dari 5,25 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan serapan tenaga kerja, dengan angka TPT Kota Magelang pada 2024 yang lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah (4,78 persen) dan Nasional (4,91 persen). Untuk menjaga tren positif ini dan menurunkan TPT lebih lanjut, diperlukan langkah strategis seperti penciptaan lapangan kerja baru, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk memperluas kesempatan kerja yang berkualitas.



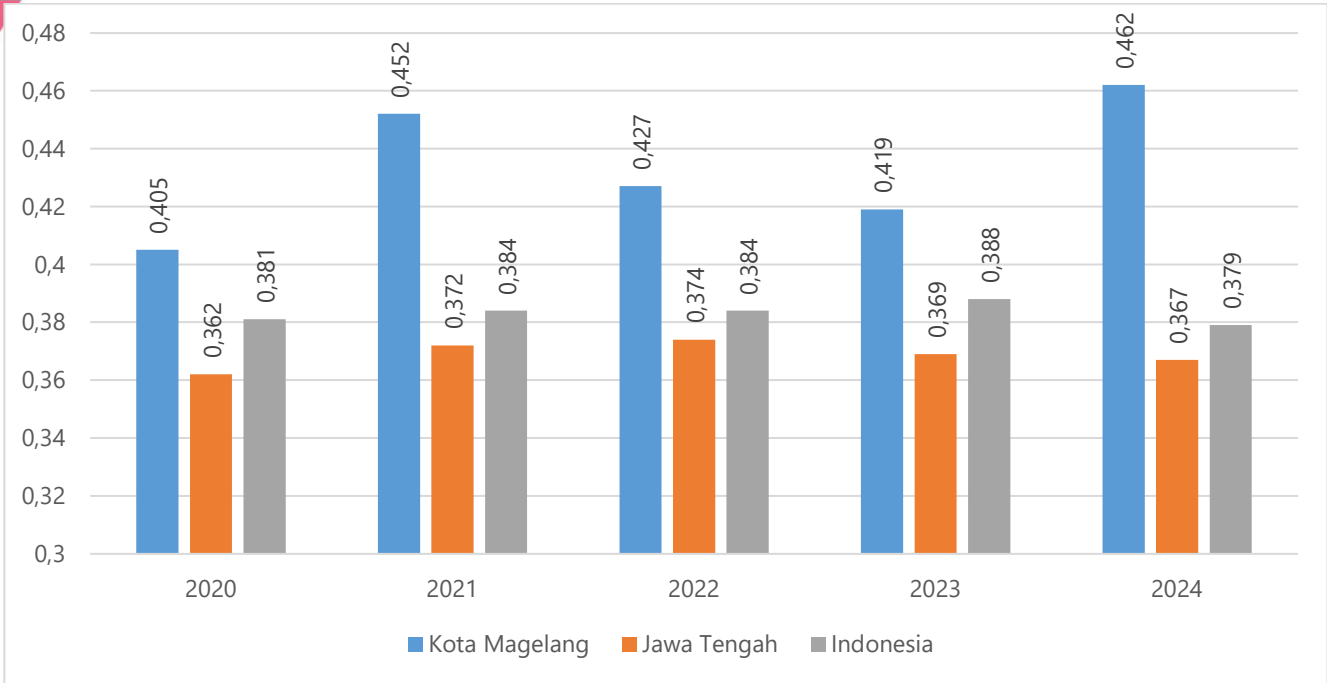
Gambar 2.44 Perbandingan TPAK Kota Magelang terhadap Kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja dapat memicu tingginya tingkat pengangguran, terutama karena peluang kerja yang sesuai dengan kualifikasi lulusan masih terbatas. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama bagi pembangunan Kota Magelang ke depan adalah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memperluas dan mendiversifikasi peluang kerja. Sejalan dengan arah pengembangan Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa, diperlukan peningkatan jumlah serta kualitas sekolah vokasi untuk mendukung transformasi tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta menjadi kunci dalam merancang program pelatihan kerja yang dapat meningkatkan keterampilan lulusan agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kota Magelang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengatasi tantangan pengangguran di masa mendatang.

2.1.2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan relatif, yaitu kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan menimbulkan ketimpangan sosial (Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Kota Magelang 2024, dalam BPS Kota Magelang). Selain itu, ketimpangan pendapatan juga mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam masyarakat. Untuk mengukur tingkat ketimpangan ini, digunakan Gini Ratio, yang memiliki nilai antara 0 hingga 1. Distribusi pendapatan di suatu daerah dianggap sangat timpang jika Gini Ratio berada dalam rentang 0,5 hingga 0,7, sedangkan distribusi yang lebih merata berkisar antara 0,2 hingga 0,35. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, Gini Ratio dalam rentang 0,36 hingga 0,49 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang.



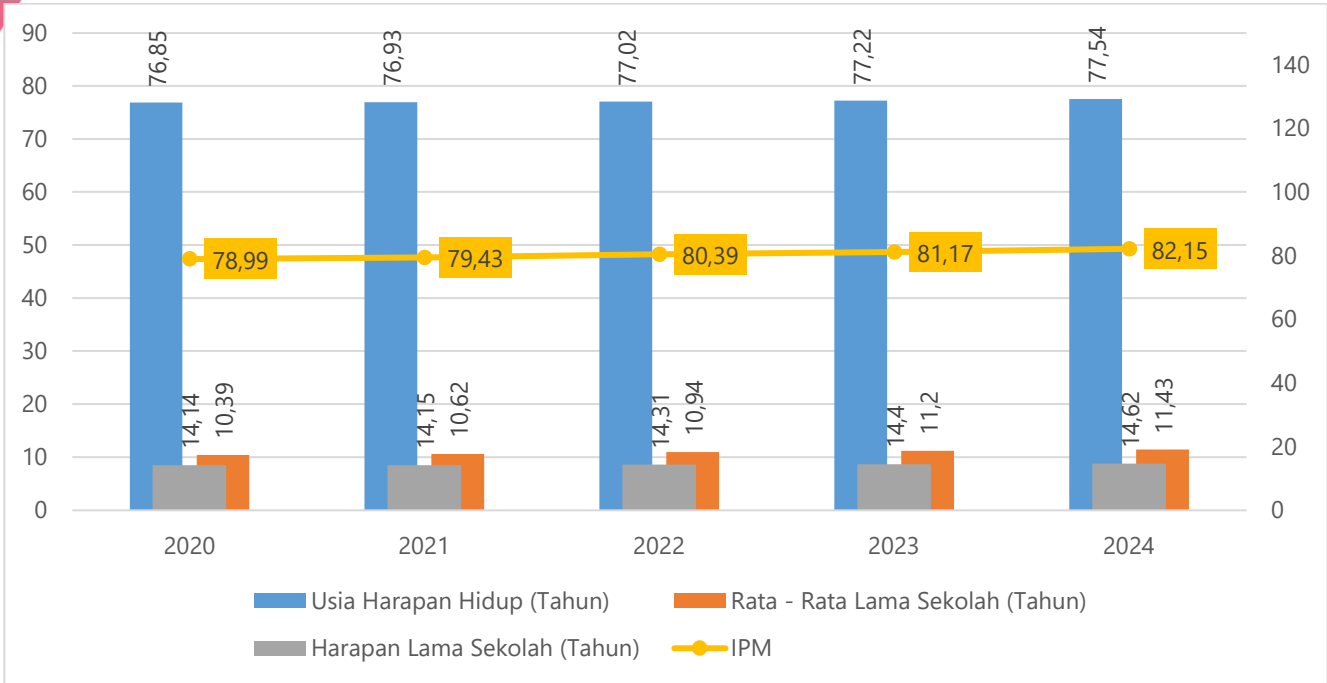
Gambar 2.45 Perbandingan Gini Ratio Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Mengacu pada Gambar 2.45, ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Magelang selama periode 2020-2024 termasuk dalam kategori sedang. Meskipun demikian, secara keseluruhan selama periode tersebut, Gini Ratio di Kota Magelang mengalami peningkatan sebesar 0.057 poin. Namun, dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi penurunan sebesar 0.033 poin. Selain itu, pada tahun 2024, Gini Ratio Kota Magelang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (0,367) dan tingkat nasional (0,379). Peningkatan Gini Ratio di Kota Magelang dapat menunjukkan semakin lebarnya ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di kalangan penduduknya. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.

2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

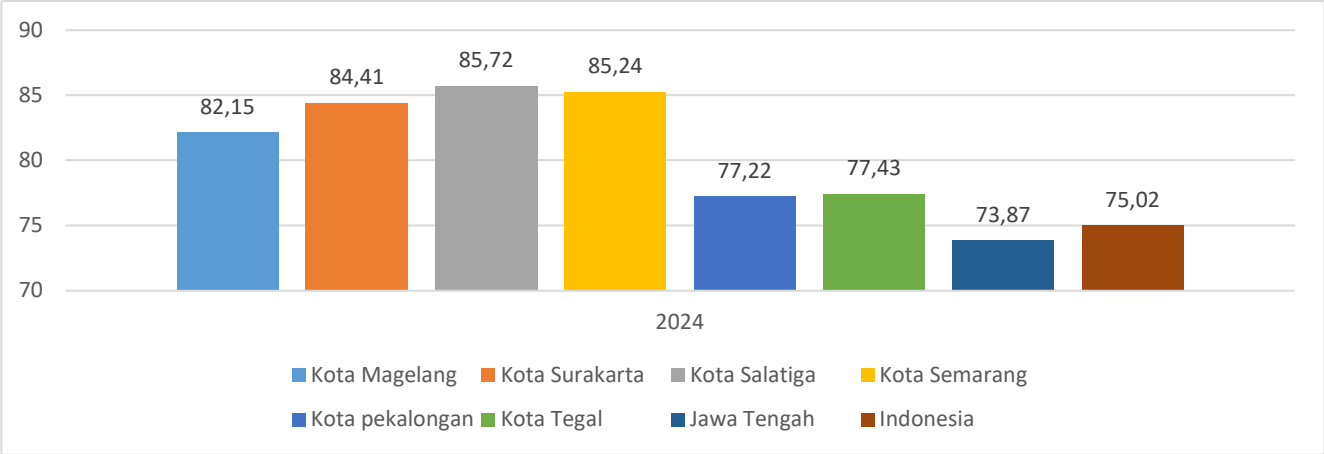
IPM Kota Magelang tercatat sebesar 82,15, mengalami peningkatan 0,98 poin atau tumbuh 1,21% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi capaian dan pertumbuhan, IPM Kota Magelang tahun 2024 (pertumbuhan 1,21%) tetap berada di atas IPM Jawa Tengah (pertumbuhan 0,65%) maupun IPM Nasional (pertumbuhan 0,85%). Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, laju pertumbuhan IPM Kota Magelang tahun 2024 secara umum lebih unggul. Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024), pertumbuhan IPM Kota Magelang mencapai 4,00%, yang merupakan angka tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Jawa Tengah serta melebihi pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan Nasional dalam periode yang sama.



Gambar 2.46 IPM Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Berdasarkan kategorinya, pembangunan manusia di Kota Magelang tahun 2024 telah mencapai tingkat "sangat tinggi," dengan IPM sebesar 82,15. Meskipun demikian, Kota Magelang tetap berada di peringkat keempat tertinggi di Jawa Tengah, berada di bawah Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta. Kenaikan IPM pada tahun ini, meski signifikan, belum cukup untuk mengubah posisi relatif Kota Magelang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, juga lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM nasional serta Provinsi Jawa Tengah seperti terlihat pada Gambar 2.47 di bawah ini.



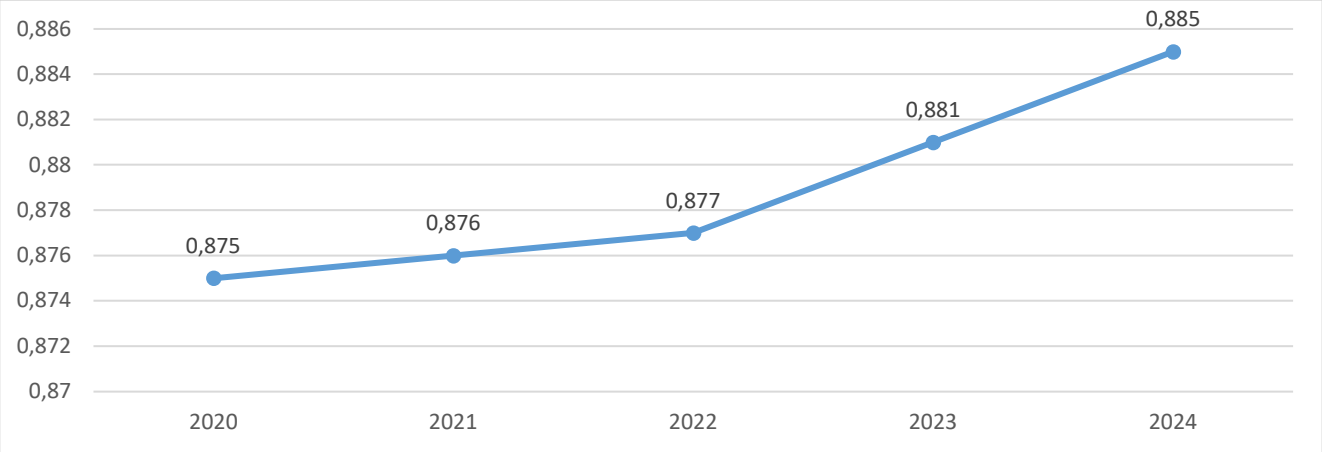
Gambar 2.47 IPM Nasional, Prov. Jateng, dan Kota-Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Indonesia; BPS Jawa Tengah, 2025, Datago Kota Magelang, 2025

Gambar 2.47 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 di berbagai kota di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional. Kota Salatiga mencatat IPM tertinggi sebesar 85,72, diikuti Kota Surakarta (84,41) dan Kota Magelang (82,15), yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (73,87) dan nasional (75,02). Kota Pekalongan, Tegal, dan Semarang mencatat IPM yang lebih rendah. Data ini mencerminkan bahwa Kota Magelang memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif baik, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, meskipun masih dapat ditingkatkan untuk menyamai kota-kota dengan IPM tertinggi.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Berdasarkan Gambar 2.48 di bawah ini, indeks kesehatan Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, berdasarkan data dalam Buku Saku Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, capaian rumah tangga sehat di Kota Magelang mencapai 96,96%. Sementara itu, Tabel 2.29 menunjukkan bahwa setiap indikator telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2023, sehingga cakupan pelayanannya telah mencapai 100%.



Gambar 2.48 Indeks Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Gambar 2.48 menunjukkan tren peningkatan Indeks Kesehatan Kota Magelang selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,875 dan terus mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 0,885 pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dari 0,877 menjadi 0,881, menandakan adanya perbaikan signifikan dalam aspek layanan kesehatan, angka harapan hidup, atau akses terhadap fasilitas kesehatan selama periode tersebut. Data ini mengindikasikan bahwa Kota Magelang mengalami perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan.

Tabel 2.29 Pelayanan Kesehatan terhadap Ibu Hamil, Melahirkan, dan Anak dan Lansia pada Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	95,53	100,00	100,00	100,00
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	134,32	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100,00	92,36	89,33	97,37	100,00
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	99,01	99,34	100,00	100,00
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	105,32	110,43	125,77	128,27
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia	72,00	100,00	92,37	100,00	100,00

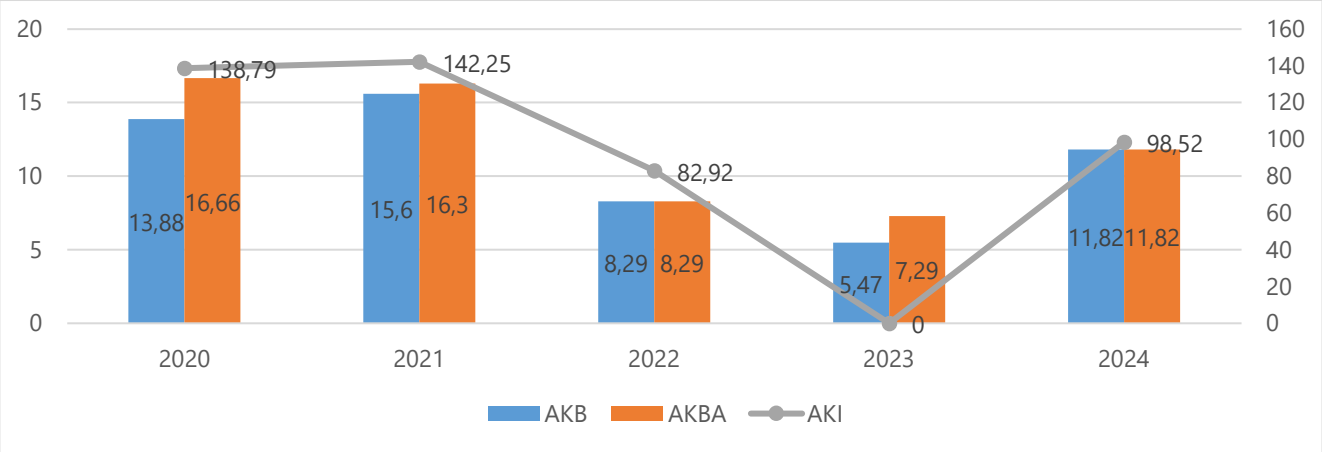
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Tabel 2.29 menunjukkan capaian pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, bersalin, bayi, balita, anak usia sekolah dasar, dan lansia di Kota Magelang selama tahun 2020-2024. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan perbaikan dan pencapaian maksimal (100%) pada tahun 2024. Beberapa indikator bahkan mencatat angka di atas 100%, seperti pelayanan persalinan dan pelayanan anak usia sekolah dasar, yang menunjukkan cakupan melebihi target sasaran atau mencakup wilayah tambahan. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ini mencerminkan efektivitas program layanan dasar kesehatan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan yang merata dan

berkelanjutan bagi kelompok rentan, termasuk ibu, anak, dan lansia. Peningkatan indeks kesehatan juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia secara keseluruhan.

2.1.2.2.1 Angka Kematian

Angka kematian merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kesehatan dan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah.



Gambar 2.49 Perkembangan AKB, AKABA, dan AKI Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang (AKB dan AKI); Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025 (AKABA)

Dari Gambar 2.49 nampak selama periode 2020-2024, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Magelang menunjukkan tren yang fluktuatif. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan tren fluktuatif: 138,79 (2020), meningkat menjadi 141,84 (2021), lalu menurun signifikan menjadi 82,92 (2022). Pada 2023, AKI mencapai 0, namun kembali meningkat menjadi 98,52 pada 2024. Penurunan AKI pada 2023 menjadi nol menunjukkan keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan bayi, tetapi lonjakan kembali pada 2024 mengindikasikan perlunya peningkatan strategi pencegahan. AKB tertinggi terjadi pada 2021 (15,60/1.000 KH), sementara terendah pada 2023 (5,47/1.000 KH). Pada 2024, AKB meningkat kembali menjadi 11,82/1.000 KH. Jumlah kasus kematian bayi menurun dari 20 kasus (2020) menjadi 6 kasus (2023), namun meningkat kembali menjadi 12 kasus pada 2024. Faktor risiko seperti persalinan prematur, asfiksia, dan infeksi neonatal masih menjadi penyebab utama kematian bayi.

AKB, AKABA juga menunjukkan fluktuasi. Angka tertinggi tercatat pada 2020 (16,66/1.000 KH) dan terendah pada 2022 (8,29/1.000 KH). Pada 2024, AKABA meningkat menjadi 11,82/1.000 KH. Jumlah kasus kematian balita menurun dari 24 kasus (2020) menjadi 8 kasus (2023), sebelum naik kembali menjadi 12 kasus pada 2024.

Di sisi lain, proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tren ini sejalan dengan target GDPK Nasional yang menetapkan AHH mencapai 77,5 tahun pada 2030. Bahkan, proyeksi AHH di Kota Magelang telah melampaui target tersebut, mengindikasikan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik.

Tabel 2.30 Proyeksi Indikator Kesehatan di Kota Magelang

Indikator Kesehatan	2025	2030
Indeks Kesehatan	0,88	0,881-0,885
Usia Harapan Hidup	77,1	77,25-77,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2021 dalam dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Magelang Tahun 2022-2036

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan keluarga berdasarkan berbagai indikator kesehatan. IKS mencakup aspek-aspek seperti prevalensi penyakit, kebiasaan merokok, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan ketersediaan sarana air bersih serta sanitasi.

Tabel 2.31 Indeks Keluarga Sehat Kota Magelang

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	Jawa Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	NA	0,31	0,39	0,41	0,41	0,25

Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2023 dan Data Go Kota Magelang

Berdasarkan data, IKS Kota Magelang menunjukkan peningkatan dari 0,31 pada tahun 2021 menjadi 0,41 pada tahun 2024. Namun demikian nilai IKS Kota Magelang masih tergolong dalam kategori Keluarga Tidak Sehat (nilai IKS < 0,5). Hal ini disebabkan oleh tingginya prevalensi rumah tangga dengan perokok yang masih di atas 30%, serta adanya penderita hipertensi, tuberkulosis (TB), dan gangguan jiwa. Selain itu, belum meratanya akses terhadap sarana air bersih dan fasilitas. Untuk meningkatkan indeks keluarga sehat, diperlukan strategi yang lebih terfokus, seperti penguatan program edukasi kesehatan keluarga, kampanye anti-merokok, peningkatan akses layanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis, serta percepatan pemerataan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendongkrak capaian indeks keluarga sehat di masa mendatang. buang air yang sehat juga memengaruhi angka kesehatan keluarga secara keseluruhan.

2.1.2.2.3 Penemuan dan Pengobatan Penyakit

Tabel 2.32 menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan penyakit di Kota Magelang pada tahun 2020-2024, diklasifikasikan berdasarkan penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular yang diidentifikasi adalah HIV, DBD, dan TBC.

Tabel 2.32 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit di Kota Magelang

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Cakupan Penemuan dan Pengobatan Penyakit Menular**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1a	Jumlah kasus penyakit menular (HIV, DBD dan TBC) yang diobati diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	296	170	314	308	295
1b	Jumlah kasus penyakit menular (HIV, DBD dan TBC) yang ditemukan dan dilaporkan diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	296	170	314	308	295
2	**Cakupan Penemuan dan Pengendalian Penyakit tidak menular**	**25,55%**	**33,88%**	**100%**	**100%**	**100%**
2a	Jumlah kasus penyakit tidak menular di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.577	14.030	20.887	49.882	39.148

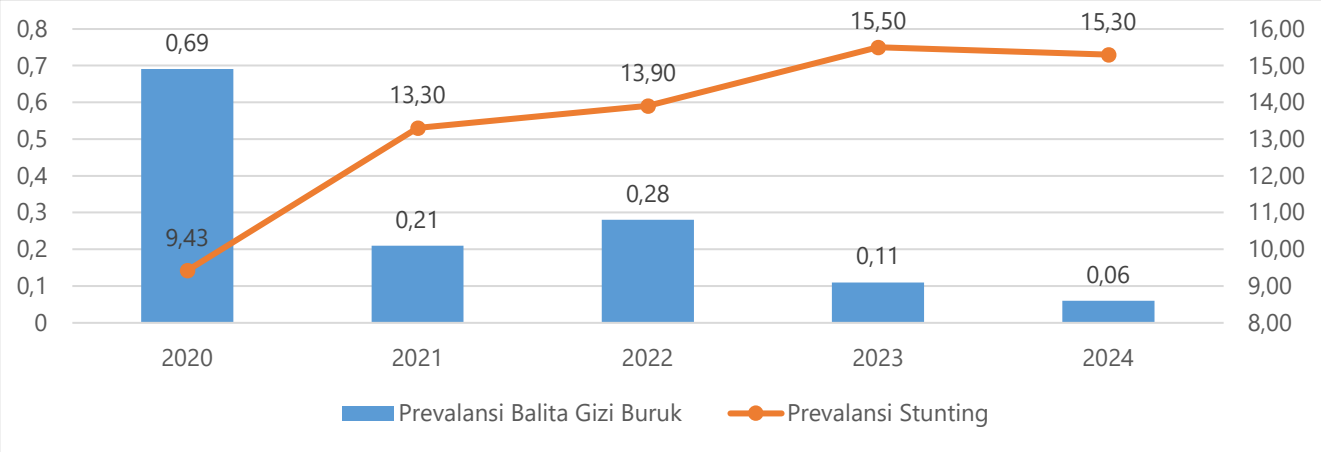
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2b	Jumlah Estimasi Penderita Penyakit Tidak Menular yang Berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota tahun yang sama	41.393	41.407	20.887	42.882	39.148

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.32, jumlah kasus penyakit tidak menular (PTM) menunjukkan penurunan dari 42.882 menjadi 39.148 kasus pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi karena cakupan penemuan dan pengendalian PTM telah mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, begitu pula dengan cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular. Capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan kesehatan, khususnya dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang berpotensi menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut di Kota Magelang.

2.1.2.2.4 Prevalensi Stunting

Selain tantangan terkait AKB, AKABA, dan AKI, permasalahan stunting serta pemenuhan gizi pada balita juga menjadi isu global yang harus diatasi di setiap daerah di Indonesia. Gambaran stunting sesuai dengan Gambar 2.50 di bawah ini.



Gambar 2.50 Prevalensi Stunting dan Gizi Buruk Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025; SSGI (data 2024)

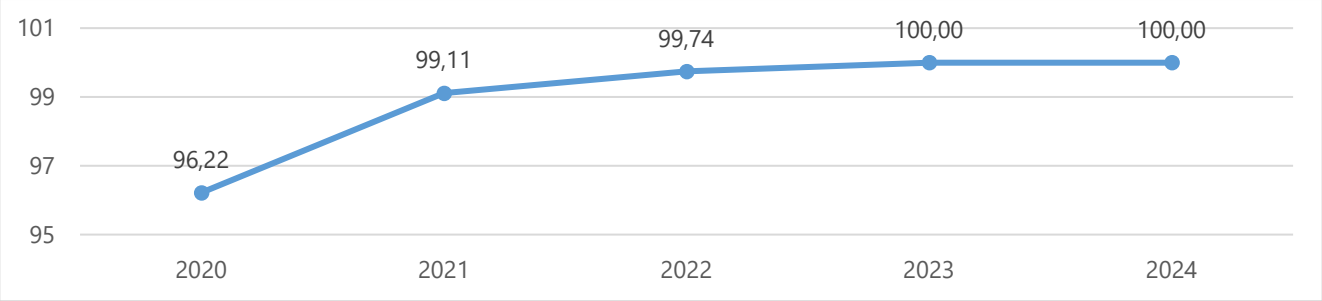
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kota Magelang mencapai 13,9%, mengalami kenaikan sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 13,3%. Pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 15,5% menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Namun, telah menunjukkan penurunan pada tahun 2024 di angka 15,3% (SSGI, 2024). Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk menangani permasalahan stunting. Sementara itu, prevalensi gizi buruk di Kota Magelang menunjukkan tren penurunan dalam periode 2022 hingga 2024, dari 0,28% menjadi 0,06%.

2.1.2.2.5 Jaminan Kesehatan

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat, Pemerintah Kota Magelang mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini merupakan skema jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk. Melalui sistem

jaminan kesehatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas.

Selain itu, JKN juga berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, perluasan jaringan rumah sakit dan tenaga medis, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Dengan demikian, program ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin kesehatan sebagai hak dasar setiap individu. Berikut adalah grafik yang menunjukkan persentase cakupan JKN di Kota Magelang pada periode 2020-2024.

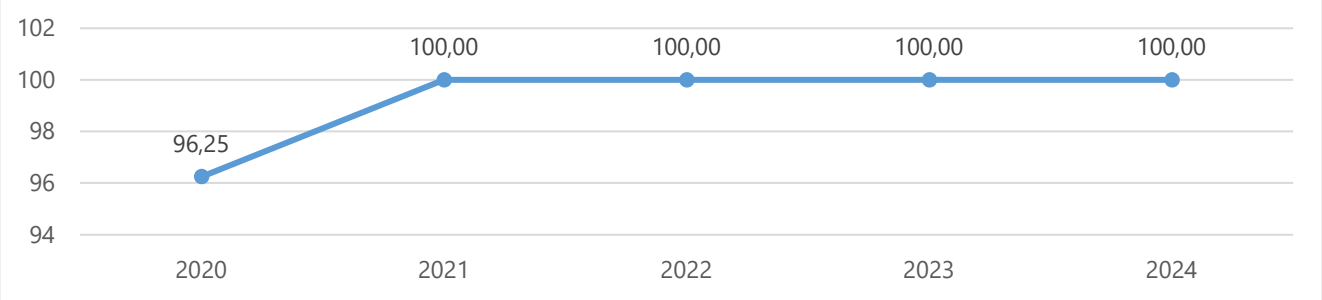


Gambar 2.51 Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Magelang 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2025

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Magelang menunjukkan tren yang cukup baik setiap tahunnya. Pada tahun 2020, cakupan JKN berada diangka 96,22%, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada periode 2023 dan 2024 mencapai angka 100%.

Tren ini mencerminkan bahwa secara umum, masyarakat Kota Magelang telah memperoleh akses jaminan kesehatan yang memadai, baik dari segi layanan fasilitas kesehatan maupun peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan. Proporsi peserta Jaminan Kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.52 berikut.



Gambar 2.52 Persentase Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

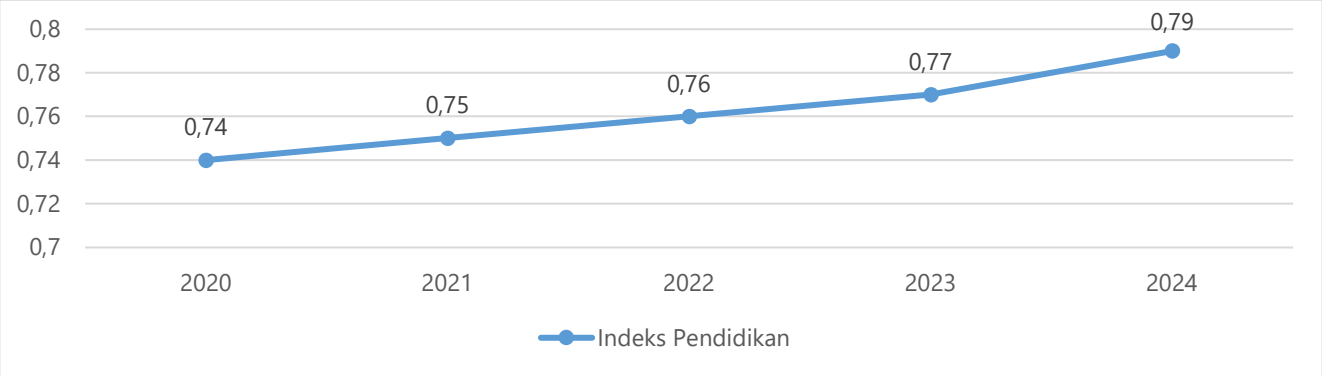
Sumber: Datago Kota Magelang

2.1.2.3 Pendidikan yang Berkualitas

Indeks pendidikan merupakan indikator untuk menilai kualitas dan tingkat pendidikan di suatu wilayah, mencakup aspek seperti tingkat partisipasi pendidikan, kualitas pengajaran, dan hasil belajar siswa. Indeks ini berperan dalam mengukur kemajuan pendidikan, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan sistem pendidikan.

Peningkatan indeks pendidikan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan grafik pada Gambar 2.53 di bawah ini, indeks pendidikan di Kota Magelang tercatat di angka 0,79 pada tahun 2024. Namun demikian sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal peningkatan partisipasi pendidikan maupun kualitas pembelajaran yang diberikan. Literasi dan Numerasi juga sangat berpengaruh terhadap indeks Pendidikan, semakin tinggi literasi dan numerasi seseorang, maka semakin tinggi pula indeks Pendidikan yang dimilikinya. Tercatat pada tahun

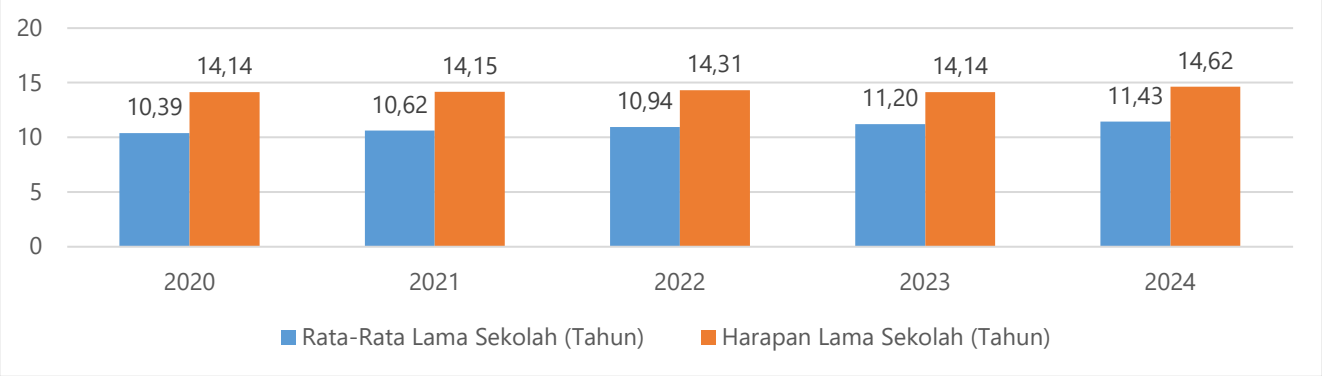
2024 presentase literasi membaca SD sebesar 78,28 dan literasi membaca SMP sebesar 86,9. Sedangkan presentase numerasi SD sebesar 90,29 dan numerasi SMP sebesar 94,23.



Gambar 2.53 Indeks Pendidikan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Capaian Kinerja RPJMD 2021-2026

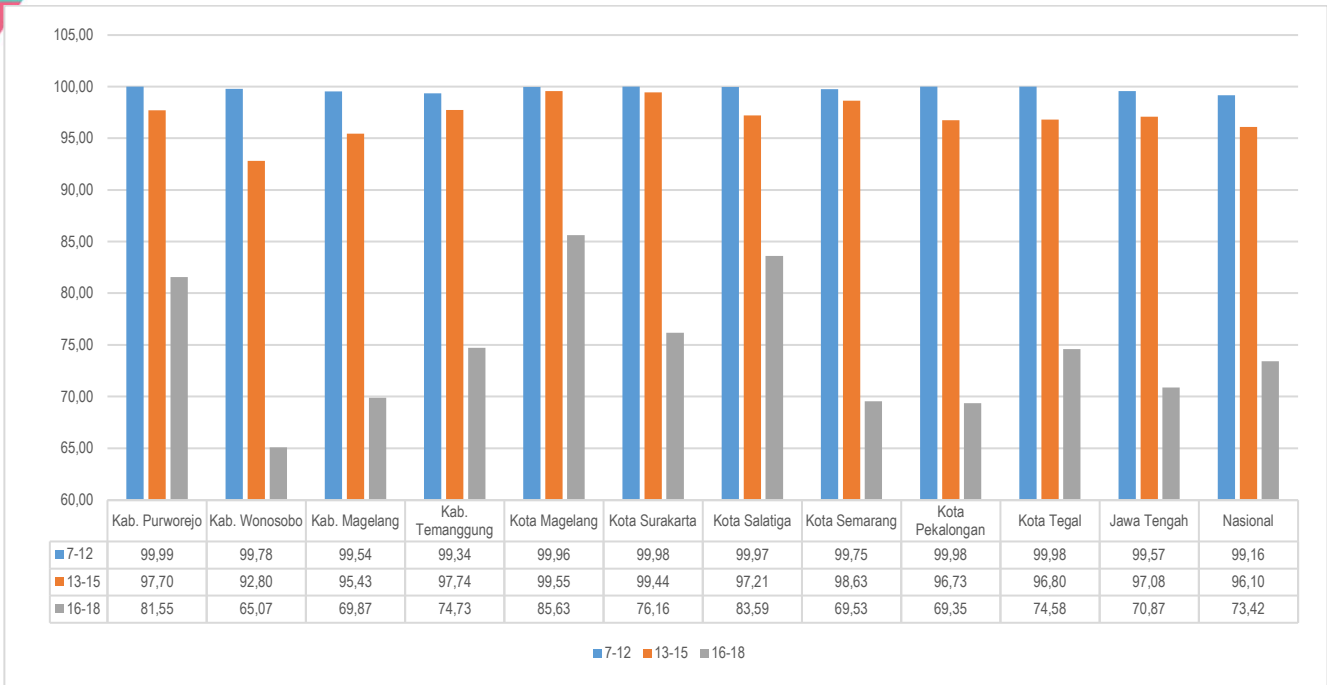
Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2024, Harapan Lama Sekolah di Kota Magelang tercatat sebesar 14,62 tahun, melampaui angka nasional yang berada di 13,21 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Magelang juga telah melampaui rata-rata nasional, dengan angka 11,43 tahun dibandingkan 8,85 tahun secara nasional seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.54 berikut.



Gambar 2.54 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Datago Kota Magelang 2025

Data pada Gambar 2.54 menunjukkan komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, rata-rata penduduk Kota Magelang menempuh hampir 11 tahun pendidikan formal.



	Kab. Purworejo	Kab. Wonosobo	Kab. Magelang	Kab. Temanggung	Kota Magelang	Kota Surakarta	Kota Salatiga	Kota Semarang	Kota Pekalongan	Kota Tegal	Jawa Tengah	Nasional
7-12	99,99	99,78	99,54	99,34	99,96	99,98	99,97	99,75	99,98	99,98	99,57	99,16
13-15	97,70	92,80	95,43	97,74	99,55	99,44	97,21	98,63	96,73	96,80	97,08	96,10
16-18	81,55	65,07	69,87	74,73	85,63	76,16	83,59	69,53	69,35	74,58	70,87	73,42

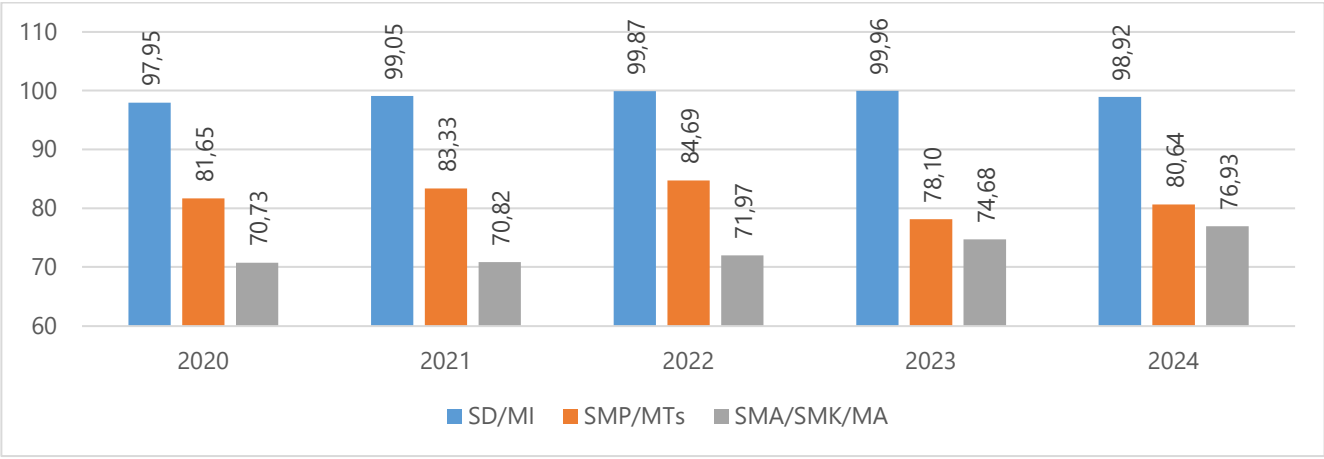
Gambar 2.55 Perbandingan Angka Partisipasi Sekolah Kota Magelang dengan Daerah Lainnya, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.55 menunjukkan Angka partisipasi sekolah di Kota Magelang tahun 2023 menunjukkan capaian tinggi pada usia 7-15 tahun, dengan hampir seluruh anak mengakses pendidikan dasar dan menengah pertama.

Namun, tantangan muncul pada kelompok usia 16-18 tahun (setara SMA/SMK), di mana angka partisipasi menurun menjadi 85,63%. Meskipun masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (70,87%) dan nasional (73,42%), penurunan ini menunjukkan adanya potensi putus sekolah atau kendala akses di jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pendidikan di Kota Magelang, dengan mendorong program intervensi seperti beasiswa, pendidikan nonformal, atau penyediaan akses pendidikan kejuruan agar partisipasi pendidikan tetap terjaga hingga usia produktif.

Selanjutnya Gambaran Angka partisipasi Murni disajikan pada Gambar 2.56 berikut ini.



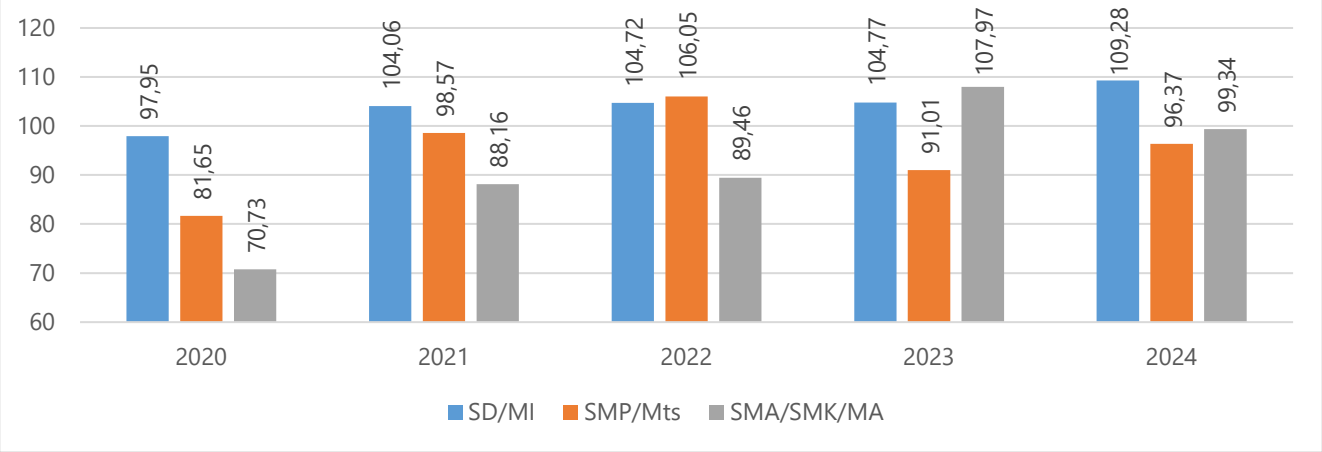
Gambar 2.56 Angka Partisipasi Murni Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Angka partisipasi murni di Kota Magelang tahun 2020-2024 menunjukkan akses pendidikan dasar (SD/MI) yang sangat tinggi dan stabil. Namun, partisipasi jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi, dan jenjang SMA/SMK/MA meskipun membaik, masih relatif rendah. Kondisi ini menandakan perlunya

penguatan intervensi pada pendidikan menengah agar keterlibatan siswa sesuai usia sekolah lebih optimal.

Disamping itu, Angka Partisipasi kasar juga menjadi informasi penting untuk kebijakan Pembangunan Pendidikan, disjaikan dalam Gambar 2.57 berikut.



Gambar 2.57 Angka Partisipasi Kasar Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Gambar 2.57 menunjukkan perkembangan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di Kota Magelang untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA selama tahun 2020-2024. Secara umum, seluruh jenjang menunjukkan tren peningkatan, terutama SMA/SMK/MA yang naik signifikan dari 70,73% (2020) menjadi 99,34% (2024). Pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs, APK bahkan melampaui 100% pada beberapa tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian siswa yang berusia lebih tua atau lebih muda juga mengikuti jenjang tersebut. Data ini mencerminkan keberhasilan Kota Magelang dalam memperluas akses pendidikan lintas usia, meskipun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pembelajaran.

Dalam konteks regional, perbandingan APM dan APK Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 2.33 di bawah ini.

Tabel 2.33 Perbandingan APM dan APK Kota Magelang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

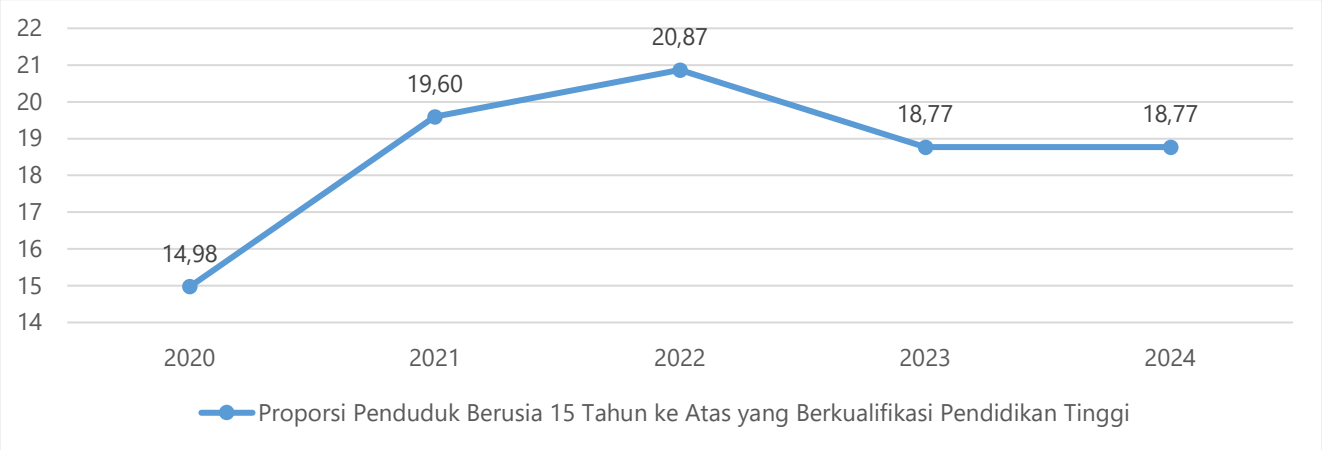
Indikator	Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
APM SD	99,96	90,69	91,81
APM SMP	78,10	80,45	79,35
APM SMA	74,68	62,27	68,87
APK SD	104,77	98,04	100,34
APK SMP	183,74	105,64	104,51
APK SMA	107,97	93,96	97,38

Sumber: https://publikasi.data.kemdikbud.go.id/upload/file/isi_12EC8B02-BE1D-4B08-B0D1- D55EA75FA4D3_.pdf

Tabel 2.33 menunjukkan bahwa Kota Magelang memiliki capaian pendidikan yang sangat baik pada tahun 2023, baik dari sisi Angka Partisipasi Murni (APM) maupun Angka Partisipasi Kasar (APK). APM SD mencapai 99,96%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah (90,69%) dan nasional (91,81%), yang mencerminkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar bersekolah sesuai usianya. Meskipun APM untuk jenjang SMP (78,10%) dan SMA (74,68%) lebih rendah dibanding APM SD, capaian tersebut tetap berada di atas APM SMA Jawa Tengah dan nasional, menandakan keberlanjutan pendidikan yang relatif terjaga hingga jenjang menengah.

Dari sisi APK, seluruh jenjang di Kota Magelang menunjukkan angka tinggi, terutama pada jenjang SMP yang mencapai 183,74%. Nilai di atas 100% mengindikasikan bahwa banyak siswa usia di luar kelompok usia ideal (baik lebih tua maupun lebih muda) yang juga menempuh pendidikan pada jenjang tersebut. Hal ini mencerminkan inklusivitas sistem pendidikan Kota Magelang dalam menjangkau kelompok usia yang lebih luas, sekaligus menunjukkan efektivitas dalam mengakomodasi pendidikan kejar paket atau siswa yang terlambat sekolah. Kombinasi APM dan APK yang tinggi memperlihatkan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan yang cukup baik di Kota Magelang.

Upaya untuk memperbesar proporsi penduduk dengan pendidikan tinggi menjadi sangat penting, karena kualitas angkatan kerja yang terbentuk akan berperan langsung dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing Kota Magelang. Pendidikan tinggi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu, tetapi juga mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih kompleks dan berkelanjutan, selain itu Pemerintah Kota Magelang perlu memahami tren pendidikan secara lebih mendalam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Langkah-langkah strategis, seperti peningkatan akses ke perguruan tinggi, penyediaan beasiswa, serta penguatan kualitas institusi pendidikan tinggi, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi di Kota Magelang.



Gambar 2.58 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Proyeksi pendidikan di Kota Magelang menunjukkan tren positif dalam partisipasi sekolah, yang selaras dengan target GDPK Nasional, tersaji dalam Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34 Proyeksi Penduduk Kota Magelang menurut Angka Partisipasi Sekolah

Indikator Pendidikan	2022	2025	2030
APK PAUD	92	98	100
APK SD	100	100	100
APK SMP	100	100	100
APM SD	100	100	100
APM SMP	100	100	100
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,50	10,65	11 - 13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,75	15,50	16 - 18

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2021 dalam Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Magelang Tahun 2022-2036

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD dan SMP diperkirakan mencapai 100 persen (Tabel 2.34), mencerminkan keberhasilan dalam memastikan bahwa anak-anak bersekolah sesuai dengan jenjang usianya. Selain itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga diproyeksikan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2030, menandakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak usia dini.

Indikator lain yang menunjukkan perkembangan pendidikan di Kota Magelang adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang diperkirakan meningkat dari 10,5 tahun pada 2022 menjadi 11-13 tahun pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas atau bahkan pendidikan tinggi. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga diproyeksikan meningkat dari 14,75 tahun pada 2022 menjadi 16-18 tahun pada 2030, yang mencerminkan ekspektasi lama sekolah yang lebih tinggi bagi generasi mendatang.

Tren ini menunjukkan bahwa Kota Magelang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program strategis. Namun, tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta kesiapan infrastruktur pendidikan tetap perlu diperhatikan agar proyeksi ini dapat terealisasi secara optimal. Kualitas pembelajaran direpresentasikan dalam Persentase Siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang), tersaji pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35 Persentase Siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang) Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi membaca SD/sederajat	NA	66,35	69,54	78,28	78,55
Literasi membaca SMP/sederajat	NA	79,43	81,22	86,9	88,27
Numerasi SD/Sederajat	NA	44,13	50,39	58,72	64,95
Numerasi SMP/Sederajat	NA	79,90	81,37	74,98	75,01

Sumber: Database Kemendikbud (Rapor Pendidikan) Kota Magelang, 2024 (data sampai 2023); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

Tabel 2.35 menunjukkan tren peningkatan persentase siswa Kota Magelang yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) dalam literasi membaca dan numerasi pada asesmen tingkat nasional selama tahun 2021-2024. Untuk literasi membaca, capaian siswa SD meningkat dari 66,35% pada 2021 menjadi 78,55% pada 2024, sementara capaian siswa SMP juga naik dari 79,43% menjadi 88,27% pada periode yang sama. Dalam numerasi, peningkatan signifikan terjadi pada siswa SD dari 44,13% (2021) menjadi 64,95% (2024), sedangkan capaian siswa SMP relatif stabil di kisaran 75-81%. Data ini mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran dasar dan menengah di Kota Magelang terus membaik, terutama dalam aspek kemampuan literasi dan numerasi yang menjadi fondasi penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan.

Pencapaian yang terlihat pada Tabel 2.35 menunjukkan bahwa Kota Magelang telah berhasil membangun lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, diperlukan upaya berkelanjutan, seperti penguatan metode pengajaran berbasis kompetensi, peningkatan fasilitas pendidikan, serta pengembangan program intervensi bagi siswa yang masih memerlukan dukungan tambahan dalam literasi dan numerasi.

2.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan kemajuan literasi masyarakat di suatu daerah. Kota Magelang menunjukkan capaian yang sangat baik dalam hal literasi masyarakat, dengan IPLM mencapai 93,11 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi

100,00 pada tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa akses terhadap pendidikan, informasi, dan kegiatan literasi di Kota Magelang tetap kuat dan berkualitas.

Keberhasilan ini mencerminkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan akses informasi. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, perbedaan yang signifikan terlihat dalam capaian IPLM. Pada tahun 2022, IPLM Provinsi Jawa Tengah hanya mencapai 74,36. Penurunan menjadi 64,40 pada tahun 2023, untuk kemudian meningkat kembali ke 70,57 di tahun 2024 (sesuai data Perpusnas pada https://be-satudata.perpusnas.go.id) .

Penurunan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan literasi masih cukup besar di tingkat provinsi, sementara Kota Magelang berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat literasi masyarakat yang tinggi.

Ke depan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPLM dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti penguatan program literasi berbasis komunitas, penyediaan fasilitas literasi yang lebih luas, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi. Hal ini akan memastikan bahwa Kota Magelang terus menjadi contoh daerah dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan literasi masyarakat.

2.1.2.3.2 Indeks Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai daya saing suatu daerah, terutama dalam era digital saat ini. Kota Magelang mencatat nilai indeks sebesar 4,92 pada tahun 2023, yang mencerminkan tingkat adopsi TIK yang sangat tinggi dan maju. Untuk tahun 2022 dan 2024, tidak dihitung indeks pilar Adopsi TIK ini.

Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur digital, akses internet, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Magelang telah berupaya secara signifikan dalam meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.36 Indikator Indeks Pilar Adopsi TIK Tahun 2022-2024

Pilar/Indikator	2022	2023	2024
Indeks Pilar Adopsi TIK	3,70	4,92	4,90

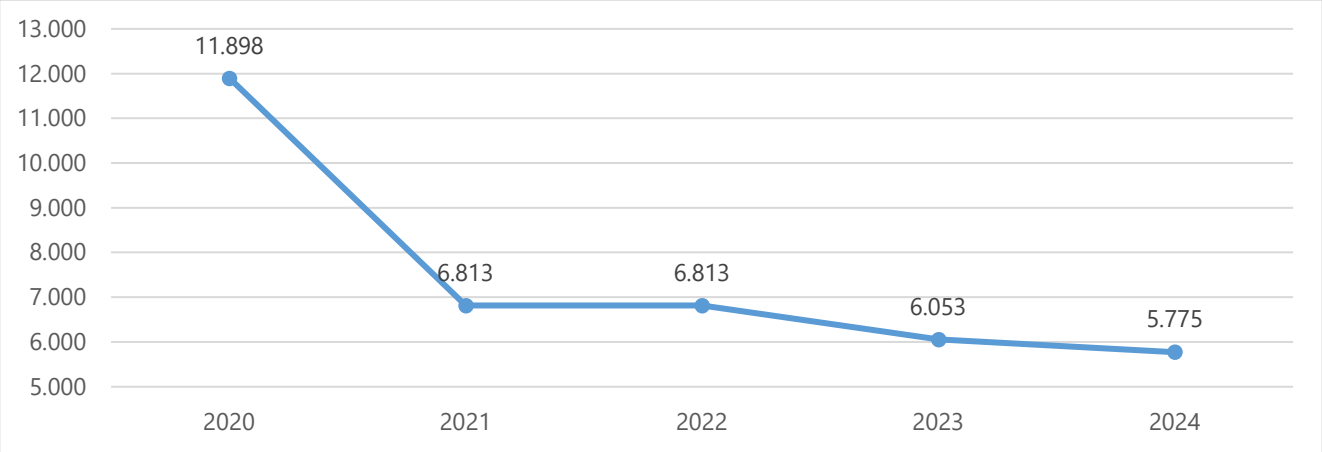
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Tabel 2.36 menunjukkan perkembangan Indeks Pilar Adopsi TIK di Kota Magelang selama periode 2022 hingga 2024. Terjadi peningkatan signifikan dari skor 3,70 pada tahun 2022 menjadi 4,92 di tahun 2023, menandakan lonjakan dalam pemanfaatan dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 4,90 pada tahun 2024, indeks tersebut tetap berada pada level tinggi dan menunjukkan kestabilan. Data ini mencerminkan bahwa Kota Magelang telah berhasil mempercepat adopsi TIK, baik dari sisi infrastruktur maupun penggunaannya, yang menjadi fondasi penting dalam transformasi digital daerah menuju tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih modern dan efisien.

Selanjutnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, Kota Magelang dapat terus mengembangkan ekosistem digital yang inklusif, memperluas jangkauan internet ke seluruh wilayah, serta mendorong literasi digital di kalangan masyarakat. Langkah-langkah ini akan semakin memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi transformasi digital yang terus berkembang.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

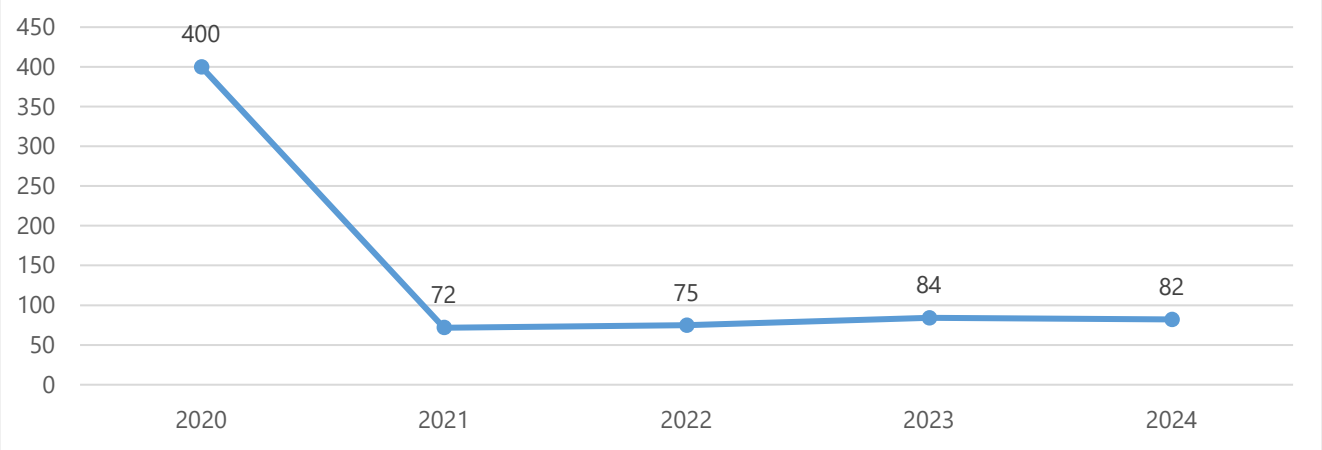
Target pembangunan sosial di Kota Magelang berfokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang sosial, khususnya terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Permasalahan sosial masih menjadi isu serius, dengan 5.775 PMKS tercatat pada tahun 2024 yang memerlukan penanganan lebih lanjut.



Gambar 2.59 Jumlah PMKS Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

Sebagai upaya memperkuat kesejahteraan sosial, Kota Magelang memiliki Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tersaji pada Gambar 2.60 berikut.

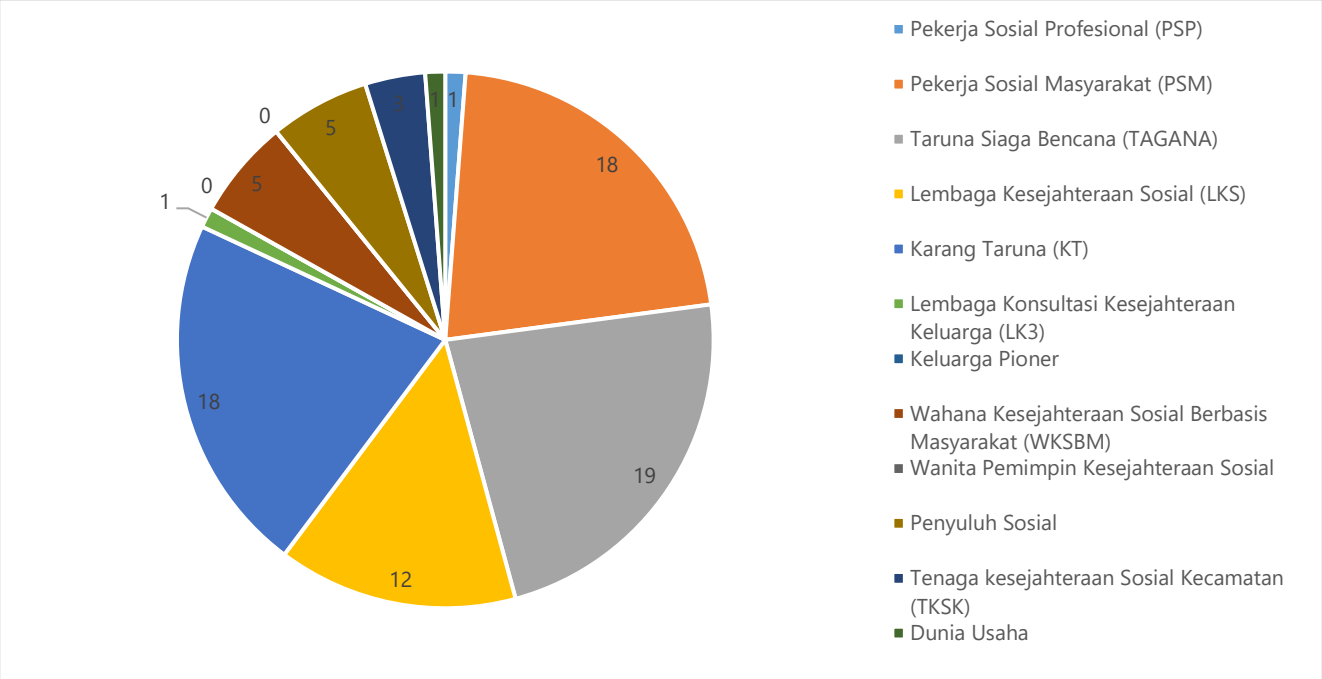


Gambar 2.60 Jumlah PSKS Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Gambar 2.60, jumlah PSKS mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dari 400 orang (2020) menjadi 72 orang (2021), kemudian mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2023 menjadi 84 orang dan terakhir di tahun 2024 menurun menjadi 82 orang. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan jumlah dan peran PSKS guna memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang.

Sebaran jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Magelang tahun 2024 tersaji pada Gambar 2.61 berikut ini.



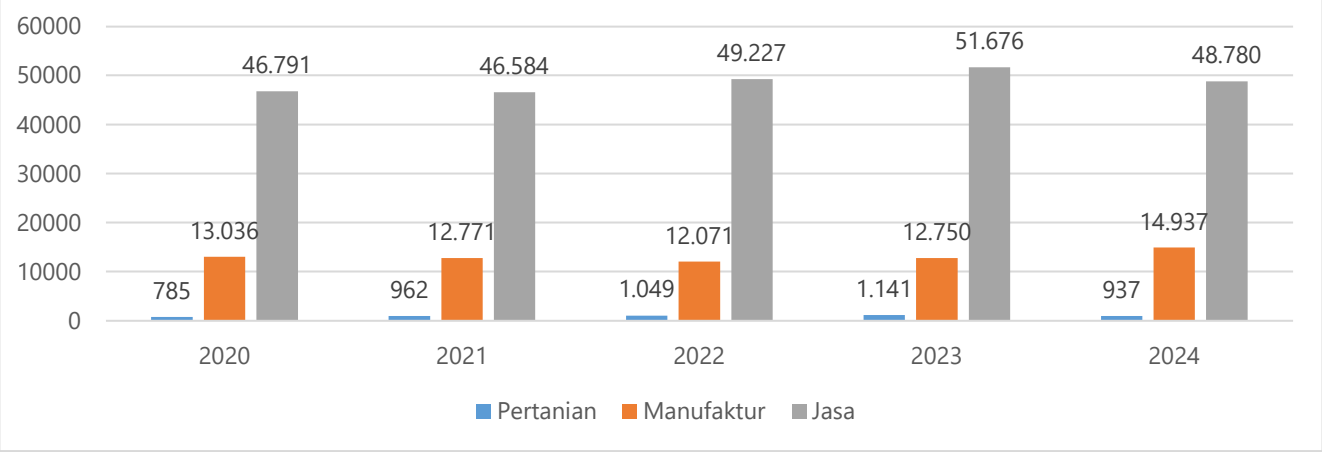
Gambar 2.61 Jenis PSKS Kota Magelang Tahun 2024

Sumber: Buku Sebaran Data PPKS dan PSKS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.61 menunjukkan sebaran jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Magelang tahun 2024. Komposisi terbesar berasal dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dengan 19 unit, disusul oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) masing-masing sebanyak 18 unit. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menyumbang 12 unit, sementara jenis lainnya seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Penyuluh Sosial memiliki proporsi lebih kecil. Data ini menunjukkan bahwa unsur relawan dan kelembagaan berbasis masyarakat menjadi tulang punggung penggerak kesejahteraan sosial di Kota Magelang, sehingga memperkuat urgensi dukungan dan pengembangan kapasitas bagi aktor-aktor PSKS agar dapat lebih optimal dalam menjangkau kelompok rentan.

2.1.2.4.1 Ketenagakerjaan

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2020-2024, sektor jasa masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kota Magelang, terutama dalam perdagangan besar dan eceran serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Serapan ketenagakerjaan tersaji pada Gambar 2.62 berikut ini.



Gambar 2.62 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Magelang Hasil Sakernas Agustus 2024

Pada tahun 2024, sektor jasa menyerap 75,45% dari total tenaga kerja, turun 3,55% dibanding tahun sebelumnya. Sektor manufaktur menyerap 23,1%, terutama di industri pengolahan, sedangkan sektor pertanian hanya 1,45% .

Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan beragamnya lapangan kerja. Namun, seiring pertumbuhan sektor ini, diperlukan peningkatan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan industri jasa yang berkembang pesat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jumlah serapan tenaga kerja berdasar jenis pekerjaan tersaji pada Tabel 2.37 berikut ini.

Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kota Magelang Tahun 2021-2024

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tidak/ Belum Bekerja	10.573	9.810	10.345	9.574	10.184	9.356	10.348	9.429
2	Mengurus Rumah Tangga	-	19.587	-	19.585	-	19.684	-	19.698
3	Pelajar/ Mahasiswa	14.211	13.383	14.612	13.621	14.744	13.823	14.813	13.880
4	Pensiunan	1.801	1.140	1.805	1.149	1.849	1.179	1.836	1.167
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.616	1.612	1.557	1.604	1.509	1.584	1.462	1.594
6	Tentara Nasional Indonesia	1.194	20	1.244	23	1.282	24	1.289	27
7	Kepolisian RI (POLRI)	423	49	437	48	428	47	445	43
8	Perdagangan	263	340	262	315	249	301	245	288
9	Petani/ Pekebun	90	44	89	43	92	47	95	48
10	Peternak	2	-	2	-	3	-	3	-
11	Nelayan/ Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Industri	5	3	5	3	5	3	6	3
13	Konstruksi	13	-	14	-	15	-	14	-
14	Transportasi	13	-	12	-	12	-	10	-
15	Karyawan Swasta	16.117	9.408	16.289	9.596	16.490	9.776	16.494	9.811
16	Karyawan BUMN	240	156	238	156	230	155	233	160
17	Karyawan BUMD	65	33	66	35	69	38	70	41
18	Karyawan Honorer	112	109	111	107	107	107	108	108
19	Buruh Harian Lepas	6.172	2.195	6.213	2.144	6.332	2.139	6.384	2.115
20	Buruh Tani/ Perkebunan	40	23	39	21	39	19	36	17

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
21	Buruh Nelayan/ Perikanan	3	1	3	1	2	1	1	1
22	Buruh Peternakan	3	-	3	-	3	-	2	-
23	Pembantu Rumah Tangga	1	88	1	85	1	82	1	79
24	Tukang Cukur	6	-	6	-	6	-	6	-
25	Tukang Listrik	3	-	2	-	2	-	2	-
26	Tukang Batu	42	-	43	-	38	-	36	-
27	Tukang Kayu	8	1	8	1	8	1	8	1
28	Tukang Sol Sepatu	2	-	2	-	2	-	2	-
29	Tukang Las/ Pandai Besi	13	-	12	-	12	-	12	-
30	Tukang Jahit	11	28	13	26	11	28	11	27
31	Tukang Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Penata Rias	-	14	-	11	-	12	-	12
33	Penata Busana	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Penata Rambut	1	5	1	4	1	4	1	4
35	Mekanik	41	-	39	-	40	-	38	-
36	Seniman	35	4	37	4	36	4	36	5
37	Tabib	-	-	-	-	-	-	2	3
38	Paraji	1	1	1	1	1	1	1	1
39	Perancang Busana	-	2	-	2	-	2	-	2
40	Penterjemah	2	2	1	2	1	2	1	2
41	Imam Masjid	1	-	1	-	1	-	1	-
42	Pendeta	38	7	39	7	39	7	38	8
43	Pastor	8	-	8	-	9	-	9	-
44	Wartawan	8	1	8	1	9	1	7	-
45	Ustadz/ Mubaligh	6	1	7	1	7	1	7	1
46	Juru Masak	2	3	2	3	2	3	2	3
47	Promotor Acara	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Anggota DPR RI	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Anggota DPD RI	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Anggota BPK	1	-	1	-	-	-	-	-
51	Presiden	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
52	Wakil Presiden	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Anggota Kabinet Kementrian	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Duta Besar	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Wakil Gubernur	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Wakil Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Walikota	1	-	1	-	1	-	1	-
61	Wakil Walikota	1	-	1	-	1	-	-	-
62	Anggota DPRD Provinsi	1	-	1	-	1	-	1	-
63	Anggota DPRD Kab./ Kota	17	5	17	5	17	5	17	4
64	Dosen	58	70	60	78	55	73	61	72
65	Guru	325	885	313	875	306	888	302	907
66	Pilot	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Pengacara	9	1	9	1	8	1	9	1
68	Notaris	4	8	4	9	4	9	5	10
69	Arsitek	5	2	6	3	6	2	6	2
70	Akuntan	-	1	-	1	-	1	-	1
71	Konsultan	4	-	5	-	3	-	3	-
72	Dokter	65	102	68	112	72	121	76	127
73	Bidan	-	68	-	72	-	72	-	76
74	Perawat	57	224	60	233	63	236	69	246
75	Apoteker	2	18	2	18	2	16	2	17
76	Psikiater/ Psikolog	-	4	-	3	-	3	-	3
77	Penyiar Televisi	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Penyiar Radio	-	3	-	3	-	3	-	3
79	Pelaut	42	1	40	1	41	-	40	-
80	Peneliti	-	-	1	-	1	-	1	-
81	Sopir	231	-	230	-	225	-	218	-

NO	KETERANGAN	2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P
82	Pialang	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Paranormal	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Pedagang	889	1.003	897	990	881	977	875	958
85	Perangkat Desa	1	-	1	-	1	-	2	-
86	Kepala Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Biarawan/ Biarawati	-	13	-	11	-	12	-	10
88	Wiraswasta	7.598	3.984	7.720	4.052	7.778	4.065	7.800	4.077
89	Anggota Lembaga Tinggi Lain	194	97	8	2	7	2	7	2
90	Artis	-	-	-	-	1	-	1	-
91	Atlet	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Chef	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Manajer	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Tenaga Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Operator	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Teknisi	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Asisten Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Pekerjaan Lainnya	-	-	-	1	-	1	-	2
	TOTAL	**62.691**	**64.560**	**63.023**	**64.644**	**63.345**	**64.919**	**63.612**	**65.097**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2025

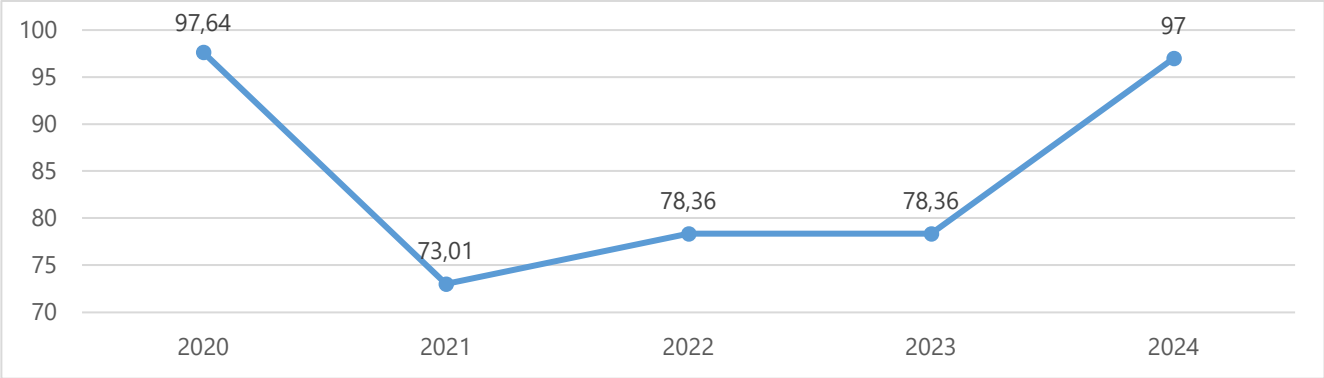
Mata pencaharian penduduk Kota Magelang cukup beragam. Seperti halnya fenomena yang banyak terjadi di daerah perkotaan, jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani relatif kecil. Sebagian besar bermata pencaharian sebagai karyawan swasta.

Tingginya jumlah pekerja buruh menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat cenderung berada pada level UMR Kota Magelang. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah. Upaya yang bisa dilakukan termasuk mendorong penyelenggara usaha/jasa untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya, seperti jaminan pensiun dan kesehatan, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih kepada pekerja di sektor informal, mengingat banyaknya penduduk yang berwirausaha. Modernisasi perkotaan dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan pergeseran pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal. Meskipun sektor informal memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia serta menciptakan lapangan kerja baru, pekerja di sektor ini sering kali minim perlindungan hukum dan hak ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk akses pembiayaan, pendampingan teknis, serta

penciptaan pasar. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah mendorong belanja barang dan jasa oleh pemerintah serta BUMN dari sektor informal, sehingga terjadi kolaborasi antara sektor informal dan formal.

Untuk menjamin perlindungan sosial terhadap tenaga kerja di Kota Magelang, peningkatan persentase pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pada bidang ketenagakerjaan. Infrmasi tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar 2.63 berikut ini.



Gambar 2.63 Persentase Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Sebagai bagian dari indikator perlindungan sosial yang adaptif, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan masa pensiun. Manfaatnya mencakup asuransi kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Berdasarkan Gambar 2.63, proporsi peserta Jamsostek di Kota Magelang mengalami stagnasi, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 97,64%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam program ini, terutama bagi pekerja sektor informal.

Sementara itu, Tabel 2.38 di bawah ini menunjukkan tren positif dalam penguatan kompetensi dan penempatan kerja di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat tajam dari 17,56% pada 2020 menjadi 95,25% pada 2024, menandakan keberhasilan program sertifikasi dan pelatihan kerja. Begitu pula dengan persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatan kerja, yang meningkat dari 51,42% menjadi 87,27%, menunjukkan efektivitas layanan intermediasi ketenagakerjaan.

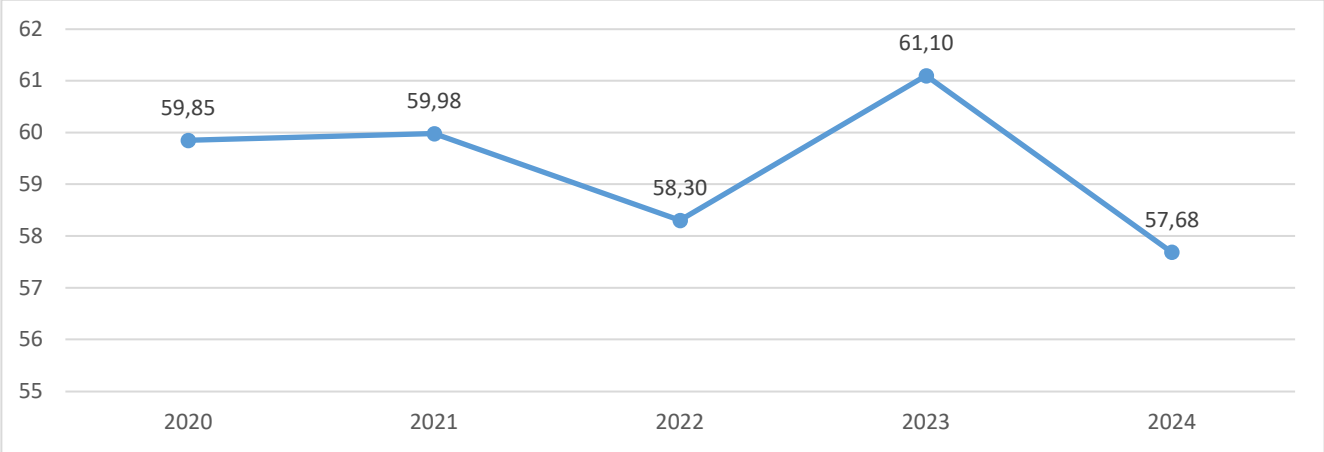
Tabel 2.38 Persentase Peserta Pelatihan dan Pencari Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Penempatan Kerja

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	17,56%	23,50%	48,25%	75,83%	95,25%
Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan kerja	51,42%	70,46%	63,84%	84,54%	87,27%
Persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan kerja	43,87%	40,91%	46,78%	82,53%	74,91%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Selain itu, partisipasi angkatan kerja dalam pelatihan kerja juga melonjak dari 43,87% menjadi 74,91%. Data ini mencerminkan bahwa Kota Magelang semakin siap dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan terserap di pasar kerja, seiring dengan meningkatnya kualitas layanan ketenagakerjaan

dan pelatihan vokasi. Untuk isu gender, data TPAK untuk perempuan dapat dilihat pada Gambar 2.64 di bawah ini.



Gambar 2.64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Gambar 2.64 menggambarkan fluktuasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Nilai TPAK berada pada kisaran 57-61%, dengan angka tertinggi tercapai pada tahun 2023 sebesar 61,1%, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 57,68%. Meskipun sempat mengalami peningkatan dari 58,3% pada 2022, tren keseluruhan menunjukkan penurunan partisipasi perempuan di pasar kerja. Hal ini dapat mencerminkan adanya hambatan struktural, sosial, atau ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang lebih responsif gender untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam sektor ekonomi formal maupun informal.

Urusan tenaga kerja juga harus inklusi dalam rangka mewujudkan kesempatan kerja yang adil dan merata bagi masyarakat Kota Magelang, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu sejak tahun 2024, diadakan Unit Disabilitas di Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan layanan bagi pencari kerja disabilitas. Selain penempatan kerja melalui kegiatan job fair, bagi penyandang disabilitas dilaksanakan pelatihan membatik untuk bisa memberikan keterampilan yang kemudian mengantarkan pada kemandirian secara finansial. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan membatik bagi 32 penyandang disabilitas.

2.1.2.4.2 Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitasi tenaga kerja di Kota Magelang dari 91,84 juta rupiah/jiwa (2015) menjadi 110,80 juta rupiah/jiwa (2023) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun, penurunan produktivitas pada tahun 2018 dan 2020 menandakan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi fluktuasi ini.

Tabel 2.39 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per jiwa)	104,14	107,99	110,5	110,8	118,61

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Tabel 2.39 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Kota Magelang mengalami peningkatan bertahap dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari Rp104,14 juta per jiwa menjadi Rp110,8 juta per jiwa. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan efisiensi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja selama periode tersebut, yang dapat dikaitkan dengan peningkatan kompetensi, akses pelatihan, atau transformasi ekonomi lokal. Namun, data untuk tahun 2024 belum tersedia, sehingga tren keberlanjutan peningkatan produktivitas belum dapat dipastikan. Secara umum, tren positif ini menunjukkan bahwa

Kota Magelang telah berada di jalur yang baik dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerjanya.

Tabel 2.40 Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Kota Magelang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Uraian	Kota Magelang	Jawa Tengah	Nasional
Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per jiwa)	110,80	55,46	86,55

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang, 2025

Tabel 2.40 memperlihatkan pada tahun 2023, produktivitas tenaga kerja Kota Magelang mencapai Rp110,80 juta per jiwa, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp55,46 juta dan rata-rata nasional sebesar Rp86,55 juta. Capaian ini mencerminkan efisiensi dan nilai tambah ekonomi per tenaga kerja di Kota Magelang yang relatif tinggi, yang kemungkinan didorong oleh struktur ekonomi kota yang lebih produktif, seperti dominasi sektor perdagangan, jasa, atau industri bernilai tambah. Perbedaan mencolok ini mengindikasikan bahwa Kota Magelang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, serta menjadi rujukan dalam pengembangan tenaga kerja yang produktif di skala provinsi.

2.1.2.4.3 Kepemudaan dan Olahraga

Aspek kepemudaan dan olahraga berperan penting dalam pembangunan daerah, karena generasi muda adalah aset masa depan dengan potensi membawa perubahan positif. Olahraga juga berkontribusi dalam mengembangkan bakat lokal, mendukung perekonomian, dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

Tabel 2.41 Kondisi Kepemudaan dan Olahraga Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	NA	43	47	40	21
Jumlah Organisasi Kepemudaan	NA	44	63	47	31
Jumlah Prestasi Pemuda/Organisasi Pemuda	NA	2	3	4	18
Jumlah Prestasi Olahraga	NA	69	124	169	235
Indeks Pembangunan Pemuda	56,70	67,17	74,62	68,32	68,82*

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

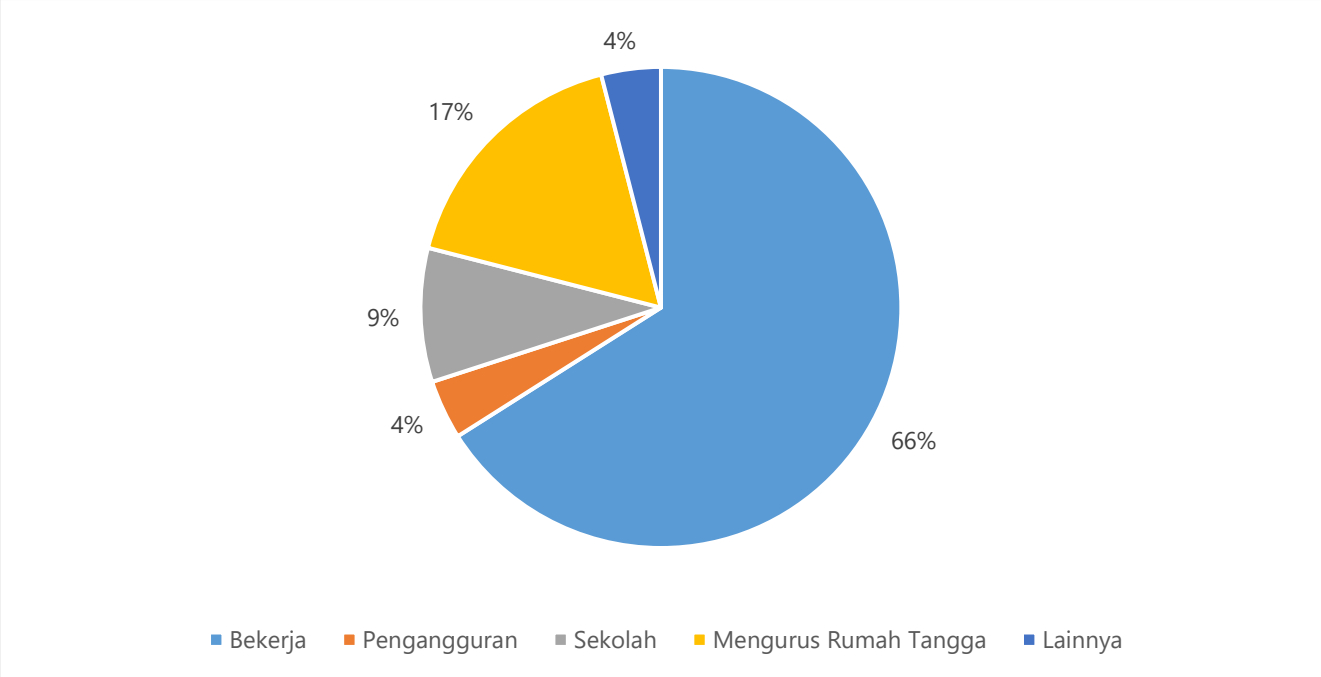
Tabel 2.41 menunjukkan bahwa jumlah organisasi kepemudaan aktif di Kota Magelang mengalami penurunan signifikan dari 47 organisasi pada tahun 2022 menjadi hanya 21 organisasi pada 2024. Jumlah total organisasi kepemudaan juga menurun drastis dari 63 menjadi 31 dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, data prestasi pemuda meningkat dari tahun 2021 sebanyak 2 prestasi menjadi 18 di tahun 2024, prestasi di bidang olahraga menunjukkan peningkatan tajam dari 69 prestasi pada tahun 2021 menjadi 169 prestasi pada 2023 dan 235 pada 2024. Data ini mengindikasikan adanya pergeseran fokus atau keberhasilan pembinaan di sektor olahraga, namun juga menunjukkan tantangan besar dalam keberlangsungan organisasi dan kegiatan kepemudaan secara umum.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda di Indonesia dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas beserta kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda. Dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, IPP telah melalui proses peninjauan ulang. Proses peninjauan ulang yang dilakukan berimplikasi pada perubahan nilai IPP yang diperoleh, baik di tingkat nasional maupun

provinsi. Lebih lanjut, melalui proses peninjauan ulang, IPP telah mampu menyediakan angka capaian pembangunan pemuda di tingkat kabupaten/kota dengan batasan-batasan tertentu.

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Magelang menunjukkan tren peningkatan cukup konsisten di Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2022, yakni dari 56,70 pada 2020, naik menjadi 67,17 pada 2021, dan mencapai 74,62 pada 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 68,32, sedangkan data 2024 belum tersedia. Pergerakan ini menunjukkan adanya keberhasilan awal dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda, yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta partisipasi pemuda. Akan tetapi, penurunan pada 2023 menandakan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan program pembinaan pemuda.

Hal ini menunjukkan kebutuhan dalam perkuatan ekosistem kepemudaan melalui penyediaan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas kesehatan pemuda, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, serta ruang partisipasi sosial dan politik. Stabilitas dan peningkatan IPP yang berkelanjutan akan menjadi modal penting dalam membangun generasi muda yang produktif, inovatif, dan berdaya saing, sehingga mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara keseluruhan.



Gambar 2.65 Persentase Pemuda Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kota Magelang Tahun 2023

Sumber: Publikasi BPS Kota Magelang Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.65, mayoritas pemuda di Kota Magelang pada tahun 2023 memiliki kegiatan utama sebagai pekerja, yaitu sebesar 66%. Proporsi ini menunjukkan tingkat keterlibatan pemuda dalam dunia kerja yang cukup tinggi. Sementara itu, 17% pemuda terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga, diikuti oleh 9% yang masih menempuh pendidikan, serta masing-masing 4% merupakan pengangguran dan memiliki aktivitas lain. Komposisi ini mencerminkan pentingnya kebijakan pengembangan keterampilan dan peningkatan akses kerja serta pendidikan untuk memastikan pemuda di Kota Magelang dapat berdaya saing dan produktif secara berkelanjutan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1 Indeks Kota Toleran

Untuk aspek ini, data terkait IKUB dan IPK belum tersedia, sehingga didekati dari Indeks Kota Toleran berdasarkan publikasi dari Pustaka Masyarakat Setara yang ditulis oleh Yosarie dan Hasan di tahun 2025.

Tabel 2.42 Indeks Kota Toleran Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kota Toleran	5.520	6.020	5.670	6.220	6.248

Sumber: Indeks Kota Toleran 2024 (Yosarie dan Hasan, 2025)

Data pada Tabel 2.42 menunjukkan bahwa Kota Magelang mengalami tren peningkatan skor toleransi dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai indeks meningkat dari 5,520 pada tahun 2020 menjadi 6,248 pada tahun 2024, dengan fluktuasi kecil di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara bertahap Kota Magelang dinilai semakin inklusif dan kondusif bagi kehidupan sosial yang harmonis antarwarga. Meskipun tidak melonjak drastis, tren positif ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam memperkuat nilai-nilai toleransi dalam tata kelola kota dan kehidupan masyarakat.

2.1.2.5.2 Kebudayaan

Kegiatan kebudayaan di Kota Magelang tercermin dalam keberagaman kelompok kesenian yang aktif di berbagai bidang. Mulai dari seni tradisional hingga seni modern, berbagai bentuk ekspresi seni berkembang di kalangan generasi muda Kota Magelang. Berdasarkan DataGo Kota Magelang, tercatat sebanyak 223 kelompok kesenian yang tersebar di 18 cabang seni pada tahun 2023. Jumlah kelompok kesenian ini sempat mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19, namun kembali bertumbuh dan aktif kembali sejak tahun 2021, seiring dengan pemulihan pasca pandemi. Beberapa cabang kesenian yang berkembang di Kota Magelang meliputi Drum Band, Kobro Siswo, Kuntulan, Ketoprak, Wayang Orang, Jatilan/Reog, Dagelan, Karawitan/Panembromo, Orkes Keroncong, Samproh/Kasidah, Orkes Melayu, Tari Topeng Ireng, Sanggar Tari, Seni Lukis/Seni Rupa, Tari Jawa Tradisional, Wayang Kulit, Janur/Dekorasi, dan Seni Pahat. Di antara berbagai cabang tersebut, kesenian Samproh menjadi yang paling dominan, dengan jumlah kelompok mencapai 81 pada tahun 2024.

Tabel 2.43 Jumlah Kelompok Kesenian Aktif Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Kesenian Aktif	220	220	233	233	223

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Selain aktivitas kesenian, Kota Magelang juga memiliki nilai kebudayaan yang mencakup cagar budaya dan warisan budaya tak benda (WBTB). Cagar budaya meliputi situs, bangunan, serta objek yang memiliki nilai historis dan budaya, sedangkan WBTB mencakup tradisi, praktik, serta ekspresi budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Upaya pelestarian kedua aspek ini sangat penting guna menjaga warisan budaya serta memahami langkah-langkah pelestarian yang dilakukan di daerah tersebut.

Berdasarkan database Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Magelang, persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang berhasil dilestarikan pada tahun 2023 tercatat sebesar 23,53%. Angka ini menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam upaya pelestarian budaya, baik untuk menjaga identitas lokal maupun sebagai daya tarik wisata yang dapat dikembangkan oleh Kota Magelang.

Sementara itu, data pada Tabel 2.44 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung ke situs-situs bersejarah di Kota Magelang, yang mencapai 425.000 jiwa pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan meningkatnya minat wisatawan terhadap pariwisata budaya di Kota Magelang, khususnya terhadap destinasi dengan nilai sejarah yang tinggi.

Tabel 2.44 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung tempat bersejarah	NA*	163.000	334.000	425.000	NA*

**data belum tersedia*
Sumber: Database IUP Kota Magelang

Salah satu cara untuk mengenalkan nilai budaya kepada generasi muda dan penerus bangsa adalah melalui pendidikan, khususnya dengan memasukkan muatan lokal (mulok) bahasa daerah dan seni budaya ke dalam kurikulum. Muatan lokal memiliki peran penting dalam menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai budaya, sehingga generasi muda dapat menghargai serta menjaga warisan budaya yang ada.

Persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pendidikan di suatu daerah berkontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Berdasarkan data dari Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kota Magelang, pada tahun 2023 hanya 21,28% satuan pendidikan yang memiliki guru untuk mengajar muatan lokal bahasa daerah dan seni budaya.

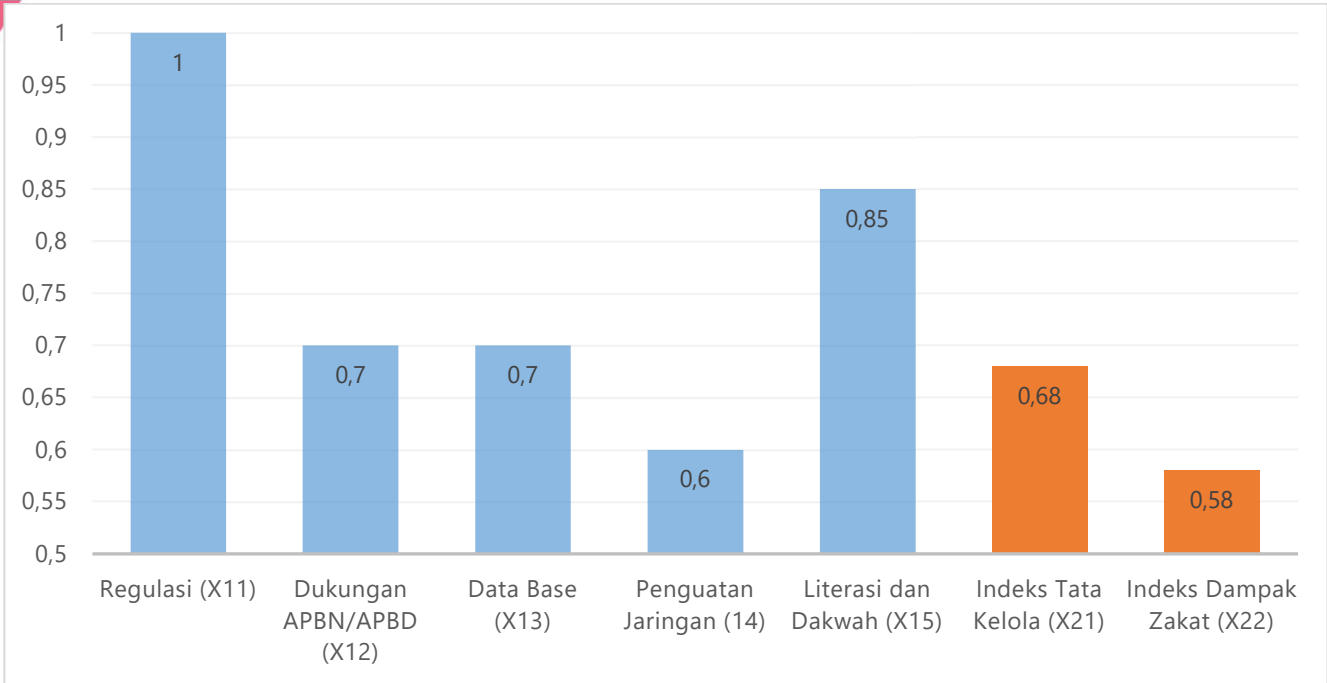
Rendahnya angka tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelestarian budaya serta pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan sistem pendidikan di Kota Magelang, terutama dalam memperluas cakupan dan kualitas pengajaran muatan lokal guna memperkuat identitas budaya daerah.

2.1.2.5.3 Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional menilai kinerja lembaga zakat mencakup BAZNAS dan LAZ dari berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi melalui sistem yang telah disediakan. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk melihat dan mengetahui hal-hal yang dapat menjadi perbaikan pada kinerja lembaga zakat di tahun sebelumnya. Pengukuran Indeks Zakat Nasional menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner Dimensi Mikro oleh LAZ seluruh tingkatan wilayah sedangkan data sekunder berasal dari data data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

Indeks Zakat Nasional disusun oleh dua Dimensi utama yaitu Dimensi Makro yang memotret kondisi dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan zakat, baik berupa ada atau tidaknya regulasi maupun berupa ada atau tidaknya alokasi APBD untuk biaya operasional BAZNAS. Selain itu dimensi Makro juga memotret mengenai kelengkapan database pengelolaan zakat, pelaksanaan penguatan jaringan di BAZNAS dan juga aktivitas dakwah dan peningkatan literasi zakat di suatu wilayah. Dimensi kedua adalah dimensi Mikro yang memotret pelaksanaan tata kelola zakat dan dampak zakat. Indikator Tata Kelola mengukur kualitas manajemen kelembagaan secara menyeluruh. Indikator dalam dimensi ini mencakup perencanaan, sistem dan struktur organisasi, aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, rasio keuangan lembaga, teknologi dan informasi, serta kualitas pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Indikator Dampak Zakat mencerminkan sejauh mana program zakat memberikan perubahan nyata terhadap mustahik, yang mencakup Indeks Kesejahteraan Pengentasan kemiskinan, Mustahik menjadi Muzaki, Perubahan budaya produktif, Model Cibest, dan memotret Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran IZN dan KDZ Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, pengelolaan zakat di Kota Magelang berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi makro 0,79. Secara tata kelola dan dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kota Magelang berada pada kategori Baik dengan nilai dimensi mikro 0,62. Secara umum, pengelolaan zakat di Kota Magelang masuk pada kategori Stabil dengan nilai IZN 0,67.



Gambar 2.66 Nilai Indikator Penyusun IZN BAZNAS Kota Magelang

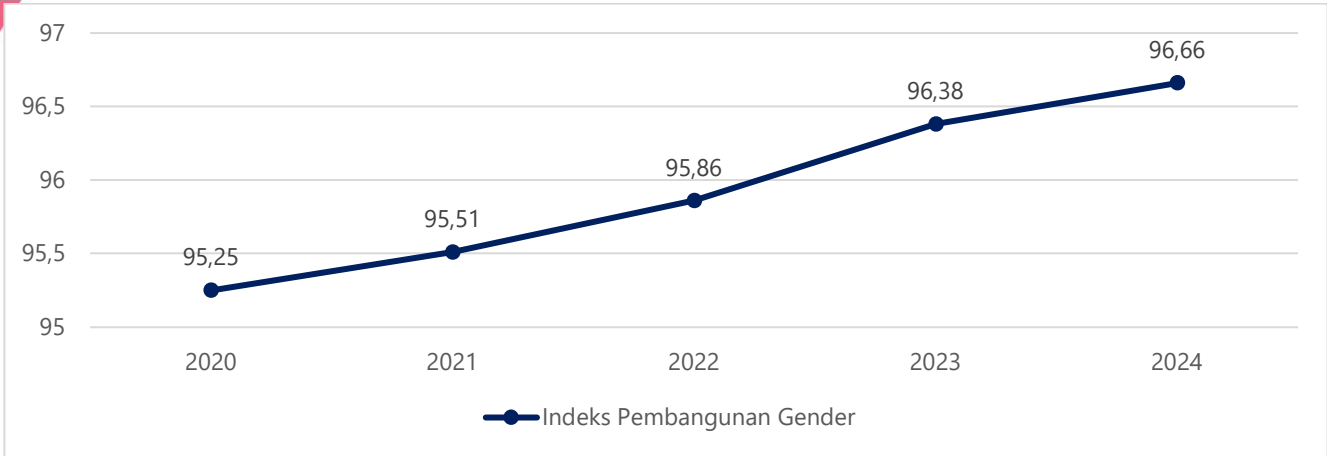
Sumber: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2025

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN, indikator regulasi merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi atau termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai sempurna, yaitu 1,00. Disusul indikator literasi dakwah zakat yang masih berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai 0,85. Kemudian indikator dukungan APBN/APBD (0,70), database (0,70), dan indeks tata kelola (0,68) berada pada kategori Baik. Selanjutnya indikator penguatan jaringan (0,60) dan indeks dampak zakat (0,58) berada di kategori Cukup Baik. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis IZN 2024, BAZNAS Kota Magelang secara keseluruhan sudah Baik, akan tetapi masih diperlukan penguatan dan peningkatan melalui evaluasi guna meningkatkan kinerja dan hasil IZN di seluruh indikator penyusunan IZN, khususnya pada indeks dampak zakat dalam membantu mustahik untuk terentaskan dari kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzaki, serta indikator penguatan jaringan dalam berkoordinasi dengan stakeholder maupun pihak internal.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

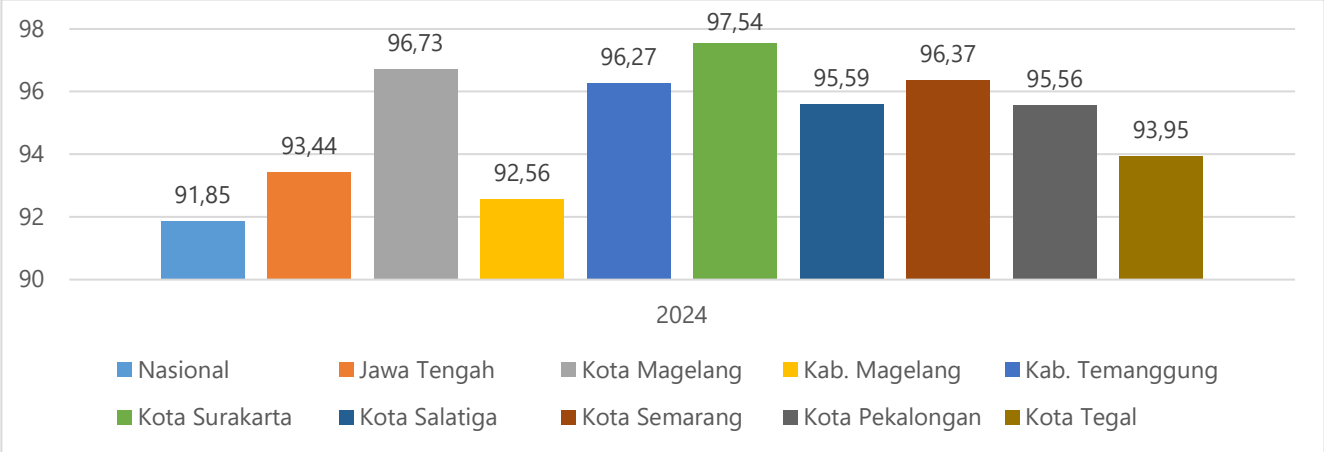
Kesenjangan gender secara statistik diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender di suatu wilayah. BPS pada tahun 2024 mencatat IPG Kota Magelang sebesar 96,73 (Gambar 2.66). IPG yang mendekati angka 100 ini menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sangat tinggi. Meskipun dalam periode 2020-2024 IPG terus menunjukkan peningkatan, namun demikian masih tetap diperlukan upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.



Gambar 2.67 IPG Kota Magelang tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Perbandingan IPG kota Magelang dengan Daerah Sekitar tersaji dalam Gambar 2.67 berikut ini.



Gambar 2.68 IPG Kab/Kota Gelangmanggung dan Kota Lain, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024

Sumber: BPS, 2025

Berdasarkan Gambar 2.68, IPG Kota Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah (93,44) dan secara Nasional (91,85). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, Kota Magelang menempati peringkat kedua setelah Kota Surakarta. Capaian ini menandakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam aspek pembangunan sudah baik di Kota Magelang. Hal ini juga dipengaruhi keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah setempat dalam mendukung kesetaraan gender.

2.1.2.6.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan ekonomi dan politik dengan komposit pembentuk berupa keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.

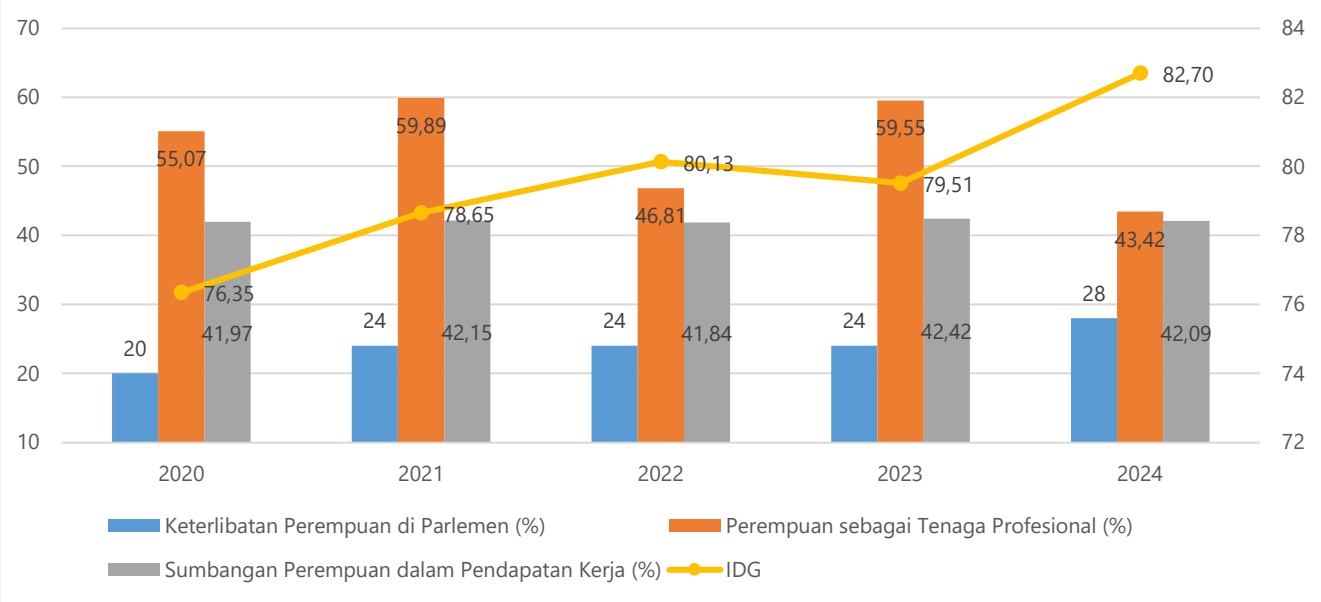
IDG menurun jika perempuan mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pengambilan keputusan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan dalam politik sebagai berikut:

1. Rendahnya Representasi Perempuan di Parlemen: Jumlah perempuan di parlemen yang sedikit dapat disebabkan perempuan sering dihadapkan pada hambatan struktural dan sosial untuk masuk ke dunia politik dan adanya stereotip bahwa perempuan kurang kompeten dalam kepemimpinan. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang afirmatif dalam hal kuota perempuan dalam politik.

2. Kesenjangan Partisipasi Ekonomi: Perempuan lebih sering bekerja di sektor informal dengan pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, perempuan masih dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau serupa.
3. Akses Pendidikan dan Keterampilan yang Tidak Merata: Banyak perempuan yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan akan menyulitkan perempuan dalam bersaing dalam dunia kerja.

Pemberdayaan gender memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan perempuan. Penurunan IDG menunjukkan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memastikan hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan dalam politik sehingga tidak terjadi diskriminasi gender.

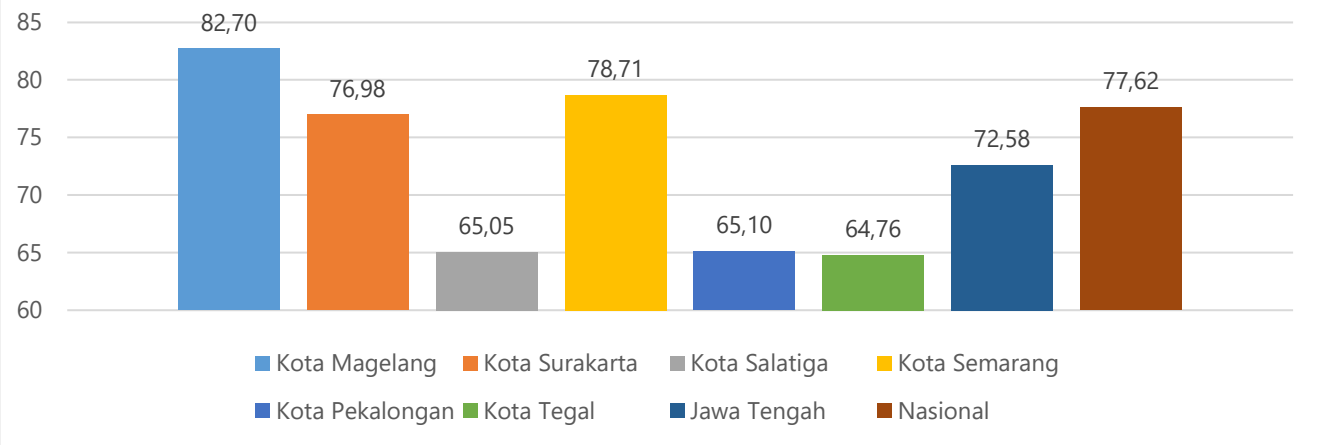
Berdasarkan data pada web DataGo Kota Magelang, nilai IDG Kota Magelang menurun pada tahun 2023 menjadi 79,51 daripada tahun 2022 yang mencapai angka 80,13, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 mencapai 82,70 seperti terlihat pada Gambar 2.69 berikut ini.



Gambar 2.69 IDG dan Komponen Pembentuknya di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Datago Kota Magelang (data tahun 2024)

Perbandingan IDG Kota Magelang dengan daerah sekitar tersaji pada Gambar 2.69 berikut ini.



Gambar 2.70 Perbandingan IDG Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

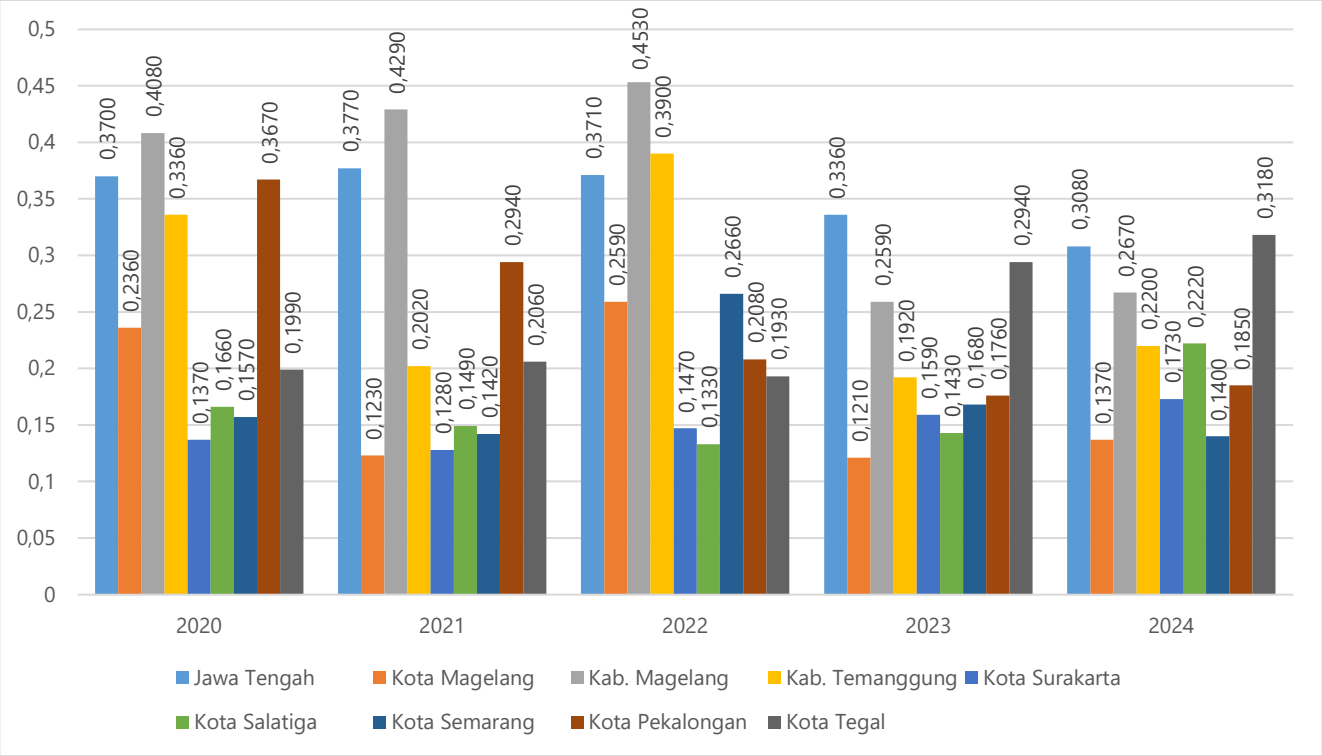
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan Gambar 2.70, Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai angka 82,7, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa

Tengah maupun rata-rata provinsi dan nasional. Capaian ini menandakan bahwa Kota Magelang memiliki pencapaian yang relatif baik dalam hal kesetaraan gender di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan di Kota Magelang memiliki akses dan peran yang setara dengan laki-laki dalam pembangunan, serta mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan responsif gender.

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan. IKG mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Penurunan nilai IKG menunjukkan kemajuan dalam upaya mengurangi ketimpangan gender dan meningkatkan kesetaraan. Informasi IKG tersaji pada Gambar 2.70 berikut ini.



Gambar 2.71 IKG Kawasan Gelangmanggung dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 2.71, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Magelang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Nilai IKG Kota Magelang sempat menurun drastis dari 0,236 pada tahun 2020 menjadi 0,123 pada 2021, kemudian meningkat kembali pada 2022 menjadi 0,259, namun kembali menurun ke angka 0,121 di tahun 2023, dan sedikit naik ke 0,137 di tahun 2024. Meskipun trennya tidak stabil, secara umum nilai IKG Kota Magelang tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain, seperti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, yang mengindikasikan adanya ketimpangan gender yang relatif lebih kecil. Meski begitu, rendahnya nilai ini perlu dilihat secara hati-hati karena bisa juga mencerminkan rendahnya partisipasi secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga upaya peningkatan peran aktif gender secara merata tetap perlu didorong untuk pembangunan yang lebih setara.

2.1.2.6.4 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial, pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh

masyarakat, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan Tabel 2.45 kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Magelang dalam rentang waktu 2020-24 mengalami kondisi yang fluktuatif. Tren kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) selalu meningkat selama periode 2020 sampai dengan 2023. Hal tersebut terjadi juga dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi paling banyak di tahun 2023. Meskipun demikian, tingginya jumlah kasus kekerasan juga dapat mengindikasikan semakin sadarnya perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan dan dukungan hukum yang lebih kuat.

Tabel 2.45 Kondisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah KDRT[1]	11	20	50	94	28
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan[1]	1	9	17	44	35
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak[1]	2	25	31	50	35
Jumlah kasus perkawinan terhadap anak[2]	26	25	24	17	16
Jumlah anak dengan kedisabilitasan[3]	86	108	71	58	54

Sumber:
[1] RPJMD 2021-2026 (data tahun 2016-2017); RKPD 2024 (data tahun 2018-2022);
[2] RPJMD 2021-2026;
[3] Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Magelang;
[4] Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025; DataGo Kota Magelang (data tahun 2023)

Upaya pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Magelang masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masih adanya perkawinan anak yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan masa depan mereka. Faktor sosial, ekonomi, serta budaya turut berkontribusi terhadap masih terjadinya praktik ini, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencegahnya, seperti peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi hak anak, serta penguatan regulasi yang membatasi pernikahan di usia dini.

Selain itu, perhatian terhadap anak-anak dengan disabilitas juga menjadi isu krusial. Saat ini, layanan yang tersedia bagi mereka sebagian besar masih terbatas pada Dinas Sosial, sehingga belum mencakup seluruh kebutuhan mereka, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan. Kurangnya akses terhadap fasilitas ramah disabilitas serta minimnya tenaga pendidik atau pendamping yang memiliki keahlian khusus menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas instansi, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta lembaga sosial dan komunitas, untuk menciptakan sistem dukungan yang komprehensif. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan inklusif, akses layanan kesehatan yang lebih baik, serta program pemberdayaan yang memungkinkan anak-anak dengan disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, anak-anak dengan disabilitas dapat lebih berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara.

2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022, kualitas keluarga diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di suatu wilayah, serta menilai sejauh mana peran dan fungsi keluarga berjalan secara optimal. Nilai iBangga menjadi dasar dalam mengklasifikasikan suatu wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu keluarga tangguh, berkembang, atau rentan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator dalam perumusan

kebijakan pembangunan keluarga. iBangga terdiri atas 3 dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Dimensi Ketenteraman mencerminkan kondisi keluarga dalam hal pelaksanaan ibadah, legalitas pernikahan, akses terhadap jaminan kesehatan, serta keharmonisan dalam rumah tangga. Dimensi Kemandirian mengukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, memiliki jaminan keuangan yang stabil, melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan keluarga, serta memanfaatkan akses terhadap media daring. Dimensi Kebahagiaan melihat tingkat interaksi sosial di dalam keluarga serta hubungan dengan lingkungan sekitarnya sebagai indikator kesejahteraan emosional.

Tabel 2.46 Nilai Indeks Pembangunan Keluarga Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,57	53,57*	58,82	65,58	66,30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025

Selama 2020-2024, nilai iBangga Kota Magelang secara umum pertahunnya mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 tercatat 53,57 dan pada tahun 2024 berada di angka 66,30. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di wilayah Kota Magelang. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di Kota Magelang. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup penguatan layanan kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, peningkatan akses pendidikan, serta program-program sosial yang mendorong keharmonisan keluarga dan interaksi sosial yang lebih baik. Dengan peningkatan di ketiga dimensi iBangga, Kota Magelang dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan keluarga yang semakin mandiri.

2.1.2.6.6 Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah indikator yang mengukur kesejahteraan keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup. IKK memberikan gambaran tentang seberapa baik keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kualitas hidup yang layak. Berdasarkan data yang tersedia, IKK Kota Magelang meningkat dari 0,76 pada tahun 2021 menjadi 0,80 pada tahun 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah yang berada di 0,78 pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kualitas hidup keluarga di Kota Magelang sudah lebih baik. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Tabel 2.47 Indeks Kualitas Keluarga Kota Magelang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Jawa Tengah (2023)
Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	NA*	0,76	0,78	0,80	NA*	0,78

**data belum tersedia*
Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2023 dan Data Go Kota Magelang

2.1.2.6.7 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Perlindungan anak merupakan aspek penting meliputi segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terbebas dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan

kehidupan yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Berdasarkan Tabel 2.48, angka IPA di Kota Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa kondisi IPA sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, angka IPKA masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah, dengan angka yang cukup baik yaitu 76,77.

Tabel 2.48 Indeks Perlindungan Anak Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Magelang	58,16	69,20	68,39	NA*
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Tengah	63,20	64,99	64,34	NA*

**data belum tersedia*
Sumber: SIGA KemenPPA, 2025

Berdasarkan Tabel 2.48, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 58,16 pada tahun 2021 menjadi 69,20 di tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 68,39 pada tahun 2023. Meski mengalami fluktuasi, capaian IPA Kota Magelang pada dua tahun terakhir tetap berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yang tercatat sebesar 64,99 pada 2022 dan 64,34 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Magelang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di provinsi. Namun demikian, tren penurunan dari tahun 2022 ke 2023 menjadi sinyal penting agar kebijakan dan program perlindungan anak terus diperkuat secara konsisten.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Anak-anak di bawah usia 15 tahun dianggap belum berkontribusi secara ekonomi karena masih bergantung pada orang tua atau pihak lain, sementara orang-orang di atas usia 65 tahun dianggap tidak produktif setelah pensiun sedangkan penduduk usia 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk usia kerja yang produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk menghidupi mereka yang tidak bekerja. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, rasio ketergantungan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi penduduk dari perspektif demografi.

Tabel 2.49 Angka Beban Ketergantungan Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

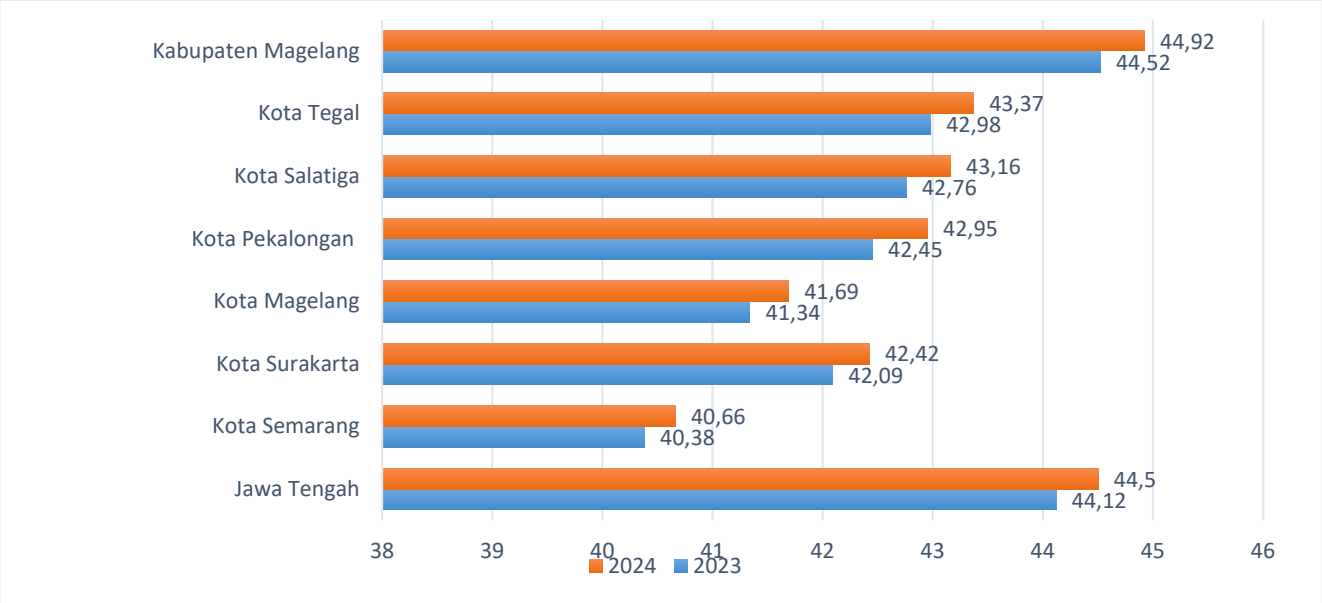
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Beban Ketergantungan	41,68	40,67	41,60	41,34	41,69

Sumber: Proyeksi Interim Penduduk Hasil Sensus Penduduk (Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2024) (data 2020-2023); Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (data 2024)

Berdasarkan Tabel 2.49, angka beban ketergantungan di Kota Magelang menunjukkan kecenderungan relatif stabil selama periode 2020-2024. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 41-42 penduduk usia non-produktif, yang dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan yang moderat. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan demografis yang cukup terjaga, meskipun tetap diperlukan perhatian agar peningkatan beban tidak terjadi seiring dengan perubahan struktur usia penduduk ke depan.

Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi rasio ketergantungan, terutama pada kelompok usia lanjut, melalui program-program seperti sekolah hebat dan layanan kesehatan gratis bagi lansia dan disabilitas. Upaya-upaya ini harus terus ditingkatkan untuk menghadapi

tantangan *aging population* di masa depan, sehingga dapat menekan peningkatan rasio ketergantungan, khususnya pada masyarakat lanjut usia.



Gambar 2.72 Perbandingan Rasio Ketergantungan Kota Magelang dengan Kota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023-2024

Berdasarkan Gambar 2.72, rasio ketergantungan Kota Magelang pada tahun 2023 sebesar 41,34 dan meningkat menjadi 41,69 pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit kenaikan, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah (44,12 pada 2023 dan 44,5 pada 2024), yang menunjukkan bahwa beban ketergantungan penduduk non-produktif terhadap penduduk produktif di Kota Magelang relatif lebih ringan. Dibandingkan kota lain, Kota Magelang sejajar dengan kota-kota besar seperti Surakarta dan Semarang, yang mencerminkan struktur demografis yang cukup seimbang.

2.1.3.2 Daya Saing Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 PDRB (Lapangan Usaha) Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB mencerminkan kinerja ekonomi daerah dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.50 di bawah ini, sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Magelang pada tahun 2024 adalah sektor Industri Pengolahan, sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang memiliki kontribusi paling rendah. Besaran PDRB menunjukkan seberapa besar masing-masing sektor berperan dalam perekonomian Kota Magelang.

Tabel 2.50 PDRB Menurut Lapangan Usaha (Harga Berlaku dan Harga Konstan) Kota Magelang Tahun 2024

PDRB Kota Magelang Tahun 2024 (Menurut Lapangan Usaha) dalam Milyar Rupiah		
Lapangan Usaha	**Harga Berlaku**	**Harga Konstan**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	192,19	118,79
Pertambangan dan Penggalian	0	0
Industri Pengolahan	1.950,02	1.099,78
Pengadaan Listrik dan Gas	33,47	28,59

PDRB Kota Magelang Tahun 2024 (Menurut Lapangan Usaha) dalam Milyar Rupiah		
Lapangan Usaha	**Harga Berlaku**	**Harga Konstan**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,31	8,89
Konstruksi	1.883,49	1.146,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.652,24	1.134,15
Transportasi dan Pergudangan	942,74	631,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	776,53	528,54
Informasi dan Komunikasi	695,04	670,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	582,38	333,5
Real Estate	348,85	267,55
Jasa Perusahaan	43,41	27,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.203,5	759,27
Jasa Pendidikan	875,35	495,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	370,71	238,21
Jasa Lainnya	259,71	180,93
PDRB	**11.821,94**	**7.668,79**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2025

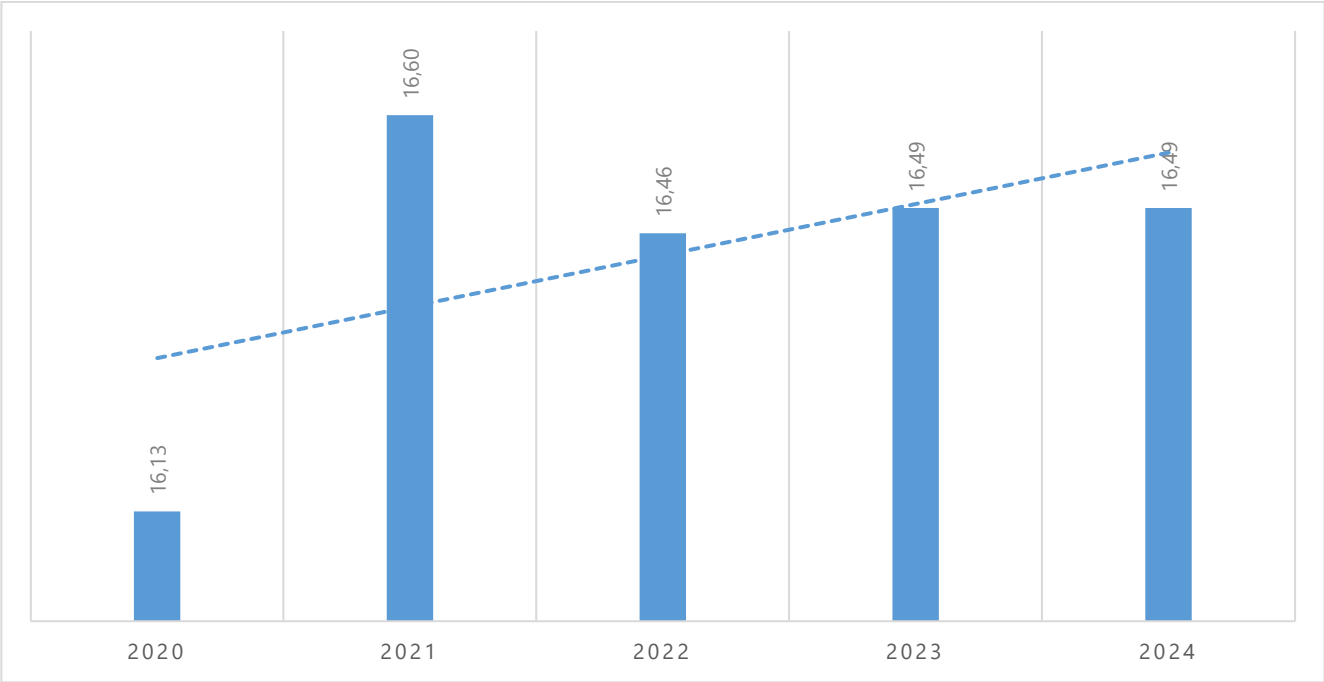
Berdasarkan Tabel 2.50, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar Rp11.821,94 miliar (harga berlaku) dan Rp7.668,79 miliar (harga konstan). Kontribusi terbesar terhadap PDRB berasal dari sektor industri pengolahan (Rp1.950,02 miliar harga berlaku), diikuti oleh sektor konstruksi (Rp1.883,49 miliar) dan perdagangan besar dan eceran (Rp1.652,24 miliar). Hal ini menegaskan dominasi sektor sekunder dan tersier dalam struktur ekonomi Kota Magelang, dengan kontribusi signifikan dari kegiatan industri, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan. Sementara itu, sektor pertanian dan jasa perusahaan memberikan kontribusi paling kecil, mencerminkan karakteristik wilayah kota yang lebih terfokus pada aktivitas jasa dan manufaktur daripada sektor primer.

2.1.3.2.2 Rasio PDRB

Rasio PDRB atau distribusi PDRB adalah persentase sumbangan setiap lapangan usaha terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor industri pengolahan serta akomodasi dan makanan minuman merupakan indikator utama yang menunjukkan kontribusi kedua sektor terhadap perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan berperan dalam mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, sementara sektor akomodasi dan makanan minuman menyediakan layanan terkait kebutuhan konsumsi. Analisis terhadap rasio PDRB kedua sektor ini membantu memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.2.1 Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Magelang. Rasio PDRB sektor industri pengolahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada angka 16% dan mengalami sedikit fluktuasi setiap tahunnya seperti dapat dilihat pada Gambar 2.72 di bawah ini.



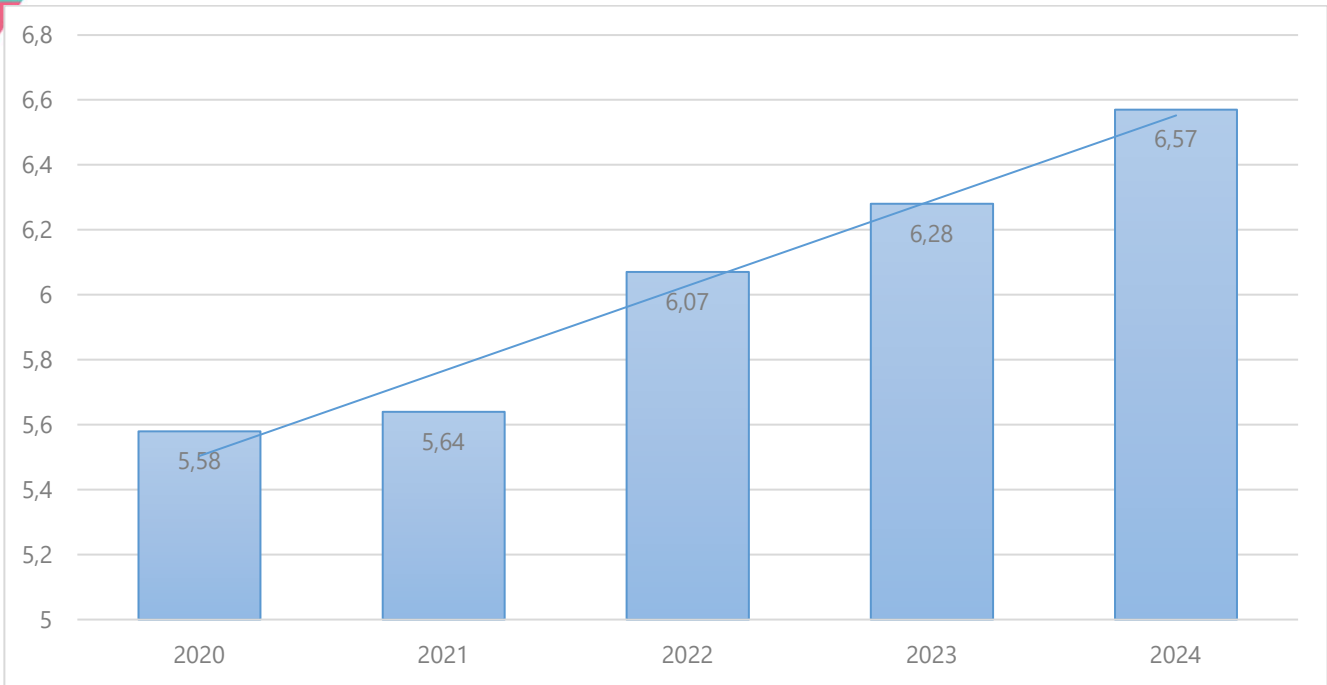
Gambar 2.73 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Gambar 2.73, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kota Magelang menunjukkan tren yang relatif stabil dan positif pada periode 2020-2024. Rasio meningkat dari 16,13% pada tahun 2020 menjadi 16,6% pada 2021, sempat sedikit menurun menjadi 16,46% pada 2022, lalu kembali naik menjadi 16,49% pada 2023 dan bertahan di angka yang sama pada 2024. Secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan, meskipun dalam skala yang kecil. Pertumbuhan yang lambat ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan belum optimal sesuai target. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ini antara lain keterbatasan teknologi, daya saing yang rendah, serta minimnya investasi di sektor tersebut.

2.1.3.2.2.2 Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi makan dan minum diantaranya mencakup perhotelan, restoran, dan layanan penyediaan makanan, memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan lapangan kerja.



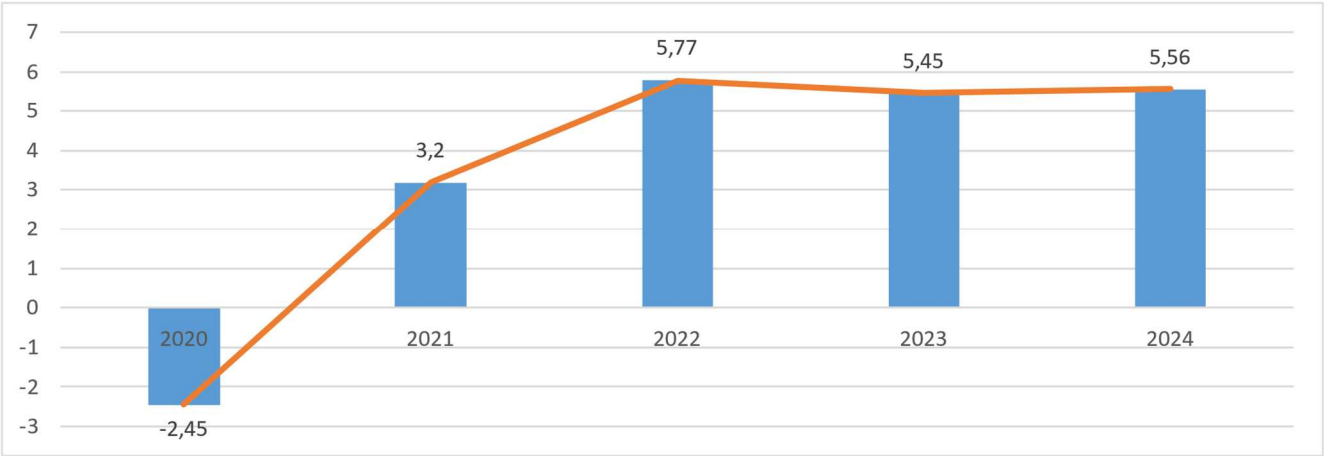
Gambar 2.74 Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Gambar 2.74, dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio PDRB sektor Akomodasi Makan dan Minum cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai angka 6,57% pada tahun 2024. Analisis terhadap kontribusi sektor ini juga dapat memberikan wawasan terkait ketahanan pangan daerah serta membantu merumuskan strategi peningkatan produksi dan distribusi makanan. Upaya ini penting untuk mengoptimalkan potensi Kota Magelang dalam hubungannya dengan wilayah sekitarnya.

2.1.3.2.3 Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi steruktur ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB yang merupakan indikator utama dalam menilai kesejahteraan ekonomi daerah. Melalui analisis ini, dapat diketahui tingkat perkembangan ekonomi serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan tersebut. Tren pertumbuhan ekonomi Kota Magelang, dilihat dari PDRB harga konstan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.75 berikut.



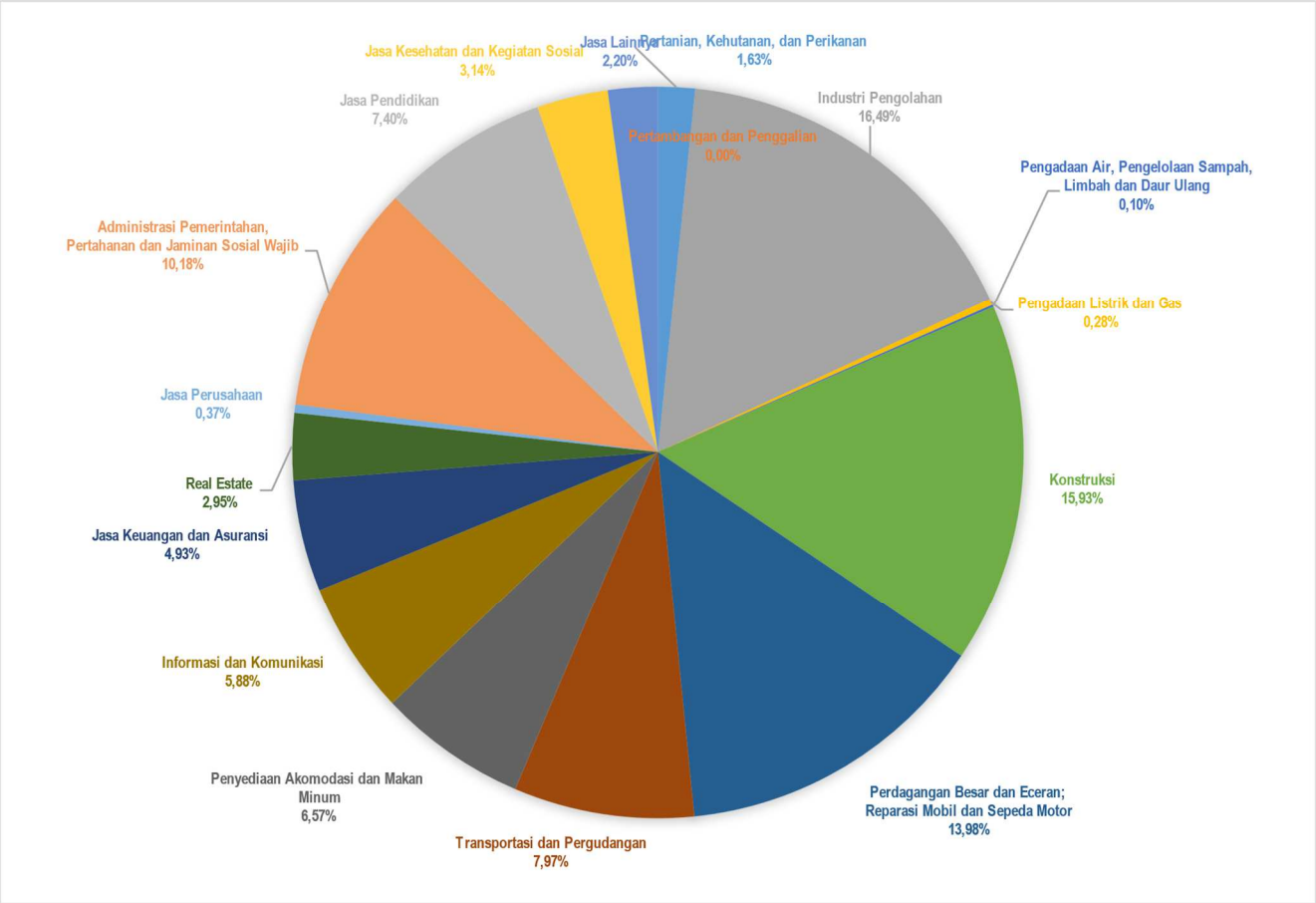
Gambar 2.75 Tingkat Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Magelang 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Magelang menunjukkan tren fluktuatif selama 2020-2024. Pada 2020, terjadi penurunan tajam akibat pandemi Covid-19, pada angka -2,45%. Setelah meningkat pada 2021-

2022, pertumbuhan kembali melambat pada 2023 dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 5,56%. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, investasi infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam strategi pembangunan ekonomi.

Struktur ekonomi Kota Magelang juga dilihat berdasarkan kontribusi lapangan usaha perekonomian terhadap PDRB. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Magelang relatif stabil, dengan sektor utama pada 2024 terdiri dari industri pengolahan (16,49%), konstruksi (15,93%), serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor (13,98%). Ketiga sektor ini memiliki potensi besar untuk terus dioptimalkan guna meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.



Gambar 2.76 Struktur Perekonomian Kota Magelang (ADHB) berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Gambar 2.76, struktur perekonomian Kota Magelang tahun 2024 (berdasarkan ADHB) didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan (16%), konstruksi (16%), dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14%).

Sektor sekunder (industri pengolahan dan konstruksi) secara kumulatif menyumbang 32% dari PDRB, menunjukkan peran penting sektor ini dalam kegiatan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, sektor tersier juga sangat kuat, dengan kontribusi besar dari perdagangan, transportasi dan pergudangan (8%), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (7%). Jika dijumlahkan, sektor tersier menyumbang lebih dari 50% PDRB menjadikannya sebagai penggerak utama perekonomian Kota Magelang. Dengan demikian, perekonomian Kota Magelang lebih condong didominasi oleh sektor tersier, yang mencerminkan karakteristik kota jasa dan perdagangan, sekaligus menandakan orientasi ekonomi yang kuat pada sektor non-produktif berbasis pelayanan.

Namun, terdapat sejumlah tantangan yang dapat menghambat perkembangan optimal sektor-sektor tersebut, antara lain keterbatasan teknologi, kurangnya tenaga kerja terampil, akses pasar yang terbatas, kondisi infrastruktur yang belum memadai, serta kerangka regulasi yang perlu disempurnakan. Tantangan-tantangan ini perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dan agar potensi yang dimiliki setiap sektor dapat dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam analisis struktur ekonomi Kota Magelang dilihat dari sektor basis dan non basis. Perhitungan sektor basis Kota Magelang dapat dilihat dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Struktur Ekonomi Sektor Basis dan Non Basis Kota Magelang Berdasarkan Perhitungan LQ Tahun 2024

Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,135	Non Basis
Pertambangan dan Penggalian	0,000	Non Basis
Industri Pengolahan	0,444	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	**3,110**	**Basis**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	**1,697**	**Basis**
Konstruksi	**1,391**	**Basis**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**1,020**	**Basis**
Transportasi dan Pergudangan	**1,985**	**Basis**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**1,710**	**Basis**
Informasi dan Komunikasi	**1,308**	**Basis**
Jasa Keuangan dan Asuransi	**1,742**	**Basis**
Real Estate	**1,775**	**Basis**
Jasa Perusahaan	0,861	Non Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**4,115**	**Basis**
Jasa Pendidikan	**1,642**	**Basis**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	**3,263**	**Basis**
Jasa Lainnya	**1,325**	**Basis**

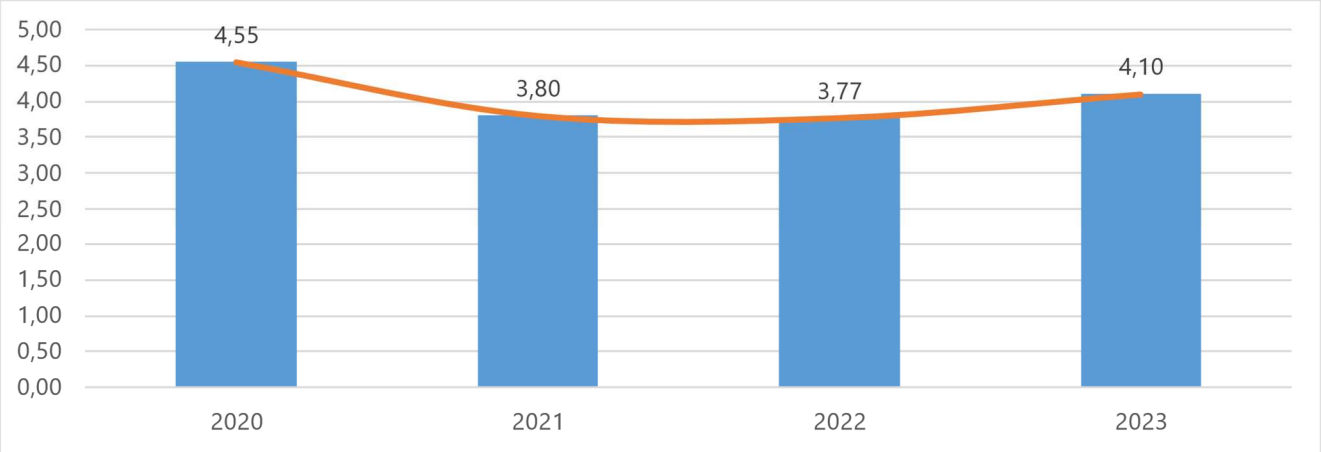
Sumber: Analisis Tim Penyusun RPJMD Kota Magelang, 2025

Berdasarkan perhitungan *Location Quotient* (LQ), jumlah lapangan usaha potensial di Kota Magelang dengan nilai LQ >1 sebanyak 13 sektor pada tahun 2024. Di Kota Magelang, sektor primer tidak menjadi sektor basis, sedangkan sektor sekunder dan tersier tetap mendominasi.

Struktur ekonomi Kota Magelang secara keseluruhan relatif stabil, tetapi industri pengolahan (meskipun bukan sektor basis) tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB. Ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki potensi kompetitif yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat daya saing industri pengolahan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah persentase jumlah wirausaha (orang yang memiliki atau mengelola bisnis sendiri) terhadap total angkatan kerja atau populasi penduduk suatu negara atau wilayah. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur tingkat kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.



Gambar 2.77 Rasio Kewirausahaan Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2023

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kota Magelang

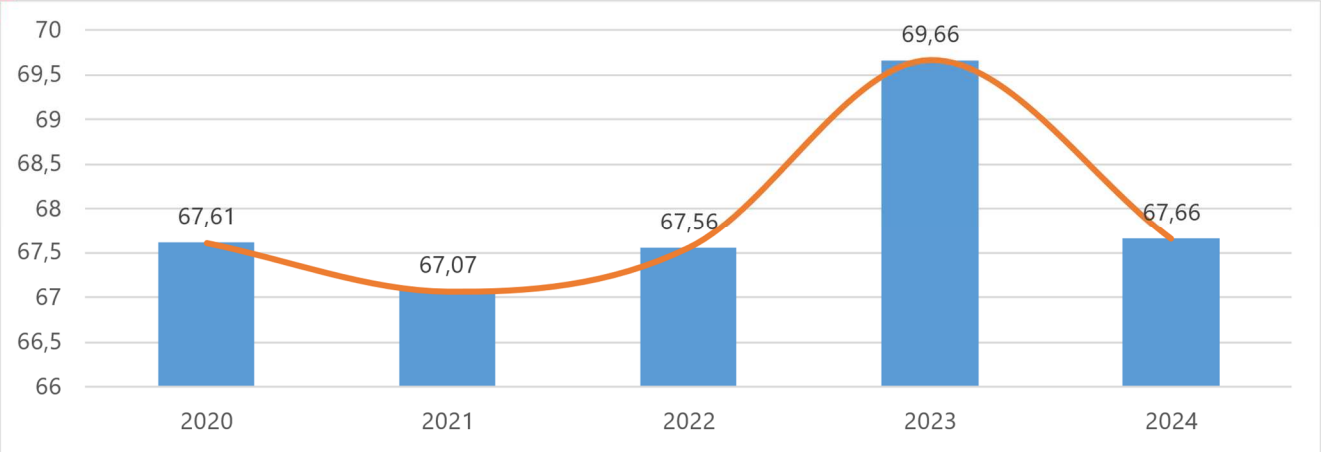
Rasio kewirausahaan mencerminkan tingkat aktivitas usaha di Kota Magelang, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan daya saing ekonomi. Gambar 2.77 menunjukkan perkembangan rasio kewirausahaan daerah di Kota Magelang selama periode 2020-2023. Rasio ini mengalami penurunan dari 4,55 pada tahun 2020 menjadi 3,80 di tahun 2021, dan terus sedikit turun ke angka 3,77 di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali menjadi 4,10. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam perkembangan pelaku usaha dan aktivitas kewirausahaan di wilayah tersebut, yang bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, dampak pandemi, atau kebijakan lokal terkait dukungan UMKM dan iklim usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kota Magelang memiliki potensi wirausaha yang cukup baik, namun perlu ada intervensi dan strategi penguatan kewirausahaan secara berkelanjutan. Peningkatan pada tahun 2023 menjadi sinyal positif bahwa upaya pemulihan dan pemberdayaan usaha lokal mulai membuahkan hasil. Ke depan, menjaga tren positif ini sangat penting agar kewirausahaan dapat terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi ekonomi lokal, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

2.1.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk dalam kelompok usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi penduduk yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, yang mencerminkan potensi tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah.

TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, sedangkan TPAK yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam memasuki pasar kerja, seperti kurangnya kesempatan kerja atau faktor sosial dan ekonomi lainnya. Analisis TPAK juga sering dilakukan berdasarkan jenis kelamin untuk memahami perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja.



Gambar 2.78 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Magelang Tahun 2020-2024

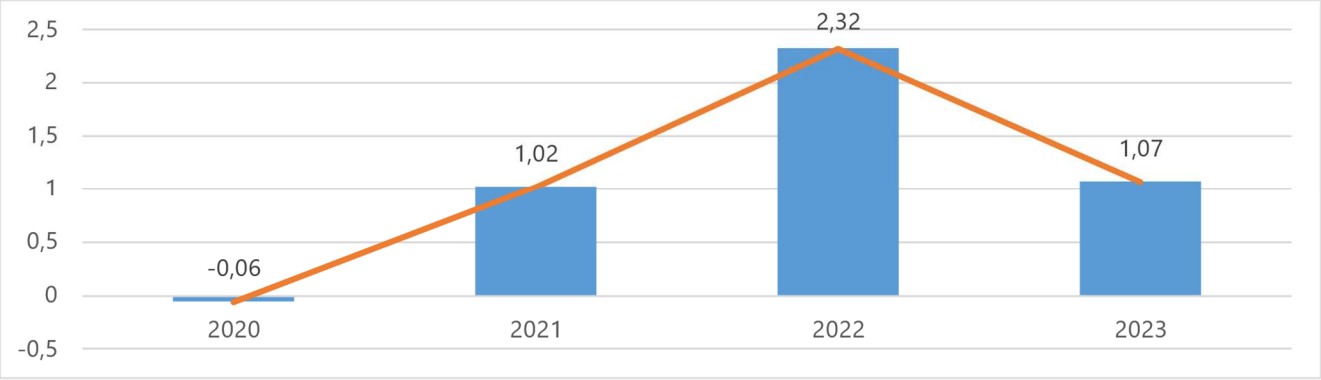
Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Gambar 2.78 menunjukkan tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Magelang selama periode 2020-2024. TPAK relatif stabil di kisaran 67%, dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 67,61% dan sempat menurun pada 2021 menjadi 67,07%. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 67,56%, lalu melonjak tajam ke 69,66% di tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 TPAK menurun kembali ke angka 67,66%. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika penawaran tenaga kerja yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan ketenagakerjaan lokal.

Stabilitas TPAK di angka 67-68% menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja aktif dalam pasar tenaga kerja, namun angka ini juga mengindikasikan adanya potensi yang belum optimal terserap. Lonjakan pada 2023 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan penyerapan tenaga kerja dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dirancang intervensi strategis untuk memperluas akses terhadap lapangan kerja produktif, memperkuat kewirausahaan, serta meningkatkan kualitas angkatan kerja guna menjaga dan mendorong peningkatan TPAK secara berkelanjutan.

2.1.3.2.6 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Return on Asset (ROA) adalah indikator kinerja keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan aset oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Data ROA BUMD Kota Magelang pada 2020-2023 menunjukkan tren fluktuatif, yang dapat mencerminkan ketidakstabilan kinerja keuangan serta pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan dan kondisi ekonomi. Evaluasi tren ini penting untuk memahami efektivitas pengelolaan aset dan merancang strategi peningkatan kinerja BUMD di masa depan.



Gambar 2.79 Return on Asset (ROA) BUMD Tahun 2020-2023

Sumber: Database Perekonomian Kota Magelang

Gambar 2.79 menunjukkan perkembangan *Return on Asset* (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Magelang selama periode 2020-2023. ROA mengalami peningkatan signifikan dari -0,06% pada tahun 2020 menjadi 1,02% di 2021 dan mencapai puncaknya di 2022 sebesar 2,32%, sebelum menurun kembali menjadi 1,07% pada 2023. Kenaikan tajam pada 2021-2022 mencerminkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas pemanfaatan aset oleh BUMD, sementara penurunan pada 2023 mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap operasional atau strategi investasi BUMD. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren positif namun fluktuatif, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan penguatan kinerja keuangan BUMD.

Stabilitas ekonomi daerah juga dipengaruhi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dan total dana pihak ketiga. Kedua hal tersebut ditunjukkan oleh Tabel 2.52 di bawah ini.

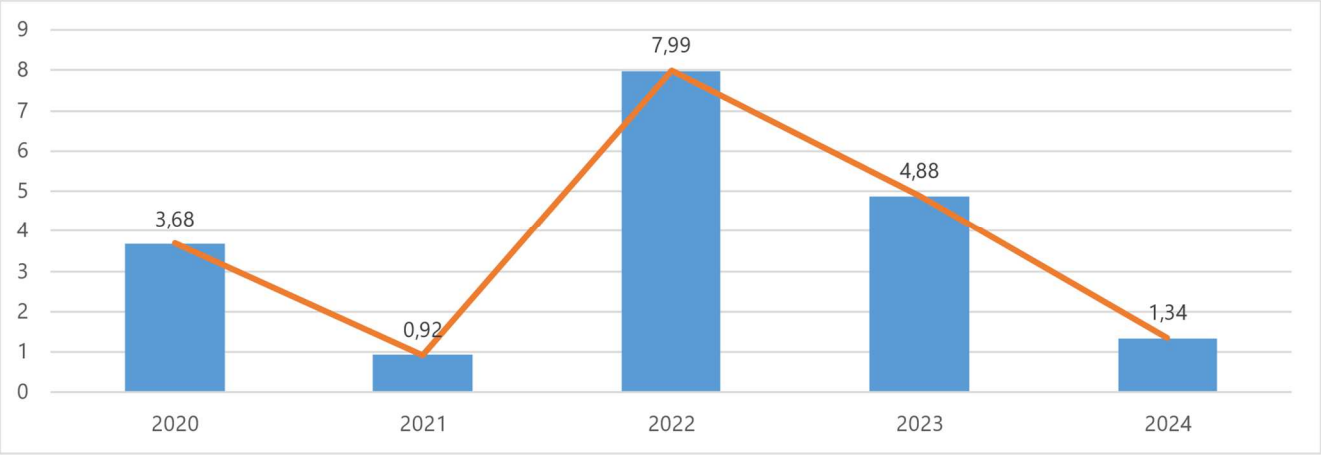
Tabel 2.52 Rasio Volume Usaha Koperasi dan Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Daerah terhadap PDRB Kota Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi	NA*	1,50	1,44	1,25	NA*
Total Dana Pihak Ketiga	1,89	2,06	1,96	1,98	NA*
Total Kredit Pihak Ketiga	1,83	1,99	1,92	1,80	NA*

**data belum tersedia*
Sumber: Database Perekonomian Kota Magelang

Tabel 2.52 menunjukkan rasio volume usaha koperasi serta total dana dan kredit pihak ketiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang pada periode 2020-2024. Rasio volume usaha koperasi terlihat mengalami penurunan dari 1,50 pada 2021 menjadi 1,25 pada 2023, menunjukkan melemahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, rasio total dana pihak ketiga relatif stabil di kisaran 1,89-2,06 selama 2020-2023, mencerminkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di bank. Rasio total kredit pihak ketiga sedikit menurun dari 1,99 pada 2021 menjadi 1,80 pada 2023, yang bisa menandakan pelambatan penyaluran kredit oleh perbankan atau berkurangnya permintaan kredit produktif.

Data ini menggambarkan bahwa meskipun intermediasi perbankan tetap cukup aktif dalam menghimpun dana masyarakat, peran koperasi sebagai lembaga keuangan lokal perlu diperkuat untuk menjaga keseimbangan inklusi keuangan. Penurunan kontribusi koperasi dan stabilnya dana pihak ketiga menunjukkan perlunya intervensi dalam penguatan koperasi dan penyaluran kredit produktif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi inklusif dalam RPJMD 2025-2029. Indikator lain yang digunakan adalah dispartias harga seperti ditampilkan dalam Gambar 2.80 di bawah ini.



Gambar 2.80 Disparitas Harga Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Database Perekonomian Kota Magelang (data 2020-2023);
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025 (data 2024)

Gambar 2.80 menunjukkan fluktuasi disparitas harga di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Disparitas harga mengalami penurunan tajam dari 3,68 pada tahun 2020 menjadi 0,92 pada 2021, kemudian melonjak signifikan hingga mencapai puncak tertinggi sebesar 7,99 pada 2022. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap menjadi 4,88 pada 2023 dan turun lebih jauh menjadi 1,34 pada 2024. Pola ini mencerminkan dinamika yang cukup ekstrem dalam ketimpangan harga antarwilayah atau komoditas di Kota Magelang.

Tingginya disparitas harga pada 2022 mencerminkan dampak gangguan rantai pasok, inflasi, atau ketidakseimbangan distribusi barang dan jasa, sementara penurunan pada 2024 menunjukkan perbaikan efisiensi distribusi dan stabilisasi harga. Fluktuasi ini menjadi penting untuk dicermati dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kota Magelang, karena kestabilan harga sangat memengaruhi daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi lokal.

2.1.3.2.7 Indeks Stabilitas Ekonomi Makro

Indeks Stabilitas Ekonomi Makro Kota Magelang yang mencapai 3,31 dari skala 5,00 pada tahun 2023 mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif stabil. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan yang baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti peningkatan investasi, penguatan sektor industri, serta optimalisasi kebijakan fiskal dan moneter. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kestabilan ekonomi, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu terus memantau indikator-indikator utama, seperti inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan sektor-sektor produktif. Upaya kolaboratif dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi ketimpangan akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi Kota Magelang di masa mendatang.

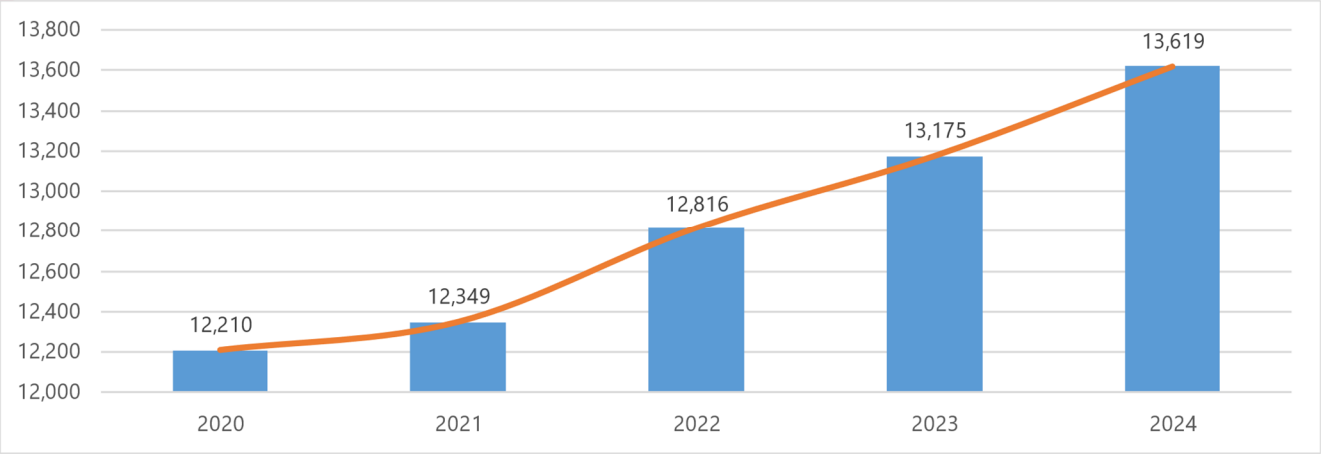
Tabel 2.53 Indikator Indeks Pilar Ekonomi Makro

Pilar/Indikator	Nilai
Kapasitas Fiskal Daerah	3,70
Pertumbuhan Ekonomi	4,10
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,18
Indeks Ketahanan Pangan	4,13
Nilai ICOR (Investasi)	2,44
Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	**3,31**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.1.3.2.8 Pengeluaran Per Kapita

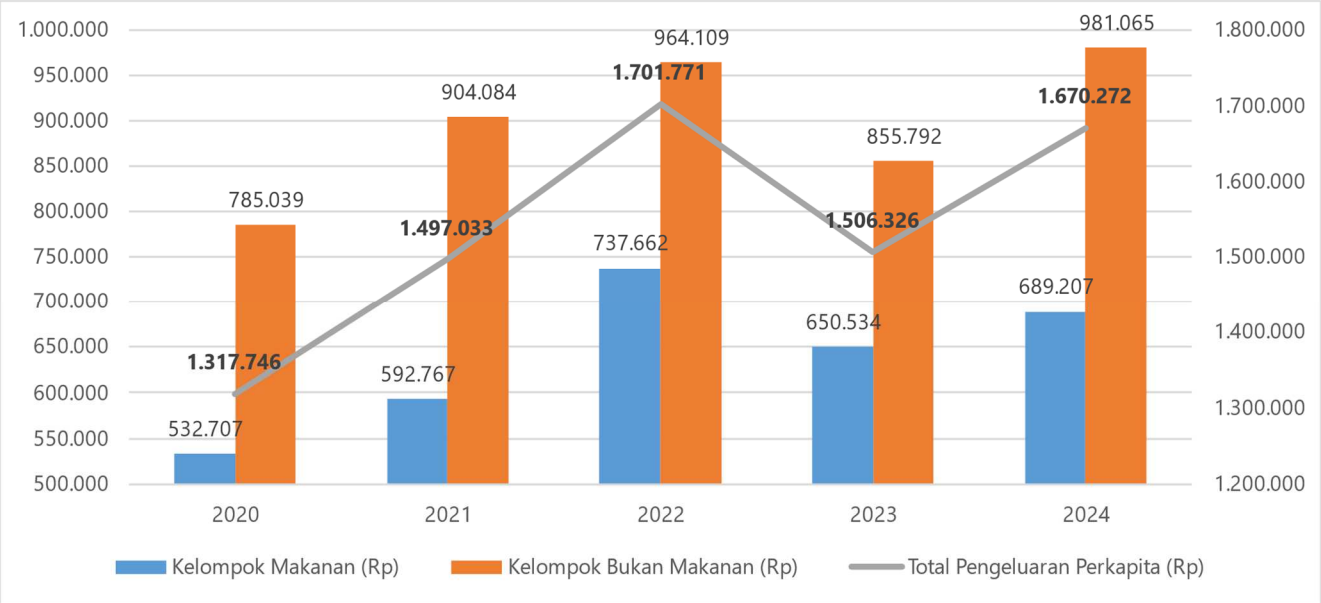
Tren pengeluaran per kapita di Kota Magelang meningkat selama 2020-2024 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.81 di bawah ini. Fenomena meningkatnya pengeluaran per kapita di Kota Magelang sementara pertumbuhan ekonominya melambat menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, atau adanya kelompok tertentu yang mendominasi pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan.



Gambar 2.81 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Datago Kota Magelang 2025

Gambar 2.81 menunjukkan tren peningkatan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Angka pengeluaran per kapita meningkat dari Rp12,2 juta pada tahun 2020 menjadi Rp13,6 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan daya beli atau kebutuhan konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun, meskipun besarnya kenaikan tiap tahun relatif moderat dan konsisten. Peningkatan ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi membaiknya taraf hidup masyarakat Kota Magelang, meskipun juga dapat disebabkan oleh inflasi atau naiknya harga barang dan jasa. Tren yang stabil ini mendukung arah kebijakan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, namun perlu diimbangi dengan pemantauan ketimpangan dan pengendalian inflasi agar pertumbuhan pengeluaran tidak hanya mencerminkan tekanan biaya hidup.



Gambar 2.82 Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Komoditas

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 (data 2020-2023); BPS Kota Magelang, 2025 (data 2024)

Gambar 2.82 memperlihatkan data pengeluaran per kapita masyarakat Kota Magelang menurut kelompok komoditas selama periode 2020-2024. Secara umum, total pengeluaran per kapita mengalami peningkatan dari Rp1.317.746 pada tahun 2020 menjadi Rp1.670.272 pada tahun 2024. Pengeluaran untuk kelompok bukan makanan selalu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran untuk kelompok makanan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024, pengeluaran untuk bukan makanan mencapai Rp981.065, sementara untuk makanan sebesar Rp689.207. Data ini mencerminkan pola konsumsi masyarakat Kota Magelang yang cenderung lebih besar pada kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar

pendapatan masyarakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, yang dapat diasosiasikan dengan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, tren fluktuasi di tahun 2023 juga menunjukkan adanya sensitivitas konsumsi terhadap dinamika ekonomi, seperti inflasi atau daya beli.

2.1.3.2.9 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Data Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia berfungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengidentifikasi kelompok miskin, rentan, dan menengah ke atas. Informasi ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran serta menetapkan prioritas intervensi sosial dan ekonomi. Selain itu, data ini menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan dan pencapaian target pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.

Tabel 2.54 Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
20% penduduk berpendapatan tinggi (%)	46,95	52,19	50,59	49,32	54,55
40% penduduk berpendapatan menengah (%)	36,80	32,91	33,16	34,62	30,19
40% penduduk berpendapatan rendah (%)	16,26	14,90	16,24	16,07	15,26

**data belum tersedia*
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024 (data 2022 dan 2023); Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2025 (data 2024)

Data distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia di Kota Magelang menunjukkan dominasi konsumsi oleh kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi yang terus meningkat dari 46,95% pada tahun 2020 menjadi 54,55% pada tahun 2024. Sementara itu, porsi pengeluaran kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah cenderung menurun dari 36,80% menjadi 30,19%, begitu pula kelompok 40% berpendapatan rendah yang stagnan pada kisaran 14-16%. Pola ini mengindikasikan adanya konsentrasi daya beli di kelompok atas, yang dapat memperbesar kesenjangan konsumsi antar kelompok pendapatan. Kondisi tersebut dapat menunjukkan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Diperlukan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas belanja kelompok menengah dan bawah seperti memperkuat jaringan keselamatan sosial, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memastikan pembangunan infrastruktur yang merata. Langkah ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi Kota Magelang tidak hanya dinikmati oleh kelompok atas, tetapi juga mendorong inklusi dan pemerataan pembangunan antarkelompok sosial.

2.1.3.2.10 Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi di berbagai sektor. Indikatornya mencakup investasi riset, kualitas sumber daya manusia, kolaborasi penelitian dan industri, serta akses teknologi. Pada 2021, Indeks Inovasi Daerah Kota Magelang sebesar 52,36% dan meningkat menjadi 59,28% pada 2023. Kapabilitas inovasi daerah juga naik dari 3,52% pada 2022 menjadi 3,65% pada 2023, menunjukkan kemajuan dalam inovasi. Selain itu, Kota Magelang berpartisipasi dalam *Innovative Government Award* (IGA) 2020, memaparkan tujuh dari 111 inovasi unggulannya dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2024 nilai indeks inovasi daerah Kota Magelang naik menjadi 71,87 dan menempati peringkat 14 dengan predikat sangat inovatif.



Gambar 2.83 Inovasi Daerah

1. SIMPEL (Sistem Pemakaman Online) yang merupakan aplikasi yang digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang. SIMPEL adalah sistem dimana administrasi pemakaman menjadi mudah. Pemohon/ahli waris dapat mendaftar perijinan pemakaman, perpanjangan ijin pemakaman, ijin pemakaman tumpangan dan perpanjangan ijin makam tumpangan serta pemesanan petak makam secara online. Inovasi ini mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Top 5 kategori Kabupaten/Kota Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
2. DataGO (Portal Data Sektoral) yang merupakan sistem informasi satu data terpadu Kota Magelang yang mengakomodir produsen data sektoral di lingkup OPD, instansi vertikal, lembaga swasta, dan institusi pendidikan. Mekanisme DataGO digerakan secara *online*, terintegrasi dan didukung oleh asisten virtual Bang Data yang terkoneksi dengan aplikasi Telegram. DataGo terbukti sebagai Sistem Satu Data yang berdampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta berperan dalam mewujudkan *evidence based policy making*.
3. Magelang Cerdas: *One Stop Public Service and Information Portal With One Touch* yang merupakan portal satu pintu untuk layanan publik dan informasi publik berbasis elektronik (digital). Fitur

unggulan semuanya elektronik atau digital dalam Magelang Cerdas antara lain: Layanan Kesehatan, Layanan Kependudukan, Layanan Perizinan, Layanan Pendidikan, Portal Data, Layanan Pengaduan (Monggo Lapor), Tanya Dokter, Harga Komoditas, Layanan Statistik, Layanan Perpajakan, dan Layanan Informasi. Aplikasi Magelang Cerdas termasuk salah satu quick wins Kota Magelang saat masuk 25 besar Kota Cerdas (*Smart City*) di Indonesia.

4. Si Sakti (Aksi Siyap Antar Akte Kematian) yang merupakan penerapan inovasi pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang. Layanan ini berguna dalam mempercepat penerbitan kutipan akta kematian dan mendistribusikan kepada pihak keluarga sebelum jenazah dikebumikan. Terbitnya akta kematian tersebut juga meliputi dikeluarkannya Kartu Keluarga (KK) terbaru, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik milik suami atau istri yang ditinggal. Semua dokumen tersebut telah mengalami perubahan elemen data.
5. HATII PAKKEM (Hazmat dari RSUD Tidar Inovasi Coverall Pakai Kembali) dan SUSTER MAHISA (Sinar Ultraviolet Sterilisasi Masker Higienis dan Aman) yang merupakan inovasi dari RSUD Tidar Kota Magelang. HATII PAKKEM merupakan karya inovasi terbaik yang dirilis oleh Kemenpan RB pada gelaran Inovasi Covid-19. HATII PAKKEM yang diciptakan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini ternyata mampu memberikan peran yang berarti dalam penggunaan hazmat dengan dampak yang lebih baik dari tenaga medis, kelangkaan APD dan limbah yang dihasilkan. Sedangkan SUSTER MAHISA yang memiliki peran dalam proses sterilisasi Masker N-95 agar dapat digunakan kembali telah memberikan peran yang berarti terhadap ketersediaan Masker N-95 yang cukup terbatas di pasaran.
6. Cek KIR (Uji Kendaraan Bermotor) merupakan pelayanan yang diluncurkan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang yang dilakukan berbasis online. Hal ini dilakukan langsung oleh masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung biaya uji sebelum datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk melakukan pengujian.

Salah satu indikator yang penting untuk menunjukkan kondisi inovasi daerah adalah dengan indikator Kapabilitas Inovasi. Kapabilitas inovasi merupakan pilar ke-12 komponen pembentuk Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tabel 2.55 di bawah ini menunjukkan perkembangan kapabilitas inovasi daerah pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.55 Kapabilitas Inovasi Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kapabilitas Inovasi	NA	NA	3,52	3,65	3,57

**data belum tersedia*
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025 diakses melalui link https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah

Tingkat Kapabilitas Inovasi Kota Magelang menunjukkan nilai yang relatif stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni 3,52 pada 2022, naik sedikit menjadi 3,65 pada 2023, lalu kembali turun menjadi 3,57 pada 2024. Meskipun belum tersedia data pada 2020 dan 2021, tren ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan kapasitas inovatif daerah, meskipun belum menunjukkan lonjakan signifikan.

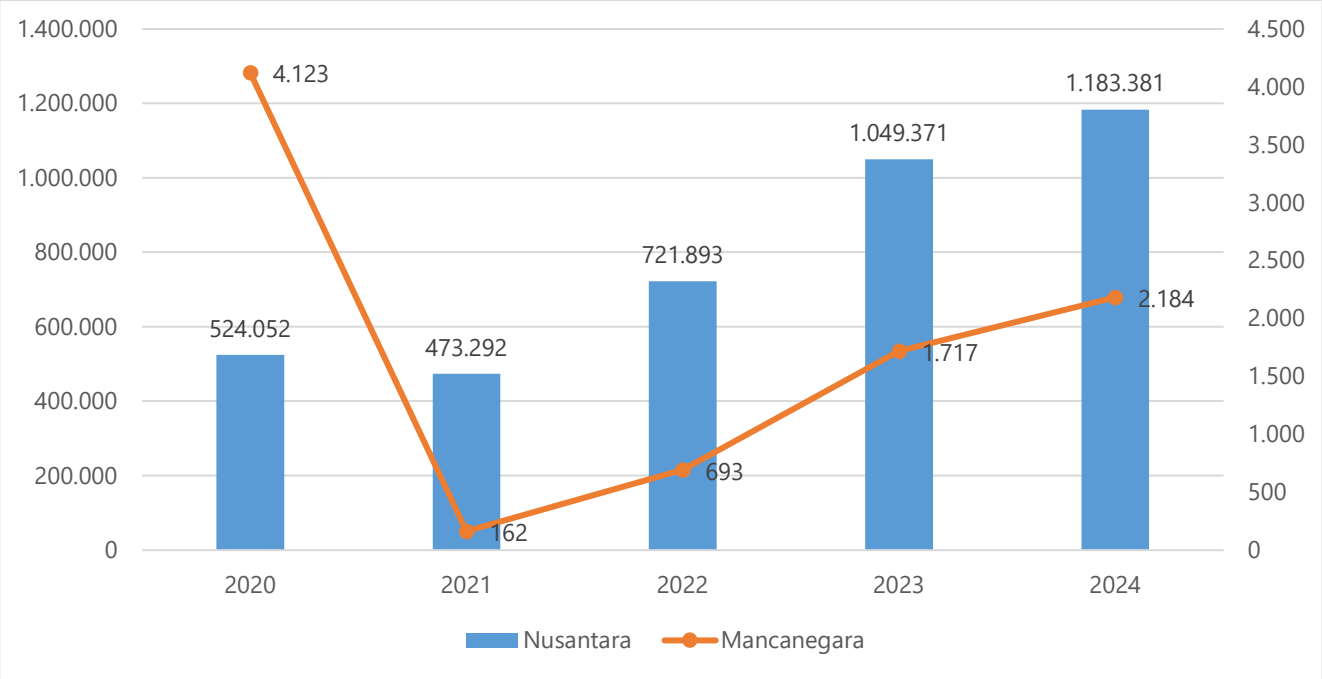
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, indikator ini penting sebagai cerminan kemampuan daerah dalam menciptakan solusi baru, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Nilai kapabilitas inovasi yang cenderung datar menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut, seperti peningkatan investasi riset dan penguatan ekosistem inovasi daerah melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

2.1.3.2.11 Pariwisata

Sektor pariwisata berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan sektor lain melalui keterkaitan ekonomi. Selain itu,

sektor ini juga mendukung ekonomi kerakyatan dengan menghidupkan industri kreatif. Berdasarkan RPJPD Kota Magelang 2025-2045, kota ini diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa, termasuk dalam mendukung sektor pariwisata.

Data capaian kinerja 2020-2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Magelang, baik domestik maupun mancanegara, disajikan pada Gambar 2.84 berikut ini.



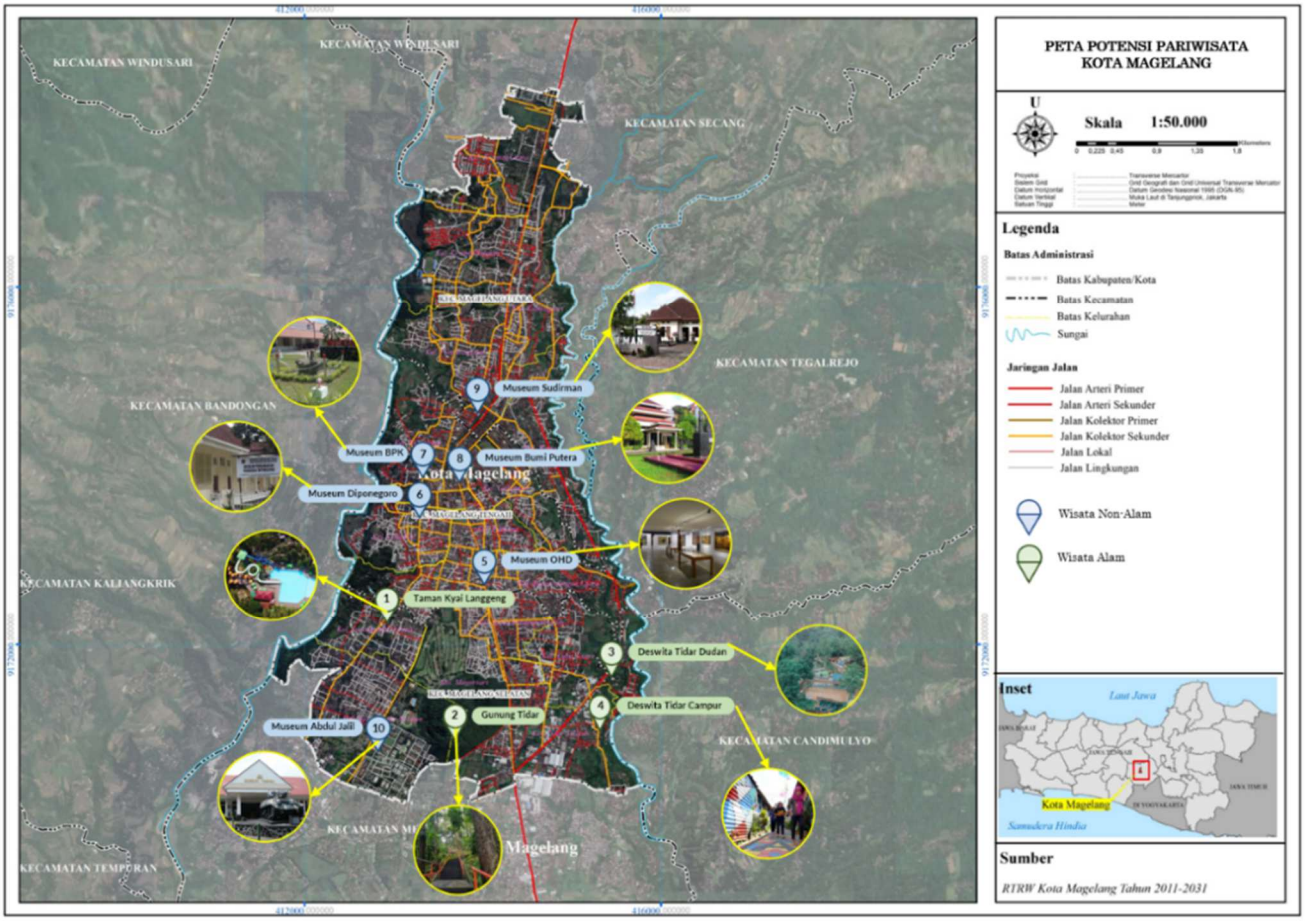
Gambar 2.84 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Kota Magelang mengalami penurunan jumlah wisatawan selama 2020-2021, terutama wisatawan mancanegara yang turun hingga 92%. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas, termasuk di sektor pariwisata. Pada 2022, jumlah kunjungan wisatawan domestik mulai meningkat, menandakan pemulihan sektor pariwisata. Namun, tren pada wisatawan mancanegara tetap menurun, tersaji pada Gambar 2.84 berikut.

Kota Magelang memiliki berbagai daya tarik wisata yang dapat dikembangkan, termasuk wisata budaya, pendidikan, ziarah/religius, alam, dan wisata buatan. Beberapa destinasi unggulan di antaranya adalah Taman Kyai Langgeng, Museum Sudirman, Museum BPK, Museum Diponegoro, Museum OHD, Museum Abdul Jalil, Museum Bumi Putera, Gunung Tidar, Borobudur Golf, Kebun Bibit Senopati, Mantyasih, serta beberapa desa wisata dan kampung tematik seperti Deswita Tidar Dudan, Pokdarwis Potrobangsan, Pokdarwis Tidar Utara, Desa Wisata Tidar Campur, serta kampung iklim dan kampung religi.

Namun, belum semua destinasi tersebut dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip sapta pesona (aman, tertib, bersih, indah, ramah, dan berkesan) kecuali Desa Wisata Tidar Campur. Selain itu, Kota Magelang juga memiliki potensi event wisata tahunan seperti Grebeg Gethuk, Kirab Budaya Ndalu, Reli Mobil Kuno, Magelang Fair, dan berbagai kegiatan lainnya. Peta persebaran potensi wisata Kota Magelang dapat dilihat pada Gambar 2.85 berikut.



Gambar 2.85 Peta Persebaran Potensi Wisata

Sumber: RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Selain daya tarik wisata diatas, Kota Magelang juga memiliki potensi wisata lain yang dapat dikembangkan, seperti sentra kuliner di berbagai lokasi, termasuk Sentra Kuliner Tuguran, Pusat Kuliner Armada Estate, Sentra Kuliner Jendalan, dan Sentra Kuliner Ngara'an. Selain itu, keberadaan pusat perbelanjaan dan Pasar Tukangan juga berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, pengelolaan potensi wisata ini masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum adanya lisensi layak sehat bagi sentra kuliner serta kurangnya integrasi antara daya tarik wisata dengan sektor UMKM lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan daya tarik wisatawan melalui sinergi antar sektor, termasuk dengan industri UMKM.

Dari segi objek wisata, kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2023 sebanyak 745.169 wisatawan. Wisatawan tertinggi tercatat di Gunung Tidar (45%) dan Taman Kyai Langgeng (39%), yang menunjukkan minat tinggi terhadap wisata alam. Sementara itu, wisatawan mancanegara lebih banyak mengunjungi objek wisata sejarah, dengan Museum OHD sebagai destinasi utama yang mencatat sebanyak 346 wisatawan asing.

Tabel 2.56 Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Obyek Wisata Kota Magelang Tahun 2021-2024

No	Nama Tempat	2021		2022		2023		2024	
		Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man
1	Museum Diponegoro	999	-	5.607	-	9.761	-	7.754	-
2	Museum Abdul Jalil	1.714	-	1.910	-	20.175	-	41.127	-
3	Museum AJB Bumi Putera	132	-	673	-	893	-	1.342	-
4	Museum BPK RI	9.760	-	31.889	-	49.477	-	60.467	-

No	Nama Tempat	2021		2022		2023		2024	
		Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man	Nus	Man
5	Museum Sudirman	710	-	4.374	-	6.165	-	9.140	4
6	Museum OHD	1.541	5	3.980	92	3.980	346	4.030	248
7	TKL Ecopark	149.308	-	355.072	-	288.286	-	225.272	-
8	Borobudur Golf	16.690	-	22.639	-	20.251	-	13.688	-
9	Kebun Raya Gunung Tidar	148.620	-	286.415	-	334.641	-	317.561	6
10	Mantyasih	922	-	3.068	-	3.920	-	4.622	-
11	Kebun Bibit Senopati	958	-	6.266	-	7.448	-	6.280	-
12	Van der Steur	-	-	-	-	-	-	491	59
13	Proklim Bersemi	-	-	-	-	-	-	3.974	7
14	S C Gelora Sanden	-	-	-	-	-	-	111.420	-
15	Event Kota	-	-	-	-	84.864	86	167.083	25
	TOTAL	**331.354**	**5**	**721.893**	**92**	**829.861**	**432**	**974.251**	**349**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, 2025

Data pada Tabel 2.56 menunjukkan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Nus) dan mancanegara (Man) ke berbagai destinasi wisata di Kota Magelang selama periode 2021 hingga 2024. Terdapat peningkatan total kunjungan signifikan dari 331.359 kunjungan pada tahun 2021 menjadi 974.600 kunjungan pada tahun 2024. TKL Ecopark dan Kebun Raya Gunung Tidar merupakan dua destinasi paling dominan dalam menarik wisatawan domestik, meskipun pada tahun 2024 jumlah kunjungannya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kontribusi wisatawan mancanegara masih sangat kecil dan hanya tercatat di beberapa destinasi seperti Museum OHD, Van der Steur, Proklim Bersemi, dan Event Kota.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kota Magelang memiliki potensi besar dari pasar domestik, namun masih perlu penguatan promosi dan fasilitas untuk menarik wisatawan mancanegara. Kegiatan berbasis komunitas dan event kota tampak mulai menyumbang jumlah kunjungan yang signifikan, menandakan pentingnya pengembangan ekowisata dan atraksi lokal dalam perencanaan kepariwisataan. Selain itu, keberadaan destinasi edukatif seperti museum masih relevan, namun perlu peningkatan manajemen agar lebih optimal dalam menarik wisatawan. Peningkatan ini penting untuk mendukung visi Kota Magelang sebagai tujuan wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Daya tarik wisata sejarah di Kota Magelang lebih diminati wisatawan mancanegara dibanding wisatawan domestik. Namun, penurunan jumlah wisatawan asing menunjukkan bahwa pengelolaan wisata sejarah belum optimal dalam mempertahankan daya tariknya. Secara strategis, Kota Magelang berada di jalur wisata utama Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass-Dataran Tinggi Dieng serta berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan destinasi regional lainnya di Gelangmanggung. Meskipun belum mampu menangkap limpahan wisatawan dari destinasi tersebut, Kota Magelang memiliki peluang besar untuk meningkatkan kunjungan jika daya tarik wisatanya dioptimalkan. Untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas objek wisata, sekaligus sebagai upaya pembangunan rendah karbon, angkutan umum dapat dihidupkan kembali sebagai salah satu bentuk transportasi massal.

Jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi mengalami penurunan dari 50 kelompok (2019) menjadi 35 kelompok (2020), seiring dengan menurunnya kunjungan museum sebesar 22,6% akibat pandemi.

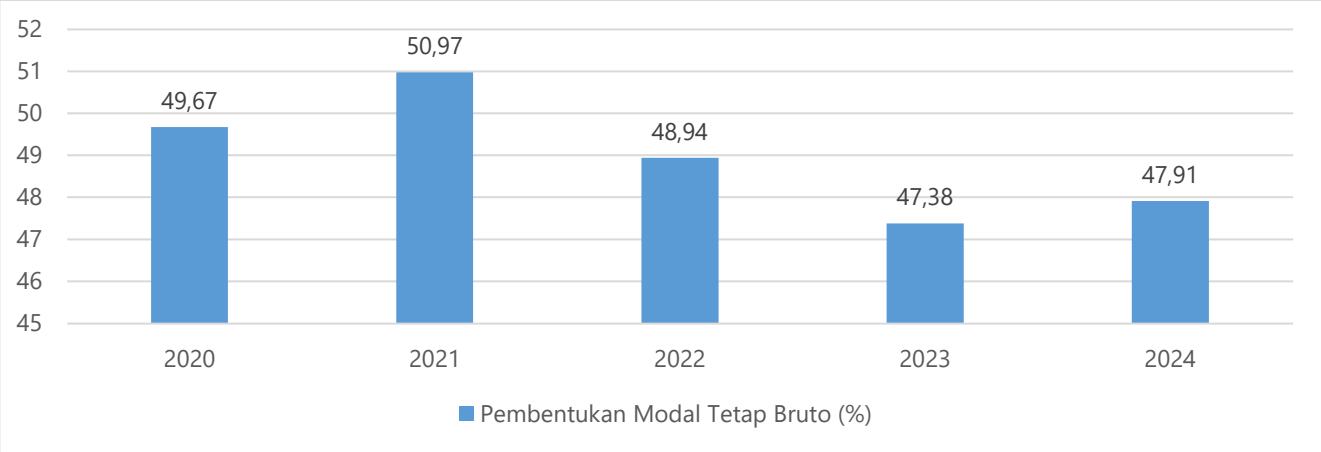
Namun, perlindungan cagar budaya meningkat dengan bertambahnya enam benda cagar budaya yang terdaftar dalam Sistem Registrasi Nasional, sehingga totalnya mencapai 42 pada tahun 2022. Meski demikian, Kota Magelang belum tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang dapat membantu pelestarian cagar budaya.

Tantangan utama bagi sektor pariwisata Kota Magelang adalah meningkatkan daya saing wisata sejarah agar lebih menarik bagi wisatawan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi informasi wisata, promosi dalam bentuk paket wisata, serta konservasi dan penataan objek wisata sejarah. Selain itu, sejarah lokal dan seni budaya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata.

2.1.3.3 Daya Saing Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.3.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) merupakan indikator penting stabilitas ekonomi daerah. yang dapat mengindikasikan dinamika investasi daerah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan ketersediaan lapangan kerja. Gambar 2.86 di bawah ini menunjukkan dinamika pembentukan modal tetap bruto pada periode 2020-2024.



Gambar 2.86 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Gambar 2.86 menunjukkan tren Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024. PMTB mengalami puncaknya pada tahun 2021 sebesar 50,97%, kemudian cenderung menurun hingga mencapai titik terendah 47,38% pada tahun 2023, dan sedikit meningkat kembali menjadi 47,91% di tahun 2024.

Tren ini menunjukkan bahwa kontribusi investasi tetap terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, setelah sempat meningkat pada masa pemulihan pasca-pandemi. Fluktuasi ini bisa mencerminkan perubahan prioritas kebijakan fiskal, tingkat kepercayaan investor, atau kapasitas pembiayaan proyek pembangunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menjaga konsistensi dan kualitas investasi, khususnya pada sektor-sektor produktif.

2.1.3.3.2 Nilai Ekspor Barang dan Jasa

Nilai Ekspor tahun 2024 US$ 3.098.437. Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor pada tahun 2024 baru 2 (dua) pelaku usaha dengan 2 (dua) komoditas yaitu plastik dan arang batok kelapa. Nilai ekspor Kota Magelang setiap tahun mengalami fluktuasi. Kontribusi ekspor terbesar berasal dari produk plastik (Joyoboyo), diikuti oleh produksi batok arang (CV. Cahaya Anak Negeri).

Nilai ekspor sebagai salah satu sumber devisa perlu dioptimalkan. Pada tahun 2024, Sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar ke 3 (tiga) terhadap PDRB Kota Magelang sebesar 13,98%. Hal tersebut tidak lepas dari peranan Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan fasilitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik.

Tabel 2.57 Net Ekspor Barang dan Jasa ADHB dan ADHK Kota Magelang Tahun 2020-2024

Nilai Ekspor	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa ADHB [Juta Rp]	4.837.319,21	-2.460.785,66	-2.376.568,20	-239.430,00	-2.558,25
Net Ekspor Barang dan Jasa ADHK [Juta Rp]	3.055.971,34	-1.227.897,39	-1.113.171,9	-.092.160,00	-1.071,51

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Net ekspor barang dan jasa, baik dalam ADHB maupun ADHK, menunjukkan fluktuasi. Net ekspor merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi makro, khususnya terkait Agregat Permintaan. Penurunan net ekspor ADHB dapat menekan total permintaan agregat, sementara peningkatan net ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ADHK, perubahan net ekspor langsung memengaruhi komponen ekspor, yang berdampak pada pendapatan daerah, konsumsi, dan investasi. Fluktuasi ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, sehingga diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mengelola dampaknya.

2.1.3.4 Daya Saing Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.4.1 Transportasi

Transportasi berperan penting dalam meningkatkan konektivitas perkotaan, tidak hanya sebagai sarana mobilitas orang dan barang, tetapi juga sebagai pilar utama perekonomian dan kehidupan sosial kota. Sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi mempermudah akses ke berbagai fasilitas dan peluang, seperti lapangan kerja, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi. Di Kota Magelang, layanan transportasi darat didukung oleh Terminal Tipe A dan sub-terminal Tipe C. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan Terminal Tipe A Tidar dialihkan ke pemerintah provinsi sejak 2016. Sementara itu, Kota Magelang bertanggung jawab atas pengelolaan Terminal Tipe C, yakni Terminal Magersari.

Tabel 2.58 Jumlah Sarana Perhubungan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah angkutan barang	769	102	97	135	140
Jumlah angkutan kota	335	200	226	157	146
Jumlah armada taksi	50	13	10	11	7
Jumlah terminal kelas A	1	1	1	1	1
Jumlah terminal kelas C	1	1	1	1	1
Jumlah travel	43	12	15	0	23

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel 2.58, beberapa sarana perhubungan di Kota Magelang mengalami penurunan sepanjang 2020-2024. Jumlah kendaraan angkutan perkotaan berkurang dari 335 unit pada 2020 menjadi 146 unit pada 2024, atau turun 56,42%. Selain itu, jumlah kendaraan taksi juga mengalami penurunan cukup signifikan dalam periode 2020-2024, yaitu 50 unit pada tahun 2020 menjadi 7 unit di

tahun 2024 atau menurun sebesar 86%. Sarana perhubungan yang juga mengalami penurunan adalah jumlah travel juga angkutan barang. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan angkutan umum, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebiasaan perjalanan masyarakat serta meningkatnya penggunaan transportasi pribadi.



Gambar 2.87 Jumlah Pengguna Angkutan Umum, 2020-2024

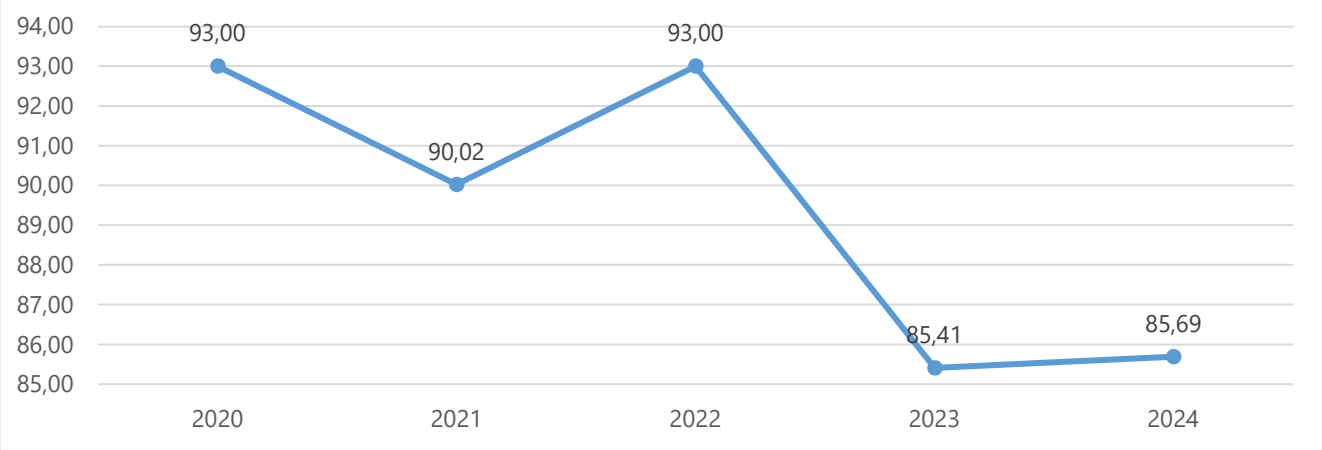
Sumber: RKPD Kota Magelang Tahun 2024 (Data tahun 2020-2022), Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025 (Data tahun 2023-2024)

Dilihat dari sisi jumlah pengguna angkutan umum di Kota Magelang, dalam periode 2020-2024 juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan meskipun dalam kurun waktu 2022-2024 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2024, hanya sebesar 10.673 pengguna angkutan umum di Kota Magelang. Dalam konteks *load factor* angkutan umum, selama 2020-2024 juga berada pada kisaran 31-35% dengan rincian tahun 2024 masih sebesar 35,08%. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagaimana Kota Magelang menyediakan angkutan umum yang memenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga pola hidup masyarakat tidak bertumpu pada angkutan pribadi.

2.1.3.4.2 Jaringan Jalan

Kondisi jalan yang mantap berperan penting dalam mendukung sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta mendorong pemerataan pembangunan daerah. Jalan mantap mencakup kondisi baik dan sedang, sementara jalan rusak ringan dan berat dikategorikan tidak mantap.

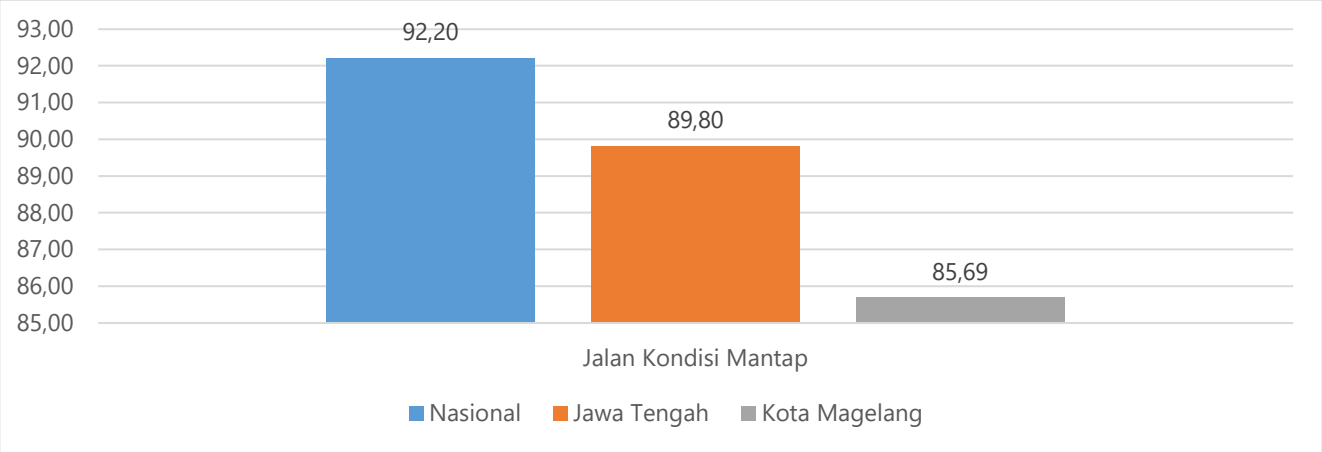
Kondisi jalan mantap tersaji pada (Gambar 2.88). Kondisi Jalan Mantap mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama 2020-2024. Pada dua tahun terakhir, persentase kondisi jalan mantap sedikit meningkat dari 85,41 pada tahun 2023 menjadi 85,69 pada tahun 2024 Meskipun demikian, kondisi ini masih lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah maupun Nasional pada tahun 2023.



Gambar 2.88 Persentase Kemantapan Jalan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Perbandingan kondisi Jalan mantap Kota Magelang dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersaji pada Gambar 2.89 berikut ini.



Gambar 2.89 Perbandingan Persentase Kemantapan Jalan Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang Tahun 2024

Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 (data Nasional dan Jawa Tengah); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025 (data Kota Magelang)
**Data Nasional dan Jawa Tengah menggunakan realisasi 2023*

Beberapa ruas jalan di Kota Magelang tergolong padat, khususnya jalan protokol seperti Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ikhlas juga Jalan Achmad Yani dengan V/C ratio pada kisaran 0,7 (Tabel 2.59). Meski belum kritis, masalah utama terletak pada manajemen lalu lintas yang kurang optimal, seperti pengaturan lampu lalu lintas yang tidak efisien, banyaknya putaran kendaraan di median jalan, serta parkir di tepi jalan yang mengurangi kapasitas jalan.

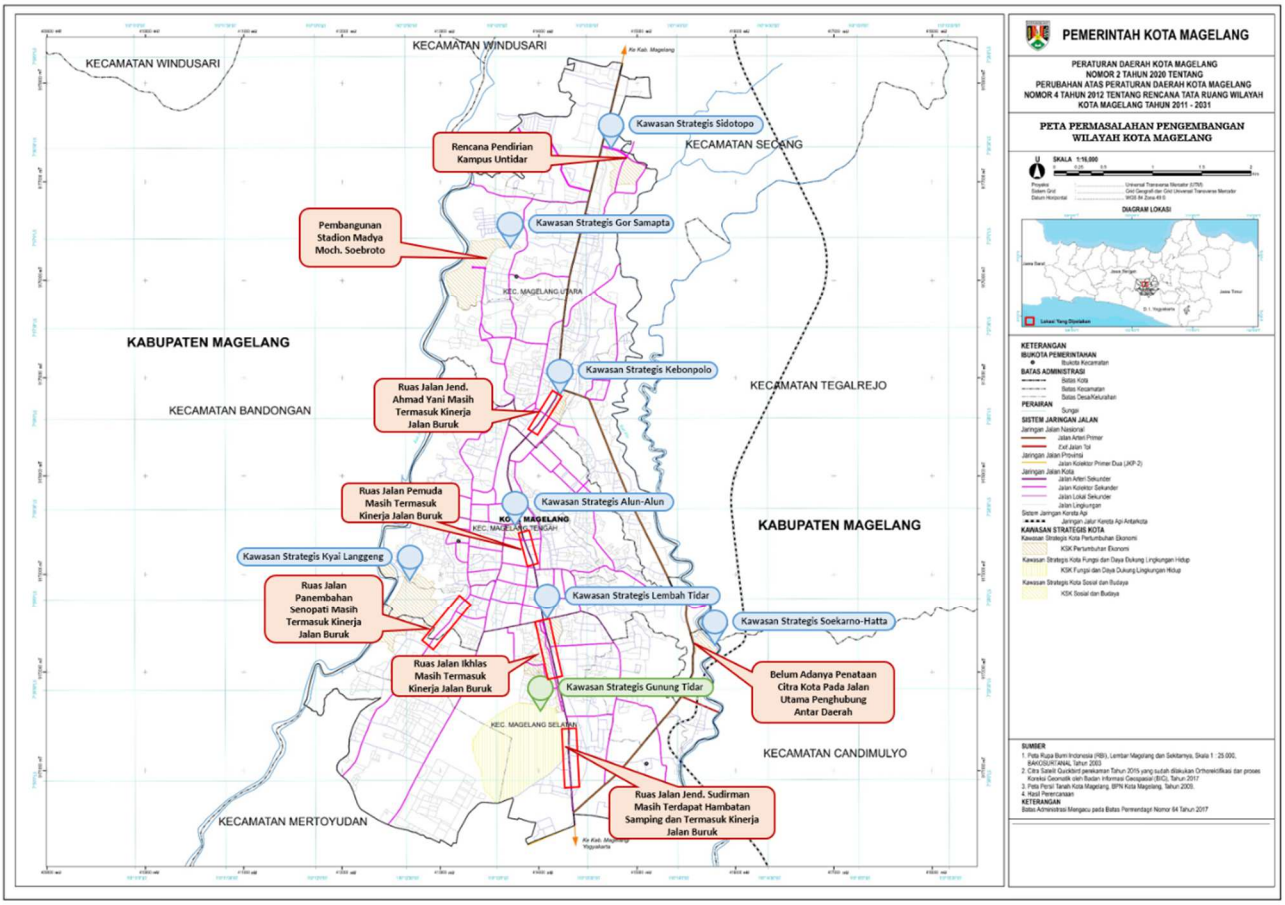
Tabel 2.59 Perankingan Jalan Terburuk di Kota Magelang Tahun 2024

No	Nama Jalan	V/C Ratio
1	Jalan Pemuda	0,72
2	Jalan Pahlawan	0,71
3	Jalan Jendral Sudirman	0,70
4	Jalan Ikhlas	0,70
5	Jalan Jend. Achmad Yani	0,70
6	Jalan Pajajaran	0,69
7	Jalan Pangeran Diponegoro	0,63
8	Jalan Kyai Mojo	0,60
9	Jalan Mataram	0,58
10	Jalan Singosari	0,55
11	Jalan Mayjend Sutoyo	0,53
12	Jalan Telaga Warna	0,52
13	Jalan Gatot Subroto	0,51
14	Jalan Daha	0,48
15	Jalan Suprapto	0,42
16	Jalan Tidar	0,35

No	Nama Jalan	V/C Ratio
17	Jalan Sultan Agung	0,33
18	Jl. Kol Sugiono	0,33
19	Jalan Yos Sudarso	0,33
20	Jalan Veteran	0,31

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Magelang, 2025

Kota Magelang memiliki lokasi strategis dengan mobilitas tinggi, terutama di ruas jalan utama. Berdasarkan RTRW 2011-2031, terdapat Kawasan Strategis Kota untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk Kawasan Strategis Alun-Alun (Jl. Pemuda dan Pangeran Diponegoro), Kawasan Strategis Lembah Tidar (Jl. Jend. Sudirman, Jl. Ikhlas, dan Jl. Mataram), serta Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar (Jl. Mataram). Selain itu, kota ini berada di jalur ekonomi dan transportasi antara Yogyakarta-Magelang dan Semarang seperti ditunjukkan oleh Peta pengembangan Kawasan Strategis yang disajikan pada Gambar 2.90 berikut.



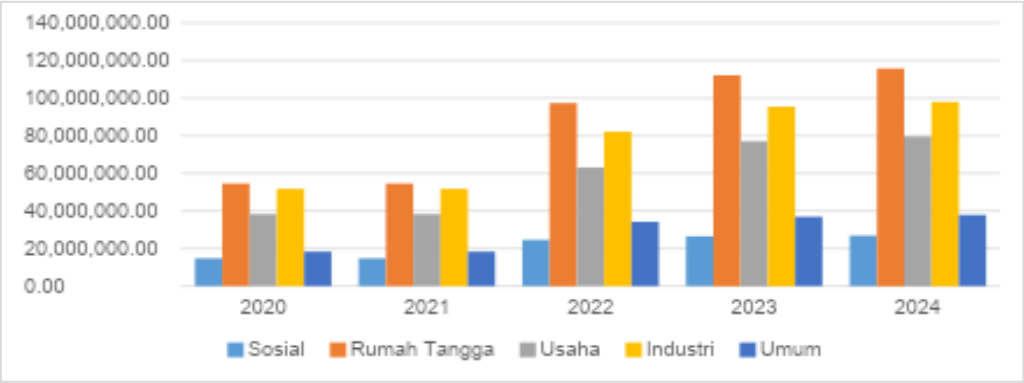
Gambar 2.90 Peta Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota Magelang

Sumber: Peta Rencana Kawasan Strategis RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 (diolah)

Dengan target pengembangan kawasan strategis tersebut, kondisi jalan menjadi salah satu faktor penting untuk pencapaian kesuksesan pembangunan. Kinerja ruas jalan yang mulai tidak optimal ditambah kondisi mantap jalan belum mencapai 100% berpotensi menjadi kendala bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen lalu lintas yang lebih baik serta peningkatan kondisi jalan untuk mendukung kelancaran transportasi, ekonomi, dan kegiatan sosial di Kota Magelang.

2.1.3.4.3 Listrik

Listrik yang stabil merupakan infrastruktur dasar yang sangat vital bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi di perkotaan. Keandalan pasokan listrik mendukung operasional industri, perdagangan, layanan publik, serta pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi kota. Tanpa listrik yang stabil, produktivitas akan terganggu dan daya saing kota dalam menarik investasi akan menurun.

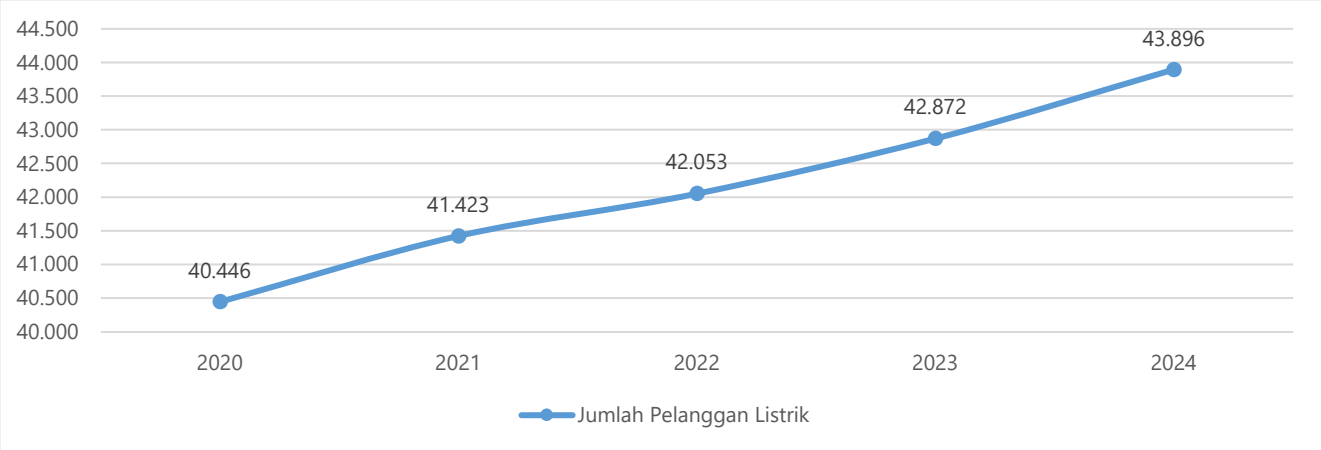


Gambar 2.91 Pemakaian Listrik Pasca Bayar (kWh) berdasarkan kelompok pelanggan di Kota Magelang tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2020-2025

Kota Magelang memiliki ketergantungan tinggi pada listrik, dengan pemakaian listrik pascabayar tahun 2024 pada seluruh kelompok pelanggan meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Pada 2025, konsumsi terbesar berasal dari rumah tangga (115.840.187 kWh), sementara kelompok sosial memiliki penggunaan terendah (26.831.708 kWh). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi listrik di Kota Magelang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, terutama pada sektor rumah tangga, usaha, dan industri, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang makin dinamis.

Selanjutnya jumlah pelanggan listrik tersaji pada Gambar 2.92 berikut.



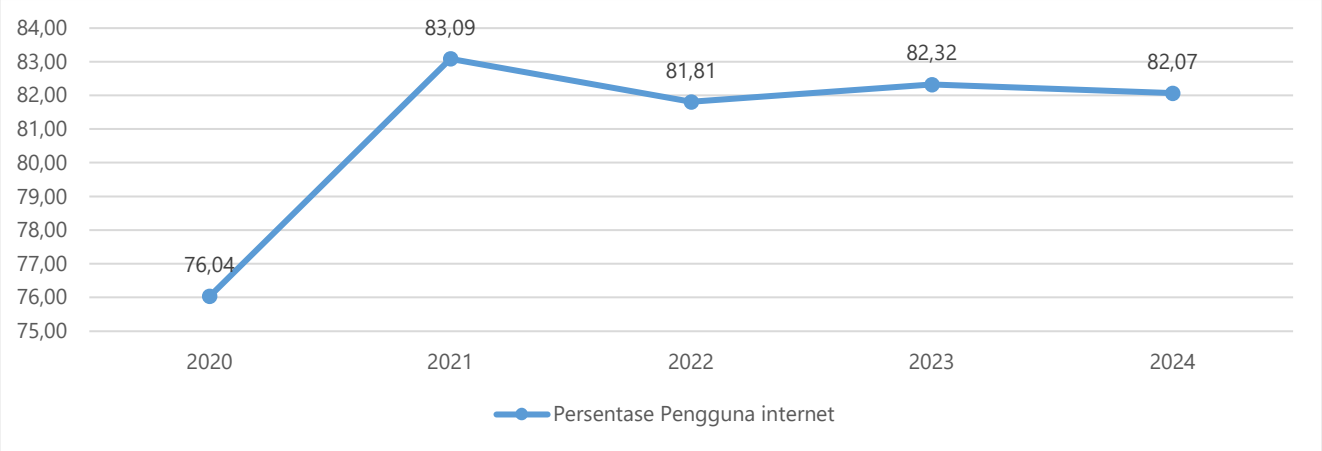
Gambar 2.92 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Magelang tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2020-2025

Jumlah pelanggan listrik PLN juga terus bertambah setiap tahun, mencapai 43.896 pelanggan pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan perluasan akses dan kebutuhan energi, yang menjadi indikator penting bagi perencanaan infrastruktur kota yang berkelanjutan dan responsif terhadap pertumbuhan penduduk dan sektor ekonomi.

2.1.3.4.4 Akses Internet

Transformasi digital menjadi indikator utama pembangunan di Kota Magelang, mendorong inovasi dan efisiensi. Akses internet berperan penting dalam pertukaran informasi, komunikasi, serta kolaborasi, membuka peluang baru bagi individu dan organisasi. Selain itu, internet mendukung inklusi digital, memungkinkan akses lebih luas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang transparan. Gambar 2.93 berikut menyajikan persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet di Kota Magelang pada periode 2020-2024.



Gambar 2.93 Persentase Individu Di Atas 5 tahun yang Menggunakan Internet di Kota Magelang tahun 2020-2024

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Gambar 2.93 menunjukkan tren persentase individu di atas 5 tahun yang menggunakan internet di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Terdapat peningkatan signifikan dari 76,04% pada tahun 2020 menjadi 83,09% pada tahun 2021, kemudian sedikit menurun dan stabil di kisaran 81-82% pada tiga tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan tingkat penetrasi internet yang relatif tinggi dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti setelah tahun 2021. Meningkatnya penggunaan internet di tahun 2021 disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang membuat banyak pihak harus beraktifitas secara online dari rumah, dan setelah itu perlahan menjadi hal normal dalam kehidupan.

Data ini memperlihatkan bahwa akses terhadap internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kota Magelang. Stabilnya tingkat penggunaan internet di atas 80% sejak 2021 menunjukkan bahwa infrastruktur digital sudah relatif merata dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong transformasi digital di sektor pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, stagnasi dalam peningkatan persentase pengguna juga menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjangkau kelompok masyarakat yang masih belum mengakses atau memanfaatkan internet secara optimal, termasuk melalui literasi digital dan perluasan jaringan.

2.1.3.4.5 Drainase

Drainase merupakan prasarana penting bagi masyarakat kota. Pada 2021, terjadi perubahan kewenangan drainase di Kota Magelang, dimana jaringan drainase sekunder menjadi bagian pelengkap jalan, sementara jaringan primer menghubungkan drainase sekunder ke Sungai Progo dan Sungai Elo.

Tabel 2.60 Kondisi Saluran Drainase di Kota Magelang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang drainase dalam kondisi baik (m)	219.859	4.930	5.136	6.555	7.024
Panjang drainase (m)	237.830	**20.230	**20.230	**20.230	**20.230

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	**92,44%**	**24,37%**	**25,39%**	**32,40%**	**34,75%**

*** Perubahan Kewenangan Drainase Kota Menjadi Drainase Primer saja berdampak pada Perubahan Panjang Drainase*
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

Selama 2021-2022, persentase panjang drainase dalam kondisi baik meningkat sebesar 4,18%. Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Magelang meningkat dari 24,37% (2021) menjadi 34,75% (2024), namun masih di bawah 50%. Banyak saluran masih tersumbat, berisiko meluap, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk dan limbah. Jika tidak ditingkatkan, dampaknya meliputi kemacetan akibat genangan, lingkungan tidak sehat, dan gangguan kesehatan. Solusi selain perbaikan fisik mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pembangunan tangki pemeliharaan dan penyaring sampah di saluran air.

2.1.3.4.6 Air Bersih

Kota Magelang masih bergantung pada sumber air di luar wilayahnya, terutama dari Kabupaten Magelang. Terdapat lima sumber mata air, namun hanya Mata Air Tuk Pecah yang berada di dalam kota. Sebagian besar kebutuhan air bersih sudah terpenuhi melalui jaringan perpipaan yang mencakup hampir seluruh wilayah. Kota Magelang juga memiliki beberapa sumber air kecil-kecil yang beberapa telah dimanfaatkan untuk SPAM komunal seperti yang terdapat di lokasi berikut:

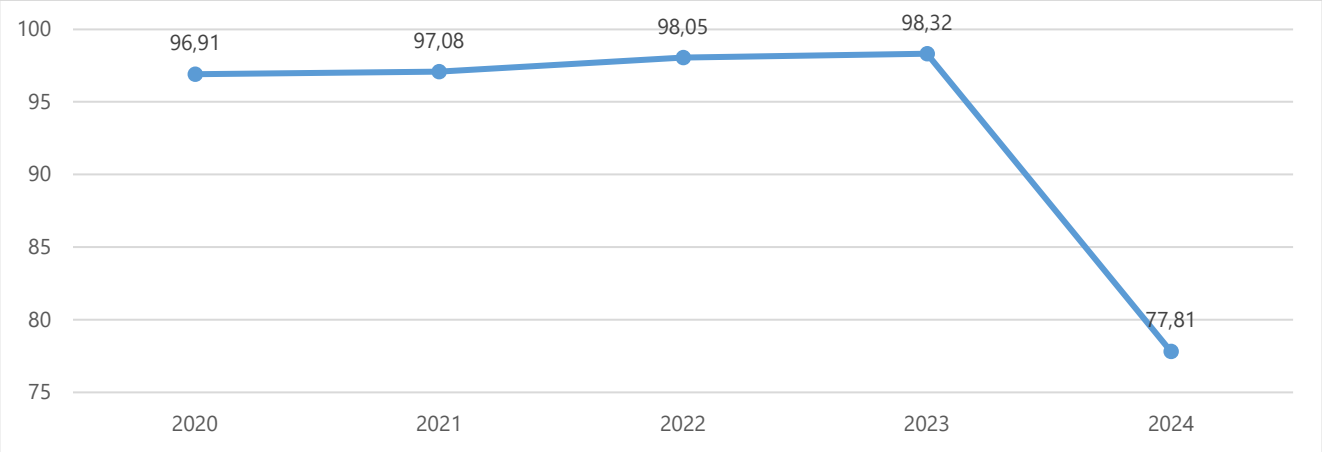
1. Kramat Utara, Magelang Utara, Kota Magelang (Jambu)
2. Jl. Pahlawan No.115, Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (Beliksari) (0,5 L/detik)
3. Jl. Nanas No.30, Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (Pajangan)
4. Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (Bodongan) (0,74 L/detik)
5. Jl. Jeruk, Kramat Selatan, Kota Magelang (Gor Samapta)
6. Gang Potrobangsan 1 No. 377, Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (Nglarangan)
7. Magelang, Kecamatan Magelang Tengah (Drajat) (1,96 L/detik)
8. Jl. Tentara Pelajar No. 26a, Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang (Gladiool) (0,01 L/detik)
9. Jalan Sriwijaya No. 41, Panjang Rejo, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Panjang (Telaga Warna 1) (1,95 L/detik)
10. Jalan Sriwijaya No. 41, Panjang Rejo, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Panjang (Telaga Warna 2) (0,92 L/detik)
11. Jl. Flores, Wates, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang (Legok Kalisari)
12. Wates Pontaan, No. 269, RT 01/ RW 04, Wates Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (Kaliwesi) (0,53 L/detik)
13. Jl. Tidar Campur No. 4, Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang (Tidar Campur) (0,51 L/detik)
14. Cacaban RT 1 RW 9, Magelang Tengah, Kota Magelang (Mata Air Cacaban)

Dokumen RISPAM Kota Magelang 2022 mengidentifikasi beberapa kendala dalam penyelenggaraan SPAM, seperti pelestarian daerah tangkapan air dan perizinan karena sumber air berada di Kabupaten Magelang. Selain itu, peningkatan cakupan pelanggan menuntut ketersediaan air baku yang lebih besar,

sementara pertumbuhan penduduk juga meningkatkan produksi sampah yang berisiko mencemari sumber air. Perubahan iklim semakin memperumit situasi dengan potensi kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan air baku, seperti memanfaatkan sumber air Kalibening di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dan memperkuat kerja sama antar daerah dalam pelestarian daerah tangkapan air.

2.1.3.4.7 Akses Air Minum Layak dan Siap Minum

Akses air minum layak di Kota Magelang terus meningkat, dengan persentase rumah tangga yang terlayani naik 10,44% pada periode 2020-2023. Namun, pada tahun 2024, data menunjukkan penurunan signifikan dari 98,32% di tahun 2023, menjadi 77,81 % di tahun 2024. Kesenjangan layanan ini terutama terjadi di perkotaan. Peningkatan akses air bersih sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan, termasuk stunting pada balita.



Gambar 2.94 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Gambar 2.94 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Kota Magelang semula sangat tinggi dan relatif stabil, namun mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun terakhir, yang disebabkan perubahan formulasi perhitungan jumlah Rumah Tangga, yang membuat meningkatnya jumlah basis Rumah Tangga di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan potensi kerentanan dalam keberlanjutan layanan air bersih yang dapat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam pengelolaan infrastruktur air minum dan penguatan sistem distribusi agar layanan tersebut dapat menjangkau seluruh rumah tangga secara adil dan berkelanjutan.

Persentase air siap minum perpipaan merupakan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria seperti rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan, lokasi sumber air minum berada didalam atau halaman rumah, tersedia setiap saat dibutuhkan dan memenuhi standar kualitas kesehatan sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023. Realisasi persentase air siap minum perpipaan Kota Magelang sebagai berikut :

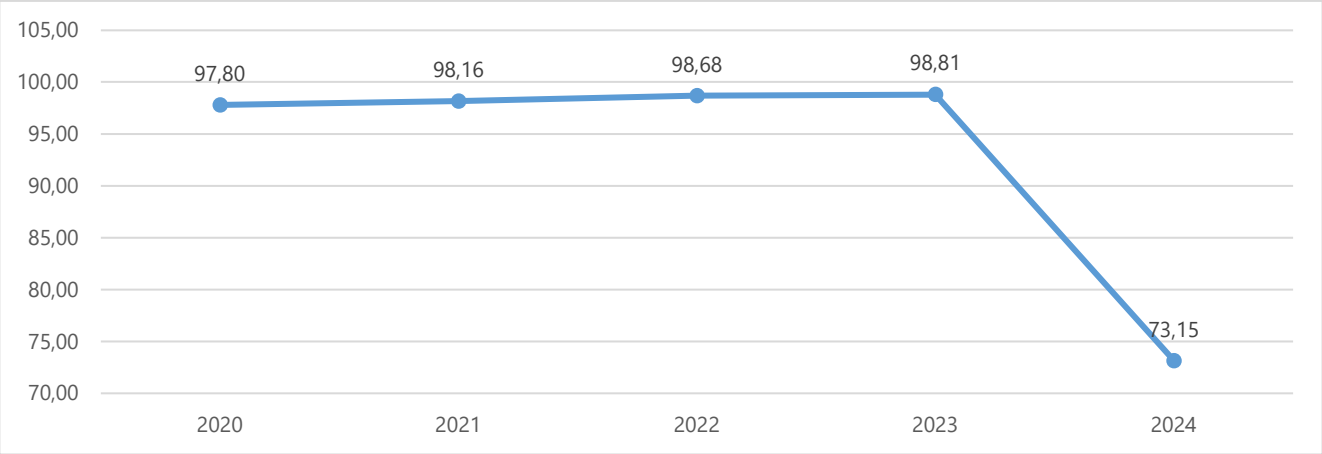
Tabel 2.61 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	1.66%	1.42%	85.88%	88.21%	89.43%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.8 Sanitasi Layak dan Aman

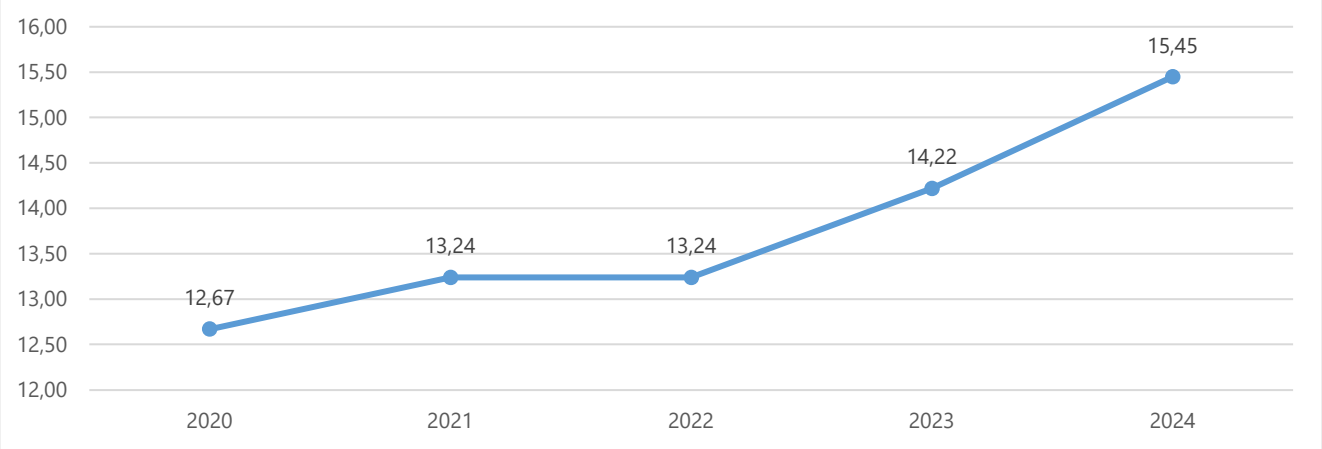
Data mengenai akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak dan aman sangat penting dalam pembangunan Kota Magelang karena mencerminkan kualitas infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan sanitasi yang memadai berkontribusi langsung terhadap kesehatan publik, pengurangan penyakit menular, serta lingkungan pemukiman yang bersih dan berkelanjutan. Sama seperti kondisi Air Minum Layak, penurunan di tahun terakhir disebabkan perubahan formulasi perhitungan jumlah Rumah Tangga, yang membuat meningkatnya jumlah basis Rumah Tangga di tahun 2024. Oleh karena itu, fluktuasi atau penurunan capaian dalam layanan ini perlu segera direspons melalui perencanaan dan investasi infrastruktur yang tepat guna memastikan seluruh warga menikmati hak atas sanitasi yang layak dan aman.



Gambar 2.95 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Selanjutnya Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman pada Gambar 2.96 di bawah ini.



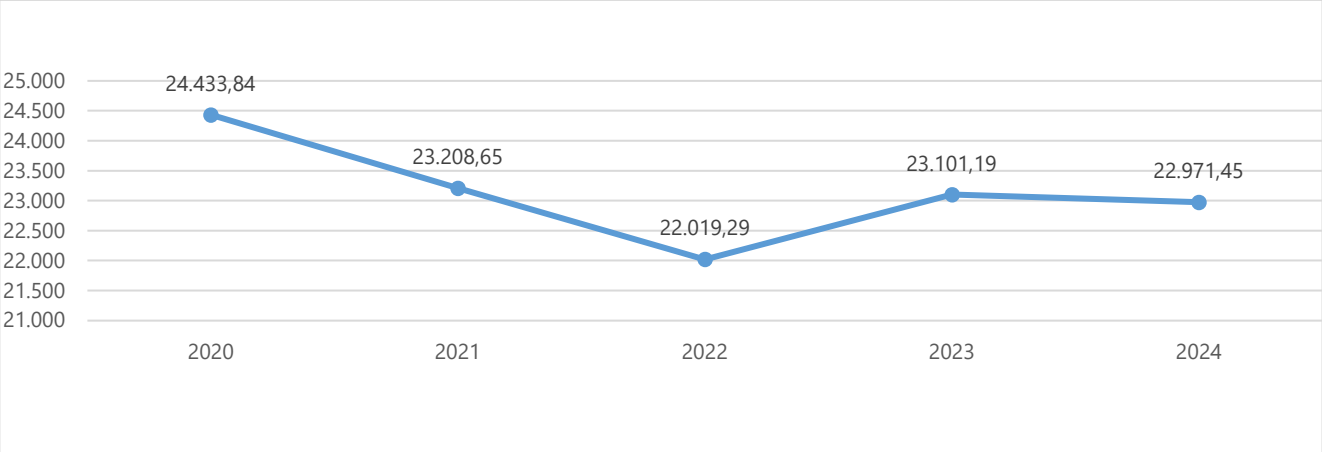
Gambar 2.96 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Akses sanitasi aman di Kota Magelang mengalami tren peningkatan pada 2020-2023, dengan peningkatan 2,22 %. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan menjadi 15,45%. Hal ini menunjukkan masih ada rumah tangga yang belum terlayani, dengan 3% belum menerapkan higienitas limbah domestik pada 2022. Peningkatan akses sanitasi layak penting untuk kesehatan dan kualitas hidup. Perbaikan kondisi akses sanitasi aman hingga tahun 2023 perlu kembali menjadi prioritas bila melihat turunnya pemenuhan aspek ini untuk permukiman Kota Magelang.

2.1.3.4.9 Persampahan dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kota Magelang menghadapi tantangan akibat pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang berpotensi meningkatkan volume sampah. Seiring perkembangan teknologi dan aktivitas sosial ekonomi, timbulan sampah diperkirakan terus bertambah. Gambar 2.97 di bawah ini menunjukkan peningkatan valume sampah di Kota Magelang.



Gambar 2.97 Volume Sampah yang Tertangani (ton) Kota Magelang tahun 2021-2024

Sumber: SIPSN, 2025

Berdasarkan data SIPSN (2025), volume sampah yang tertangani di Kota Magelang menunjukkan tren fluktuatif dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah sampah tertangani mencapai 24.433,84 ton, kemudian menurun menjadi 23.208,65 ton pada 2021 dan turun lebih lanjut hingga titik terendah 22.019,29 ton pada 2022. Setelah itu, terjadi sedikit perbaikan dengan meningkatnya volume sampah yang tertangani menjadi 23.101,19 ton pada 2023, namun kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 22.971,45 ton pada 2024. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya penanganan, secara umum volume sampah yang dapat tertangani cenderung belum stabil dan belum mampu kembali ke capaian awal pada tahun 2020.

Fluktuasi yang hanya sedikit tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas dalam sistem pengelolaan persampahan di Kota Magelang, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun efektivitas program pengurangan dan pengolahan sampah. Penurunan capaian di tahun 2021-2022 dapat mencerminkan meningkatnya timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan penanganan. Meskipun ada perbaikan pada 2023, penurunan kembali pada 2024 menunjukkan bahwa persoalan persampahan masih menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi konsisten.

Selain itu, kondisi persampahan juga ditunjukkan melalui volume sampah tertangani melalui pemrosesan akhir dan volume sampah yang di daur ulang seperti pada Tabel 2.61 di bawah ini.

Tabel 2.62 Pemrosesan Sampah di Kota Magelang 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir (ton)	1.495,68	2.300,80	4.326,64	4,379,63	4,995,31
Volume sampah yang didaur ulang (ton)	24.029,05	23.308,65	22.019,29	23.101,19	2.297,45

Sumber: Datago Kota Magelang, 2025

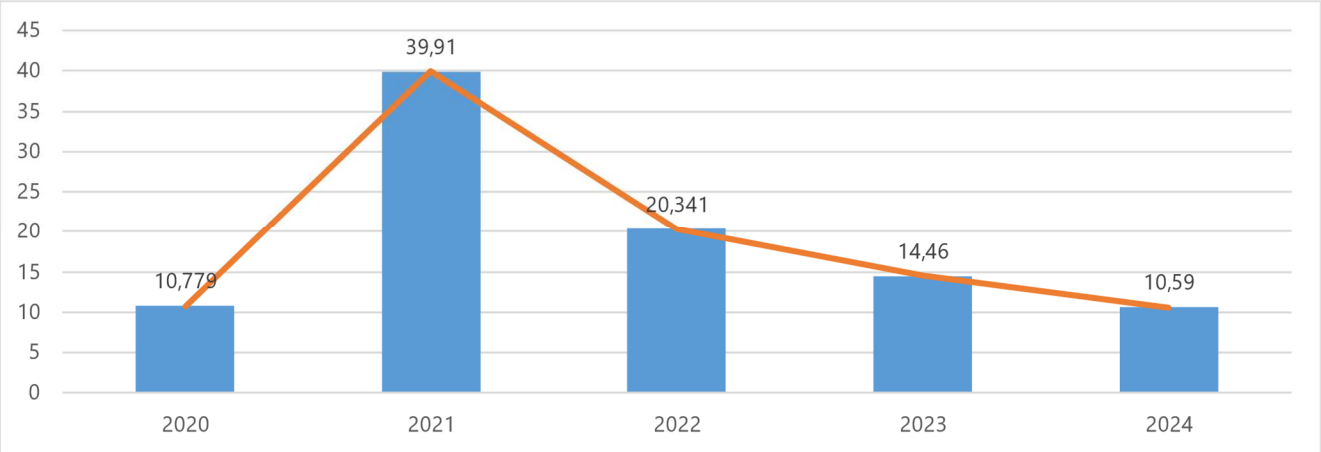
Data pada Tabel 2.61 menunjukkan tren peningkatan volume sampah yang ditangani melalui pemrosesan akhir di Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa jumlah sampah yang diproses meningkat signifikan dari sekitar 1.495 ton pada 2020 menjadi hampir 5.000 ton pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas fasilitas pemrosesan sampah, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun manajemen pengelolaan yang lebih optimal.

Namun, pada saat yang sama, volume sampah yang didaur ulang justru menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis. Dari lebih dari 24.000 ton pada tahun 2020, volume sampah daur ulang menurun tajam menjadi hanya sekitar 2.297 ton pada 2024. Penurunan ini bisa menjadi sinyal menurunnya efektivitas program daur ulang, melemahnya partisipasi masyarakat, atau terbatasnya pasar daur ulang. Hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan berkelanjutan Kota Magelang, mengingat daur ulang merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan.

Kota Magelang memiliki sistem pengelolaan sampah melalui penyediaan 5 TPS3R, 57 Bank Sampah yang tersebar di seluruh kecamatan, serta 13 Kampung Organik. Selain itu, program Kampung Iklim juga menjadi salah satu intervensi yang berkontribusi pada pengurangan timbulan sampah melalui kegiatan seperti pengelolaan sampah rumah tangga, komposting, dan daur ulang berbasis komunitas. Program ini tidak hanya berfungsi untuk pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi wadah adaptasi perubahan iklim di tingkat komunitas melalui peningkatan ketahanan lingkungan dan partisipasi warga dalam menjaga kualitas ekosistem lokal. Namun, efektivitas keseluruhan sistem masih terbatas, karena sebagian besar sampah yang didaur ulang masih lebih banyak ditangani oleh pengepul/lapak dibandingkan Bank Sampah, TPS3R, maupun unit pengelolaan di Kampung Iklim. Hanya sebagian kecil Bank Sampah dan kelompok pengelola di wilayah Kampung Iklim yang berfungsi optimal dengan kelembagaan yang efektif dan mampu mendorong ekonomi sirkular di sektor persampahan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan Bank Sampah, penguatan kapasitas pengelola Kampung Iklim, serta tindak lanjut hasil daur ulang agar tidak hanya mengurangi sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

2.1.3.4.10 Perumahan dan Permukiman

Pemerintah menargetkan kota bebas kumuh dengan fokus pada penyediaan infrastruktur perumahan yang memadai. Upaya ini sejalan dengan konsep akses universal 0-100, yakni 100% akses air minum layak, 0% permukiman tidak layak huni, dan 100% akses sanitasi memadai. Kota Magelang, dengan luas 1.856 hektar dan kepadatan penduduk yang tinggi, menghadapi tantangan dalam mengatasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas bervariasi seperti pada Gambar 2.98 berikut.



Gambar 2.98 Luas Permukiman Kumuh (Ha) Kota Magelang, 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, 2025

Pada 2021, luas kawasan kumuh di Kota Magelang meningkat akibat perubahan jumlah indikator permukiman kumuh dari 19 menjadi 16. Indikator yang dihapus terkait drainase dan pengelolaan sampah, yang berkontribusi pada bertambahnya kawasan kumuh. Namun, pada 2022-2024, luas permukiman kumuh terus berkurang.

Kepadatan penduduk dan keterbatasan lahan menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan bebas kumuh. Upaya perbaikan dilakukan melalui subsidi rumah swadaya, yang menurunkan jumlah Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) dari 4.707 unit (2015) menjadi 2.852 unit (2020), dengan realisasi renovasi 277 unit. Pemerintah juga menyediakan hunian vertikal, termasuk tiga rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Potrobangsan, Tidar Utara, dan Wates, sebagai solusi atas keterbatasan lahan. Namun, peralihan ke hunian vertikal masih memerlukan perubahan budaya dan penerimaan masyarakat.

Backlog perumahan dan permukiman kumuh tetap menjadi tantangan, terutama dengan pertumbuhan penduduk yang akan meningkatkan kebutuhan hunian. Saat ini, jumlah penduduk sekitar 4.265 jiwa atau 32.522 KK, dengan kebutuhan perumahan yang masih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan keterbatasan lahan tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sektor lainnya.

Perwujudan hunian layak perkotaan yang optimal dan berkelanjutan perlu didukung oleh sarana prasarana lingkungan yang baik, perwujudan integrase transportasi publik perkotaan dan regional yang andal, nyaman, ramah lingkungan serta terkoneksi secara efisien, infrastruktur transportasi dan sistem transportasi yang mendukung transportasi ramah lingkungan, guna meningkatkan konektivitas, mengurangi emisi serta mendukung keberlanjutan kota. Realisasi prosentase rumah tangga dengan akses hunian layak Kota Magelang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 72,51% menjadi 78,27% pada tahun 2024. Hal ini membuktikan adanya upaya peningkatan perwujudan infrastruktur yang baik.

Tabel 2.63 Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak Kota Magelang, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga dengan akses hunian layak	72,51 %	77,79 %	75,45%	76,16 %	78,27%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

UMKM menjadi sektor penting dalam menopang perekonomian Kota Magelang sebagai Kota Jasa, dengan kontribusi terbesar ketiga dalam PDRB berasal dari sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Untuk mendukung perkembangannya, Pemerintah Kota Magelang memberikan perhatian besar, salah satunya dengan membangun IKM Center pada 2022 sebagai pusat pembinaan dan pemasaran produk UMKM. Jumlah Pelaku UMKM tersaji pada Tabel 2.62 berikut.

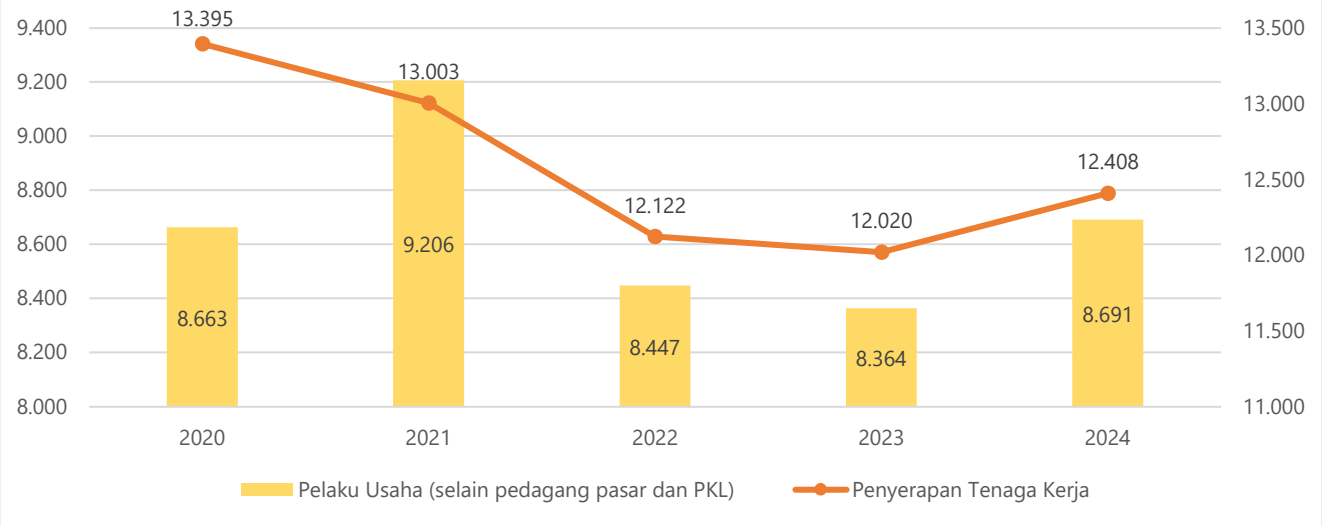
Tabel 2.64 Pelaku UMKM Kota Magelang Tahun 2020-2024

Tahun	Pelaku UMKM				Pertumbuhan
	Jumlah Pelaku Usaha Non-PKL dan Pedagang Pasar	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	Total	
2020	8.663	1.453	613	10.729	NA
2021	9.206	1.387	560	11.153	3,95
2022	8.447	1.516	572	10.535	-5,54
2023	8.364	1.468	709	10.541	0,06
2024	8.691	1.468	749	10.909	3,49

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025

Pada tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di Kota Magelang baik yang berasal dari pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan lainnya relatif menujukkan perbaikan mengingat dampak melambatnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Pelaku UMKM di Kota Magelang berhasil meningkat 3,49% di tahun 2024 dengan total 10.909 pelaku. Sebanyak 8.691 pelaku usaha diantaranya mampu memberikan dampak ekonomi dengan mempekerjakan 12.408 tenaga kerja pada tahun 2024.

Informasi penyerapan tenaga kerja disajikan dalam Gambar 2.99 berikut.



Gambar 2.99 Jumlah Pelaku Usaha dan Serapan Tenaga Kerja UMKM di Kota Magelang tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025

Pertumbuhan UMKM di Kota Magelang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelaku usaha, tenaga kerja, dan akses modal. Tantangan seperti keterbatasan pendanaan, perubahan teknologi, globalisasi, dan persaingan ketat menuntut UMKM untuk memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang. Untuk mendukung promosi dan pemasaran, Pemerintah Kota Magelang telah merintis aplikasi Magelang Cerdas, yang mulai beroperasi pada awal 2019, memungkinkan promosi produk UMKM secara daring dan memperluas jangkauan pasar.

Tabel 2.65 Jenis Koperasi di Kota Magelang, 2020-2024

Tahun	Koperasi Produsen	Koperasi Konsumen	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Jasa	Koperasi Pemasaran	Jumlah
2020	14	161	36	2	6	**219**
2021	14	161	36	2	6	**219**
2022	18	165	45	4	8	**240**
2023	18	165	45	4	8	**240**
2024	18	165	45	4	8	**240**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025

Kota Magelang memiliki berbagai jenis koperasi, dengan koperasi konsumen sebagai yang terbanyak, mencapai 165 unit pada 2024 naik 4 unit dari 2020. Dominasi koperasi konsumen mencerminkan tingginya preferensi industri dalam memenuhi kebutuhan melalui pendekatan kolaboratif.

Untuk memperkuat peran UMKM dan koperasi dalam perekonomian Kota Magelang, diperlukan peningkatan akses modal, dukungan teknologi, serta pengembangan pasar dan promosi. Kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan dalam menyediakan kredit terjangkau serta adopsi inovasi akan membantu sektor ini meningkatkan daya saing dan berkontribusi lebih besar bagi ekonomi kota.

2.1.3.4.12 Perindustrian

Kementerian Perindustrian mewajibkan industri memperbarui data melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sejak 2020, Pemerintah Kota Magelang aktif mendorong pendaftaran industri, dengan 8 industri telah terdaftar. Industri kecil dan menengah, seperti makanan, minuman, tekstil, serta

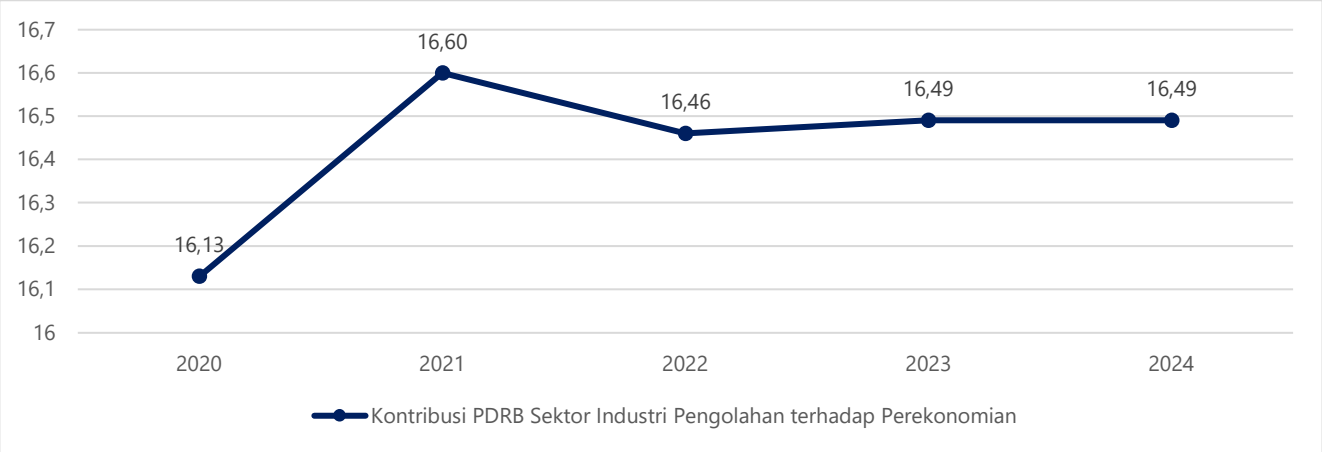
pengolahan tembakau dan kayu, berperan penting dalam perekonomian kota. Pada 2024, sektor industri pengolahan menyumbang 16,49% terhadap PDRB. Untuk meningkatkan manfaatnya, diperlukan optimalisasi hubungan antara industri kecil dan besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Tabel 2.66 Perkembangan Industri Kecil Kota Magelang, 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jml	Tenaga Kerja	Jml	Tenaga Kerja	Jml	Tenaga Kerja	Jml	Tenaga Kerja	Jml	Tenaga Kerja
1	Magelang Utara	441	631	494	728	556	959	553	956	587	1.114
2	Magelang Tengah	626	912	657	1.028	698	1.168	708	1.175	777	1.239
3	Magelang Selatan	613	741	634	1.134	628	1.125	657	1.133	762	1.444
	Total	**1.680**	**2.284**	**1.785**	**2.890**	**1.882**	**3.252**	**1.918**	**3.264**	**2.126**	**3.797**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025

Dilihat dari sisi industri kecil, selama 2020-2024 secara konsisten bertambah dari sisi jumlah dengan total 2.126 industri kecil pada tahun 2024. Bertambahnya jumlah industri tersebut diikuti jumlah serapan tenaga kerja dimana sejumlah 3.797 tenaga kerja terserap di 2024. Hal ini linier dengan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dimana selama 2022-2024 relatif mengalami peningkatan yaitu dari 16,46% di tahun 2022 menjadi 14,49% di tahun 2024 meskipun belum signifikan.



Gambar 2.100 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan terhadap Perekonomian

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

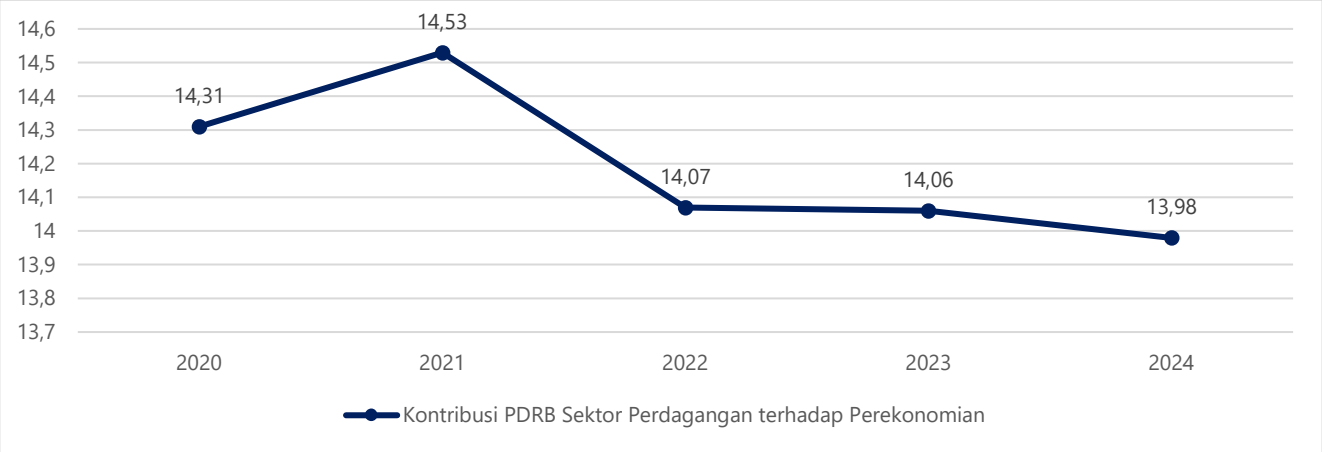
Penambahan industri membuka peluang lebih luas bagi tenaga kerja, namun keterbatasan lahan menjadi kendala utama. Pengembangan industri memerlukan perencanaan tata guna lahan yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Magelang dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mencari solusi inovatif, seperti revitalisasi atau konversi lahan tidak produktif menjadi kawasan industri.

Selain itu, perkembangan industri berisiko menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan limbah industri harus diperketat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Masa depan industri yang berkelanjutan dapat diwujudkan melalui penerapan *eco-industry* dan *green industry* yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan pengendalian dampak lingkungan.

2.1.3.4.13 Perdagangan dan Jasa

Sektor perdagangan di Kota Magelang berperan besar dalam perekonomian daerah yaitu berada di peringkat ketiga setelah industri pengolahan dan konstruksi. Kondisi tersebut sejalan dengan arah

pengembangannya sebagai kota perdagangan dan jasa di Kawasan Gelangmanggung Pada 2024, sektor ini berkontribusi sebesar 13,98% terhadap PDRB Kota Magelang. Sayangnya, jika dilihat dari laju pertumbuhannya dalam kurun waktu 2023-2024 sektor ini mengalami sedikit perlambatan.



Gambar 2.101 Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap Perekonomian

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Stagnasi sektor perdagangan dan jasa di Kota Magelang mencerminkan tantangan pasar yang jenuh dan perubahan pola konsumsi. Untuk mendorong pertumbuhan, dibutuhkan inovasi layanan, peningkatan kualitas, penguatan infrastruktur, dan kemitraan strategis dengan sektor swasta.Letak strategis Kota Magelang sebagai penghubung Semarang dan Yogyakarta, ditambah proyek tol Yogyakarta-Bawen, menjadi peluang besar bagi sektor perdagangan dan jasa. Potensi ini perlu dimanfaatkan agar sektor tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Selain itu, keberadaan Rumah Sakit Tidar sebagai fasilitas kesehatan unggulan di Eks Karesidenan Kedu, serta perguruan tinggi terakreditasi seperti Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Tidar, dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa dan meningkatkan PDRB Kota Magelang.

Tabel 2.67 Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Pasar Ber-SNI	Jumlah Shelter dalam Kondisi Baik	Jumlah Pasar	Jumlah Shelter PKL	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik
2020	1	10	5	19	**45,83%**
2021	1	18	5	19	**79,17%**
2022	1	7	5	22	**29,63%**
2023	1	22	5	22	**85,19%**
2024	1	23	5	23	**85,71%**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang, 2025

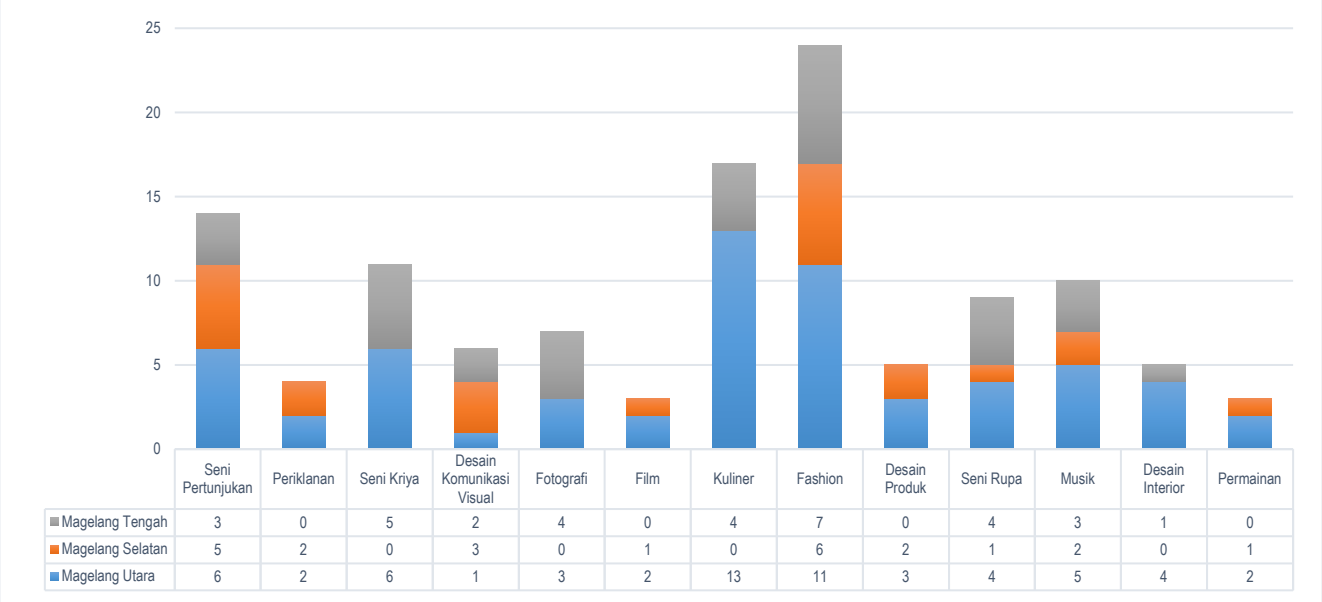
Kota Magelang memiliki lima pasar tradisional serta 23 shelter PKL. Salah satu pasar yaitu Pasar Rejowinangun telah memperoleh sertifikasi SNI 8152:2015 kategori mutu 2 pada tahun 2019. Selain itu, tersedia 26 pasar swalayan dan 17 pasar grosir. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan perdagangan, termasuk tera alat UTTP yang mencapai 7.156 pada tahun 2024, serta fasilitasi perizinan bagi pedagang.

Salah satu tantangan utama Kota Magelang adalah belum adanya produk unggulan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produk unggulan bernilai ekonomi, seperti olahan makanan berkualitas tinggi, serta peningkatan distribusi agar

akses pasar lebih luas. Dengan strategi ini, Kota Magelang dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

2.1.3.4.14 Ekonomi Kreatif

Kota Magelang memiliki potensi ekonomi kreatif yang beragam, terutama di sektor kuliner yang didominasi oleh 13 potensi kuliner di Kecamatan Magelang Selatan. Selain itu, terdapat 24 potensi di sektor fashion yang tersebar di seluruh kota. Pengembangan ekonomi kreatif, terutama kuliner, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika terintegrasi dengan sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa.

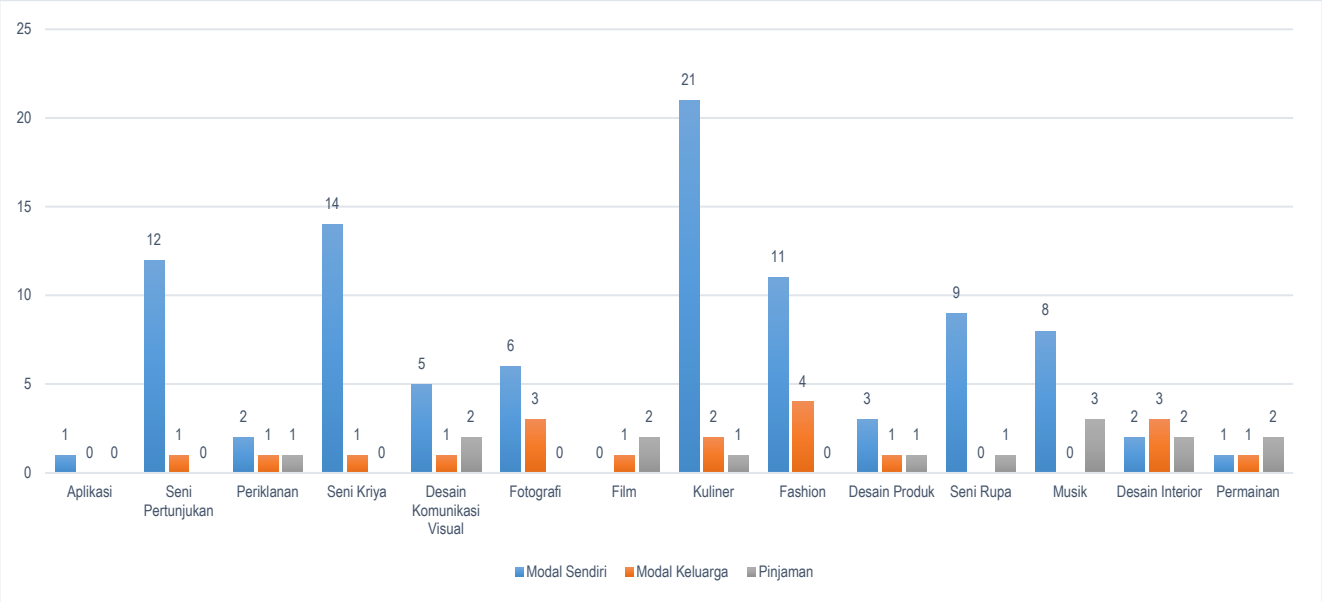


	Seni Pertunjukan	Periklanan	Seni Kriya	Desain Komunikasi Visual	Fotografi	Film	Kuliner	Fashion	Desain Produk	Seni Rupa	Musik	Desain Interior	Permainan
Magelang Tengah	3	0	5	2	4	0	4	7	0	4	3	1	0
Magelang Selatan	5	2	0	3	0	1	0	6	2	1	2	0	1
Magelang Utara	6	2	6	1	3	2	13	11	3	4	5	4	2

Gambar 2.102 Persebaran Ekonomi Kreatif Berdasarkan Kecamatan di Kota Magelang

Sumber: Dokumen Ekonomi Kreatif Kota Magelang tahun 2021

Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif menggunakan modal sendiri, menunjukkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan usaha. Potensi ini dapat semakin berkembang jika didukung oleh peningkatan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif.



Gambar 2.103 Asal Modal Usaha dari Pelaku Ekraf Kota Magelang

Sumber: Dokumen Ekonomi Kreatif Kota Magelang tahun 2021

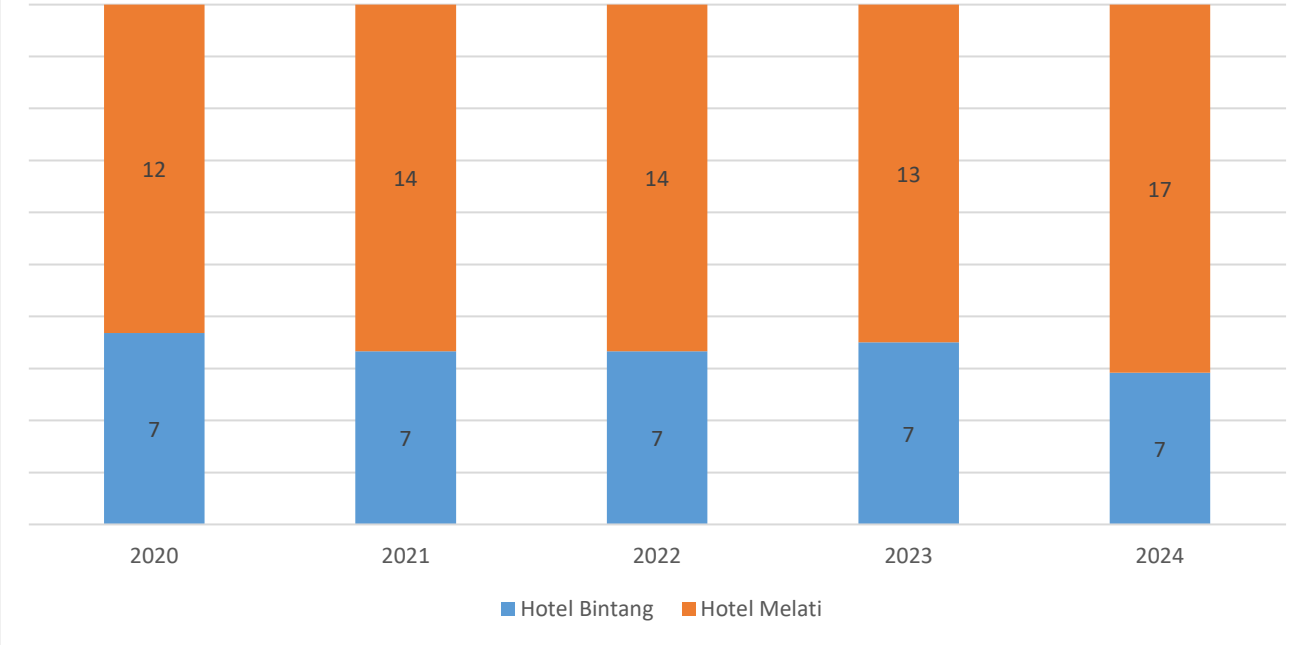
Ekonomi kreatif berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan keterlibatan komunitas. Selain itu, sektor ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan melalui partisipasi masyarakat dalam industri kreatif dan rumahan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan dukungan terhadap UMKM serta industri rumahan menjadi kunci dalam mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.4.15 Jenis dan Jumlah Bank

Akses perbankan yang mudah menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan untuk kegiatan produktif. Hingga tahun 2021, Kota Magelang memiliki 56 lembaga keuangan perbankan, termasuk bank umum, BPR, dan bank syariah. Berdasarkan DataGo Kota Magelang, pada tahun 2021-2022 terdapat 2 Bank Perkreditan Rakyat, 12 Bank Umum Pemerintah, dan 21 Bank Umum Swasta. Keberadaan lembaga keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2.1.3.4.16 Jenis dan Jumlah Penginapan dan Restoran

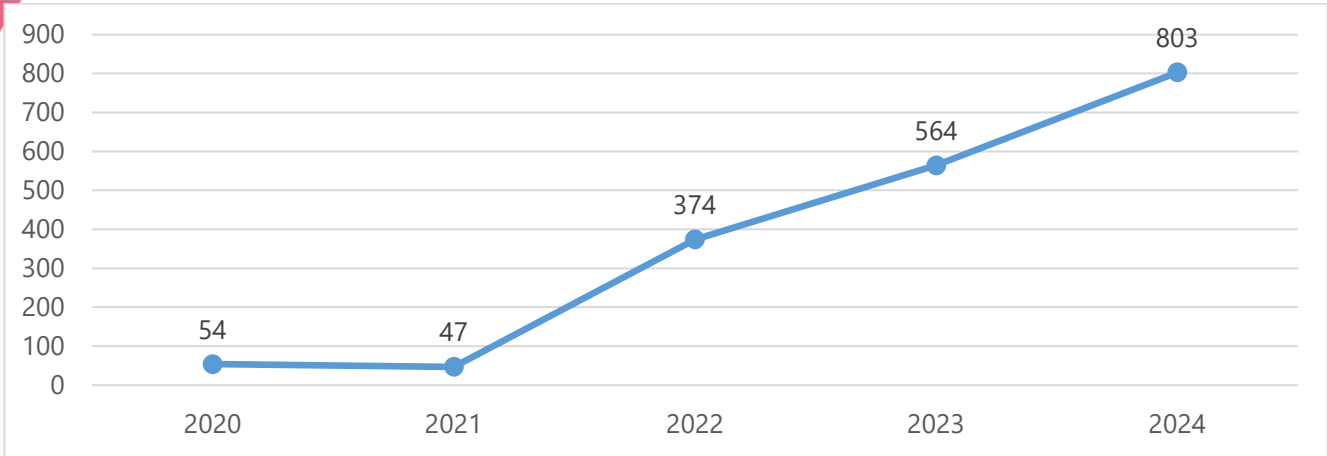
Sebagai kota perdagangan dan jasa, Kota Magelang memiliki 24 hotel pada tahun 2024, dari kelas Melati hingga Bintang 5. Keberadaan hotel dan restoran mendukung sektor jasa, wisata, serta limpahan wisata dari KSPN Borobudur. Investasi di sektor ini meningkat, terutama di Kecamatan Magelang Tengah, seiring berkembangnya aktivitas wisata, perdagangan, dan jasa. Jumah hotel tersaji dalam Gambar 2.104 berikut.



Gambar 2.104 Banyaknya Penginapan/Hotel di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang 2025

Gambar 2.104 menunjukkan tren jumlah penginapan/hotel di Kota Magelang selama periode 2020-2024. Selama lima tahun terakhir, jumlah hotel bintang tetap stabil sebanyak 7 unit, sementara hotel melati mengalami peningkatan dari 12 unit pada 2020 menjadi 17 unit pada 2024. Peningkatan jumlah hotel melati ini menunjukkan pertumbuhan sektor akomodasi yang lebih terjangkau dan mungkin menyesuaikan dengan segmen wisatawan domestik atau lokal yang mencari alternatif penginapan dengan harga lebih rendah. Di sisi lain, jumlah restoran tersaji dalam Gambar 2.105 berikut ini.



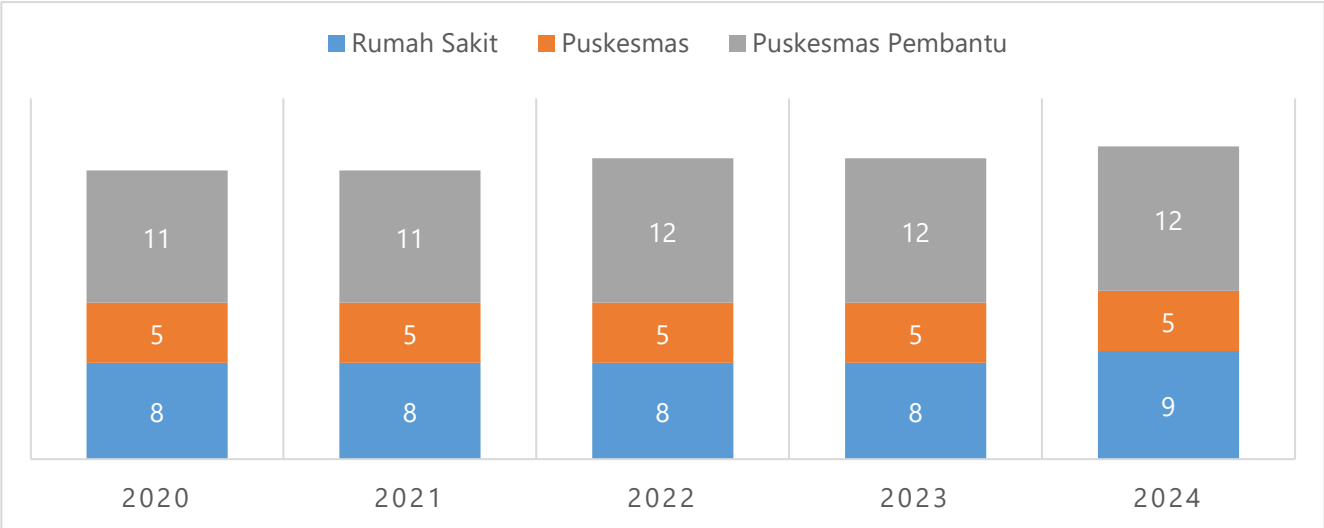
Gambar 2.105 Banyaknya Restoran di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Jawa Tengah (data 2020-2021); DataGo Kota Magelang (Data 2022-2024)

Gambar 2.105 memperlihatkan lonjakan tajam jumlah restoran di Kota Magelang, dari hanya 47–54 unit pada 2020–2021 menjadi 803 unit pada 2024. Pertumbuhan signifikan ini mencerminkan dinamika positif sektor kuliner dan daya tarik wisata kota, sekaligus menandakan peningkatan peluang usaha dan kebutuhan konsumsi masyarakat maupun wisatawan. Tren ini dapat menjadi indikator tumbuhnya ekonomi lokal dan harus ditopang dengan penguatan pengawasan mutu, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan yang baik.

2.1.3.4.17 Fasilitas Kesehatan

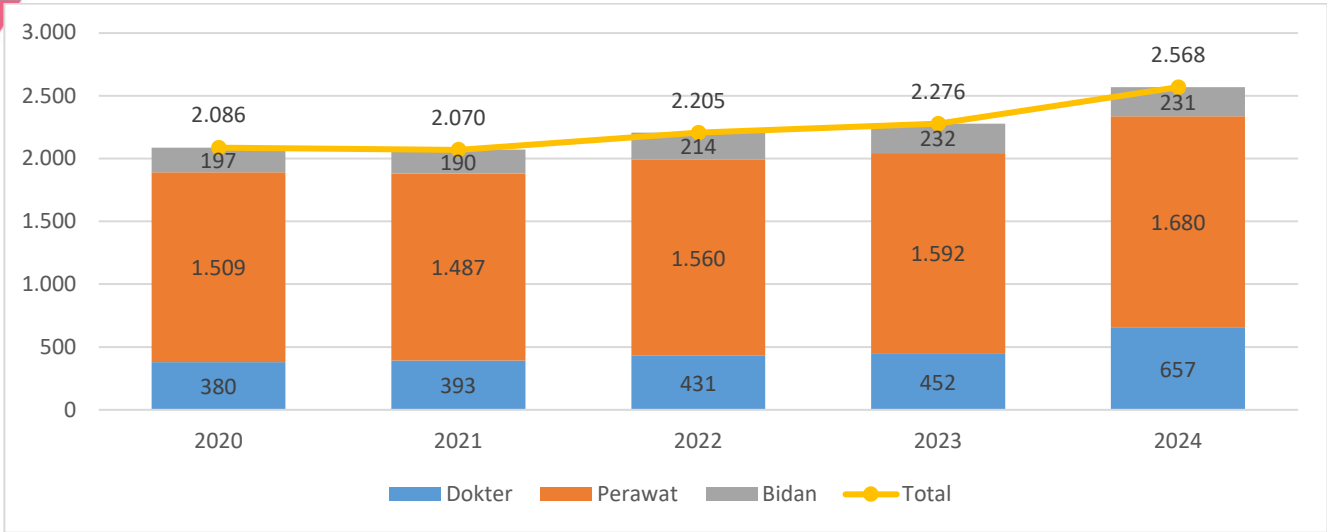
Fasilitas kesehatan di Kota Magelang cukup memadai dan merata. Pada 2024, terdapat 8 rumah sakit, 5 puskesmas, 12 puskesmas pembantu, 16 klinik, dan 5 laboratorium kesehatan. RS Tidar, sebagai rumah sakit tipe B, menjadi yang terbaik dan terlengkap di Karesidenan Kedu.



Gambar 2.106 Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2025

Jumlah tenaga kesehatan tersaji dalam Gambar 2.107 berikut.



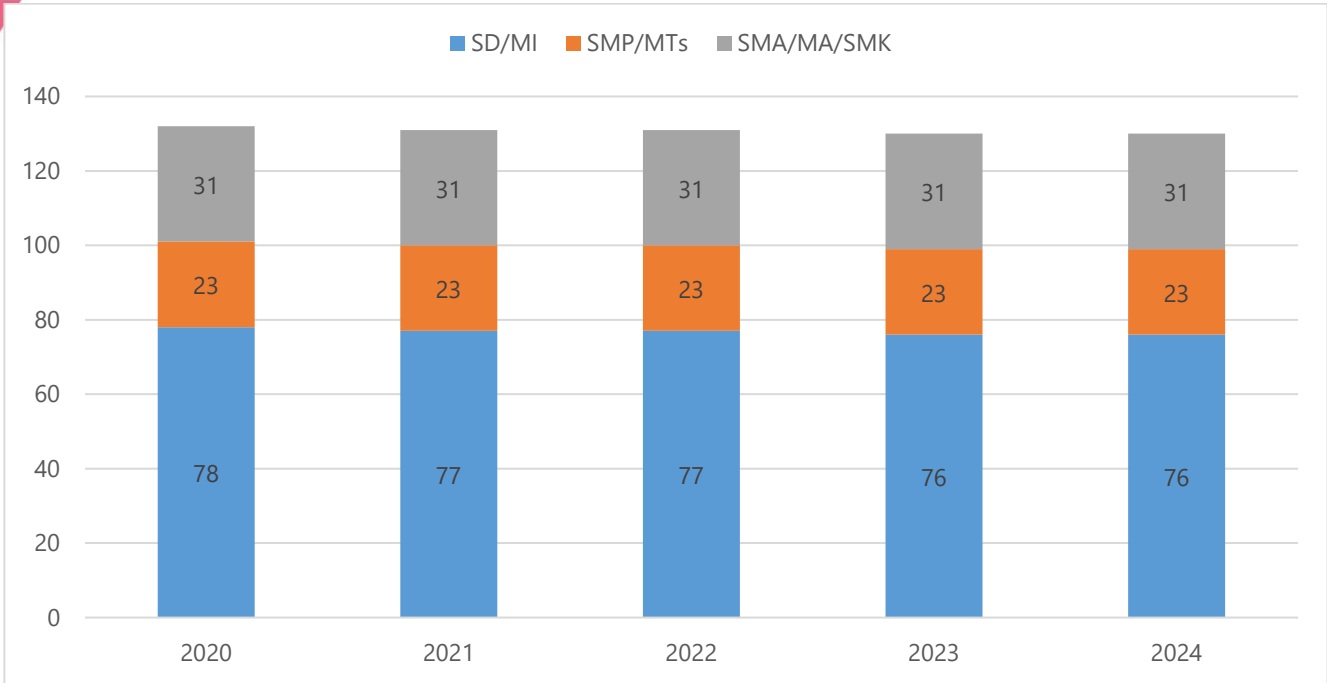
Gambar 2.107 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS dan Data Go Kota Magelang, 2025

Selain keberadaan fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan juga mempengaruhi kualitas kesehatan di suatu daerah. Jumlah sumber daya manusia berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Sejak tahun 2021, telah terjadi penambahan jumlah dokter menjadi 657, hampir dua kali lipat dari tahun 2021. Jumlah perawat dan Bidan juga terus bertambah menjadi 1680 perawat dan 231 bidan di Kota Magelang. Keberadaan tenaga kesehatan ini merupakan potensi layanan regional untuk jasa kesehatan yang dapat dikembangkan menjadi *Hospital Tourism*.

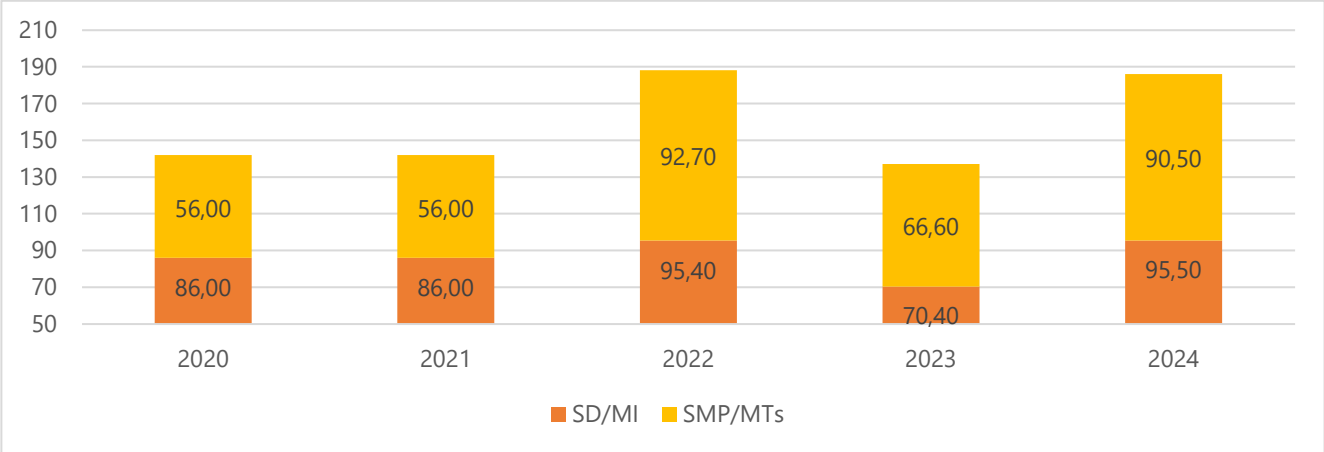
2.1.3.4.18 Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM di Kota Magelang. Pada 2024, terdapat 130 sekolah, terdiri dari 76 SD, 23 SMP, dan 31 SMA. Jumlah sekolah mengalami perubahan akibat fluktuasi jumlah murid dan kebijakan zonasi. Pada 2021, semua SMP dan PKBM telah terakreditasi, sementara pada 2022, 72 dari 128 PAUD dan sebagian besar LKP juga telah terakreditasi. Kota Magelang juga memiliki beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Tidar yang terakreditasi B. Keberadaan institusi pendidikan tinggi ini berpotensi meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal. Ketersediaan sekolah di Kota Magelang tersaji pada Gambar 2.118 dan ketersediaan ruang kelas tersaji pada Gambar 2.119.



Gambar 2.108 Ketersediaan Sekolah Pada Tingkat Pendidikan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kota Magelang, 2024



Gambar 2.109 Persentase Kondisi Ruang Kelas Berstatus Baik Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: RKPD 2017 (Data tahun 2011-2015); RKPD 2022 (Data tahun 2016-2017); RKPD 2024 (Data Tahun 2018-2022)

Bila melihat pada kondisi ruang kelas dalam keadaan baik, hingga tahun 2024 baik SD/MI maupun tingkat SMP/MTs telah mencapai lebih dari 90%. Pada 2021, semua SMP dan PKBM telah terakreditasi, sementara pada 2022, 72 dari 128 PAUD dan sebagian besar LKP juga telah terakreditasi (Tabel 2.66). Kota Magelang juga memiliki beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Magelang dan Universitas Tidar yang terakreditasi B. Keberadaan institusi pendidikan tinggi ini berpotensi meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pembangunan daerah jika dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.68 Akreditasi PAUD, SD, SMP, PKMB, dan LKP di Kota Magelang

Tahun	Persentase PAUD terakreditasi			Persentase SD terakreditasi			Persentase SMP terakreditasi			Persentase PKMB terakreditasi			Persentase LKP terakreditasi		
	Jumlah PAUD	Terakreditasi	%	Jumlah SD	Terakreditasi	%	Jumlah SMP	Terakreditasi	%	Jumlah PKMB	Terakreditasi	%	Jumlah LKP	Terakreditasi	%
2020	127	99	77,95	76	74	97,37	20	20	100,00	3	3	100,00	30	8	26,67
2021	146	94	64,38	75	74	98,67	20	20	100,00	3	3	100,00	30	8	26,67
2022	128	72	56,25	75	74	98,67	20	20	100,00	3	3	100,00	30	8	26,67
2023	126	120	95,24	74	73	98,65	20	20	100,00	3	3	100,00	30	8	26,67
2024	126	125	99,21	74	74	100,00	20	20	100,00	3	3	100,00	30	8	26,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, 2025

2.1.3.4.19 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur mengukur kualitas dan kemajuan infrastruktur suatu daerah, mencakup transportasi, fasilitas umum, dan aksesibilitas. Pada 2024, Kota Magelang mencatat Indeks Pilar Infrastruktur sebesar 3,37, menunjukkan kondisi yang cukup baik tetapi masih memerlukan peningkatan. Rincian penilaian tiap indikator dapat dilihat pada Tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.69 Indikator Indeks Infrastruktur 2024

Pilar / Indikator		Nilai
Infrastruktur Transportasi (Jalan Darat)	2.01 Aksesibilitas Jalan	5,00
	2.02 Kualitas Infrastruktur Jalan	5,00
Infrastruktur Transportasi (Jalur Kereta Api)	2.03 Layanan Infrastruktur Stasiun Kereta Api	0,00
Infrastruktur Transportasi (Udara)	2.04 Layanan Infrastruktur Bandara	5,00
Infrastruktur Transportasi (Pelabuhan)	2.05 Layanan Infrastruktur Pelabuhan	1,92
Infrastruktur Utilitas (Kelistrikan)	2.06 Rasio Elektrifikasi	5,00
Infrastruktur Utilitas (Air)	2.07 Akses Air Minum Layak	5,00
	2.08 Tingkat Kehilangan Air	0,00
Indeks Pilar Infrastruktur		**3,37**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Tabel 2.68 menunjukkan nilai Indeks Infrastruktur Kota Magelang tahun 2024 yang berada pada angka 3,37, mencerminkan kondisi infrastruktur yang sedang dalam tahap berkembang. Pilar-pilar yang mendukung indeks ini terdiri dari sektor transportasi dan utilitas. Pada aspek transportasi darat, kualitas infrastruktur jalan memperoleh skor tinggi (5,00), begitu juga pada aksesibilitas jalan memperoleh skor tinggi (5,00). Beberapa indikator seperti layanan stasiun kereta api dan tingkat kehilangan air memperoleh skor 0,00, yang mengindikasikan tidak tersedianya layanan tersebut atau belum ada pembangunan signifikan di sektor tersebut.

Di sisi lain, beberapa sektor menunjukkan performa optimal, seperti layanan bandara, rasio elektrifikasi, dan tingkat kehilangan air, yang semuanya mendapat nilai sempurna (5,00). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelistrikan dan layanan bandara sudah sangat baik dan mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi lokal. Namun, masih terdapat tantangan besar pada penyediaan akses air minum layak serta peningkatan konektivitas transportasi non-darat. Hal ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan agar lebih merata dan inklusif.

2.1.3.4.20 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kota Magelang mengacu pada Permen PUPR No. 01 Tahun 2014 dan SNI 03-1733-2004, yang menetapkan standar luas per jiwa untuk sarana tersebut. Rincian standar kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.70 Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Kesehatan

Kebutuhan Sarana	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung
Pendidikan	SD	1.600
	SMP	4.800

Kebutuhan Sarana	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung
	SMA	4.800
Kesehatan	Rumah Sakit	-
	Puskesmas	120.000
	Puskesmas Pembantu	30.000

Sumber: SNI 03-1733-2004

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan sarana Pendidikan di Kota Magelang hingga tahun 2030 mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi jumlah penduduk Kota Magelang yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	2023	2025		2030	
		SNI	*Penyesuaian Eksisting	SNI	*Penyesuaian Eksisting
SD	76	77	70	77	74
SMP	23	26	21	26	22
SMA	31	26	28	26	30

**Perhitungan proyeksi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk usia sekolah*
Sumber: RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel 2.69, proyeksi kebutuhan sarana pendidikan menunjukkan:

1. Kebutuhan SD diproyeksikan meningkat menjadi 77 unit pada tahun 2030 dari 76 unit pada tahun 2022, yang berarti diperlukan penambahan 2 unit sekolah.
2. Kebutuhan SMP meningkat dari 23 unit pada tahun 2022 menjadi 26 unit pada tahun 2030, memerlukan tambahan 3 unit.
3. Kebutuhan SMA menurun dari 31 unit pada tahun 2022 menjadi 26 unit pada tahun 2030.

Namun, ketika mempertimbangkan jumlah penduduk usia sekolah dan angka kelahiran yang diproyeksikan menurun, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan berkurang:

1. Fasilitas SD diproyeksikan menjadi 74 unit pada tahun 2030, turun 2 unit dari 2022.
2. Fasilitas SMP berkurang menjadi 22 unit pada tahun 2030, turun 1 unit dari 2022.
3. Fasilitas SMA diproyeksikan menjadi 30 unit pada tahun 2030, turun 1 unit dari 2022.

Ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan di Kota Magelang sudah memadai, namun perlu pemerataan khususnya untuk SMA di Kecamatan Magelang Selatan yang masih kekurangan sekolah SMA Negeri.

Berdasarkan hasil proyeksi, kebutuhan sarana kesehatan di Kota Magelang hingga tahun 2030 tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana kesehatan di Kota Magelang telah mencukupi untuk melayani penduduk di Kota Magelang saat ini maupun di masa yang akan datang.

Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	2023	2025	2030
Rumah Sakit	8	8	8
Puskesmas	5	1	1
Puskesmas Pembantu	11	4	4

Sumber: RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Ketersediaan sarana kesehatan di Kota Magelang saat ini sudah mencukupi kebutuhan hingga tahun 2030. Proyeksi menunjukkan kebutuhan minimal 8 rumah sakit, 1 puskesmas, dan 4 puskesmas pembantu pada 2030, sementara pada 2022 telah tersedia masing-masing 8 rumah sakit, 5 puskesmas, dan 11 puskesmas pembantu.

Namun demikian, Rumah Sakit di Kota Magelang merupakan rumah sakit rujukan bagi daerah di sekitar Kota Magelang, sehingga untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pembangunan rumah sakit baru masih bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kualitas pelayanan Rumah sakit.

2.1.3.4.21 Proyeksi Kebutuhan Air Kota Magelang

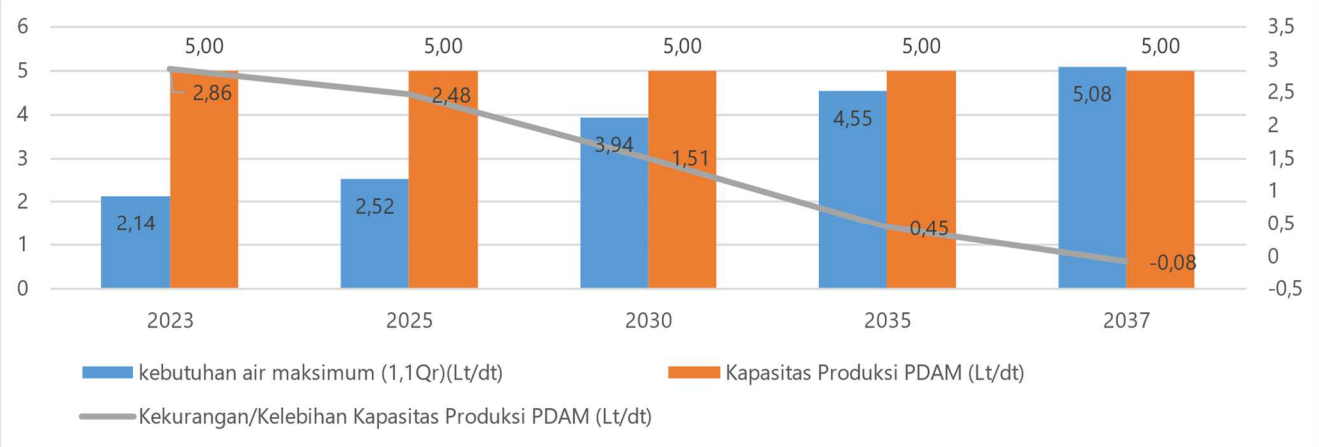
Proyeksi kebutuhan air didasarkan pada Dokumen Review RISPAM Kota Magelang tahun 2022. Periode 2023-2030 menunjukkan peningkatan cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Magelang dari 82% menjadi 89% pada tahun 2030. Namun, meski mengalami peningkatan, cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Magelang belum mencapai 100%.

Tabel 2.73 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2030

Uraian	Satuan	2023	2025	2030
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	100.259	103.260	110.892
Cakupan Pelayanan	%	82,00	84,00	89,00
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	174,06	179,27	192,52
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	34,81	35,85	38,5
Total Kebutuhan Air (Domestik & Non Domestik)	Lt/dt	208,87	215,13	231,02
Kebutuhan Air Maksimum (1.1 Qr) (Lt/dt)	Lt/dt	2,14	2,52	3,94
Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	5,00	5,00	5,00
Kekurangan/Kelebihan Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	2,86	2,48	1,51

Sumber: Review Dokumen RISPAM Kota Magelang tahun 2022

Proyeksi kapasitas produksi Perumda Air Minum Kota Magelang menunjukkan potensi defisit sebesar 1,51 Lt/dt pada tahun 2030 akibat meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk. Meskipun kapasitas produksi pada 2030 masih mencukupi kebutuhan maksimum 3,94 Lt/dt, defisit diperkirakan terjadi pada 2037. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber air untuk memastikan ketersediaan air minum jangka panjang.



Gambar 2.110 Proyeksi Kebutuhan dan Kapasitas Air Minum SPAM Perumda Air Minum Kota Magelang Tahun 2023-2037

Sumber: Review Dokumen RISPAM Kota Magelang tahun 2022

Proyeksi kebutuhan air minum SPAM di Kota Magelang menunjukkan peningkatan hingga 2030. Kapasitas produksi di Kecamatan Magelang Selatan dan Magelang Utara masing-masing sebesar 6,00 Lt/dt, sementara di Kecamatan Magelang Tengah sebesar 5,00 Lt/dt. Kapasitas di Magelang Selatan dan Magelang Utara diperkirakan masih mencukupi kebutuhan hingga 2030.

Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Air Minum SPAM Wilayah Pelayanan Non Perumda Air Minum

Uraian	Satuan	2023	2025	2030
Kecamatan Magelang Selatan				
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	1.212	1.300	1.523
Cakupan Pelayanan	%	3,00	3,20	3,70
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	2,10	2,26	2,64
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	0,42	0,45	0,53
Total Kebutuhan Air (Domestik & Non Domestik)	Lt/dt	2,53	2,71	3,17
Kebutuhan Air Maksimum (1.1 Qr) (Lt/dt)	Lt/dt	3,33	3,57	4,19
Kapasitas Produksi (Lt/dt)	Lt/dt	6,00	6,00	6,00
Kekurangan/Kelebihan Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	2,67	2,43	1,81
Kecamatan Magelang Tengah				
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	779	917	1.270
Cakupan Pelayanan	%	1,75	2,05	2,80
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	1,35	1,59	2,20
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	0,27	0,32	0,44
Total Kebutuhan Air (Domestik & Non Domestik)	Lt/dt	1,62	1,91	2,64
Kebutuhan Air Maksimum (1.1 Qr) (Lt/dt)	Lt/dt	2,14	2,52	3,49
Kapasitas Produksi (Lt/dt)	Lt/dt	5,00	5,00	5,00
Kekurangan/Kelebihan Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	2,86	1,48	1,51
Kecamatan Magelang Utara				
Jumlah Penduduk Terlayani	Jiwa	934	1.014	1.219
Cakupan Pelayanan	%	2,50	2,70	3,20
Kebutuhan Air Domestik	Lt/dt	1,62	1,76	2,12
Kebutuhan Air Non Domestik	Lt/dt	0,32	0,35	0,42
Total Kebutuhan Air (Domestik & Non Domestik)	Lt/dt	1,95	2,11	2,54
Kebutuhan Air Maksimum (1.1 Qr) (Lt/dt)	Lt/dt	2,57	2,79	3,35
Kapasitas Produksi (Lt/dt)	Lt/dt	6,00	6,00	6,00
Kekurangan/Kelebihan Kapasitas Produksi PDAM (Lt/dt)	Lt/dt	3,43	3,21	2,65

Sumber: Review Dokumen RISPAM Kota Magelang tahun 2022

2.1.3.4.22 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Magelang

Listrik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Proyeksi kebutuhan listrik di masa depan membantu pemerintah merancang strategi guna memastikan pasokan yang stabil dan andal.

Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Magelang Tahun 2030

Uraian	2023	2025	2030
Total Population (ribu)	123	125	130
Growth Rate (%)	1,16	1,16	1,16
Growth of Total GDP (%)	5,91	6,18	6,41
Electrification Ratio PLN (%)	**3,66**	**3,66**	**100**
Electrification Ratio non PLN (%)	**3,66**	**3,66**	**3,66**
Energy Sales (GWh)	77,77	81,98	93,93
- Growth Rate (%)	**5,97**	**2,81**	**2,87**
-- Residential	33,86	35,69	40,9
-- Commercial	12,76	13,45	15,41
-- Public	7,4	7,8	8,94
-- Industrial	23,75	25,04	28,69
Power Contracted (MVA)	**51,08**	**59,84**	**88,24**
-- Residential	26,15	29,98	42,34
-- Commercial	9,98	12,06	18,92
-- Public	5,72	6,94	10,97
-- Industrial	9,23	10,85	16,02
Number of Customer	**35.514**	**36.985**	**41.336**
-- Residential	31.626	32.359	34.265
-- Commercial	2.399	2.897	4.546
-- Public	1.444	1.674	2.440
-- Industrial	44	54	85
Total Production (GWh)	**84,04**	**87,91**	**99,39**
Energy Requirement (GWh)	**84,04**	**87,91**	**99,39**
Susut Tanpa I4	7,47	6,74	5,49
Load Factor (%)	71,6	72	73
Peak Load (MW)	**13**	**14**	**16**

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kota Magelang, 2024

Kebutuhan listrik di Kota Magelang diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 99,39 GWh pada tahun 2030, seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Faktor utama yang mendorong kenaikan ini meliputi pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi. Tantangan utamanya adalah memastikan pasokan listrik yang mencukupi sambil menjaga keberlanjutan dan efisiensi energi. Solusinya mencakup pembangunan infrastruktur listrik, investasi dalam teknologi ramah lingkungan,

serta pengembangan energi terbarukan. Selain itu, kebijakan efisiensi energi, pengelolaan permintaan, dan diversifikasi sumber energi diperlukan untuk mewujudkan ketahanan energi jangka panjang.

2.1.3.4.23 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Magelang

Jumlah penduduk Kota Magelang diproyeksikan terus meningkat hingga 2030, mendorong kebutuhan tempat tinggal. Proyeksi disajikan dalam Tabel 2.74.

Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Magelang Tahun 2030

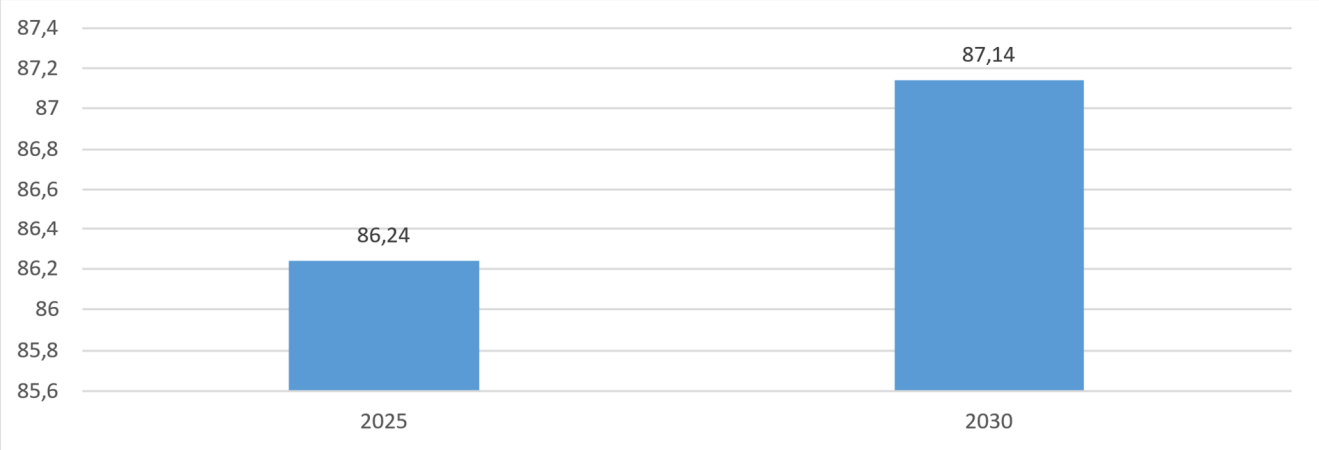
Uraian	2023	2025	2030
Jumlah Rumah Eksisting	28.210 (Tahun 2022)		
Proyeksi Jumlah Penduduk	121.250	122.670	123.510
Asumsi jumlah jiwa setiap KK	4	4	4
Proyeksi Kebutuhan Rumah	30.313	30.668	30.878
Kebutuhan Penambahan Rumah	2.103	2.458	2.668

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

Hingga 2030 diproyeksikan kebutuhan tempat tinggal yang mencapai 30.878 unit. Namun, masih terdapat kekurangan 2.668 unit karena pada 2022 jumlah rumah hanya 28.210 unit. Pemerintah menargetkan nol persen kekurangan rumah pada 2030, tetapi keterbatasan lahan dan harga tanah yang terus naik menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi lahan, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta regulasi dan kerja sama antar-stakeholder untuk memastikan ketersediaan hunian jangka panjang.

2.1.3.4.24 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Magelang

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Magelang berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah. Berdasarkan proyeksi penduduk dan asumsi timbulan sampah 0,7 kg/orang/hari (Permen KLHK No.10 Tahun 2018), volume sampah diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 87,14 ton per hari pada 2030. Oleh karena itu, diperlukan prediksi yang akurat serta perencanaan kapasitas tampung TPA untuk mengelola sampah secara efektif.



Gambar 2.111 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Magelang Hingga Tahun 2030

Sumber: RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045

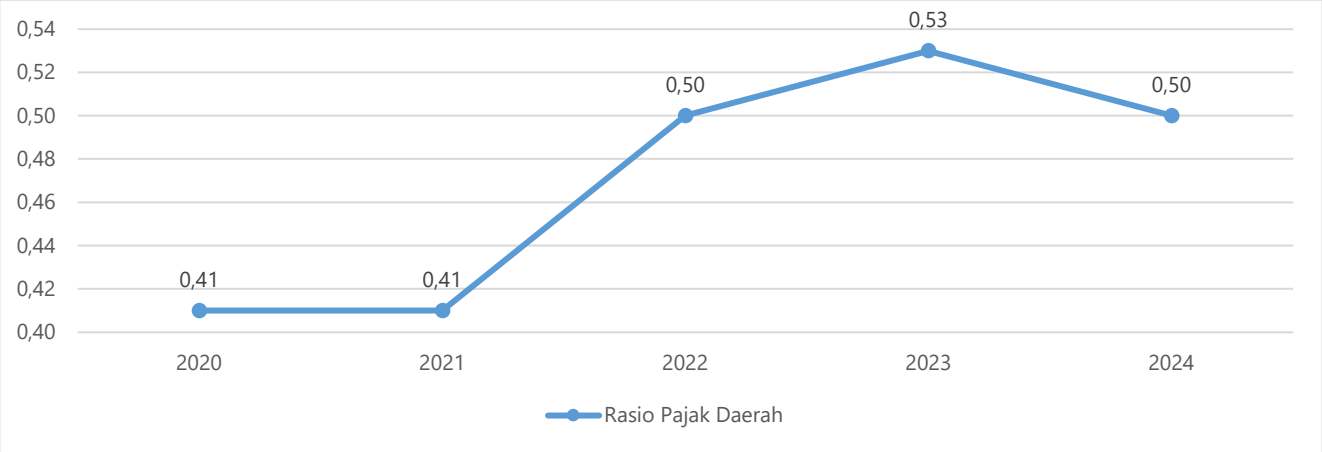
Sebagai kawasan penyangga KSPN Borobudur, Kota Magelang berpotensi menerima limpahan wisatawan, yang dapat meningkatkan timbulan sampah pariwisata. Selain itu, kebijakan pengembangan tujuh kawasan strategis ekonomi diperkirakan mendorong aktivitas perdagangan dan jasa,

berkontribusi pada peningkatan sampah makanan (*food waste*). Tantangan ini semakin mendesak mengingat TPA Banyu Urip telah melebihi kapasitas dengan tumpukan sampah lebih dari 8 meter, sementara perluasan tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan sesuai RTRW Kabupaten Magelang.

2.1.3.5 Daya Saing Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.5.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB merupakan indikator penting stabilitas ekonomi daerah. Rasio pajak daerah di Kota Magelang meningkat dari 0,41 pada tahun 2020 menjadi 0,5 pada tahun 2024 yang mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak.



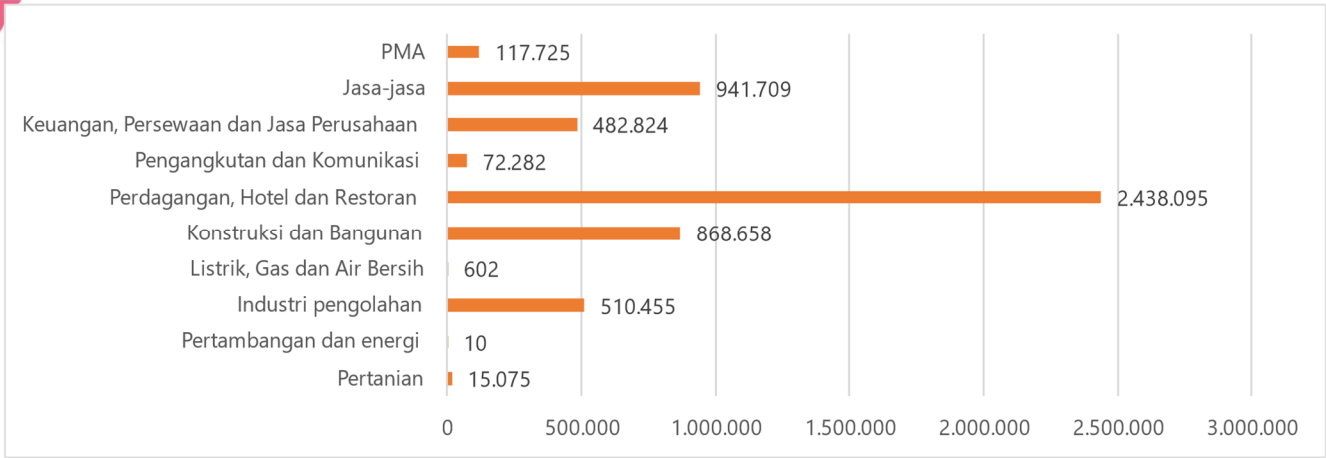
Gambar 2.112 Rasio Pajak Daerah Kota Magelang terhadap PDRB Tahun 2020-2024

Sumber: BPKAD Kota Magelang

Berdasarkan Gambar 2.112, rasio pajak daerah Kota Magelang terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari 0,41 pada 2020 dan 2021 menjadi 0,5 pada 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 0,53 pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan kembali ke angka 0,5. Data ini mencerminkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total nilai tambah ekonomi Kota Magelang cenderung meningkat, menandakan peran pajak daerah yang makin signifikan dalam struktur ekonomi kota, meskipun tetap perlu diwaspadai potensi stagnasi atau penurunan seperti pada tahun 2024.

2.1.3.5.2 Investasi

Investasi berperan penting dalam pembangunan daerah karena mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Di Kota Magelang, tren PMA dan PMDN mencerminkan kepercayaan investor serta efektivitas kebijakan investasi. Untuk memperkuat daya tarik investasi, DPMPTSP mengembangkan aplikasi SIPOINT sebagai sarana informasi potensi investasi, yang telah meraih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Daerah 2024. Investasi tahun 2025 tersaji dalam Gambar 2.114 berikut.



Gambar 2.113 Jumlah Investasi (Juta Rp) yang Ditanamkan Menurut Sektor di Kota Magelang Tahun 2024

Sumber: Kota Magelang dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2025, total investasi di Kota Magelang mencapai Rp5,33 triliun, dengan dominasi sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 44,76%, mencerminkan tingginya permintaan pasar lokal dan wisata. PMA masih relatif kecil (2,16%), namun menunjukkan peluang untuk ditingkatkan. Posisi geografis yang strategis di jalur utama transportasi dan pariwisata Jawa Tengah menjadikan sektor perdagangan dan pariwisata sebagai potensi unggulan untuk menarik investasi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Meskipun investasi di sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Magelang, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam pembangunan daerah ke depan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, seperti meningkatnya harga tanah dan biaya hidup yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat lokal. Selain itu, tingginya aktivitas perdagangan dan pariwisata berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk degradasi ekosistem serta meningkatnya kepadatan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kota Magelang perlu mengelola investasi ini secara strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya melalui penerapan regulasi yang tepat dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3.5.3 Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan di Kota Magelang diarahkan pada efisiensi prosedur, digitalisasi layanan, dan integrasi dengan OSS, yang diperkuat dengan percepatan penetapan RDTR sebagai dasar tata ruang. Meskipun mayoritas layanan perizinan telah mengikuti SOP, masih terdapat beberapa yang melebihi waktu standar karena kendala teknis. Dominasi izin periklanan dan penelitian mencerminkan kebutuhan adaptasi terhadap tren usaha dan inovasi. Implementasi UU Cipta Kerja menjadi landasan penguatan iklim investasi dan daya saing daerah, dengan tantangan utama menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun upaya Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan kemudahan berinvestasi di Kota Magelang, telah ada beberapa peraturan daerah dalam yang mendukung investasi yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

2.1.3.5.4 Kondusivitas Kota Magelang

Statistik kriminalitas menjadi indikator penting stabilitas wilayah yang memengaruhi iklim investasi dan daya saing daerah. Hal ini mendukung terciptanya lingkungan sosial dan ekonomi yang aman, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kota.

Selain faktor kriminalitas, kondisi keamanan dan ketenteraman masyarakat di Kota Magelang juga sangat dipengaruhi oleh tingkat toleransi di antara warganya. Tingginya sikap saling menghormati dan menerima perbedaan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis serta mencegah potensi konflik sosial. Sebaliknya, rendahnya tingkat toleransi dapat memicu ketegangan antar kelompok, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Oleh karena itu, membangun budaya toleransi melalui edukasi, dialog antar komunitas, serta kebijakan inklusif menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di Kota Magelang. Pada tahun 2024, Kota Magelang menempati peringkat 6 Nasional untuk Kota Toleran dengan nilai Indeks Kota Toleran sebesar 6,22. Indeks Kota Toleran mengalami peningkatan, sebelumnya pada tahun 2023 yang menempati peringkat 10 nasional. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Program Magelang Agamis memberi jalan bagi upaya-upaya pemajuan toleransi melalui optimalisasi peran dan fungsi tempat ibadah. Selain itu, persentase konflik SARA di Kota Magelang 0%, yang berarti di Kota Magelang tingkat toleransi terkait SARA sangat baik.

Tabel 2.77 Angka Kriminalitas Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kriminalitas yang terjadi	134	142	76	95	73
Jumlah penduduk	128.020	127.846	127.846	127.965	128.017
Angka kriminalitas	10,47	11,11	5,94	7,43	5,702
Kejadian konflik (sosial dan SARA)	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2025

Di Kota Magelang, angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun secara umum mengarah pada perbaikan kondusivitas. Kota Magelang yang aman dan tenteram merupakan kondisi ideal yang perlu diwujudkan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan keamanan Kota Magelang yaitu melalui banyaknya kriminalitas yang terjadi. Pada tahun 2024, tercatat ada 73 kasus kriminalitas. Jumlah tersebut menurun 22 (dua puluh dua) kasus dari tahun 2023 yang berjumlah 95 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari kejadian konflik sosial dan SARA, setidaknya selama kurun waktu 2020-2024, tidak ada permasalahan di Kota Magelang.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

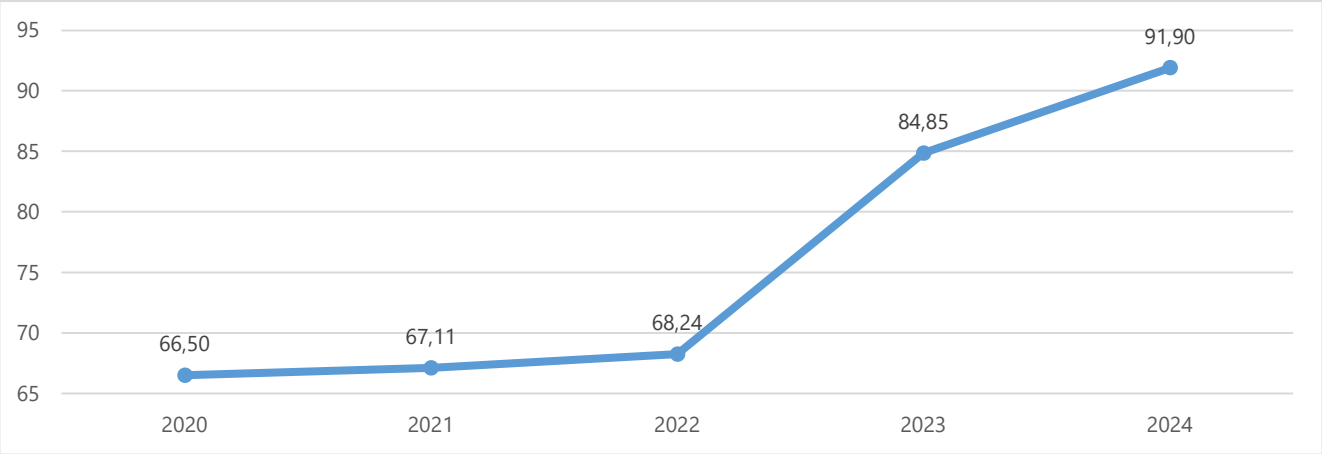
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Reformasi Birokrasi dan Reformasi Hukum

Reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Magelang telah menyusun Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2024. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang meningkat dari tahun 2020-2024 (Gambar 2.115). Hal tersebut dapat tercapai karena adanya komitmen bersama untuk terus meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Magelang.

Peningkatan indeks reformasi birokrasi di Kota Magelang mencerminkan adanya perbaikan dalam efisiensi dan kinerja birokrasi, sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, reformasi birokrasi yang berhasil juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan adanya reformasi yang lebih baik, proses perizinan usaha menjadi lebih mudah, pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, dan pengelolaan sumber daya manusia dalam birokrasi menjadi lebih optimal. Semua faktor ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Birokrasi yang efektif dan efisien juga dapat meningkatkan daya tarik Kota Magelang bagi investor dan pelaku usaha, karena adanya prosedur yang lebih sederhana serta lingkungan bisnis yang lebih ramah terhadap investasi. Namun, meskipun peningkatan indeks reformasi birokrasi merupakan pencapaian yang penting, hal ini hanya merupakan salah satu elemen dalam pembangunan daerah. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, diperlukan langkah-langkah lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2.114 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang Tahun 2020-2024

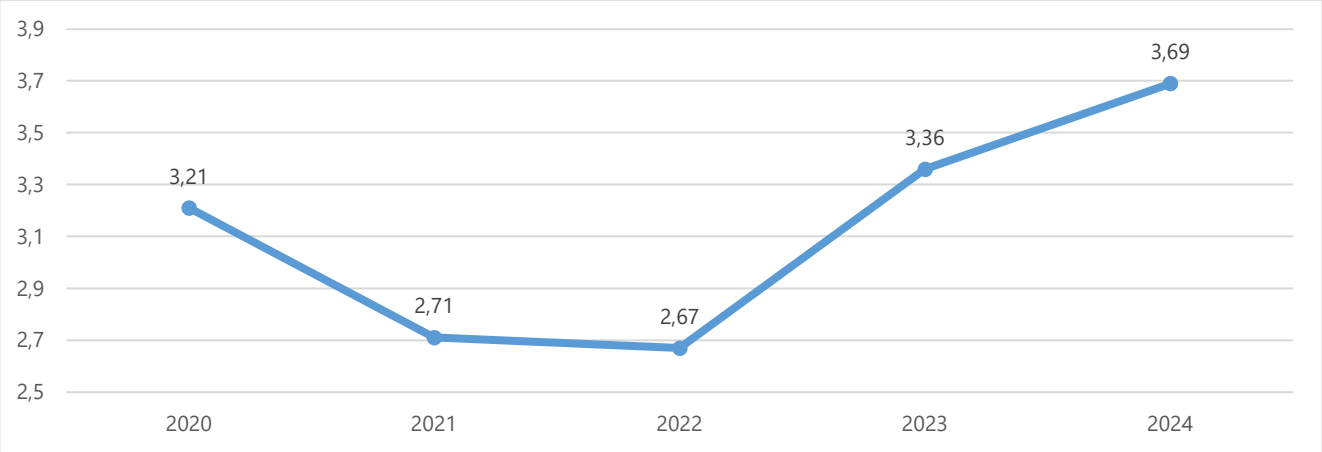
Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Indeks Reformasi Hukum (IRH) juga digunakan untuk mengukur kemajuan dalam reformasi hukum di suatu wilayah. IRH menggabungkan berbagai aspek yang berhubungan dengan reformasi hukum, termasuk keadilan, kepastian hukum, dan akses terhadap hukum. Berdasarkan database Kemenkumham, IRH Kota Magelang mengalami kenaikan, yaitu sebesar 66,85 (Cukup Baik) di tahun 2022, 77,57 (Baik) di tahun 2023 dan 99,04 (Istimewa) di tahun 2024. Indeks ini mencerminkan peraturan hukum telah mengalami perbaikan dengan adanya harmonisasi regulasi, transparansi dan kepastian hukum meningkat, serta sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat semakin baik.

2.1.4.1.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. SPBE sering disebut juga sebagai *e-Government*, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Semenjak tahun 2016 semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Magelang telah menerapkan *e-Government* dan pelayanan berbasis teknologi informasi diperkuat dengan penerapan SPBE. Seluruh OPD telah menggunakan aplikasi seperti Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk surat menyurat dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk perencanaan sampai dengan penganggaran. Kota Magelang terus berupaya meningkatkan struktur dan rencana strategis SPBE serta melakukan analisis kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

secara proporsional dengan peningkatan indeks SPBE. Selama periode tahun 2020-2024, Indeks SPBE Kota Magelang mengalami peningkatan signifikan dari 3,21 menjadi 3,69.



Gambar 2.115 Indeks SPBE Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: DataGo Kota Magelang, 2025

Peningkatan Indeks SPBE menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan, yang mencerminkan berbagai aspek positif dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kota Magelang. Ini mencerminkan adanya upaya yang berhasil dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ditunjukkan dengan layanan publik yang semakin modern, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan indeks SPBE dapat dianggap sebagai indikator positif bagi kemajuan pembangunan daerah dalam hal modernisasi administrasi dan pelayanan publik.

Selain indeks SPBE, kinerja efektivitas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika juga tercermin dalam Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 2.78 Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	92,4	NA	(80-89,9)	95,03	96,73
	Menuju Informatif	NA	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2025

Tingkat keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Magelang menunjukkan perbaikan dan menunjukkan tren peningkatan. Tingkat keterbukaan informasi publik masih berada pada tingkat menuju informatif pada tahun 2022. Pencapaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Kota Magelang pada tahun 2023 dan 2024 berada di tingkat informatif. Peningkatan ini didukung dari upaya pendampingan dari Dinas Kominsta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk penyebaran informasi publik melalui website maupun media sosial OPD.

2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel 2.79 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	-	4,30	4,51	4,51	4,61 (A)

Sumber: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2020-2023

Capaian indeks pelayanan publik tahun 2024 telah berada pada kategori A (pelayanan prima) dengan angka 4,61 meingkkat 0,10 poin dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah berupaya meningkatkan pelayanan publik, meliputi kemudahan akses layanan, kualitas, hingga responsivitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan variasi layanan sesuai tuntuntan zaman.

2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional dirumuskan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023 SPI dilaksanakan dengan menggunakan metode baku/standar yang ditetapkan pada 2021. Pemerintah Kota Magelang tahun 2023 mendapatkan skor 80,71, di atas rata-rata kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan skor 70,97. Skor tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 78,21.

Meskipun di atas rata-rata nasional, upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Magelang masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, juga diukur indeks survei penilaian integritas di Kota Magelang pada tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.80 Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Magelang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	NA	78,72	71,94	80,71	78,21

Sumber: Laporan Penilaian Integritas Kota Magelang 2025

Data Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Magelang menunjukkan dinamika persepsi dan praktik integritas yang fluktuatif selama periode 2021-2024. Setelah mencatat skor cukup tinggi pada 2021, terjadi penurunan pada 2022 yang kemudian diikuti oleh peningkatan signifikan pada 2023, sebelum kembali sedikit turun pada 2024. Pola ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola dan akuntabilitas publik di tengah tantangan yang masih perlu diatasi secara konsisten untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Instansi pemerintah perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/ melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Selama kurun waktu tahun 2020-2024 persentase penegakan perda secara konsisten mencapai 100%. Pada tahun 2021 tercatat sembilan perda yang ditegakkan yaitu seluruh perda yang memuat sanksi, sedangkan tahun 2022 hingga 2024 terdapat sepuluh perda yang ditegakkan.

Tabel 2.81 Persentase Penegakan Perda Kota Magelang

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang, 2025

Tabel 2.79 tersebut menunjukkan bahwa persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Magelang selama lima tahun berturut-turut, dari 2020 hingga 2024, tercatat selalu 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa setiap pelanggaran terhadap perda yang terjadi telah ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menunjukkan konsistensi kinerja Satpol PP dalam menjalankan fungsi penegakan hukum daerah.

2.1.4.2.2 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Hingga tahun 2024 belum dilakukan pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kota Magelang namun kondusivitas daerah menunjukkan situasi positif. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat hingga tahun 2024 tercapai 100%. Hal ini mencakup pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

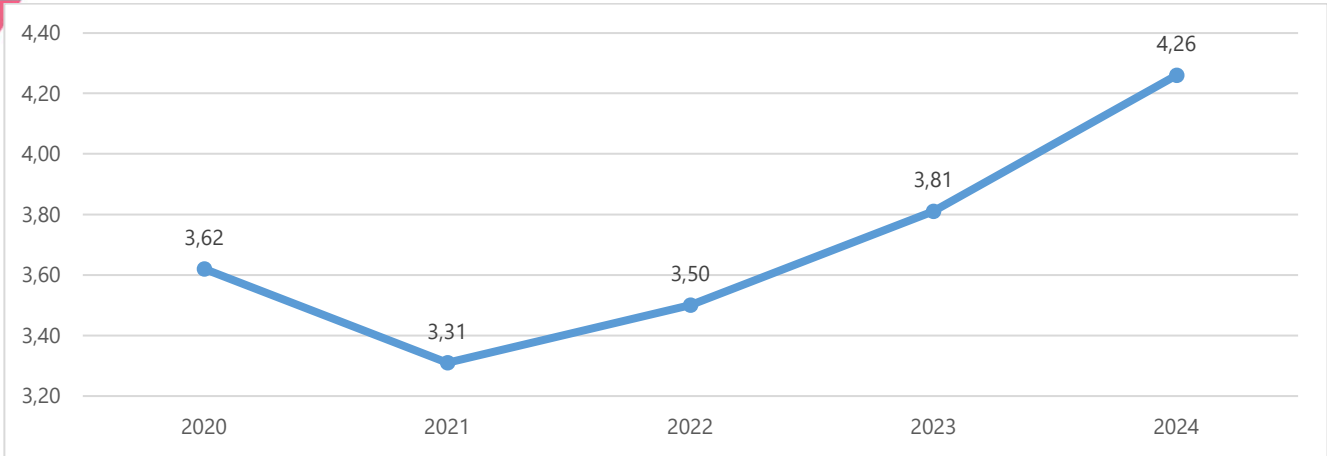
Indikator ketenteraman dan ketertiban kota Magelang tahun tersaji pada Tabel 2.75 (Angka Kriminalitas Kota Magelang Tahun 2020-2024), juga tersaji dalam Tabel 2.85 (Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024).

Situasi kondusif ketentraman dan ketertiban di Kota Magelang didukung oleh peningkatan kapasitas aparat Satpol PP maupun linmas yang dilakukan setiap tahun. Pencegahan potensi pelanggaran perda juga dilakukan dengan patrol yang rutin dilakukan setiap hari di seluruh wilayah. Dukungan sarana dan prasarana juga terus dikuatkan, termasuk dalam pencegahan bahaya kebakaran yaitu dengan dukungan alat pemadam kebakaran di setiap lingkungan RT.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat kemajuan, kemandirian, dan persaingan suatu daerah. IDSD Kota Magelang mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun seperti pada Gambar 2.117 di bawah ini. Dalam lima tahun terakhir, IDSD tertinggi dicapai pada tahun 2024.

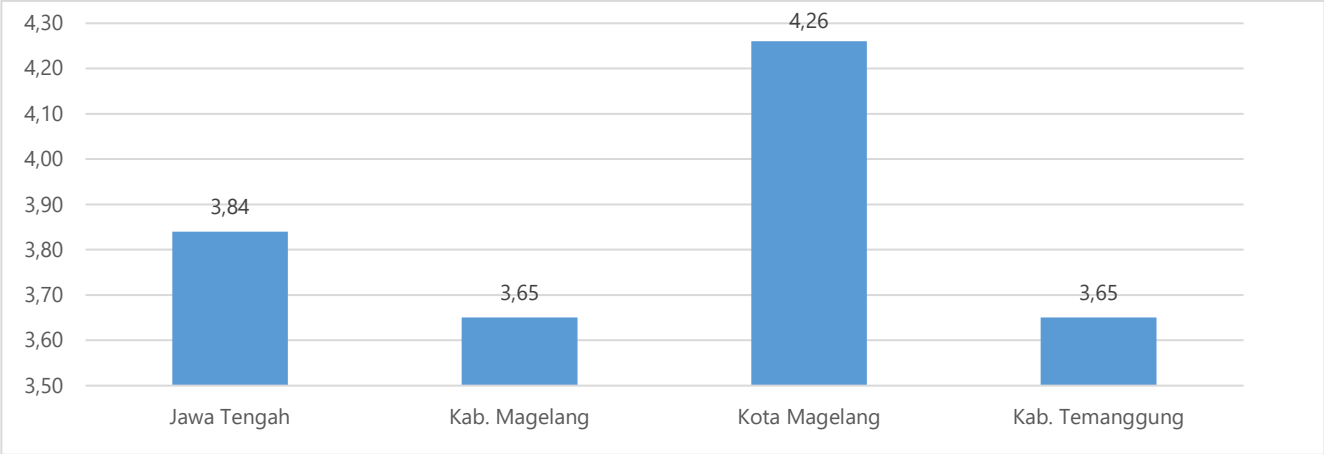


Gambar 2.116 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021-2025

Indeks daya saing daerah yang fluktuatif menandakan adanya ketidakstabilan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing suatu wilayah, seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, inovasi, kebijakan ekonomi, dan investasi. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, dinamika investasi, perkembangan teknologi, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan bencana alam. Jika indeks mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dalam waktu singkat, hal ini bisa menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya stabil atau berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang konsisten untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan, seperti memperkuat ekosistem bisnis, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta memperbaiki regulasi agar lebih ramah investasi.

Dalam perbandingan dengan angka IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024, Kota Magelang termasuk dalam 10 kabupaten/kota yang memiliki skor IDSD lebih tinggi dari skor IDSD Jawa Tengah. Kota Magelang juga menduduki skor IDSD paling tinggi, yaitu sebesar 4,26 apabila dibandingkan dengan wilayah yang berada dalam Gelangmanggung. Berikut merupakan grafik skor IDSD untuk wilayah Gelangmanggung tahun 2024.

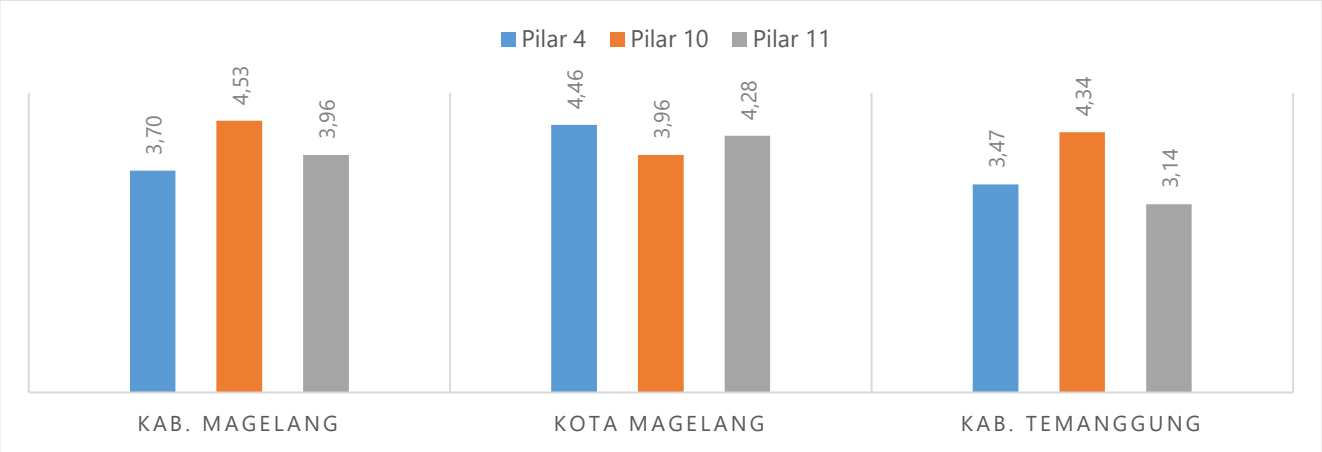


Gambar 2.117 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Gelangmanggung Tahun 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Untuk meningkatkan angka IDSD Kota Magelang, tiga pilar yang perlu diperkuat yaitu nilai pada Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro), Pilar 10 (Ukuran Pasar), dan Pilar 11 (Dinamisme Bisnis). Pada Pilar 4 terkait dengan stabilitas ekonomi makro, terdapat 5 indikator yang perlu ditinjau untuk meningkatkan nilai indeks di Kota Magelang, terutama pada tingkat pengangguran terbuka dan kapasitas fiskal daerah. Pada pilar ini, Kota Magelang berada pada posisi di atas Kab. Magelang dan Kab. Temanggung. Sementara itu, pada Pilar 10, Kota Magelang berada pada posisi paling rendah dan pada Pilar 11, Kota Magelang berada pada posisi paling tinggi dalam lingkup Wilayah Gelangmanggung. Hal ini

mengindikasikan aktivitas ekonomi di Magelang tidak cukup besar untuk menciptakan pasar yang menarik bagi investasi besar dan adanya hambatan bagi pelaku usaha dalam memulai dan menjalankan bisnis di Kota Magelang. Untuk meningkatkan nilai indeks pada pilar 10 diperlukan peningkatan terhadap nilai PDRB ADHK dan meningkatkan diversifikasi ekonomi. Pada Pilar 11 dibutuhkan upaya peningkatan untuk pertumbuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kinerja pelayanan publik. Selain itu, diperlukan peningkatan dan pemerataan layanan lembaga keuangan perbankan yang tersedia di Kota Magelang untuk mengatasi tantangan bagi pelaku usaha dalam mengakses layanan perbankan untuk pertumbuhan bisnis.



Gambar 2.118 Nilai Indeks Wilayah Gelangmanggung pada Pilar 4, 10, dan 11 Tahun 2024

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Untuk meningkatkan daya saing daerah, Kota Magelang perlu menerapkan strategi yang efektif meskipun telah memiliki indeks daya saing yang tinggi. Salah satu langkah utama adalah memprioritaskan pengembangan sektor unggulan yang menjadi potensi utama dalam pembangunan, termasuk industri besar, menengah, dan kecil. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan serta pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif juga menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Kota Magelang juga perlu memperkuat sektor pariwisata dengan mengoptimalkan daya tarik wisata lokal dan membangun citra kota sebagai destinasi yang menarik dan kompetitif. Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, Kota Magelang dapat terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di Kawasan Gelangmanggung.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Selama Lima Tahun Terakhir

2.1.4.4.1 Urusan Bidang Pendidikan

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.82 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	90,79	90,88	87,58	85,63	80,59
Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	63,40	63,40	63,40	63,40	63,40
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Indeks Pemerataan Guru	0,40	0,40	0,40	0,40	0,60

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	71,95	69,37	72,44	74,28	83,33
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88,67	98,6301	83,47	96,98	94,91
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,72	116,652	114,75	104,33	115,53
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	134,02	152,874	158,01	140,41	170,52
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	0,00	3,34	3,88	100,00
Indeks Pendidikan	0,74	0,75	0.76	0.77	0.79
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,14	14,15	14,31	14,40	14,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,39	10,62	10,94	11,20	11,43
Indeks Capaian SPM Pendidikan	NA	NA	NA	80,4	88,04
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	104,79	104,06	104,72	104,77	109,28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,93	98,57	106,05	91,01	96,37
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,95	99,05	99,87	99,96	98,92
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,65	83,33	84,69	78,10	80,64
Rerata Kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	NA	67,31	69,91	78,28	78,55
Rerata Kemampuan literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	NA	79,90	81,37	86,90	88,27
Rerata Kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	NA	44,13	50,39	58,72	64,95
Rerata Kemampuan numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	NA	79,90	81,37	74,98	75,01
Indeks iklim inklusivitas Sekolah Dasar (SD)	NA	57,01	58,34	61,09	62,96
Indeks iklim inklusivitas Sekolah Menengah Pertama (SMP)	NA	57,01	57,84	63,58	65,90
Indeks Iklim Keamanan SD	NA	75,60	74,91	77,33	79,07
Indeks Iklim Keamanan SMP	NA	75,60	72,00	74,07	75,35
Indeks Iklim Kebinekaan SD	NA	62,18	73,98	77,83	75,52
Indeks Iklim Kebinekaan SMP	NA	62,18	72,20	78,90	76,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	NA	78,57	75,47	62,75	63,30
Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma empat (D-IV)	NA	83,06	84,49	83,93	83,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Magelang dan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Tahun 2025

Pelayanan pendidikan di Kota Magelang 2020-2024 memperlihatkan capaian tinggi pada jenjang dasar dan menengah pertama, namun terjadi penurunan partisipasi usia 16-18 tahun (APS SMA) dari 90,79% ke 80,59%, menunjukkan perlunya penguatan program transisi ke jenjang atas.

Indeks Pendidikan naik dari 0,74 ke 0,79, disertai perbaikan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Literasi SD dan SMP meningkat, namun numerasi SMP stagnan, menunjukkan kebutuhan perbaikan strategi matematika.

Kualitas guru juga membaik, persentase guru bersertifikat naik dan distribusi merata. Tata kelola sekolah baik: 100% kurikulum muatan lokal dan perizinan selalu diperbarui.

Iklim sekolah makin inklusif, aman, dan menghargai keberagaman (indeks inklusivitas, keamanan, kebinekaan naik). Namun, partisipasi anak penyandang disabilitas usia 4-18 tahun stagnan di 63,4%, dan PAUD terakreditasi B menurun, menuntut intervensi layanan inklusif dan peningkatan mutu PAUD.

Capaian 100% pada pendidikan kesetaraan juga positif. Secara keseluruhan, banyak prestasi, tetapi masih perlu penguatan pada transisi jenjang atas, layanan inklusif, numerasi SMP, dan mutu PAUD.Dalam RPJMD 2025-2029, fokus utama yang perlu diutamakan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah atas, penguatan pendidikan inklusif bagi anak disabilitas, serta peningkatan efektivitas kurikulum lokal dan kompetensi guru. Kinerja pendidikan Kota Magelang menunjukkan fondasi yang kuat dalam aspek kelembagaan dan mutu tenaga pendidik, namun perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih progresif untuk memperluas akses dan pemerataan hasil belajar bagi seluruh anak.

2.1.4.4.2 Urusan Bidang Kesehatan

Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.83 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI)	NA	141,84	82,92	0	98,52
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	9,43	13,3	13,9	15,4	15,3
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,03	1.02	1,039	1,047	1,01
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang Terakreditasi	87,5	87.50	87,50	100	88,89
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,09	95.53	97,094	100	100
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100	100	100	100	100
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,68	99.01	99,337	100	100

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	71,47	92.36	89,298	97,37	100
Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89,24	105.32	110,372	100	100
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100	92.98	91,376	100	100
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	85,06	100	100,476	100	100
Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	71,976	100	100
Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100	100	100	100	100
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	100	100	100	100	100
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100	100	100	100	100
Usia Harapan Hidup	76,85	76,93	77,02	77,22	77,54
Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	99,98	126,71	40,28	21,32	21,19
Insidens tuberculosis (TBC)	105,45	130,63	213,34	201,15	180,25
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96,25	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Selama periode 2020-2024, kinerja sektor kesehatan Kota Magelang menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam cakupan pelayanan dasar, skrining kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Pelayanan kesehatan ibu dan anak telah mencapai angka optimal, termasuk cakupan 100% untuk pelayanan ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita pada tahun 2024. Skrining kesehatan usia produktif, lansia, penderita hipertensi, diabetes, ODGJ, TBC, dan HIV juga telah mencapai 100% secara konsisten.

Namun, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan fluktuasi, sementara prevalensi stunting sempat meningkat sebelum kembali turun pada 2024. Penemuan kasus TBC menurun drastis, sementara insidens masih tinggi, mengindikasikan perlunya penguatan sistem pelaporan. Di sisi fasilitas, rasio daya tampung rumah sakit tetap ideal, namun akreditasi rumah sakit menurun pada 2024. Akan tetapi, pelayanan rumah sakit rujukan tidak hanya ditujukan bagi penduduk kota saja, penduduk kabupaten juga harus terlayani. Oleh karena itu, pembangunan rumah sakit di Kota Magelang masih dimungkinkan dengan tetap mengacu pada RTRW yang sudah ada. Usia Harapan Hidup meningkat menjadi 77,54 tahun pada 2024. Ke depan, arah kebijakan dan strategi sektor kesehatan dalam RPJMD 2025-2029 perlu difokuskan pada penguatan dan pengembangan layanan rujukan, percepatan penurunan stunting, peningkatan mutu layanan melalui akreditasi, serta pemantapan sistem gizi dan data kesehatan berbasis bukti.

2.1.4.4.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Ketaatan dalam RTRW merupakan kinerja dari Pemanfaatan Ruang didasarkan pada monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang tahunan. Secara umum, total realisasi pemanfaatan ruang mencapai 1.592,96 hektare dari total rencana seluas 1.860,02 hektare, dengan tingkat realisasi sebesar 87,17%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan ruang di Kota Magelang telah sesuai dengan ketentuan RTRW, dengan rasio ketaatan RTRW mencapai 85,64%, yang merupakan indikator positif terhadap implementasi penataan ruang di kota ini.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Magelang selama periode 2020-2024 dapat dilihat melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.84 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96,91	97,08	88,37	98,32	76,30
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	97,13	0,57	0,56	98,81	71,11
Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	100	100	100	100	100
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	94,29	90,49	93,03	85,41	85,69
Rasio tenaga operator/teknisi analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	NA	NA	0,083	35	24
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	NA	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Magelang selama 2020-2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan konsistensi dalam pelayanan dasar dan penataan wilayah. Pengelolaan sampah dan akses sanitasi mengalami kemajuan, namun belum stabil, menandakan perlunya perbaikan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Kualitas drainase menunjukkan tren positif, mengindikasikan adanya perhatian terhadap infrastruktur pengendali banjir, meskipun perlu percepatan untuk menjangkau cakupan ideal. Di sisi lain, kondisi kemantapan jalan cenderung menurun, yang dapat berdampak pada kelancaran konektivitas dan aktivitas ekonomi, serta menandakan perlunya pemeliharaan rutin yang lebih optimal.

Kapasitas SDM konstruksi membaik, namun belum merata, menunjukkan pentingnya program sertifikasi dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Akses air minum dan layanan air limbah menunjukkan lonjakan dan penurunan tajam, mencerminkan kerentanan sistem layanan dasar yang sangat bergantung pada dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang stabil.

Secara umum, data menunjukkan bahwa Kota Magelang telah mencatat sejumlah kemajuan dalam aspek teknis dan kelembagaan, namun juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga kualitas dan stabilitas layanan infrastruktur dasar, yang memerlukan kebijakan lintas sektor yang lebih terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Diperlukan penyesuaian indikator pasca-perubahan kebijakan teknis,

penguatan pengelolaan infrastruktur permukiman berbasis kawasan (termasuk drainase dan sanitasi), peningkatan kualitas dan kontinuitas tenaga kerja konstruksi, serta optimalisasi pengelolaan persampahan regional yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika lintas wilayah. Selain itu, aspek tata ruang dan ketahanan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi perlu menjadi fokus utama guna mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

2.1.4.4.4 Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan perumahan dan kawasan permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.85 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	0	44,72	22,729	44,975	23,21
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,79	8,61	8,348	5,59	4,78
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,44	1,98	2,095	0,32	0,32

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Magelang selama periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan di beberapa aspek, meskipun ada tantangan pada penanganan kawasan kumuh dan pengembangan infrastruktur permukiman.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam persentase kawasan kumuh yang berhasil ditangani. Pada 2024, persentase penanganan kawasan kumuh mencapai 23,21%. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memperluas penanganan kawasan kumuh, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, perencanaan yang belum optimal, atau perubahan prioritas program.

Sementara itu, indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU menunjukkan tren positif. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman yang berkelanjutan, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan utama ke depan tetap pada upaya penanganan kawasan kumuh, yang meskipun menunjukkan penurunan, harus mendapat perhatian khusus. Pemerintah perlu mencari strategi yang lebih efektif untuk menangani kawasan kumuh secara komprehensif, serta memastikan bahwa pembangunan PSU terus berlanjut di seluruh permukiman, dengan fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di permukiman yang masih tertinggal. Selain itu, penerapan kebijakan yang mendukung penyediaan rumah layak huni bagi warga terdampak bencana juga harus menjadi prioritas agar kebutuhan hunian yang layak bisa terpenuhi dengan optimal.

2.1.4.4.5 Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaran urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.86 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (orang)	NA	382	150	150	300
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (orang)	NA	376	180	480	485
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (orang)	18	18	NIHIL Kasus	NIHIL Kasus	NIHIL Kasus
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Magelang telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Semua gangguan ketertiban yang terjadi berhasil ditangani, dan seluruh peraturan daerah ditegakkan secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa aparat bekerja cepat dan tegas. Namun, jumlah gangguan yang berhasil dicegah belum banyak berkurang, artinya upaya pencegahan perlu diperkuat. Edukasi, pengawasan dini, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar gangguan dapat dicegah.

Di bidang penanggulangan bencana, pelayanan kepada warga dalam bentuk informasi dan pelatihan kesiapsiagaan sudah berjalan, tetapi belum menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Ini penting untuk ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko bencana. Pelayanan penyelamatan dan pemadaman kebakaran berjalan dengan sangat baik. Waktu tanggap juga semakin cepat, menunjukkan peningkatan kemampuan tim di lapangan.

Tantangan Utama ke depan adalah memperluas edukasi dan pelatihan kebencanaan, serta memperkuat upaya pencegahan gangguan ketertiban. Dengan begitu, pelayanan publik di bidang ini tidak hanya menunggu masalah muncul, tetapi juga aktif mencegah dan melindungi masyarakat sejak awal.

2.1.4.4.6 Urusan Bidang Sosial

Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.87 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Sosial Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	100	100	100	100	100
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100	100	100	100
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	100	100	100	100	100
Persentase PMKS/PPKS	9,34	5,35	4,83	4,72	4,49

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja urusan sosial Kota Magelang selama 2020-2024 menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan kelompok rentan dan pengelolaan layanan sosial dasar. Pemerintah berhasil memastikan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis

terpenuhi secara penuh di luar panti. Respons terhadap korban bencana juga konsisten optimal, menandakan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan darurat.

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang terus terjaga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap nilai historis dan penghormatan kepada para pahlawan.

Tren penurunan persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial secara signifikan mengindikasikan keberhasilan intervensi sosial yang bersifat preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan. Ini menjadi bukti bahwa pendekatan komprehensif dan lintas sektor yang diterapkan telah efektif mengurangi kerentanan sosial secara nyata dan berkelanjutan.

Capaian ini merefleksikan tata kelola urusan sosial yang tidak hanya responsif dalam kondisi darurat, tetapi juga berorientasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.

Tantangan mendatang adalah bagaimana mencegah masalah sosial sejak awal, bukan hanya menanganinya saat sudah terjadi. Layanan sosial juga perlu diperluas agar bisa menjangkau semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan yang selama ini fokus pada bantuan langsung perlu diarahkan menjadi upaya pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri. Selain itu, pertumbuhan kota, perubahan jumlah penduduk, dan kemungkinan krisis sosial di masa depan menuntut sistem perlindungan sosial yang lebih cepat, tangguh, dan saling terhubung antar lembaga.

2.1.4.4.7 Urusan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.88 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	NA	68,58%	63,84%	84,45%	87,27%
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	41,93	NA	NA	NA	NA
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	34,24	19,591	75,83	95,25
Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per jiwa)	104,14	107,99	110,5	110,8	118,61
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	23,60	21,75	38,51	37,46	37,91
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	51,42	68,58	63,84	84,62	87,27

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja ketenagakerjaan Kota Magelang menunjukkan perbaikan signifikan dalam penempatan tenaga kerja, peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, dan pemulihan produktivitas kerja. Capaian ini mencerminkan mulai efektifnya pelatihan berbasis kebutuhan industri serta membaiknya akses terhadap informasi pasar kerja. Namun, implementasi kerja layak di perusahaan masih belum merata dan memerlukan penguatan pengawasan serta insentif. Fluktuasi produktivitas dan keterbatasan data perencanaan tenaga kerja juga menandakan perlunya sistem ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data.

Selanjutnya, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas SDM, perluasan jejaring kerja sama lintas wilayah, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi transformasi ekonomi digital dan perubahan pasar tenaga kerja. Dalam RPJMD 2025-2029, arah kebijakan ketenagakerjaan perlu difokuskan pada penguatan sistem informasi pasar kerja, perluasan jejaring kerja sama antarwilayah dan antarsektor, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor strategis. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digital dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

2.1.4.4.8 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.89 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,318	1,28	6,729	20,28	6,58
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,002	2927,63	33,949	67,78	0,05
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	59,85	59,98	58,30	61,10	57,68
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	2	2	2	2	2
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	NA	56,54	67,98	64,32	NA*
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	NA	67,76	76,77	85,50	NA*
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	53,57	57,50	58,82	65,58	66,30

**: Data belum diterbitkan*
Sumber: BPS, 2025 untuk TPAK, Publikasi Kemen PPA untuk IPHA dan IPKA, Publikasi KemendukBangga untuk Ibangga, dan DPMP4KB untuk indikator lainnya

Kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Magelang menunjukkan kemajuan dalam layanan perlindungan korban kekerasan dan penguatan keluarga. Seluruh korban perempuan dan anak yang membutuhkan layanan telah tertangani dengan baik, menandakan sistem perlindungan yang responsif sudah berjalan. Alokasi anggaran responsif gender sempat meningkat tajam, namun belum konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan perlunya penguatan komitmen anggaran untuk mendukung kesetaraan gender secara berkelanjutan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih fluktuatif, mengindikasikan perlunya strategi yang lebih kuat agar perempuan dapat lebih aktif dalam ekonomi formal.

Konsistensi program edukasi keluarga seperti Puspaga ikut mendorong peningkatan kualitas keluarga, tercermin dari membaiknya indeks pembangunan keluarga. Namun, fluktuasi dalam indeks pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menandakan perlunya koordinasi yang lebih kuat lintas sektor dan berkelanjutan. Implikasinya, RPJMD ke depan perlu menekankan peningkatan akses perempuan ke dunia kerja, memperkuat layanan pencegahan kekerasan berbasis gender, serta mendorong anggaran dan kebijakan yang lebih berpihak pada anak dan keluarga secara konsisten dan terstruktur.

2.1.4.4.9 Urusan Bidang Pangan

Kinerja penyelenggaran urusan pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.90 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Cadangan Pangan	120,07	125,08	31,25	54,17	117,92
Skor Pola Pangan Harapan	89,50	89,20	93,10	91,10	86,10
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	NA	NA	NA	35,29%	52,9%
Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	NA	85,71%	95,10%	95,90%	88,48%

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2025

Kinerja urusan pangan Kota Magelang menunjukkan kemajuan dalam ketersediaan dan cadangan pangan, yang mencerminkan kesiapan daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, kualitas konsumsi masyarakat menurun, terlihat dari turunnya skor pola pangan harapan, yang menandakan kurangnya keberagaman dan keseimbangan gizi dalam konsumsi harian. Selain itu, peningkatan daerah rentan rawan pangan menunjukkan masih ada wilayah dengan akses pangan yang belum merata, meskipun seluruhnya telah tertangani. Dari sisi keamanan, pangan segar sebagian besar sudah memenuhi standar, tetapi masih perlu pengawasan dan edukasi lanjutan agar konsisten aman.

Implikasinya, RPJMD ke depan perlu menekankan peningkatan edukasi gizi, penguatan cadangan pangan lokal, penanganan rawan pangan berbasis data wilayah, serta pelibatan pelaku usaha dan masyarakat dalam menjamin kualitas dan akses pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2.1.4.4.10 Urusan Bidang Pertanahan

Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.91 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pertanahan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	100	NA	NA	NA
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	76,547	10,43	NA	NA	NA
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	10,43	10,43	NA	NA	NA

Data NA karena tidak ada peruntukannya
Sumber: LPPD Kota Magelang 2020-2024

Kinerja urusan pertanahan Kota Magelang masih terbatas dari sisi data, namun menunjukkan beberapa capaian awal yang penting. Pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukan pada izin lokasi telah berjalan optimal, menandakan kontrol tata ruang yang cukup baik. Namun, penurunan drastis alokasi tanah untuk fasilitas umum menunjukkan potensi keterbatasan ruang publik di masa depan, yang bisa berdampak pada kualitas layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan lahan untuk investasi stagnan, mencerminkan perlunya sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan lahan strategis agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Minimnya data

tentang akses masyarakat terhadap tanah, redistribusi, dan penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa aspek keadilan agraria belum menjadi fokus utama.

Implikasinya, RPJMD ke depan perlu mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan, berbasis data spasial, dan proaktif dalam menjamin ruang publik, mendukung investasi yang berkelanjutan, serta memperkuat akses masyarakat terhadap tanah sebagai aset produktif.

2.1.4.4.11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.92 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	NA	20%	40%	80%	100%
Indeks Kualitas Air	16,67	30,83	65	66,67	56,67
Indeks Kualitas Udara	83,67	81,08	81,16	83,05	86,83
Persentase RTH	16,00%	16,24%	16,24%	16,24%	16,24%
Persentase Limbah B3 yang Terkelola	NA	NA	30%	50%	66,67%
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH	50%	51,51%	36,67%	40%	43,33%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,03	47,03	63,10	64,8	64,96
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	99,66	98,08	98,47	98,65	98,87

Sumber: LPPD Kota Magelang 2020-2024

Urusan lingkungan hidup di Kota Magelang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan bertahap dalam beberapa aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam hal kualitas dan partisipasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami lonjakan dari 47,03 pada tahun 2020 menjadi 64,96 pada tahun 2024, karena berbagai faktor positif yang mencerminkan perbaikan kondisi lingkungan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan kualitas udara yang membaik.

Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PPLH dan PUU LH) masih relatif rendah, yakni 43,33% pada 2024, yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha.

2.1.4.4.12 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.93 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk usia wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman KTP-el	99,79	100	100	100	100
Persentase kepemilikan KK	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan KIA	94,26	100	100	100	100
Persentase pasangan yang memiliki akta Perkawinan	100	100	100	100	100
Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	99,18	100	100	100	100
Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	100	100	100	100
Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100	100	100	100	100
Persentase Penerbitan Akta Perceraian	100	100	100	100	100
Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Terkelola Berbasis Teknologi Informasi	100	100	100	100	100
Persentase Jenis Data yang Tersaji dalam Profil Kependudukan	81,97	81,97	100	100	100
Perekaman KTP elektronik	99,79	100	100	100	100
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	94,26	100	100	100	100
Persentase kepemilikan akta kelahiran	99,18	99,95	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Magelang 2020-2024

Administrasi pendudukan dan pencatatan sipil memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi penduduk secara akurat. Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Magelang terus menunjukkan tren positif, dengan capaian indikator yang konsisten tinggi sepanjang 2020 hingga 2024. Tertib administrasi kependudukan ditunjukkan melalui tingginya persentase penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP-el, KIA, dan akta kelahiran, yang telah mencapai 100% sejak tahun 2021.

Demikian pula, indikator lainnya juga menunjukkan capaian maksimal, seperti kepemilikan Kartu Keluarga (KK), akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian, yang seluruhnya berada pada angka 100%. Perekaman KTP-el pun telah mencapai 100% sejak tahun 2021, setelah sebelumnya berada di angka 99,79% pada tahun 2020. Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun juga meningkat dari 99,18% pada 2020 menjadi 100% mulai tahun 2022.

Seluruh proses pencatatan sipil ini juga telah terkelola secara berbasis teknologi informasi secara penuh (100%) sejak 2020, serta didukung oleh penyajian jenis data dalam profil kependudukan yang meningkat dari 81,97% pada 2020-2021 menjadi 100% mulai tahun 2022. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi pelayanan inovatif melalui sistem jemput bola yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan inklusivitas layanan, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah yang sulit dijangkau.

2.1.4.4.13 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, evaluasi perkembangan kelurahan dilakukan setiap tahun mencakup tiga aspek yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan dan Bidang

Kemasyarakatan. Hasilnya sejak tahun 2022 seluruh kelurahan di Kota Magelang masuk dalam kategori cepat berkembang dengan nilai evaluasi di atas 351. Berikut merupakan rincian hasil evaluasi perkembangan kelurahan di Kota Magelang.

Tabel 2.94 Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Kota Magelang Tahun 2022-2024

Kelurahan	2022	2023	2024
Rejowinangun Selatan	373	384	384
Magersari	358	383	374
Jurangombo Utara	388	392	393
Jurangombo Selatan	353	376	382
Tidar Utara	363	375	379
Tidar Selatan	385	396	387
Wates	392	392	392
Potrobangsan	409	409	408
Kedungsari	387	388	389
Kramat Utara	383	385	398
Kramat Selatan	387	395	399
Kemirirejo	395	397	398
Cacaban	367	367	374
Rejowinangun Utara	367	367	368
Magelang	368	368	369
Panjang	369	380	381
Gelangan	399	399	399

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025

Capaian evaluasi perkembangan kelurahan ini konsisten selama tiga tahun terakhir (2022-2024), dengan seluruh 17 kelurahan memperoleh nilai evaluasi di atas ambang batas minimal. Secara umum, sebagian besar kelurahan menunjukkan tren peningkatan skor evaluasi dari tahun ke tahun. Misalnya, Kramat Selatan meningkat dari 387 pada tahun 2022 menjadi 399 pada tahun 2024, sedangkan Kemirirejo mempertahankan skor tinggi dengan 395 pada 2022 dan naik menjadi 398 pada 2024. Potrobangsan dan Gelangan juga menunjukkan performa konsisten dengan skor di atas 400 dan nyaris tidak berubah, menandakan stabilitas kualitas tata kelola di kelurahan tersebut.

Kelurahan Jurangombo Selatan mengalami peningkatan signifikan, dari skor 353 di tahun 2022 menjadi 382 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan nyata dalam aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Sementara itu, kelurahan seperti Magersari dan Cacaban menunjukkan fluktuasi nilai, namun tetap berada dalam kategori cepat berkembang.

Peningkatan nilai evaluasi ini menggambarkan efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelurahan yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang. Hal ini penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dalam penguatan peran kelurahan ke depan.

2.1.4.4.14 Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaran urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.95 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	NA	1,3	1,79	1,77	1,78
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	NA	NA	6,33	6,64	2,53
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR)	28,40	29,73	62,18	70,09	71,04
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	18,33	7,72	21,90	11,58	6,65

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2025

Tabel 2.94 menunjukkan perkembangan indikator kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama periode 2020-2024. Angka Kelahiran Total (TFR) meningkat dari 1,3 pada 2021 menjadi 1,79 di 2022 dan tetap stabil di kisaran 1,77-1,78 pada 2023-2024. Sementara itu, Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR) menunjukkan lonjakan pada 2022-2023 (6,33 dan 6,64), namun turun tajam menjadi 2,53 pada 2024, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan intervensi terhadap pencegahan kehamilan remaja.

Di sisi lain, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) mengalami peningkatan signifikan, dari 28,40% pada 2020 menjadi 71,04% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern, yang mencerminkan efektivitas program KB di Kota Magelang. Selaras dengan tren tersebut, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menurun drastis dari 18,33% pada 2020 menjadi hanya 6,65% pada 2024. Penurunan unmet need ini menandakan bahwa akses terhadap layanan KB semakin membaik dan respons terhadap kebutuhan keluarga dalam merencanakan kehamilan telah ditangani dengan lebih efektif. Kombinasi dari penurunan *unmet need*, peningkatan MCPR, dan penurunan angka kelahiran remaja memperlihatkan bahwa Kota Magelang menunjukkan kemajuan dalam pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana.

2.1.4.4.15 Urusan Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.96 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perhubungan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas kabupaten/kota	9000	90	90	1,0	1,0
V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0,43	0,43	0,43	0,61	0,72

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Urusan perhubungan di Kota Magelang memiliki peran penting dalam mewujudkan mobilitas yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mendukung konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik perkotaan. Penguatan sistem transportasi publik dan manajemen lalu lintas menjadi prioritas utama dalam menjaga kelancaran arus barang dan orang.

Rasio konektivitas kabupaten/kota menunjukkan perbaikan kualitas sistem transportasi dan akses antarwilayah. Data tahun 2023 hingga 2024 mencatat angka rasio sebesar 1, yang mengindikasikan bahwa jaringan konektivitas antarkabupaten/kota telah berada dalam kondisi ideal. Hal ini menandakan bahwa aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah di sekitar Kota Magelang sudah cukup baik dan merata, mendukung integrasi wilayah dalam skala regional.

Namun demikian, nilai *Volume to Capacity* (V/C) *Ratio* pada jalan kabupaten/kota menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebesar 0,61 dan 0,72. Angka ini mencerminkan adanya tekanan beban lalu lintas yang semakin tinggi terhadap kapasitas jalan, yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan menurunkan efisiensi transportasi jika tidak diantisipasi dengan baik. Perlu adanya intervensi melalui pengendalian lalu lintas, pelebaran jalan, manajemen parkir, serta penguatan infrastruktur jalan alternatif untuk menurunkan tingkat kepadatan ini.

Ke depan, dalam RPJMD 2025-2029, perencanaan transportasi dapat difokuskan pada peningkatan kualitas dan jangkauan transportasi publik, pengembangan sistem transportasi cerdas (*Intelligent Transport System*), serta penguatan integrasi antar moda. Upaya riil yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Magelang adalah pelayanan angkutan gratis bagi pelajar, perbaikan angkutan umum dengan sistem yang terintegrasi, integrasi dengan angkutan regional, penyediaan kelengkapan jalan serta manajemen rekayasa lalulintas pada ruas jalan yang membutuhkan.

2.1.4.4.16 Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.97 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Daring dan Terintegrasi	100%	100%	95,238%	95,24%	76,83%
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota	0,05%	0,10%	11,896%	100%	100%

Sumber: LPPD Kota Magelang 2020-2024

Urusan komunikasi dan informatika di Kota Magelang menunjukkan kemajuan dalam transformasi digital pemerintahan. Seluruh perangkat daerah telah terhubung dengan internet, menjadi fondasi penting untuk pelayanan publik berbasis digital. Selanjutnya, RPJMD perlu menekankan penguatan sistem layanan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan keamanan data, pelatihan SDM digital, serta pemerataan literasi informasi agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat digitalisasi secara nyata.

2.1.4.4.17 Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaran urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.98 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	41,227,671,003.00	NA	41,928,541,411.00	43,895,483,280.00	45,939,758,280.00
Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	32,91%	35,29%	38,75%	36,67%	71,32%
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	22,10%	41,33%	50,50%

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja urusan KUKM Kota Magelang menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Volume usaha koperasi terus meningkat, didukung pengawasan yang makin intensif dan lonjakan koperasi berkualitas, terutama pada 2024. Pertumbuhan wirausaha juga konsisten, menunjukkan ekosistem kewirausahaan yang mulai terbentuk melalui pelatihan dan fasilitasi pembiayaan. Di sisi lain, proporsi UKM yang terhubung dengan kemitraan atau ekspor masih sangat rendah dan stagnan, menandakan perlunya strategi untuk mendorong UKM naik kelas dan masuk pasar lebih luas.

Secara keseluruhan, arah kebijakan KUKM sudah tepat, namun RPJMD ke depan perlu fokus pada percepatan legalisasi koperasi, pembukaan akses kemitraan, dan penguatan kapasitas usaha agar KUKM makin kompetitif dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

2.1.4.4.18 Urusan Bidang Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.99 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	24,36	52,65	35,38	16,00	25,63

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Penanaman modal di Kota Magelang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan persentase peningkatan investasi yang fluktuatif.

2.1.4.4.19 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Magelang pada tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.100 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	2,05	2,10	2,07	2,15
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,69	0,58	1,189	1,521	1,724

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Data pada Tabel 2.99 menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam bidang kepemudaan dan olahraga selama periode 2020-2024. Pada indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, terlihat adanya perkembangan positif setelah pada tahun 2020 tercatat nihil.

Partisipasi mulai meningkat pada 2021 sebesar 2,05%, sedikit naik di tahun 2022 menjadi 2,10%, namun mengalami penurunan menjadi 2,07% di 2023, lalu naik kembali tipis ke 2,15% pada 2024. Sementara itu, partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan mengalami peningkatan tajam dari 0,222% di 2021 menjadi 1,189% di 2022 dan terus meningkat hingga 2024 sebesar 1,724%.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya nyata dalam meningkatkan keterlibatan pemuda dan prestasi olahraga, namun capaian yang fluktuatif mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program, kesinambungan kebijakan, dan dukungan terhadap sektor kepemudaan dan olahraga.

2.1.4.4.20 Urusan Bidang Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kota Magelang dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral yang berkualitas, konsisten, dan dapat diakses oleh publik. Statistik sektoral dikembangkan dalam kerangka Satu Data Indonesia, dengan landasan hukum berupa Perda Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020. Pemerintah Kota Magelang juga telah mengembangkan portal dataGo yang terhubung dengan open data Jawa Tengah sebagai sarana publikasi dan integrasi data antarperangkat daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditunjukkan melalui capaian indikator berikut.

Tabel 2.101 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Statistik Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	NA	NA	2,19	3,26

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja statistik Kota Magelang menunjukkan kemajuan yang kuat dan terstruktur, terutama dalam hal integrasi data statistik ke dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sejak 2021, seluruh perangkat daerah telah secara penuh menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi, mencerminkan telah tertanamnya budaya kerja berbasis data (*data-driven policy*). Ini bukan hanya capaian administratif, tetapi mencerminkan pergeseran penting menuju birokrasi yang lebih rasional dan akuntabel.

Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari 2,19 pada 2023 menjadi 3,26 pada 2024 memperkuat bukti bahwa kapasitas kelembagaan statistik daerah (dari sisi kelembagaan, SDM, hingga teknologi) terus membaik. Kenaikan ini menandakan penguatan sistem satu data yang mulai berjalan lebih efektif, baik dari aspek pengumpulan, pengelolaan, penyajian, hingga pemanfaatan data antarperangkat daerah.

Namun, tantangan statistik sektoral masih dihadapi seperti ketidakterpaduan standar antarinstansi, keterlambatan pembaruan, dan lemahnya validasi data. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menurunkan keandalan statistik sektoral sebagai landasan kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan IPS harus dibarengi dengan upaya berkelanjutan: standardisasi metodologi, interoperabilitas data antarplatform, peningkatan kapasitas statistik di OPD, serta penguatan peran koordinator data sektoral di level kota.

Implikasinya, RPJMD mendatang perlu menempatkan urusan statistik bukan sekadar sebagai pelengkap perencanaan, tetapi sebagai fondasi utama pembangunan berbasis bukti. Ini termasuk memperluas jangkauan publikasi data, mendorong keterbukaan data sektoral, serta membangun sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mendukung tata kelola yang transparan, adaptif, dan presisi.

2.1.4.4.21 Urusan Bidang Persandian

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperkuat pengelolaan keamanan informasi dan sistem persandian. Upaya ini dilengkapi dengan

penggunaan Indeks KAMI (Keamanan Informasi) sebagai alat asesmen berbasis standar ISO/IEC 27001. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan dan kematangan sistem keamanan informasi perangkat daerah secara menyeluruh. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan ini dirinci pada Tabel 2.101 berikut.

Tabel 2.102 Nilai Komponen Indeks KAMI Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	24	24	91	109	109
Nilai Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi	18	18	26	61	61
Nilai Kerangka Kerja Keamanan Informasi	24	24	32	61	61
Nilai Pengelolaan Aset Keamanan Informasi	27	27	62	138	138
Nilai Teknologi dan Keamanan Informasi	0	0	55	72	72
Nilai Indeks KAMI	93	93	266	441	441
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah***	NA	1.860%	53,2%	68,37%	68,37%

**Penilaian Mandiri*
***Menggunakan Angka 2023 karena tidak mengajukan assessemen ke BSSN*
**** Asesmen Badan Siber dan Sandi Negara (2020-2023) dan Mandiri (2024)*
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, 2025

Data menunjukkan bahwa Kota Magelang telah mengalami peningkatan signifikan dalam aspek keamanan informasi, mencerminkan perbaikan tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset, serta mulai diadopsinya sistem dan teknologi keamanan. Kenaikan nilai indeks yang pesat menunjukkan bahwa sistem pengamanan informasi tidak lagi bersifat administratif, melainkan mulai terintegrasi dalam proses digitalisasi pemerintahan.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjamin kesiapan sistem menghadapi risiko siber secara menyeluruh. Masih terdapat kesenjangan antara peningkatan nilai asesmen dan kematangan infrastruktur, terutama pada aspek teknologi, yang menjadi titik lemah utama. Ketiadaan konfigurasi keamanan yang terdokumentasi dan belum optimalnya pengelolaan sistem jaringan membuat sistem masih rentan terhadap gangguan dan kebocoran data.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa lompatan nilai indeks belum disertai dengan pencapaian tingkat kematangan minimal untuk memenuhi standar ISO. Apalagi tidak dilakukan asesmen ulang pada 2024, sehingga peningkatan tidak dapat diverifikasi secara independen.

Implikasinya, RPJMD ke depan harus menjadikan keamanan informasi sebagai bagian integral dari transformasi digital pemerintahan. Ini mencakup pembaruan infrastruktur, pembangunan ruang server yang aman, standarisasi sistem dan dokumentasi, serta peningkatan kapasitas SDM di seluruh OPD.

2.1.4.4.22 Urusan Bidang Kebudayaan

Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.103 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kebudayaan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarikannya cagar budaya	NA	100%	100%	100%	32,69%

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja kebudayaan Kota Magelang menunjukkan arah yang positif dalam pemajuan kebudayaan, pelestarian seni tradisional, dan pembinaan sejarah lokal. Peningkatan nilai pemajuan kebudayaan, capaian maksimal dalam pengembangan kebudayaan lokal dan pembinaan sejarah, serta naiknya

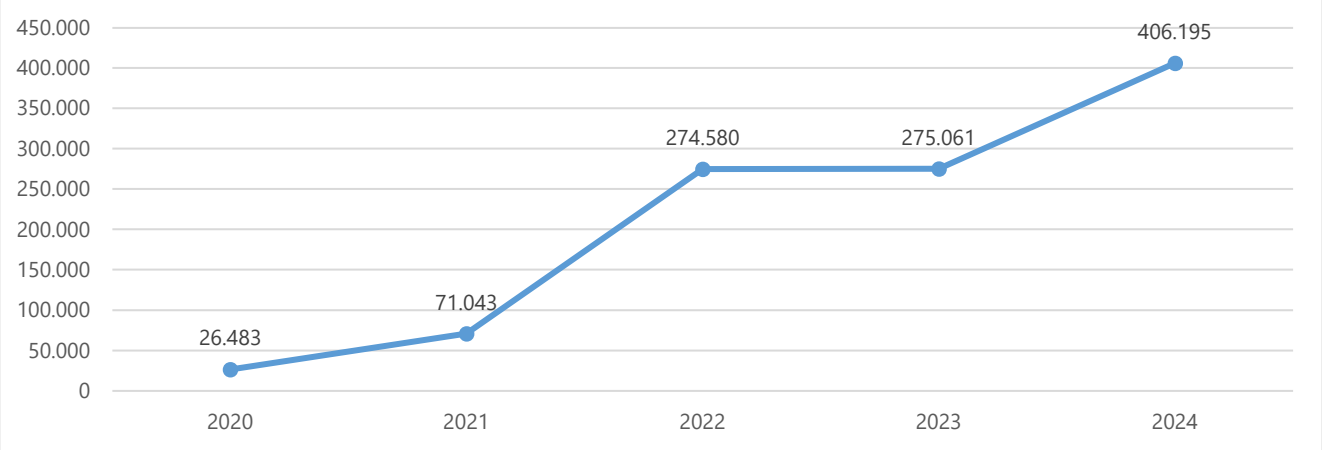
persentase kesenian tradisional yang dikembangkan menunjukkan bahwa identitas dan ekspresi budaya terus diperkuat sebagai bagian penting dari pembangunan kota. Kebudayaan telah menjadi nilai dasar yang menopang kehidupan masyarakat Kota Magelang yang harmonis dan humanis, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal yang memperkuat kohesi sosial.

Namun, penurunan drastis pelestarian cagar budaya pada 2024 menjadi perhatian serius. Hal ini mengindikasikan lemahnya keberlanjutan perlindungan fisik terhadap warisan budaya dan potensi konflik antara pelestarian dan pembangunan fisik. Jika tidak ditangani, kondisi ini berisiko menggerus jejak sejarah dan mengurangi daya dukung budaya dalam pembangunan kota. Fluktuasi kunjungan museum juga menandakan perlunya revitalisasi pendekatan edukatif dan promosi budaya berbasis pengalaman.

Implikasinya, RPJMD ke depan harus memosisikan kebudayaan bukan sekadar sektor, melainkan fondasi pembangunan karakter kota. Pelestarian cagar budaya perlu didorong melalui regulasi yang kuat, insentif pelindungan aset budaya, dan kolaborasi lintas sektor. Pembangunan kebudayaan harus selaras dengan urbanisasi dan digitalisasi, agar nilai-nilai budaya tetap hidup dalam ruang modern, mendukung Magelang sebagai kota yang harmonis, inklusif, dan berjati diri kuat.

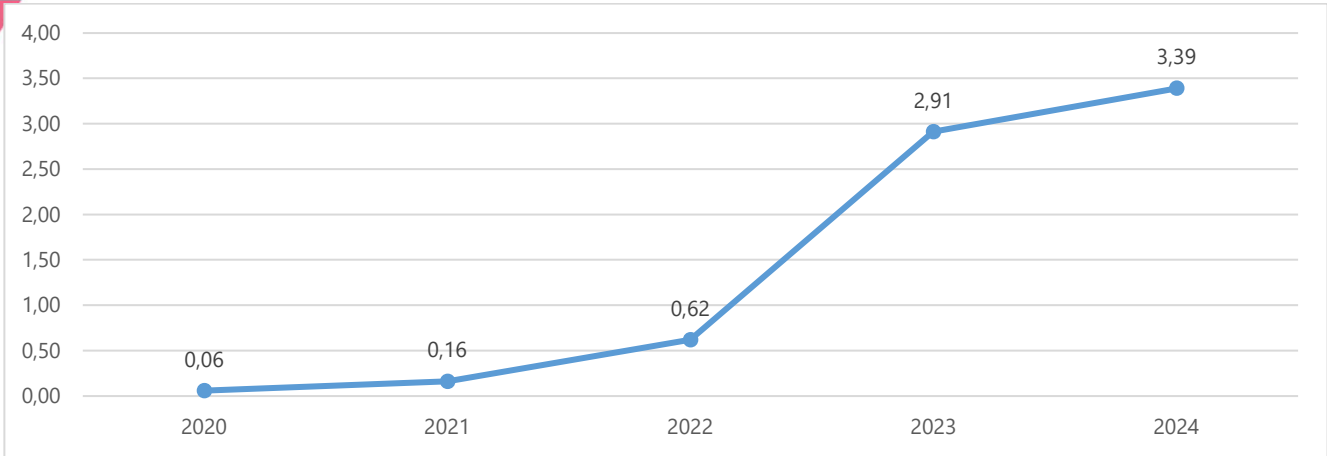
2.1.4.4.23 Urusan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran penting dalam penyediaan informasi dengan menjadi pusat pengetahuan yang mendukung pendidikan dan penelitian berbasis data. Sebagai lembaga yang mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan berbagai sumber informasi, perpustakaan memastikan akses yang luas terhadap literatur. Perpustakaan Kota Magelang telah memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya informasi untuk masyarakat. Jumlah pengunjung perpustakaan sejak tahun 2017 hingga 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat di periode akhir (Gambar 2.120). Jumlah pengunjung mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 namun kembali meningkat pasca pandemi hingga mencapai 406.195 orang di tahun 2024. Sementara itu, Gambar 2.121 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan juga kembali meningkat pasca pandemi, yaitu di tahun 2021 dengan angka 0,16 menjadi 3,39 pada tahun 2024.



Gambar 2.119 Jumlah Pengunjung Perpustakaan (jiwa) di Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2023; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, 2025 (Data Tahun 2023-2024)



Gambar 2.120 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Sumber: Data Go Kota Magelang, 2025

Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.104 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perpustakaan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61	61	61	NA	88,43
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	52,08	52,08	93,11	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Urusan perpustakaan di Kota Magelang mendapatkan perhatian khusus dengan dirilisnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat pada tahun 2024, yang mencapai 88,43. Sebelumnya, data TGM belum tersedia untuk Kota Magelang karena sampling yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional hanya mencakup beberapa kabupaten/kota tertentu. Nilai TGM yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Magelang memiliki minat baca yang kuat, yang merupakan hasil dari berbagai inisiatif dan program promosi literasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks RPJMD, hasil ini menjadi landasan penting untuk terus mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Upaya untuk memperluas jangkauan program literasi dan meningkatkan fasilitas perpustakaan diharapkan dapat lebih menguatkan budaya membaca di kalangan masyarakat. Dengan demikian, Kota Magelang dapat terus membangun masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing tinggi.

2.1.4.4.24 Urusan Bidang Kearsipan

Pengelolaan arsip merupakan fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Efektivitas pengelolaan arsip bukan hanya menyangkut penyimpanan dokumen, melainkan menjamin bukti kinerja, alat pertanggungjawaban, dan penyediaan informasi strategis bagi pembangunan. Kinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut

Tabel 2.105 Kinerja Urusan Pemerintah Kota Magelang di Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai pengawasan kearsipan	0	0	70,03	84.77	86,46
Nilai ASKI	0	0	54,47	77,66	80,85
Nilai ASKE	92,92	64,74	80,14	88,67	90.2

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Pengelolaan arsip di Kota Magelang menunjukkan kemajuan pada aspek prosedural. Nilai pengawasan, ASKI, dan ASKE yang terus meningkat, menandakan sistem dan koordinasi kelembagaan semakin baik. Namun, capaian ini belum menjamin kualitas substansi arsip. Kondisi ini berisiko melemahkan fungsi arsip sebagai memori pemerintahan dan alat pertanggungjawaban publik. Ke depan, dibutuhkan langkah konkret dalam pelestarian fisik, digitalisasi, serta peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan arsip benar-benar menjadi sumber informasi yang handal, bukan sekadar dokumen administratif.

2.1.4.4.25 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.106 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	-	168,10	169,32	296,31	298,54
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	165.860	173.484	175.629,5	307.351,625	100,75

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Urusan kelautan dan perikanan di Kota Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam produksi perikanan budidaya selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah produksi mencapai 168,10 ton dan terus meningkat hingga mencapai 298,54 ton pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pengembangan perikanan budidaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peningkatan teknologi budidaya, pelatihan bagi petani ikan, dan dukungan infrastruktur.

Dalam konteks RPJMD, hasil ini menunjukkan potensi besar sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar bagi produk perikanan. Dengan strategi yang tepat, Kota Magelang dapat terus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.4.26 Urusan Bidang Pariwisata

Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.107 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pariwisata Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-53,06	162	327,78	147,76	27,20
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-66,41	-60,92	97	12,65	12,77
Persentase peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara	NA	NA	NA	NA	12,79

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Sektor pariwisata Kota Magelang pulih cepat pasca-pandemi, tetapi mulai kehilangan momentum. Pertumbuhan kunjungan melambat, mengindikasikan daya tarik destinasi stagnan dan strategi promosi perlu disegarkan. Kunjungan wisatawan nusantara stabil rendah. Ini menunjukkan pasar domestik belum tergarap optimal. Padahal, segmen ini penting sebagai penyangga saat pasar internasional melemah.

Kesimpulannya, pariwisata Magelang perlu diarahkan pada diferensiasi produk, penguatan daya tinggal, dan promosi berbasis pengalaman. Dukungan terhadap UMKM pariwisata, peningkatan layanan, dan sinergi lintas sektor jadi kunci agar sektor ini tetap tumbuh dan berkontribusi nyata bagi ekonomi daerah.

2.1.4.4.27 Urusan Bidang Pertanian

Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.108 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Pertanian Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	100%	NA	81,73%	100%	83,28%
Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	%	NA	NA	11,11%	10%	9,09%
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	NA	NA	12%	10%	80%
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	12,6	12,98	8,10	-6,61	-6,3
Peningkatan pangan asal hewan yang ASUH		NA	NA	2,09	3,36	2,20

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Pertanian Kota Magelang beroperasi dalam keterbatasan pertanian, seperti tanpa sawah, lahan sempit, dan perkembangan aktivitas perkotaan. Penurunan produktivitas mencerminkan fakta dasar: model pertanian konvensional tidak relevan lagi. Untuk itu, diperlukan transformasi total menuju pertanian kota yang inovatif, seperti hidroponik, akuaponik, pekarangan produktif, dan integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan tajam kapasitas penyuluh pada 2024 merupakan peluang besar. Namun, peran penyuluh dikembangkan untuk bukan sekadar pendamping teknis, tetapi agen inovasi lokal, edukator pangan sehat, dan fasilitator usaha tani kecil berbasis komunitas.

Minimnya izin usaha pertanian menunjukkan ekosistem usaha tani belum terbentuk. Ini sinyal bahwa insentif, regulasi, dan kemitraan belum mendukung tumbuhnya agribisnis skala mikro. Tanpa intervensi kebijakan afirmatif, sektor ini akan terus stagnan. Kesimpulannya, sektor pertanian di Kota Magelang tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan konvensional. Arah kebijakan ke depan harus fokus pada efisiensi lahan, integrasi multisektor, teknologi adaptif, dan ketahanan pangan rumah tangga. Tanpa transformasi ini, kontribusi pertanian terhadap pembangunan kota akan terus menurun, bahkan kehilangan relevansi.

2.1.4.4.28 Urusan Bidang Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.109 Kinerja Urusan Pemerintahan Kota Magelang di Bidang Perdagangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	36	79,17	29,63	85,19	85,71
Nilai Ekspor Barang	2,483,087.00	2,333,573.00	2,202,000.00	2,289,000.00	2,461,000.00
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	NA	NA	NA	100	100

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	44,09	98,29	94,21	89,54	98,93

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Perbaikan sarana perdagangan menunjukkan arah yang konsisten dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur ekonomi rakyat. Namun fluktuasi di tahun-tahun sebelumnya menandakan perlunya kesinambungan program dan manajemen aset yang terencana, bukan sekadar intervensi proyek. Stabilnya nilai ekspor mencerminkan daya saing produk lokal yang bertahan di tengah dinamika global, tetapi belum menunjukkan ekspansi pasar atau diversifikasi komoditas. Artinya, strategi ekspor perlu diarahkan pada hilirisasi, penguatan kualitas produk, dan akses pasar baru, khususnya berbasis UMKM. Legalitas usaha sudah tertata baik, tetapi tantangan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas dan skala bisnis para pelaku. Tanpa dukungan pembiayaan, pelatihan, dan jejaring distribusi, izin yang dimiliki belum tentu berdampak pada pertumbuhan usaha.

Secara keseluruhan, arah kebijakan perlu difokuskan pada penguatan ekosistem perdagangan: sarana niaga yang fungsional, usaha yang produktif dan berdaya saing, serta regulasi yang berpihak pada pertumbuhan usaha kecil.

2.1.4.4.29 Urusan Bidang Perindustrian

Kinerja penyelenggaran urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.110 Kinerja Urusan Bidang Perindustrian Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan omzet pelaku usaha industri kecil	NA	NA	NA	2,85	2,61
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	-1,05	-0,29	16,56	1,87	8,73
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	95,96	97,80	113,44	176,16
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	45	NA	NA	NA	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Industri kecil dan menengah di Kota Magelang mulai tumbuh kembali setelah sempat menurun. Jumlah pelaku usaha bertambah dan omzet mulai naik, walau kenaikannya masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa kondisi usaha mulai membaik, tapi belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Program pembangunan industri yang dijalankan pemerintah sudah berjalan dengan baik, bahkan melampaui target. Artinya, arah kebijakan sudah tepat. Namun, capaian ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, yang masih bergerak pelan.

Data industri kini sudah tersedia secara lengkap dan terkini. Ini mendukung pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya dalam menentukan jenis dukungan yang dibutuhkan pelaku industri, kawasan yang perlu difokuskan, atau subsektor yang punya potensi tumbuh cepat.

Ke depan, kebijakan perlu lebih fokus pada mendorong pelaku usaha agar bisa meningkatkan skala usahanya. Dukungan yang paling dibutuhkan adalah akses ke pembiayaan, peralatan produksi yang efisien, pengembangan produk, dan perluasan pasar. Hal ini dimaksudkan upaya industri tidak hanya akan tumbuh di permukaan tetapi juga memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha maupun perekonomian kota.

2.1.4.4.30 Unsur Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaran unsur Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.111 Kinerja Unsur Sekretariat Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kematangan Organisasi	30,00	34,10	35,56	37,11	37,25
Tingkat Kematangan UKPBJ	NA	NA	NA	Proaktif (Level 3)	Proaktif (Level 3)

Sumber: https://siukpbj.lkpp.go.id/files/apresiasi/kota-magelang.pdf

Indeks kematangan organisasi Sekretariat Daerah berada pada kategori tinggi. Ini menunjukkan struktur, tata kelola, dan sistem kerja organisasi telah terbentuk dengan baik. Artinya, kapasitas internal bukan lagi isu utama. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi eksekusi dan ketegasan pengendalian.

UKPBJ sudah mencapai level proaktif. Pengadaan tidak lagi hanya soal administrasi, tapi sudah masuk ke ranah perencanaan dan efisiensi belanja. Ini jadi alat kendali anggaran yang efektif jika dijalankan konsisten.

Posisi kelembagaan Sekda saat ini cukup kuat. Tantangannya bukan membangun, tapi menjaga mutu kerja, menyederhanakan proses, dan mempercepat koordinasi antarbagian. Risiko stagnasi harus diantisipasi lewat sistem evaluasi kinerja yang objektif dan umpan balik lintas unit.

2.1.4.4.31 Unsur Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaran unsur Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.112 Kinerja Unsur Sekretariat DPRD Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Capaian 100% dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD selama lima tahun berturut-turut menunjukkan kinerja operasional Sekretariat DPRD sangat stabil dan andal. Tidak ada deviasi kinerja, artinya semua kebutuhan administratif, teknis, dan fasilitas lembaga legislatif terpenuhi secara penuh setiap tahun.

Ini mencerminkan perencanaan yang presisi, eksekusi yang tertib, dan koordinasi kerja yang berjalan lancar. Namun, capaian penuh juga harus dibaca secara kritis. Stabilitas tinggi perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa tidak terjadi stagnasi, dan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan aktual dewan, bukan sekadar formalitas pemenuhan program.

Ke depan, tantangan bukan pada pemenuhan dasar, tetapi pada peningkatan kualitas dukungan: efisiensi kerja, literasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi legislatif, dan penguatan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD secara subtantif. Sekretariat perlu mengambil peran lebih aktif dalam meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD, bukan hanya sebagai unit layanan administratif.

2.1.4.4.32 Unsur Perencanaan

Kinerja penyelenggaran unsur perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.113 Kinerja Unsur Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	NA	48,32	71,77	81,74	77,81
Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NA	100,00	90,58	90,58	90,58
Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	NA	100,00	90,63	90,63	90,63
Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	NA	85,71	70,83	70,83	70,83

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Kinerja perencanaan daerah menunjukkan perbaikan dalam cakupan dan kualitas proses. Kenaikan skor selama beberapa tahun mencerminkan sistem perencanaan mulai terbentuk, namun penurunan di tahun terakhir menandakan perlunya penguatan dalam konsistensi pemantauan dan pengendalian. Implementasi di bidang pemerintahan, SDM, serta ekonomi dan SDA tercatat stabil pada level tinggi, mengindikasikan pelaksanaan masih berjalan sesuai rencana. Bidang infrastruktur dan kewilayahan mengalami penurunan. Ini menunjukkan adanya hambatan struktural, yang muncul dari aspek perencanaan teknis, kesiapan dokumen, hingga dukungan anggaran. Karena menyangkut konektivitas dan layanan dasar, sektor ini menjadi titik perhatian utama.

Untuk RPJMD tahun 2025-2029, evaluasi ini bermakna, fokus perbaikan perlu diarahkan pada jaminan mutu proses perencanaan, tindak lanjut terhadap evaluasi, serta percepatan penyelesaian hambatan teknis di sektor-sektor yang masih tertinggal dalam pelaksanaan.

2.1.4.4.33 Unsur Keuangan

Kinerja penyelenggaran unsur keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.114 Kinerja Unsur Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	30,73%	32,12%	38,28%	32,06%	34,48%
Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	NA	20,69%	15,123%	14,89%	16,51%
Persentase PAD	NA	33,34%	38,267%	32,04%	34,48%
Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	NA	74,90%	16,979%	78,59%	69,76%
Opini Laporan Keuangan	NA	10	10	10	10
Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	NA	-21,26%	-12,6501%	-12,07%	-7,22%
Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	NA	26,39%	4,5982%	5,96%	5,82%
Cash Management: Persentase Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	NA	30,38%	17,987%	14,08%	9,62%

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan (*Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units*)	NA	0,5596%	35,817%	100%	100%
Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah (*Public Access to Fiscal Information*)	NA	100%	100%	100%	100%
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,398	20,69	15,123	14,89	16,51
Rasio PAD	27,72	33336,146	38,267	32,04	34,48

Sumber: LPPD Kota Magelang, 2020-2024

Pengelolaan aset mulai menunjukkan struktur yang tertata. Sejak 2021, telah tersedia daftar aset tetap, manual penyusunan, dan proses inventarisasi tahunan. Sistem manajemen aset juga telah dibentuk di empat unit pada dua tahun terakhir. Namun, belum terlihat indikasi bahwa aset ini dimanfaatkan secara produktif.

Pengelolaan keuangan daerah menunjukkan perbaikan pada beberapa aspek kunci. Realisasi belanja semakin mendekati rencana, dengan deviasi yang menurun signifikan. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran makin realistis dan pelaksanaannya makin terkendali. Deviasi realisasi PAD terhadap target juga membaik, menandakan penguatan proyeksi pendapatan dan intensifikasi pemungutan yang mulai efektif. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sempat naik, tetapi belum konsisten. Ini menunjukkan bahwa arah kemandirian fiskal sudah ditempuh, namun masih belum stabil. Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan relatif terkendali, berada di kisaran 14%-20%. Angka ini masih dalam batas wajar, namun perlu dijaga agar tidak mengganggu kapasitas fiskal untuk program prioritas.

Indeks pengelolaan keuangan daerah menurun dari 71 ke 66. Meski angka ini tidak rendah, tren penurunan selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola belum mengalami perbaikan yang berarti. Ini perlu dicermati, terutama dari aspek efisiensi belanja dan perbaikan sistem penganggaran. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, opini BPK yang konsisten, akses publik terhadap informasi fiskal yang terbuka, dan ketersediaan data pelayanan menandakan kemajuan tata kelola terbuka. Persentase belanja urusan pemerintahan umum sangat fluktuatif. Setelah sempat turun tajam pada 2022, angkanya kembali tinggi pada 2023 dan menurun lagi di 2024. Fluktuasi ini perlu dievaluasi dari sisi perencanaan dan konsistensi pengalokasian belanja lintas tahun.

Fokus kebijakan ke depan adalah menjaga kedisiplinan belanja, menstabilkan kontribusi PAD, dan meningkatkan pemanfaatan aset yang sudah terdata agar menghasilkan nilai tambah fiskal. Selain itu, tren penurunan indeks keuangan perlu dihentikan melalui perbaikan sistem anggaran dan kontrol pelaksanaan yang lebih kuat.

2.1.4.4.34 Unsur Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran unsur kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.115 Kinerja Unsur Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Merit	NA	0,373	0,6825	0,823	0,823
Nilai Sistem Merit	NA	149,5	273,0	337,5	337,5

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase rata-rata capaian target aspek sistem merit	NA	100	100	100	100
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	NA	203,94%	216,467%	74,07%	76,68%
Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	NA	22,85%	28,03%	25,66%	26,64%
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	NA	22,85%	23,015%	38,65%	38,08%

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025

Sistem Merit Kota Magelang berada pada kategori "Sangat Baik" dengan Indeks Sistem Merit sebesar 0,823 dan Nilai Sistem Merit sebesar 337,5 berdasarkan pada penilaian KASN, yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa prinsip meritokrasi dalam pengelolaan manajemen ASN telah diterapkan dengan sangat baik. Ketercapaian kinerja pada aspek-aspek sistem merit menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah berproses dengan tren yang sesuai dengan rencana pada setiap tahunnya.

Kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang telah menyelenggarakan urusan kepegawaian dengan trend yang positif dan baik. Hal ini ditunjukkan pada Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi menunjukkan peningkatan, meskipun proporsinya secara keseluruhan masih belum dominan. Ini menjadi catatan penting, mengingat jabatan fungsional merupakan kerangka utama birokrasi pasca reformasi. Fluktuasi pada Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar menandakan perlunya konsistensi basis data kepegawaian serta pemetaan ulang kebutuhan formasi berbasis analisis jabatan dan beban kerja, sedangkan Rasio Pegawai Fungsional menunjukkan tren perbaikan, meskipun masih berada pada kisaran moderat; peningkatan ke depan perlu diarahkan secara terukur agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas.

Rekomendasi untuk RPJMD 2025-2029: memperkuat penerapan sistem merit pada manajemen ASN, memperluas transformasi jabatan fungsional secara terukur, dan meningkatkan kompetensi ASN melalui sertifikasi yang berbasis pada kebutuhan riil organisasi.

2.1.4.4.35 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran unsur pendidikan dan pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.116 Kinerja Unsur Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya	NA	30,67	37,77	48,70	42,92

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang, 2025

Data persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam periode 2021-2023. Pada tahun 2021, persentasenya berada di angka 30,67 persen, kemudian naik menjadi 37,77 persen pada 2022, dan kembali meningkat signifikan menjadi 48,70 persen pada 2023. Namun, pada 2024 terjadi penurunan menjadi 42,92 persen.

Peningkatan persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dari 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya perbaikan upaya dalam memperkuat kapasitas aparatur sesuai bidang tugasnya, yang berpotensi mendorong kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan. Meski demikian, penurunan pada 2024 menjadi 42,92 persen mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian tersebut. Konsistensi peningkatan partisipasi dalam pelatihan menjadi penting untuk memastikan kompetensi ASN terus berkembang sejalan dengan tuntutan jabatan dan dinamika pelayanan publik.

2.1.4.4.36 Unsur Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaran unsur penelitian dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.117 Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	42,11	0,00	0,00	37,50	41,18
Persentase pemanfaatan hasil inovasi	10,09	44,00	22,00	27,78	33,83

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Magelang, 2025

Pemanfaatan hasil litbang di Kota Magelang menunjukkan perbaikan pada 2023 dan 2024, menandakan meningkatnya perhatian terhadap litbang sebagai bagian dari proses kebijakan. Di sisi lain, pemanfaatan inovasi memperlihatkan tren membaik meski masih fluktuatif, dengan capaian 2024 mendekati tingkat moderat. Ini mengindikasikan bahwa inisiatif inovatif mulai mendapat tempat, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

RPJMD 2025-2029 diharapkan memperkuat ekosistem litbang dan inovasi agar tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga menjamin pemanfaatannya secara sistematis dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan layanan publik.

2.1.4.4.37 Unsur Pengawasan

Kinerja penyelenggaran unsur pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.118 Kinerja Unsur Pengawasan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	NA	NA	95,06	93,75	96,02
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	NA	NA	3,000	3,290	3,339
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	NA	NA	3,06	3,10

Sumber: Inspektorat Kota Magelang, 2025

Kinerja pengawasan di Kota Magelang menunjukkan penguatan pada tiga aspek utama: tindak lanjut hasil audit BPK, maturitas SPIP, dan kapabilitas APIP. Tingkat penyelesaian rekomendasi BPK tetap tinggi dalam tiga tahun terakhir, menandakan adanya komitmen terhadap akuntabilitas keuangan. Maturitas SPIP telah melampaui level 3, mengindikasikan sistem pengendalian intern mulai berjalan sistematis, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi ke seluruh proses manajemen risiko. Sementara itu, kapabilitas APIP juga berada di atas level 3, yang artinya sudah memenuhi standar minimum sebagai pengawas internal yang independen dan efektif.

Rekomendasi untuk RPJMD 2025-2029: memperkuat integrasi pengawasan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan, memastikan peran APIP sebagai mitra strategis, serta menjaga konsistensi tindak lanjut temuan sebagai instrumen pengendalian kinerja organisasi.

2.1.4.4.38 Unsur Kewilayahan

Kinerja penyelenggaran unsur kewilayahan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.119 Kinerja Unsur Kewilayahan Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	99.20%	100%	100%
Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	NA	NA	98.71%	100%	100%
Cakupan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan se-Kota Magelang, 2025

Kinerja unsur kewilayahan menunjukkan konsistensi tinggi dalam cakupan program, baik pemerintahan, ketertiban umum, maupun pemberdayaan masyarakat. Hampir seluruh indikator mencapai 100% secara berkelanjutan, mencerminkan kepatuhan administratif dan keberlangsungan pelaksanaan program di tiga kecamatan. Namun, capaian administratif ini tetap perlu dibarengi dengan pemantauan atas kualitas pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek layanan publik dan koordinasi keamanan wilayah, agar tidak hanya terjaga dari sisi kepatuhan tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Rekomendasi untuk RPJMD 2025-2029 adalah memperkuat evaluasi substantif terhadap hasil program kewilayahan untuk memastikan pemerataan dampak layanan dan ketertiban hingga tingkat kelurahan.

2.1.4.4.39 Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja penyelenggaran unsur pemerintahan umum ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.120 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kota Magelang Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	17%	37%	80%
Persentase Penduduk Usia Pemilih Pemula yang Berpartisipasi dalam Agenda Politik	NA	NA	0,98%	2,43%	12,51%
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	NA	NA	NA	85,09%	86,74%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang, 2025

Kinerja unsur pemerintahan umum di Kota Magelang menunjukkan tren perbaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir, terutama pada aspek pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan peran organisasi kemasyarakatan. Kenaikan tajam dalam cakupan pembinaan ideologi serta tingginya proporsi ormas aktif mencerminkan penguatan kesadaran kolektif dan dukungan sosial terhadap nilai-nilai kebangsaan. Meski partisipasi politik pemilih pemula masih relatif rendah, pertumbuhannya menunjukkan adanya respons terhadap intervensi edukatif, meskipun belum cukup masif.

Capaian ini menjadi dasar untuk mendorong RPJMD 2025-2029 agar menempatkan pembinaan kebangsaan sebagai program lintas sektor yang sistematis, memperluas literasi politik digital bagi

generasi muda, serta memperkuat ekosistem *civil society* melalui fasilitasi kelembagaan dan regulasi partisipatif. Pendekatan ini penting untuk membentuk pemerintahan umum yang responsif, berbasis nilai, dan didukung partisipasi publik yang terstruktur.

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

Tabel 2.121 Evaluasi Kinerja Pembangunan Kota Magelang Tahun 2022-2024

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**															
1	Kemiskinan	%	7,58	7.58	7.30	7.00	6.76	6.70	7.10	6.11	5.94	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-2,45	4.35	5.05	5.14	5.18	5.32	5.77	5.45	5.45	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Pengeluaran per kapita	Ribu Rp	12.21	13.40	13.85	14.33	14.82	15.33	12.82	13.18	13.18	95.66	95.13	91.93	85.93	T
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,99	80.56	81.25	81.94	82.64	83.34	80.39	81.17	82.15	99.79	99.90	100.00	98.57	ST
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,59	7.80	7.50	7.10	6.30	6.00	6.71	5.25	4.40	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
6	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	%	19,09	19.20	19.35	19.45	19.50	19.65	18.03	17.96	19.41	93.90	92.84	99.79	98.77	ST
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,39	10.54	10.62	10.71	10.80	10.89	0.00	11.20	11.43	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14.54	14.75	14.97	15.19	15.42	0.00	14.40	14.62	98.42	97.63	97.66	94.81	ST
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,85	76.93	76.98	77.04	77.10	77.16	0.00	77.22	77.54	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
10	Pertumbuhan investasi	%	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	41.15	16.29	16.05	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
11	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,27	95.65	95.75	95.90	96.00	96.15	95.91	96.43	96.43	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**															
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1	Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.98	99.48	100.13	99.98	99.48	100.00	100.00	ST
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.72	99.48	145.59	99.72	99.48	100.00	100.00	ST
3	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	NA	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	70.05	84.58	81.89	76.98	91.93	88.05	86.20	T
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.24	120.11	126.80	100.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	178.01	183.74	186.76	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.00	32.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
12	Angka Kelulusan (AL) Pendidikan Kesetaraan (Paket A/B/C)	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	97,63	98.00	98.50	99.00	99.50	100.00	0.00	67.00	98.52	0.00	68.02	99.52	98.52	ST
16	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00	0.00	65.92	65.92	0.00	98.39	96.94	94.17	ST
17	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,3	95.60	95.70	95.80	95.90	96.00	0.00	98.40	98.40	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
18	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,71	97.00	97.25	97.50	98.00	98.50	0.00	99.00	99.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	Indeks Kesehatan	Indeks	0.875	0.876	0.877	0.878	0.878	0.879	0.88	0.88	0.89	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	138,79	140.00	130.00	120.00	110.00	100.00	82.92	0.00	98.52	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	16,66	16.00	16.00	15.00	15.00	15.00	0.00	7.29	11.82	100.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
4	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka	13,88	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	8.29	5.47	11.82	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Angka	16.00	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	0.00	3.65	9.85	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
6	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	NA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	5.52	3.89	100.00	16.00	70.36	70.36	S
7	Persentase warga negara usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85,1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	98.46	0.00	100.00	98.46	98.46	ST
8	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	%	NA	63.00	66.00	69.00	72.00	75.00	0.00	98.40	68.43	0.00	100.00	99.17	91.24	ST
9	Cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular	%	NA	59.00	62.00	65.00	67.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
10	Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	NA	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	0.00	85.82	88.66	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															
1	Persentase kualitas infrastruktur wilayah	%	NA	75.14	76.88	78.75	82.05	84.50	0.00	66.42	66.42	0.00	86.39	84.34	78.60	T
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	NA	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	79.74	83.40	83.34	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Jumlah aksesibilitas sarana pemerintahan daerah yang sesuai universal desain	unit	NA	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	0.00	22.00	22.00	0.00	100.00	73.33	44.00	R
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															
1	Cakupan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman berkualitas	%	NA	51.47	52.52	54.53	58.65	59.79	0.00	59.36	62.11	0.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
2	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni pada kawasan bencana dan relokasi program pemerintah	%	NA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	89.47	100.00	0.00	99.41	100.00	100.00	ST
3	Luas kawasan permukiman kumuh	Ha	10,779	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,341	14,46	10,59	0.00	0.00	0.00	0.00	SR
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1	Persentase kriminalitas yang tertangani	%	73,88	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	0.00	90.53	82.19	0.00	100.00	100.00	99.62	ST
2	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Angka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Angka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1.00	100.00	0.00	1.00	100.00	100.00	ST
5	Tingkat Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilu	%	77,41	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.42	0.00	0.00	100.00	0.00	SR
6	Nilai Penguatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	NA	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	80.90	84.71	0.00	81.72	85.57	85.57	T
7	Persentase penurunan gangguan trantibum	%	NA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.62	3.71	0.00	100.00	100.00	100.00	SR
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	SR
9	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks	NA	35.29	41.18	47.06	52.94	58.82	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	100.00	81.60	T
10	Rasio Resiko Dampak Bencana	Angka	NA	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1	Persentase Penurunan PMKS	%	NA	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2	Persentase penanganan PMKS	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	NA	65.00	68.00	71.00	73.00	76.00	0.00	66.67	83.33	0.00	98.04	100.00	100.00	ST
2	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	51,42	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	63.84	84.45	87.27	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
1	Sumbangan pendapatan perempuan	%	NA	43.18	43.41	43.53	43.66	43.88	0.00	0.00	42.42	0.00	0.00	97.45	96.67	ST
2	Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan	%	NA	15.00	15.20	15.20	15.20	15.40	0.00	69.33	69.33	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Rasio KDRT*	%	0,04	0.04	0.04	0.04	0.35	0.35	0.00	0.02	0.08	100.00	100.00	3.51	100.00	ST
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
1	Tingkat Ketersediaan Energi	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	127.04	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2	Tingkat Ketersediaan Protein	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
3	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	NA	20.00	22.00	25.00	27.00	30.00	0.00	0.00	117.92	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**															
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	93,12	93.20	93.23	93.36	93.44	93.53	58.70	61.23	62.42	62.98	65.68	66.86	66.74	S
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (Penyelesaian kasus tanah)	%	NA	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	0.00	73.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	SR
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	16,67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	65.00	66.67	56.67	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,67	85.92	88.25	93.03	95.36	95.36	81.16	83.05	86.83	94.46	94.11	93.34	91.05	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
3	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap pelaksanaan dokumen lingkungkan	%	NA	43.33	43.33	46.67	46.67	50.00	0.00	40.00	43.33	0.00	92.31	92.84	86.66	T
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	31,38	31.38	31.66	31.93	32.21	32.48	0.00	27.85	35.88	0.00	87.97	100.00	100.00	ST
5	Persentase Sampah yang Terkelola	%	84,11	88.05	90.65	93.65	97.15	99.65	0.00	93.63	94.84	0.00	100.00	100.00	95.17	ST
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**															
1	Nilai kualitas administrasi kependudukan	%	NA	84.37	88.07	91.21	94.63	95.83	0.00	97.67	98.70	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	IKM OPD	Indeks	82,83	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	88.93	93.02	96.10	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Nilai tertib administrasi kependudukan	%	NA	99.10	99.20	99.30	99.38	99.50	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	%	NA	70.00	80.00	88.33	97.50	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
1	Persentase keswadayaan masyarakat	%	NA	40.00	42.00	45.00	48.00	50.00	99.32	99.61	99.81	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Persentase Kelurahan Kategori Cepat Berkembang	%	NA	59.00	65.00	71.00	76.00	82.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	NA	2.60	2.50	2.40	2.30	2.20	0.00	0.27	0.23	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	NA	8.00	7.00	7.00	6.00	6.00	0.00	1.79	1.78	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
1	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang Berkeselamatan	%	NA	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	86.00	87.00	82.00	100.00	100.00	93.18	91.11	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**															
1	Indeks SPBE	Indeks	3,21	2.40	2.55	2.675.00	2.975.00	3.25	2.67	2.67	3.69	100.00	100.00	0.00	100.00	ST
2	Nilai domain kebijakan SPBE	Angka	3,21	2.90	3.00	3.00	3.30	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
3	Nilai domain tata kelola SPBE	Angka	0.00	2.70	2.70	2.80	2.80	3.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
4	Nilai domain Manajemen SPBE	Angka	0.00	1.20	1.50	1.80	2.50	3.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	100.00	88.00	T
5	Nilai domain layanan SPBE	Angka	0.00	2.80	3.00	3.10	3.30	3.50	0.00	0.00	4.39	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															
1	Peningkatan omzet pelaku usaha mikro	%	-8,22	-3.00	-2.00	-1.00	2.00	3.00	19.37	2.85	2.61	0.00	0.00	0.00	86.92	T
2	Peningkatan volume usaha koperasi	Rp	41,227,671,003.00	41,928,541,411.00	43,895,483,280.00	45,939,758,280.00	48,065,748,585.00	50,278,072,095.00	0.00	22,333,613,664.00	44,067,988,362.00	0.00	50.88	95.93	87.65	T
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
1	Pertumbuhan Nilai investasi PMA PMDN	%	NA	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.05	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Angka	NA	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
3	Rata-rata lama waktu pelayanan perizinan	Hari	5.00	4.50	4.00	3.50	3.00	2.50	0.00	0.00	1.63	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	IKM Pelayanan Perijinan	Indeks	83.41	83.50	83.50	84.00	84.50	85.00	0.00	0.00	92.53	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**															
1	Persentase prestasi kepemudaan, olahraga dan pramuka	%	#N/A	40.67	41.43	43.28	44.74	46.85	0.00	561.50	28.07	0.00	100.00	64.86	59.91	R
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	#N/A	2.09	2.12	2.15	2.18	2.22	0.00	1.69	2.15	0.00	79.72	100.00	96.85	ST
3	Jumlah atlet berprestasi	Angka	5.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	0.00	68.00	382.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	Jumlah prestasi olahraga	Angka	25.00	125.00	150.00	175.00	200.00	225.00	0.00	169.00	235.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**															
1	Indeks kepuasan pengguna data sektoral (skala 5)	Indeks	3,21	3.40	3.45	3.50	3.55	3.60	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**															
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
1	Cakupan obyek pemajuan kebudayaan	%	NA	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	0.00	88.89	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Cakupan pengelolaan kesenian, kebudayaan, cagar budaya dan museum	%	NA	53.00	57.00	59.00	61.00	64.00	0.00	57.00	71.35	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	NA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Persentase peningkatan layanan perpustakaan	%	NA	27.00	28.00	29.00	30.00	31.00	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang dibina	%	NA	31.01	33.54	36.07	38.60	41.13	35.13	40.19	45.89	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**															
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															
1	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Budidaya	%	NA	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	100.00	ST
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**															
1	Persentase PAD sektor pariwisata	%	2,89	3.73	3.83	4.17	4.26	4.52	0.00	0.00	6.32	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2	Persentase kunjungan wisata kota	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Lama kunjungan Wisata	Angka	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	0.00	1.43	1.29	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
1	Produktivitas produksi pertanian	Ton/Ha	6,05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.50	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
2	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	%	NA	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**															
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**															
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**															
1	Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan	%	14,3	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	14.05	14.07	14.07	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															
1	Persentase kontribusi PDRB sektor industri pengolahan	%	16,12	16.14	16.16	16.18	16.20	16.22	16.44	16.49	16.49	100.00	100.00	100.00	100.00	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**															
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**															
1	Persentase kebijakan bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SR
2	Persentase kebijakan bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	84.85	0.00	0.00	84.85	84.85	T
3	Nilai LPPD	Angka	NA	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	0.00	0.00	92.58	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
4	Persentase dokumentasi dan publikasi kegiatan pimpinan	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	96.10	0.00	100.00	96.10	96.10	ST
5	Tingkat kepuasan pimpinan	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.67	87.29	94.53	85.67	87.29	94.53	94.53	ST
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**															
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)	Indeks	NA	70.00	72.00	75.00	78.00	80.00	0.00	86.66	90.56	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
7	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	NA	68.00	69.00	70.00	71.00	72.00	0.00	80.60	93.45	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**															
5.01	**PERENCANAAN**															
1	Nilai SAKIP dari aspek perencanaan	%	22,49	24.50	25.00	25.50	26.00	26.50	0.00	0.00	24.53	0.00	0.00	96.20	92.57	ST
2	Persentase Tingkat efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah dan kualitas dokumen perencanaan	%	53,25	76.00	81.00	86.50	92.00	93.25	0.00	0.00	84.62	0.00	0.00	97.83	90.75	ST

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
5.02	**KEUANGAN**															
1	Nilai Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	%	89,76	89.76	91.43	91.43	93.10	93.10	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	88,79	89.77	90.76	92.64	94.29	94.64	0.00	99.35	99.35	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	32,02	36.16	34.61	35.64	36.69	36.69	0.00	45.10	50.44	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
5	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	23,82	26.05	25.25	25.81	26.37	26.37	0.00	33.51	34.05	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
5.03	**KEPEGAWAIAN**															
1	Indeks sistem merit	Indeks	NA	0.6450	0.6825	0.7050	0.7300	0.7300	0.6825	0.8232	0.8232	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
2	Nilai sistem merit	Angka	NA	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.0000	337.50	337.50	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**															
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	NA	17.02	36.17	55.32	76.60	100.00	0.00	0.00	42.55	0.00	0.00	76.92	42.55	SR
2	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	%	NA	24.00	49.00	65.17	66.31	68.44	11.00	32.64	37.51	45.83	66.61	57.55	54.80	R
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**															
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**															

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja					Capaian Kinerja			Tingkat Capaian dibanding pada Target Akhir Tahun				Skala Nilai
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	RPJMD	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**															
1	Kapabilitas APIP	Angka	3.00	3.16	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	3.06	3.10	0.00	92.73	93.94	93.94	ST
2	MRI	Angka	2,12	2.29	2.47	2.65	2.82	3.00	0.00	3.08	3.08	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
3	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	6,9	7.50	8.10	8.20	8.30	8.40	0.00	15.30	17.19	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
4	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	3,38	3.40	3.40	3.42	3.43	3.45	0.00	2.94	2.94	0.00	86.47	85.96	85.22	T
5	Persentase Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	NA	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SR
6	Persentase OPD dengan nilai SAKIP A	%	NA	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ST
7	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	87.00	88.00	89.00	91.00	93.00	95.00	0.00	97.00	98.01	0.00	100.00	100.00	100.00	ST
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7.01	**KECAMATAN**															
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Utara)	Indeks	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	85.43	85.40	88.27	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Tengah)	Indeks	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	85.00	87.11	93.45	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kec. Magelang Selatan)	Indeks	80.00	80.50	81.00	81.50	82.00	82.50	84.13	86.54	90.56	100.00	100.00	100.00	100.00	ST
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**															
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**															

Capaian kinerja berstatus ST (Sangat Tinggi) berjumlah 119 dari 142 indikator, berarti sebesar 84%. Status T (Tinggi) sebesar 11 indikator (83%), status S (sedang) sebanyak 2 indikator (2%), status R (Rendah) sebanyak 2 indikator (2%), dan status SR sebanyak 8 indikator (6%).

Hal ini bermakna keberhasilan Kota Magelang dalam menjaga stabilitas pembangunan, khususnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat, layanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Keberhasilan implementasi program-program strategis daerah, yang tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong keberhasilan, antara lain:

1. Konsistensi Perencanaan dan Implementasi Program Strategis. Keberhasilan capaian indikator dengan status ST dan T menunjukkan adanya kesinambungan antara perencanaan strategis dengan pelaksanaan program. Hal ini tercermin dari capaian indikator kesejahteraan masyarakat seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pengurangan pengangguran, dan capaian layanan dasar pendidikan serta kesehatan yang mendekati atau melebihi target.
2. Kebijakan yang Responsif terhadap Kebutuhan Daerah. Program-program yang mendukung pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, pengelolaan lingkungan, hingga tata kelola administrasi pemerintahan, berhasil menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Magelang. Kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan capaian indikator ST.
3. Kinerja Keuangan Daerah yang Stabil. Capaian indikator pengelolaan keuangan daerah seperti opini BPK WTP yang konsisten, peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah, dan peningkatan rasio PAD terhadap pendapatan daerah, menjadi faktor penting dalam mendukung pembiayaan program-program prioritas. Stabilitas fiskal ini mendorong keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.
4. Sinergi dan Kolaborasi Antar-Perangkat Daerah. Koordinasi yang baik antar-perangkat daerah dan dukungan lintas sektor, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal, memperkuat capaian indikator kinerja daerah. Sinergi ini menjadi modal penting dalam mempertahankan status ST pada berbagai indikator.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha. Keberhasilan capaian indikator di bidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi pendidikan, kesehatan, dan dukungan terhadap program pemerintah juga didukung oleh peran aktif masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lokal. Partisipasi ini mempercepat pencapaian target pembangunan secara inklusif.
6. Dukungan Kebijakan Nasional dan Program Delegasi Pemerintah Pusat/Provinsi. Implementasi program-program nasional dan sinergi dengan prioritas provinsi turut memperkuat pencapaian indikator daerah. Dukungan ini terlihat dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan layanan administrasi pemerintahan, yang mendukung keberhasilan indikator kinerja dengan status ST dan T.
7. Fokus pada Layanan Publik Berkualitas. Keberhasilan capaian indikator pelayanan publik, seperti kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di Kota Magelang.

Namun demikian, evaluasi ini juga mengungkap beberapa capaian indikator yang belum optimal, seperti kontribusi sektor jasa terhadap PDRB, pertumbuhan investasi, penguatan ekosistem perdagangan, serta inovasi layanan publik di sektor tertentu. Beberapa indikator juga menunjukkan stagnasi atau penurunan capaian, terutama pada bidang pengelolaan risiko bencana, ketahanan lingkungan, pengelolaan program berbasis inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif.

Analisis terhadap capaian indikator S, R, dan SR mengindikasikan beberapa faktor penghambat kinerja RPJMD 2021-2026, antara lain:

1. Keterbatasan Kapasitas Inovasi dan Adaptasi Birokrasi. Beberapa indikator, terutama yang terkait inovasi layanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan pengelolaan program berbasis inovasi (seperti nilai domain manajemen SPBE, implementasi kelitbangan, dan pemanfaatan hasil riset), menunjukkan capaian rendah. Hal ini mencerminkan keterbatasan kapasitas birokrasi dalam mengadopsi teknologi, berinovasi, serta mendukung transformasi digital secara optimal.
2. Rendahnya Kontribusi Sektor Strategis terhadap Perekonomian Daerah. Indikator kontribusi sektor jasa terhadap PDRB, pertumbuhan investasi, dan volume usaha koperasi masih belum optimal, mengindikasikan hambatan dalam pengembangan ekosistem perdagangan, investasi, dan UMKM. Hal ini berimplikasi pada lambatnya transformasi Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang kompetitif.
3. Permasalahan Keterpaduan Perencanaan dan Kelemahan Monitoring Evaluasi. Beberapa indikator terkait kelitbangan, pengelolaan aset, penyelesaian kasus tanah, Pemenuhan Sasaran dan Area Perubahan RB dan dokumentasi kebijakan (kebijakan bidang Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Barang Jasa yang terpenuhi) menunjukkan capaian rendah atau stagnan. Kelemahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan integrasi perencanaan lintas sektor, kurang optimalnya sistem pemantauan dan evaluasi kinerja, serta lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah.
4. Keterbatasan Sumber Daya dan Kesiapan Infrastruktur. Status rendah juga terlihat pada capaian indikator yang terkait infrastruktur pendukung seperti kawasan kumuh, aksesibilitas sarana pemerintahan dengan universal design, kapasitas gangguan trantibum dan mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan tantangan dalam penguatan infrastruktur dasar yang mendukung layanan publik inklusif dan pengurangan risiko bencana.
5. Belum Optimalnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Lokal. Beberapa capaian rendah, seperti partisipasi pemuda dan olahraga, partisipasi politik, dan indikator pemberdayaan ekonomi perempuan, mencerminkan perlunya penguatan pemberdayaan sosial ekonomi secara lebih inklusif. Hal ini penting dalam rangka membangun daya tahan sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
6. Kesenjangan antara Target Ambisius dan Realitas Implementasi. Beberapa indikator capaian rendah terjadi akibat target yang terlalu ambisius tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya, kapasitas implementasi, serta dukungan kebijakan yang memadai. Hal ini mengakibatkan capaian program di lapangan tidak sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi ini memberikan implikasi strategis bagi perumusan RPJMD Kota Magelang 2025-2029. Kinerja masa lalu menjadi pijakan penting untuk memperkuat fokus pembangunan ke depan, antara lain:

1. Mempercepat transformasi ekonomi berbasis perdagangan dan jasa untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap PDRB.
2. Meningkatkan inovasi layanan publik dan reformasi birokrasi, terutama dalam menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi.
3. Memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata
4. Memperbaiki capaian indikator ketahanan sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengantisipasi tantangan baru, seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan dinamika global, dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan serta mengoptimalkan potensi lokal Kota Magelang.

2.3 Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di kabupaten/kota di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, saat ini sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, yang mencakup di dalamnya adalah sistem pembiayaan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui upaya penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang secara langsung dapat dikendalian di daerah yang bersangkutan.

Di lain pihak, aspek pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi: (i) perencanaan, (ii) pelaksanaan, (iii) penatausahaan, (iv) pelaporan, (v) pertanggungjawaban, dan (vi) pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan aspek penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Pada bagian berikut akan dipaparkan yang mencakup:

2.3.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

2.3.1.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu, sekaligus juga untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan yang merupakan bahan dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sisi keuangan. Analisis terhadap kinerja keuangan Kota Magelang mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang Tahun 2020-2024 diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur - Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; ditambah Permendagri yang setiap tahun terbit terkait dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara teknis operasional, pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang juga berpayung hukum kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara dan daerah, khususnya yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stanadar Akuntansi Pemerintahan.

APBD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan tahunan di bidang keuangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, yang didalamnya mengatur Pendapatan Daerah, Belanja Daerah beserta Pembiayaan Daerah. Dalam APBD, terdapat 3 (tiga) pos penting, yaitu: (i) Pendapatan Daerah, (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah. Gambaran pelaksanaan APBD tersebut akan dibahas dalam bagian berikut.

Tabel 2.122 Perkembangan Realisasi APBD Kota Magelang Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
1	**PENDAPATAN**						
A	**Pendapat. Asli Daerah (PAD)**	**290,757**	**319,391**	**377,368**	**324,670**	**348,972**	**332,232**
	Rasio Kemandirian [(PAD/TPD) x100%]	**30.73**	**32.12**	**38.28**	**32.06**	**34.48**	**33.53**
	- Pajak Daerah	35,959	38,089	50,528	58,055	58,993	48,325
	- Retribusi Daerah	5,319	6,255	7,596	8,388	272,699	60,052
	- Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,217	8,505	8,961	10,877	9,936	9,499
	- Lain-lain PAD	240,262	266,543	310,284	247,350	7,344	214,356
B	**Pendapatan Transfer (TKD)**	**635,301**	**657,130**	**607,888**	**685,987**	**663,233**	**649,908**
	Rasio Ketergantungan [(TKD/TPD) x100%]	**67.14**	**66.09**	**61.67**	**67.74**	**65.52**	**65.63**
	- Transfer Pemerintah Pusat (TKD)	582,999	594,106	542,582	568,109	594,723	576,504
	- Trasfer Pemerintah Pusat Lainnya (DID, DIF)	52,302	63,023	65,306	52,523	16,271	49,885
	- Transfer antar Daerah (Bagi Hasil Provinsi)	-	-	-	65,356	52,239	23,519
C	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**20,131**	**17,846**	**508**	**1,992**	**-**	**8,095**
	- Pendapatan Hibah	19,564	310	508	1,992	-	4,475
	- Pendapatan Lainnya	567	17,536	-	-	-	3,621
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (TPD)	**946,189**	**994,367**	**985,764**	**1,012,649**	**1,012,205**	**990,235**
2	**BELANJA**						
A	**Belanja Operasi (BO)**	**657,879**	**740,801**	**879,135**	**867,002**	**893,557**	**807,675**
	Rasio Belanja Operasi [(BO/TBD) x100%]	**82.40**	**79.23**	**84.57**	**85.02**	**84.25**	**83.09**
	- Belanja Pegawai (BP)	315,071	338,332	357,967	347,044	377,980	347,279
	Rasio Belanja Pegawai [(BP/TBD) x100%]	**39.47**	**36.18**	**34.44**	**34.03**	**35.64**	**35.95**
	- Belanja Barang dan Jasa (BBJ)	320,083	395,432	500,465	486,886	483,550	437,283
	Rasio Belanja Barang & Jasa [(BBJ/TBD) x100%]	**40.09**	**42.29**	**48.14**	**47.75**	**45.59**	**44.77**
	- Belanja Hibah	21,818	6,835	13,292	20,911	29,150	18,401
	- Belanja Bantuan Sosial	908	201	7,411	12,161	2,878	4,712
	- Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-
B	**Belanja Modal (BM)**	**116,558**	**186,006**	**154,811**	**151,577**	**166,118**	**155,014**
	Rasio Belanja Modal [(BM/TBD) x100%]	**14.60**	**19.89**	**14.89**	**14.86**	**15.66**	**15.98**
	- Belanja Tanah	1,783	845	-	4,753	5,693	2,615
	- Belanja Peralatan dan Mesin	59,325	76,597	78,688	63,031	69,038	69,336

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
	- Belanja Gedung dan Bangunan	35,886	66,724	35,303	20,661	54,221	42,559
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	17,676	39,035	37,931	57,962	7	30,522
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	1,888	2,804	2,888	3,700	2,619	2,780
	- Belanja Aset Tak Berwujud	353	-	-	1,470	784	521
C	**Belanja Tak Terduga (BTT)**	**23,915**	**8,241**	**5,556**	**1,136**	**967**	**7,963**
	Rasio Belanja Tak Terduga [(BTT/TBD) x100%]	**3.00**	**0.88**	**0.53**	**0.11**	**0.09**	**0.92**
D	**Belanja Transfer**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	JUMLAH BELANJA DAERAH (TBD)	**798,353**	**935,048**	**1,039,502**	**1,019,715**	**1,060,642**	**970,652**
	SURPLUS/DEFISIT	**147,836**	**59,319**	**- 53,738**	**- 7,066**	**- 48,437**	**19,583**
3	**PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**249,700**	**162,461**	**162,461**	**114,925**
A	Penerimaan Pembiayaan	-	-	299,613	200,483	170,829	134,185
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	49,914	38,022	12,000	19,987
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	249,700	162,461	158,829	114,198
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**195,962**	**155,395**	**110,392**	**92,350**

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024

Dari Tabel 2.121, dapat dilihat bahwa dari sisi **Pendapatan Daerah** di Kota Magelang menunjukkan kecenderungan/tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, walaupun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Di lain pihak, untuk **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, kecenderungan/trennya menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dimana terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan, PAD tetap menjadi sumber pendapatan yang penting dan berkontribusi secara signifikan terhadap total pendapatan daerah.

Untuk Pajak Daerah khususnya jenis Pajak Daerah di Tingkat Kabupaten/ Kota, berdasar pada Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas: (i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (ii) Pajak Reklame; (iii) Pajak Air Permukaan (PAT); (iv) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan (v) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
2. Jenis Pajak kabupaten/ kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: (i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (ii) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri atas: (a) Makanan dan/atau Minuman; (b) Tenaga Listrik; (c) Jasa Perhotelan; (d) Jasa Parkir; dan (e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

Terkait dengan masalah penggunaan Pajak Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling rendah sekitar 10% (sepuluh persen) dari PKB dan Opsen

PKB harus digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

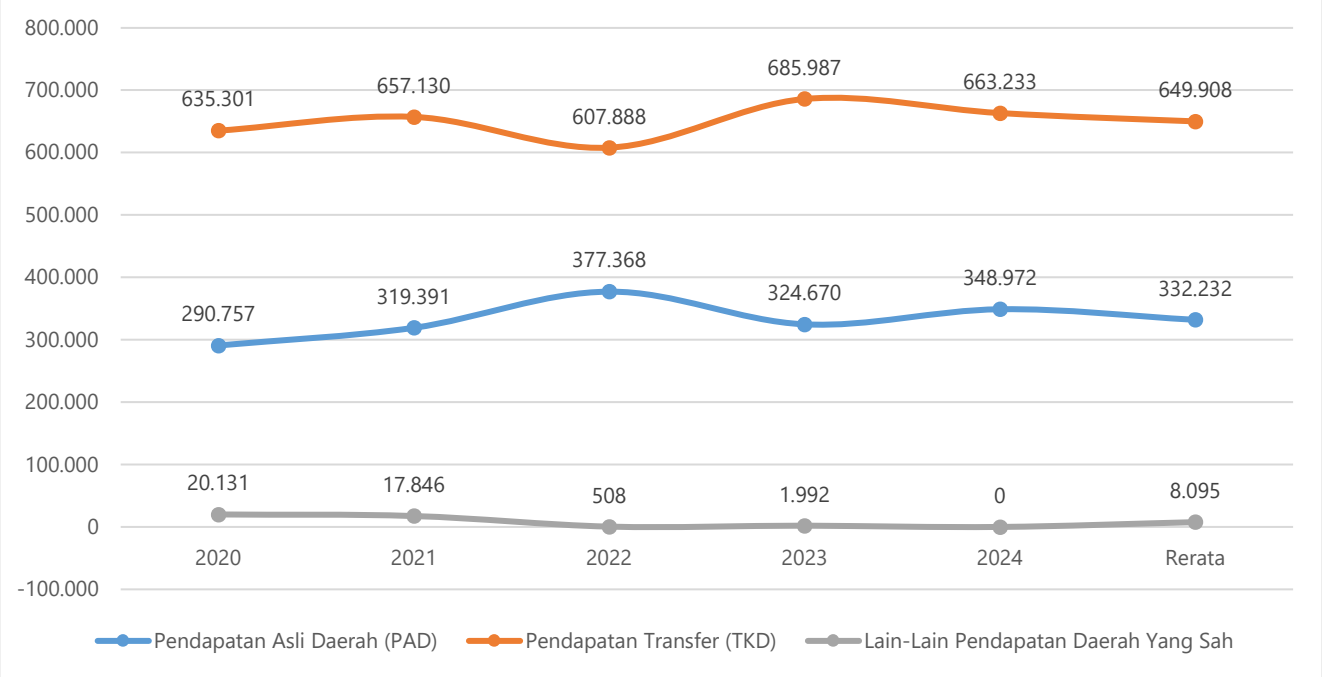
Sementara itu, penggunaan dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah dari Tenaga Listrik, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meliputi: (i) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, dan (ii) Pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha.

Pendapatan Transfer (TKD) dari pemerintah pusat menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, dengan puncaknya pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang masih tergantung terhadap dana dari pemerintah pusat, dan masih menjadikan TKD ini sumber pendapatan yang penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Magelang.

TKD merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Komponen TKD berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2023, mencakup: (i) Dana Bagi Hasil (dari Pajak dan SDA), (ii) Dana Alokasi Umum (DAU), (iii) Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan DAK Non-Fisik, (iv) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (v) Dana Keistimewaan, (vi) Dana Desa, dan (vii) Dana Insentif Fiskal (DID). Sementara yang masuk kategori Pendapatan Transfer Antar Daerah mencakup: (i) Pendapatan Bagi Hasil, dan (ii) Bantuan Keuangan.

Terakhir, untuk **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, dengan angka yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan PAD dan pendapatan transfer (TKD). Hal ini menunjukkan bahwa komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bukanlah sumber pendapatan utama, tetapi tetap penting untuk diversifikasi pendapatan di Kota Magelang.

Gambaran perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD di Kota Magelang selama tahun 2020-2024 (dalam satuan Rp Juta), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.122 berikut.



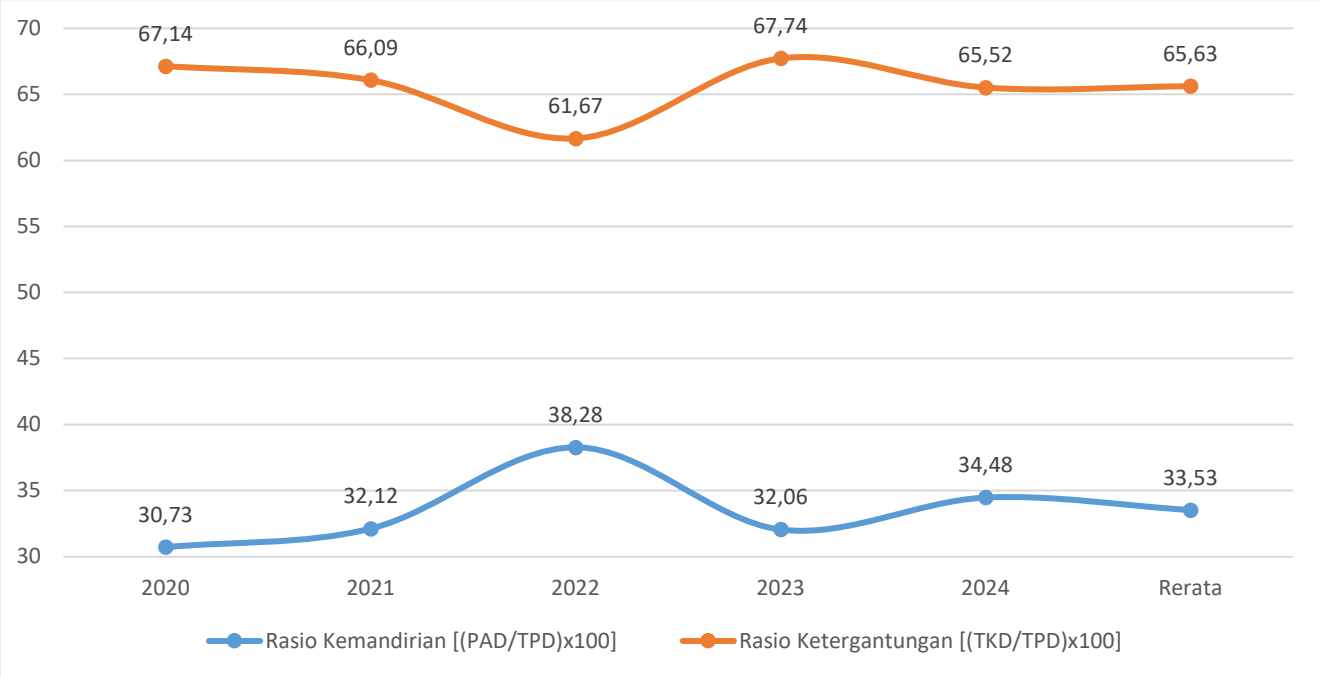
Gambar 2.121 Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Sumber: Diolah Data dari Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 yang telah diaudit

Jika dilihat dari besaran Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yang menunjukkan persentase kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), angkanya dari tahun 2020-2024 berada dalam kisaran 30,73% sampai 34,48% atau secara rara-rata selama tahun 2020-2024 sebesar 33,53%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Magelang pada masa-masa mendatang agar rasio ini terus mengalami peningkatan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan ke masyarakat dengan lebih baik, akibat tingkat kemandiriannya yang terus meningkat. Dari rasio ketergantungan ke Pemerintah Pusat (khususnya dari Transfer ke Daerah (TKD) juga masih besar yaitu berkisar 61,67% s/d 67,74% atau secara rata-rata sebesar 65,63%.

Dari Gambar 2.122 dapat dilihat bahwa meskipun ada fluktuasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Magelang secara keseluruhan selama tahun 2020-2024, menunjukkan potensi yang selalu meningkat secara signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan keberhasilan dalam menggali potensi di Kota Magelang, tetapi terjadi penurunan lagi pada tahun 2023. Rata-rata PAD selama periode 2020-2024 yang besarnya mencapai Rp332,23 miliar, menggambarkan kemampuan Kota Magelang dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya.

Gambaran perkembangan Rasio Kemandirian (PAD/TPD) dan Rasio Ketergantungan (TKD/TPD) dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan persen), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.123 berikut.



Gambar 2.122 Perkembangan Rasio Kemandirian (PAD/TPD) dan Rasio Ketergantungan (TKD/TPD) dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah Data dari Audit Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.123, maka dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 tingkat kemampuan Kota Magelang relatif masih rendah. Kemudian pada tahun 2022 tingkat kemampuan daerah semakin meningkat, seiiring dengan bertambahnya rasio kemandirian keuangan mengalami peningkatan karena adanya peningkatan PAD yang signifikan dari tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan laporan keuangan tahun 2022, Kota Magelang masuk dalam kategori Rendah seiiring dengan menurunnya tingkat PAD dari tahun sebelumnya dan berbanding terbalik dengan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari Tabel 2.121, juga dapat dilihat besaran **Belanja Daerah**. Kinerja pelaksanaan **Belanja Daerah** di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2024, secara umum mencakup: (i) **Belanja Operasi**, (ii)

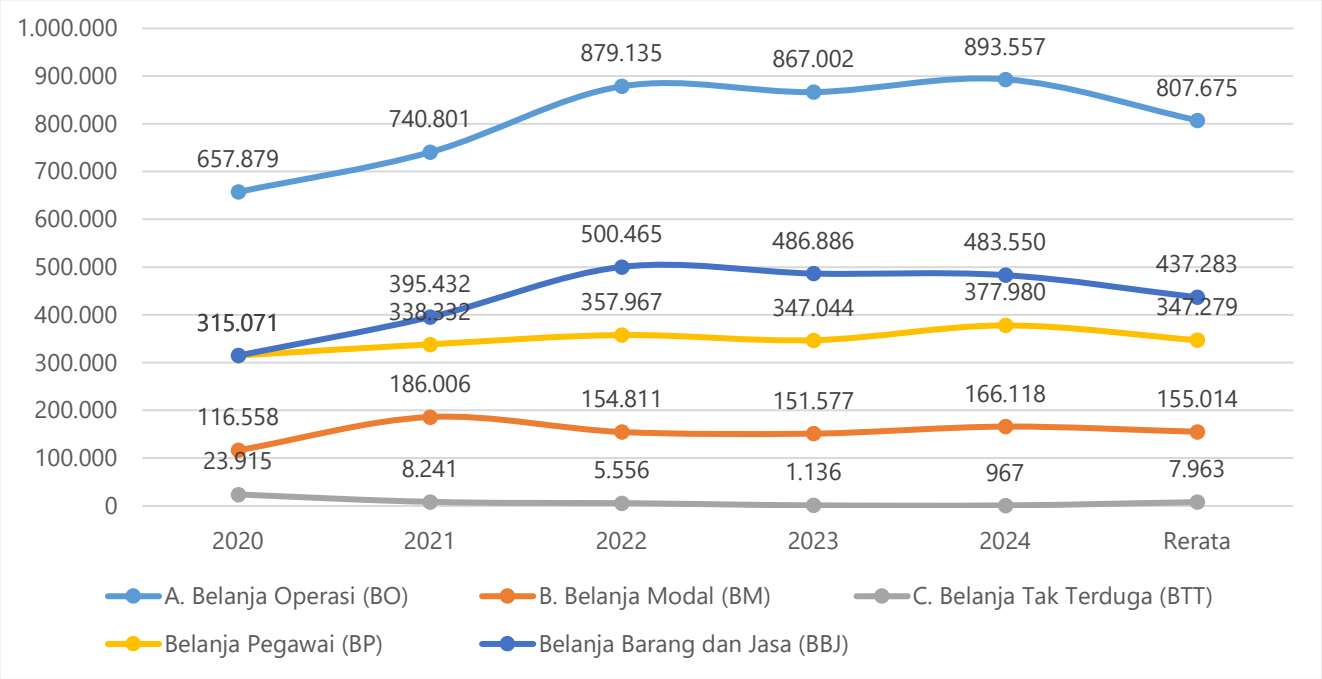
Belanja Modal, (iii) **Belanja Tidak Terduga**, dan (iv) **Belanja Transfer**. Penjabaran atas Belanja Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2024, secara umum mencakup:

1. **Belanja Operasi**. Belanja Operasi, terdiri dari: (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang dan Jasa, (iii) Belanja Bunga, (iii) Belanja Subsidi, (iv) Belanja Hibah, dan (v) Belanja Bantuan Sosial.
2. **Belanja Modal**. Belanja Modal, terdiri dari: (i) Belanja Modal Tanah, (ii) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (iii) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (iv) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, (v) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan (vi) Belanja Modal Aset Lainnya.
3. **Belanja Tidak Terduga**.
4. **Belanja Transfer**. Belanja Transfer, terdiri dari: (i) Belanja Bagi Hasil, dan (ii) Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Operasi, yang merupakan komponen terbesar dari Total Belanja, Daerah (TBD) menunjukkan adanya peningkatan yang stabil. Hal ini mencerminkan adanya fokus Pemerintah Kota Magelang dalam memenuhi kebutuhan operasional dan layanan publik bagi masyarakatnya.

Sementara itu, Belanja Modal juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun dengan fluktuasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Magelang untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pengembangan daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang (lebih dari 1 tahun anggaran).

Gambaran perkembangan Belanja Daerah dalam APBD di Kota Magelang selama tahun 2020-2024 (dalam satuan Rp Juta), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.124 berikut.



Gambar 2.123 Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

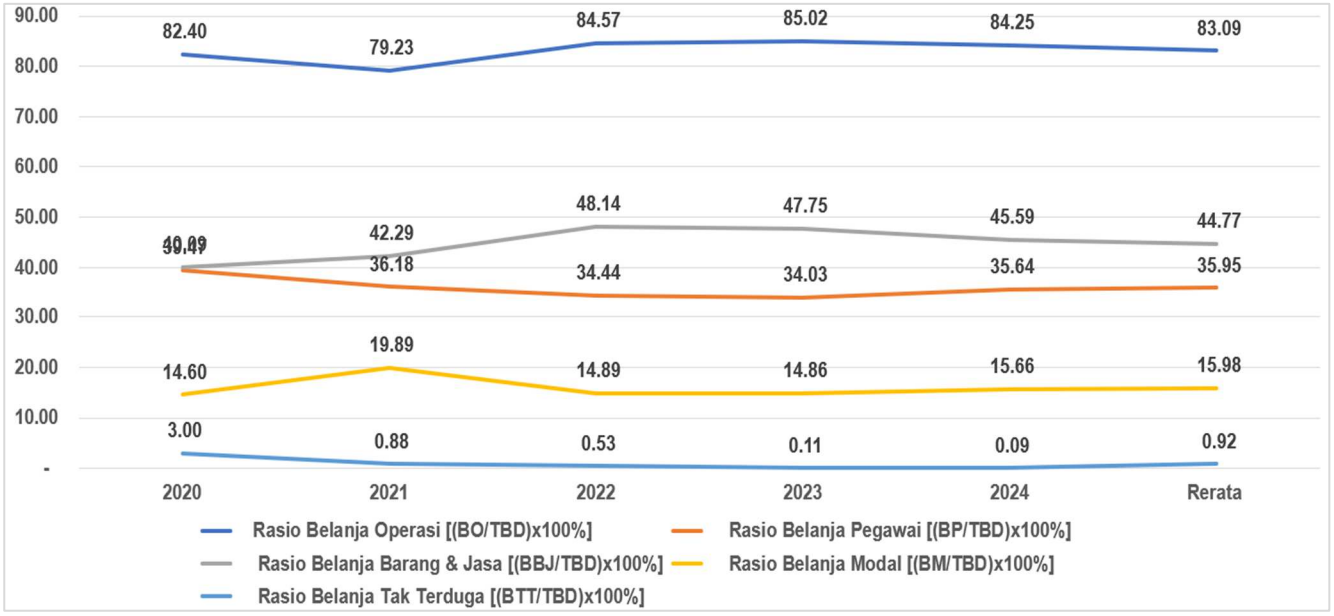
Sumber: Diolah Data dari Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 yang telah diaudit

Berdasarkan Gambar 2.124, Belanja Modal juga mengalami peningkatan, meskipun dengan fluktuasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Magelang terus memperluas investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur dan pengembangan daerah. Sementara itu, belanja tak terduga tetap berada pada angka yang relatif kecil, dengan sedikit variasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola risiko dengan baik.

Belanja Tak Terduga dan belanja transfer menunjukkan angka yang lebih kecil dan cenderung tidak signifikan dalam struktur belanja total. Secara keseluruhan, peningkatan belanja daerah ini menunjukkan upaya pemerintah Kota Magelang untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, yang lebih penting adalah

untuk memastikan bahwa peningkatan belanja ini dilakukan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas, agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat pada saat ini maupun pada masa-masa mendatang.

Gambaran perkembangan Rasio Belanja terhadap Total Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan persen), selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.125 berikut.



Gambar 2.124 Perkembangan Rasio Belanja Operasi (BO) dan Rasio Belanja Pegawai (BP) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) dalam APBD di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (%)

Sumber: Diolah Data dari Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 yang telah diaudit

Berdasarkan Gambar 2.125, terdapat tren penurunan secara persentase dari **Belanja Pegawai**. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Terkait dengan masalah Belanja Pegawai dalam Belanja Operasional, berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, telah dinyatakan bahwa paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil Guru, Tunjangan Kinerja Guru (TKG), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya (paling lambat tahun anggaran 2027). Terkait dengan masalah ini maka rasio Belanja Pegawai (BP) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) di Kota Magelang yang pada tahun 2024 masih sebesar 35,64% akan terus diupayakan penurunnya agar memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sekitar 30% mulai akhit tahun 2027. Gambaran rasio Belanja Operasi (BO) dan Rasio Belanja Pegawai (BP) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.125.

Kinerja pelaksanaan **Pembiayaan Daerah** di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2024, secara umum mencakup: (i) **Penerimaan Pembiayaan**, dan (ii) **Pengeluaran Pembiayaan**. Berdasarkan Tabel 2.121 yang menunjukkan perkembangan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya penggunaan dana untuk menutupi defisit. Penerimaan pembiayaan yang signifikan pada tahun 2022 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kekurangan anggaran, meskipun pengeluaran pembiayaan juga meningkat.

Secara keseluruhan, meskipun Kota Magelang menunjukkan pertumbuhan Pendapatan Daerah yang baik, namun adanya peningkatan dalam Belanja Daerah yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada tahun-tahun terakhir. Hal ini menandakan perlunya pengelolaan keuangan yang

lebih hati-hati dan strategi untuk meningkatkan efisiensi belanja agar keseimbangan anggaran dapat terjaga, baik pada saat sekarang maupun pada masa-masa mendatang.

Di lain pihak, kinerja keuangan daerah pada masa lalu menggambarkan antara kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini dijalankan, khususnya di Kota Magelang. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di Kota Magelang merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) atau terhadap Total Belanja Daerah (TBD) dalam APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan pada masa mendatang ditentukan oleh sejauh mana kemandirian pendanaan pembangunan di Kota Magelang disediakan secara mandiri.

Jika dilihat dari sisi surplus atau defisit anggaran, Kota Magelang mengalami kondisi yang bervariasi antara surplus dan defisit dalam APBD. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi surplus anggaran, namun pada 3 tahun terakhir (2022-2024) terjadi tren anggaran yang defisit. Dengan kata lain, defisit anggaran yang muncul pada 3 tahun terakhir menunjukkan perlunya perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dan menghindari risiko fiskal pada masa-masa mendatang.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Dengan SILPA yang sedemikian besar tiap tahun maka isu penting ke depan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat.

Tabel 2.123 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Penerimaan Daerah					
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	107,045	251,515	299,613	195,911	155,395
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	4,568	15,432
3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	7	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	19	0	4	2
	Total Penerimaan Daerah	**0**	**251,534**	**299,613**	**200,483**	**170,829**

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah akan tercermin dari besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per tahunnya. SILPA per tahun diharapkan akan semakin menurun baik secara nominal maupun persentasenya (khususnya terhadap Total Belanja Daerah). Jika SILPA cenderung besar, bisa berdampak kurang baik untuk perekonomian makro di Kota Magelang. SILPA yang besar menggambarkan belanja pemerintah yang kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat dialokasikan secara optimal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembanguan daerah di Kota Magelang.

Di lain pihak jika dilihat dari sisi **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** di Kota Magelang selama kurun waktu 2020-2024 didominasai, untuk (i) Pembentukan Dana Cadangan, dan (ii) Penyertaan Modal Daerah. Gambaran komposisi Pengeluaran Daerah di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan Juta Rupiah), selengkapanya dapat dilihat pada Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.124 Komposisi Pengeluaran Daerah di Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan Juta Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengeluaran Daerah					
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	38,500	27,500	12,000
2.	Penyertaan Modal Daerah	3,373	11,240	11,414	10,522	0
	Total Pengeluaran Daerah	**3,373**	**11,240**	**49,914**	**38,022**	**12,000**

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024

2.3.1.2 Alokasi Pengelolaan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD.

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2020-2024, Laporan keuangan yang disusun oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh BPKAD yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh BPKAD sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kota Magelang. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh BPKAD. Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Alokasi penggunaan anggaran Kota Magelang lebih berfokus pada sektor Kesehatan dan Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada alokasi penggunaan anggaran untuk setiap OPD di Kota Magelang. Sebagai contoh model alokasi Alokasi Penggunaan Anggaran di Kota Magelang per OPD untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.125 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

No	Uraian	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	
		Realisasi (Rp)	Proporsi *	Realisasi (Rp)	Proporsi *
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125,675	11.85	32,397	3.05
2	Dinas Kesehatan	83,726	7.89	249,333	23.51
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,338	0.60	9,830	0.93
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3,493	0.33	5,272	0.50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6,594	0.62	5,419	0.51
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,225	0.30	1,170	0.11
7	Dinas Sosial	3,482	0.33	7,479	0.71
8	Dinas Tenaga Kerja	4,295	0.40	6,288	0.59
9	Dinas Lingkungan Hidup	7,887	0.74	18,556	1.75
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,864	0.36	1,802	0.17
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	3,241	0.31	8,726	0.82
12	Dinas Perhubungan	4,917	0.46	8,335	0.79
13	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	4,171	0.39	7,590	0.72
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,258	0.31	2,158	0.20
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	3,184	0.30	6,706	0.63
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,194	0.40	1,890	0.18
17	Dinas Pertanian dan Pangan	4,611	0.43	4,147	0.39
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro	8,853	0.83	10,443	0.98
19	Sekretariat Daerah	21,718	2.05	13,652	1.29
20	Inspektorat Daerah	6,409	0.60	1,856	0.17
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	5,718	0.54	2,346	0.22
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8,133	0.77	4,194	0.40
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,530	0.43	3,810	0.36
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	18,042	1.70	26,622	2.51
25	Kecamatan Magelang Selatan	8,342	0.79	13,523	1.27
26	Kecamatan Magelang Tengah	8,914	0.84	15,690	1.48
27	Kecamatan Magelang Utara	7,364	0.69	11,717	1.10
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,802	0.36	2,600	0.25
	Jumlah	**377,979.98**	**35.64**	**483,549.57**	**45.59**

*Keterangan: * proporsi antara realisasi jumlah Belanja OPD dibandingkan dengan Total Belanja Daerah*
Sumber: Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2024 yang telah diaudit

Secara teknis operasional, pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang juga berpayung hukum kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara dan daerah, khususnya yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.3.1.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk menjaga APBD tetap sehat dan kredibel sebagai alat utama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung program pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, akan dilakukan upaya peningkatan sistem keuangan daerah secara **menyeluruh**, dengan memperkuat optimalisasi pendapatan yang diselaraskan kapasitas perekonomian, penguatan kualitas belanja agar lebih efisien dan produktif, serta terus mendorong agar pembiayaan lebih inovatif dan prudent.

Pengelolaan keuangan daerah dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 diarahkan untuk mewujudkan tata kelola fiskal yang kredibel, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan ini disusun sejalan dengan semangat reformasi fiskal nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk:

1. Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah

   Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui:

   a. memastikan pendapatan daerah telah disusun berdasarkan potensi;

   b. diversifikasi sumber pendapatan, dengan mendorong PAD yang berkualitas dan berkelanjutan. Diversifikasi yang dimaksud dilakukan dengan optimalisasi obyek-obyek yang sudah ada antara lain dengan perluasan basis pajak, Peningkatan akurasi data objek pajak dan retribusi melalui digitalisasi dan integrasi sistem, pemanfaatan dan komersialisasi aset daerah, pemanfaatan BUMD serta menerapkan kebijakan tarif dan intensifikasi;

   c. peningkatan basis penerimaan melalui inovasi digital, integrasi data, dan reformasi sistem pajak dan retribusi daerah;

   d. optimalisasi pengelolaan transfer ke daerah (TKD) secara tepat sasaran dan selaras dengan prioritas nasional.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

   Belanja daerah diarahkan untuk belanja yang lebih produktif dan efisien. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Prioritas belanja akan mempertimbangkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah, berpihak pada pelayanan dasar dan memperkuat implementasi mandatory spending.

3. Pengembangan Pembiayaan Daerah Yang Berkelanjutan

   Pemerintah Kota Magelang akan mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif seperti Sinergi Pendanaan, yang mencakup pembiayaan utang daerah, kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pinjaman daerah, dan obligasi daerah sesuai ketentuan, untuk memperluas ruang fiskal dan mempercepat pembangunan. Hal ini sejalan dengan UU HKPD, yang memberikan pemerintah daerah kemampuan untuk menggunakan berbagai instrumen pembiayaan, seperti Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

4. Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Keuangan Daerah

   Pengelolaan keuangan akan terus diarahkan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, melalui:

   a. Integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
   b. Penguatan pengawasan internal dan eksternal serta sistem akuntabilitas publik.
   c. Peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga opini WTP dari BPK dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

5. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Fiskal

   a. Kebijakan keuangan daerah akan disinergikan dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi.
   b. Pemanfaatan transfer ke daerah (TKD) akan difokuskan untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, dan transformasi ekonomi daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran dari BAPPENAS, Nomor: 07727/D.03/ PP.02.01/05/2025 Jakarta, tanggal 20 Mei 2025, perihal Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025-2030, mengamanatkan Pemerintah Kota Magelang (Nomor Urut 241) untuk mempersiapkan dan menerapkan **"Indikator Inklusi Keuangan"**. Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka Pemerintah Kota Magelang memasukkan salah satu dari 45 (empat lima) butir Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam bentuk: "Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD).

Inti dari kebijakan tersebut, adalah perluasan akses dalam transaksi keuangan daerah baik dalam hal belanja, pembayaran retribusi, pajak, dan pemasukan PAD yang lain melalui transaksi non tunai (*cashless*) dengan terus menjalin kerjasama antar badan usaha swasta ataupun BUMD untuk mempermudah pembayaran.

2.3.1.3.1 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu bagian penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Neraca Daerah berfungsi untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan daerah pada suatu titik waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca Daerah mencerminkan keadaan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan perihal: (i) apa yang dimiliki oleh daerah (aset), (ii) apa yang menjadi kewajiban daerah (kewajiban), dan (iii) selisih antara keduanya yang merupakan ekuitas. Laporan ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pos-Pos dalam Neraca Daerah, berdasarkan PP SAP tersebut, terdiri dari: (i) Aset, (ii) Kewajiban, dan (iii) Ekuitas. Penjabaran atas ketiga pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Aset**. Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Dengan kata lain, Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau pelayanan publik di masa depan. Aset dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
    a. **Aset Lancar**. Aset Lancar, yaitu asset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam waktu satu tahun. Contohnya termasuk: kas, piutang (utang yang harus dibayar oleh pihak ketiga), dan persediaan. Aset lancar mencerminkan likuiditas dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
    b. **Aset Tetap**. Aset Tetap adalah asset yang dimiliki untuk digunakan dalam operasional pemerintah daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Contohnya meliputi: tanah, bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Aset tetap mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur publik dan fasilitas yang mendukung pelayanan masyarakat.
    c. **Aset Tidak Berwujud**. Aset Tidak Berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi, seperti: hak paten, lisensi, dan *goodwill*. Aset ini menunjukkan potensi manfaat yang tidak terukur secara fisik tetapi penting untuk operasional.
2. **Kewajiban**. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ini terbagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kata lain, Kewajiban adalah utang atau komitmen yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Kewajiban dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
    a. **Kewajiban Jangka Pendek**. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun, seperti: utang kepada penyedia barang dan jasa, utang gaji pegawai, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Kewajiban jangka pendek mencerminkan tanggung jawab keuangan yang harus segera dipenuhi.
    b. **Kewajiban Jangka Panjang**. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, seperti utang obligasi atau pinjaman jangka panjang. Kewajiban jangka panjang menunjukkan komitmen finansial yang lebih besar dan berjangka waktu yang lebih lama, sering kali terkait dengan proyek infrastruktur atau investasi besar.
3. **Ekuitas**. Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total kewajiban. Ekuitas mencerminkan nilai bersih dari pemerintah daerah dan menunjukkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan operasional setelah semua kewajiban dipenuhi. Ekuitas dapat terdiri dari: (i) Modal Pemerintah Daerah, yang berisikan investasi awal dan tambahan yang disediakan oleh pemerintah daerah, (ii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yang merupakan saldo positif

dari perhitungan anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya, dan (iii) Sumbangan dari Pihak Ketiga, yaitu kontribusi yang diterima dari individu atau organisasi lain yang tidak mengharuskan pengembalian.

Gambaran Neraca Daerah di Kota Magelang salama tahun 2020-2024, berdasarkan PP 71/2010 tentang SAP yang terdiri dari: (i) Aset, (ii) Kewajiban, dan (iii) Ekuitas, dapat dilihat pada Tabel 2.125 berikut:

Tabel 2.126 Neraca Daerah Kota Magelang Tahun 2020-2024 (dalam satuan Juta Rupiah)

No	Aset Pemerintah Kota Magelang	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
1	**ASET**	**4.160.263**	**4.337.394**	**4.267.506**	**4.250.624**	**4.248.253**	**4.252.808**
	Aset Lancar	345.952	437.656	259.534	183.028	144.146	274.063
	Investasi Jangka Panjang	121.584	131.483	146.173	158.105	155.917	142.653
	Aset Tetap	3.605.533	3.676.790	3.727.682	3.751.568	3.729.700	3.698.255
	Aset Lainnya	87.194	91.464	95.617	94.056	91.159	91.898
	Properti Investasi	-	-	-	-	64.852	12.970
	Dana Cadangan	-	-	38.500	63.867	62.477	32.969
2	**KEWAJIBAN**	**2.475**	**2.653**	**3.140**	**3.669**	**14.200**	**5.227**
	Kewajiban Jangka Pendek	2.475	2.653	3.140	3.669	14.200	5.227
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	0	-
3	**EQUITAS**	**4.157.787**	**4.334.740**	**4.264.366**	**4.246.956**	**4.234.053**	**4.247.580**
	EKUITAS	4.157.787	4.334.740	4.264.366	4.246.956	4.234.053	4.247.580
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**4.160.263**	**4.337.394**	**4.267.506**	**4.250.624**	**4.248.253**	**4.252.808**

Sumber: Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024 yang telah diaudit

Berdasarkan Tabel 2.125, jika dilihat dari sisi rinciannya, posisi **Aset Lancar** menunjukkan variasi yang signifikan selama periode tersebut. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam likuiditas daerah, yang mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak atau terjadinya pengelolaan kas untuk kepentingan yang mendesak. Di lain pihak, untuk pos **Investasi Jangka Panjang** menunjukkan adanya pertumbuhan yang relatif konsisten. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk **Aset Tetap**, yang merupakan komponen terbesar dalam total aset, menunjukkan perkembangan. Peningkatan ini menunjukkan investasi yang terus dilakukan dalam infrastruktur dan fasilitas publik, yang penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Untuk komponen **Aset Lainnya**, menunjukkan angka yang relatif stabil. Terakhir, **Dana Cadangan**, tidak terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat pencatatan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyiapkan dana cadangan untuk kebutuhan mendesak pada masa-masa mendatang.

Secara keseluruhan, **Neraca Aset** Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam beberapa pos, total aset tetap menunjukkan tren stabil dengan peningkatan dalam investasi jangka panjang dan aset tetap. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dengan baik dan berinvestasi dalam infrastruktur serta pelayanan publik, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset yang efektif dan efisien akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dari Tabel 2.125 tersebut menunjukkan bahwa kewajiban Pemerintah Kota Magelang dari tahun 2020 hingga 2024, kewajiban daerah mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Rincian Kewajiban Pemerintah Kota Magelang, adalah sebagai berikut:

1. **Kewajiban Jangka Pendek**. Kewajiban jangka pendek merupakan komponen utama dari total kewajiban, yang mencakup utang yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Kewajiban jangka pendek terus mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan yang terus bertambah, kemungkinan untuk mendukung belanja operasional dan proyek-proyek daerah. Kewajiban jangka pendek selama periode tahun 2020-2024 merupakan kewajiban yang rutin untuk operasional pelayanan masyarakat diantaranya utang listrik, telepon, air dan internet pada bulan Desember yang dibayarkan pada awal tahun berikutnya.
2. **Kewajiban Jangka Panjang**. Kewajiban Jangka Panjang. Selama periode 2020 - 2024 tidak terdapat kewajiban jangka panjang yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu membiayai kegiatan operasional maupun infrastruktur dengan kemampuan keuangan yang ada sehingga belum memerlukan untuk melakukan pinjaman atau kewajiban jangka Panjang. Ini dapat diartikan sebagai pendekatan konservatif dalam pengelolaan kewajiban, meskipun tidak adanya kewajiban jangka panjang juga bisa menjadi indikator bahwa pemerintah daerah lebih memilih untuk mengandalkan sumber pendanaan jangka pendek.

Secara keseluruhan, **Kewajiban Pemerintah Kota Magelang** menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan fokus pada kewajiban jangka pendek. Hal ini mencerminkan kebutuhan pendanaan yang terus berkembang untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja daerah. Meskipun tidak ada pencatatan kewajiban jangka panjang, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan strategi pendanaan yang seimbang antara kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Pengelolaan kewajiban yang baik akan berkontribusi pada stabilitas keuangan daerah dan memastikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga secara tepat waktu.

2.3.1.3.2 Analisa Neraca Daerah

Analisa terhadap Neraca yang digunakan dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya adalah rasio solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang. Kedua rasio solvabilitas yang dimaksud dalam hal ini tentunya sesuai dengan pengertian rasio solvabilitas yang diterapkan pada organisasi pemerintah daerah yang mungkin secara rumusan, istilah pengertian dan pendekatan perhitungannya berbeda dengan yang diterapkan pada organisasi privat/ swasta.

Rasio solvabilitas jangka pendek dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan, sedangkan Rasio solvabilitas jangka panjang dapat mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Solvabilitas\ Jangka\ Pendek = \frac{(Kas\ dan\ setara\ kas - Investasi\ jangka\ Pendek)}{Kewajiban\ Lancar}$$

$$Rasio\ Solvabilitas\ Jangka\ Panjang = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Kewajiban\ Jangka\ Panjang}$$

Di sisi lain, dalam mencermati kondisi Neraca Daerah atau Neraca Keuangan Pemerintah Kota Magelang, besaran **Rasio Likuiditas** yang sering digunakan adalah: (i) rasio lancar, dan (ii) rasio cair (quick). Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Untuk memperoleh rasio lancar, rumusan yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$Rasio\ Lancar = \frac{Aktiva\ Lancar}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek}$$

Kemudian rasio quick diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$Rasio\ Quick = \frac{Aktiva\ Lancar - Persediaan}{Kewajiban\ Jangka\ Pendek}$$

Hasil perhitungan **Rasio Likuiditas** dan **Rasio Solvabilitas** Pemerintah Kota Magelang untuk Tahun 2020-2024 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.127 Analisa Neraca Periode Tahun 2020 - 2024

No	Analisis Neraca Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
1	Rasio Lancar	139.76	164.94	82.66	49.89	10.00	89.45
2	Rasio Quick	127.89	153.49	71.79	44.33	8.36	81.17
3	Rasio Solvabilitas Jk pendek	101,62	112,94	62,41	41,69	7,67	65,26
4	Rasio Solvabilitas Jk Panjang	0	0	0	0	0	0

Sumber: Audit Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Tabel 2.126, jika dilihat dari Rasio Likuiditas selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan adanya dinamika sebagai berikut:

1. **Rasio Lancar**

   Rasio Lancar (*Current Ratio*) mengalami kecenderungan fluktuatif dari tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya sangat baik serta mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 50 kali lebih untuk tahun 2024.

2. **Rasio Quick**

   Rasio Cair (*Quick Ratio*) mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 131 menjadi sebesar 44 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang dalam menggunakan aktivas lancar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi sangat baik.

Masih dari Tabel 1.126, jika dilihat dari Rasio solvabilitas selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan adanya dinamika sebagai berikut:

1. **Rasio Solvabilitas Jangka Pendek**

   Rasio Solvabilitas Jangka Pendek mengalami kecenderungan fluktuatif dari tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya sangat baik.

2. **Rasio Solvabilitas Jangka Panjang**

   Rasio Solvabilitas Jangka Panjang selama periode tahun 2020-2024 sebesar 0 (nol) karena belum pernah ada kewajiban jangka panjang di Kota Magelang, semua kewajiban bisa terpenuhi atau dibayarkan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan.

2.3.1.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tabel 2.128 Laporan Operasional Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	**969.313**	**1.051.452**	**910.376**	**997.242**	**1.022.452**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**309.665**	**369.316**	**293.438**	**309.658**	**345.707**
Pajak Daerah-LO	36.878	39.503	51.455	58.761	56.071
Retribusi Daerah-LO	6.087	7.201	6.879	9.137	273.600
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	6.182	11.287	13.185	10.756	7.666
Lain-lain PAD yang Sah-LO	260.516	311.323	221.918	231.002	8.369
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**309.665**	**369.316**	**293.438**	**309.658**	**345.707**
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**638.803**	**652.616**	**612.012**	**681.778**	**661.636**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	581.272	592.207	546.381	619.937	607.888
Dana Perimbangan-LO	0,00	0,00	0,00	567.414	591.617
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	0,00	0,00	35.818	27.103
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	0,00	0,00	426.686	453.244
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	35.795	42.314
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	69.114	68.955
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	**581.272**	**592.207**	**546.381**	**567.414**	**591.617**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00	52.522	0,00
Insentif Fiskal-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.522**	**16.270**
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**57.530**	**60.408**	**65.630**	**61.841**	**53.747**
Pendapatan Bagi Hasil-LO	57.530	60.408	65.630	55.248	51.911
Bantuan Keuangan				6.593	1.836
JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	**57.530**	**60.408**	**65.630**	**61.841**	**53.747**
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	**638.803**	**652.616**	**612.012**	**681.778**	**661.636**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**20.844**	**29.519**	**4.925**	**5.805**	**15.108**
Pendapatan Hibah-LO	20.277	11.983	4.925	5.805	15.108
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	567	17.535			
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**20.844**	**29.519**	**4.925**	**5.805**	**15.108**
JUMLAH PENDAPATAN	**969.313**	**1.051.452**	**910.376**	**997.242**	**1.022.452**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
BEBAN	**808.140**	**878.995**	**1.007.371**	**1.017.094**	**1.025.833**
BEBAN OPERASI	**678.868**	**752.277**	**880.010**	**884.465**	**893.702**
Beban Pegawai	318.812	337.413	357.938	347.011	378.341
Beban Barang dan Jasa	331.581	396.284	499.840	502.846	482.208
Beban Hibah	21.817	6.834	13.292	21.704	29.149
Beban Bantuan Sosial	907	1.048	7.411	12.161	2.878
Beban Penyisihan Piutang	(2.668)	10.696	1.527	741	1.124
Beban Lain-lain	8.417	0,00			
JUMLAH BEBAN OPERASI	**678.868**	**752.277**	**880.010**	**884.465**	**893.702**
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**129.271**	**126.717**	**127.361**	**132.629**	**132.131**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.465	71.721	70.652	73.120	73.104
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.618	19.308	19.130	19.500	19.327
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.187	33.996	35.486	37.703	37.342
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	179	176	193	155	66
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.	1	1	1	0,00
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	818	1.513	1.896	2.147	1.967
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**129.271**	**126.717**	**127.361**	**132.629**	**132.131**
JUMLAH BEBAN	**808.140**	**878.995**	**1.007.371**	**1.017.094**	**1.025.833**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**161.172**	**172.457**	**(96.995)**	**(19.852)**	**(3.381)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**(534)**	**(1.325)**	**276**	**456**	**2**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	183	646	456	2
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	1.509	370		

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	534	0,00			
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**(534)**	**(1.325)**	**276**	**456**	**2**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(534)**	**(1.325)**	**276**	**456**	**2**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**160.638**	**171.131**	**(96.718)**	**(19.395)**	**(3.379)**
POS LUAR BIASA					
BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**263**	**5.555**	**1.136**	**967**
Beban Luar Biasa	0,00	0,00		1.136	967
Beban Tak Terduga	0,00	263	5.555		
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	**0,00**	**263**	**5.555**	**1.136**	**967**
JUMLAH POS LUAR BIASA	**0,00**	**(263)**	**(5.555)**	**(1.136)**	**(967)**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**160.638**	**170.867**	**(102.274)**	**(20.531)**	**(4.346)**

Analisa atas Laporan Operasional periode 2020-2024 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pendapatan-LO yang semakin meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa prediksi perolehan pendapatan yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang. Adapun Beban-LO mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024, hal ini menunjukkan bahwa besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan dan peningkatan pelayanan masyarakat sedangkan pada Pos Luar Biasa-LO mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 hal ini disebabkan karena pos luar biasa ini merupakan kejadian luar biasa yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Di sisi lain, Analisa terhadap Laporan Operasional yang digunakan dalam penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rasio solvabilitas operasional. Rasio solvabilitas operasional dapat mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

$$Rasio\ Solvabilitas\ Operasional = \frac{Total\ Pendapatan\ LO - Pendapatan\ DAK\ LO}{Total\ Beban\ LO}$$

Tabel 2.129 Analisa Laporan Operasional Periode Tahun 2020 - 2024

No	Analisis Laporan Operasional	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata
1	Rasio Solvabilitas Operasional	1,10	1,10	0,82	0,88	0,89	0,96

Sumber: Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020 - 2024 yang telah diaudit

Berdasarkan Tabel 2.128, jika dilihat dari Rasio solvabilitas operasional selama kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi dan di tahun 2024 terdapat kenaikan meskipun tidak signifikan, dari hasil rasio tersebut dapat kita ketahui bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam menutupi beban operasional dengan pendapatan setelah dikurangi dengan pendapatan Dana Alokasi Khusus masih mampu untuk membiayai beban operasional.

2.3.1.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan/pembiayaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Berikut ini klasifikasi dalam Laporan Arus Kas:

2.3.1.5.1 Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

1. Penerimaan Perpajakan;
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Penerimaan Hibah;
4. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi 40 Lainnya;
5. Transfer masuk

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Bunga;
4. Subsidi;
5. Hibah;
6. Bantuan Sosial;
7. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
8. Transfer keluar

2.3.1.5.2 Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

1. Penjualan Aset Tetap;
2. Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya.

2.3.1.5.3 Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan Pinjaman;
2. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
3. Penerimaan dari Divestasi;
4. Penerimaan Kembali Pinjaman;
5. Pencairan Dana Cadangan.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

1. Penyertaan Modal Pemerintah;
2. Pembayaran Pokok Pinjaman;
3. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
4. Pembentukan Dana Cadangan.

2.3.1.5.4 Aktivitas Non anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

2.3.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
   b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Berikut ini Laporan Perubahan Ekuitas periode tahun 2020-2024:

Tabel 2.130 Laporan Perubahan Ekuitas Kota Magelang Tahun 2020-2024 (Juta Rp)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
EKUITAS AWAL	4.010.873	4.157.787	4.334.740	4.264.366	4.246.955
SURPLUS/DEFISIT-LO	160.638	170.867	(102.274)	(20.531)	(4.346)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:					
Koreksi Ekuitas	(13.724)	6.085	31.900	3.121	(8.555)
EKUITAS AKHIR	**4.157.787**	**4.334.740**	**4.264.366**	**4.246.955**	**4.234.053**

Sumber: Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2020-2024 yang telah diaudit

Laporan Perubahan Ekuitas periode tahun 2020 - 2024 menggambarkan jumlah ekuitas atau jumlah keseluruhan kepemilikan pemerintah daerah yang diperoleh dari Jumlah Aset dikurangi Kewajiban yang terdapat pada Laporan Neraca. Dari tahun ke tahun jumlah ekuitas Kota Magelang semakin meningkat meskipun ada penurunan pada tahun 2023 dan 2024 namun hal ini bisa jadi karena aset yang dimiliki berkurang karena adanya penghapusan aset yang sudah rusak berat atau jumlah kewajiban pemerintah daerah yang semakin kecil.

2.3.1.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

2.3.2 Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus terus diperhatikan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Magelang. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2026-2030 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyadari bahwa kapasitas fiskal yang kuat merupakan fondasi penting untuk memperluas ruang fiskal, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen utama dari pendapatan daerah akan terus dioptimalkan melalui perbaikan tata kelola, intensifikasi, dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi ini mencakup penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan melalui sistem pelayanan berbasis digital, penyesuaian regulasi yang mendukung efisiensi pemungutan, serta peningkatan pengawasan terhadap potensi-potensi yang belum tergali secara optimal.

Selain itu, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akan terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pemerintah Kota Magelang juga akan mendorong pengembangan pemanfaatan aset daerah yang produktif.

Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan PAD, melalui:

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah, antara lain:
    a. Peningkatan validasi dan akurasi data objek dan subjek pajak (melalui pemutakhiran database wajib pajak).
    b. Ekstensifikasi melalui pendataan aktif objek pajak baru.
    c. Pemanfaatan teknologi informasi seperti:
        1) Optimalisasi sistem Informasi Pajak Terintegrasi (e-SPTPD)

2) Pemasangan alat perekam transaksi berupa *tapping box*, *mobile Point of Sale* untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.

3) Monitoring dan evaluasi rutin terhadap target dan realisasi penerimaan pajak.

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah, melalui:
   a. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya, dengan tetap menjunjung prinsip pembinaan
   b. Pemberian *reward* bagi wajib pajak patuh
   c. Penyederhanaan proses administrasi dan pembayaran (online & non-tunai).
   d. Edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada wajib pajak.
3. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Daerah, melalui:
   a. Evaluasi tarif retribusi agar sesuai dengan kemampuan masyarakat dan nilai manfaat layanan.
   b. Peningkatan kualitas layanan publik yang dikenakan retribusi agar menarik minat pengguna.
   c. Digitalisasi sistem pemungutan retribusi daerah.
   d. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek retribusi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan Kinerja dan Kontribusi BUMD, melalui:
   a. Revitalisasi BUMD agar lebih profesional, adaptif, dan berbasis pasar.
   b. Evaluasi unit usaha BUMD yang tidak produktif dan dorong pengembangan unit usaha baru.
   c. Keterlibatan BUMD dalam pengelolaan aset dan penyediaan layanan komersial.
5. Penguatan kelembagaan dan optimalisasi sumber daya manusia pemungut pendapatan asli daerah, melalui:
   a. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur pengelola PAD.
   b. Penempatan petugas pajak/retribusi berbasis kompetensi dan integritas.
   c. Pembentukan unit khusus pemantauan dan evaluasi penerimaan PAD.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengawasan, melalui:
   a. Integrasi data antar-OPD untuk mendukung basis data PAD.
   b. Penggunaan *dashboard monitoring real-time* untuk pengawasan penerimaan.
   c. Penguatan sistem informasi pengawasan internal (integrasi dengan BPKAD, Inspektorat, dan OPD teknis).
7. Pengendalian kebocoran dan peningkatan transparansi, melalui:
   a. Audit internal berkala terhadap potensi kebocoran PAD.
   b. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai untuk semua jenis penerimaan daerah.
   c. Penerapan transparansi data penerimaan.
8. Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah khususnya elektronifikasi transaksi pendapatan daerah yang terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah dengan instrumen pembayaran nontunai melalui kanal pembayaran nontunai seperti agen *banking*, *mobile/phone banking*, *car banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, QRIS/*Barcode*, *tapping*,

Electronic Data Capture (EDC), *Cash Management System* (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

2.3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, arah kebijakan belanja daerah disusun secara strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan belanja daerah dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses dan pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Sementara itu, kebijakan Belanja Daerah di Kota Magelang selama Tahun 2026-2030 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Menyelaraskan kebijakan belanja daerah dengan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Magelang dapat mendukung pencapaian sasaran makro pembangunan nasional, serta memperkuat kolaborasi fiskal antara pusat dan daerah;
2. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kota Magelang, selama kurun waktu 2026-2030;
3. Membiayai penyelesaian permasalahan aset perkantoran pemerintahan daerah Kota Magelang sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kesepakatan antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Magelang;
4. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
5. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
6. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
7. Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan melakukan penguatan pada belanja produktif yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus menekan porsi belanja yang bersifat konsumtif. Pendekatan *Money Follow Programme* dan *Money Follow Result* akan diterapkan untuk memastikan alokasi anggaran sejalan dengan program prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat;
8. Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
9. Meningkatkan percepatan implementasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam seluruh tahapan belanja daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
10. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
11. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.
12. Mengingat keterbatasan fiskal dalam membiayai pembangunan, Pemerintah Kota Magelang akan membuka ruang untuk belanja berbasis kerja sama melalui skema *Public Private*

Partnership (PPP), kerja sama antar daerah, pemanfaatan dana CSR, dan sumber pendanaan alternatif lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

2.3.2.2 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur APBD yang memiliki fungsi penting untuk menjembatani selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam RPJMD periode 2026-2030 kebijakan pembiayaan daerah dirancang sebagai instrumen pendukung untuk menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada dua sisi, yaitu **penerimaan pembiayaan daerah** dan **pengeluaran pembiayaan daerah**, dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*), efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
   a. Optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

      Pemerintah Kota Magelang akan mengoptimalkan pemanfaatan SiLPA setiap tahun sebagai sumber penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendukung program prioritas pembangunan. Pengelolaan SiLPA dilakukan dengan tetap menjaga akurasi perencanaan dan efisiensi realisasi anggaran agar SiLPA tidak semata-mata menjadi cerminan ketidakterserapan anggaran.

   b. Pemanfaatan Dana Cadangan

      Pemerintah Kota Magelang akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan dana cadangan yang telah dibentuk, serta mempertimbangkan pencairannya untuk mendukung kegiatan prioritas yang bersifat strategis dan tidak dapat didanai secara langsung oleh APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c. Akses terhadap Pinjaman Daerah

      Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penguatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Magelang membuka opsi untuk mengakses pinjaman daerah, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   a. Penyertaan Modal kepada BUMD

      Pemerintah Kota Magelang akan melanjutkan kebijakan penyertaan modal kepada BUMD yang dinilai memiliki prospek usaha dan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan mempertimbangkan:

      1) Kinerja keuangan dan tata kelola BUMD,
      2) Kesesuaian dengan RPJMD dan Rencana Bisnis BUMD,
      3) Audit kelayakan investasi dan efektivitas penggunaan dana.

   b. Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan

      Dalam rangka antisipasi kebutuhan pembiayaan strategis jangka menengah, Pemerintah Kota Magelang akan membentuk dana cadangan, antara lain:

      1) mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
      2) mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2.3 Kebijakan Pengendalian Risiko Fiskal

Sebagai bentuk pengelolaan risiko fiskal yang bertanggung jawab, Pemerintah Kota Magelang menetapkan kebijakan pengendalian pembiayaan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tahunan atas rasio pinjaman terhadap pendapatan daerah dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) untuk menjaga kesinambungan fiskal.
2. Mengintegrasikan kebijakan pembiayaan dengan sistem penganggaran berbasis kinerja.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan investasi daerah dan manajemen utang.
4. Melibatkan DPRD dan publik secara transparan dalam pengambilan keputusan pembiayaan strategis.

Mengingat keterbatasan sumber pendanaan di Pemerintah Kota Magelang, dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Magelang memandang perlu untuk memperkuat sinergi pendanaan, khususnya dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan pelaksanaan program prioritas sesuai dengan kewenangan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang tidak memungkinkan seluruh kebutuhan pembangunan dipenuhi hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sinergi pendanaan dimaknai sebagai langkah strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan pembangunan secara terpadu. Sumber-sumber pembiayaan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal (IF), pembiayaan utang daerah, serta sumber pendanaan lain di luar APBD. Pendanaan non-APBD dapat berasal dari skema kerja sama dengan pihak swasta (*Public-Private Partnership*/KPBU), dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), partisipasi BUMN/BUMD, maupun kerja sama antar pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk mendorong kolaborasi yang sinergis antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan mitra pembangunan. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Penguatan sinergi pendanaan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang mendorong keterpaduan antara kebijakan fiskal pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan berbasis kinerja. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kota Magelang berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak yang nyata, terukur, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan tata kelola yang baik serta perencanaan dan pengawasan yang kuat, sinergi pendanaan diharapkan menjadi motor penggerak transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Gambaran proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.131 Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2026 - 2030 (Juta Rp)

No	URAIAN APBD	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
A	**PENDAPATAN DAERAH**						
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**348,972.00**	**394,534.67**	**401,935.80**	**409,447.49**	**417,071.69**	**424,810.31**
	- Pajak Daerah	58,993	92,277.94	94,457.47	96,657.37	98,878.00	101,119.72

No	URAIAN APBD	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
	- Retribusi Daerah	272,699	286,096.83	291,039.26	296,067.06	301,181.73	306,384.75
	- Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,936	10,369.32	10,548.45	10,730.68	10,916.06	11,104.63
	- Lain-lain PAD	7,344	5,790.58	5,890.62	5,992.38	6,095.90	6,201.21
	Pendapatan Transfer (TKD)	663,233.00	651,988.71	662,666.66	673,546.34	684,631.26	695,924.94
	- Transfer Pemerintah Pusat (TKD)	610,994	622,847.29	633,607.20	644,552.98	655,687.87	667,015.11
	- Trasfer Pemerintah Pusat Lainnya	663,233.00	651,988.71	662,666.66	673,546.34	684,631.26	695,924.94
	- Transfer antar Daerah	52,239	29,141.42	29,059.46	28,993.36	28,943.39	28,909.83
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1,012,205.00**	**1,046,523.38**	**1,064,602.46**	**1,082,993.83**	**1,101,702.95**	**1,120,735.25**
B	**BELANJA DAERAH**						
	Belanja Operasi (BO)	**893,558.00**	**952,741.45**	**956,977.72**	**961,498.31**	**966,304.50**	**971,397.66**
	- Belanja Pegawai (BP)	377,980.00	353,760.74	347,649.40	341,643.63	335,741.61	329,941.56
	- Belanja Barang dan Jasa (BBJ)	483,550.00	549,336.99	558,826.99	568,480.92	578,301.63	588,292.00
	- Belanja Hibah	29,150.00	38,736.44	39,405.62	40,086.37	40,778.88	41,483.35
	- Belanja Bantuan Sosial	2,878.00	10,907.28	11,095.71	11,287.39	11,482.38	11,680.75
	- Belanja Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Modal (BM)	**132,362.00**	**158,736.80**	**161,479.03**	**164,268.63**	**167,106.45**	**169,993.27**
	- Belanja Tanah	5,693.00	3,868.87	3,935.70	4,003.69	4,072.86	4,143.22
	- Belanja Peralatan dan Mesin	69,038.00	74,001.98	75,280.39	76,580.89	77,903.85	79,249.67
	- Belanja Gedung dan Bangunan	54,221.00	77,193.30	78,526.85	79,883.42	81,263.44	82,667.29
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.00	7.97	8.11	8.25	8.40	8.54
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	2,619.00	2,866.73	2,916.25	2,966.63	3,017.88	3,070.02
	- Belanja Aset Tak Berwujud	784.00	797.95	811.73	825.75	840.02	854.53
	Belanja Tak Terduga	**967.00**	**510.51**	**519.33**	**528.30**	**537.43**	**546.71**
	Belanja Transfer	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**1,026,887.00**	**1,111,988.76**	**1,118,976.08**	**1,126,295.24**	**1,133,948.38**	**1,141,937.64**
	SURPLUS/DEFISIT	**-48,437.00**	**-65,465.38**	**-54,373.62**	**-43,301.41**	**-32,245.43**	**-21,202.39**
C	**PEMBIAYAAN**						
	- Penerimaan Pembiayaan	170,829.00	70,465.38	69,373.62	58,301.41	37,245.43	26,202.39
	- SiLPA Tahun Sebelumnya	170,829.00	70,465.38	69,373.62	53,301.41	42,245.43	26,202.39
	- Pencairan Dana cadangan						
	- Pengeluaran Pembiayaan	12,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00

No	URAIAN APBD	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
	- Pembentukan Dana Cadangan			10,000.00	10,000.00		
	- Penyertaan Modal		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**158,829.00**	**65,465.38**	**54,373.62**	**43,301.41**	**32,245.43**	**21,202.39**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**110,392**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber: Analisis Tim Penyusun Rancangan Perda RPJMD Kota Magelang 2026-2030

2.4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

2.4.1 Permasalahan Pembangunan

2.4.1.1 Aspek Geografi

Kota Magelang, dengan luas wilayah hanya 18,56 km^2, menghadapi keterbatasan lahan yang membatasi pengembangan permukiman, industri, dan ruang terbuka hijau. Pertumbuhan penduduk meningkatkan tekanan terhadap lahan, sementara ketergantungan pasokan air bersih dari Kabupaten Magelang menjadi risiko tersendiri karena potensi air tanah terbatas pada kedalaman 5-20 meter dengan aquifer dangkal. Lahan pertanian menyusut signifikan dari 142,89 hektar (2019) menjadi 105,55 hektar (2023), mengancam ketahanan lingkungan dan pangan.

Kota ini juga rawan bencana, khususnya longsor dan banjir, dengan wilayah terdampak antara lain Kelurahan Kramat Utara, Potrobangsan, dan Rejowinangun Utara. Data menunjukkan 12 kasus longsor pada 2022, menurun menjadi 7 kasus pada 2023, lalu meningkat kembali menjadi 11 kasus pada 2024. Perubahan iklim memicu curah hujan fluktuatif, serta meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan kenaikan suhu. Tantangan lingkungan juga mencakup pencemaran air, ruang terbuka hijau publik yang belum mencapai 20% wilayah, dan keterbatasan pengelolaan sampah di tengah tren timbulan yang meningkat.

RPJMD 2025-2029 perlu menekankan pembangunan vertikal, diversifikasi sumber air bersih, pengendalian ketat alih fungsi lahan, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur mitigasi bencana. Optimalisasi posisi Kota Magelang sebagai pusat jasa dan pendidikan melalui pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta mengurangi dampak keterbatasan geografis, sehingga kota berkembang tangguh dan berkelanjutan.

2.4.1.2 Aspek Demografi

Kota Magelang tumbuh lambat dengan kenaikan penduduk 0,35% pada 2024. Bonus demografi masih berlangsung dengan 70,51% penduduk berusia produktif (15-64 tahun), namun berisiko hilang tanpa penciptaan lapangan kerja memadai. Kepadatan penduduk tinggi, rata-rata 6.935 jiwa/km^2, dengan Kecamatan Magelang Tengah (9.506 jiwa/km^2) dan Kelurahan Rejowinangun Selatan (21.513 jiwa/km^2) menjadi titik terpadat, menekan daya dukung lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Struktur penduduk menuju penuaan, dengan peningkatan lansia (65 tahun ke atas) tiap tahun, berpotensi

menaikkan angka ketergantungan dan kebutuhan layanan kesehatan, fasilitas ramah lansia, serta jaminan sosial.

Tantangan lain mencakup ketimpangan gender, di mana rasio jenis kelamin 97,72 menunjukkan jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun banyak perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga dengan akses ekonomi terbatas. Pendidikan juga menjadi isu, karena mayoritas penduduk hanya berpendidikan SLTA/sederajat dan lulusan perguruan tinggi masih sedikit, membatasi daya saing tenaga kerja di sektor teknologi dan industri kreatif. Terbatasnya lapangan kerja formal dan tingginya pengangguran terselubung, dengan dominasi sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan informal, memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat kesejahteraan.

2.4.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gini Rasio Kota Magelang meningkat dari 0,42 pada 2023 menjadi 0,46 pada 2024, yang menunjukkan pelebaran ketimpangan pendapatan. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial serta menghambat pemerataan kesejahteraan. Urusan terkait yang terdampak mencakup bidang perekonomian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial, mengingat dampaknya terhadap distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 6,11% menjadi 5,94%, setara dengan berkurangnya sekitar 200 penduduk miskin. Meski trennya positif, jumlah penduduk miskin yang masih sekitar 7.250 jiwa tetap menjadi tantangan, terlebih di tengah penurunan daya beli dan dominasi sektor jasa yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan urusan perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan UMKM yang masih menghadapi kendala permodalan, pemasaran, serta literasi digital.

Namun, distribusi pengeluaran 40% penduduk berpendapatan terendah justru menurun dari 16,07% pada 2023 menjadi 15,26% pada 2024. Penurunan ini memperkuat indikasi bahwa kelompok masyarakat miskin belum mendapatkan manfaat proporsional dari pertumbuhan ekonomi, yang menurut kriteria Bank Dunia tergolong ketimpangan sedang. Kondisi ini menghubungkan permasalahan di berbagai urusan, termasuk perencanaan wilayah (terkait ketersediaan ruang publik dan RTH untuk interaksi sosial), pariwisata dan kebudayaan (penguatan identitas dan ekonomi kreatif dari warisan budaya), serta komunikasi dan informatika (pengaruh interaksi digital terhadap kohesi sosial).

2.4.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 sebesar 4,26, meningkat 0,11 poin dibanding tahun 2023. Kota Magelang memiliki skor lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (3,43) maupun Provinsi Jawa Tengah (3,84). Meskipun menunjukkan performa yang cukup baik, terdapat beberapa aspek yang masih menjadi tantangan bagi daya saing Kota Magelang ke depan.

1. **Daya Saing Ekonomi**

   Kota Magelang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing ekonominya. Saat ini, perekonomian masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, terutama UMKM. Namun, perkembangan bisnis di kota ini masih lambat, dengan dinamika usaha yang lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Selain itu, pasar di Kota Magelang masih kecil, sehingga peluang untuk menarik investasi dan memperluas usaha menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan skala ekonomi kota relatif kecil dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Ketergantungan pada sektor perdagangan dan jasa juga membuat ekonomi kurang bervariasi, karena sektor industri dan manufaktur masih belum berkembang optimal. Meskipun Kota Magelang memiliki daya saing produk yang cukup baik, akses pasar dan kapabilitas inovasi

masih perlu diperkuat, agar produk lokal lebih kompetitif, meningkat 0,23 poin dibandingkan tahun 2023.

2. **Daya Saing Sumber Daya Manusia**

   Tantangan utama dalam penguatan SDM adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan ekonomi digital. Meskipun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 mencapai 11,43 tahun, meningkat 0,23 poin dibandingkan tahun 2023. RLS Kota Magelang lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah (8,47 tahun) dan nasional (9,22 tahun). Namun jika dikaitkan dengan angka pengangguran terbuka, hal ini mengindikasikan tantangan bahwa banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan spesifik yang dibutuhkan dunia kerja. Sebagai contoh: kompetensi yang dibutuhkan dunia industri berbasis teknologi dan manufaktur.

3. **Daya Saing Infrastruktur**

   Infrastruktur Kota Magelang masih perlu ditingkatkan agar lebih mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Skor Pilar Infrastruktur Kota Magelang tahun 2024 sebesar 3,18, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah (4,14). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan aksesibilitas infrastruktur di kota ini masih menjadi tantangan. Salah satu masalah utama adalah jaringan jalan dan konektivitas antar wilayah yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun Kota Magelang memiliki lokasi strategis, kapasitas jaringan jalan masih perlu diperbaiki agar lebih mendukung pergerakan barang dan manusia secara lebih efisien. Selain itu, Kota Magelang masih bergantung pada pasokan air dan energi dari luar daerah. Kebutuhan air bersih sebagian besar dipasok dari Kabupaten Magelang, dan ketergantungan ini bisa menjadi risiko bagi ketahanan sumber daya jika tidak ada alternatif pasokan yang lebih mandiri.

4. **Daya Saing Investasi**

   Daya tarik investasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya dinamisme bisnis, dengan skor hanya 2,48, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah (4,47). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang masih perlu memperkuat ekosistem bisnis agar lebih menarik bagi investor dan pengusaha baru. Selain itu, akses permodalan masih menjadi kendala. Skor Pilar Sistem Keuangan hanya 2,72, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (3,44). Data ini dapat memberikan gambaran bahwa UMKM dan pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan yang memadai. Di sisi lain, kurangnya promosi dan fasilitasi investasi juga menjadi hambatan. Kota Magelang belum menjadi destinasi utama bagi investasi skala besar, karena keterbatasan strategi pemasaran daerah dan belum adanya insentif yang cukup menarik bagi investor.

2.4.1.5 Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pelayanan umum di Kota Magelang mencerminkan adanya tantangan mendasar pada sektor-sektor strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada urusan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, masih terlihat kesenjangan akses, kualitas layanan, serta efektivitas sistem pendukung. Misalnya, masih ada ketimpangan akses pendidikan menengah atas dan pendidikan inklusif, persoalan gizi masyarakat dan layanan rujukan kesehatan yang belum optimal, serta rendahnya daya serap tenaga kerja akibat keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Permasalahan ini berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia Kota Magelang yang belum berkembang secara merata.

Di sisi lain, urusan pekerjaan umum, perumahan, dan lingkungan hidup juga memperlihatkan sejumlah persoalan mendasar. Pengelolaan infrastruktur perkotaan, termasuk drainase, sanitasi, serta pengelolaan persampahan, masih belum terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, keterbatasan rumah layak huni, rendahnya

ketersediaan ruang terbuka hijau, serta menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya tata ruang kota yang sehat, layak huni, dan berdaya saing.

Selain itu, sektor pelayanan publik lain seperti transportasi, komunikasi dan informatika, serta administrasi kependudukan juga menunjukkan keterbatasan dalam integrasi dan pemanfaatan teknologi. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum, keterbatasan literasi digital masyarakat, serta akses terbatas terhadap data kependudukan untuk verifikasi menunjukkan bahwa pelayanan publik berbasis teknologi belum berjalan optimal. Secara umum, permasalahan-permasalahan ini menandakan bahwa Kota Magelang perlu memperkuat kualitas pelayanan umum yang lebih inklusif, berbasis data, serta terintegrasi lintas sektor agar mampu menjawab tantangan pembangunan menengah ke depan.

Di sisi pelayanan publik, masih terdapat permasalahan prasarana dan sarana perkantoran yang mana Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang menggunakan tanah dan bangunan Eks Markas Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (MAKO AKABRI) sejak Tahun 1985 sehingga secara yuridis status kepemilikannya masih merupakan aset Tentara Nasional Indonesia. Adapun langkah penyelesaian yang disepakati telah dtituangkan dalam Nota Kesepahaman Antara Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Magelang Nomor: B/1077/IX/2022/Slog; Nomor: MoU-3/SJ/2022; Nomor: 030/914/440/2022 Tanggal 13 September 2022 tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah Dan Bangunan Di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, dimana pelaksanaan atas hal-hal yang di sepakati para Pihak terkait belum selesai pada masa periode RPJMD ini.

Oleh karena itu, maka dalam RPJMD ini juga merencanakan pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tersebut di atas untuk mewujudkan perkantoran pemerintahan daerah yang representatif dan memiliki kepastian hukum atas status kepemilikannya.

2.4.1.6 Potensi Kota Magelang

Potensi Kota Magelang sebagai Dasar Perumusan Isu Strategis 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. **Letak Geografis yang Strategis**

   Kota Magelang berada di tengah Pulau Jawa dan menjadi simpul pergerakan ekonomi serta jalur wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Posisi ini menjadikan Kota Magelang sebagai pusat perdagangan, jasa, dan transit bagi wilayah sekitarnya.

2. **Peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

   Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, Kota Magelang berperan sebagai PKW bagi kawasan Magelang-Temanggung. Kota ini menjadi pusat pelayanan keuangan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan yang melayani beberapa kabupaten di sekitarnya.

3. **Dukungan Infrastruktur dan Aksesibilitas**

   Kota Magelang memiliki jaringan transportasi yang cukup baik, dengan jalur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah. Selain itu, pengembangan jalur kereta api dan jalan tol Semarang-Yogyakarta berpotensi meningkatkan mobilitas dan investasi.

4. **Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata**

   Kota Magelang memiliki potensi pengembangan sektor ekonomi kreatif, terutama melalui industri kuliner, kerajinan, serta wisata sejarah dan religi seperti kawasan Gunung Tidar. Keberadaan Borobudur sebagai destinasi wisata nasional juga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya.

5. **Sektor Pendidikan dan Akademi Militer (AKMIL) sebagai Magnet Pertumbuhan**

   Kota Magelang memiliki Akademi Militer sebagai pusat pendidikan militer nasional serta Universitas Tidar sebagai perguruan tinggi negeri. Keberadaan lembaga pendidikan ini menarik mahasiswa dan pendatang, mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan properti.

6. **Keunggulan dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik**

   Kota Magelang menjadi pusat layanan kesehatan di wilayah Kedu dengan adanya rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Sistem pelayanan publik yang terus berkembang juga mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

7. **Bonus Demografi dan Potensi SDM**

   Dengan 70,51% penduduk berusia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2024, Kota Magelang memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis SDM yang berkualitas. Namun, hal ini juga harus dikelola agar tidak menimbulkan masalah sosial akibat ketidakseimbangan pasar tenaga kerja.

8. **Rencana Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis**

   Kota Magelang memiliki sejumlah kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur, seperti:

   a. Sidotopo sebagai pusat perdagangan dan pendidikan
   b. Gunung Tidar sebagai kawasan konservasi dan wisata religius
   c. Kawasan Soekarno Hatta sebagai pusat perdagangan dan transportasi
   d. GOR Samapta sebagai pusat olahraga dan rekreasi

9. **Potensi Urban Farming dan Ketahanan Pangan**

   Meski lahan pertanian terbatas, konsep pertanian perkotaan (urban farming) dan pemanfaatan teknologi pertanian modern dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal.

10. **Komitmen terhadap Pengelolaan Lingkungan**

    Kota Magelang memiliki kawasan lindung seperti Gunung Tidar dan sempadan Sungai Progo serta Elo. Pengembangan konsep kota hijau dan keberlanjutan menjadi potensi dalam pembangunan berkelanjutan.

Potensi-potensi ini dapat menjadi dasar dalam perumusan isu strategis Kota Magelang 2025-2029, khususnya dalam mengembangkan sektor ekonomi, meningkatkan daya saing SDM, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat daya tarik investasi dan pariwisata.

2.4.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis Kota Magelang dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Magelang tahun 2025-2029.

2.4.2.1 Isu Strategis Global

Isu global sebagaimana disebutkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 meliputi:

1. **Disrupsi teknologi** mengubah kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, menuntut adaptabilitas layanan publik serta kesiapan tata ruang yang ramah lansia seiring meningkatnya populasi usia tua dan kelas menengah.

2. **Geopolitik dan geoekonomi** global yang semakin terintegrasi menuntut penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi untuk menghadapi tensi antarnegara.
3. **Urbanisasi global** berdampak pada ekonomi, sosial, dan infrastruktur daerah, sehingga memerlukan pengelolaan akses universal dan daya dukung pemerintah yang efektif.
4. **Perubahan iklim** menuntut mitigasi risiko dan pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan mendorong ekonomi ramah lingkungan melalui konsep ekonomi **hijau, biru, dan kuning**.

Terkait dengan tantangan global tersebut, dampaknya juga menjadi tantangan bagi Kota Magelang. Tantangan Kota Magelang di tengah perubahan global jika tidak disiapkan dengan baik, dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan tersebut antara lain:

1. Bonus Demografi yang Singkat dan Bertambahnya Penduduk Lansia

   Saat ini, Kota Magelang memiliki banyak penduduk usia produktif, tetapi jumlah ini akan menurun setelah 2025. Di masa depan, penduduk lansia akan semakin banyak, sehingga kota harus siap menyediakan layanan kesehatan, fasilitas yang ramah lansia, serta peluang kerja bagi mereka yang masih ingin produktif.

2. Perubahan Iklim dan Lingkungan yang Makin Rentan

   Suhu udara semakin panas, cuaca tidak menentu, dan pencemaran lingkungan meningkat. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dan emisi gas rumah kaca dari aktivitas perkotaan semakin memperparah kondisi ini. Jika tidak diatasi, Kota Magelang bisa mengalami krisis lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan ketersediaan pangan serta air bersih.

3. Perkembangan Teknologi yang Mengubah Dunia Kerja

   Kemajuan teknologi membuat banyak pekerjaan bisa digantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Jika tenaga kerja di Kota Magelang tidak menyesuaikan diri, banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Namun, jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi bisa menjadi peluang untuk meningkatkan ekonomi digital dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

4. Persaingan Ekonomi yang Makin Ketat

   Perubahan ekonomi dunia menuntut Kota Magelang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha dan industri. Jika tidak bisa bersaing, produk lokal akan kalah dengan produk luar, dan kesenjangan sosial akan semakin lebar. Kota juga harus menarik investasi tanpa membuat masyarakat kecil semakin terpinggirkan.

5. Keterbatasan Lahan untuk Pembangunan

   Luas lahan Kota Magelang terbatas, sementara kebutuhan ruang untuk hunian, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Jika tidak dirancang dengan baik, kota bisa menjadi semakin padat, harga tanah naik, dan masyarakat sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak.

6. Aturan yang Sering Berubah dan Tidak Selalu Sesuai

   Perubahan kebijakan di tingkat pusat sering kali tidak sesuai dengan kondisi Kota Magelang, sehingga pembangunan menjadi terhambat. Jika koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak diperbaiki, banyak program yang tidak berjalan optimal dan justru menyulitkan masyarakat.

2.4.2.2 Isu Strategis Nasional

Tantangan pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025) sebagai berikut.

1. **Rendahnya Produktivitas**

   Total Factor Productivity (TFP) Indonesia masih rendah akibat kualitas SDM yang tertinggal, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, keterbatasan inovasi dan teknologi, serta kelembagaan yang belum efisien. Selain itu, produktivitas tenaga kerja perempuan masih terhambat oleh norma sosial budaya, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya akses layanan *daycare* yang terjangkau. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi, dengan tren melambat.

2. **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

   Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada 2022 masih rendah, hanya US$28.600 per pekerja. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas SDM, tercermin dari nilai PISA 2022 sebesar 369,3, lebih rendah dari rata-rata OECD (488,33). Sebanyak 52,32% angkatan kerja berpendidikan rendah, sedangkan hanya 21,23% pekerja memiliki keahlian menengah dan tinggi. Kondisi ini membatasi tenaga kerja terampil di Indonesia. Untuk mencapai pembangunan optimal, diperlukan investasi dalam peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.

3. **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

   Pergeseran status dari kelas menengah ke calon kelas menengah dan rentan miskin terjadi akibat tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli yang lemah menyebabkan turunnya permintaan barang dan jasa, sehingga industri kesulitan menutupi biaya operasional. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha, yang semakin memperburuk siklus ekonomi. Kondisi ini menciptakan efek domino, di mana semakin banyak pekerja kehilangan pendapatan, daya beli semakin turun, dan risiko kemiskinan semakin meningkat.

4. **Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

   Pada 2023, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 147,71 juta jiwa, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, jaminan sosial, dan perlindungan kesehatan. Jumlah tenaga kerja yang besar ini juga berisiko membebani sistem jaminan hari tua, terutama jika banyak yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, masih ada kesenjangan antara kebutuhan pekerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi ketenagakerjaan yang berkelanjutan, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan jaminan sosial dan kesehatan.

5. **Krisis Lingkungan**

   Lingkungan yang saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam keberlanjutan ekonomi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

6. **Perekonomian global dilanda ketidakpastian**

   a. **Geopolitik dan Geoekonomi**

      Berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah.

   b. **Pelemahan Ekonomi China**

      Tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China.

   c. **Dampak perubahan iklim global**

      Peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.

d. Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat

Peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.

7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi adalah isu penting yang memerlukan kerja sama semua pihak untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan investasi. Keberhasilan upaya ini akan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, tata kelola data berperan krusial dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Namun, keamanan data pemerintahan dan nasional masih rentan terhadap peretasan dan pelanggaran privasi, yang dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber dan manajemen data yang lebih baik sangat diperlukan.

2.4.2.3 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah seperti termuat dalam **RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**, terdiri dari delapan, yaitu:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah belum optimal karena rendahnya produktivitas sektor ekonomi dan kurangnya perhatian terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transformasi ekonomi yang mendorong sektor berproduktivitas rendah menjadi sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Transformasi dilakukan melalui pendekatan ekonomi hijau dan biru, dengan fokus pada investasi ramah lingkungan, penciptaan pekerjaan hijau, serta pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Keberhasilan transformasi bergantung pada kondisi lingkungan yang mendukung. Selain itu, pembangunan desa dan perdesaan juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan perbaikan pelayanan dasar.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas rata-rata nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang perlu segera diatasi. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mencakup aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia, hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Untuk itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh dengan mempertimbangkan empat prinsip utama secara komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan yang inklusif. Strategi penanggulangan kemiskinan mencakup: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dan (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui sinergi kebijakan dan program. Program dan kegiatan yang dirancang harus terintegrasi melalui satu basis data yang akurat untuk memastikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Prinsip dan strategi ini secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang ada.

3. **Ketahanan pangan yang berkelanjutan**

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus mampu memenuhi kebutuhan penduduk dalam jangka panjang dan lintas generasi. Keberlanjutan ketersediaan pangan dapat dicapai apabila pembangunan memperhatikan sarana dan prasarana pertanian, konversi atau alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian (*up-skilling*). Selain itu, keterjangkauan pangan oleh masyarakat harus dipastikan melalui distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen, baik antarwaktu maupun antarwilayah, serta dengan menjaga stok dan harga pangan yang stabil. Upaya konkret juga diperlukan agar pangan yang tersedia benar-benar bermanfaat bagi kesehatan penduduk, melalui dukungan pola konsumsi yang seimbang, beragam, bergizi cukup, serta aman dan bermutu. Dukungan ini juga mencakup pengembangan pengolahan pangan lokal dan penguatan sektor pertanian sesuai karakteristik serta potensi unggulan masing-masing daerah di Jawa Tengah, yang dilakukan secara terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan.

4. **Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

Salah satu isu strategis dalam memperkuat perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas serta ramah lingkungan. Infrastruktur ini penting untuk mendukung kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyelenggaraan jalan provinsi harus mempertimbangkan kapasitas, keamanan, dan kenyamanan, serta ramah bagi kelompok rentan seperti anak-anak, pelajar, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana, dengan berpedoman pada tata ruang dan mendorong penggunaan transportasi umum. Selain itu, akses terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi bagi masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana harus bersifat inklusif dan berkelanjutan.

5. **Keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana**

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana menjadi isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Fokus utama strategi ini mencakup penanganan kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan wilayah pesisir serta kawasan lindung; penanggulangan bencana akibat meningkatnya kejadian banjir, longsor, dan kekeringan; serta pengelolaan sampah dan limbah yang meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Keberlanjutan pembangunan hanya dapat tercapai jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, guna mengurangi risiko bencana dan menjaga kualitas fungsi ekologis wilayah.

6. **Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia**

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia dilakukan dengan mendorong akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin.

7. **Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat**

   Isu strategis penting di Jawa Tengah adalah penguatan budaya sebagai fondasi karakter dan jati diri masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak modernisasi dan globalisasi. Meski kehidupan modern perlu direspon agar tidak tertinggal, modernisasi juga dapat menggerus identitas budaya, nilai moral, dan spiritual masyarakat. Selain itu, pembangunan kualitas keluarga juga menjadi perhatian, karena perubahan gaya hidup dan arus informasi memengaruhi struktur dan pola hubungan keluarga, serta memicu perilaku menyimpang seperti kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan ketimpangan gender. Pergeseran norma ini mengancam ketahanan keluarga dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, pelestarian budaya luhur Jawa penting untuk menjaga identitas dan membangun ketahanan sosial yang mampu menangkal ancaman seperti kriminalitas, ekstremisme, dan terorisme, demi terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman.

8. **Tata kelola pemerintahan yang dinamis**

   Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan yang bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Ke depan, tata kelola pemerintahan diarahkan menjadi lebih dinamis, adaptif, dan tetap berlandaskan pada asas yang berlaku, sehingga mekanisme kokreasi antarpelaku dapat dioptimalkan. Transformasi ini perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, penguatan kapasitas dan integritas aparatur, serta langkah-langkah transformasi dalam mewujudkan *collaborative governance*. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menuju demokrasi yang lebih substansial untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dengan demikian, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kerangka utama pengarusutamaan pembangunan lima tahun ke depan di Jawa Tengah.

2.4.2.4 Isu Strategis Daerah

2.4.2.4.1 Isu Strategis dari KLHS

Isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029 mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan isu-isu ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Isu strategis daerah pada dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030 sudah terintegrasi dengan isu pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah isu-isu strategis KLHS yang direkomendasikan untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD Kota Magelang:

1. Kemiskinan:

   Upaya **pemberantasan kemiskinan masih belum optimal**, yang berisiko dapat memperbesar kesenjangan sosial serta menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

   Terdapat ancaman **stagnasi kualitas SDM** akibat belum optimalnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG).

3. Sarana Prasarana Permukiman:

   Layanan **sarana dan prasarana belum optimal** dalam mendukung lingkungan hunian yang berkualitas dan berkelanjutan. Isu ini juga mencakup isu pembangunan berkelanjutan yaitu penurunan kualitas air, kurang optimalnya pengelolaan sampah, sanitasi, dan limbah.

4. Daya Saing Ekonomi Daerah:

   Lambatnya pertumbuhan PDB daerah serta tingginya tingkat pengangguran menjadi ancaman bagi daya saing ekonomi Kota Magelang.

5. Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup:

   Kerentanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi tantangan utama dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Isu ini juga mencakup belum optimalnya kualitas tutupan lahan hijau untuk memastikan pemeliharaan fungsi ekologis. Selain itu, perubahan iklim juga membutuhkan pengurangan risiko bencana dan peningkatan upaya mitigasi bencana.

6. Tata Kelola dan Layanan Pemerintah:

   Kinerja **tata kelola pemerintahan masih belum optimal** dalam memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada masyarakat.

2.4.2.4.2 Isu Strategis dari RTRW Kota Magelang

Isu strategis yang disarikan dari Perubahan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 dalam Perda No 2 tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pengembangan **integrasi di sektor perekonomian** meliputi perdagangan, jasa, pariwisata dan pelayanan wilayah sekitar dalam **sistem regional dan nasional** yang didukung oleh pengembangan **infrastruktur transportasi berbasis transit**.
2. Pengembangan **simpul-simpul ekonomi kawasan** yang cukup besar terkendala oleh **terbatasnya lahan pengembangan** yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pengembangan lahan.
3. Perlunya **mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan** untuk menjaga ketahanan pangan Kota Magelang.
4. Perlunya mewujudkan **kawasan perumahan layak huni** yang sesuai standar teknis terutama pada **layanan infrastruktur dasar**.
5. Pengembangan **RTH publik** agar mencapai minimal 20% dari luas lahan Kota Magelang, disertai dengan pengembangan **RTNH sebagai ruang aktivitas sosial**.

2.4.2.4.3 Isu Strategis dari RPJPD

Isu strategis dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. **Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat**

   Kota Magelang menghadapi tantangan serius dalam menghadapi bonus demografi yang berisiko berubah menjadi krisis ketenagakerjaan dan kemiskinan jika kualitas sumber daya manusia tidak segera ditingkatkan. Ketidakmampuan tenaga kerja bersaing di tingkat regional dan global memperparah masalah pengangguran, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam 20 tahun ke depan, transisi menuju *aging population* semakin memperumit situasi, karena tanpa pengelolaan yang tepat, akan muncul beban ekonomi yang berat akibat meningkatnya angka ketergantungan. Kesehatan masyarakat juga berada dalam ancaman jika layanan kesehatan tidak berbasis pencegahan dan akses jaminan kesehatan masih terbatas. Pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak inklusif akan memperlebar kesenjangan serta menghambat generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Selain itu, rendahnya produktivitas perempuan dan lansia tanpa sistem kesejahteraan yang memadai

akan memperburuk tingkat kemiskinan. Jika Kota Magelang gagal memanfaatkan kemajuan teknologi dan akses pasar global, maka peluang kerja yang semakin terbatas akan mendorong stagnasi ekonomi dan memperbesar kesenjangan sosial. Ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan demografi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial jika ruang interaksi masyarakat terbatas, yang pada akhirnya melemahkan daya saing daerah dan menghambat investasi. Tanpa langkah yang segera dan tepat, Kota Magelang akan menghadapi dampak sosial-ekonomi yang berat, yang tidak hanya menghambat kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga membahayakan masa depan generasi mendatang.

2. Perwujudan Permukiman yang Berkelanjutan

Kota Magelang menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan permukiman layak huni. Kebutuhan hunian terus meningkat, sementara lahan terbatas dan kawasan kumuh semakin meluas. Jika tidak segera ditangani, kualitas lingkungan akan memburuk, mengancam kesehatan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masalah lain muncul dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan meningkatnya emisi karbon. Selain itu, banyak permukiman belum terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, yang menghambat mobilitas masyarakat.

Perubahan menuju *aging population* juga menjadi tantangan. Jika fasilitas umum tidak ramah bagi lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya, kesenjangan akses akan semakin besar. Kota Magelang perlu segera meningkatkan infrastruktur dasar, memperbaiki sistem transportasi, dan memastikan setiap warga mendapatkan akses permukiman yang nyaman dan berkelanjutan. Tanpa langkah cepat, kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota akan terancam.

3. Peningkatan Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Magelang menghadapi risiko tinggi akibat rendahnya kapasitas dalam menghadapi bencana serta semakin buruknya kualitas lingkungan hidup. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketahanan daerah dan kualitas lingkungan saling berkaitan, sehingga penurunan salah satunya akan memperburuk kondisi lainnya.

Polusi udara, air, dan tanah terus meningkat akibat aktivitas manusia yang melebihi daya dukung lingkungan. Jika tidak dikendalikan, pencemaran ini akan semakin mempercepat kerusakan ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada energi yang tidak ramah lingkungan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperparah perubahan iklim.

Kota Magelang juga menghadapi ancaman krisis air dan pangan akibat keterbatasan sumber daya alam. Jika tidak ada upaya serius untuk menjaga ketersediaannya, kelangkaan air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, dan ketidakseimbangan penggunaan lahan akan semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Tanpa langkah cepat dan berkelanjutan, risiko bencana dan degradasi lingkungan akan semakin besar, mengancam kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah dalam jangka panjang.

4. Pengembangan potensi ekonomi daerah berorientasi global

Kota Magelang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang jika dibiarkan berlarut-larut dapat menghambat daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi menjadi krusial agar perekonomian daerah tidak stagnan dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan ini adalah ekonomi kreatif, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Tanpa dorongan yang kuat, tenaga kerja kreatif sulit berkembang, dan pasar produk lokal akan terus kalah bersaing di tingkat global. Minimnya jaringan modal sosial juga menjadi kendala

bagi usaha rumah tangga dan UMKM untuk naik kelas. Jika tidak ada fasilitasi khusus bagi kelompok pemuda dan pelaku industri kreatif, potensi ekonomi dari sektor teknologi, perdagangan, dan jasa modern akan sulit berkembang. Selain itu, tanpa dukungan untuk UMKM berorientasi ekspor, peluang untuk memperluas pasar akan semakin terbatas.

Sektor pariwisata juga menghadapi tantangan besar jika tidak dikembangkan secara optimal dan berkolaborasi dengan daerah sekitar. Ketiadaan infrastruktur yang terintegrasi dengan daya tarik wisata, kuliner, dan ekonomi kreatif lainnya dapat menghambat pertumbuhan industri pariwisata Kota Magelang. Jika penguatan daya saing ekonomi daerah tidak segera dilakukan, Kota Magelang berisiko kehilangan peluang untuk menjadi pusat ekonomi kreatif dan pariwisata yang kompetitif di tingkat nasional maupun global.

5. **Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Responsif, Bersih**

   Kota Magelang membutuhkan transformasi tata kelola pemerintahan agar lebih dinamis, transparan, dan efisien. Jika tidak segera diperbaiki, birokrasi yang kurang adaptif akan menghambat daya saing daerah serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pemerintahan lebih efektif dan responsif terhadap masyarakat.

   Isu integritas aparatur tetap harus diperhatikan serius. Tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dalam pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran akan terus meningkat. Jika budaya antikorupsi tidak diperkuat, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun, menghambat investasi, dan memperburuk efektivitas birokrasi dalam mendukung pembangunan daerah.

6. **Penguatan kohesi sosial dan identitas budaya lokal**

   Kota Magelang perlu menjaga kohesi sosial dan identitas budaya agar tetap harmonis, aman, dan berdaya saing. Jika tidak diperkuat, hubungan sosial bisa melemah dan budaya lokal tergerus oleh pengaruh luar. Kemajuan teknologi semakin mempercepat perubahan budaya, sehingga tanpa pemahaman moral dan spiritual, nilai-nilai luhur bisa hilang. Pelestarian kesenian dan cagar budaya juga penting untuk menjaga ciri khas Kota Magelang. Jika diabaikan, kota ini bisa kehilangan identitas dan daya tariknya. Identitas budaya yang kuat tidak hanya mempererat masyarakat, tetapi juga menjadi keunggulan bagi perkembangan ekonomi dan investasi.

2.4.2.4.4 Isu RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Berdasarkan analisis dan sintesis permaslahan daerah, tantangan global, tantangan nasional dalam RPJMN 2025-2029, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, Isu strategis KLHS, Isu strategis RTRW, Isu strategis RPJPD Kota Magelang 2025-2045, dan potensi wilayah maka disusunlah isu strategis untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029. Adapun hasil analisis dan sintesis tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. **Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial untuk Masyarakat Bermartabat**

   Ketimpangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Magelang, terutama dalam upaya menurunkan **angka kemiskinan**, meningkatkan **akses layanan sosial** bagi kelompok rentan, serta memperkuat **ketahanan keluarga**.

   Kesenjangan sosial yang masih terjadi dapat berdampak langsung pada stabilitas masyarakat, memperlambat peningkatan kesejahteraan, serta menghambat peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat memperlebar

ketimpangan, menghambat pembangunan inklusif, serta berisiko menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja dalam sektor ekonomi produktif.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini antara lain masih adanya kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan fakir miskin yang belum mendapatkan layanan sosial secara optimal. Keterbatasan akses terhadap program perlindungan sosial mengakibatkan mereka semakin terpinggirkan, baik dalam aspek kesejahteraan maupun dalam memperoleh hak dasar lainnya.

Selain itu, meningkatnya kasus **kekerasan terhadap perempuan dan anak** menjadi indikator bahwa sistem perlindungan sosial belum sepenuhnya berjalan efektif. Kurangnya pemahaman dan akses terhadap mekanisme perlindungan, serta rendahnya keberanian korban dalam melaporkan kasus, menjadi tantangan tersendiri dalam mengatasi permasalahan ini.

Di bidang **kesehatan**, angka kematian ibu dan bayi yang masih terjadi menunjukkan bahwa layanan kesehatan bagi kelompok rentan belum tersebar merata. Faktor ekonomi, jarak ke fasilitas kesehatan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang aman menjadi penyebab utama yang harus segera ditangani.

Sementara itu, masih ada kelompok masyarakat marjinal yang belum memiliki dokumen **kependudukan** yang sah, sehingga mereka kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta program bantuan sosial. Ketidakpastian identitas kependudukan ini membuat mereka semakin terisolasi dari kebijakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, isu ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan. Upaya peningkatan akses terhadap layanan sosial, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak, pemerataan layanan kesehatan, serta penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kota Magelang untuk memastikan inklusivitas dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan strategi memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan, seperti penguatan distribusi pangan lokal, urban farming, dan dukungan bagi UMKM pangan untuk menciptakan sistem pangan berkelanjutan, memastikan akses yang cukup dan bergizi bagi seluruh masyarakat.

2. Isu Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan menjadi isu strategis dalam perencanaan Kota Magelang 2025-2029. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat daya saing kota. Jika pengelolaan dan pengembangannya tidak dilakukan secara optimal, Kota Magelang berisiko mengalami berbagai dampak negatif, seperti meningkatnya risiko bencana perkotaan, terbatasnya mobilitas masyarakat, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta melemahnya daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Efisiensi dan keberlanjutan sistem infrastruktur masih perlu diperkuat agar seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap fasilitas dasar. Rendahnya persentase pengguna **transportasi umum** yang masih di bawah 10% menunjukkan bahwa sistem transportasi publik belum menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka penggunaan kendaraan pribadi akan meningkat, menyebabkan kemacetan dan kenaikan emisi karbon yang berdampak pada kualitas udara dan kenyamanan lingkungan kota. Selain itu, kondisi jalan yang belum seluruhnya mantap juga masih menjadi kendala dalam mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran aktivitas ekonomi.

Keberlanjutan **infrastruktur dasar** seperti drainase dan sanitasi juga masih memerlukan perhatian serius. Kota Magelang memiliki beberapa titik rawan genangan dan banjir akibat kapasitas drainase yang belum optimal. Sementara itu, meskipun akses sanitasi layak sudah cukup tinggi, akses terhadap **sanitasi aman** baru mencapai 14,22%, menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pengelolaan limbah domestik dan kualitas air bersih. Jika tidak segera ditingkatkan, kondisi ini dapat menghambat pencapaian standar kota yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan.

Selain itu, Kota Magelang juga masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan tutupan lahan. **Isu terkait tutupan lahan** di Kota Magelang meliputi penurunan **ruang terbuka hijau**, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang. Hal ini berdampak pada berkurangnya fungsi ekologis lahan, meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan kualitas lingkungan hidup. Saat ini, proporsi RTH publik masih berada di bawah target ideal 20% dari luas wilayah kota. Hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya suhu perkotaan, berkurangnya daya dukung lingkungan dalam menyerap polusi, serta menurunnya kenyamanan bagi masyarakat. Jika pengelolaan RTH tidak segera diperkuat, kualitas lingkungan kota akan terus menurun, menghambat pencapaian konsep pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam kebijakan tata ruang kota.

Sebagai dampak lanjut dari alih fungsi lahan dan permasalahan pengendalian ruang, Kota Magelang menghadapi tantangan strategis dalam menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Ketergantungan yang tinggi pada pasokan pangan dari luar wilayah membuat kota rentan terhadap disrupsi rantai pasok akibat perubahan iklim, krisis pangan global, dan fluktuasi harga bahan pokok. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, melainkan juga berkaitan erat dengan tata ruang, efisiensi distribusi logistik, dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang ramah lingkungan. Dalam konteks penguatan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan, ketahanan pangan perlu diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kota yang adaptif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus mencakup strategi terintegrasi, seperti pengembangan pertanian perkotaan berbasis lahan sempit (urban farming), penguatan distribusi pangan lokal, dan pemanfaatan teknologi pertanian yang efisien. Upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pasokan pangan luar wilayah, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat dalam mewujudkan Kota Magelang yang nyaman, tangguh, dan berkelanjutan.

Berbagai aspek infrastruktur ini terkait dengan beberapa urusan pemerintahan yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Dalam urusan **pekerjaan umum dan penataan ruang**, masih terdapat jaringan jalan yang belum dalam kondisi mantap, sistem drainase yang belum optimal, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali, yang berdampak pada berkurangnya kawasan hijau dan meningkatnya kepadatan permukiman. Dalam urusan **perhubungan**, rendahnya persentase penggunaan transportasi umum serta belum adanya integrasi antara moda transportasi menghambat efisiensi pergerakan masyarakat dan barang. Dalam **urusan lingkungan hidup**, belum tercapainya target ruang terbuka hijau serta meningkatnya tekanan polusi akibat emisi kendaraan menjadi perhatian utama dalam menjaga keseimbangan ekologi perkotaan. Sementara itu, dalam urusan **perumahan dan permukiman**, masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi aman serta permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan lebih sistematis untuk memastikan standar hunian layak dan berkelanjutan.

Kota Magelang menghadapi risiko banjir, longsor, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim, diperburuk oleh drainase yang kurang optimal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Strategi adaptasi diperlukan melalui infrastruktur hijau, optimalisasi drainase, edukasi, serta kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam peringatan dini dan penanganan bencana guna memastikan ketahanan kota dan keberlanjutan pembangunan.

Keberlanjutan infrastruktur perkotaan juga perlu didukung oleh **penegakan hukum** yang tegas namun tetap humanis dalam mengatasi permasalahan ketertiban di sektor transportasi, perumahan, dan fasilitas umum. Satpol PP dapat bekerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan ketertiban di area strategis kota seperti pasar, terminal, dan pusat wisata agar tetap tertata dengan baik.

Jika berbagai persoalan infrastruktur ini tidak segera diatasi, Kota Magelang berisiko mengalami ketimpangan dalam akses layanan perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta melemahnya daya saing daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

3. Isu Penguatan Kohesi Sosial dan Harmoni dalam Keberagaman untuk Kota yang Harmonis dan Humanis

Dinamika sosial yang semakin kompleks, disrupsi teknologi, serta perubahan pola interaksi masyarakat menjadi tantangan bagi Kota Magelang dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni dalam keberagaman. Modernisasi yang pesat berpotensi menggerus nilai-nilai kebersamaan dan toleransi, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan segregasi sosial, melemahnya **identitas budaya lokal**, serta meningkatnya potensi konflik berbasis sosial dan agama. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, minimnya ruang interaksi berbasis komunitas, serta belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan menghambat terbentuknya solidaritas sosial yang kuat.

Kota Magelang menghadapi tantangan dalam memperkuat **rasa kebangsaan** dan interaksi sosial yang inklusif. Partisipasi pemilih pemula dalam agenda politik masih rendah, meskipun meningkat dari 0,98% pada 2022 menjadi 12,51% pada 2024, yang menunjukkan perlunya pembinaan wawasan kebangsaan yang lebih intensif Di sisi lain, pengaruh budaya global berpotensi melemahkan identitas budaya lokal, dengan warisan budaya seperti Petilasan Mantyasih yang belum dimanfaatkan secara optimal Terbatasnya ruang publik juga mengurangi peluang interaksi sosial berbasis komunitas, sementara ketergantungan pada komunikasi digital semakin meningkat. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan melemahkan karakter kota sebagai pusat budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan kebangsaan, pelestarian budaya, serta optimalisasi ruang publik untuk memperkuat kohesi sosial dan harmoni keberagaman.

Selain itu, era digital membawa tantangan baru dalam bentuk penyebaran informasi yang tidak terkendali, termasuk hoaks dan disinformasi yang dapat memicu ketegangan sosial. Belum optimalnya pengelolaan komunikasi publik serta kurangnya literasi digital di masyarakat membuat Kota Magelang semakin rentan terhadap polarisasi sosial berbasis informasi yang salah. Pemerintah juga masih perlu memperkuat perannya dalam menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan antar kelompok masyarakat dengan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami dan menangani dinamika sosial.

Jika isu ini tidak segera diatasi, Kota Magelang berisiko mengalami penurunan kohesi sosial yang berdampak pada **stabilitas sosial**, menurunnya interaksi berbasis komunitas, serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan inklusivitas dalam kehidupan sosial harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan Kota Magelang sebagai kota yang harmonis dan humanis. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan program wawasan kebangsaan, penguatan organisasi kemasyarakatan, pelestarian budaya lokal, serta optimalisasi teknologi digital sebagai alat untuk membangun komunikasi yang sehat dan inklusif di tengah masyarakat.

Kota Magelang sebagai kota yang beragam membutuhkan stabilitas sosial yang kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kehadiran Satpol PP membantu melayani warga

dalam menjaga ketertiban ruang publik, mengurangi potensi konflik sosial akibat pelanggaran aturan, serta mencegah berbagai bentuk gangguan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan antarwarga.

4. **Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif untuk Pembangunan Berkelanjutan**

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kota Magelang. Era digitalisasi, tuntutan transparansi, serta perubahan kebijakan nasional dan global mengharuskan birokrasi bertransformasi menjadi lebih dinamis dan efisien. Jika reformasi tata kelola pemerintahan tidak dilakukan secara optimal, maka Kota Magelang berisiko mengalami stagnasi dalam pelayanan publik, menurunnya akuntabilitas kebijakan, serta melemahnya kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin cepat dan kompleks.

Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi faktor utama dalam menciptakan **birokrasi** yang lebih responsif dan efisien. Kota Magelang telah mengadopsi berbagai inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan publik, namun masih menghadapi tantangan dalam integrasi sistem antar-instansi dan keamanan informasi. Skor Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Magelang tahun 2024 mencapai 4,90 lebih tinggi dari rata-rata nasional (3,47), tetapi tanpa strategi yang tepat dalam penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas SDM birokrasi, efektivitas layanan publik berbasis teknologi masih akan mengalami keterbatasan.

Selain itu, efektivitas reformasi birokrasi juga menjadi tantangan utama dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berdaya saing. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Magelang pada tahun 2024 mencapai 91,9 (kategori AA istimewa). Hal ini menjadi tantangan untuk mempertahankan kualitas tata Kelola birokrasi. Tantangan ruang penguatan dalam efektivitas pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menghadapi dinamika administrasi modern bebrasis digiital. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Magelang tahun 2024 berada di angka 75,02 (kategori BB) juga mengindikasikan bahwa masih diperlukan optimalisasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja agar lebih berorientasi pada hasil.

Di sisi lain, efektivitas pengelolaan **keuangan daerah** masih perlu diperkuat untuk memastikan stabilitas fiskal yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Magelang menunjukkan tren penurunan 68,02 tahun 2023 menjadi 66,11 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya peningkatan strategi dalam pengelolaan fiskal daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta efisiensi dalam pemanfaatan belanja daerah. Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat yang masih tinggi juga menunjukkan bahwa perlu ada kebijakan yang lebih strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi pembiayaan dan pemanfaatan aset daerah.

Isu tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif memerlukan peran **perencanaan pembangunan** yang berbasis data, terukur, dan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas kebijakan, optimalisasi sumber daya, serta pencapaian target pembangunan yang selaras dengan kebutuhan daerah. Pemanfaatan data yang akurat menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), di mana urusan statistik berperan strategis dalam menyediakan data valid untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Namun, tantangan masih dihadapi dalam integrasi data antar-perangkat daerah akibat belum optimalnya sistem pengelolaan data sektoral dan koordinasi lintas instansi.

Isu tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif juga **memerlukan peran arsip yang terintegrasi**, terdokumentasi dengan baik, dan berbasis digital untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif memerlukan **koordinasi, penyelarasan, dan sinergi** kebijakan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik berbasis **riset dan inovasi**. Oleh karena itu, peran Sekretariat Daerah dan Sekertariat Dewan, serta badan riset dan inovasi penting dalam memastikan penguatan sinergi antarbagian serta optimalisasi layanan birokrasi yang *agile* (cergas), akuntabel dan inovatif memecahkan masalah publik.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif memerlukan **ASN profesional berbasis meritokrasi dan transformasi digital** untuk meningkatkan efektivitas birokrasi. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan krusial dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan manajemen kinerja ASN guna mendukung pelayanan yang responsif dan berkelanjutan.

Tata kelola pemerintahan yang adaptif memerlukan pengawasan yang efektif serta koordinasi kewilayahan yang responsif. Dalam hal ini peran Inspektorat strategis untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu **kecamatan** berperan strategis mengoordinasikan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat wilayah.

Jika berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan ini tidak segera ditangani, Kota Magelang akan menghadapi risiko menurunnya kualitas layanan publik, melemahnya daya saing birokrasi, serta keterbatasan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.132 Ringkasan Isu Strategis Kota Magelang

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
1. **Keunggulan dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik**. Kota Magelang memiliki rumah sakit rujukan dan fasilitas kesehatan yang memadai, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. **Bonus Demografi dan Potensi SDM**. Sebanyak 70,51% penduduk berusia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2024 dapat menjadi modal pembangunan sosial-ekonomi jika dikelola dengan baik. 3. **Peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**. Sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk wilayah sekitarnya, Kota Magelang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. **Komitmen terhadap Pengelolaan Lingkungan**. Kawasan lindung seperti Gunung Tidar dan sempadan Sungai Progo dapat mendukung kesehatan masyarakat melalui keberlanjutan lingkungan.	1. Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi dan kesenjangan sosial yang berisiko menghambat kesejahteraan masyarakat. 2. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. 3. Masih ada pengangguran yang ditunjukkan oleh TPT 4,4% 4. Masih ada kelompok rentan, termasuk lansia, disabilitas, dan fakir miskin yang memerlukan perlindungan sosial 5. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	**Kemiskinan** Upaya pemberantasan kemiskinan masih belum optimal, yang berisiko meningkatkan kesenjangan sosial dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.	Disrupsi teknologi mengubah kehidupan sosial dan ekonomi, menuntut kesiapan SDM dan layanan publik.	Rendahnya Produktivitas dalam sektor perdagangan dan jasa.	Isu RPJMD Prov Jawa Tengah Isu 2: Penurunan tingkat kemiskinan Isu 6: Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia Isu 7: Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	1. Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial untuk Masyarakat Bermartabat
1. **Dukungan Infrastruktur dan Aksesibilitas**. Kota Magelang memiliki jaringan transportasi strategis dan berpotensi berkembang dengan rencana jalur kereta api serta jalan tol Semarang-Yogyakarta. 2. **Rencana Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis**. Pengembangan kawasan Sidotopo, Gunung Tidar, dan Soekarno Hatta sebagai pusat kegiatan dapat meningkatkan kenyamanan kota. 3. **Komitmen terhadap Pengelolaan Lingkungan**. Konsep kota hijau dan pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dengan optimal di kawasan konservasi dan sempadan sungai.	1. Luas wilayah yang kecil menghambat ekspansi permukiman, industri, dan ruang terbuka hijau. 2. Ketergantungan tinggi terhadap sumber daya air dari luar wilayah. 3. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali mengancam ketahanan lingkungan dan ketahanan pangan. 4. Sistem drainase belum optimal, menyebabkan genangan dan risiko banjir di beberapa titik. 5. Ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau belum	**Sarana Prasarana Permukiman** Layanan sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung lingkungan hunian yang berkualitas dan berkelanjutan	Rendahnya Produktivitas dalam sektor perdagangan dan jasa.	Krisis Lingkungan akibat tekanan urbanisasi dan dampak perubahan iklim.	Isu RPJMD Prov Jawa Tengah Isu 3: Ketahanan pangan yang berkelanjutan Isu 4: Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan Isu 5: Keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Isu Penguatan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
4. **Potensi Urban Farming dan Ketahanan Pangan**. Pemanfaatan teknologi pertanian modern di perkotaan mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ekosistem hijau perkotaan.	memenuhi standar ideal kota berkelanjutan.					
1. **Potensi Wisata Sejarah dan Religi**. Keberadaan Gunung Tidar sebagai kawasan wisata religi memperkuat identitas budaya dan kebersamaan sosial masyarakat. 2. **Sektor Pendidikan dan Akademi Militer (AKMIL) sebagai Magnet Pertumbuhan**. Keberadaan AKMIL dan Universitas Tidar mendukung interaksi sosial dan keberagaman komunitas di Kota Magelang. 3. **Keunggulan dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik**. Kota Magelang sebagai pusat layanan kesehatan juga dapat memperkuat integrasi sosial melalui layanan kesehatan yang inklusif. 4. **Rencana Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis**. GOR Samapta sebagai pusat olahraga dan rekreasi dapat menjadi ruang interaksi masyarakat lintas generasi.	1. Ketimpangan ekonomi yang berpengaruh pada kohesi sosial dan hubungan masyarakat. 2. Menurunnya partisipasi sosial berbasis komunitas akibat perkembangan digitalisasi. 3. Minimnya ruang publik yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi sosial. 4. Identitas budaya lokal semakin tergerus oleh modernisasi dan kurangnya program pelestarian budaya. 5. Belum optimalnya penetapan status resmi cagar budaya dan pemanfaatannya sebagai daya tarik wisata	**Kualitas Sumber Daya Manusia:** Ancaman stagnasi kualitas SDM akibat belum optimalnya layanan kesehatan dan pendidikan, serta rendahnya penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG).	Geopolitik dan geoekonomi global menuntut penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi untuk menghadapi tensi antarnegara.	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat yang mempengaruhi ketimpangan sosial dan akses layanan dasar.	Isu RPJMD Prov Jawa Tengah Isu 6: Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia Isu 7: Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	Isu Penguatan Kohesi Sosial dan Harmoni dalam Keberagaman untuk Kota yang Harmonis dan Humanis
1. **Sektor Pendidikan dan Akademi Militer (AKMIL) sebagai Magnet Pertumbuhan**. Kota Magelang memiliki potensi sebagai kota pendidikan dengan keberadaan Universitas Tidar dan AKMIL. 2. **Bonus Demografi dan Potensi SDM**. Tingginya persentase penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan untuk peningkatan daya saing tenaga kerja. 3. **Keunggulan dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik**. Pelayanan kesehatan yang baik mendukung	1. Penurunan angka partisipasi sekolah (APS) jenjang SMA/SMK. 2. Masih adanya anak tidak sekolah (ATS) terutama di kelompok rentan. 3. Belum optimalnya pendidikan vokasi yang berbasis kebutuhan industri. 4. Kurangnya program sertifikasi keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.	**Rendahnya kualitas SDM** yang dapat menghambat produktivitas ekonomi daerah	Urbanisasi global berdampak pada ekonomi, sosial, dan infrastruktur daerah, menuntut akses universal dan daya dukung pemerintah yang efektif.	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdampak pada daya saing tenaga kerja.	Isu RPJMD Prov Jawa Tengah Isu 6: Kualitas hidup dan daya saing sumberdaya manusia	Isu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing untuk Kota Magelang

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
peningkatan kualitas SDM dalam aspek kesehatan masyarakat. 4. **Peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**. Kota Magelang berpotensi menjadi pusat peningkatan kapasitas SDM bagi wilayah sekitarnya dengan program pendidikan dan pelatihan vokasi.	5. Rendahnya tingkat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi perubahan industri dan digitalisasi.					
1. **Potensi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata**. Kota Magelang memiliki sektor kuliner, kerajinan, dan wisata sejarah yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 2. **Keunggulan Letak Geografis yang Strategis**. Sebagai simpul ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, Kota Magelang memiliki potensi besar untuk perdagangan dan jasa. 3. **Dukungan Infrastruktur dan Aksesibilitas**. Konektivitas yang semakin baik melalui jalur tol dan kereta api dapat memperkuat sektor perdagangan dan pariwisata. 4. **Rencana Pengembangan Wilayah dan Kawasan Strategis**. Kawasan Soekarno Hatta sebagai pusat perdagangan dan transportasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.	1. Daya saing sektor perdagangan dan jasa masih rendah. 2. Belum optimalnya pengembangan UMKM dalam skala nasional dan internasional. 3. Belum seluruh destinasi wisata terkelola dengan baik dan belum memiliki daya tarik maksimal. 4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. 5. Minimnya inovasi dan digitalisasi dalam strategi pemasaran produk lokal dan sektor pariwisata.	**Rendahnya laju pertumbuhan PDB daerah dan tingginya angka pengangguran** menjadi ancaman bagi daya saing ekonomi Kota Magelang.	Perekonomian global dilanda ketidakpastian akibat faktor geopolitik dan perdagangan internasional.	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif yang menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	Isu RPJMD Prov Jawa Tengah Isu 1: Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Isu Peningkatan Perekonomian dan Pariwisata yang Berdaya Saing untuk Kota Magelang
1. **Keunggulan dalam Kesehatan dan Pelayanan Publik**. Kota Magelang memiliki sistem pelayanan publik yang terus berkembang, mendukung tata kelola yang lebih baik. 2. **Peran sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**. Sebagai pusat pemerintahan bagi kawasan Magelang-Temanggung, Kota Magelang perlu memiliki tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien.	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Magelang masih menunjukkan ruang perbaikan. 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset pemerintah. 3. Tingkat integrasi teknologi dalam sistem pemerintahan masih memerlukan peningkatan.	Kinerja tata kelola pemerintahan masih belum optimal dalam memberikan layanan yang efektif dan responsif kepada masyarakat.	Tata kelola pemerintahan harus beradaptasi dengan digitalisasi dan perubahan global.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efektivitas layanan publik.	Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Isu 8: Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Isu Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Responsif untuk Pembangunan Berkelanjutan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
3. **Komitmen terhadap Pengelolaan Lingkungan**. Kebijakan keberlanjutan dan tata kelola lingkungan yang baik menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang adaptif. 4. **Dukungan Infrastruktur dan Aksesibilitas**. Peningkatan tata kelola transportasi dan infrastruktur digital akan mendukung efektivitas pemerintahan di Kota Magelang.	4. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas layanan publik. 5. Kurangnya keterpaduan antara berbagai sistem layanan pemerintahan berbasis digital.					

Tabel 2.131 memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan utama pembangunan daerah pada periode 2025-2029, mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan keberlanjutan. Penyusunan isu strategis ini memperhatikan hasil analisis permasalahan daerah dan potensi dan keunggulan wilayah Kota Magelang. Potensi Kota Magelang sebagai kota jasa, pusat layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta pariwisata berbasis heritage dan sejarah, yang menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pembangunan ke depan.

Potensi Kota Magelang sebagai kota jasa, pusat layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta pariwisata berbasis heritage dan sejarah tercermin dalam berbagai isu strategis yang mencakup penguatan peran Kota Magelang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kedu Raya, peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM dan sektor informal, optimalisasi potensi wisata berbasis sejarah dan budaya, serta penataan infrastruktur pendukung layanan publik dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan.

Selain itu, isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital, prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, isu strategis Provinsi Jawa Tengah, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Magelang. Substansi dukungan terhadap isu nasional tercermin dalam upaya pengurangan ketimpangan antarwilayah, penguatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, transformasi digital, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. Dukungan terhadap isu strategis Provinsi Jawa Tengah diwujudkan melalui penguatan daya saing ekonomi lokal, pengendalian urbanisasi dan alih fungsi lahan, peningkatan infrastruktur dasar yang inklusif, pengelolaan sampah dan sanitasi, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana di wilayah perkotaan. Selain itu, isu-isu strategis ini mendukung penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam KLHS, terutama dalam aspek perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, dan penguatan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Dengan pemahaman komprehensif ini, diharapkan kebijakan dan program pembangunan Kota Magelang mampu merespons isu-isu strategis secara adaptif, integratif, dan berkelanjutan.

BAB 3
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045. Walikota-Wakil Walikota Kota terpilih periode 2025-2029 mengusung visi:

"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan"

Penjelasan unsur visi sebagai berikut.

1. **Kota Perdagangan dan jasa**

   Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang tahun 2025-2045, Perdagangan dan Jasa dimaknai sebagai pembangunan Kota Magelang yang diarahkan untuk memperkuat sektor perdagangan skala mikro dan jasa dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi yang inovatif dan berlandaskan IPTEK serta berwawasan lingkungan sebagai bentuk pemanfaatan posisi strategis wilayah.

2. **Harmonis**

   Makna harmonis yang terkait dengan keselarasan, keserasian dan kesetaraan, maka Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota inklusif. Keharmonisan dalam menjalin hubungan antar warga masyarakat mencakup segala aspek, dengan penekanan pada keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. Hubungan antara agama dan penganutnya bersifat esensial. Dengan mengutamakan hal yang esensial maka akan merambat dan menjadi penarik bagi hubungan dalam aspek kehidupan lain dalam masyarakat. Harmonis mencerminkan kehidupan sosial yang rukun dan damai, dengan interaksi yang sehat antar warga serta kerukunan antar umat beragama. Harmonis juga mencerminkan keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya lokal agar identitas Kota Magelang tetap terjaga dalam proses modernisasi.

3. **Humanis**

   Berawal dari tercapainya aspek keharmonisan, maka akan mengarah pada pencapaian kota yang humanis. Kota yang humanis adalah kota yang mengedepankan kepentingan dasar manusia dalam pembangunan. Pembangunan Kota Magelang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan, dengan mengutamakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Humanis berarti bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga mencerminkan pendekatan inklusif dalam pembangunan, yang memperhatikan kelompok rentan seperti difabel, lansia, dan masyarakat miskin. Konsep tersebut dilaksanakan melalui penerapan pengendalian pertumbuhan kota, kota hemat energi, kota yang menerapkan sistem transportasi cerdas, kota yang ramah lingkungan dan kota yang layak huni.

4. **Nyaman**

   Dengan terwujudnya kota yang harmonis dan humanis maka akan menuju terwujudnya kota yang nyaman dan inklusif sehingga masyarakat dan orang yang datang ke Magelang akan merasakan pesona kota yang jauh lebih baik. Masyarakat terjamin kenyamanan dalam hidup sehingga dapat terjaga keberlangsungannya.

5. **Berkelanjutan**

Aspek berkelanjutan sebagai indikasi bahwa pemerintahan periode ini tetap mengutamakan kepentingan-kepentingan yang harus dijaga keberadaannya di masa yang akan datang. Pengelolaan segala potensi yang dimiliki kota akan selalu mempertimbangkan keberlanjutannya untuk dapat tetap dimiliki dan dinikmati oleh generasi mendatang.

Berkelanjutan dimaknai dengan pengembangan kemampuan adaptif dan kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya serta mengelola wilayahnya secara efektif sehingga dapat mewujudkan Kota Magelang yang berdaya dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Kota Magelang yang Berkelanjutan, mampu meningkatkan kualitas hidup lingkungan dan masyarakat serta memiliki daya tahan terhadap bencana.

6. **Aspek Sumber Daya Manusia**

Meskipun frasa sumber daya manusia tidak tersurat sebagai komponen visi, namun tersirat bahwa keberhasilan pencapaian visi dilandasi pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan pendidikan dan wawasan pada sumber daya manusia tidak akan menjamin terwujudnya kota harmonis dan humanis. Optimalisasi pencapaian visi sangat tergantung pada aspek sumber daya manusia. Oleh karena itu faktor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan akan mendapat porsi anggaran yang memadai. Sumber daya manusia yang mempunyai etos kerja tinggi, kreatif dan inovatif, mempunyai daya saing tinggi, serta berkarakter menjadi modal kuat dalam mewujudkan visi Kota Magelang yang telah dirancang.

RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kota Magelang tahun 2025-2045. Visi RPJPD adalah "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan". Tahap I mengusung tema Pembangunan Sumber Daya Manusia dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek Pembangunan. Tahap I ini diarahkan kepada diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Visi RPJMD dan RPJPD memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang unggul secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. RPJPD Kota Magelang 2025-2045 memiliki capaian jangka panjang untuk membangun Kota Magelang yang unggul dalam perdagangan dan jasa dengan karakter yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara RPJMD Kota Magelang 2025-2029 menjadi tahapan awal dalam merealisasikan visi RPJPD, dengan menitikberatkan pada penciptaan masyarakat yang harmonis, nyaman, dan humanis sebagai dasar peningkatan daya saing. Korelasi utama antara RPJPD dan RPJMD terletak pada aspek keberlanjutan, daya saing ekonomi, penguatan SDM, dan keseimbangan sosial dalam proses pembangunan. Berikut adalah hubungan antarunsur visi:

Tabel 3.1 Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045

Visi RPJMD 2025-2029	Hubungan dengan Unsur Visi RPJPD 2025-2045	Penjelasan Keselarasan
Harmonis dan Humanis	Berdaya Saing	Selaras dan mendukung RPJPD dalam aspek: pengembangan SDM yang kompetitif dengan tetap menjaga keseimbangan sosial dan budaya untuk mendukung daya saing kota.

Visi RPJMD 2025-2029	Hubungan dengan Unsur Visi RPJPD 2025-2045	Penjelasan Keselarasan
Nyaman	Berkarakter	Selaras dan mendukung RPJPD dalam aspek: mewujudkan kenyamanan sebagai bagian dari pembangunan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beretika, untuk mendukung terciptanya karakter kota, yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai lokal yang kuat.
Berkelanjutan	Berkelanjutan	RPJPD dan RPJMD sama-sama menekankan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi hijau, dan keberlanjutan sosial. RPJMD menjadi tahapan awal dalam mewujudkan tujuan jangka panjang RPJPD terkait ketahanan lingkungan dan ekonomi.
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa	Keduanya berfokus pada penguatan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan Kota Magelang. RPJMD menitikberatkan pada infrastruktur dan tata kelola yang mendukung pengembangan ekonomi, sejalan dengan tujuan RPJPD.
Sumber daya manusia	Arah kebijakan tahap I	Keduanya memberikan arah pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan.

Visi RPJMD Kota Magelang juga mendukung Visi RPJMN 2025-2029, yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. RPJMD Kota Magelang 2025-2029 selaras dengan RPJMN 2025-2029 dalam menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif, keberlanjutan lingkungan, pembangunan SDM berkualitas, serta pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Fokus utama RPJMD dalam penguatan sektor perdagangan dan jasa mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dalam RPJMN. RPJMD menjadi implementasi di tingkat daerah dalam mencapai tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Visi RPJMD Kota Magelang juga mendukung Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, yaitu: Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan ini tercermin melalui fokus Kota Magelang dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa, penguatan harmoni sosial, pelayanan publik yang humanis, penciptaan lingkungan kota yang nyaman, serta pembangunan berkelanjutan. Prinsip kolaboratif dan responsif yang diusung Kota Magelang sejalan dengan semangat pembangunan Jawa Tengah untuk mewujudkan kemajuan, kewibawaan, dan keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.2 Keselarasan Visi RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2045, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD 2025-2029	Unsur Visi RPJMN 2025-2029	Penjelasan Keselarasan
Keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029		
Harmonis dan Humanis	Peningkatan Kualitas Hidup dan SDM	Mendukung RPJMN dalam aspek: Peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial yang memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata.
Nyaman		
Perdagangan dan Jasa	Indonesia Maju	Mendukung RPJMN dalam aspek: peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan jasa, mendukung target nasional dalam percepatan pertumbuhan ekonomi
Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan	Mendukung RPJMN dalam aspek: Pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan agenda pembangunan hijau dan ketahanan iklim dalam RPJMN
Harmoni, Humanis Nyaman	Bersama	Mendukung RPJMN dalam aspek: Bersama-sama semua komponen masyarakat
Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029		
Harmonis dan Humanis	Berwibawa dan Kolaboratif	Mendukung RPJMD Jateng dalam aspek: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, melayani dengan nilai kemanusiaan, menciptakan harmonisasi antar warga, serta mendukung nilai-nilai etika dan budaya yang menjadi dasar kewibawaan pemerintah.
Nyaman	Maju dan Responsif	Mendukung RPJMD Jateng dalam aspek: Penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kehidupan kota yang nyaman, aman, dan inklusif, sejalan dengan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kemajuan layanan publik.
Perdagangan dan Jasa	Maju	Mendukung RPJMD Jateng dalam aspek: Penguatan sektor unggulan perdagangan dan jasa mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi yang maju, memperluas peluang usaha, dan mendorong kontribusi Kota Magelang sebagai simpul ekonomi regional di Jawa Tengah.
Berkelanjutan	Berkelanjutan	Mendukung RPJMD Jateng dalam aspek: Pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berimbang, mendukung target pembangunan hijau dan transisi energi bersih yang menjadi agenda bersama Provinsi Jawa Tengah.

3.1.2 Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dipastikan selaras dengan misi RPJPD Kota Magelang 2025-2045 visi **"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan"**. Misi RPJPD Kota Magelang 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul,** berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan mutu kesehatan dan pendidikan; meningkatkan produktivitas; masyarakat yang berkarakter dan berbudaya; pengoptimalan pemanfaatan IPTEK; serta meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif.

   Dalam tahap 2025-2029 misi 1 memandu arah: (1) peningkatan angka partisipasi sekolah di seluruh jenjang hingga tercapainya wajib belajar 13 tahun, (2) Fasilitasi peningkatan kompetensi lulusan SMA/SMK untuk penyerapan kerja, (3) pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis IPTEK guna memanfaatkan peluang KSPN Borobudur; (4) penguatan pendidikan karakter, kearifan lokal, dan nilai budaya; (5) peningkatan mutu layanan kesehatan, pemenuhan tenaga dan sarana kesehatan sesuai standar, (6) ketahanan gizi, jaminan kesehatan universal, serta pengembangan jasa kesehatan unggulan.

2. **Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh dan berdaya saing,** berarti penguatan potensi perdagangan dan jasa sebagai leading sector ekonomi termasuk di dalamnya penguatan kawasan strategis ekonomi kota; peningkatan inovasi potensi wisata sebagai stimulan peningkatan promosi daya tarik wisata; peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat; serta peningkatan pembangunan ekonomi inklusif didukung stabilitas ekonomi daerah.

   Dalam tahap 2025-2029 misi 2 memandu arah pengembangan: (1) infrastruktur IPTEK dan sistem inovasi industri pengolahan, akomodasi, dan makan minum; (2) penguatan ekosistem ekonomi kreatif, kewirausahaan, koperasi, BUMD, perdagangan, jasa, dan pariwisata; (3) pengembangan amenitas, aksesibilitas, aktivitas, akomodasi, awareness, ancillary dan atraksi pariwisata; (4) peningkatan kondusifitas daerah melalui pengawasan berbasis masyarakat dan pemanfaatan teknologi.

3. **Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan,** berarti peningkatan ketahanan pangan; peningkatan kualitas lingkungan; peningkatan ketahanan sosial budaya; peningkatan ketentraman dan ketertiban; peningkatan kondusifitas daerah; peningkatan partisipasi masyarakat dalam agenda politik; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; peningkatan kemampuan adaptif daerah; peningkatan konservasi cagar budaya.

   Dalam tahap 2025-2029 misi 3 memandu arah: (1) pengendalian pencemaran dan pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkuler; (2) penyelesaian pembangunan sarana prasarana persampahan; (3) peningkatan kesadaran kolektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; (4) penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang komprehensif; (5) pengembangan pertanian perkotaan terintegrasi untuk kemandirian pangan lingkungan; serta (7) penguatan peran masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, konservasi lingkungan, dan penurunan emisi gas rumah kaca; (8) penguatan fondasi partisipasi masyarakat untuk pelestarian cagar budaya.

4. **Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan,** berarti penguatan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa; penguatan infrastruktur konektivitas; pengoptimalan pelayanan dasar; peningkatan penyediaan hunian.

   Misi 4 ini memandu arah: (1) terwujudnya sistem infrastruktur perkotaan yang andal, merata, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan; (2) pemenuhan pelayanan dasar perkotaan yang menjamin kualitas hidup warga secara berkelanjutan; (3) penguatan konektivitas

dan keterpaduan antar kawasan untuk memperkuat fungsi ekonomi dan pelayanan; (4) penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan sesuai tata ruang; (5) pengelolaan sumber daya air dan energi yang efisien serta adaptif terhadap perubahan iklim; (6) terciptanya tata kelola ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan; dan (7) peningkatan integrasi moda dan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

5. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,** berarti penguatan penerapan tata kelola pemerintahan yang responsif, agile, akuntabel, transparan dan kondusif melalui kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai dan adaptif dengan berbagai skema, seperti Corporate Social Responsibility dan berbagai Kerjasama pihak ketiga lainnya; pengoptimalan sistem pemerintahan berbasis digital; peningkatan aksesibilitas pelayanan publik yang inklusif, serta optimalisasi dan kerja sama antar *stakeholders*.

   Dalam tahap 2025-2029 Misi 5 ini memandu arah: (1) terbangunnya sistem pemerintahan yang berintegritas, profesional, dan adaptif; (2) penguatan transformasi digital untuk mempercepat proses bisnis pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik; (3) pengembangan skema pembiayaan pembangunan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan; (4) perluasan partisipasi dan akses masyarakat dalam proses perumusan kebijakan serta evaluasi layanan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi aparatur; (6) peningkatan kolaborasi lintas sektor dan kerja sama antar daerah untuk memperluas dampak pembangunan; dan (7) penguatan sistem pengawasan internal yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi serta memastikan kinerja pemerintahan yang optimal.

Misi yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2025-2029 menjadi misi RPJMD Kota Magelang 2025-2029 adalah:

1. **Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat**

   Misi ini mengusung nilai masyarakat Kota Magelang diperlakukan secara hormat bermartabat, terlindungi, dan menjalani standar hidup layak. Masyarakat Kota Magelang adalah sumber daya manusia yang harus diarahkan untuk menjadi modal yang potensial bagi pembangunan Kota Magelang. Nilai-nilai agama dan budaya harus ditanamkan dan menjadi landasan dalam menjalankan kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan diri, mempunyai harga diri dan derajat kemanusiaan yang luhur. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan keistimewaan dalam pelayanan. Itu semua dalam rangka menjaga martabat masyarakat tetap terjunjung tinggi.

   Transformasi sosial menjadi semangat utama misi ini, dengan menempatkan keadilan sosial dan partisipasi warga sebagai prinsip dasar pembangunan. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi perlindungan, tetapi juga mendorong perubahan struktural dalam pola relasi sosial dan distribusi layanan, agar masyarakat yang rentan dapat berdaya secara setara dan bermartabat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kota berkewajiban mengatasi ketimpangan sosial dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat. Melalui layanan yang inklusif dan berkualitas, hak-hak warga negara -terutama perempuan dan keluarga- dapat lebih terlindungi, sehingga berkontribusi pada meningkatnya kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.

   Oleh karena itu, misi ini menjadi payung dari upaya menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan akses layanan dasar bagi kelompok rentan, memperkuat ketahanan keluarga, serta melindungi masyarakat dari kerentanan sosial ekonomi.

2. **Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan**

Masyarakat yang berkualitas, harmonis, bermartabat membutuhkan wadah yang nyaman, yaitu lingkungan tempat tinggal yang sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu dukungan infrastruktur yang memadai diperlukan sebagai katalis percepatan proses pembentukan kondisi masyarakat yang dikehendaki. Inovasi dalam penyediaan infrastruktur mutlak menjadi prioritas. Guna mendukung kualitas inovasi maka penerapan prinsip dan konsep kota cerdas tetap akan ditempuh. Infrastruktur yang cerdas menjadi salah satu faktor pendukung mitigasi perubahan iklim. Penyediaan infrastruktur juga mencakup infrastruktur digital guna mendukung implementasi konsep kota cerdas.

Misi ini menekankan penguatan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas, mitigasi bmisitujuaencana, dan daya saing Kota Magelang, termasuk transportasi publik, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta infrastruktur hijau yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Misi ini juga mengupayakan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah sirkuler, penurunan gas emisi rumah kaca, dan pemasyarakatan pemanfaatan energi terbarukan. Selain itu, penguatan sistem ketahanan pangan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi lahan perkotaan, distribusi pangan yang efisien, dan pengurangan limbah pangan.

Misi ini hendak mewujudkan pembangunan sarana prasarana yang terkoneksi dengan upaya menurunkan risiko bencana, meningkatkan ketahanan lingkungan, serta memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

3. **Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama**

Hubungan harmonis antar umat beragama bermakna terjalinnya hubungan yang baik, saling menghormati, saling memahami, saling menyayangi, selalu berbuat baik, berkata lemah lembut, dan sopan santun. Masing-masing agama pasti mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu berbagai kebaikan dan kemajemukan harus selalu dijaga sebagai modal utama terwujudnya wilayah Kota Magelang yang lebih kondusif.

Misi ini memerlukan penguatan kohesi sosial melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan literasi digital untuk menyaring informasi dan mencegah disinformasi yang dapat memicu konflik sosial. Pelestarian Cagar Budaya (CB), seperti situs bersejarah dan tempat ibadah, serta Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), seperti seni, ritual adat, dan tradisi lokal, menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan menanamkan nilai toleransi dalam masyarakat. Keberlanjutan warisan budaya ini berperan penting dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan memperkuat identitas masyarakat di tengah keberagaman. Oleh karena itu, misi ini menjadi payung bagi pengembangan Kota Magelang yang kondusif, aman, tertib, serta stabil secara sosial, sekaligus mencegah konflik berbasis keberagaman melalui penguatan nilai budaya sebagai perekat sosial.

Keharmonisan yang dibangun bukan hanya sebagai kondisi sosial yang stabil, tetapi juga bagian dari transformasi sosial, yakni perubahan menuju masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan saling memahami. Proses ini diperkuat melalui penguatan institusi budaya dan ruang dialog antar kelompok, yang menjadi fondasi tatanan sosial yang lebih resilien terhadap disinformasi, polarisasi, dan konflik identitas.

4. **Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas**

Misi ini untuk menghasilkan Masyarakat Kota Magelang yang sehat terdidik, terampil dan produktif. Misi ini menekankan penguatan pendidikan, keterampilan berbasis industri, literasi

IPTEKS, serta kualitas kesehatan sebagai faktor fundamental dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing guna menghadapi transformasi ekonomi digital.

Transformasi ekonomi dalam konteks ini menuntut kapasitas individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan pola kerja, struktur industri, dan dinamika pasar tenaga kerja berbasis teknologi. Dalam hal ini, generasi milenial dan Gen Z memiliki peran strategis sebagai penggerak utama transformasi, karena mereka tumbuh dalam lingkungan digital, berpola pikir inovatif, serta cenderung adaptif terhadap disrupsi teknologi. Pengembangan SDM difokuskan untuk memfasilitasi potensi kreatif dan kewirausahaan generasi muda ini agar mampu menjadi pelaku ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

Namun, transformasi yang diharapkan tidak semata bersifat ekonomi, melainkan juga sosial. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia juga dimaknai sebagai proses transformasi sosial, yaitu membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab kolektif, dan semangat kebersamaan. Pendidikan, pelatihan, dan literasi digital diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial dan membentuk karakter warga yang siap menjadi agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era digital, generasi muda dipandang sebagai katalis dalam pembentukan budaya digital yang inklusif dan kolaboratif, sekaligus penjaga nilai-nilai sosial yang memperkuat integrasi antargenerasi dalam pembangunan kota.

5. Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing

Pengelolaan berbagai obyek yang menjadi roda penggerak ekonomi kota harus lebih dioptimalkan agar bisa menjadi sumber pendapatan kota yang pada akhirnya memberi manfaat lebih bagi peningkatan pendapatan Masyarakat. Prioritas pada peningkatan kepariwisataan didasarkan pada upaya untuk memperoleh nilai lebih dari Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. Aksesibilitas dari dan ke kota menjadi lebih baik dengan adanya pintu masuk dan keluar Jalan Tol Bawen-Yogyakarta serta didukung adanya konektivitas antar wilayah Gelang Manggung. Misi ini memayungi upaya penguatan sektor perdagangan, industri kreatif, peningkatan kemudahan investasi, pariwisata, pemberdayaan UMKM dan perdagangan berbasis digital, untuk meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Transformasi ekonomi menjadi fondasi misi ini, dengan mendorong pengembangan struktur ekonomi kota menuju sektor perdagangan dan jasa dengan penguatan ekonomi kreatif yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Pengembangan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi dan perluasan kesempatan usaha bagi masyarakat luas.

Dalam konteks ini, generasi milenial dan Gen Z mengambil peran dalam sektor ekonomi kreatif dan digital. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi, menciptakan inovasi produk, serta membangun jaringan usaha melalui platform digital agar menjadi kekuatan baru dalam mendorong ekonomi lokal yang lebih adaptif dan kompetitif.

Pemerintah memberikan ruang tumbuh yang luas bagi inisiatif kewirausahaan generasi muda, termasuk dalam pengembangan UMKM digital, promosi pariwisata, serta partisipasi aktif dalam ekosistem industri kreatif.

6. Misi 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan adalah seperangkat alat atau tools guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta kuat secara moralitas dan menjadi modal yang tangguh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya harus diterapkan beberapa prinsip, yaitu partisipasi

masyarakat, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas. Misi ini menekankan reformasi birokrasi, transformasi digital, penguatan akuntabilitas, serta sinergi antar-lembaga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Transformasi tata kelola menjadi kata kunci dalam misi ini, mencakup perubahan menyeluruh dalam cara pemerintahan dijalankan, dari pendekatan administratif ke arah yang lebih kolaboratif, adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang lincah, terpercaya, dan mampu menjadi fasilitator perubahan sosial dan ekonomi secara simultan.

Tabel 3.3 Persandingan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Magelang 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029	RPJPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029
VISI			
Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis dan Humanis Nyaman dan Berkelanjutan	Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045
MISI			
Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul:	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1: Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global.
		Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	

RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029	RPJPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029
Misi 2: Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	Misi 4: Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan.	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang Merata dan Berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif
Misi 3: Menciptakan keharmonisan antar umat beragama.	Misi 3: Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 5: Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial, serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
		Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 1: Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif, dan Berwawasan Global.
Misi 5: Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh	Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan berbasis Sektor Unggulan yang

RPJMD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029	RPJPD KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029
	dan berdaya saing	Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Inovatif, Mandiri, dan Berkelanjutan.
			Misi 6: Menjaga Iklim Investasi yang Kondusif dan Kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
Misi 6: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas
		Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	

Penjelasan Tabel 3.3 Persandingan Misi RPJMD tersebut di atas sebagai berikut. Misi RPJMD Kota Magelang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul strategis yang mendukung dan diwarnai oleh arah kebijakan nasional, provinsi, dan jangka panjang kota. Keterkaitan ini bersifat simultan, bukan linear, yang berarti seluruh misi Kota Magelang secara bersamaan mendukung pencapaian target RPJPD Kota Magelang 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Misalnya, misi Kota Magelang dalam penguatan SDM unggul selaras dengan arah RPJPD yang menekankan pembentukan karakter dan daya saing, mendukung RPJMN dalam penguatan SDM inklusif dan berkualitas, serta mendukung RPJMD Provinsi dalam mencetak SDM mandiri dan kompetitif. Misi pengembangan infrastruktur inovatif dan ramah lingkungan di Kota Magelang juga sejalan dengan visi RPJPD untuk infrastruktur cerdas, mendukung RPJMN dalam percepatan infrastruktur hijau dan adaptif, serta mendukung RPJMD Provinsi dalam pemerataan infrastruktur yang responsif. Selanjutnya, misi ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Magelang mendukung ekonomi lokal dan industri kreatif dalam RPJPD, hilirisasi industri di RPJMN, dan penguatan UMKM serta pariwisata di RPJMD Provinsi. Misi harmoni sosial Kota Magelang mendukung RPJPD dalam memperkuat toleransi, RPJMN dalam menjaga ideologi Pancasila dan HAM, serta RPJMD Provinsi dalam menjaga stabilitas dan keberagaman budaya. Sementara itu, misi tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Magelang mendukung digitalisasi dan pelayanan publik dalam RPJPD, reformasi birokrasi dalam RPJMN, serta pemerintahan yang responsif

dan transparan dalam RPJMD Provinsi. Dengan demikian, misi RPJMD Kota Magelang secara substantif menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya arah pembangunan daerah, provinsi, dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

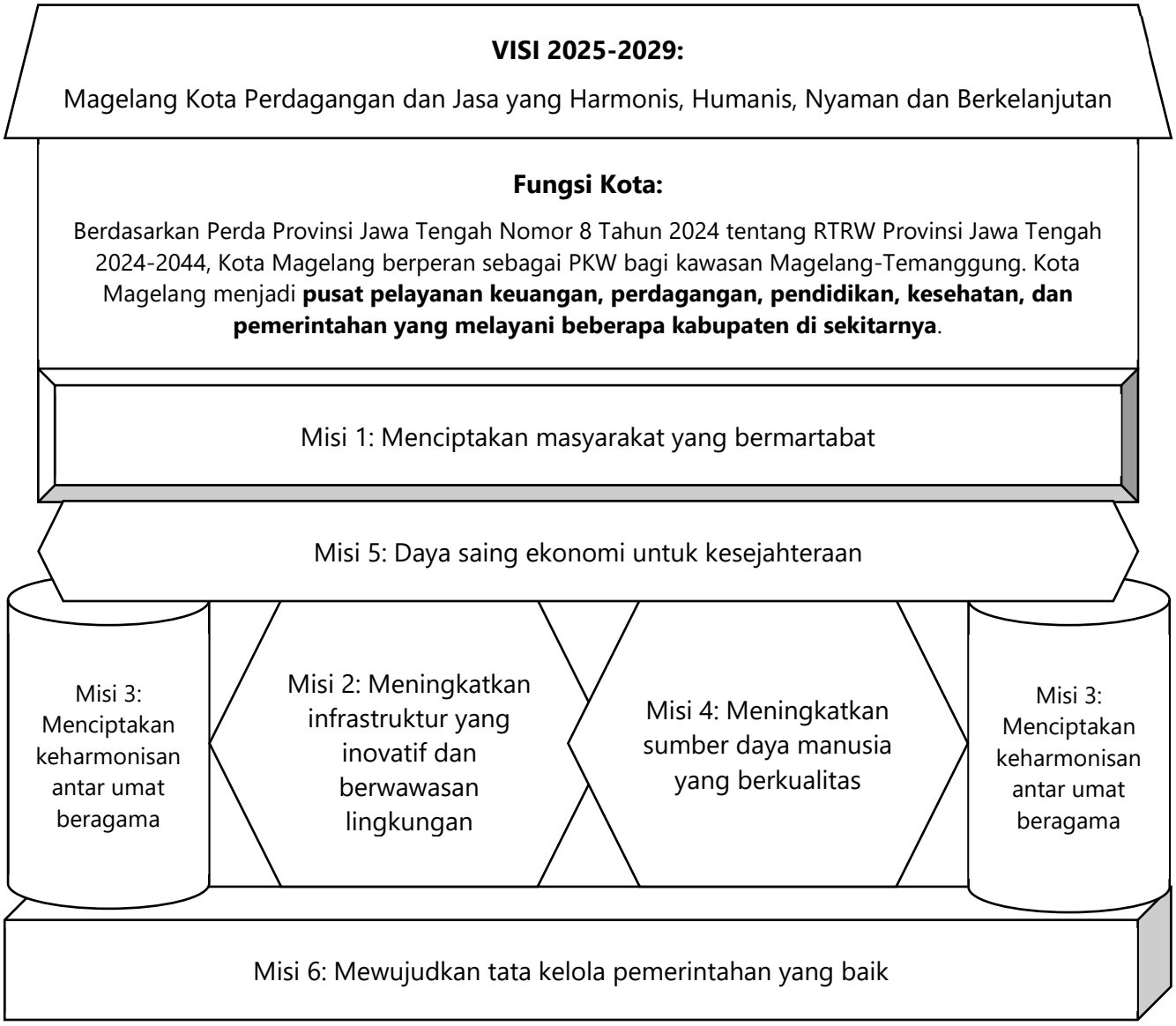
Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, rekomendasi KLHS memuat dua hal, yaitu sasaran pokok dan rekomendasi program. Rekomendasi terhadap visi dan misi Kota Magelang dalam RPJMD didekati dari kedua hal tersebut seperti termuat pada dokumen KLHS RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029.

Tabel 3.4 Keselarasan Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan Rekomendasi KLHS

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029	**Rekomendasi KLHS**
Misi	**Sasaran Pokok**
Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat	Sasaran 1: Optimalnya upaya pemberantasan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang matang
Misi 2: Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM
	Sasaran 5: Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan melalui pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan efisiensi SDA
Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama.	
Misi 4: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Sasaran 2: Kualitas SDM yang optimal melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender
Misi 5: Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	Sasaran 4: Ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan
Misi 6: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Sasaran 6: Optimalnya kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi

3.1.2.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Kerangka logis proses perwujudan Visi 2025-2029 digambarkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Struktur Kerangka Pencapaian Visi

Penjelasan Gambar 3.1 Struktur kerangka Pencapaian Visi sebagai berikut. Dalam konteks pencapaian visi "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan", dapat dijelaskan alur proses bisnis (Proses Manajemen, Proses Pendukung, dan Proses Inti) sebagai berikut.

1. Misi 6 Tata Kelola Pemerintahan sebagai Proses Manajemen menjadi pondasi utama yang mengatur dan memastikan keberjalanan kebijakan.
   a. Peran: Sebagai fondasi, proses ini berfungsi untuk menciptakan sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan inovatif guna memastikan seluruh kebijakan dan layanan publik berjalan optimal.
   b. Kegiatan: Meliputi perencanaan strategis, pengawasan, reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, serta penguatan sistem akuntabilitas dan manajemen risiko.
2. Misi 3 Menciptakan keharmonisan antar umat beragama (Kondusifitas Wilayah) sebagai Proses Pendukung berfungsi menciptakan ekosistem yang stabil untuk menunjang pertumbuhan.

a. Peran: Berfungsi sebagai pilar penyangga, memastikan Kota Magelang tetap kondusif bagi investasi melalui stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

b. Kegiatan: Penguatan peran keamanan dan ketertiban umum, pengelolaan konflik sosial, harmonisasi antar umat beragama untuk mendukung aktivitas ekonomi.

3. Misi 2 Meningkatkan Infrastruktur yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan untuk membangun fondasi pertumbuhan kota

   a. Peran utama: Menyediakan infrastruktur yang berkelanjutan, efisien, dan mendukung ekonomi hijau untuk memperkuat daya saing kota.

   b. Fokus: Penguatan transportasi publik, pengelolaan drainase dan sanitasi, optimalisasi ruang terbuka hijau, serta pembangunan infrastruktur digital dan energi ramah lingkungan.

   c. Dampak terhadap visi: Infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan akan menciptakan kota yang nyaman, aman, resilien, dan berdaya saing, mendukung konektivitas perdagangan dan jasa, serta meningkatkan ketahanan lingkungan.

4. Misi 4 Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai Proses Inti yang Membangun Daya Saing Individu

   a. Peran utama: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi individu agar siap menghadapi tantangan di sektor perdagangan, jasa, dan industri berbasis ekonomi kreatif.

   b. Fokus: Pendidikan, keterampilan tenaga kerja, kesehatan masyarakat, serta inovasi dan literasi digital.

   c. Dampak terhadap visi: SDM yang unggul dan sehat akan meningkatkan produktivitas ekonomi, mendorong inovasi, serta memastikan keberlanjutan daya saing Kota Magelang sebagai pusat jasa dan perdagangan.

5. Misi 5 Pengembangan daya saing ekonomi untuk kesejahteraan sebagai Proses Inti yang Menggerakkan Aktivitas Perdagangan dan Jasa

   a. Peran utama: Mengembangkan ekosistem ekonomi yang mendorong investasi, mendukung UMKM, serta memperkuat sektor perdagangan dan jasa sebagai core business kota.

   b. Fokus: Penguatan industri kreatif, optimalisasi sektor perdagangan dan jasa, peningkatan investasi, serta penguatan daya saing ekonomi daerah.

   c. Dampak terhadap visi: Ekonomi yang berkembang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat posisi Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang kompetitif.

6. Misi 1 Menciptakan masyarakat yang bermartabat sebagai Proses Inti yang Menciptakan aksesibilitas, perlindungan dan kesejahteraan bagi Masyarakat

   a. Peran utama: Menyediakan layanan dasar dan perlindungan bagi masyarakat agar kesejahteraan dan kenyamanan hidup meningkat.

   b. Fokus: akses kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan layanan sosial, serta penyediaan pelayanan dasar yang memberikan perlindungan sosial dan keberlanjutan kehidupan yang nyaman sejahtera

   c. Dampak terhadap visi: Layanan publik yang optimal akan menciptakan masyarakat yang harmonis, humanis, serta meningkatkan kenyamanan rakyat Kota Magelang sebagai tempat tinggal dan berusaha.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sementara definisi dalam Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 menyebutkan bahwa tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi 5 tahun. Sedangkan sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya tujuan RPJMD.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kondisi yang merupakan *ultimate outcome* dari rangkaian kinerja pembangunan daerah sebagai tujuan Pembangunan dengan turunannya sebagai sasaran pembangunan jangka menengah. Cascading visi, tujuan dan sasaran dan memperhatikan arahan misi RPJMD kota Magelang tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Turunan Tujuan dan Sasaran dari Unsur Visi Kota Magelang 2025-2029

Penjelasan Gambar 3.2 Turunan Unsur Visi ke Dalam Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut.

Visi Kota Magelang 2025-2029, yaitu "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan", merupakan pernyataan arah pembangunan jangka menengah yang holistik dan mencerminkan keunggulan lokal, karakter sosial, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Untuk menjamin implementasi visi secara terukur, maka visi ini diturunkan ke dalam empat tujuan dan tujuh sasaran pembangunan daerah melalui pendekatan normatif (sesuai amanat perencanaan nasional dan potensi lokal) serta logis (berbasis keterkaitan sebab-akibat antara sasaran dan arah visi).

1. **Kota Perdagangan dan Jasa**

   Diturunkan dalam Tujuan 1 dan Sasaran 1. Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam unggulan, sehingga pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sektor tersier seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata. Oleh karena itu, visi diarahkan untuk memperkuat peran Magelang sebagai simpul ekonomi jasa tingkat regional.

   Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional. **Indikator:** Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional

   1.1. Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa. Indikator: Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

Dasar pemikiran rumusan tujuan dan sasaran ini adalah bahwa sektor perdagangan dan jasa menjadi penggerak utama ekonomi Kota Magelang dengan daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusinya diukur dari persentase sumbangan sektor terkait terhadap PDRB tahunan. Sebagai simpul layanan ekonomi regional yang melayani Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, penguatan sektor ini langsung memperkuat posisi kota dalam jejaring perdagangan Jawa Tengah. Peningkatan kontribusi sektor ini mencerminkan keberhasilan mewujudkan visi Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa.

2. Humanis dan Harmonis

Unsur visi ini akan dicapai dengan 1 tujuan dan 3 sasaran. Kerangka pemikiran yang melandasi sebagai berikut. Nilai-nilai sosial seperti kohesi, inklusi, dan solidaritas menjadi kunci bagi stabilitas dan produktivitas masyarakat urban. Humanisme dalam visi menghendaki peningkatan kualitas SDM dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, sedangkan keharmonisan sosial ditopang oleh kerukunan dan pelestarian budaya.

Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, dengan **Indikator**: Tingkat Kemiskinan.

2.1. Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia, dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

2.2. Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini

2.3. Sasaran 2.3: Terwujudnya Daerah yang Kondusif Berbasis Harmoni Sosial dengan indikator: Jumlah Kejadian Konflik SARA

Pemilihan rumusan tujuan dan sasarannya, beserta indikatornya, didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat yang sejahtera dan harmonis adalah syarat utama pembangunan berkelanjutan. Indikator-indikator sosial ini menjadi barometer apakah pembangunan tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan berkeadilan. Unsur visi Harmoni dan Humanis secara strategis mengarah pada ketahanan sosial-ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang tercermin dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia) menempati posisi sentral sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan. IPM mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan ekonomi (pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Peningkatan IPM tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan investasi pada manusia, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan karakter masyarakat yang toleran, produktif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kota Magelang yang mendorong peningkatan IPM secara merata di seluruh lapisan masyarakat akan menciptakan ruang tumbuh bagi kohesi sosial, partisipasi aktif, dan pengurangan ketimpangan, yang merupakan fondasi utama dari visi masyarakat yang humanis dan harmonis.

Ketahanan ekonomi dibangun melalui penguatan kesempatan kerja, penciptaan wirausaha baru, penguatan UMKM, penguatan industri ekonomi kreatif serta peningkatan kapasitas SDM yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga mampu menurunkan ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan akses antar kelompok, termasuk ketimpangan gender.

Pemajuan budaya lokal memegang peranan penting sebagai landasan harmoni sosial dan penguatan identitas kolektif. Upaya pelestarian cagar budaya, pengembangan seni tradisional, serta pewarisan nilai-nilai kearifan lokal tidak hanya memperkuat jati diri masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kohesi sosial dan mencegah konflik. Ketika budaya lokal dijadikan kekuatan strategis pembangunan, maka akan tercipta ruang interaksi sosial yang inklusif dan toleran, yang pada akhirnya meningkatkan kondusifitas daerah secara menyeluruh.

Masyarakat yang demikian akan menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah secara berkelanjutan. Kondisi yang demikian kondusif bagi keberhasilan pembangunan daerah 2025-2029.

3. Nyaman dan Berkelanjutan

Pencapaian unsur visi nyaman Berkelanjutan diupayakan melalui perwujudan kenyamanan kota mencakup aspek fisik (infrastruktur, transportasi, ruang publik) dan lingkungan. Sedangkan keberlanjutan diturunkan dalam aspek mitigasi bencana, pengendalian emisi, ketahanan pangan, dan pengelolaan ruang.

Pencapaian unsur visi nyaman dan berkelanjutan diupayakan melalui perwujudan kenyamanan kota yang mencakup aspek fisik seperti infrastruktur, transportasi, ruang publik, serta kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, keberlanjutan dimaknai sebagai kemampuan kota dalam menjamin keberlangsungan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi melalui mitigasi risiko bencana, pengendalian emisi, ketahanan pangan, dan pengelolaan ruang yang adaptif. Oleh karena itu dirumuskan Tujuan 3, dengan Sasaran 3.1 dan 3.2.

Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan, dengan **indikator**: Nilai Livable City

3.1. Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator: Nilai Kepuasan layanan infrastruktur.

3.2. Sasaran 3.2: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan indikator: Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Pangan, dan Kontribusi Penurunan emisi GRK kumulatif.

Kualitas infrastruktur mencakup infrastruktur konektivitas dan perhubungan (seperti jalan, angkutan umum, jalur pejalan kaki, dan jaringan transportasi terpadu), permukiman beserta lingkungannya (perumahan layak huni, air bersih, sanitasi, drainase), serta sarana dan prasarana publik yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan olahraga masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang terpadu dan terjangkau menjadi prasyarat terciptanya kehidupan kota yang nyaman, produktif, dan inklusif, sekaligus mampu mereduksi ketimpangan spasial antar wilayah kota.

Ketahanan daerah dibangun melalui perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana, penyediaan infrastruktur konektivitas dan perhubungan yang tangguh (jalan, angkutan umum, jalur pejalan kaki, dan transportasi terpadu), serta permukiman layak huni yang dilengkapi air bersih, sanitasi, dan drainase memadai.

Ketahanan pangan diperkuat dengan menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, aksesibilitas, dan pola konsumsi yang seimbang serta mengatasi adanya limbah pangan (*food loss* dan *food waste*). Program edukasi gizi di tingkat keluarga dan sekolah menjadi bagian dari strategi untuk membentuk pola konsumsi sehat dan berkelanjutan didukung oleh pengembangan teknologi hasil pangan serta penyediaan pangan segar yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Upaya tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang berkualitas dari ketersediaan akses jalan, jembatan, dan transportasi untuk kelancaran distribusi pangan; pasar dan sentra logistik yang memadai; serta jaringan air bersih dan sanitasi yang mendukung keamanan pangan. Ketersediaan infrastruktur yang terpadu dan merata bukan hanya memperlancar distribusi dan akses pangan, tetapi juga memastikan setiap wilayah kota memiliki kemampuan yang setara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Lingkungan hidup dijaga melalui pengendalian pencemaran, konservasi ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah secara terpadu, pengendalian banjir dengan pendekatan alam, serta mengembangkan ekonomi sirkuler untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Seluruh upaya

ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti sistem drainase perkotaan yang terintegrasi, fasilitas pengolahan sampah modern, taman kota dan jalur hijau yang berfungsi ganda sebagai ruang publik, serta infrastruktur pengendalian banjir berbasis ekosistem. Ketersediaan infrastruktur tersebut memungkinkan pengurangan emisi GRK, peningkatan kualitas udara, dan terjaganya keseimbangan ekosistem kota secara berkelanjutan

Keberadaan infrastruktur yang terpadu, merata, dan terjangkau menjadi prasyarat penting untuk menciptakan kehidupan kota yang nyaman, produktif, dan inklusif. Pembangunan ini sekaligus menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan spasial antarwilayah, meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi, dan memperkuat daya lenting Kota Magelang terhadap berbagai tantangan masa depan.

Namun demikian, kenyamanan dan keberlanjutan kota tidak akan tercapai tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pelayanan publik yang efisien, akuntabel, serta inklusif. Pemerintahan yang responsif dan birokrasi yang profesional menjadi pengungkit utama dalam memastikan tercapainya kualitas hidup masyarakat secara merata. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, transparansi pengelolaan anggaran, efektivitas koordinasi antar-perangkat daerah, serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan publik menjadi bagian integral dari visi ini.

Pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi digital, percepatan waktu layanan, dan peningkatan kepuasan pengguna, merupakan indikator penting kota yang nyaman dan modern. Dalam jangka panjang, pemerintahan yang inklusif dan akuntabel akan menjamin terciptanya kepercayaan publik, menjaga stabilitas sosial, dan mempercepat keberhasilan agenda pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dirumuskan Tujuan 4, dengan sasaran 4.1 sebagai berikut:

Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi.

4.1. Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator: SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Indeks Pelayanan Publik.

Birokrasi yang efektif merupakan *enabler* atau pengungkit utama dari seluruh tujuan pembangunan. Reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik menjadi aspek strategis dalam mengeksekusi visi pembangunan yang tidak hanya fokus pada output fisik dan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan pelayanan bagi seluruh warga kota.

Dengan demikian, visi Nyaman dan Berkelanjutan bukan hanya berbasis pada aspek fisik dan ekologis, tetapi juga dibangun melalui tata kelola yang andal, partisipatif, dan akuntabel sebagai fondasi transformasi kota Magelang menuju masa depan yang lebih berkualitas.

Tabel 3.5 Unsur Visi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Urusan Penanggungjawab

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unsur Visi: Kota Perdagangan dan Jasa									
Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional	%	19,62	19,63	19,65	19,66	19,67	19,69	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)
Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	%	65,86	66,07	66,29	66,52	66,77	66,89	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)
Unsur Visi: Humanis dan Harmonis									
Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Angka	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing SDM	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Angka	82,63	83,09	83,57	84,05	84,53	85,00	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)
Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 – 4,52	3,96 – 4,38	3,88 – 4,24	3,80 – 4,10	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 2)
	Rasio Gini	Angka	0,447	0,432	0,417	0,402	0,387	0,372	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)
Sasaran 2.3: Terwujudnya Daerah yang kondusif Berbasis Harmoni Sosial	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Angka	0	0	0	0	0	0	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1)

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unsur Visi: Nyaman dan Berkelanjutan									
Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Livable City	Nilai	73,40	73,76	74,12	74,48	74,84	75,20	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 2)
Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Nilai Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	3,05	3,10	3,16	3,20	3,25	3,30	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan 2)
Sasaran 3.2: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Risiko Bencana	Angka	92,32-90,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1)
	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 2)

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Target						Urusan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kontribusi Penurunan emisi GRK kumulatif	Ton CO_2eq	34.978,84	114.342,81	193.706,78	273.070,75	352.434,72	431.798,69	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 2)
Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, inklusif, akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	94,00	Koordinator: Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 1 dan Asisten 3)
Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	SAKIP	Angka	80,01	80,30	80,50	80,60	80,80	82,49	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 3)
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,610	4,615	4,620	4,625	4,630	4,630	Unsur Pendukung Urusan pemerintahan: Sekretariat Daerah (Asisten 3)

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Sementara itu, rumusan tujuan pembangunan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD.

3.2.1 Dasar Perumusan Strategi Pembangunan Daerah

Perumusan strategi RPJMD 2025-2029 memperhatikan: (1) arahan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029; (2) arah kebijakan RPJPD Kota Magelang tahap I (2025-2029); (3) Rencana Tata Ruang Wilayah, (4) Kajian lingkungan Hidup Strategis, (5) visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan walikota, dan (6) prioritas Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah juga dijadikan pertimbangan penyusunan strategi dan arah kebijakan.

Prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi acuan untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Penyusunan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Magelang juga memperhatikan arahan nasional tentang efisiensi belanja. Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Kota Magelang menempatkan efisiensi anggaran sebagai prinsip fundamental pada seluruh proses perencanaan program dan kegiatan prioritas. Pendekatan ini menekankan pentingnya efektivitas capaian pembangunan sebagai tolok ukur utama, dengan mendorong penggunaan sumber daya secara cermat, fokus pada intervensi yang memiliki nilai strategis tinggi, serta menghindari pembelanjaan yang

tidak memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang selektif, terukur, dan akuntabel. Prinsip ini juga sejalan dengan upaya memperkuat integritas fiskal daerah, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan warga kota.

Sebelum menyusun strategi pembangunan sektoral, RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Pokok-pokok arah kebijakannya terbagi menjadi kebijakan pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang Kota Magelang, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang
    a. penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan Kota Magelang menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung;
    b. pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Magelang yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing Kota Magelang;
    c. pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional; dan
    d. pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Magelang sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kebijakan pengembangan pola ruang
    a. pengoptimalan sarana perdagangan yang sudah ada dan pengembangan pusat-pusat perdagangan pada embrio ekonomi baru pada kawasan-kawasan strategis kota
    b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang handal dan profesional
    c. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk menjadikan Kota Magelang sebagai tujuan utama di bidang pendidikan (umum, kesehatan, militer, kepariwisataan dan informal)
    d. menyediakan ruang permukiman kota yang sehat, nyaman huni, aman dari bencana dan tidak merusak lingkungan
    e. menjadikan Kota Magelang menjadi tujuan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) di Jawa Tengah

Rekomendasi pada KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029, seperti termuat pada halaman 258-259, terdiri dari enam kelompok sasaran strategis seperti berikut:

1. Sasaran untuk isu kemiskinan: Optimalnya upaya pemberantasan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang matang
    a. Peningkatan efektivitas program penanganan kemiskinan
    b. Pengalokasian sumberdaya dan penganggaran dengan optimal guna pemberantasan kemiskinan
    c. Pemerataan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
2. Sasaran untuk isu kualitas SDM: Kualitas SDM yang optimal melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender
    a. Perencanaan penanganan bencana sosial

b. Optimalisasi layanan dan edukasi kesehatan dalam penanganan obesitas, napza, kebiasaan merokok, dan KB

c. Peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan digital

d. Peningkatan layanan pendidikan

e. Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

f. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak (edukasi pencegahan perkawinan anak)

3. Sasaran untuk isu kualitas sarana prasarana permukiman: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM

   a. Peningkatan aksesibilitas prasarana sumber air minum yang aman dan berkelanjutan

   b. Optimalisasi kualitas sarana pendidikan sesuai SNI

   c. Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi umum perkotaan dengan dukungan kondisi jalan mantap

   d. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana teknologi informasi dan komunikasi

   e. Peningkatan aksesibilitas prasarana sanitasi dan persampahan yang aman dan berkelanjutan

4. Sasaran untuk isu daya saing ekonomi daerah: Ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan

   a. Peningkatan produktivitas industri manufaktur melalui *Green Industry*

   b. Pengurangan pengangguran terbuka melalui pemerataan akses lapangan pekerjaan, peningkatan upah rata-rata per jam, dan dukungan keselamatan pekerja

5. Sasaran untuk isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup: Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan melalui pengarusutamaan perubahan iklim dan efisiensi SDA

   a. Optimalisasi ketahanan pangan lokal mandiri masyarakat

   b. Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim

   c. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan dukungan kebijakan yang mendukung kepada pelestarian Lingkungan Hidup serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan

6. Sasaran untuk isu tata kelola dan layanan pemerintah: Optimalnya kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi

   a. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kerja birokrasi dalam layanan digital, penganggaran, kerjasama, dan layanan peradilan

   b. Pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kota Magelang 2025-2045. Arah Kebijakan Tahap I (Tahun 2025-2029): Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap 5 tahun pertama diarahkan pada tema pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan

kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Fokus kebijakan RPJPD Tahap 2025-2029:

1. Mewujudkan SDM unggul melalui: peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pencapaian wajib belajar tiga belas tahun, penguatan layanan kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, pemenuhan sarana-prasarana, pengendalian penyakit, ketahanan gizi, ketahanan pangan, jaminan kesehatan universal, dan pengembangan SDM jasa kesehatan unggulan.
2. Mewujudkan perekonomian inklusif dan berdaya saing melalui penguatan infrastruktur IPTEK, inovasi industri, ekonomi kreatif, kewirausahaan, koperasi, BUMD, ketenagakerjaan, infrastruktur digital, stabilitas harga, potensi pajak, serta kelembagaan dan SDM bank daerah.
3. Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan lingkungan, persampahan, energi terbarukan, kelembagaan konservasi, kesiapsiagaan bencana, serta strategi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan ketahanan pangan.
4. Mewujudkan infrastruktur adaptif dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan jalan, drainase, sanitasi, perlindungan sumber air, pengelolaan ruang, pembangunan perkotaan, hunian layak, transportasi publik, serta konektivitas kawasan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik berkualitas, digitalisasi, penguatan ASN, kelembagaan, kolaborasi antar daerah, serta pengawasan internal yang berintegritas, adaptif, dan bebas korupsi.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dokumen RPJMD ini disusun dengan memperhatikan dan mengintegrasikan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai acuan strategis dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Integrasi RIPJPID dimaksudkan agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan berbasis pada pendekatan ilmiah, pemanfaatan hasil riset, serta pengembangan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah secara berkelanjutan.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kota Magelang merupakan bagian integral dari penyusunan RPJMD yang berfungsi sebagai landasan strategis pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini menekankan pentingnya IPTEK dalam menciptakan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), mendorong inovasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansi, RIPJPID memberikan panduan untuk: (1) rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk perumusan program yang lebih akurat dan terukur; (2) pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung peningkatan daya saing produk unggulan daerah; dan (3) penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk menjawab permasalahan utama pembangunan daerah secara kontekstual dan berkelanjutan. Sasaran strategis RIPJPID mencakup peningkatan kapasitas riset, kualitas SDM, daya saing daerah, partisipasi masyarakat, dan pengurangan kemiskinan melalui penerapan IPTEK yang relevan dan aplikatif.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kebijakan pembangunan yang akuntabel dan berbasis bukti, RIPJPID juga selaras dengan mandat pengembangan dan pemanfaatan *Satu Data Daerah*. Integrasi data yang akurat, terbuka, dan terstandar menjadi prasyarat utama dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi, serta memastikan bahwa rekomendasi kebijakan IPTEK dapat diterapkan secara tepat sasaran. *Satu Data Daerah* berperan penting dalam menyediakan infrastruktur data yang diperlukan bagi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, termasuk dalam mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjawab permasalahan utama daerah dan memperkuat daya saing produk unggulan lokal. Dalam konteks ini, urgensi integrasi data spasial dan statistik dalam *Satu Data*

Daerah menjadi kunci untuk menghadirkan informasi yang utuh serta mampu menggambarkan kondisi faktual wilayah, sehingga mendukung perumusan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap pembangunan daerah.

Perumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan supaya memberi ruang penyesuaian dukungan pada mandat prioritas Provinsi Jawa Tengah yang yang sesuai dengan konteks dan kewenangan kota, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029.

3.2.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Magelang

Strategi pembangunan Kota Magelang disusun sebagai rangkaian tindakan komprehensif, bertahap, dan berkesinambungan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan dan mewujudkan visi daerah: "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan". Penanda utama keberhasilan strategi ini adalah turunnya tingkat kemiskinan, yang ditargetkan menurun dari 5,94% menjadi 3,47-4,25 % pada akhir periode. Penurunan ini merupakan hasil akumulatif dari ketercapaian sasaran utama lainnya, seperti peningkatan kualitas SDM, produktivitas daerah (laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan penurunan pengangguran), serta penguatan daya saing dan ketahanan kota baik sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologi.

Strategi ini disusun selaras dengan arah RPJMN 2025-2029 serta amanat dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengintegrasikan kebijakan nasional penghapusan kemiskinan ke dalam perencanaan daerah.

Perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Seluruh strategi dikembangkan dengan dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dan berbasis pada pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau Data kemiskinan yang akurat.

Kedua regulasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dan penguatan peran TKPK Kota dalam merancang, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, strategi Kota Magelang juga memprioritaskan perbaikan tata kelola dan basis data kemiskinan berbasis Data Kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara terpadu lintas sektor dan perangkat daerah.

Strategi Penurunan Kemiskinan (SPK) dibagi ke dalam empat kerangka strategi. Seluruh kerangka strategi ini dirancang untuk memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, multisektor, dan berbasis data kemiskinan yang akurat, dengan pelibatan aktif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020.

Strategi Pengentasan Kemiskinan (SPK) Kota Magelang sebagai berikut:

1. SPK 1: Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.
    a. Bantuan Sosial Berbasis Individu

        Prioritas intervensi ini bersifat sebagai jaring pengaman bagi kelompok miskin dan rentan miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Bantuan sosial berbasis individu dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin sehingga mereka dapat mempertahankan taraf hidup, khususnya dalam menghadapi krisis ekonomi, bencana, maupun kondisi darurat lainnya.

b. Pembentukan Jaring Pengaman Kemiskinan Kota

Pembentukan jaring kemiskinan dirancang dengan tujuan untuk melindungi masyarakat miskin yang rentan akan guncangan sosial maupun ekonomi, serta untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Strategi ini juga sebagai respons adanya penduduk miskin yang tidak terjangkau bantuan sosial akibat *exclusion error*. Intervensi yang dilakukan dapat berupa (1) Pengembangan sistem deteksi dini (*Early Warning System*), Pelaporan, dan Verifikasi Cepat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan kemiskinan secara sigap. Sistem ini dapat memanfaatkan informasi dari lingkungan sekitar seperti pada tingkat kelurahan hingga RT/RW untuk mengantisipasi kondisi yang dapat memperburuk kemiskinan penduduk. Proses verifikasi dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat sehingga intervensi bantuan dapat diberikan dengan segera kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah berikutnya adalah (2) Respons Bantuan Darurat dan Program Pemulihan Pendapatan. Strategi ini menekankan pada penyediaan bantuan sesegera mungkin bagi masyarakat yang terkena kejadian tak terduga, seperti bencana alam atau kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan pangan, perlengkapan mendasar, maupun bantuan tunai/non tunai untuk mengatasi kebutuhan selama periode krisis. Setelah fase darurat tersebut teratasi, langkah selanjutnya dapat diarahkan pada pemulihan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, ataupun fasilitasi akses kepada UMKM mandiri/perusahaan mitra. Langkah terakhir yaitu (3) Pengembangan Sistem Pelaporan dan Evaluasi. Strategi ini berfokus pada penguatan mekanisme pelaporan dan evaluasi jaring pengaman kemiskinan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Sistem ini memungkinkan pemerintah terkait untuk dapat memantau realisasi bantuan dan memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan sasaran. Langkah evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program yang dilakukan, dan untuk menilai dampak yang diberikan terhadap angka kemiskinan dan menjadi masukan untuk program selanjutnya.

c. Penguatan Program Perlindungan Sosial

Program ini ditujukan khususnya bagi kelompok berkebutuhan khusus, seperti lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu kelompok ini adalah menyediakan layanan sosial yang memadai, memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Intervensi ini dapat dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk di dalamnya adalah dukungan dari keluarga, kerabat, rukun tetangga /rukun warga (RT/RW), dan pemerintah desa/kelurahan setempat.

d. Perluasan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Bagi penduduk miskin, aspek kesehatan menjadi aspek yang sangat penting, sehingga aspek ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun pihak terkait. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perluasan bantuan iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya. Melalui langkah ini, pemerintah daerah dapat berupaya memastikan penduduk miskin untuk dapat terlindungi dari risiko finansial akibat terkena penyakit atau kecelakaan.

e. Pemberian Bantuan Pendidikan/Beasiswa

Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa khususnya bagi penduduk miskin untuk dapat memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan minimal pada jenjang menengah dan mencegah risiko putus sekolah. Bantuan ini dapat berupa beasiswa bagi siswa miskin serta beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa miskin berprestasi. Beasiswa siswa miskin tidak hanya

berfungsi untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga dapat meningkatkan peluang anak-anak untuk memperoleh masa depan yang lebih layak sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Sementara itu, beasiswa pendidikan tinggi bagi siswa miskin ditujukan untuk memastikan bahwa siswa miskin yang memiliki potensi dapat mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas dan mengembangkan potensi mereka menjadi sumber daya produktif. Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang memiliki hambatan finansial dikarenakan kondisi keluarga yang tidak berkecukupan. Maka dari itu, bantuan yang diberikan dapat berupa kebutuhan utama untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, seperti biaya kuliah (UKT/SPP) dan biaya hidup selama periode studi.

f. Pemberian Bantuan Subsidi yang Bersifat Konsumsi secara Berkelanjutan

Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bantuan konsumsi bagi rumah tangga miskin dan rentan secara berkala, sehingga kebutuhan dasar sehari-hari mereka dapat terpenuhi. Bentuk bantuan yang diberikan berupa bantuan pangan non tunai, seperti subsidi pangan atau kebutuhan pokok lainnya yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh penerima bantuan. Program ini tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban pengeluaran penduduk miskin, namun juga dapat menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat secara umum terutama dalam masa krisis atau saat terjadi fluktuasi harga pangan.

g. Penguatan Literasi Keuangan Keluarga

Kemiskinan dapat dipicu oleh kelemahan dalam pengelolaan keuangan pada tingkat rumah tangga. Hal ini tercermin mulai dari ketidakmampuan masyarakat dalam membuat anggaran rumah tangga, tidak adanya pencatatan pengeluaran, tidak memisahkan urusan keuangan rumah tangga dan usaha, serta kecenderungan pada pengeluaran konsumtif. Kondisi-kondisi ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga merupakan persoalan pola pikir, perilaku, dan keterampilan pengambilan keputusan finansial masing-masing individu. Dengan demikian, maka diperlukan strategi penguatan ketangguhan ekonomi keluarga yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pemahaman akan pengelolaan keuangan memiliki tujuan jangka panjang agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi berbagai situasi. Literasi keuangan dalam konteks ini mencakup pembentukan pola pikir keuangan yang sehat, kemampuan menyusun anggaran rumah tangga, mengidentifikasi dan membedakan utang produktif maupun konsumtif, menyisihkan tabungan dan menyiapkan dana darurat hingga investasi sederhana, memanfaatkan bantuan secara produktif, dan merencanakan keuangan jangka panjang dan strategi menghadapi krisis.

2. SPK 2: Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin.

a. Program UMKM Naik Kelas

Program "UMKM Naik Kelas" disusun sebagai strategi komprehensif dengan tujuan untuk mendorong pelaku UMKM mikro (khususnya dari keluarga prasejahtera) untuk meningkatkan skala usaha, produktivitas, akses pasar, dan legalitas. Program ini disusun agar UMKM mampu naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Program ini diawali dengan pemetaan dan seleksi UMKM potensial di seluruh kelurahan di setiap kecamatan yang ada di Kota Magelang untuk mengidentifikasi pelaku usaha dengan prospek pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya, peserta yang terpilih akan diklasifikasikan berdasarkan karakteristik UMKM (Pemula, Menengah, Dan Siap Naik Kelas) dan menetapkan kelompok UMKM yang menjadi prioritas pengembangan kapasitas. Tahap selanjutnya adalah pelatihan dan pendampingan pada UMKM prioritas mulai dari (1) Pelatihan Manajemen Keuangan, *Branding*, dan *Digital*

Marketing, (2) Pendampingan Teknis Produksi, Kemasan, Dan Standar Mutu, (3) Pelatihan *Online Single Submission* Rencana Berusaha (OSS RBA) dan sertifikasi, (4) Pemberian Akses Permodalan dan Fasilitas produksi serta bahan baku, (5) Digitalisasi dan Akses Pasar seperti bantuan pendaftaran ke *marketplace*, pelatihan pembuatan konten media sosial, dan sebagainya, (6) Bantuan Legalitas & Peningkatan usaha seperti pengurusan izin NIB, PIRT, sertifikasi halal dan sebagainya, dan (7) Monitoring dan Evaluasi dengan kunjungan lapangan secara berkala, evaluasi omzet, jumlah karyawan, akses pasar, dan penilaian kenaikan kelas. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa UMKM berkembang secara terukur. Kriteria "Naik Kelas" ditetapkan berdasarkan beberapa indikator utama, seperti (1) kenaikan omzet (2) jumlah karyawan, (3) aspek legalitas/perizinan, (4) akses pasar, (5) pengelolaan keuangan, (6) digitalisasi usaha, dan (7) sistem manajemen. Sistem "Naik Kelas" akan diverifikasi oleh tim pendamping dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (DisperindagkopUM) dan diakui melalui sertifikat UMKM Naik Kelas oleh Pemkot Magelang. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan UMKM dari masyarakat miskin di Kota Magelang dapat keluar dari zona stagnasi dan tumbuh menjadi pengusaha produktif, mandiri, dan berkontribusi aktif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

b. Integrasi Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja

Integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi rumah tangga miskin melalui peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan regional. Pendekatan tidak hanya melakukan pelatihan teknis namun juga menambahkan mekanisme sertifikasi kompetensi resmi yang diakui oleh instansi terkait. Pelatihan yang diberikan dirancang berdasarkan kebutuhan sektoral sehingga lulusan dapat memiliki kompetensi yang siap digunakan, sementara itu sertifikasi memberikan legitimasi formal yang dapat memperbesar peluang untuk diterima kerja. Penempatan tenaga kerja dilakukan dengan menghubungkan lulusan pelatihan dengan kesempatan kerja nyata, melalui kerja sama dengan sektor swasta, unit usaha pemerintah/daerah, ataupun dengan penyaluran tenaga kerja pada program UMKM Naik Kelas. Dengan demikian, intervensi ini dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri akan tenaga kerja dan meningkatkan daya tawar tenaga kerja yang berasal dari penduduk miskin di pasar kerja.

c. Perluasan Lapangan Kerja

Perluasan lapangan kerja dilakukan melalui promosi investasi yang bersifat padat karya sesuai dengan potensi unggulan Kota Magelang. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja langsung dan menyerap tenaga kerja dari keluarga miskin secara maksimal. Pemerintah daerah dapat mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, insentif terarah, penyediaan kawasan usaha, dan asosiasi industri. Program ini terintegrasi dengan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, sehingga SDM lokal siap mengisi lapangan kerja yang tercipta, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kota Magelang.

3. SPK 3: Mengurangi Kantong-Kantong Kemiskinan.

a. Penyediaan Akses Sanitasi yang Layak

Program penyediaan akses sanitasi yang layak menjadi salah satu prioritas intervensi yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin melalui perbaikan infrastruktur dasar. Upaya ini meliputi (1) Penyediaan dan Pelayanan Air Bersih dan (2) Mendukung Penyediaan Tangki Septik dan Fasilitas MCK. Kedua program ini secara umum sudah dikembangkan pada periode sebelumnya, artinya sebenarnya tidak harus memulai program dari nol. Namun, diperlukan penataan dan perbaikan bagi program yang sudah

berjalan. Penyediaan dan pelayanan air bersih dan sanitasi sebelumnya sudah dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang dan menjadi standar pelayanan minimal (SPM) bagi pemerintah. Ini artinya, ketersediaan air bersih dan sanitasi sudah menjadi standar minimal yang harus disediakan untuk masyarakat. Selain itu, pihak PDAM juga telah membantu memberikan akses fasilitas air bersih pada penduduk yang berada pada desil 1. Penyediaan tangki septik dan fasilitas MCK dapat dikembangkan lagi dengan memberikan antiseptik pada saluran sanitasi dan diprioritaskan pada masyarakat miskin untuk mengurangi risiko penyakit.

b. Penyediaan Rumah Layak Huni

Program ini meliputi perbaikan rumah tidak layak huni maupun pembangunan unit rumah baru untuk memenuhi standar kelayakan dan keselamatan penghuninya. Perbaikan ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dapat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Program ini juga diperkuat dengan pendampingan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang berperan dalam pemberdayaan warga, pengelolaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), serta pengelolaan dana bergulir yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perbaikan atau pengembangan hunian. Meski begitu, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti akses jalan ke lokasi kumuh dan beberapa permasalahan lain yang sulit diselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Permukiman Wilayah

Peningkatan kualitas permukiman dapat dilakukan melalui program pengelolaan sampah rumah tangga terpadu di Kota Magelang sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan sampah yang kini tidak hanya berfokus pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan ke TPA, namun juga mengutamakan pengolahan untuk mengurangi volume sampah dan memaksimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kota Magelang saat ini memiliki 6 unit TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) yang dapat dioptimalkan sebagai pusat pengolahan, yang mana 2 di antaranya telah dilengkapi dengan mesin pemilah sampah untuk memisahkan sampah organik dan anorganik secara lebih efisien. Pengolahan sampah organik dapat dilakukan dengan metode ramah lingkungan seperti pembuatan *eco enzyme* atau pemanfaatan maggot untuk mengurai limbah organik. Sementara itu, sampah anorganik dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

4. SPK 4: Sinergi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan.

a. Pengembangan Bank Data Mikro Kemiskinan

Program pengembangan bank data kemiskinan memiliki tujuan untuk memastikan penyaluran program-program perlindungan sosial yang telah disusun sedemikian rupa dapat berjalan dengan tepat sasaran, terukur dan akuntabel melalui pengelolaan data yang terintegrasi sistem. Upaya ini meliputi penyelarasan data kemiskinan dengan seluruh program perlindungan sosial agar informasi penerima bantuan dapat secara langsung diakses oleh sektor-sektor terkait. Pengembangan dashboard digital berbasis GIS memungkinkan pemantauan kondisi kemiskinan secara *real time*, termasuk sebaran penerima manfaat dan capaian program. Selain itu, diperlukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk menjamin informasi yang akurat. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan agar penerima bantuan memahami hak dan kewajiban mereka. Pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi juga harus terus dilakukan untuk memantau efektivitas intervensi dan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di masa depan.

b. Peningkatan Kolaborasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Program peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan diarahkan untuk menciptakan sinergi yang positif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Kolaborasi ini menjadi penting karena masih sering terjadi tumpang tindih kebijakan antar OPD yang mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan berjalan kurang efektif dan efisien. Melalui pendekatan rantai pasok dari hulu ke hilir, setiap OPD diharapkan dapat memberikan dukungan seusai dengan kewenangannya, mulai dari memberikan bantuan sosial, memberikan pelatihan kompetensi yang berjenjang, hingga menyediakan rumah layak huni dan sanitasi yang layak. Diperlukan pula orkestrasi yang harmoni di antara seluruh pihak yang mana keanekaragaman program dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, sehingga intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak maksimal dan berkelanjutan bagi penanggulangan kemiskinan di Kota Magelang.

c. Peningkatan Program Keluarga Berencana (KB) Bagi Keluarga MIskin

Program Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat miskin perlu ditingkatkan untuk menjamin kualitas tumbuh kembang anak sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga mereka. Hal ini meliputi pengendalian jumlah anak dan jarak kelahiran antar anak, pemenuhan kebutuhan gizi anak, serta lebih memfokuskan pada pendidikan dan kesehatan anak yang dapat berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia anak tersebut. Dengan penerapan KB yang lebih terencana, keluarga miskin memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari zona kemiskinan.

d. Mengoptimalkan peran dan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Mengoptimalkan peran dan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi langkah strategis untuk menahan laju inflasi yang berpengaruh langsung terhadap garis kemiskinan, khususnya dengan menjaga keterjangkauan dan kestabilan harga beras. Hal ini lantaran beras merupakan komoditas pangan utama yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin dan berkontribusi signifikan pada pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian harga beras menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat.

3.2.3 Strategi Pengelolaan Persampahan Kota Magelang

Strategi pembangunan Kota Magelang dalam bidang persampahan disusun sebagai rangkaian tindakan komprehensif, bertahap, dan berkesinambungan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan mewujudkan visi Kota Magelang: *"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan"*. Penanda utama keberhasilan strategi ini adalah meningkatnya kinerja pengelolaan sampah yang ditargetkan melalui penurunan timbulan sampah yang dibuang ke TPA, peningkatan rasio pengurangan dan penanganan sampah, serta terwujudnya kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan pada akhir periode 2029.

Peningkatan kinerja persampahan ini merupakan hasil akumulatif dari ketercapaian sasaran utama lainnya, seperti penguatan kelembagaan dan tata kelola persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pengembangan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan, serta terbangunnya ekosistem ekonomi sirkular berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R).

Strategi ini disusun selaras dengan arah RPJMN 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur nomenklatur urusan persampahan pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan mengintegrasikan target

nasional pengurangan sampah 30% dan penanganan 70% ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Prinsip utama strategi pengelolaan persampahan Kota Magelang adalah perbaikan tata kelola berbasis data persampahan yang akurat, penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi dan energi. Seluruh strategi dikembangkan dengan dukungan lintas OPD, masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan, yang difasilitasi melalui forum koordinasi persampahan daerah.

Oleh karena itu, strategi Kota Magelang memprioritaskan penguatan tata kelola, penyediaan infrastruktur memadai, inovasi pengolahan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah secara terpadu.

Strategi Pengelolaan Persampahan (SPP) Kota Magelang dibagi ke dalam empat kerangka strategi. Seluruh kerangka strategi ini dirancang untuk memperkuat efektivitas pengelolaan persampahan secara terintegrasi, multisektor, berbasis data, serta sejalan dengan target nasional dan kebutuhan lokal.

Strategi Pengelolaan Persampahan (SPP) Kota Magelang sebagai berikut:

1. SPP 1: Mengurangi Timbulan Sampah di Sumbernya
    a. Penerapan program *reduce, reuse, recycle* (3R) di rumah tangga, sekolah, perkantoran, dan kawasan perdagangan.
    b. Pengembangan bank sampah, TPS3R, dan unit usaha berbasis daur ulang.
    c. Edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai dan pemilahan sejak dari sumber.
    d. Penerapan zona bebas sampah skala kewilayahan dengan basis pemilihan sampah skala rumah tangga
    e. Insentif dan disinsentif untuk mendorong perilaku ramah lingkungan (contoh: kebijakan kantong plastik berbayar atau pengurangan retribusi bagi pelaku usaha ramah lingkungan).
2. SPP 2: Memperkuat Sistem Pengangkutan dan Penanganan Sampah
    a. Peningkatan kapasitas armada dan sarana pengangkutan sampah yang efisien dan ramah lingkungan.
    b. Optimalisasi TPS3R, TPST, dan TPA agar sesuai standar teknis pengelolaan sampah.
    c. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan persampahan
    d. Peningkatan kualitas SDM persampahan melalui peningkatan kapasitas SDM secara berkala
3. SPP 3: Mewujudkan Ekonomi Sirkular dan Inovasi Pengolahan Sampah
    a. Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular melalui kemitraan dengan sektor swasta, UMKM, dan komunitas lingkungan.
    b. Pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, *eco enzyme*, pakan maggot, atau energi terbarukan.
    c. Penguatan pasar daur ulang untuk sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
    d. Inkubasi usaha inovatif berbasis sampah sebagai sumber pendapatan masyarakat.
    e. Integrasi persampahan dengan program CSR perusahaan untuk memperkuat pendanaan alternatif.
    f. Promosi produk daur ulang dan hasil olahan sampah melalui *marketplace* digital atau event pameran ekonomi hijau.

4. SPP 4: Penguatan Tata Kelola, Data, dan Kolaborasi Lintas Sektor
    a. Pembangunan basis data persampahan terintegrasi berbasis geospasial untuk pemantauan timbulan, alur pengangkutan, dan pengolahan sampah.
    b. Pemutakhiran data dan penyusunan *dashboard* persampahan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
    c. Penguatan regulasi daerah yang mendukung pengelolaan persampahan berkelanjutan.
    d. Peningkatan kolaborasi dengan komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.
    e. Kampanye dan gerakan partisipatif, seperti *Magelang Bersih Sampah 2029*, sebagai gerakan kolektif masyarakat.
    f. Integrasi pengelolaan sampah dengan program ketahanan pangan dan ketahanan energi perkotaan (contoh: pemanfaatan kompos untuk *urban farming*, energi dari biodigester untuk kebutuhan rumah tangga).
    g. Monitoring dan evaluasi kinerja persampahan berbasis KPI yang terukur, transparan, dan dilaporkan secara periodik kepada publik.

3.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

Selanjutnya strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi: Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis Nyaman dan Berkelanjutan, dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan
	Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.	
	Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	
Misi 5. Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing		1.1.1. Penguatan ekosistem perdagangan dan jasa yang inklusif skala regional
		1.1.2. Penguatan daya saing pariwisata melalui pengembangan nilai budaya, sejarah, dan *heritage* serta ekonomi kreatif
	Tujuan 2: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	
	Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing SDM	
Misi 4. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas		2.1.1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Berdaya Saing
		2.1.2. Penguatan Kesehatan Masyarakat untuk SDM Sehat dan Produktif

Misi	Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan
		2.1.3. Penguatan Literasi Masyarakat dan IPTEKS untuk Daya Saing
		2.1.4. Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga untuk SDM yang Kompetitif
		2.1.5. Penguatan sumber daya manusia berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan humanis
	Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	
Misi 1: Menciptakan masyarakat yang bermartabat		1.2.1. Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan
		1.2.2. Pemerataan Akses dan Distribusi Pendapatan yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
	Sasaran 2.3: Terwujudnya kondusifitas daerah	
Misi 3. Menciptakan keharmonisan antar umat beragama.		1.3.1. Memperkuat ketahanan budaya dan pencegahan konflik berbasis kearifan lokal
	Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan	
	Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	
Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan		1.1.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, peningkatan konektivitas wilayah, Pemanfaatan Efisien Ruang Kota serta penyediaan prasarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat
	Sasaran 3.2.: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	
Misi 2. Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan		3.2.1. Penguatan Resiliensi Wilayah melalui Penataan Risiko Bencana, Kemandirian Pangan, dan Pengendalian Daya Dukung Lingkungan
	Tujuan 4: Terwujudnya pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel	
	Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	

Misi	Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 6. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik		4.1.1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja, Teknologi Cerdas, dan Partisipatif

Rincian strategi sebagai turunan dari arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, akan dilaksanakan selama lima tahun dengan uraian berikut.

1. **Unsur Visi Kota Perdagangan dan Jasa**

   Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional. **Indikator:** Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional.

   Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa. **Indikator:** Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB.

   Arah Kebijakan dan Strategi 1.1.1: Penguatan ekosistem perdagangan dan jasa yang inklusif skala regional sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi melalui:

   a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis yang terintegrasi dengan infrastruktur kota;
   b. Fasilitasi penguatan UMKM dan industri kreatif berbasis jasa dan perdagangan;
   c. Digitalisasi layanan dan sistem informasi perdagangan termasuk dukungan *e-commerce* lokal (ekonomi digital);
   d. Peningkatan kualitas SDM sektor jasa melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi;
   e. Promosi dan fasilitasi investasi sektor perdagangan dan jasa dengan insentif dan kemudahan berusaha;
   f. Penyediaan inkubator bisnis industri dan pelatihan wirausaha bagi pelaku UMKM dan startup digital;
   g. Pengembangan pasar digital dan sistem pemasaran berbasis teknologi untuk UMKM;
   h. Mendorong sertifikasi produk lokal agar lebih kompetitif di pasar regional dan nasional;
   i. Penerapan standar industri hijau untuk investasi perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
   j. Peningkatan infrastruktur penunjang investasi, termasuk aksesibilitas transportasi, fasilitas pendukung usaha, serta penunjang keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang;
   k. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas dalam pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
   l. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif Kota Magelang yang terintegrasi antara pelaku, pasar, dan ruang kreatif berbasis potensi budaya dan digital;
   m. Penguatan kelurahan maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan kelurahan
   n. Mengintegrasikan program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait sektor ekonomi sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor ekonomi antara lain: Ekonomi Digital, Destinasi Pariwisata Prioritas, Penguatan Ekosistem Pendukung Koperasi (Koperasi Merah Putih), ekosistem

ekonomi syariah, Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis, sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan, penguatan kelurahan maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan kelurahan, produk unggulan go internasional, manajemen keuangan bagi perempuan, konten kreator destinasi wisata, Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM, Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau, Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja, penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian kelurahan, Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*), produk unggulan go internasional.

Arah Kebijakan dan Strategi 1.1.2: Penguatan daya saing pariwisata berbasis budaya, sejarah, *heritage* dan ekonomi kreatif melalui:

a. Mengembangkan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur pendukung; (Prioritas Jateng) termasuk pariwisata berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan integrasi antar destinasi Magelang-Yogyakarta-Surakarta.

b. Mengoptimalkan pengelolaan wisata budaya dan sejarah; [Prioritas Jateng] dilengkapi peningkatan kualitas destinasi dengan sarana-prasarana memenuhi unsur 6A, yaitu: *Attraction* (Daya Tarik), *Accessibility* (Aksesibilitas), *Amenities* (Fasilitas), *Accommodation* (Akomodasi), *Activity* (Aktivitas), dan *Ancillary* (Layanan Tambahan)

c. Menyediakan serta meningkatkan infrastruktur pendukung wisata, diperkuat konektivitas antar destinasi dan *city beautification* untuk daya tarik *urban tourism*.

d. Mengintegrasikan pariwisata dengan industri kreatif dan kuliner lokal sebagai diversifikasi daya tarik paket wisata tematik berbasis potensi daerah.

e. Meningkatkan kapasitas SDM pariwisata, UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif.

f. Memperkuat kelembagaan dan kemitraan pariwisata, termasuk fasilitasi kemitraan destinasi dan peran Kelompok Sadar Wisata Kelurahan untuk pariwisata berkelanjutan, diperluas dengan promosi digital dan integrasi promosi antar destinasi.

g. Menyiapkan integrasi program nasional dan provinsi sesuai kewenangan dan kapasitas kota, termasuk pengembangan kampung wisata, konten kreator, promosi digital, serta pengembangan ekonomi kreatif kelurahan berbasis wisata berkelanjutan.

2. Unsur Visi Humanis dan Harmonis

Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, dengan **indikator:** Tingkat Kemiskinan

Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia, dengan **indikator** IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.1: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk SDM Berdaya Saing, melalui:

a. Penguatan pengarusutamaan pendidikan keterampilan vokasi dasar dan kewirausahaan pada jenjang SD, SMP, dan pendidikan nonformal yang selaras dengan potensi ekonomi lokal.;

b. Peningkatan fasilitas pendidikan inklusif untuk mendukung akses belajar bagi semua kelompok masyarakat;

c. Revitalisasi kurikulum berbasis teknologi dan inovasi guna meningkatkan kompetensi digital dan IPTEKS;

d. Beasiswa pendidikan vokasi bagi masyarakat kurang mampu;

e. Mendorong pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar dan perpustakaan digital;

f. Perluasan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui penguatan layanan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan nonformal di seluruh wilayah kota;

g. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan tenaga pendidik, pemenuhan standar sarana-prasarana, dan penerapan sistem evaluasi pembelajaran yang berkelanjutan;

h. Menyiapkan kerangka untuk mengintegrasikan program nasional dan program prioritas provinsi Jawa Tengah, sesuai kewenangan dna kemampuan daerah terkait sektor Pendidikan. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor Pendidikan, antara lain: Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, Sekolah Rakyat, Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sekolah unggulan per kecamatan, (Prioritas Nasional); Program Kartu Zillenial (Taruna Karya Mandiri) untuk pelatihan kerja dan penempatan lulusan SMA/SMK, Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan, Digitalisasi Pendidikan.

Strategi ini merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat penting untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong mobilitas sosial, dan secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.2: Penguatan Kesehatan Masyarakat untuk SDM Sehat dan Produktif, melalui:

a. Perluasan akses layanan kesehatan gratis dan berbasis digital melalui Program KTP-KU;

b. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan melalui Program Poliklinik Pagi-Sore Puskesmas dan Rumah Sakit;

c. Percepatan penurunan stunting dan peningkatan gizi anak;

d. Peningkatan layanan kesehatan berbasis homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas;

e. Meningkatkan angka harapan hidup melalui penguatan layanan kesehatan preventif dan promotif;

f. Peningkatan layanan kesehatan paripurna dan spesifik;

g. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan yang merata dan memperkuat sarana prasarana kesehatan yang modern dan inklusif, seperti pengembangan dan pembangunan rumah sakit dalam rangka mendukung *hospitourism*;

h. Menyiapkan kerangka untuk mengintegrasikan program nasional dan program prioritas provinsi Jawa Tengah, terkait sektor Kesehatan. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor kesehatan, antara lain: makan siang dan susu gratis, bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas, Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penurunan Stunting, pendayagunaan SDM Kesehatan, Pelayanan kesehatan keliling, Peningkatan kualitas hidup lansia, Integrasi layanan kesehatan berbasis *mobile-clinic* dan *digital screening* untuk percepatan deteksi dini.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.3: Penguatan Literasi Masyarakat dan IPTEKS untuk Daya Saing ekonomi, melalui:

a. Meningkatkan keterampilan di bidang industri kreatif dan teknologi digital melalui pelatihan dan akses sumber belajar.

b. Memberdayakan masyarakat lewat pendidikan non-formal dan literasi berbasis komunitas.

c. Memperkuat jejaring antara daerah, kelurahan, dan komunitas untuk pertukaran informasi, literasi digital, kewirausahaan, dan IPTEKS.

d. Menyusun kerangka kerja untuk menggabungkan program nasional dan provinsi di bidang literasi, termasuk pengembangan konten kreator, literasi digital bagi perempuan, dan wirausaha komunitas.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.4.: Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga untuk SDM yang Kompetitif, melalui:

a. Mengembangkan ruang kreatif bagi generasi muda sebagai tempat belajar, bertukar ide, dan berkolaborasi berbasis literasi IPTEKS.

b. Peningkatan literasi digital, keuangan, dan kewirausahaan untuk pemuda.

c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas olahraga di setiap kelurahan untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat, pembinaan bakat atlet muda, dan pengembangan pusat kegiatan pemuda.

d. Penguatan ekosistem pembinaan atlet dan olahraga prestasi yang terintegrasi dengan sekolah, klub, dan komunitas olahraga.

e. Dukungan bagi pemuda dalam pengembangan ekonomi kreatif dan startup digital berbasis olahraga dan seni-budaya.

f. Integrasi kegiatan olahraga dengan penguatan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan kerja sama tim di kalangan anak muda.

g. Peningkatan daya saing pemuda melalui partisipasi dalam ajang kompetisi olahraga dan kreativitas di tingkat lokal, regional, hingga nasional.

h. Penguatan peran olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat melalui kampanye publik, event olahraga massal, dan kemitraan lintas sektor.

i. Menyiapkan kerangka untuk mengintegrasikan program nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Tengah di sektor pemuda dan olahraga. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor pemuda dan olahraga antara lain: dukungan program ekonomi kreatif berbasis komunitas dan pelestarian seni-budaya melalui partisipasi pemuda, penyelenggaraan event olahraga tingkat daerah dan nasional, serta pengembangan fasilitas olahraga terpadu di setiap kecamatan/kelurahan.

Strategi ini berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara tidak langsung. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam ekonomi kreatif, olahraga dan kegiatan kewirausahaan digital membuka ruang kerja baru, meningkatkan pendapatan mandiri, serta memperkuat mobilitas sosial dan ekonomi di kalangan usia produktif.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.1.5.: Penguatan sumber daya manusia berbasis inklusi sosial, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan humanis, melalui:

a. Penerapan prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

b. Pengembangan ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif sebagai wahana interaksi sosial, ekspresi budaya, dan penguatan kebersamaan lintas kelompok.

c. Penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan nilai saling menghargai dalam masyarakat;

d. Peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga;

e. Sinkronisasi program nasional dan provinsi dalam pembangunan keluarga dan pengarusutamaan GEDSI.

Strategi ini berkontribusi pada peningkatan daya saing SDM dan ketahanan sosial inklusif karena mendorong perencanaan pembangunan yang adil (melalui prinsip GEDSI), memperkuat interaksi dan kohesi sosial di ruang publik, membangun jejaring perlindungan berbasis komunitas, meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi SDM.

Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan dengan **indikator:** (1) Tingkat Pengangguran Terbuka dan (2) Rasio Gini.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.2.1.: Perluasan Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkelanjutan, melalui:

a. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia kerja lokal dan regional, terutama sektor perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan digital, sebagai upaya membekali kelompok usia produktif dari rumah tangga miskin agar mampu menembus pasar kerja formal maupun informal;

b. Pengembangan program magang dan kemitraan dunia usaha-dunia industri (DUDI) di kawasan strategis kota untuk menjembatani pencari kerja dengan lowongan nyata, sekaligus mempercepat transisi penduduk miskin produktif ke dalam dunia kerja bergaji tetap;

c. Pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui pelatihan wirausaha, inkubasi bisnis pemula, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB), yang secara langsung mendukung mobilitas ekonomi keluarga miskin dan rentan;

d. Pemutakhiran data tenaga kerja dan pemutakhiran sistem informasi pasar kerja daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem pencarian kerja online dan layanan konsultasi karir berbasis kelurahan, untuk memperluas jangkauan informasi peluang kerja ke lapisan masyarakat bawah;

e. Perluasan program padat karya produktif dan berbasis komunitas, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi atau kawasan padat penduduk, sebagai instrumen langsung penciptaan pendapatan jangka pendek bagi keluarga rentan miskin;

f. Penguatan jejaring penempatan tenaga kerja lokal, termasuk layanan antar kerja (LAK), bursa kerja khusus, dan pelibatan Balai Latihan Kerja (BLK), guna memperluas akses kerja;

g. Penerapan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen sektor publik dan swasta bagi kelompok marginal (perempuan kepala keluarga, disabilitas, pemuda usia produktif tidak sekolah, dan eks pekerja migran), sebagai bentuk intervensi struktural dalam mendorong inklusi ekonomi.

Strategi ini ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) melalui penciptaan lapangan kerja yang produktif, inklusif, responsif terhadap kelompok rentan, dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan. Strategi ini bertujuan memperbesar akses masyarakat terhadap pasar kerja melalui perluasan lapangan kerja yang relevan, pelatihan keterampilan berbasis permintaan pasar, serta skema penempatan kerja yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi pengangguran struktural, dan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Arah Kebijakan dan Strategi 2.2.2.: Pemerataan Akses dan Distribusi Pendapatan yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, melalui:

a. Fasilitasi UMKM dan wirausaha mikro bagi masyarakat miskin dan rentan dengan afirmasi khusus untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lansia produktif, melalui bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pembukaan akses pasar;

b. Perluasan program padat karya dan skema kerja produktif berbasis komunitas GEDSI, terutama di wilayah dengan konsentrasi kemiskinan perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja informal;

c. Peningkatan inklusi keuangan melalui literasi keuangan yang ramah gender dan disabilitas, penguatan kelompok simpan pinjam perempuan, serta pengembangan layanan perbankan digital inklusif; dan penggunaan Indeks Akses Keuangan daerah untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;

d. Jaring pengaman sosial bagi kelompok 40% terbawah selaras dengan program nasional berbasis data akurat untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok paling tertinggal.

e. Revitalisasi pelatihan vokasi berbasis kebutuhan kelompok marginal, termasuk perempuan pekerja rumahan, remaja putus sekolah, dan penyandang disabilitas, dengan dukungan penempatan kerja inklusif.

Strategi yang disusun bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dengan memperluas akses terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, dan perlindungan sosial berbasis data, serta memastikan keterjangkauan bagi kelompok rentan melalui pendekatan GEDSI.

Sasaran 2.3: Terwujudnya kondusivitas daerah dengan **indikator:** Jumlah Kejadian Konflik SARA

Arah Kebijakan dan Strategi 2.3.1: Memperkuat ketahanan budaya dan pencegahan konflik berbasis kearifan lokal melalui:

a. Perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda, didukung penetapan status legal, revitalisasi objek, dan pelibatan komunitas dalam kegiatan budaya yang mendorong ekonomi local;

b. Pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya dengan festival komunitas, serta pengembangan usaha kreatif berbasis nilai lokal;

c. Penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, serta pendidikan nilai moderasi di sekolah, kelurahan, dan komunitas;

d. Penguatan sistem pengawasan sosial berbasis tokoh masyarakat, serta patroli komunitas untuk menjaga keamanan lingkungan;

e. Integrasi nilai budaya dan penguatan kohesi sosial ke dalam kebijakan pendidikan karakter, pengembangan ruang publik, pengelolaan pariwisata lokal, dan perencanaan kota untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan harmonis.

Strategi ini menjangkau tiga dimensi utama yang membentuk kondusifitas wilayah, yaitu: kerukunan sosial, keamanan lingkungan, dan keberlanjutan budaya lokal. Ketiga aspek tersebut saling menopang dalam menciptakan ruang hidup yang stabil dan inklusif. Kondisi sosial yang aman dan rukun memungkinkan masyarakat miskin mengakses layanan, peluang ekonomi, dan partisipasi pembangunan tanpa hambatan sosial, sehingga kesejahteraan meningkat secara merata dan berkelanjutan.

3. Unsur Visi Nyaman dan Berkelanjutan

Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan, dengan **indikator:** Nilai Livable City

Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, dengan **indikator:** Nilai kepuasan layanan infrastruktur.

Arah Kebijakan dan Strategi 3.1.1: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, peningkatan konektivitas wilayah, Pemanfaatan Efisien Ruang Kota serta penyediaan prasarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat melalui:

a. Penataan jaringan jalan, drainase, persampahan dan fasilitas dasar skala perkotaan maupun lingkungan dengan memperhatikan prinsip inklusivitas, efisiensi ruang, dan keterlibatan komunitas;

b. Penerapan pendekatan berbasis alam (*nature-based solutions*) pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air, ruang terbuka hijau, dan sistem pengendalian banjir, guna mendukung ketahanan iklim kota yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan

c. Penerapan standar teknis layanan infrastruktur sebagai acuan perencanaan dan evaluasi termasuk pengembangan sistem digital dan spasial untuk peningkatan efisiensi pengelolaan.

d. Penyediaan fasilitas umum dengan aksesibilitas universal yang dirancang sebagai ruang publik kreatif, ramah sosial, dan terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat;

e. Rehabilitasi infrastruktur tidak laik fungsi dan penguatan sistem pemeliharaan aset dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan dan perawatan berkala;

f. Kebijakan yang mendorong pada penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda, kendaraan berbasis energi alternatif;

g. Pengoptimalan ruang terbatas untuk pembangunan prasarana sarana utilitas yang memperkuat fungsi ekologis dan estetika kota;

h. Dukungan pada kebijakan Pemerintah Pusat untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum serta optimalisasi penatagunaan tanah di daerah;

i. Pengarusutamaan desain efisien lahan dan energi pada pembangunan infrastruktur baru, yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis prinsip keberlanjutan;

j. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi dan pengolahan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya;

k. Penguatan infrastruktur pengelolaan air bersih, konservasi air dan jaringan distribusi air, dengan memperhatikan kebutuhan air untuk rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya secara berkelanjutan, serta mitigasi konflik pemanfaatan air antar sektor;

l. Penguatan infrastruktur pendukung sektor pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan;

m. Peningkatan transportasi publik perkotaan serta penguatan konektivitas dalam dan antar wilayah;

n. Mengintegrasikan mandat program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait infrastruktur, sesuai kewenangan dan kapasitas kota. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor infrastruktur, antara lain: sumber daya air, Pengembangan SPAM terintegrasi, infrastruktur untuk pusat rekreasi dan promosi pembangunan, sarana olahraga, mengembangkan titik aglomerasi yang menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya, Permukiman Layak Huni (1 KK 1 RLH).

Peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fisik, tetapi oleh sejauh mana infrastruktur tersebut dapat memberikan layanan yang layak, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, strategi ini dirancang dengan mengarahkan tindakan pada tiga simpul logis: penataan layanan dasar agar fungsi infrastruktur

sesuai kebutuhan kawasan, standarisasi mutu sebagai dasar evaluasi antarwilayah dan antarwaktu, serta efisiensi pemanfaatan ruang untuk menjawab tantangan keterbatasan lahan di kota padat. Ketiganya merupakan determinan utama dari nilai kepuasan layanan infrastruktur. Secara simultan, pembenahan mutu dan distribusi infrastruktur juga membentuk kualitas tata ruang yang inklusif dan adaptif, yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan 3: Meningkatnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran 3.2.: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan **indikator:** (1) Indeks Risiko Bencana, (2) Indeks Ketahanan Pangan; dan (3) Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO_2eq).

Arah kebijakan dan Strategi 3.2.1: Penguatan Resiliensi Wilayah melalui Penataan Risiko Bencana, Kemandirian Pangan, dan Pengendalian Daya Dukung Lingkungan, melalui:

a. Identifikasi wilayah rawan bencana dan integrasi data risiko secara spasial dalam RTRW/RDTR kota;
b. Penguatan infrastruktur dan sistem peringatan dini di titik rawan bencana;
c. Penataan drainase, ruang terbuka hijau dan tutupan lahan untuk mengurangi limpasan air dan banjir lokal;
d. Revitalisasi ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hijau perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara, tutupan lahan dan keanekaragaman hayati;
e. Pengembangan lahan pangan produktif, integrated urban farming, pengelolaan sisa pangan (*food waste*), dan edukasi gizi di tingkat keluarga dan sekolah, sebagai bagian dari jaringan ketahanan pangan perkotaan;
f. Penguatan sistem rantai pasok dan pengendalian harga pangan pokok untuk menjaga aksesibilitas dan keterjangkauan pangan masyarakat;
g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk logistik bagi tanggap darurat bencana dan krisis distribusi pangan;
h. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengadaan dan penyediaan pangan lokal;
i. Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi pangan;
j. Penguatan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan pelestarian lingkungan hidup;
k. Peningkatan target pengolahan sampah menuju *zero waste* serta pengembangan ekonomi sirkuler;
l. Penerapan energi terbarukan, seperti solar panel dan teknologi efisiensi energi pada fasilitas umum;
m. Implementasi kebijakan pengurangan emisi GRK, efisiensi energi dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti penggunaan sepeda, kendaraan listrik dan sarana transportasi lainnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau;
n. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan konservasi lingkungan hidup;
o. Mengintegrasikan mandat program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait resiliensi wilayah, sesuai kewenangan dan kapasitas kota. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait resiliensi wilayah, antara lain: (1) Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air; (2) Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup; (3) Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya; (4) Hilirisasi Ekonomi Hijau; (5) *Early Warning* Bencana, Penguatan BPBD/Tagana; (6) program lingkungan.

Strategi ini menguatkan tiga aspek kunci: pengelolaan risiko bencana, ketahanan sistem pangan lokal, dan kualitas lingkungan hidup. Ketiganya saling menopang dalam membentuk wilayah yang tangguh terhadap gangguan alam dan krisis pasokan pangan. Tiga pilar—perlindungan terhadap risiko, jaminan pasokan, dan pengendalian daya dukung ruang—merupakan syarat utama bagi terciptanya tata ruang kota yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif.

Tujuan 4: Terwujudnya pemerintahan dan layanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel, dengan **indikator:** Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan, dengan **indikator:** (1) SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan (2) Indeks Pelayanan Publik;

Arah Kebijakan dan Strategi 4.1.1: Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja, Teknologi Cerdas, dan Partisipatif, melalui:

a. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi melalui sistem kinerja, meritokrasi, dan integrasi perencanaan-anggaran.
b. Mengembangkan sistem digital pemerintahan yang aman untuk mendukung pengelolaan arsip, layanan publik, dan administrasi pemerintahan
c. Memodernisasi layanan administrasi kependudukan untuk menjamin kepemilikan dokumen dasar, profil kependudukan dan keakuratan data untuk perencanaan kebijakan berbasis kependudukan.
d. Mengoptimalkan Satu Data Daerah, Big Data, dan kecerdasan buatan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan publik
e. Memperkuat budaya integritas ASN melalui sistem pengawasan internal, mitigasi risiko, dan pelaporan benturan kepentingan, termasuk pelaksanaan Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 bagi ASN
f. Mengintegrasikan RIPJPID dalam perencanaan dan inovasi daerah berbasis riset, teknologi, dan data terbuka
g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan publik melalui feedback terbuka, pokok pikiran DPRD, dan kanal pelaporan digital
h. Meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan pengembangan skema pembiayaan inovatif
i. Mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), baik belanja dan penerimaan daerah serta integrasi layanan publik dan keuangan digital
j. Meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui perluasan kanal pembayaran nontunai, dan edukasi literasi keuangan mendukung Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
k. Mendorong dukungan pelayanan publik prima dengan penyediaan gedung kantor pemerintahan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai, modern, berwawasan lingkungan dan inklusif
l. Mempercepat penyelesaian permasalahan aset daerah dalam rangka dukungan layanan publik prima dan pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
m. Mengintegrasikan mandat program prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah terkait tata kelola pemerintahan dalam program daerah. Adapun Program Prioritas Nasional dan Provinsi terkait sektor tata kelola pemerintahan, antara lain: Reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, reward berbasis kinerja ASN, transformasi digital layanan publik, ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan, pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN bekerjasama dengan

Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, KPK, *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa, Sistem Informasi Desa (SID). Dalam konteks kota Magelang desa diinterpretasikan sebagai kelurahan.

Strategi ini diarahkan untuk mendukung pencapaian Sasaran 4.1 melalui penguatan sistem kinerja, pengendalian internal, dan kualitas layanan publik yang merata dan berintegritas. Ketiga aspek tersebut merupakan prasyarat utama untuk membentuk birokrasi yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis data, digitalisasi layanan, dan partisipasi publik yang terstruktur diyakini mampu mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, sehingga selaras dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.

3.2.5 Penahapan Pembangunan

Selanjutnya, agar arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan penahapan pembangunan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun.

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan dan fokus tema pembangunan Kota Magelang pada tahun 2025-2029 ditetapkan dengan mengacu pada focus RPJPD Kota Magelang Tahap 2025-2029 dan tema fokus prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

3.2.5.1 Keselarasan Tema Arah Kebijakan Pembangunan Kota Magelang 2026-2030 dengan tema Pembangunan RPJPD Kota Magelang dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan tema Pembangunan Kota Magelang tahun 2025-2029 sebagai pemandu arah kebijakan didasarkan pada tema arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kota Magelang 2025-2045 yaitu: Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap 5 tahun pertama diarahkan pada tema pembangunan sumber daya manusia modern, inovatif dan berintegritas sebagai modal sosial dalam berbagai aspek pembangunan. Tahap ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakat didukung penguatan reformasi birokrasi, peningkatan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kondusifitas daerah, dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Visi RPJMD Kota Magelang 2025-2029 adalah ***"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan"***. Kota Magelang memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah sekitarnya, dengan fokus pada peningkatan daya saing ekonomi, penguatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk memperkokoh posisi Magelang sebagai kota jasa dan perdagangan yang adaptif, inklusif, serta berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperluas jejaring investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata.

Dalam upaya mewujudkan visi "Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan", Pemerintah Kota Magelang menanamkan nilai-nilai lokal sebagai jiwa dari setiap langkah pembangunan. Empat nilai khas, yakni Magelang Peduli, Magelang Tumoto, Ngrawat Magelang, dan Magelang Bergaung, tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi roh yang mengarahkan strategi pembangunan secara bertahap dan bertanggung jawab.

Penyusunan tema pembangunan Kota Magelang juga memperhatikan keselarasan dan dukungan kepada tema arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029. Tema arah kebijakan Provinsi

Jawa Tengah: (1) Tahun 2026- Penguatan Landasan Pembangunan Daerah: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional; (2) Tahun 2027- Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Mengembangkan *Pariwisata* Berkelanjutan Dan *Ekonomi* Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi; (3) Tahun 2028 - Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah: Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa Dan Industri Hijau; (4) Tahun 2029 - Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan; (5) Tahun 2030- Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, tantangan pembangunan, serta misi yang telah ditetapkan, dan penyelarasan tema Tahunan Provinsi Jawa Tengah, maka tema pembangunan lima tahun Kota Magelang disusun sebagai berikut.

Pembangunan Kota Magelang 2025-2029 dimulai dengan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi. Birokrasi yang responsif, digital, dan berbasis data menjadi kunci untuk meningkatkan layanan publik dan menjamin perlindungan sosial yang merata, terutama bagi kelompok rentan. Tahun pertama menjadi tahap menata sistem, infrastruktur dasar, dan stabilitas sosial sebagai syarat keberlanjutan pembangunan ke depan.

Tahun kedua diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi warga. Pendidikan vokasi, kesehatan masyarakat, dan penguatan UMKM menjadi prioritas untuk membangun masyarakat yang sehat, terampil, dan berdaya saing di sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif.

Tahun ketiga difokuskan pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan lingkungan. Penataan transportasi, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau dilakukan untuk menciptakan kota yang tangguh terhadap bencana, nyaman, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Tahun keempat menjadi momen akselerasi ekonomi dan perluasan jejaring investasi. Potensi lokal seperti pariwisata sejarah, jasa kesehatan, dan ekonomi kreatif dipromosikan untuk memperkuat posisi Magelang sebagai pusat jasa regional.

Tahun kelima diarahkan untuk mengokohkan identitas kota yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Konsolidasi seluruh capaian menjadi pijakan menuju Magelang yang berdaya saing, adil dalam pelayanan, dan siap menghadapi tantangan jangka panjang.

Adapun keselarasan tema Kota Magelang dengan tema provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7 Keselarasan Tema Kota Magelang dengan Tema Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
2026	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah: Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Penguatan Landasan Pembangunan Kota yang Harmonis dan Nyaman (Landasan Pembangunan)	Tema Kota Magelang tahun 2026 selaras dengan tema Provinsi Jawa Tengah pada aspek konsumsi pangan. Kota Magelang memperkuat distribusi logistik dan perlindungan sosial sebagai bagian dari perannya sebagai simpul jasa dan distribusi di selatan Jawa Tengah. Pemerintah kota memperkuat layanan dasar untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan memastikan akses pangan bagi kelompok rentan. Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan ruang publik dibenahi untuk mendukung

Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
			kelancaran distribusi logistik. Pemerintah Kota Magelang juga memperkuat layanan dasar karena masyarakat yang sehat dan sejahtera lebih mudah menjaga kecukupan pangan, sehingga secara langsung mendukung ketahanan pangan yang menjadi fokus tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Lumbung pangan berarti kemampuan wilayah menjamin ketersediaan dan distribusi pangan yang cukup bagi masyarakat. Klaster Magelang Peduli melindungi kelompok rentan agar tetap memiliki akses pangan yang adil, terutama saat terjadi krisis. Perlindungan ini penting agar permintaan dan distribusi pangan tetap stabil, sehingga mendukung terwujudnya lumbung pangan sebagai sistem yang adil dan inklusif.

Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
2027	Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Mengembangkan *Pariwisata* Berkelanjutan Dan *Ekonomi* Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan SDM dan Daya Saing Ekonomi Kota Magelang yang inklusif (SDM UNGGUL)	Keselarasan tema Kota Magelang dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 terletak pada aspek penguatan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berbasis nilai lokal. Kota Magelang mendukung pengembangan UMKM, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan komunitas dan pelatihan vokasi. Prinsip ekonomi syariah tercermin dalam pembiayaan tanpa riba, penguatan ekonomi beretika, dan perluasan akses yang adil. Tema Kota Magelang tentang penguatan SDM mendukung tema Jawa Tengah karena SDM yang unggul dan ekonomi yang inklusif menjadi fondasi utama dalam mendorong pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan daerah. Pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan adaptif. Klaster Magelang Tumoto mendukung pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, literasi digital, dan pemberdayaan komunitas berbasis nilai lokal. Dengan SDM yang kuat, pariwisata dan usaha mikro lokal tumbuh secara inklusif dan adil, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Klaster Magelang Tumoto mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 pada aspek penguatan ekonomi berbasis komunitas, pengembangan pariwisata, dan penerapan prinsip ekonomi syariah.

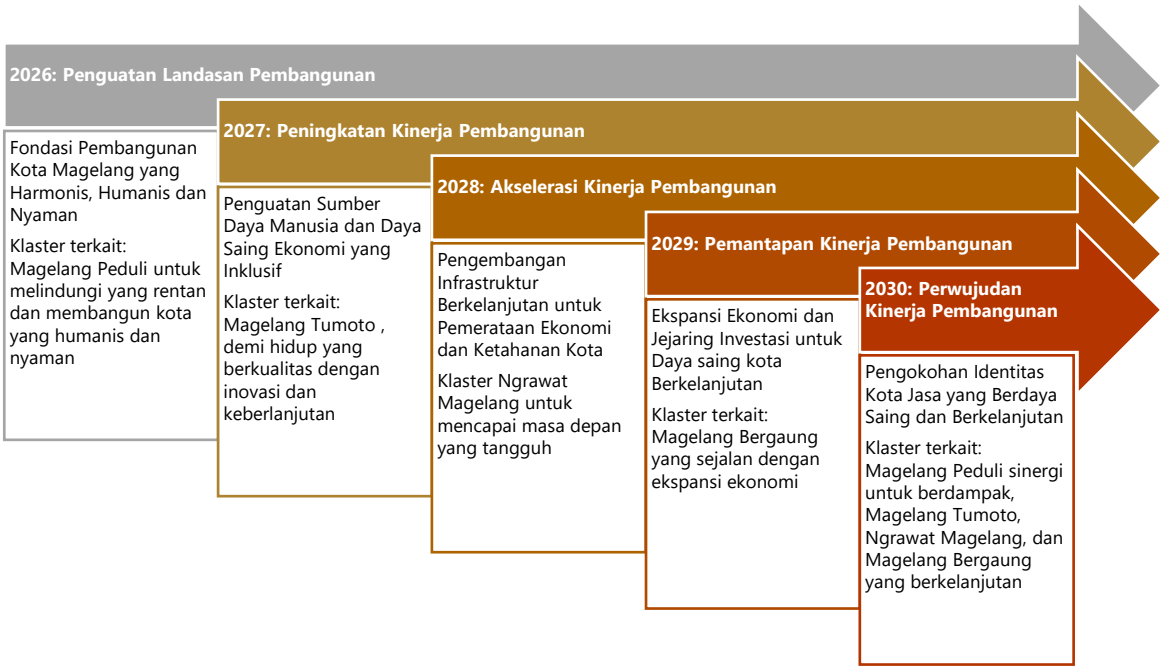
Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
2028	Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah: Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa Dan Industri Hijau	Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi dan dan Ketahanan Kota (INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN)	Kota Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2028 pada aspek penguatan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Wujud nyata dukungan ini adalah pembangunan transportasi publik, ruang hijau, sistem drainase adaptif, dan pengelolaan sampah berbasis sirkular. Kota Magelang juga mendukung UMKM lokal dan menciptakan ruang usaha yang sehat dan aman. Dukungan Kota Magelang terwujud pada penguatan distribusi logistik, pengembangan potensi lokal, dan penyediaan infrastruktur ramah lingkungan. Relevansi keselarasan dengan tema Jawa Tengah adalah terciptanya ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis industri hijau dan pemerataan ekonomi daerah. Klaster Ngrawat Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2028 melalui penguatan infrastruktur ramah lingkungan, sistem transportasi dan drainase adaptif, serta pengelolaan sampah berbasis sirkular. Upaya ini memperlancar distribusi logistik, mendukung aktivitas usaha masyarakat, dan menciptakan ruang usaha yang sehat. Dengan langkah tersebut, klaster Ngrawat Magelang berkontribusi pada pemerataan ekonomi berbasis potensi lokal dan pengembangan industri hijau.
2029	Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah: Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan	Ekspansi Ekonomi Kota dan Peningkatan Jejaring Investasi untuk Daya saing kota Berkelanjutan (EKSPANSI EKONOMI)	Kota Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2029 pada aspek ekspansi ekonomi daerah, penguatan jejaring investasi, dan peningkatan daya saing lokal. Wujud nyata dukungan ini adalah pengembangan potensi wisata sejarah dan budaya, promosi produk lokal, dan fasilitasi kemitraan UMKM dengan pasar regional dan nasional.

Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
			Kota Magelang juga mengembangkan program branding kota, meningkatkan infrastruktur promosi, dan mendukung sektor jasa serta perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi kota. Dukungan Kota Magelang terwujud pada penguatan daya tarik investasi, perluasan peluang usaha, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Relevansi keselarasan dengan tema Jawa Tengah adalah terciptanya ekosistem ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan mendukung pertumbuhan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan. Klaster Magelang Bergaung mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2029 pada aspek peningkatan daya saing daerah dan penguatan konektivitas ekonomi lokal. Klaster ini mendorong promosi potensi lokal, pengembangan pariwisata sejarah dan budaya, serta perluasan jejaring investasi. Langkah ini memperkuat posisi Kota Magelang sebagai pusat jasa dan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.
2030	Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan	Pengokohan Identitas Kota yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan (KOTA TANGGUH)	Kota Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2030 pada aspek penguatan identitas kota, keberlanjutan pembangunan, dan ketangguhan menghadapi perubahan global. Wujud nyata dukungan ini adalah penguatan tata kelola berbasis digital, pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengendalian emisi dan mitigasi bencana. Dukungan Magelang terwujud melalui sinergi klaster Magelang Peduli, Tumoto, Ngrawat Magelang, dan Bergaung. Keselarasan ini menciptakan kota yang inklusif, adaptif, dan

Tahun	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Tema Pembangunan Kota Magelang	Bentuk Keselarasan dan Dukungan
			berdaya saing, sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah menuju provinsi yang maju dan berkelanjutan. Klaster Magelang Peduli, Magelang Tumoto, Ngrawat Magelang, dan Magelang Bergaung mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2030 pada aspek penguatan ketahanan sosial, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur ramah lingkungan, dan perluasan ekonomi lokal. Keempat klaster ini bersinergi melalui penguatan layanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Langkah ini memperkuat posisi Kota Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Klaster ini mendukung terwujudnya Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan.

3.2.5.2 Tema dan Tahapan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2026-2030

Selanjutnya disajikan visualisasi tahapan dan tema Pembangunan Kota Magelang tahun 2026-2030 dalam Gambar 3.3 di bawah ini.



Gambar 3.3 Penahapan dan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030

Sumber: Tim Penyusun

Penjabaran arah kebijakan dan strategi pada setiap penahapan pembangunan daerah RPJMD diuraikan sebagai berikut.

3.2.5.2.1 Tahun 2026: Penguatan Landasan Pembangunan Kota yang Harmonis, Humanis dan Nyaman

Tahun 2026 merupakan fase krusial dalam RPJMD 2025-2029, yakni sebagai Tahap Penguatan Landasan. Tema pembangunan yang diusung adalah *"Penguatan landasan pembangunan Kota Magelang yang harmonis, humanis, dan nyaman"*, yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026.

Strategi utama tahun ini menitikberatkan pada klaster **Magelang Peduli**. Fokus diarahkan pada pengukuhan fondasi kota melalui penguatan layanan dasar, ketahanan pangan, dan perlindungan kelompok rentan. Secara spesifik, wajah humanis kota diterjemahkan melalui program ketahanan pangan untuk semua dan jaminan sosial yang adaptif.

Guna memastikan keberhasilan RPJMD, tahun 2026 difokuskan pada intervensi lintas sektor:

1. **Stabilitas Sosial:** Melalui layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta perlindungan menyeluruh bagi kelompok rentan.
2. **Infrastruktur Dasar:** Perbaikan jalan, drainase, dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mendukung kenyamanan kota.
3. **Kondusivitas Wilayah:** Peningkatan keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat harmoni sosial.

Dengan landasan yang kokoh pada tahap ini, akselerasi pembangunan Kota Magelang pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Kota Magelang mendukung tema Provinsi Jawa Tengah 2026 melalui penguatan layanan dasar, perlindungan sosial, dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung konsumsi pangan, distribusi logistik, dan kesejahteraan kelompok rentan. Sebagai simpul jasa dan distribusi di selatan Jawa Tengah, kota ini

memastikan arus barang, jasa, dan orang lancar, lingkungan sehat, dan stabilitas sosial terjaga, sehingga menopang ketahanan pangan provinsi secara menyeluruh.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama (2026) **"Penguatan Landasan Pembangunan"** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut:

1. Penguatan landasan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa:
    a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa strategis yang terintegrasi dengan pusat aktivitas ekonomi .
    b. Memperkuat UMKM dan industri kreatif melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan, sertifikasi produk, serta promosi berbasis e-commerce lokal.
    c. Menyelenggarakan pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan program inkubator bisnis bagi pelaku usaha serta startup digital pemula.
    d. Mengembangkan kemitraan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk mendorong inovasi dan perluasan pasar perdagangan dan jasa.
    e. Memperkuat peran kelurahan sebagai simpul ekonomi lokal dan pusat promosi produk unggulan kota.
    f. Pengembangan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta-Surakarta, termasuk memulai *city beautification*, dan pemenuhan elemen dasar 6A, yaitu: Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenities, Aktivitas, dan Layanan Tambahan
    g. Memperkuat kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif
2. Penguatan landasan untuk meningkatkan daya saing SDM, dengan fokus pada:
    a. Memulai pengarusutamaan pendidikan vokasi dasar, kewirausahaan, dan kompetensi digital sejak SD, SMP, dan pendidikan nonformal sesuai potensi lokal.
    b. Memperluas akses pendidikan inklusif dan PAUD dengan pemenuhan sarana-prasarana minimum di seluruh kelurahan.
    c. Mengembangkan komunitas belajar dan perpustakaan digital untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.
    d. Mengintegrasikan program nasional dan provinsi seperti makan siang gratis, sekolah unggulan, dan sekolah inklusif di setiap kecamatan.
    e. Melanjutkan perluasan akses layanan kesehatan gratis dan digital, penurunan stunting, perbaikan gizi anak., layanan *homecare* bagi lansia dan penyandang disabilitas
    f. Melanjutkan layanan preventif dan promotive, layanan kesehatan primer dan rujukan, dan pengembangan layanan kesehatan paripurna.
    g. Menginisiasi pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.
    h. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan secara merata dan memulai penguatan sarana prasarana dasar rumah sakit sebagai landasan hospitourism
    i. Menginisiasi pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

j. Menguatkan fondasi kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga.

k. Melanjutkan pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah serta klub olahraga.

l. Penguatan landasan dilakukan melalui penerapan prinsip GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai dasar terciptanya masyarakat yang harmonis dan humanis

3. Penguatan landasan untuk peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan

a. Melanjutkan program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja lokal, dan prioritas untuk rumah tangga miskin.

b. Melanjutkan pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis.

c. Menyusun dan memutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan.

d. Penguatan jejaring tenaga kerja dengan pengaktifan LAK dan pemetaan kebutuhan kerja lokal

e. Melanjutkan program literasi keuangan, wirausaha mikro dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan.

f. Menyusun mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah

4. Penguatan landasan untuk terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial.

a. Melanjutkan pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas

b. Melanjutkan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan.

c. Melanjutkan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah

5. Penguatan landasan untuk terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan

a. Melanjutkan penguatan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.

b. Melanjutkan penguatan landasan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana.

c. Melanjutkan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

d. Melanjutkan penguatan landasan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

e. Melanjutkan penguatan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.

6. Penguatan landasan untuk terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas
    a. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan.
    b. Mengelola ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi dan sosial.
    c. Mengembangkan ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi
    d. Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah.
    e. Landasan transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah
7. Penguatan landasan untuk terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
    a. Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
    b. Penguatan landasan manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan.
    c. Penguatan landasan pemerintahan digital untuk layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntablitas arsip.
    d. Penguatan landasan perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum.
    e. Penguatan landasan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.

Program prioritas tahun 2026 adalah Kluster Program Magelang Kita Peduli. Kluster program ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan secara lebih komprehensif. Program unggulan Kepala Daerah yang termasuk kluster Magelang Kita Peduli antara lain: Program Pro-DAMAI, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH, Pelayanan Untuk Warga Miskin, Harapan Magelang, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman dan Sejahtera, Angkot Pelajar Gratis, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, KTP-KU, Berdikarikan Disabilitas, Poliklinik Pagi-Sore: Puskesmas dan Rumah Sakit, Homecare Pusling, RSUD Tidar "RS Tanpa Dinding", Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, dan Aplikasi "Kesehatan Memudahkan Rakyat.

3.2.5.2.2 Tahun 2027: Penguatan SDM dan Daya Saing Ekonomi Kota Magelang yang Inklusif

Tema pembangunan 2027 adalah Penguatan SDM dan Daya Saing Ekonomi Kota Magelang yang inklusif. Tahun 2027 menjadi momen penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) serta daya saing ekonomi lokal. Fokus ini penting karena pembangunan Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika masyarakatnya memiliki ketahanan sosial, kompetensi adaptif, dan lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara inklusif. SDM yang unggul dan ekonomi yang inklusif adalah dua pilar utama dalam membangun Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.

Keselarasan tema dan dukungan kota Magelang pada tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 terletak pada aspek penguatan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berbasis nilai lokal. Kota Magelang

mendukung tema Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, khususnya dalam sektor usaha mikro, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pemerintah kota mendorong wirausaha berbasis komunitas, pelatihan keterampilan kerja, serta fasilitasi UMKM agar tumbuh dalam ekosistem yang adil dan terbuka. Selain itu, Magelang mengembangkan potensi wisata sejarah dan budaya secara berkelanjutan, dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Tema Kota Magelang tahun 2027 juga mencerminkan prinsip ekonomi inklusif, termasuk ruang bagi ekonomi syariah. Dukungan terhadap UMKM, pembiayaan tanpa riba, dan penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai syariah dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan ini Kota Magelang tidak hanya meningkatkan kapasitas ekonomi warganya, tetapi juga memperkuat peran ekonomi syariah dan pariwisata lokal sebagai pilar pertumbuhan daerah, sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua (2027) **"**Peningkatan Kinerja Pembangunan**"** diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan kinerja pembangunan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa:
    a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis terintegrasi dengan infrastruktur kota.
    b. Penguatan UMKM dan industri kreatif melalui pendampingan, sertifikasi produk, dan e-commerce lokal.
    c. Pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan inkubator bisnis bagi pelaku usaha dan startup.
    d. Kemitraan pemerintah-usaha-komunitas untuk inovasi dan perluasan pasar.
    e. Pemberdayaan kelurahan sebagai penggerak ekonomi lokal.
    f. Perluasan Pembangunan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta-Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A.
    g. Memperluas kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan dan promosi digital
    h. Memperluas pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan literasi digital berbasis potensi lokal hingga tingkat SMP dan pendidikan nonformal secara merata.
    i. Pengembangan ekosistem pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang inklusif, melalui kemitraan lintas sektor, termasuk penguatan keuangan syariah dan halal value chain
2. Peningkatan kinerja pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM, dengan fokus pada:
    a. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menurunkan Anak Tidak Sekolah melalui intervensi terarah meningkatkan cakupan wajib belajar 13 tahun dan fasilitasi beasiswa vokasi
    b. Memperluas layanan PAUD, pendidikan dasar, dna Pendidikan inklusif yang ramah disabilitas dengan sarana-prasarana memadai inklusif.
    c. Mengoptimalkan kurikulum berbasis teknologi dan inovasi, serta memperkuat mutu Pendidikan, kualitas pendidik dan kualitas peserta didik melalui pelatihan pendidik dan evaluasi pembelajaran
    d. Mengembangkan pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar, beasiswa, perpustakaan digital, dan integrasi program nasional maupun provinsi.

e. Memperluas layanan kesehatan gratis berbasis digital, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas.

f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan preventif dan promotif layanan kesehatan primer, rujukan, dan pengembangan layanan kesehatan paripurna mengintegrasikan program nasional dan provinsi.

g. Mengembangkan kompetensi SDM kesehatan dan meningkatkan layanan rumah sakit untuk memperluas akses serta menunjang hospitourism.

h. Memperluas pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

i. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga.

j. Memperluas pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah.

k. Peningkatan kinerja diwujudkan dengan pengembangan ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif sebagai wahana interaksi sosial, ekspresi budaya, serta penguatan kebersamaan lintas kelompok.

3. Peningkatan kinerja pembangunan untuk peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan

   a. Perluasan program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja lokal, dan prioritas untuk rumah tangga miskin.

   b. Perluasan jangkauan pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis.

   c. Perluasan area Pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan.

   d. Peningkatan kinerja bursa kerja untuk memperluas akses informasi lowongan kerja

   e. Perluasan program literasi keuangan, wirausaha mikro dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan.

   f. Pengendalian mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah

4. Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial.

   a. Memperluas area pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas

   b. Memperluas cakupan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan.

   c. Memperluas cakupan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah

5. Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
    a. Perluasan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.
    b. Perluasan penguatan landasan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana.
    c. Perluasan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
    d. Perluasan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi
6. Peningkatan kinerja pembangunan untuk terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas:
    a. Peningkatan kesiapan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan.
    b. Peningkatan tata kelola ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial.
    c. Peningkatan area ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi
    d. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah.
    e. Perluasan transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.
7. Peningkatan kinerja Pembangunan untuk terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
    a. Peningkatan kinerja manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan.
    b. Peningkatan kinerja implementasi pemerintahan digital untuk layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.
    c. Peningkatan kinerja perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum.
    d. Peningkatan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, serta memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.

Tahun 2027 diperkuat oleh program-program dari klaster Magelang Kita Peduli yang mendorong pemberdayaan sosial secara inklusif, seperti Pelayanan untuk Warga Miskin, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Berdikarikan Disabilitas, dan Homecare Pusling. Program ini mendukung penciptaan kondisi sosial yang lebih adil dan memperkuat ketahanan masyarakat sebagai fondasi pembangunan SDM.

Di sisi lain, klaster Magelang Tumoto mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan lingkungan fisik yang layak dan sehat, antara lain melalui program Akses Air Bersih Lancar,

Hunian Nyaman (Rehab RTLH), dan Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Infrastruktur dasar ini menjadi landasan penting bagi tumbuhnya SDM yang sehat dan produktif.

Sementara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat melalui program-program dari klaster Magelang Bergaung seperti UMKM Berdaya dan Sahabat Usaha. Kedua program ini mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan menengah melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha, agar pelaku ekonomi lokal memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

Dengan sinergi ketiga klaster program tersebut (Magelang Kita Peduli, Magelang Tumoto, dan Magelang Bergaung) pembangunan SDM dan penguatan ekonomi lokal pada tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya, terampil, serta siap menghadapi tantangan ekonomi modern secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2.5.2.3 Tahun 2028: Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Kota

Tema Pembangunan tahun 2028 adalah "Merawat Kota, Menjaga Masa Depan", yaitu Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Akselerasi Ekonomi dan Ketahanan Kota. Kluster program pembangunan yang dominan adalah: Ngrawat Magelang, yaitu: pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, transportasi publik, dan sistem kota yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan mobilitas, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan transportasi publik diperlukan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim juga menjadi prioritas mengingat meningkatnya risiko cuaca ekstrem, banjir, dan degradasi lingkungan. Mitigasi bencana dan penguatan ketahanan lingkungan melalui sistem drainase yang lebih baik, perlindungan ruang hijau, dan pengurangan emisi karbon akan membantu menciptakan kota yang lebih aman dan layak huni bagi masyarakat. Dengan langkah ini, Kota Magelang dapat tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.

Tema Kota Magelang tahun 2028 selaras dengan tema Provinsi Jawa Tengah **"**Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah: Peningkatan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau" pada aspek penguatan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan. Kota Magelang memperkuat infrastruktur ramah lingkungan seperti transportasi publik, ruang hijau, pengelolaan sampah, dan sistem drainase adaptif untuk mendukung aktivitas ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Langkah ini membantu memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung distribusi logistik, dan menciptakan ruang usaha yang sehat dan aman, termasuk bagi UMKM lokal. Dengan cara ini, Kota Magelang mendukung pemerataan ekonomi dan penguatan industri hijau sebagai pilar pertumbuhan daerah, selaras dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap ketiga (2028) "Akselerasi Kinerja Pembangunan" diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Akselerasi kinerja pembangunan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa:
    a. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis berstandar industri hijau dan ramah lingkungan.

b. Peningkatan distribusi barang, jasa, dan penumpang yang cepat dan aman.

c. Hilirisasi produk unggulan berbasis riset, inovasi, dan ekonomi hijau dengan perluasan akses pasar digital global.

d. Kemitraan antar kelurahan maju untuk membentuk rantai pasok antarwilayah.

e. Sertifikasi halal, HAKI, P-IRT, serta penguatan koperasi dan perekonomian kelurahan.

f. Akselerasi Pembangunan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta-Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A.

g. Akselerasi kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan dan promosi digital.

2. Akselerasi kinerja pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM, dengan fokus pada:

a. Mengakselerasi pencapaian Angka Partisipasi Sekolah dan percepatan penurunan Anak Tidak Sekolah dan penguatan jalur wajib belajar 13 tahun serta percepatan distribusi beasiswa vokasi.

b. Mengakselerasi pendidikan keterampilan dasar dan kewirausahaan berbasis potensi lokal di SD, SMP, dan pendidikan nonformal.

c. Memperluas dan meningkatkan fasilitas pendidikan inklusif, PAUD, dan pendidikan dasar dengan standar mutu yang merata di seluruh kelurahan.

d. Mengembangkan kurikulum adaptif berbasis teknologi, riset lokal, dan literasi digital di satuan pendidikan.

e. Mengoptimalkan pembelajaran sepanjang hayat melalui komunitas belajar, beasiswa, perpustakaan digital, platform e-learning, serta sinergi program nasional dan provinsi.

f. Akselerasi layanan kesehatan gratis, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas..

g. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan preventif, promotif layanan kesehatan primer, rujukan, layanan kesehatan paripurna dan mengintegrasikan program nasional dan provinsi..

h. Mengakselerasi pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

i. Mengakselerasi pemerataan SDM kesehatan dan percepatan pembangunan rumah sakit modern yang mendukung hospitourism.

j. Mengakselerasi kemandirian dan daya saing pemuda melalui literasi digital, keuangan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga.

k. Mengakselerasi pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah.

l. Akselerasi pembangunan sosial dicapai dengan penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan nilai saling menghargai.

3. Akselerasi kinerja pembangunan untuk peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan
    a. Akselerasi pencapaian target program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja lokal, dan prioritas untuk rumah tangga miskin.
    b. Akselerasi pencapaian target pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis.
    c. Akselerasi pencapaian target pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan.
    d. Akselerasi cakupan layanan BLK untuk menyiapkan keterampilan dan koneksi ke dunia usaha.
    e. Akselerasi program literasi keuangan, wirausaha mikro dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan.
    f. Akselerasi evaluasi mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah
4. Akselerasi kinerja pembangunan untuk terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial.
    a. Akselerasi pencapaian kinerja perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas
    b. Akselerasi capaian kinerja pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan.
    c. Akselerasi capaian kinerja penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah.
5. Akselerasi kinerja pembangunan untuk terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
    a. Akselerasi capaian target konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.
    b. Akselerasi capaian target sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana.
    c. Akselerasi capaian target pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
    d. Akselerasi capaian target infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
6. Akselerasi kinerja pembangunan untuk terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas:
    a. Akselerasi kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan.
    b. Akselerasi luasan ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial.
    c. Akselerasi ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi

d. Akselerasi stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah.

e. Akselerasi implementasi transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigsi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.

7. Akselerasi kinerja pembangunan untuk terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan

   a. Akselerasi kinerja manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan.

   b. Akselerasi implementasi pemerintahan digital untuk layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.

   c. Akselerasi perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum.

   d. Akselerasi bukti budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.

Pembangunan infrastruktur Kota Magelang tahun 2028 diarahkan untuk mengintegrasikan nilai Ngrawat Magelang, Tumoto, dan Peduli dalam setiap program yang dijalankan. Fokusnya bukan hanya pada penyediaan fisik, tetapi juga pada penguatan karakter kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada semua kelompok masyarakat. Upaya ini mencakup penataan ruang strategis yang responsif terhadap tantangan lingkungan, peningkatan akses air bersih, serta pengelolaan infrastruktur berbasis data dan pengawasan digital. Infrastruktur diposisikan sebagai instrumen sosial untuk memperkuat interaksi warga, mengurangi ketimpangan spasial, dan membuka peluang ekonomi, sekaligus menjaga kohesi sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ini, pembangunan juga mulai mempersiapkan pondasi nilai Magelang Bergaung melalui pengembangan infrastruktur pariwisata dan layanan publik yang memperkuat citra kota perdagangan dan jasa yang ramah bagi wisatawan dan investor.

Program prioritas yang utama di tahap ini antara lain: Pengembangan transportasi publik, sistem pengelolaan sampah berbasis sirkular, serta peningkatan mitigasi bencana dan ketahanan lingkungan.

3.2.5.2.4 Tahun 2029: Ekspansi Ekonomi Kota dan Peningkatan Jejaring Investasi untuk Daya Saing Kota Berkelanjutan

Tema Pembangunan 2029 adalah: Ekspansi Ekonomi Kota dan Peningkatan Jejaring Investasi untuk Daya saing kota Berkelanjutan, dengan tagline: “Potensi Lokal Menggema Luas". Kluster program pembangunan daerah yang dominan adalah Magelang Bergaung, yaitu ekspansi ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan posisi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan.

Arah pembangunan ini tidak hanya mencerminkan perluasan aktivitas ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi ekonomi yang bersifat struktural. Transformasi ekonomi tahun ini menekankan akselerasi nilai tambah dari sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata melalui digitalisasi, peningkatan efisiensi, dan perluasan kemitraan investasi yang mendorong pertumbuhan lebih merata dan berkelanjutan.

Pada tahun 2029 diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah dan konektivitas ekonomi lokal sejalan dengan tema Provinsi Jawa Tengah “Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan". Fokusnya pada promosi potensi lokal, pengembangan pariwisata sejarah dan budaya, serta perluasan jejaring investasi. Prinsip inklusivitas tetap dijaga melalui dukungan bagi usaha

mikro, pemberdayaan perempuan, dan kelompok rentan agar pertumbuhan ekonomi merata. Pendekatan ini memastikan ekspansi ekonomi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat keadilan sosial, solidaritas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan melalui investasi hijau, tata ruang berkelanjutan, serta pengelolaan pariwisata yang menjaga kelestarian budaya dan ekosistem kota.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap keempat (2029) "Pemantapan Kinerja Pembangunan" diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Pemantapan kinerja pembangunan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa:
    a. Memperkuat perdagangan dan jasa kota agar mampu bersaing di tingkat regional.
    b. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk lokal hingga dikenal di pasar nasional atau internasional.
    c. Mengembangkan ekonomi kreatif dan menghubungkannya dengan jejaring nasional atau internasional.
    d. Menjadikan kelurahan maju sebagai pusat produksi dan distribusi perdagangan dan jasa
    e. Menerapkan industri ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan rantai pasok perdagangan serta jasa
    f. Memantapkan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta-Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A.
    g. Memantapkan kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata.
2. Pemantapan kinerja pembangunan untuk meningkatkan daya saing SDM, dengan fokus pada:
    a. Memantapkan Angka Partisipasi Sekolah menjaga tren penurunan Anak Tidak Sekolah melanjutkan dukungan cakupan wajib belajar 13 tahun dan kemitraan beasiswa vokasi.
    b. Memantapkan layanan pendidikan inklusif, PAUD, dan pendidikan dasar di seluruh kelurahan memenuhi standar nasional.
    c. Memantapkan kurikulum adaptif berbasis teknologi, inovasi, dan kebutuhan lokal di seluruh satuan pendidikan.
    d. Memperluas akses beasiswa dan dukungan pembelajaran sepanjang hayat melalui komunitas belajar, perpustakaan digital, dan e-learning.
    e. Memantapkan mutu tenaga pendidik melalui pembinaan berkelanjutan serta integrasi program nasional dan provinsi untuk pendidikan inklusif dan digitalisasi pembelajaran.
    f. Memantapkan layanan kesehatan gratis, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas
    g. Memantapkan kapasitas dan kualitas layanan preventif dan promotif layanan kesehatan primer, rujukan, dan pengembangan layanan kesehatan paripurna mengintegrasikan program nasional dan provinsi.
    h. Memantapkan kapasitas SDM kesehatan dan penguatan rumah sakit unggulan sebagai pusat layanan dan destinasi hospitourism.
    i. Memantapkan pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

j. Mantapkan kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga.

k. Memantapkan pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah.

l. Pemantapan diarahkan pada peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga.

3. Pemantapan kinerja pembangunan untuk peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan:

   a. Pemantapan target program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja lokal, dan prioritas untuk rumah tangga miskin.

   b. Pemantapan target pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis.

   c. Pemantapan target pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan.

   d. Pemantapan Integrasi LAK, bursa kerja, dan BLK dalam sistem informasi ketenagakerjaan.

   e. Pemantapan program literasi keuangan, wirausaha mikro dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan.

   f. Pemantapan mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah

4. Pemantapan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial.

   a. Pemantapan perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas

   b. Pemantapan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan.

   c. Pemantapan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi

5. Pemantapan kinerja pembangunan untuk terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan:

   a. Pemantapan capaian target konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.

   b. Pemantapan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana.

   c. Pemantapan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

   d. Pemantapan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

6. Pemantapan kinerja pembangunan untuk terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas:
    a. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan.
    b. Pemantapan luasan ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial.
    c. Pemantapan ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi
    d. Pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah.
    e. Pemantapan implementasi transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.
7. Pemantapan kinerja pembangunan terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
    a. Pemantapan manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan.
    b. Pemantapan implementasi pemerintahan digital untuk layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.
    c. Pemantapan kinerja perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum.
    d. Pemantapan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.

Pada 2029, Klaster Magelang Bergaung menjadi simpul yang menghubungkan tiga nilai utama kota secara eksplisit. Magelang Tumoto tercermin dalam strategi ekonomi yang visioner, berbasis inovasi, dan siap menghadapi transformasi digital melalui program seperti UMKM Berdaya, Sahabat Usaha, dan *Hospital Tourism*, yang didukung digitalisasi layanan usaha serta percepatan perizinan berbasis teknologi. Magelang Peduli hadir dalam kebijakan ekspansi ekonomi yang inklusif, memastikan manfaat pertumbuhan dinikmati secara merata oleh usaha mikro, perempuan, dan kelompok rentan, sehingga menguatkan solidaritas sosial dan kolaborasi ekonomi. Ngrawat Magelang memandu keberlanjutan jangka panjang dengan menyeimbangkan pertumbuhan dan kelestarian melalui investasi hijau, tata ruang berkelanjutan, serta pengelolaan pariwisata yang menjaga budaya dan ekosistem. Keterkaitan ketiga nilai ini membentuk arah pembangunan yang tidak hanya memperluas jejaring investasi dan promosi kota di tingkat regional hingga nasional, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi daya saing Kota Magelang. Program unggulan tahun ini Adalah program UMKM Berdaya, Sahabat Usaha, dan Hospital Tourism, Branding Kota Magelang sebagai pusat perdagangan dan jasa, penguatan ekosistem investasi, serta digitalisasi sektor jasa.

3.2.5.2.5 Tahun 2030: Pengokohan Identitas Kota Magelang yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Tema pembangunan tahun 2030 adalah Pengokohan Identitas Kota Magelang yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.

Tahap kelima pembangunan Kota Magelang tahun 2030 dengan tema Pengokohan Identitas Kota Magelang yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan selaras dengan tema Provinsi Jawa Tengah Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan. Pada fase ini, empat nilai utama (Magelang Peduli, Ngrawat Magelang, Magelang Tumoto, dan Magelang Bergaung) terintegrasi harmonis untuk mewujudkan kota yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Transformasi sosial menjadi pengikat, memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor jasa, perdagangan, dan industri kreatif berjalan berdampingan dengan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsolidasi tata kelola dilakukan melalui pemerintahan yang transparan, digital, dan berbasis data, memperkuat kapasitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan presisi. Pendekatan ini mendukung agenda Jawa Tengah dalam membangun daya saing daerah yang tangguh, memperluas konektivitas ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kelima (2030) "Perwujudan Kinerja Pembangunan" diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Perwujudan kinerja pembangunan meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa:
    a. Mengokohkan peran Kota Magelang pusat perdagangan dan jasa di selatan Jawa Tengah.
    b. Mengokohkan kapasitas UMKM dan industri kreatif lokal bersaing di pasar nasional dan global.
    c. Mengokohkan sistem perdagangan berbasis teknologi dengan sistem cerdas dan otomatisasi.
    d. Mengokohkan peran kelurahan mandiri dalam produksi, distribusi, dan inovasi.
    e. Melanjutkan konsolidasi sistem perdagangan dan jasa yang hijau serta sirkular.
    f. Memantapkan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta-Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A.
    g. Memantapkan kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan.
2. Perwujudan kinerja pembangunan meningkatkan daya saing SDM, dengan fokus pada:
    a. Terwujud ekosistem pendidikan berkelanjutan dengan Angka Partisipasi Sekolah tinggi, Anak Tidak Sekolah rendah, wajib belajar 13 tahun tercapai, dan beasiswa vokasi merata tepat sasaran.
    b. Mengokohkan pengarusutamaan pendidikan vokasi dasar, kewirausahaan, dan pelatihan nonformal.
    c. Mengokohkan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif yang dapat diakses semua kelompok masyarakat, termasuk disabilitas.
    d. Mengokohkan kurikulum sekolah berbasis teknologi, inovasi, dan literasi digital.
    e. Mengokohkan pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar, perpustakaan digital, beasiswa, serta perluasan layanan PAUD dan pendidikan dasar di wilayah padat penduduk.
    f. Mewujudkan layanan kesehatan gratis, layanan homecare, dan hospitourism, layanan digital berkelanjutan bebas bagian dari sistem perlindungan sosial terpadu stunting dan berstatus kota sehat.
    g. Menjadikan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan sebagai pusat kesehatan regional.
    h. Terwujud ekosistem kesehatan berkelanjutan dengan SDM kesehatan berkualitas, rumah sakit modern, dan hospitourism sebagai daya saing kota.

i. Mengokohkan pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

j. Mengokohkan pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.

k. Perwujudan prestasi olahraga dan Masyarakat berolahraga

l. Perwujudan ditandai dengan sinkronisasi program nasional dan provinsi dalam pembangunan keluarga serta pengarusutamaan GEDSI sebagai fondasi masyarakat inklusif dan berkelanjutan.

3. Perwujudan kinerja pembangunan peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan:
   a. Perwujudan penurunan pengangguran
   b. Perwujudan perluasan keempatan kerja
   c. Perwujudan Peningkatan dan pemerataan distribusi pendapatan
   d. Perwujudan penurunan ketimpangan pendapatan kelompok masyarakat.
4. Perwujudan kinerja pembangunan terwujudnya kondusivitas daerah berbasis harmoni sosial.
   a. Perwujudan pemajuan kebudayaan: praktik tata nilai budaya, pelestarian tradisi, konservasi warisan budaya.
   b. Perwujudan daerah yang kondusif: penurunan gangggguan trantibum; penurunan konflik.
5. Perwujudan kinerja pembangunan terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
   a. Perwujudan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.
   b. Perwujudan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana.
   c. Perwujudan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
   d. Perwujudan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan.
6. Perwujudan kinerja pembangunan terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas
   a. Perwujudan ketahanan daerah menghadapi risiko bencana
   b. Perwujudan Perbaikan kualitas lingkungan hidup
   c. Perwujudan Tingkat ketahanan pangan kota
7. Perwujudan kinerja pembangunan terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
   a. Perwujudan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, berkinerja prima
   b. Perwujudan pelayanan publik yang responsif dan inklusif
   c. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi

Tabel 3.8 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2026-2030

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional.	Penguatan Landasan Pembangunan **Fokus Tema:** Fondasi Pembangunan Kota Magelang yang Harmonis, Humanis dan Nyaman	Peningkatan Kinerja Pembangunan **Fokus Tema:** Penguatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi yang Inklusif	Akselerasi Kinerja Pembangunan **Fokus Tema:** Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Kota	Pemantapan Kinerja Pembangunan **Fokus Tema:** Ekspansi Ekonomi dan Jejaring Investasi untuk Daya saing kota Berkelanjutan	Perwujudan Kinerja Pembangunan **Fokus Tema:** Pengokohan Identitas Kota Jasa yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Penguatan Landasan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Akselerasi kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Pemantapan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Perwujudan kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa
	1. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa strategis yang terintegrasi dengan pusat aktivitas ekonomi. 2. Memperkuat UMKM dan industri kreatif melalui pendampingan usaha, akses pembiayaan, sertifikasi produk, literasi keuangan digital, serta promosi berbasis e-commerce lokal. 3. Menyelenggarakan pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan program inkubator bisnis bagi pelaku usaha serta startup digital pemula. 4. Mengembangkan kemitraan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas untuk mendorong inovasi dan perluasan pasar perdagangan dan jasa. 5. Memperkuat peran kelurahan sebagai simpul ekonomi lokal dan pusat promosi produk unggulan kota.	1. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis terintegrasi dengan infrastruktur kota. 2. Penguatan UMKM dan industri kreatif melalui pendampingan, sertifikasi produk, dan e-commerce lokal. 3. Pelatihan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan inkubator bisnis bagi pelaku usaha dan startup. 4. Kemitraan pemerintah-usaha-komunitas untuk inovasi dan perluasan pasar. 5. Pemberdayaan kelurahan sebagai penggerak ekonomi lokal.	1. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa strategis berstandar industri hijau dan ramah lingkungan. 2. Peningkatan distribusi barang, jasa, dan penumpang yang cepat dan aman. 3. Hilirisasi produk unggulan berbasis riset, inovasi, dan ekonomi hijau dengan perluasan akses pasar digital global. 4. Kemitraan antar kelurahan maju untuk membentuk rantai pasok antarwilayah. 5. Sertifikasi halal, HAKI, P-IRT, serta penguatan koperasi dan perekonomian kelurahan.	1. Memperkuat perdagangan dan jasa kota agar mampu bersaing di tingkat regional. 2. Meningkatkan kualitas dan pemasaran produk lokal hingga dikenal di pasar nasional atau internasional. 3. Mengembangkan ekonomi kreatif dan menghubungkannya dengan jejaring nasional atau internasional. 4. Menjadikan kelurahan maju sebagai pusat produksi dan distribusi perdagangan dan jasa 5. Menerapkan industri ramah lingkungan dan menjaga keberlanjutan rantai pasok perdagangan serta jasa	1. Mengokohkan peran Kota Magelang pusat perdagangan dan jasa di selatan Jawa Tengah. 2. Mengokohkan kapasitas UMKM dan industri kreatif lokal bersaing di pasar nasional dan global. 3. Mengokohkan sistem perdagangan berbasis teknologi dengan sistem cerdas dan otomatisasi. 4. Mengokohkan peran kelurahan mandiri dalam produksi, distribusi, dan inovasi. 5. Melanjutkan konsolidasi sistem perdagangan dan jasa yang hijau serta sirkular.
	6. Pengembangan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta- Surakarta, termasuk memulai city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A, yaitu: Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenities, Aktivitas, dan Layanan Tambahan 7. Memperkuat kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif	6. Perluasan Pembangunan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang- Yogyakarta- Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A. 7. Memperluas kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan dan promosi digital 8. Memperluas pendidikan vokasi, kewirausahaan, dan literasi digital berbasis potensi lokal hingga tingkat SMP dan pendidikan nonformal secara merata 9. Pengembangan ekosistem pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang inklusif, melalui kemitraan lintas sektor, termasuk penguatan keuangan syariah dan halal value chain	6. Akselerasi Pembangunan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang- Yogyakarta- Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A. 7. Akselerasi kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan dan promosi digital	6. Memantapkan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta- Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A. 7. Memantapkan kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan	6. Memantapkan destinasi wisata unggulan yang terhubung dengan infrastruktur koridor Magelang-Yogyakarta- Surakarta, city beautification, dan pemenuhan elemen dasar 6A. 7. Memantapkan kelembagaan, SDM pariwisata, kemitraan UMKM pariwisata, industri kreatif serta integrasi program nasional/provinsi untuk kampung wisata percontohan
Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat					
Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	Penguatan Landasan daya saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia	Akselerasi daya saing Sumber Daya Manusia	Pemantapan daya saing Sumber Daya Manusia	Perwujudan Kinerja Sumber Daya Manusia Kota Magelang yang Berdaya saing
	Pendidikan: 1. Mempertahankan Angka Partisipasi Sekolah dan menekan Anak Tidak Sekolah sebagai dasar	1. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah dan menurunkan Anak Tidak Sekolah melalui intervensi terarah meningkatkan cakupan wajib belajar 13 tahun dan fasilitasi beasiswa vokasi.	1. Mengakselerasi pencapaian Angka Partisipasi Sekolah dan percepatan penurunan Anak Tidak Sekolah dan penguatan jalur wajib belajar 13 tahun serta percepatan distribusi beasiswa vokasi.	1. Memantapkan Angka Partisipasi Sekolah menjaga tren penurunan Anak Tidak Sekolah melanjutkan dukungan cakupan wajib belajar 13 tahun dan kemitraan beasiswa vokasi.	1. Terwujud ekosistem pendidikan berkelanjutan dengan Angka Partisipasi Sekolah tinggi, Anak Tidak Sekolah rendah, wajib belajar 13 tahun tercapai,

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	pencapaian wajib belajar 13 tahun, disertai pembukaan akses beasiswa vokasi. 2. Memulai pengarusutamaan pendidikan vokasi dasar, kewirausahaan, dan kompetensi digital sejak SD, SMP, dan pendidikan nonformal sesuai potensi lokal. 3. Memperluas akses pendidikan inklusif dan PAUD dengan pemenuhan sarana-prasarana minimum di seluruh kelurahan. 4. Mengembangkan komunitas belajar dan perpustakaan digital untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. 5. Mengintegrasikan program nasional dan provinsi seperti makan siang gratis, sekolah unggulan, dan sekolah inklusif di setiap kecamatan.	2. Memperluas layanan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan inklusif yang ramah disabilitas dengan sarana-prasarana memadai di seluruh kelurahan. 3. Mengoptimalkan kurikulum berbasis teknologi dan inovasi, serta memperkuat mutu pendidikan melalui pelatihan pendidik dan evaluasi pembelajaran. 4. Mengembangkan pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar, beasiswa perpustakaan digital, dan integrasi program nasional maupun provinsi.	2. Mengakselerasi pendidikan keterampilan dasar dan kewirausahaan berbasis potensi lokal di SD, SMP, dan pendidikan nonformal. 3. Memperluas dan meningkatkan fasilitas pendidikan inklusif, PAUD, dan pendidikan dasar dengan standar mutu yang merata di seluruh kelurahan. 4. Mengembangkan kurikulum adaptif berbasis teknologi, riset lokal, dan literasi digital di satuan pendidikan. 5. Mengoptimalkan pembelajaran sepanjang hayat melalui komunitas belajar, beasiswa, perpustakaan digital, platform e-learning, serta sinergi program nasional dan provinsi.	2. Memantapkan layanan pendidikan inklusif, PAUD, dan pendidikan dasar di seluruh kelurahan memenuhi standar nasional. 3. Memantapkan kurikulum adaptif berbasis teknologi, inovasi, dan kebutuhan lokal di seluruh satuan pendidikan. 4. Memperluas akses beasiswa dan dukungan pembelajaran sepanjang hayat melalui komunitas belajar, perpustakaan digital, dan e-learning. 5. Memantapkan mutu tenaga pendidik melalui pembinaan berkelanjutan serta integrasi program nasional dan provinsi untuk pendidikan inklusif dan digitalisasi pembelajaran.	dan beasiswa vokasi merata tepat sasaran 2. Mengokohkan pengarusutamaan pendidikan vokasi dasar, kewirausahaan, dan pelatihan nonformal. 3. Mengokohkan ketersediaan fasilitas pendidikan inklusif yang dapat diakses semua kelompok masyarakat, termasuk disabilitas. 4. Mengokohkan kurikulum sekolah berbasis teknologi, inovasi, dan literasi digital. 5. Mengokohkan pendidikan sepanjang hayat melalui komunitas belajar, perpustakaan digital, beasiswa, serta perluasan layanan PAUD dan pendidikan dasar di wilayah padat penduduk.
	Kesehatan: 6. Melanjutkan perluasan akses layanan kesehatan gratis dan digital, penurunan stunting, perbaikan gizi anak., layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas 7. Melanjutkan layanan preventif dan promotif, layanan kesehatan primer dan rujukan, pengembangan layanan kesehatan paripurna 8. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan secara merata dan memulai penguatan sarana prasarana dasar rumah sakit sebagai landasan hospitourism.	5. Memperluas layanan kesehatan gratis berbasis digital, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas. 6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan preventif dan promotif layanan kesehatan primer, rujukan, dan pengembangan layanan kesehatan paripurna mengintegrasikan program nasional dan provinsi. 7. Mengembangkan kompetensi SDM kesehatan dan meningkatkan layanan rumah sakit untuk memperluas akses serta menunjang hospitourism.	6. Akselerasi layanan kesehatan gratis, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas. 7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan preventif, promotif layanan kesehatan primer, rujukan, layanan kesehatan paripurna dan mengintegrasikan program nasional dan provinsi. 8. Mengakselerasi pemerataan SDM kesehatan dan percepatan pembangunan rumah sakit modern yang mendukung hospitourism.	6. Memantapkan layanan kesehatan gratis, penurunan stunting, gizi anak, serta layanan homecare bagi lansia dan penyandang disabilitas 7. Memantapkan kapasitas dan kualitas layanan preventif dan promotif layanan kesehatan primer, rujukan, dan pengembangan layanan kesehatan paripurna mengintegrasikan program nasional dan provinsi. 8. Memantapkan kapasitas SDM kesehatan dan penguatan rumah sakit unggulan sebagai pusat layanan dan destinasi hospitourism.	6. Mewujudkan layanan kesehatan gratis, layanan homecare, dan hospitourism, layanan digital berkelanjutan bebas bagian dari sistem perlindungan sosial terpadu stunting dan berstatus kota sehat. 7. Menjadikan fasilitas layanan kesehatan primer dan rujukan sebagai pusat kesehatan regional. 8. Terwujud ekosistem kesehatan berkelanjutan dengan SDM kesehatan berkualitas, rumah sakit modern, dan hospitourism sebagai daya saing kota.
	Literasi IPTEKS: 9. Menginisiasi pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.	8. Memperluas pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.	9. Mengakselerasi pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.	9. Memantapkan pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.	9. Mengokohkan pengembangan literasi publik berbasis perpustakaan modern untuk diseminasi IPTEKS bagi pengembangan keterampilan SDM di industri kreatif, teknologi digital, dan kewirausahaan.
	Pemuda dan Olahraga: 10. Menguatkan fondasi kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga. 11. Melanjutkan pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah dan klub olahraga, serta pemasyarakatan olahraga sebagai gaya hidup sehat	9. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga. 10. Memperluas pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah, serta pemasyarakatan olahraga sebagai gaya hidup sehat	10. Mengakselerasi kemandirian dan daya saing pemuda melalui literasi digital, keuangan, kewirausahaan, pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga. 11. Mengakselerasi pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah, serta pemasyarakatan olahraga sebagai gaya hidup sehat	10. Mantapkan kemandirian dan daya saing pemuda dalam literasi digital, keuangan, kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan startup berbasis seni-budaya dan olahraga. 11. Memantapkan pembinaan dan prestasi olahraga dengan peningkatan fasilitas di kelurahan, pembinaan atlet, dan integrasi program dengan sekolah, serta pemasyarakatan olahraga sebagai gaya hidup sehat	10. Perwujudan prestasi dan daya saing pemuda 11. Perwujudan prestasi olahraga dan Masyarakat berolahraga
	Ketahanan Keluarga: 12. Penguatan landasan dilakukan melalui penerapan prinsip GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai dasar terciptanya masyarakat yang harmonis dan humanis.	11. Peningkatan kinerja diwujudkan dengan pengembangan ruang publik yang aman, ramah, dan inklusif sebagai wahana interaksi sosial, ekspresi budaya, serta penguatan kebersamaan lintas kelompok.	12. Akselerasi pembangunan sosial dicapai dengan penguatan layanan sosial berbasis komunitas untuk pencegahan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan nilai saling menghargai.	12. Pemantapan diarahkan pada peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan fungsi sosial, ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan rumah tangga.	12. Perwujudan ditandai dengan sinkronisasi program nasional dan provinsi dalam pembangunan keluarga serta pengarusutamaan GEDSI sebagai fondasi masyarakat inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Penguatan landasan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Peningkatan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Akselerasi kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Pemantapan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan	Perwujudan Penyediaan kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan
	Kesempatan kerja: 1. Melanjutkan program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dan prioritas untuk rumah tangga miskin. 2. Melanjutkan pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB). 3. Menyusun dan memutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan. 4. Penguatan jejaring tenaga kerja dengan pengaktifan LAK dan pemetaan kebutuhan kerja lokal.	1. Perluasan program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dan prioritas untuk rumah tangga miskin. 2. Perluasan jangkauan pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB). 3. Perluasan area Pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan. 4. Peningkatan kinerja bursa kerja untuk memperluas akses informasi lowongan kerja.	1. Akselerasi pencapaian target program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dan prioritas untuk rumah tangga miskin. 2. Akselerasi pencapaian target pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB). 3. Akselerasi pencapaian target pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan. 4. Akselerasi cakupan layanan BLK untuk menyiapkan keterampilan dan koneksi ke dunia usaha.	1. Pemantapan target program padat karya produktif dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia kerja dan prioritas untuk rumah tangga miskin. 2. Pemantapan target pemberdayaan ekonomi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui wirausaha dasar dan inkubasi bisnis, serta fasilitasi pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB). 3. Pemantapan target pemutakhirkan basis data tenaga kerja serta sistem informasi pasar kerja daerah berbasis kelurahan. 4. Pemantapan Integrasi LAK, bursa kerja, dan BLK dalam sistem informasi ketenagakerjaan.	1. Perwujudan penurunan pengangguran 2. Perwujudan perluasan keempatan kerja
	Distribusi pendapatan dan penurunan ketimpangan: 5. Melanjutkan program literasi keuangan, wirausaha mikro, pelatihan vokasi dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan. 6. Menyusun mekanisme insentif sosial ekonomi berbasis data akurat untuk kelompok 40% terbawah.	5. Perluasan program literasi keuangan, wirausaha mikro, pelatihan vokasi dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan. 6. Pengendalian mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah.	5. Akselerasi program literasi keuangan, wirausaha mikro, pelatihan vokasi, dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan. 6. Akselerasi evaluasi mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah.	5. Pemantapan program literasi keuangan, wirausaha mikro, pelatihan vokasi, dan padat karya bagi masyarakat miskin dan rentan, dengan afirmasi awal untuk perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, serta dan lansia produktif, wilayah kantong kemiskinan. 6. Pemantapan mekanisme jaring pengaman sosial berbasis data pilah terpadu untuk kelompok 40% terbawah.	3. Perwujudan Peningkatan dan pemerataan distribusi pendapatan 4. Perwujudan penurunan ketimpangan pendaoat kelompok Masyarakat
Sasaran 2.3: Terwujudnya kondusivitas daerah	Penguatan landasan Pembangunan kondusivitas daerah	Peningkatan kondusivitas daerah	Akselerasi Pembangunan kondusivitas daerah	Pemantapan kondusivitas daerah	Perwujudan kondusivitas daerah
	1. Melanjutkan pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas 2. Melanjutkan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan. 3. Melanjutkan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah	1. Memperluas area pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas 2. Memperluas cakupan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan. 3. Memperluas cakupan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah	1. Akselerasi pencapaian kinerja pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas 2. Akselerasi capaian kinerja pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan. 3. Akselerasi capaian kinerja penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi dan Pendidikan karakter di kurikulum sekolah	1. Pemantapan pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta warisan budaya tak benda melalui penetapan status legal, inventarisasi, dan revitalisasi objek prioritas, dengan pelibatan komunitas 2. Pemantapan pemberdayaan pelaku seni tradisi, pelestari budaya, dan ekspresi budaya melalui festival komunitas tingkat kelurahan. 3. Pemantapan penguatan toleransi dan kohesi sosial antarumat beragama dengan memperkuat FKUB, forum dialog lintas iman, dan pendidikan moderasi	1. Perwujudan pemajuan kebudayaan: praktik tata nilai budaya, pelestarian tradisi, konservasi warisan budaya 2. Perwujudan daerah yang kondusif: penurunan gangggguan trantibum; penurunan konflik
Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan					
Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan landasan Pembangunan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kinerja Pembangunan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi Pembangunan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantaan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan
	1. Melanjutkan penguatan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.	1. Perluasan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.	1. Akselerasi capaian target konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.	1. Pemantapan capaian target konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga.	1. Perwujudan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	2. Melanjutkan penguatan landasan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana. 3. Melanjutkan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. 4. Melanjutkan penguatan landasan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.. 5. Melanjutkan penguatan konektivitas dan kualitas infrastruktur perkotaan untuk mendukung pusat-pusat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga	2. Perluasan penguatan landasan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana. 3. Perluasan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. 4. Perluasan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi	2. Akselerasi capaian target sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana. 3. Akselerasi capaian target pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. 4. Akselerasi capaian target infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi	2. Pemantapan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana. 3. Pemantapan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. 4. Pemantapan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi	ekonomi, pelayanan publik, dan mobilitas warga. 2. Perwujudan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk ketahanan air, ruang hijau, dan pengendalian risiko bencana. 3. Perwujudan pemerataan akses infrastruktur dasar yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. 4. Perwujudan infrastruktur cerdas dan ramah lingkungan
Sasaran 3.2.: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Penguatan landasan ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kinerja ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang	Akselerasi Kinerja ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Pemantapan Kinerja ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas	Perwujudan ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas
	1. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan. 2. Mengelola ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi dan sosial. 3. Mengembangkan ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi 4. Menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah. 5. Landasan transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.	1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan. 2. Peningkatan tata kelola ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial. 3. Peningkatan area ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah. 5. Perluasan transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.	1. Akselerasi kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan. 2. Akselerasi luasan ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial. 3. Akselerasi ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi 4. Akselerasi stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah. 5. Akselerasi implementasi transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.	1. Pemantapan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana dan sistem peringatan dini di wilayah rawan. 2. Pemantapan luasan ruang terbuka, drainase, dan tutupan lahan sebagai penopang ekologi & sosial. 3. Pemantapan ketahanan pangan lokal melalui lahan produktif, urban farming, kearifan lokal masyarakat, dan sistem logistik berbasis teknologi informasi 4. Pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan melalui penguatan rantai pasok dan kerja sama antar daerah. 5. Pemantapan implementasi transisi energi bersih, transportasi ramah lingkungan, praktik ekonomi hijau, dan ekonomi sirkuler sebagai mitigasi risiko lingkungan dan resiliensi wilayah.	1. Perwujudan ketahanan daerah menghadapi risiko bencana 2. Perwujudan Perbaikan kualitas lingkungan hidup 3. Perwujudan Tingkat ketahanan pangan kota
Tujuan 4: Terwujudnya pemerintahan dan layanan publik yang profesional, inklusif, dan akuntabel					
Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Penguatan landasan birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Akselerasi pengembangan birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan birokrasi dan pelayanan publikk yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan
	1. Mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan 2. Penguatan landasan manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan. 3. Penguatan landasan pemerintahan digital dan inovasi layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem	1. Peningkatan kinerja manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Peningkatan kinerja implementasi pemerintahan digital dan inovasi layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.	1. Akselerasi kinerja manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Akselerasi kinerja implementasi pemerintahan digital dan inovasi layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.	1. Pemantapan manajemen organisasi berbudaya kinerja dan meritokrasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan program prioritas nasional dan provinsi dalam tata kelola pemerintahan. 2. Pemantapan implementasi pemerintahan digital dan inovasi layanan publik, administrasi kependudukan, kanal pembayaran nontunai, serta integrasi sistem satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip.	1. Perwujudan birokrasi yang berintegritas, akuntabel, berkinerja prima 2. Perwujudan pelayanan public yang responsive dan inklusif 3. Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	satu data daerah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dan akuntabilitas arsip. 4. Penguatan landasan perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum. 5. Penguatan landasan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.	3. Peningkatan kinerja perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum. 4. Peningkatan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.	3. Akselerasi kinerja perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum. 4. Akselerasi bukti budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.	3. Pemantapan kinerja perencanaan-penganggaran berbasis hasil, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta pembiayaan alternatif yang tidak bertentangan dengan hukum. 4. Pemantapan budaya integritas ASN, meningkatkan pengawasan internal, memperluas pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah, peran DPRD, serta partisipasi masyarakat melalui kanal digital yang transparan.	

3.2.6 Program Unggulan Walikota dan Klaster Program Prioritas

Pencapaian tujuan dan sasaran untuk menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi diintervensi dengan program unggulan kampanye Kepala daerah dan dikelola dalam klaster program prioritas.

Daftar program unggulan dan program prioritas untuk RPJMD Kota Magelang 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.9 Daftar Program Unggulan dan Program Prioritas dengan Konversi Program Nomenklatur

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
	Program Unggulan			
1	Sahabat Usaha	Program Sahabat Usaha memberikan bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta per warga miskin yang memiliki usaha berdasarkan Data kemiskinan melalui mekanisme Musrenbang Kelurahan, dengan alokasi Rp. 40 juta per RW, dikelola oleh OPD terkait sesuai jenis usaha, guna meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat.	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Sosial • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Penanaman Modal
2	Program Pro-DAMAI	Program Pro-DAMAI mengalokasikan Rp. 50 juta per RT untuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan infrastruktur, olahraga, seni, budaya, dan kemasyarakatan berbasis musrenbang kelurahan, dengan mekanisme swakelola atau dikelola OPD sesuai kewenangan, dipayungi regulasi peraturan wali kota.	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan • Program Pengelolaan Persampahan • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga	• Pendidikan • Kebudayaan • Kesehatan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Kawasan Permukiman • Sosial • Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepemudaan dan Olahraga • Tenaga Kerja • Perhubungan • Komunikasi dan Informatika • Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Lingkungan Hidup • Kewilayahan

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			• Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Kepemudaan	
3	Berdikarikan Disabilitas	Program Berdikari untuk Disabilitas mendukung kemandirian dan peningkatan kapasitas difabel di Kota Magelang melalui pelatihan keterampilan, peluang kerja di BLUD dan BUMD, serta bantuan modal usaha hingga Rp. 5 juta bagi yang telah mengembangkan usaha.	• Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pelayanan Penananaman Modal • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kelolahragaan • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Tenaga Kerja • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah • Kesehatan • Penanaman Modal • Kepemudaan dan Olahraga
4	Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH	Program Hunian Nyaman menargetkan pengurangan RTLH dan backlog perumahan melalui pembangunan 200 unit hunian, pembangunan rusun/rusunawa, serta rehab RTLH	• Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Perumahan dan Permukiman • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya	Program Z-Hub menyediakan wadah fisik dan virtual bagi Gen-Z (12-27 tahun) untuk berkarya, berinteraksi, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Pemkot Magelang melalui diskusi tatap muka dan virtual.	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Pengelolaan Pendidikan	• Kepemudaan dan Olahraga • Perindustrian • Tenaga Kerja • Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Pendidikan • Kebudayaan

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			• Program Promosi Penanaman Modal • Program Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Sosial • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Pogram pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	• Pertanian • Ketahanan Pangan • Lingkungan Hidup • Penanaman Modal • Sosial • Pemerintahan Umum
6	Program Pelayanan untuk Warga Miskin	Program Pelayanan untuk Warga Miskin menyediakan layanan terpadu satu pintu bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan administratif secara tuntas dan efisien.	• Program Rehabilitasi Sosial • Program Pemberdayaan Sosial	• Sosial
7	Harapan Magelang	Program Harapan Magelang memberikan beasiswa Rp. 5 juta per semester bagi warga kurang mampu untuk mengakses pendidikan vokasi, membuka peluang bagi generasi emas Kota Magelang	• Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Tenaga Kerja • Sosial
8	Anak Merdeka	Program Anak Merdeka bertujuan menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencegah kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, dan stunting melalui edukasi keluarga, pendampingan, serta layanan konseling terpadu lintas OPD dan instansi.	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) • Program Perlindungan Khusus Anak • Pogram pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Kesehatan • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman, dan Sejahtera	Program Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman, dan Sejahtera meningkatkan kapasitas perempuan untuk berusaha, memberikan perlindungan dari kekerasan, serta menyediakan wadah komunikasi, pendampingan, dan aktivitas produktif bagi lansia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan	• Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Tenaga Kerja • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
			• Pogram pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pelayanan Penanaman Modal	• Kesehatan • Penanaman Modal
10	Angkot Pelajar Gratis	Program Angkot Pelajar Gratis menyediakan transportasi gratis bagi pelajar pada jam sekolah, meringankan beban biaya keluarga kurang mampu, mendukung keberlanjutan usaha angkutan kota, serta mengurangi emisi kendaraan untuk menjaga kualitas udara Kota Magelang.	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),	• Perhubungan
11	Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan	Program Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan menyediakan dana operasional Rp. 50 juta per tahun bagi camat dan lurah untuk memberikan bantuan cepat bagi masyarakat terdampak bencana serta menangani infrastruktur yang rusak, sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.	• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Kewilayahan
12	KTP-KU	Program KTP-KU memberikan kemudahan layanan bagi warga ber-KTP Kota Magelang, termasuk akses gratis fasilitas kesehatan bagi yang belum memiliki BPJS serta keringanan atau pembebasan retribusi bagi pedagang pasar tradisional dan PKL.	• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Kesehatan
13	MakClinge: Magelang Clean Sheet	Program MakClinge: Magelang Clean Sheet mengoptimalkan daur ulang sampah melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat, pemilahan sampah organik dan non-organik, serta pemanfaatan sampah plastik dan organik menjadi produk bernilai ekonomi guna mengurangi volume sampah ke TPSA dan mewujudkan Kota Magelang bebas polusi sampah.	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	• Lingkungan Hidup • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Poliklinik Pagi-Sore: Puskesmas dan Rumah Sakit	Program Poliklinik Pagi-Sore memperpanjang jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga pukul 20.00 untuk mengurangi antrean, meningkatkan akses layanan bagi ASN dan masyarakat umum, serta meningkatkan kepuasan pasien dengan penambahan SDM BLUD.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Kesehatan

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
15	Homecare Pusling	Program Homecare Pusling menyediakan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan lansia melalui validasi pasien via WhatsApp serta kunjungan langsung ke rumah, dengan target 100% akses layanan dalam dua tahun melalui kolaborasi tenaga ahli.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Kesehatan
16	RSUD Tidar "RS Tanpa Dinding	Program RSUD Tidar "RS Tanpa Dinding" menjadikan rumah sakit sebagai pusat edukasi kesehatan dan hospital tourism dengan galeri preventif-promotif, penerapan smart hospital, serta layanan telemedisin yang memungkinkan konsultasi kesehatan jarak jauh dan otomatisasi layanan berbasis teknologi.	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Kesehatan
17	Hospital Tourism	Program Hospital Tourism mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sektor pariwisata melalui seminar kesehatan, kerja sama universitas dan organisasi profesi, serta kolaborasi dengan perhotelan dan wisata kuliner guna meningkatkan kunjungan pasien dan keluarga serta mendukung ekonomi kreatif Kota Magelang.	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	• Kesehatan • Pariwisata
18	Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat	Program Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat meningkatkan layanan kesehatan khususnya KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi) dengan menambah spesialis, menyediakan layanan "one day care," serta memperkuat kolaborasi layanan darurat PSC guna meningkatkan akses dan efisiensi perawatan pasien.	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Kesehatan
19	Aplikasi "Kesehatan Memudahkan Rakyat"	Aplikasi "Kesehatan Memudahkan Rakyat" menyediakan layanan kesehatan terintegrasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan klinik, memungkinkan pendaftaran periksa, konsultasi online, akses program vaksin, informasi darurat, serta berita kesehatan, yang terhubung dengan Command Center Pemkot Magelang.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	• Kesehatan • Komunikasi dan Informatika
	Program Prioritas			
20	Rumah Singgah	Program Rumah Singgah menyediakan tempat tinggal sementara bagi individu atau kelompok yang membutuhkan perlindungan darurat, seperti perempuan korban KDRT, sebagai bagian dari visi Magelang Kota Humanis.	• Program Rehabilitasi Sosial	• Sosial
21	Akses Air Bersih Lancar	Program Akses Air Bersih Lancar meningkatkan layanan air bersih dengan penggantian pipa tua, pengurangan kebocoran (NRW), pemetaan DMA, serta pengembangan Zona Air Minum Prima (ZAMP) untuk memastikan pasokan air yang lebih stabil dan layak konsumsi.	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	• Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Bantuan Bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Bantuan Bagi Petugas Rumah Ibadah memberikan dukungan kesejahteraan bagi petugas dari semua agama melalui bantuan finansia	• Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	• Pendukung Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah)

No	Program	Penjelasan	Konversi ke Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
23	UMKM Berdaya	Program UMKM Berdaya memperkuat peran UMKM dalam perekonomian daerah melalui bantuan permodalan, akses perbankan, promosi nasional, serta bimbingan digital marketing yang berkolaborasi dengan Gen-Z	• Program Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	• Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
24	Padat Karya	Program Padat Karya memberikan peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat melalui pekerjaan berbasis musrenbang, termasuk infrastruktur, produksi pertanian, serta pengelolaan sampah, limbah, dan lingkungan permukiman.	• Program Penempatan Tenaga Kerja	• Tenaga Kerja • Perumahan dan Kawasan Permukiman
25	Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub	Program Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub memperkuat keharmonisan antar umat beragama melalui doa bersama, kegiatan charity lintas agama, serta inisiatif kebersamaan lainnya untuk menciptakan Kota Magelang yang kondusif dan berkelanjutan.	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	• Pemerintahan Umum • Pendukung Pemerintahan (Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah)
26	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum.	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Pendukung Pemerintahan (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)
27	Fasilitasi bagi Ketua RW dan Ketua RT	Program Fasilitasi bagi Ketua RW dan Ketua RT mendukung peran mereka sebagai ujung tombak pembangunan melalui peningkatan kapasitas, studi banding, serta pemberian apresiasi untuk memperkuat implementasi kebijakan daerah.	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Pendukung Pemerintahan (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) • Kewilayahan
28	Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah mengoptimalkan penggunaan aset tanah dan bangunan strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan komersial, seperti penyewaan atau pengelolaan sebagai homestay.	• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Keuangan
29	Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Program Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN mengoptimalkan rekrutmen, promosi, remunerasi, serta reward and punishment berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk meningkatkan profesionalisme serta efektivitas organisasi pemerintahan.	• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Kepegawaian
30	Buka-Buka-an Anggaran	Program Buka-Buka-an Anggaran meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dengan menyajikan informasi anggaran daerah secara lebih mudah dipahami dan dapat diakses masyarakat melalui berbagai media.	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	• Keuangan

3.2.6.1 Kluster Program Unggulan dan Program Prioritas Berdasarkan Unsur Visi

1. Kota Perdagangan dan Jasa

   a. Kluster Program Magelang Tumoto. Kluster program ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk menata Kota Magelang, dalam rangka meningkatkan penampilan fisik dan menata kembali kawasan-kawasan strategis Kota Magelang

   b. Kluster program Magelang Bergaung. Kluster program ini berisi serangkain program dan kegiatan untuk menggelar berbagai event dengan skala lokal, regional, nasional dan internasional.

2. Kota Hamonis, Humanis, Nyaman.

   Kluster Program Magelang Kita Peduli. Kluster program ini berisi serangkaian program dan kegiatan untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan secara lebih komprehensif.

3. Kota Berkelanjutan

   Kluster program Ngrawat Magelang. Kluster program ini utamanya ditargetkan sebagai komponen utama dalam mendukung tercapainya kota berkelanjutan. Program dan kegiatan mencakup fokus utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, mengatasi isu kenaikan iklim, juga mewadahi kegiatan dalam rangka 'nguri-uri' budaya dan kearifan lokal kota Magelang

Selanjutnya pengelompokan program unggulan dan program prioritas berdasarkan misi.

Tabel 3.10 Program Unggulan dan Program Prioritas berdasarkan Misi

Misi		Program Prioritas	Program Unggulan
1	Menciptakan masyarakat yang bermartabat.	Rumah Singgah, Padat karya, Fasilitasi Ketua RW dan Ketua RT	Pelayanan Untuk Warga Miskin, Anak Merdeka, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman dan Sejahtera, Berdikarikan Disabilitas, Homecare Pusling
2	Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan	Akses Air Bersih Lancar	Pro-DAMAI, Hunian Nyaman: Bangun Hunian dan Rehab RTLH, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan untuk Masyarakat, MakClinge: Magelang Clean Sheet
3	Menciptakan keharmonisan antar umat beragama	Hidup Beragama Dalam DAMAI, Harmonis, Guyub; Bantuan bagi petugas rumah ibadah	
4	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Pro-DAMAI, Z-Hub: Wadah Anak Muda Berkarya, Harapan Magelang, Angkot Pelajar Gratis, Poliklinik Pagi-Sore Puskesmas dan Rumah Sakit, RSUD Tidar Konsep "RS Tanpa Dinding, Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, Aplikasi "Kesehatan Memudahkan Rakyat, Perempuan Berdaya, Lansia Mantab, Nyaman, dan Sejahtera

Misi		Program Prioritas	Program Unggulan
5	Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing	UMKM Berdaya, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Sahabat Usaha, Hospital Tourism
6	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif, Penerapan Meritokrasi Dalam Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), Buka-Buka-an Anggaran	KTP-KU, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 3.11 Kaitan Program Unggulan dan Program Prioritas dengan Asta Cita

Asta Cita		Program Unggulan dan/atau Program Prioritas	Relasi Dukungan
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub	Kota Magelang melalui Program Prioritas Hidup beragama dalam Damai, Harmonis, Guyub berkontribusi pada prioritas Nasional dengan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Dana Wibawa Kec dan Kel Pro DAMAI MakClinge (mendefinisikan pertahanan dalam konteks lokal)	Kota Magelang, melalui Program Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, Pro DAMAI, MakClinge berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat ketahanan sosial-ekonomi lokal sebagai basis pertahanan non-militer dalam mendukung ketahanan pangan, energi, air, pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru. Penerapan konsep Ekonomi Biru di Kota Magelang diarahkan pada pengelolaan sumber daya perikanan skala kota, khususnya melalui pengembangan budidaya ikan air tawar dan pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas budidaya dengan teknologi yang berkelanjutan, penguatan kapasitas kelompok pembudidaya, serta pengembangan

	Asta Cita	Program Unggulan dan/atau Program Prioritas	Relasi Dukungan
			industri pengolahan untuk memberikan nilai tambah dan memperluas akses pasar. Dengan mendorong keterkaitan antara subsektor perikanan, pariwisata, dan kuliner, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen menjadikan perikanan skala kota sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi biru. Selain meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja, arah kebijakan ini juga menekankan pada pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara efisien agar selaras dengan prinsip pembangunan rendah karbon dan keberlanjutan lingkungan. Program ini menciptakan ruang adaptasi lokal untuk menghadapi tantangan global (krisis iklim, krisis pangan-energi), sekaligus memperkuat ketahanan wilayah yang menjadi prasyarat utama mewujudkan Indonesia tangguh dan mandiri.
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prodamai Sahabat Usaha Berdikari Disabilitas Hunian Nyaman Z-Hub Hospital Tourism Angkot Pelajar Gratis UMKM Berdaya Padat Karya	Kota Magelang, melalui program Pro-DAMAI, Sahabat Usaha, Berdikarikan Disabilitas, Hunian Nyaman, Z-Hub, Hospital Tourism, Angkot Pelajar Gratis, UMKM Berdaya, Padat Karya berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat infrastruktur dasar, memperluas akses lapangan kerja berkualitas, mendukung kewirausahaan berbasis koperasi, mendorong pengembangan industri kreatif dan digital, serta menciptakan ekosistem transportasi publik ramah lingkungan. Program-program ini membangun ketahanan sosial-ekonomi lokal, menciptakan ruang inovasi dan pemberdayaan yang mendukung penguatan kemandirian ekonomi bangsa.

Asta Cita		Program Unggulan dan/atau Program Prioritas	Relasi Dukungan
4	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Prodamai Berdikari Disabilitas Z-Hub Pelayanan untuk Warga Miskin Harapan Magelang Anak Merdeka Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman dan Sejahtera Angkot Pelajar Gratis Puskesmas-RS Pagi Sore Homecare Pusling RS Tanpa Dinding Aplikasi Kesehatan Memudahkan Masyarakat (KEMURA)	Kota Magelang berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, memperluas akses pendidikan melalui beasiswa dan fasilitas transportasi pelajar gratis, memperluas layanan kesehatan melalui perpanjangan jam layanan, homecare, dan digitalisasi layanan kesehatan, mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas melalui ruang partisipasi kreatif, program usaha mikro, dan bantuan sosial, serta mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi melalui aplikasi layanan terintegrasi. Program-program ini menciptakan ruang inklusi sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial sebagai fondasi pembangunan bangsa.
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri	-	-
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prodamai Sahabat Usaha Hospital Tourism Berdikari Disabilitas Pelayanan untuk Warga Miskin Harapan Magelang Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Angkot Pelajar Gratis UMKM Berdaya Padat Karya	Kota Magelang berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin berbasis musyawarah lokal, memperluas akses permodalan usaha mikro, menciptakan peluang kerja berbasis potensi lokal, mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM), membuka akses transportasi publik yang inklusif, serta memperkuat layanan kesehatan dan pendidikan dasar untuk kelompok rentan. Program-program tersebut menjadi instrumen pemberdayaan langsung masyarakat untuk meningkatkan

	Asta Cita	Program Unggulan dan/atau Program Prioritas	Relasi Dukungan
		Rumah Singgah	pendapatan, mengurangi kesenjangan, memperluas kesempatan usaha, dan membangun ketahanan sosial-ekonomi di tingkat lokal sebagai fondasi pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif (salah satu contoh program unggulan: KTP-Ku) Buka- bukaan anggaran; Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Kota Magelang, melalui Program KTP-Ku, Buka-bukaan anggaran; Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Program ini memudahkan akses layanan dasar bagi warga ber-KTP Kota Magelang, termasuk keringanan biaya retribusi dan layanan kesehatan, sekaligus menjadi instrumen integrasi data kependudukan untuk mendukung sistem pelayanan yang transparan, adil, dan bebas diskriminasi. Dengan digitalisasi layanan berbasis data kependudukan, KTP-Ku membantu pencegahan praktik korupsi administratif, mempersempit peluang penyalahgunaan data, dan meningkatkan pengawasan terhadap program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Pro DAMAI Hidup Beragama dalam DAMAI, Harmonis, Guyub Magelang Cleansheet Prodamai	berkontribusi pada Prioritas Nasional dengan cara memperkuat kesadaran lingkungan dan nilai-nilai gotong royong sebagai wujud harmoni sosial-ekologis. Program MakClinge fokus pada edukasi pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan daur ulang berbasis masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, sedangkan Pro-DAMAI mendukung kegiatan sosial, seni-budaya, dan kerukunan antarumat beragama

Asta Cita		Program Unggulan dan/atau Program Prioritas	Relasi Dukungan
			melalui forum musyawarah, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur bersama.

Tabel 3.12 Dukungan Program Unggulan dan Program Prioritas Kota Magelang terhadap Program Jawa Tengah

Pilar Pembangunan Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
1	Jateng Sigap	Prodamai Pelayanan untuk Warga Miskin Harapan Magelang Anak Merdeka Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman, dan Sejahtera Angkot Pelajar Gratis Dana Wibawa Kec dan Kel KTP-Ku Puskesmas-RS Pagi Sore Homecare Pusling RS Tanpa Dinding RS Prorakyat Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat	Magelang mendukung Jateng Sigap dengan program-program tersebut, karena memudahkan Rakyat menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, dan adil. Seluruh program ini menciptakan pemerintahan yang responsif, pelayanan yang kolaboratif, dan ruang pemberdayaan masyarakat sebagai wujud nyata semangat Jateng Sigap.
2	Jateng Makmur	Sahabat Usaha Berdikari Disabilitas Z Hub Hospital Tourism Prodamai	Kota Magelang mendukung Jateng Makmur melalui pemberdayaan ekonomi lokal, perluasan lapangan kerja, dan penguatan wirausaha inklusif. Program Sahabat Usaha, Berdikari Disabilitas, Z-Hub, Hospital Tourism, dan Pro-DAMAI mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, menciptakan ruang usaha bagi kelompok rentan, mengembangkan industri kreatif, serta memperkuat daya saing Kota Magelang sebagai bagian

Pilar Pembangunan Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
			dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.
3	Jateng Nyaman	Hunian Nyaman MakClinge: Magelang Cleansheet Prodamai	Kota Magelang mendukung Jateng Nyaman melalui program Hunian Nyaman, MakClinge: Magelang Cleansheet, dan Pro-DAMAI dengan memperkuat kualitas lingkungan permukiman, mendorong kesadaran pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, serta membangun ruang kolaborasi masyarakat untuk menciptakan kota yang aman, bersih, harmonis, dan inklusif. Program ini berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang tertib, rukun, dan berkelanjutan di Kota Magelang sebagai bagian dari Jawa Tengah yang nyaman.

Tabel 3.13 Dukungan Program Unggulan Kota Magelang terhadap Program Prioritas Jawa Tengah

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
1	Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Prodamai Harapan Magelang Pelayanan untuk Warga Miskin	Dukungan dalam aspek pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Pro-DAMAI memperbaiki sarana prasarana pendidikan di tingkat lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan, Harapan Magelang membuka akses pendidikan vokasi melalui beasiswa, sementara Pelayanan untuk Warga Miskin mempermudah administrasi bagi warga untuk mendapatkan bantuan pendidikan, sehingga mengurangi hambatan ekonomi dan administratif dalam mengakses layanan pendidikan di Kota Magelang.
2	Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	Prodamai Pelayanan untuk Warga Miskin Puskesmas-RS Pagi Sore Homecare Pusling RS Tanpa Dinding RS Prorakyat Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat	Dukungan dalam aspek peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan paripurna. Diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur lokal melalui Pro-DAMAI, kemudahan akses bagi warga kurang mampu melalui Pelayanan untuk Warga Miskin, perluasan jam layanan di Puskesmas-RS Pagi Sore, layanan kesehatan jemput bola melalui Homecare Pusling, inovasi smart hospital di RS Tanpa Dinding, perawatan penyakit kritis di RS Pro Rakyat, dan digitalisasi layanan kesehatan melalui Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat.

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
3	Jateng Pemuda Kreatif	Z Hub Prodamai Berdikari Disabilitas Hospital Tourism	Kota Magelang mendukung program Jateng Pemuda Kreatif melalui Z-Hub yang menjadi wadah pengembangan ide, inovasi, dan karya kreatif pemuda di bidang digital, seni, dan industri kreatif; Pro-DAMAI yang mendorong partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan; Berdikari Disabilitas yang memperkuat keterampilan wirausaha pemuda penyandang disabilitas agar berdaya saing; serta Hospital Tourism yang membuka peluang kolaborasi pemuda di sektor pariwisata, digital marketing, dan layanan kesehatan berbasis kreativitas. Seluruh program ini membentuk ekosistem inovasi pemuda yang adaptif, produktif, dan berdaya saing di tingkat lokal
4	Petani dan Nelayan Makmur Sejahtera	-	-
5	Infrastruktur & Permukiman Layak Huni	Prodamai Hunian Nyaman MakClinge: Magelang Cleansheet	Kota Magelang mendukung Jateng Nyaman melalui program Hunian Nyaman, MakClinge: Magelang Cleansheet, dan Pro-DAMAI dengan memperkuat kualitas lingkungan permukiman, mendorong kesadaran pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, serta membangun ruang kolaborasi masyarakat untuk menciptakan kota yang aman, bersih, harmonis, dan inklusif. Program ini berkontribusi pada terciptanya kehidupan yang tertib, rukun, dan berkelanjutan di Kota Magelang sebagai bagian dari Jawa Tengah yang nyaman.
6	Pesantren Obah	-	-
7	Mewujudkan Jawa Tengah Melayani	Prodamai Sahabat Usaha Berdikari Disabilitas Pelayanan untuk Warga Miskin Anak Merdeka Perempuan Berdaya, Lansia Mantap, Nyaman, dan Sejahtera Angkot Pelajar Gratis	Kota Magelang mendukung Jawa Tengah Melayani melalui program -program tersebut dengan cara memperkuat akses layanan dasar yang responsif, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif, memperluas partisipasi warga dalam pembangunan, serta mendekatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan adil. Program-program ini mewujudkan prinsip pelayanan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
		Dana Wibawa Kec dan Kel KTP-Ku Puskesmas-RS Pagi Sore Homecare Pusling RS Tanpa Dinding RS Prorakyat Aplikasi Kesehatan Memudahkan Rakyat	kepentingan masyarakat sebagai wujud nyata semangat Jawa Tengah Melayani.
	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah		
1	Forum Kerukunan Umat Beragama & Forum Pembauran Kebangsaan	Pro-DAMAI	Mendorong harmoni sosial, kerukunan umat, dan nilai-nilai gotong royong melalui kegiatan budaya, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat tingkat RT.
2	Desa Mandiri Energi (Biogas, Hydro, Surya)	Pro-DAMAI MakClinge: Magelang Cleansheet	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, konservasi energi, dan edukasi pemanfaatan sumber daya terbarukan
3	Desa Maju & Berdaya (Lumbung Kesejahteraan, Produk Go Internasional, SID)	Pro-DAMAI Sahabat Usaha Dana Wibawa Z-Hub	Mendorong wirausaha mikro, penguatan kelembagaan lokal, digitalisasi layanan, serta penguatan usaha kreatif berbasis komunitas.
4	Pupuk Mudah, Subsidi Solar, Daycare untuk Buruh	Sahabat Usaha Pro-DAMAI	Memberikan modal usaha untuk penguatan ekonomi keluarga, mendukung pelaku usaha kecil, serta mengurangi beban biaya hidup.
5	Sertifikasi Juru Sembelih Halal, RPH	Sahabat Usaha	Mendukung penguatan kapasitas usaha mikro, pengembangan layanan halal di RPH
6	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Sahabat Usaha Berdikari Disabilitas	Memberi akses modal usaha dan keterampilan bagi masyarakat miskin, difabel, dan kelompok usaha kecil agar mampu mengelola usaha perikanan secara mandiri.
7	Perlindungan & Pemberdayaan Anak Terlantar & Fakir Miskin	Pelayanan untuk Warga Miskin Anak Merdeka Harapan Magelang	Memberi layanan administrasi, beasiswa, edukasi keluarga, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan fakir miskin.

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
8	1 KK 1 Rumah Layak Huni, GOR, Pusat Rekreasi	Hunian Nyaman Pro-DAMAI	Membantu mengurangi backlog rumah layak huni, meningkatkan kualitas permukiman, dan menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif.
9	Kecamatan Berdaya (Disabilitas, Perempuan, Ekonomi Kreatif, Sport Center)	Berdikari Disabilitas Perempuan Berdaya-Lansia Mantap Z-Hub Pro-DAMAI	Memberdayakan kelompok rentan melalui pelatihan keterampilan, usaha kecil, ruang kreasi, dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas.
10	Penguatan Koperasi Desa	Sahabat Usaha Pro-DAMAI	Mendukung pengembangan UMKM dan koperasi dengan pembiayaan mikro, akses permodalan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
11	Taruna Karya Mandiri (Kartu Zilenial)	Z-Hub Sahabat Usaha Berdikari Disabilitas	Mewadahi kreativitas pemuda dalam industri kreatif, memberi pelatihan, serta mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis digital.
12	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	MakClinge: Magelang Cleansheet Pro-DAMAI	Mengedukasi warga soal pengelolaan sampah, penghijauan kota, dan penguatan kesadaran lingkungan melalui aksi kolaboratif di tingkat lokal.
13	Early Warning Bencana, Penguatan BPBD/Tagana	Dana Wibawa Kec dan Kel Pro-DAMAI	Memberi dana cepat tanggap untuk bencana, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, dan mendukung mitigasi bencana berbasis komunitas.
14	Mageri Segoro (Pantai dan Lingkungan)	MakClinge: Magelang Cleansheet Pro-DAMAI	Mendukung edukasi dan aksi lingkungan untuk menjaga ekosistem pesisir, kebersihan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana.
15	Moderasi Beragama & Wawasan Kebangsaan	Pro-DAMAI	Mendorong pendidikan karakter, toleransi, dan kerukunan umat melalui kegiatan sosial, budaya, dan forum komunikasi masyarakat.
16	Kesejahteraan Atlet, Pelatih, Manajemen Olahraga	Pro-DAMAI Z-Hub	Menyediakan ruang kreatif dan aktivitas olahraga, mendukung pembinaan atlet muda, dan memperkuat solidaritas komunitas olahraga.
17	Sekolah Inklusif di Kecamatan	Berdikari Disabilitas Harapan Magelang Angkot Pelajar Gratis	Menyediakan transportasi gratis, fasilitas inklusi, dan dukungan pendidikan untuk siswa rentan, difabel, dan masyarakat miskin.

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
18	1.000 Desa/ Kampung Wisata Baru	Z-Hub Pro-DAMAI	Mendorong industri kreatif lokal, mengembangkan kampung wisata dan memfasilitasi program berbasis komunitas di destinasi wisata baru.
19	Ekosistem Ekonomi Syariah	Sahabat Usaha Hospital Tourism Pro-DAMAI	Mendukung pengembangan usaha halal, pembiayaan syariah, dan layanan wisata yang ramah muslim.
20	1.000 Konten Kreator Desa Wisata	Z-Hub	Mendorong kreativitas digital pemuda dalam promosi pariwisata, konten kreatif, dan pengembangan ekonomi digital.
21	Sertifikasi Halal, HAKI, P-IRT Gratis	Sahabat Usaha Hospital Tourism	Memberikan dukungan usaha mikro dengan sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar produk lokal.
22	1 RT 1 Kelompok UMKM	Sahabat Usaha Pro-DAMAI	Membentuk kelompok usaha berbasis RT, memberi akses permodalan, dan memperkuat jaringan usaha kecil.
23	10 Titik Aglomerasi Ekonomi Baru	Sahabat Usaha Hospital Tourism	Mendukung pengembangan pusat ekonomi baru melalui wirausaha lokal, industri kreatif, dan wisata kesehatan.
24	Hilirisasi Produk Unggulan (Ekonomi Hijau)	Sahabat Usaha MakClinge: Magelang Cleansheet	Mendukung produk ramah lingkungan, pengolahan hasil usaha lokal, dan pengurangan limbah produksi melalui edukasi dan fasilitasi usaha mikro.
25	Pendidikan Berkualitas (Beasiswa, Guru, Santri)	Harapan Magelang Anak Merdeka Angkot Pelajar Gratis	Memberikan beasiswa pendidikan, transportasi gratis, dan dukungan untuk kelompok pelajar, guru, dan santri di Kota Magelang.
26	Pesantren Obah (Dana Pengembangan Pesantren)	Harapan Magelang Pro-DAMAI	Mendukung program beasiswa, sarana pendidikan, dan penguatan kapasitas pesantren sebagai pusat pengembangan pendidikan agama.
27	Sekolah Unggulan Per Kecamatan	Harapan Magelang Angkot Pelajar Gratis	Memberi dukungan pendidikan berkualitas, transportasi gratis, dan peningkatan akses pendidikan di tingkat kecamatan.
28	Kader Posyandu	Homecare Pusling Puskesmas-RS Pagi Sore	Memperkuat layanan kesehatan dasar, mendukung operasional posyandu, dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di masyarakat.

Program Prioritas Jawa Tengah		Program Unggulan Kota Magelang	Relasi Dukungan
29	Asuransi Kesehatan Warga Miskin, 1 Dokter 1 Bidan, Kesehatan Keliling	KTP-Ku Puskesmas-RS Pagi Sore Homecare Pusling RS Tanpa Dinding RS Prorakyat KEMURA	Memberikan akses kesehatan gratis, memperluas layanan kesehatan dasar, dan digitalisasi layanan kesehatan di tingkat lokal.
30	Kualitas Hidup Lansia	Perempuan Berdaya Lansia Mantap	Memberdayakan lansia melalui program kesehatan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan.
31	Pelatihan Keuangan untuk Perempuan Pesisir & Petani	Perempuan Berdaya Sahabat Usaha	Meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi, dan keterampilan manajemen usaha bagi perempuan.
32	Rumah Perlindungan Anak, Perempuan, Disabilitas	Pelayanan untuk Warga Miskin Anak Merdeka Berdikari Disabilitas Perempuan Berdaya	Menyediakan ruang perlindungan, layanan konsultasi, dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan.
33	Bantuan Hukum Guru, Disabilitas, Perempuan, Anak	Pelayanan untuk Warga Miskin Berdikari Disabilitas Perempuan Berdaya	Mendukung hak akses hukum, perlindungan sosial, dan bantuan advokasi untuk kelompok rentan.
34	BUMDes Berdaya	Sahabat Usaha Pro-DAMAI	Memberikan dukungan usaha mikro berbasis desa, penguatan koperasi, dan pembiayaan usaha lokal.
35	Good & Clean Government, Anti Korupsi	Program prioritas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif dan Penerapan Meritokrasi dalam Manajemen ASN (Unggulan: Program KTP-Ku)	Memperkuat integritas pelayanan publik, mengurangi potensi korupsi, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Program-program unggulan Wali Kota Magelang mendukung prioritas nasional dan Jawa Tengah melalui pendekatan yang terarah: memperkuat perekonomian lokal, memperluas akses layanan dasar, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif. Pemberdayaan masyarakat,

inovasi layanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan menjadi strategi utama dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi kota. Sinergi ini menunjukkan komitmen Kota Magelang dalam mendukung capaian pembangunan nasional dan provinsi, dengan mengintegrasikan program-program daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Selanjutnya disajikan program prioritas dari urusan pemerintah daerah (Program Nomenklatur) yang memiliki dukungan langsung untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah. Rangkaian program prioritas RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 tersaji dalam Tabel 3.14 berikut ini.

Tabel 3.14 Korelasi Tujuan, Sasaran, Outcome, Program Prioritas

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
T1	Terwujudnya Peran Perdagangan dan Jasa Kota Magelang dalam Skala Regional (Gelangmanggung)					
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional					Persen
S1.1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa					
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa					Persen
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO					
		Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan	Persen
			Meningkatnya pertumbuhan kewirausahaan daerah		Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen
			Meningkatnya kinerja perdagangan daerah		Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
				Meningkatnya kontribusi ekspor barang terhadap PDRB	Nilai Ekspor Barang	US$
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen
				Menurunnya disparitas harga	Disparitas Harga	Persen
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
				Meningkatnya koperasi aktif	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
				Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
				Meningkatnya daya saing IKM	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	Persen
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA					
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian			Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
			Meningkatnya Kontribusi PAD sektor pariwisata		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
				Meningkatnya kualitas dan daya tarik destinasi wisata	Rata-Rata Lama Menginap (RLM)	Hari
					Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	Persen
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
				Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata daerah	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang
					Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	Persen
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
		Meningkatnya Realisasi Investasi			Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persen
			Meningkatnya jumlah Investor		Pertumbuhan Investor PMA/PMDN	Persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
				Terwujudnya realisasi investasi pada tahun bersangkutan	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
				Meningkatnya investor yang berinvestasi di Kota Magelang	Persentase Investor yang berinvestasi	Persen
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban PM	Persentase Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban PM	Persen
T2	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat					
	Tingkat Kemiskinan					Persen
S2.1	Meningkatnya daya saing SDM					
	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)					Indeks
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
		Meningkatnya kualitas pendidikan yang merata dan inklusif serta penguatan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan			Harapan Lama Sekolah	tahun
					Rata - rata Lama Sekolah	tahun

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
					Cakupan objek pemajuan kebudayaan	Persen
			Meningkatnya akses pemerataan pendidikan dan mutu pendidikan		Indeks Capaian SPM Pendidikan	Persen
			Meningkatnya pelestarian dan pengembangan potensi kebudayaan lokal		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan lokal yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persen
			Meningkatnya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya		Persentase cagar budaya (CB) dan warisan budaya tak benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				Meningkatnya angka partisipasi anak sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (5 - 6 Th) PAUD	Persen
					Angka Partisipasi Sekolah (7 - 12 Th) SD	Persen
					Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Th) SMP	Persen
					Angka Partisipasi Sekolah (7 - 18 Th) Kesetaraan	Persen
					Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen
					Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Persen
					Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen
					Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen
	DINAS KESEHATAN					
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun
			Meningkatnya kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup		Jumlah kematian bayi	orang
					Prevalensi stunting	Persen
					Angka populasi bebas penyakit menular	%
					Angka populasi bebas penyakit tidak menular	%
					Jumlah Kematian Ibu	orang

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
				Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC)	Persen
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Persen
					Persentase depresi yang mendapatkan layanan	Persen
					Persentase merokok penduduk 10-19 tahun	Persen
					Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
				Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio
				PROGRAM PERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
				Meningkatnya pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	Persen
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA					
		Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat melalui pembangunan yang responsif gender dan berwawasan kependudukan			Tingkat keswadayaan masyarakat	
					Indeks Pembangunan Gender	Indeks
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat		Nilai kualitas partisipasi masyarakat	%
			Meningkatnya kesetaraan gender		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks
			Meningkatnya kualitas keluarga		iBangga	Indeks
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	Persen
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
				Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		
				Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	Persen
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
				Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan (IKLKP)	Skala
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
		Meningkatnya pembangunan literasi dan tata kelola kearsipan pemerintah daerah			Nilai pembangunan literasi dan pengawasan kearsipan	Nilai
			Meningkatnya literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NIlai
			Meningkatnya akuntabilitas tata kelola kearsipan pemerintah daerah		Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
				Meningkatnya mutu layanan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Persen
					Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
				Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan OPD	Audit Sistem Kearsipan Internal	Nilai
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
				Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Audit Sistem Kearsipan Eksternal	Nilai
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA					
		Meningkatnya daya saing kepemudaan dan olahraga			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka
			Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga		Indeks Daya Saing Pemuda dan Olahraga (komposit)	Angka

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	Persen
S2.2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya Ketimpangan					
	Tingkat Pengangguran Terbuka					Persen
	Rasio Gini					Persen
	DINAS TENAGA KERJA					
		Meningkatnya Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/ kapita
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah		Prosentase Penduduk yang Bekerja (*Employment to population ratio*)	Persen
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	Persen
				PROGRAM PENEMPATAN KERJA		
				Meningkatnya Kesempatan Kerja Daerah	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	Persen
				Meningkatnya Pencari Kerja yang Berwirausaha	Pencari kerja yang berwirausaha	Wirausaha
	DINAS SOSIAL					
		Meningkatnya kesejahteraan PMKS/PPKS			Persentase PMKS atau PPKS	Persen
			Meningkatnya Pelayanan Sosial PMKS/PPKS		Persentase PMKS/PPKS yang tertangani	Persen
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
				Meningkatnya peran PSKS dalam kesejahteraan sosial	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	Persen
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
				Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Persen
					Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				PROGRAM PELINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen
					Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
				Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	Persen
S2.3	Terwujudnya Daerah yang Kondusif Berbasis Harmoni Sosial					
	Jumlah Kejadian Konflik SARA					Angka
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Masyarakat			Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (IKKU)	Angka
			Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat		Persentase penurunan gangguan trantibum dan pelanggaran perda	Persen
			Meningkatnya pelayanan dan penyelamatan aduan kebakaran dan non kebakaran		Waktu tanggap response	Menit
					Presentase pelayanan dan penyelamatan aduan non kebakaran	Persen
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen
				Meningkatnya penegakan perda	Persentase penegakan perda	Persen
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN		
				Meningkatnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
		Meningkatnya Implementasi Nilai nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi dan Sosial serta Kewaspadaan Daerah			Nilai Stabilitas Daerah	Angka
			Meningkatnya Kualitas stabilitas Politik dan Demokrasi, Implementasi Nilai nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi dan sosial Budaya serta Kewaspadaan Daerah		Indeks Harmoni	Angka
					Nilai Kewaspadaan Daerah	Angka

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		
				Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya, serta terciptanya kerukunan sosial	Persentase Pemahaman Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Angka
T3	Terwujudnya Ruang Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan					
	Nilai Livable City					Angka
S3.1	Terwujudnya Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan					
	Nilai Kepuasan Layanan Infrastruktur					Angka
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang Berbasis Infrastruktur Berkelanjutan			Nilai Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	Persen
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen
			Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang		Ketaatan Pemanfaatan Ruang	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi kualitas jaringan irigasi perkotaan	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen
					Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota	Persen
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
					Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
				Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase saluran drainase primer dalam kondisi baik	Persen
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
				Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG	Persen
					Persentase Bangunan Gedung yang memiliki SLF	Persen
					Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
				Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Dokumen RTBL Yang Tersusun	Persen
					Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai RTBL	Persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
				Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Persen
					Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	Persen
					Persentase Panjang Drainase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen
					Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG		
				Meningkatnya regulasi penataan ruang yang diterbitkan	Persentase regulasi terkait penataan ruang yang diterbitkan	Persen
				Meningkatnya perwujudan pola penataan ruang	Persentase perwujudan pola ruang	Persen
				Meningkatnya perwujudan struktur ruang	Persentase perwujudan struktur ruang	Persen
				Meningkatnya pengendalian penataan ruang	Persentase pengendalian penataan ruang	Persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
				Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
	DINAS PERHUBUNGAN					
		Terwujudnya Transportasi Yang Baik dan Berkeselamatan			Konektivitas Kabupaten/Kota	persen
					Angka Fatalitas Kecelakaan	Angka
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi		Nilai kualitas layanan transportasi	persen
			Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi		Nilai Kualitas Infrastruktur Transportasi	persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
				Meningkatnya kinerja lalu lintas perkotaan	Indeks Kinerja Lalu lintas (IKL)	Nilai
				Meningkatnya pengguna moda transportasi umum perkotaan	PPTUK	Persen
				Terpenuhinya standar kelengkapan jalan pada jalan kabupaten/kota	Presentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
		Meningkatnya Kualitas Permukiman			Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni	Persen
			Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen
			Menurunnya luas permukiman kumuh		Persentase luas permukiman kumuh	Persen
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
				Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	Persen
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
				Meningkatnya kualitas dan kawasan permukiman yang layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Persen
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
				Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar permukiman melalui pembangunan dan peningkatan PSU	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen
S3.2	Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup yang berkualitas					
	Indeks Risiko Bencana					Angka
	Indeks Ketahanan Pangan					Angka

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif					Ton CO2eq
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka
			Meningkatnya Kualitas Air dan Udara		Indeks Kualitas Air	Angka
					Indeks Kualitas Udara	Angka
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kadar Pencemaran Dalam Air	Persen
					Konsentrasi Polutan Udara SO2	µg/m3
					Konsentrasi NO2	µg/m3
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka Keanekaragaman Hayati	Angka
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
				Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan Sampah	Persen
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
		Terjaminnya pangan masyarakat			Ketersediaan Pangan Utama	Ton
					Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	%
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%
					Peningkatan produksi komoditas peternakan	%

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
				Terjaminnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor
					Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
				Terlaksananya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana			Indeks Ketahanan daerah	
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana		Indeks prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan	
					Indeks prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	
					Indeks prioritas pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	
					Indeks prioritas penanganan tematik kawasan rawan bencana	
					Indeks prioritas efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	
					Indeks prioritas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	
					Indeks prioritas pengembangan sistem pemulihan bencana	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
				Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase pendampingan penanganan pascabencana	Persen
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	Persen
T4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang Professional, Inklusif, Akuntabel					
	Indeks Reformasi Birokrasi					

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
S4.1	Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berintegritas, Efektif, Inklusif dan Berkelanjutan					
	SAKIP					
	Indeks Pelayanan Publik					
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
		Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	
			Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan		Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	Persen
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen
					Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen
					Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	Persen
					Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen
					Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen
					Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	Persen
					Persentase OPD yang mengajukan PKS pemanfaatan data	Persen
					Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
		Penyediaan layanan TIK publik yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks SPBE	Nilai
			Optimalnya Tata kelola Teknologi Informatika		Tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Level

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
					Tingkat kematangan layanan jaringan intra instansi pusat/ pemerintah daerah	Level
					Tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/ pemerintah daerah	Level
			Optimalnya Tata kelola Keamanan Informasi		Tingkat kematangan Penerapan manajemen Keamanan SPBE	Level
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Level
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Aplikasi SPBE	Level
					Tingkat kematangan Pelaksanaan audit Keamanan SPBE	Level
			Optimalnya Layanan Informasi Publik dan Media		Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	Level
					Tingkat kematangan layanan data terbuka	Level
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
				Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
				Terwujudnya Pengelolaan TIK yang terintegrasi, andal, dan responsif guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen
					Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen
					Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
				Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
				Terwujudnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis riset yang inovatif			Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan dan komponen pengukuran	angka
					Indeks Inovasi Daerah	angka
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan perencanaan pembangunan daerah	%
			Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Kapabilitas Inovasi	angka
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
				Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Hasil penelitian yang berkontribusi pada pembangunan	Persen
					Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
		Terwujudnya pengelolan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	Nilai
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Indeks Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persen
			Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
				Terpenuhinya penganggaran daerah sesuai ketentuan	Persentase rancangan dokumen penganggaran sesuai standar (tepat waktu, sesuai Standar Harga Satuan, dan Analisis Standar Belanja)	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				Terpenuhinya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Ketentuan	Persen
				Terpenuhinya pelaporan keuangan sesuai ketentuan	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan (Tepat Waktu, SAP, Kebijakan Akuntansi, BAS)	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) sesuai Ketentuan	Persen
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	Persen
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Brutto Atas Dasar Harga Berlaku)	Persen
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
		Terwujudnya birokrasi yang kapabel melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN			Indeks Sistem Merit	Skor
			Meningkatnya kualitas implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam manajemen ASN		Indeks NSPK	Skor
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
				Meningkatnya capaian aspek sistem merit dalam kepegawaian daerah	Persentase capaian nilai aspek Sistem Merit	Persen
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
				Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase cakupan pengembangan kompetensi ASN	Persen
	SEKRETARIAT DPRD					
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap DPRD			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka
			Meningkatnya Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Raperda yang Difasilitasi Persetujuannya	Persen
					Persentase Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Persetujuannya	Persen
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
					Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				Meningkatnya Kualitas Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Pembahasannya	Persen
	INSPEKTORAT					
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai (1-5)
			Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal		Kapabilitas APIP	
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah		Manajemen Risiko Indeks	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
				Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Angka
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah komponen evaluasi	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai
					Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
				Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan	Persentase OPD & BLUD yang memperoleh predikat Zona Integritas	Persen
				Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi	Indeks Integritas Nasional	Angka
	KECAMATAN					
		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka
			Meningkatnya capaian hasil perkembangan kelurahan		Persentase kelurahan yang meningkat nilainya dalam evaluasi perkembangan kelurahan	Persen
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
				Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Persen
	SEKRETARIAT DAERAH					
		Meningkatnya kualitas kebijakan daerah			Indeks Kualitas Kebijakan	Angka
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Rata-rata capaian IKU OPD Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat	Persen

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
					Rata-rata capaian IKU OPD Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Persen
					Rata-rata capaian IKU OPD Lingkup Administrasi Umum	Persen
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
				Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi tata pemerintahan	Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	Persen
					Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	Persen
				Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi	Persen
					Indeks Zakat Nasional	Nilai
				Meningkatnya kualitas kepuasan layanan hukum, kualitas kebijakan, dan reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Nilai
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan SDA	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	Persen
					Return on Asset (ROA) BUMD	Persen
					Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen
					Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen
				Meningkatnya akses keuangan masyarakat	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai
				Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase progres fisik seluruh OPD	Persen
				Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan penunjang urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum)	Nilai
				Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka
					Nilai KOD Perangkat Daerah	Angka
					Nilai Kearsipan Perangkat Daerah	Angka
					MRI Perangkat Daerah	Angka

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Indikator Kinerja daerah	Renstra Perangkat Daerah				Satuan
		Tujuan	Sasaran	Outcome-Program Prioritas PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program PD	
				Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	Sistem Kerja	Indeks
					Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (SP)	Nilai
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
					Nilai SAKIP (Aspek Pelaporan Kinerja)	Nilai
					Nilai KOD	Nilai
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan penunjang urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Prokompim)	Nilai

3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Magelang

3.3.1 Konstelasi Kebijakan Arah Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah berfungsi sebagai landasan utama dalam memperkuat wadah pembangunan serta menjadi instrumen dalam pelaksanaan pembangunan Kota Magelang. Mengacu pada RTRW Kota Magelang 2011-2031 dalam Perda no 2 tahun 2020 tentang Perubahan RTRW, pembangunan wilayah dalam konteks penataan ruang dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Tujuan pembangunan wilayah Kota Magelang dalam dokumen tersebut adalah mewujudkan ruang Daerah sebagai Kota Jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan". Tujuan ini menjawab isu kewilayahan yang menggarisbawahi pada: (1) integrasi aktivitas ekonomi pada sistem regional, (2) keterbatasan lahan pengembangan, (3) kebutuhan perumahan dengan layanan dasar yang layak, dan (4) kebutuhan pengembangan RTH.

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Magelang ini selaras dengan mendukung Visi RPJMD Kota Magelang tahun 2025-2029 **"**Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan". Pengembangan wilayah terutama mendukung perwujudan Misi 2: Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan, dan Misi 5: Meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing.

Bila dilihat dari konstelasi kebijakan pengembangan wilayah, maka terdapat beberapa kebijakan yang terkait dengan pengembangan wilayah Kota Magelang, sebagai berikut:

1. **RPJMN Tahun 2025-2029**

   Dalam arah kebijakan pengembangan wilayah RPJMN tahun 2025-2029 Lampiran IV, Provinsi Jawa Tengah memiliki delapan kawasan pertumbuhan, dan Kota Magelang termasuk dalam Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur - Dataran Tinggi Dieng, namun juga memiliki wilayah yang termasuk dalam Kawasan Konservasi/Rawan Bencana Taman Nasional Merbabu-Merapi.

   Highlight indikasi intervensi untuk dua kawasan pertumbuhan tersebut adalah:

   a. Peningkatan 6A Pariwisata Candi Borobudur sebagai *The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination*.
   b. *Urban Renewal* Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung
   c. Pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta
   d. Preservasi ruas jalan Borobudur-Wonosobo-Banjarnegara-Purbalingga-Purwokerto
   e. Preservasi ruas jalan Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Kab. Temanggung
   f. Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan *biodefense* pada RST Tk II dr. Soedjono.

2. **RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029**

   Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Kota Magelang mengalami perubahan perwilayahan, yang sekarang berada pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung. Pengembangan kewilayahan dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2025-2029 akan memfokuskan pada Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi. Untuk mendukung hal tersebut, WP Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung) dikembangkan untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata

Provinsi DIY. Kota Magelang berkontribusi pada program unggulan intervensi Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan pendorongan reaktivasi jalur rel kereta api non aktif lintas Semarang - Borobudur - Yogyakarta
b. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*);
c. Pengembangan karakteristik warisan budaya WP Gelangmanggung pada potensi desa-desa wisata baru. Pada konteks kota Magelang interpretasi desa adalah kelurahan.
d. Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung.

Sementara untuk program unggulan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kriya, Kota Magelang dapat berkontribusi pada program intervensi sebagai berikut:

a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata, pada konteks Kota Magelang adalah wisata berbasis komunitas kelurahan melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung
b. Mendorong kerjasama UMKM dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung.

Pada skema arah kebijakan WP Gelangmanggung, Kota Magelang menjadi satu-satunya Pusat Kegiatan Wilyah (PKW) yang didukung oleh lima Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung.

3. KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029

Rekomendasi pada KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2029 terdiri dari enam kelompok sasaran strategis seperti berikut:

a. Sasaran untuk isu kemiskinan: Optimalnya upaya pemberantasan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang matang
    1) Peningkatan efektivitas program penanganan kemiskinan
    2) Pengalokasian sumberdaya dan penganggaran dengan optimal guna pemberantasan kemiskinan
    3) Pemerataan akses ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin
b. Sasaran untuk isu kualitas SDM: Kualitas SDM yang optimal melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender
    1) Perencanaan penanganan bencana sosial
    2) Optimalisasi layanan dan edukasi kesehatan dalam penanganan obesitas, napza, kebiasaan merokok, dan KB
    3) Peningkatan kualitas pendidikan termasuk pendidikan digital
    4) Peningkatan layanan pendidikan
    5) Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
    6) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak (edukasi pencegahan perkawinan anak)

c. Sasaran untuk isu kualitas sarana prasarana permukiman: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM

   1) Peningkatan aksesibilitas prasarana sumber air minum yang aman dan berkelanjutan
   2) Optimalisasi kualitas sarana pendidikan sesuai SNI
   3) Peningkatan aksesibilitas sarana transportasi umum perkotaan dengan dukungan kondisi jalan mantap
   4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas prasarana teknologi informasi dan komunikasi
   5) Peningkatan aksesibilitas prasarana sanitasi dan persampahan yang aman dan berkelanjutan

d. Sasaran untuk isu daya saing ekonomi daerah: Ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan

   1) Peningkatan produktivitas industri manufaktur melalui Green Industry
   2) Pengurangan pengangguran terbuka melalui pemerataan akses lapangan pekerjaan, peningkatan upah rata-rata per jam, dan dukungan keselamatan pekerja

e. Sasaran untuk isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup: Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan melalui pengarusutamaan perubahan iklim dan efisiensi SDA

   1) Optimalisasi ketahanan pangan lokal mandiri masyarakat
   2) Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
   3) Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan dukungan kebijakan

f. Sasaran untuk isu tata kelola dan layanan pemerintah: Optimalnya kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi

   1) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kerja birokrasi dalam layanan digital, penganggaran, kerjasama, dan layanan peradilan
   2) Pengarusutamaan gender dalam tata kelola pemerintahan

4. RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044

Pada Perda No. 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, penataan ruang provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Maju, Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata dalam Keterpaduan Pengelolaan Alam Darat & Laut Pesisir. Perwilayahan pembangunan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044 membagi wilayah menjadi delapan WP, dengan Kota Magelang termasuk dalam WP Gelangmanggung bersama Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Perwilayahan ini berbeda dengan Perda RTRW terdahulu yang memasukkan Kota Magelang pada WP Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung). Perubahan ini menunjukkan menguatnya urgensi integrasi dalam pengembangan sistem pusat pemukiman perkotaan (Kota Magelang) dengan pemukiman perdesaan di hinterlandnya. Arah pengembangan WP Gelangmanggung dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan koridor kawasan perkotaan Muntilan- Mungkid - Kota Magelang - Secang - Temanggung;

b. Pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;

c. Melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi - Merbabu -Telomoyo dan Gunung Sindoro - Sumbing;

d. Menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;

e. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;

f. Pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;

g. Mengendalikan alihfungsi lahan sawah.

Dalam arah pengembangan ini, Kota Magelang berperan dalam tiga arahan, yaitu koridor kawasan perkotaan, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengendalian konversi lahan sawah. Kota Magelang juga berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dalam WP Gelangmanggung dengan program prioritas pengembangan sarana prasarana regional dan pengembangan kota berbasis mitigasi bencana.

5. RTRW Kota Magelang 2011-2031

Pembangunan wilayah bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan serta menjadi instrumen dalam pelaksanaan pembangunan Kota Magelang. Berdasarkan RTRW Kota Magelang 2011-2031 pada Perda no 2 tahun 2020 tentang Perubahan RTRW Kota Magelang 2011-2031, kegiatan penataan ruang merupakan upaya menyelaraskan pembangunan Kota Magelang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan utama pembangunan wilayah Kota Magelang adalah mewujudkan ruang Kota Magelang sebagai Kota Jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kota Magelang memiliki empat kebijakan pengembangan wilayah yang merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang bumi di wilayah Kota Magelang untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Magelang. Kebijakan-kebijakan tersebut diikuti dengan strategi pengembangan wilayah seperti pada Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah pada RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang	
Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung;	meningkatkan keterkaitan antar daerah sebagai PKW di Jawa Tengah dan pusat di WP Purwomanggung;
	menata, mengembangkan, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan perekonomian Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional;

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	menata, mengembangkan, mengkoordinasi, dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan pendidikan Daerah yang mempunyai skala pelayanan regional dan/atau nasional;
	menata, mengembangkan, mengkoordinasi dan/atau membangun kawasan pusat-pusat kegiatan kesehatan daerah.
Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Magelang yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Kota Magelang	menjaga dan meningkatkan akses keterkaitan fungsi kawasan pusat kegiatan utama perkotaan dengan kawasan pusat-pusat kegiatan perkotaan lainnya, yaitu antara kawasan pusat-pusat kegiatan utama ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata Kota Magelang dengan pusat-pusat kegiatan lainnya yang terdiri dari pusat kegiatan permukiman, pusat kegiatan pemerintahan, dan pusat kegiatan lainnya;
	mengembangkan dan menata pusat pertumbuhan kegiatan baru secara berhierarki;
	mendorong kawasan kegiatan utama perkotaan dan pusat pertumbuhan kegiatan baru agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitarnya
	meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan yang potensial menjadi pusat pelayanan tingkat kota.
Pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional	memadukan, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan infrastruktur transportasi darat yang terdiri dari jaringan jalan beserta pendukungnya, sarana terminal penumpang dan barang, dan lokasi pergantian moda transportasi barang dan orang secara terintegrasi dengan jaringan pelayanan transportasi regional, provinsi, dan nasional;
	memadukan, menata, dan/atau membangun jaringan pengolahan sampah Kota Magelang dengan Kawasan Kabupaten Magelang secara terintegrasi melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional
	memadukan, mengembangkan, dan menjaga kualitas daerah irigasi Kali Progo Manggis, Kali Bening, Kali Ngaran, Kali Kedali dan Kali Gandeka sebagai bagian infrastruktur pengairan Pemerintah pusat untuk menunjang pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Magelang sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	meningkatkan kualitas dan kuantitas, menata, dan/atau membangun sistem prasarana transportasi darat di Daerah untuk kelancaran distribusi barang/jasa dengan mengembangkan terminal tipe A, terminal tipe C, terminal barang, jaringan jalan kota, sarana angkutan umum, jalur rel kereta api, prasarana pejalan kaki, dan prasarana pendukung jaringan jalan;
	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun sarana dan prasarana telekomunikasi secara proporsional, efektif, dan efisien yang meliputi jaringan bergerak; mengembangkan, menata, dan mewujudkan keterpaduan sistem prasarana ketenagalistrikan, jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dan energi terbarukan;
	mengembangkan, menata, dan mengintegrasikan sistem prasarana dan jaringan pengairan irigasi Kota Magelang agar terpadu dengan jaringan irigasi regional untuk menunjang kegiatan sektor pertanian pangan berkelanjutan;
	menata, memantau, melindungi, dan mengkonservasi air tanah dan air permukaan sebagai sumber daya air Daerah dengan prinsip berkelanjutan;
	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun kualitas sistem jaringan Air Baku untuk air bersih Kota Magelang dengan pemanfaatan air permukaan dan pemanfaatan air tanah;
	mengembangkan, menata, meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah Kota Magelang dengan metode penggunaan kembali sampah, reduksi sampah, dan daur ulang sampah, serta membangun dan mewujudkan keterpaduan sistem pengelolaan persampahan Kota Magelang dengan wilayah Kabupaten Magelang;
	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun secara bertahap jaringan dan sarana pengolahan air limbah sehingga terpisah dengan jaringan drainase untuk kesehatan dan keberlanjutan lingkungan Kota Magelang;

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun jaringan drainase secara bertahap dan berhierarki sehingga tercapai keterpaduan sistem drainase untuk menghindari genangan air dan/atau banjir akibat hujan di wilayah Kota Magelang;
	mengembangkan, menata, meningkatkan, dan/atau membangun sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan keterpaduan dengan sistem penyediaan jaringan pelayanan tingkat kota untuk air bersih, persampahan, air limbah, dan drainase agar lebih berkualitas;
	Meningkatkan kualitas dan menyediakan prasarana dan sarana jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung	
Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi yang meliputi kawasan perlindungan setempat, RTH kota, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, dan kawasan lindung geologi;
	mengembangkan RTH kota untuk mencapai luasan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Magelang;
	mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
	mengembangkan, menata, mempertahankan, dan/atau meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata Kota Magelang.
Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.	menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
	melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
	melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau kompenen lainnya yang dibuang kedalamnya;
	mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkunga yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
	mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
	mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana
Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Budidaya	
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya	menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
	mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
	mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
	mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kota Magelang dan/atau provinsi, serta nasional;
	mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan kawasan hutan rakyat.

Kebijakan Pengembangan Wilayah	Strategi Pengembangan Wilayah
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.	mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
	mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan-kawasan dengan potensi kerawanan terhadap bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
	mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
	penataan perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal dan tidak sporadis;
	mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
	mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan kawasan dari dampak negatif yang mungkin timbul termasuk bencana.

Tabel 3.16 di bawah ini menyajikan persandingan konstelasi kebijakan pengembangan wilayah berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas, yaitu RPJMN 2025-2029, RPJMD Jawa Tengah 2025-2029, KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030, RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044, dan RTRW Kota Magelang 2011-2031.

Tabel 3.16 Konstelasi Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Magelang

RPJMN 2025-2029	RPJMD Jawa Tengah 2025-2029	KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030	RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044	RTRW Kota Magelang 2011-2031
1. Peningkatan 6A Pariwisata Candi Borobudur sebagai The World's Largest Buddhist Pilgrimage Destination 2. Urban Renewal Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung 3. Pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta 4. Preservasi ruas jalan Borobudur-	1. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur 2. Reaktivasi jalur rel kereta api lintas Smg-Borobudur-Yogyakarta 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang mendukung pengembangan pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*); 4. Pengembangan karakteristik	1. Optimalnya upaya pemberantasan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran yang matang 2. Kualitas SDM yang optimal melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta pengarusutamaan gender 3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk	1. Mengembangkan koridor kawasan perkotaan Muntilan-Mungkid - Kota Magelang - Secang - Temanggung; 2. Pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi; 3. Melestarikan kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan	1. Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan Daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung; 2. Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah

RPJMN 2025-2029	RPJMD Jawa Tengah 2025-2029	KLHS RPJMD Kota Magelang 2025-2030	RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044	RTRW Kota Magelang 2011-2031
Wonosobo-Banjarnegara-Purbalingga-Purwokerto 5. Preservasi ruas jalan Borobudur-Wonosobo-Parakan-Temanggung-Secang 6. Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan biodefense pada RST Tk II dr. Soedjono	warisan budaya WP Gelangmanggung pada potensi desa-desa wisata baru; 5. Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung. 6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Kriya 7. Pengembangan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif di WP Gelangmanggung 8. Mendorong kerjasama UMKM dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung	meningkatkan kualitas permukiman dan mendukung peningkatan kualitas SDM 4. Ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan 5. Terwujudnya perlindungan lingkungan hidup dan ketahanan pangan melalui pengarusutamaan perubahan iklim dan efisiensi SDA 6. Optimalnya kinerja pemerintah melalui keberhasilan pada semua indikator reformasi birokrasi	sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi - Merbabu -Telomoyo dan Gunung Sindoro - Sumbing; 4. Menyelaraskan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo; 5. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 6. Pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolah hasil pertanian dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam; 7. Mengendalikan alihfungsi lahan sawah.	Kota Magelang yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Kota Magelang 3. Pengembangan sistem sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional 4. Pengembangan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana dan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Magelang sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 6. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 7. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya 8. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan persandingan dari beberapa rujukan tersebut, Strategi Pengembangan Wilayah Kota Magelang pada RPJMD 2025-2029, yaitu:

1. **Pengembangan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal**

   Strategi ini mengintegrasikan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas dalam satu kawasan pariwisata yang diperkuat dengan activities, attitude, ambience, dan accelerator. Dengan berfokus pada pengembangan pariwisata, Kota Magelang diharapkan dapat memanfaatkan limpahan wisatawan dari wilayah sekitar, terutama dari KSPN Borobubur. Hal ini didukung dengan penguatan sistem transportasi yang terhubung dan terkoneksi dengan jaringan regional untuk memastikan kemudahan pergerakan wisatawan, termasuk pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung - Borobudur.

2. **Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa**

   Optimalisasi dilakukan dengan mengembangkan perdagangan berbasis UMKM, ekonomi kreatif, dan industri rumahan. Penyediaan fasilitas akomodasi dan jasa pendukung dari aktivitas wisata juga dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Secara lokasi, hub-logistik dibangun berbasis jalan raya mengingat Kota Magelang berkembang secara linear mengikuti jalan.

3. **Pemerataan Pembangunan Wilayah**

   Keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kota Magelang diharapkan dapat tercapai dengan pemerataan pembangunan wilayah. Pemerataan pembangunan juga penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan keterpaduan antar wilayah untuk mengoptimalkan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa sebagai pusat pelayanan di Kawasan Gelangmanggung.

4. **Pembangunan infrastruktur permukiman dengan memperhatikan ketahanan pangan dan kualitas lingkungan hidup**

   Dengan keterbatasan lahan dan isu pada pemerataan layanan dasar, pembangunan infstruktur permukiman dilakukan dengan mengembangkan konsep ramah lingkungan, menekan konversi lahan pertanian berkelanjutan, meningkatkan luasan RTH, dan mengembangkan transportasi kota terintegrasi yang ramah lingkungan.

3.3.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota Magelang

Berdasarkan RTRW Kota Magelang 2011-2031, struktur ruang Kota Magelang terbentuk dari sistem perkotaan yang terdiri dari pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Kegiatan fungsional sebagai elemen pengisi ruang kawasan diarahkan pengembangannya agar mampu mendukung fungsi-fungsi pengembangan kawasan. Rencana sistem perkotaan Kota Magelang dengan pusat-pusat pelayanan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota Magelang, mempunyai cakupan pelayanan seluruh wilayah Kota Magelang dan Regional (Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung sebagai hinterland) mempunyai makna sebagai fungsi pelayanan eksternal. Pusat pelayanan Kota ditetapkan di BWP I yang terdapat di sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara, yaitu Kawasan Alun-Alun Kota Magelang.
2. Subpusat Pelayanan Kota Magelang, direncanakan mempunyai cakupan pelayanan subwilayah kota dan terutama mempunyai skala pelayanan kota atau sebagai pengungkapan fungsi kawasan dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kawasan atau masing- masing bagian wilayah kota (fungsi pelayanan internal). Adapun pembagian sub pusat pelayanan Kota Magelang meliputi:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP I yaitu Kawasan Rejowinangun yang melayani sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Kemirirejo, sebagian Kelurahan Magelang, sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Selatan dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP II yaitu Kawasan Kebonpolo yang melayani sebagian Kelurahan Cacaban, sebagian Kelurahan Magelang, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Gelangan;

c. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP III yaitu Kawasan Taman Kyai Langgeng yang melayani sebagian Kelurahan Magersari, sebagian Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Jurangombo Selatan, dan Kelurahan Jurangombo Utara;

d. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP IV yaitu Kawasan Sukarno-Hatta yang melayani sebagian Kelurahan Magersari, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, dan sebagian Kelurahan Rejowinangun Utara; dan

e. Sub Pusat Pelayanan Kota BWP V yaitu Kawasan Sidotopo yang melayani Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, dan Kelurahan Kedungsari.

3. Pusat Lingkungan mempunyai cakupan pelayanan skala lingkungan wilayah di Kota Magelang. Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan skala lingkungan di Bagian Wilayah Perkotaan, meliputi:

   a. Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP I

      1) Kawasan Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

   b. Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP II

      1) Kawasan Karesidenan di Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah;

      2) Kawasan Tuguran di Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara;

      3) Kawasan Urip Sumoharjo di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.

   c. Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP III

      1) Kawasan Taman Parkir di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan;

      2) Kawasan Karet di Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

   d. Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP IV

      1) Kawasan Sokka di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara;

      2) Kawasan Canguk di Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Utara.

   e. Pusat Pelayanan Lingkungan di BWP V

      1) Kawasan Menowo di Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara;

      2) Kawasan Sambung di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara.

Untuk mewujudkan pengembangan struktur ruang di Kota Magelang, strategi pengembangan struktur ruang dalam dukungan untuk mewujudkan Visi Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perbaikan transportasi publik pada wilayah Kota Magelang untuk meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh penduduk
2. Meningkatkan konektivitas eksternal pada WP Gelangmanggung untuk memantapkan peran sebagai PKW

3. Mendorong pertumbuhan pusat aktivitas ekonomi baru berbasis jasa, perdagangan, dan pariwisata untuk pemerataan kegiatan di seluruh kota
4. Mengembangkan infrastruktur dasar perkotaan yang inovatif dan sejalan dengan prinsip lingkungan hidup, salah satunya penataan jaringan bawah tanah (*ducting*), serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi.

3.3.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota Magelang

1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kota Magelang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan RTH, kawasan cagar budaya, kawasan pelestarian alam dan kawasan rawan bencana. Kebijakan pengembangan kawasan lindung Kota Magelang meliputi:

a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Strategi pengembangan kawasan lindung dalam mewujudkan Visi Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Mengembangkan RTH Publik Kota Magelang untuk mencapai luasan 20% dari luas kota
b. Mengembangkan kegiatan produktif yang memiliki daya adaptasi bencana pada kawasan rawan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
c. Perlindungan terhadap fungsi di kawasan lindung

2. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya

Untuk pengembangan kawasan budidaya, tantangan yang harus dihadapi adalah keterbatasan lahan untuk mengoptimalkan potensi lokasi strategis Kota Magelang, sekaligus mengembangkan aktivitas produktif secara merata. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya untuk mewujudkan Visi Kota Magelang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi kapasitas sarana prasarana perkotaan yang ramah lingkungan dengan inovasi teknologi tangguh bencana.
b. Pengembangan produktivitas ruang perkotaan sebagai pusat jasa, perdagangan, dan pariwisata.
c. Pengendalian konversi lahan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Kota Magelang.

Strategi pengembangan kawasan budidaya dalam mewujudkan Visi Kota Magelang adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan jangkauan layanan sarana prasarana perkotaan.
b. Mengembangkan penyediaan permukiman dan sarana prasana perkotaan dengan konsep ramah lingkungan berbasis teknologi tangguh bencana.
c. Mengintegrasikan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pada kawasan strategis pengembangan ekonomi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
d. Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan tanpa mengkonversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.

3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah area yang memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan, yang dikelola untuk pengembangan, pelestarian, perlindungan, serta koordinasi pembangunan agar selaras dengan penataan ruang wilayah. Di Kota Magelang, kawasan strategis yang ditetapkan mencakup:

a. Kawasan strategis yang berhubungan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
    1) Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar Magelang

b. Kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi
    1) Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Samapta;
    2) Kawasan Kebonpolo;
    3) Kawasan Sukarno Hatta yang meliputi kawasan perdagangan jasa lapis pertama Jalan Sukarno Hatta, Kawasan Terminal, serta kawasan pengembangan pasar induk;
    4) Kawasan Taman Kyai Langgeng;
    5) Kawasan sentra perekonomian Lembah Tidar. Kawasan ini meliputi Pasar Rejowinangun, Pusat Kuliner Lembah Tidar, pertokoan Jalan Ikhlas, Pasar Sidomukti, Pasar Klithikan Sidomukti I, kawasan shopping, dan sebagainya;
    6) Kawasan sekitar Alun-Alun; dan
    7) Kawasan Sidotopo.

c. Kawasan strategis yang berfokus pada aspek sosial dan budaya.
    1) Kawasan Petilasan Mantyasih dan bangunan-bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan

Strategi pengembangan kawasan strategis dalam mewujudkan Visi Kota Magelang 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi:
    1) Meningkatkan integrasi antar kawasan strategis dan konektivitas kawasan strategis dengan kawasan strategis wilayah sekitar.
    2) Mengembangkan keterpaduan aktivitas produktif pada kawasan strategis.

b. Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya:
    1) Mengembangkan aktivitas konservasi produktif yang tetap mempertahankan kondisi benda cagar budaya.

c. Strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan:
    1) Mengembangkan Kebun Raya sebagai kawasan wisata dan pendidikan dengan tidak mengganggu fungsi lindung.

3.3.4 Arah Kebijakan Kewilayahan Kota Magelang 2025-2029

Berdasarkan kebijakan pengembangan kewilayahan, dapat disusun indikasi program prioritas yang menggabungkan strategi dan kebijakan kewilayahan dengan dua unsur visi, yaitu unsur visi "Nyaman Berkelanjutan" dan unsur visi "Kota Perdagangan Jasa". Tabel 3.17 di bawah ini menunjukkan strategi, arah kebijakan, dan indikasi program prioritas pengembangan kewilayahan di Kota Magelang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.17 Arah Kebijakan Kewilayahan RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029

Strategi	Arah Kebijakan	Indikasi Program Nomenklatur
Unsur Visi 1: Kota Perdagangan dan Jasa		
Tujuan 1: Terwujudnya peran perdagangan dan jasa Kota Magelang dalam skala regional		
Sasaran 1.1: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa		
Meningkatkan daya tarik investasi dan kemudahan berusaha	Peningkatan infrastruktur penunjang investasi, termasuk aksesibilitas transportasi dan fasilitas pendukung usaha	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Unsur Visi 2: Humanis dan Harmonis		
Tujuan 2: Terwujudnya kesejahteraan masyarakat		
Sasaran 2.1: Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan ketahanan sosial yang inklusif		
Mendorong perbaikan transportasi publik pada wilayah Kota Magelang untuk meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh penduduk	Optimalisasi angkutan umum massal perkotaan yang merata di seluruh bagian kota Implementasi transportasi hijau berkelanjutan menjadi salah satu arah kebijakan penting dalam menekan laju pertumbuhan emisi di sektor transportasi. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan transportasi massal perkotaan, pembangunan infrastruktur yang mendukung penggunaan transportasi umum ramah lingkungan, serta revitalisasi layanan kendaraan umum agar kembali diminati masyarakat. Selain itu, pengembangan integrasi antar moda transportasi, baik untuk logistik maupun mobilitas orang, menjadi prioritas guna meningkatkan efisiensi perjalanan dan menurunkan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Strategi	Arah Kebijakan	Indikasi Program Nomenklatur
Sasaran 2.2: Meningkatnya kesempatan kerja dan menurunnya ketimpangan		
Meningkatkan konektivitas eksternal pada WP Gelangmanggung untuk memantapkan peran sebagai PKW	Peningkatan akses terhadap pusat ekonomi pada WP Gelangmanggung untuk perluasan kesempatan kerja	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran 2.3: Terwujudnya daerah yang kondusif berbasis harmoni sosial		
Mengembangkan penyediaan permukiman dan sarana prasana perkotaan dengan konsep ramah lingkungan berbasis teknologi tangguh bencana	Pemerataan layanan dasar permukiman yang berkualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan
Unsur Visi 3: Nyaman Berkelanjutan		
Tujuan 3: Terwujudnya ruang kota yang inklusif dan berkelanjutan		
Sasaran 3.1: Terwujudnya kualitas infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan		
Menguatkan infrastruktur, permukiman, dan tata ruang yang inklusif berkelanjutan	Peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas, drainase, sanitasi, dan ruang publik yang nyaman dan aman.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan

Strategi	Arah Kebijakan	Indikasi Program Nomenklatur
	Revitalisasi permukiman kumuh melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan hunian vertikal seperti rusunawa.	Program Pengembangan Perumahan
	Penerapan konsep kota cerdas (smart city) dalam tata ruang untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan perkotaan.	Program Pengembangan Sistem Drainase
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Persampahan
	Meningkatkan keterpaduan antara infrastruktur transportasi dan tata ruang guna menciptakan sistem mobilitas yang inklusif dan berkelanjutan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran 3.2: Terwujudnya ketahanan daerah, ketahanan pangan, dan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan		
Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Rehabilitasi dan konservasi kawasan rawan bencana dengan menerapkan tata ruang berbasis mitigasi risiko	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatkan ketahanan pangan	Mendorong *urban farming* dan ketahanan pangan berbasis masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penguatan infrastruktur hijau dan ramah lingkungan, termasuk pengelolaan air bersih, ruang terbuka hijau (RTH), dan pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan Persampahan

Strategi	Arah Kebijakan	Indikasi Program Nomenklatur
Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik profesional, inklusif, dan akuntabel		
Sasaran 4.1: Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berintegritas, efektif, inklusif dan berkelanjutan		
Mengembangkan layanan administrasi perkotaan yang inovatif	Pengembangan sistem layanan administrasi berbasis elektronik yang tersedia pada setiap Pusat Pelayanan Lingkungan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

BAB 4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.1.1 Pendidikan

Rencana program urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Pendidikan**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pendidikan nonformal/kesetaraan.

2. **Program Pengembangan Kurikulum**

   Program ini diarahkan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan melalui penetapan kurikulum muatan lokal bagi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal.

3. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

   Program ini diarahkan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan di pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

4. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**

   Program ini diarahkan untuk mengendalikan perizinan pendidikan melalui penerbitan izin bagi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

4.1.1.2 Kesehatan

Rencana program urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

   Program ini diarahkan untuk pemenuhan layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas dan layanan UKM serta UKP, perizinan rumah sakit, dan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.

2. **Program Persediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman**

   Program ini diarahkan untuk pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman melalui perizinan usaha, sertifikasi produksi, pengawasan higenis sanitasi, serta pemeriksaan *post-market*.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

   Program ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

   Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan.

4.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan sumber daya air. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi baik irigasi kewenangan kota dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1.000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses air minum aman perkotaan dengan fokus kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik yang dikelola PDAM maupun oleh kelompok masyarakat.

3. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di tingkat kota. Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses sanitasi layak dan aman baik melalui pembangunan tangki septik individu, peningkatan sambungan rumah maupun pembangunan SPALD terpadu. Peningkatan akses sanitasi aman juga difokuskan melalui peningkatan layanan penyedotan lumpur tinja.

4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi baik saluran drainase primer di Kota Magelang melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan saluran drainase yang terhubung langsung dengan sungai.

5. **Program Penataan Bangunan Gedung**

   Program ini diarahkan untuk penataan bangunan gedung melalui penyelenggaraan bangunan, pemberian IMB, dan sertifikat laik fungsi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penataan bangunan baik milik pemerintah maupun non pemerintah melalui pelayanan penyelenggaraan bangunan, penerbitan PBG serta sertifikat laik fungsi. Selain itu peningkatan akses *universal design* pada bangunan gedung di Kota Magelang juga diwujudkan, dimonitoring dan dievaluasi melalui program ini.

6. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

   Program ini diarahkan untuk penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya. Program ini difokuskan untuk mengembangkan kawasan strategis di Kota Magelang baik melalui penyediaan dokumen perencanaan dan legalisasinya, maupun perwujudan fisik bangunan lingkungan pada kawasan strategis terutama di Kawasan Strategis Sidotopo, Kawasan Sport Center GOR Samapta, Kawasan Aloon-aloon, Kawasan Lembah Tidar dan Kawasan Soekarno Hatta. Perwujudan fisik dilakukan melalui pembangunan maupun revitalisasi kawasan agar menjadi pusat aktivitas yang dapat mendorong pemerataaan aktivitas ekonomi dan pembangunan.

7. **Program Penyelenggaraan Jalan**

   Program ini diarahkan untuk penyelenggaraan jalan di tingkat kota. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi mantap jalan kewenangan kota, berikut dengan sarana prasarana pelengkap jalan seperti trotoar dan drainase jalan. Peningkatan kondisi mantap difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala jalan.

8. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

   Program ini diarahkan untuk pengembangan jasa konstruksi melalui pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi, dan pengawasan ketertiban usaha serta pemanfaatan jasa konstruksi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan usaha konstruksi dari kecelakaan kerja yang dilakukan melalui pelatihan tenaga terampil, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi, dan pengawasan ketertiban usaha serta pemanfaatan jasa konstruksi.

9. **Program Penyelenggaraan Tata Ruang**

   Program penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui pemenuhan dokumen tata ruang dan legalisasinya (RTRW, RDTR), fasilitasi forum perencanaan ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan dokumen SPPR (sinkronisasi program pemanfaatan ruang), pelayanan izin KKPR (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

10. **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

    Program ini diarahkan untuk pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di tingkat kota. Program ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya TPST Regional Magelang serta pembangunan sarana prasarana persampahan skala kota. Dalam upaya mewujudkan TPSA Regional Magelang, sesuai pembagian peran yang telah ditentukan Pemerintah Kota Magelang perlu menyelesaikan proses peningkatan akses menuju TPSA Regional melalui pelebaran jalan dan peningkatan jembatan Kali Bening. Sarana dan prasarana persampahan skala kota yang menjadi fokus adalah rencana pengembangan fasilitas pengelolaan persampahan yang berlokasi di Bojong, Kecamatan Jurangombo Selatan.

4.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Perumahan**

   Program ini diarahkan untuk pengembangan perumahan melalui penyediaan, rehabilitasi, dan pendistribusian rumah bagi korban bencana atau relokasi, pembinaan rumah susun, serta perizinan pembangunan dan kepemilikan perumahan

2. **Program Kawasan Permukiman**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan kawasan permukiman melalui perizinan, penataan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, termasuk permukiman kumuh di bawah 10 hektar.

3. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

   Program ini diarahkan untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota.

4. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

   Program ini diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan di tingkat kabupaten/kota.

4.1.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penanggulangan Bencana**

   Program ini diarahkan untuk penanggulangan bencana melalui pelayanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, evakuasi korban, dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

2. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

   Program ini diarahkan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui penanganan gangguan, penegakan peraturan daerah, serta pembinaan PPNS.

3. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

   Program ini diarahkan untuk pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran melalui pengendalian, pemadaman, inspeksi, investigasi, pemberdayaan masyarakat, dan operasi pencarian serta pertolongan.

4.1.1.6 Sosial

Rencana program urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Sosial**

   Program ini diarahkan untuk pemberdayaan sosial melalui penguatan komunitas adat terpencil, pengelolaan sumbangan, dan pengembangan sumber kesejahteraan sosial.

2. **Program Rehabilitasi Sosial**

   Program ini diarahkan untuk rehabilitasi sosial melalui pelayanan bagi penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar, gelandangan, pengemis, dan PMKS lainnya di luar panti sosial.

3. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

   Program ini diarahkan untuk perlindungan dan jaminan sosial melalui pemeliharaan anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin di tingkat kabupaten/kota.

4. **Program Penanganan Bencana**

   Program ini diarahkan untuk penanganan bencana melalui perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial serta pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.

5. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui pemeliharaan makam pahlawan nasional.

4.1.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1 Tenaga Kerja

Rencana program urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

   Program ini diarahkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan, konsultansi produktivitas, dan pengukuran produktivitas.

2. **Program Hubungan Industrial**

   Program ini diarahkan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan melalui regulasi dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

3. **Program Penempatan Kerja**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui pelayanan antar kerja, regulasi LPTKS, pengelolaan informasi pasar kerja, serta perlindungan PMI.

4.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

   Program ini diarahkan untuk pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pelembagaan PUG di lembaga pemerintah serta pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

2. **Program Perlindungan Perempuan**

   Program ini diarahkan untuk perlindungan perempuan melalui pencegahan kekerasan, penyediaan layanan rujukan, serta penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan.

3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

   Program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas keluarga melalui penguatan kesetaraan gender dan hak anak, pengembangan lembaga layanan, serta penyediaan layanan bagi keluarga.

4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan sistem data gender dan anak melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dalam kelembagaan.

5. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

   Program ini diarahkan untuk pemenuhan hak anak melalui pelembagaan PHA di berbagai sektor serta penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak.

6. **Program Perlindungan Khusus Anak**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan anak dengan memastikan anak korban kekerasan mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

4.1.2.3 Pangan

Rencana program urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

   Program ini diarahkan untuk peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah, serta pencapaian target konsumsi pangan sesuai angka kecukupan gizi.

2. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**

   Program ini diarahkan untuk penanganan kerawanan pangan.

3. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**

   Program ini diarahkan untuk pengawasan keamanan pangan melalui pengawasan pangan segar.

4.1.2.4 Pertanahan

Rencana program urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penatagunaan Tanah**

   Program ini diarahkan untuk penatagunaan tanah melalui pengelolaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah.

4.1.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

   Program ini diarahkan untuk perencanaan lingkungan hidup melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

   Program ini diarahkan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan keanekaragaman.

4. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

   Program ini diarahkan untuk pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 di tingkat kabupaten/kota, termasuk penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3.

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

   Program ini diarahkan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH-nya diterbitkan oleh pemerintah daerah.

6. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

   Program ini diarahkan untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan.

7. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

   Program ini diarahkan untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup.

8. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

   Program ini diarahkan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

9. **Program Pengelolaan Persampahan**

   Program ini diarahkan untuk pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan/ pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah oleh swasta, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

4.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pendaftaran Penduduk**

   Program ini diarahkan untuk pelayanan, penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk.

2. **Program Pencatatan Sipil**

   Program ini diarahkan untuk pelayanan, penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil.

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

   Program ini diarahkan untuk pengumpulan, pemanfaatan, penyajian, penataan, serta penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

   Program ini diarahkan untuk penyusunan profil kependudukan melalui penyediaan data kependudukan, serta penyusunan data perkembangan, proyeksi kependudukan, dan kebutuhan lainnya.

4.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Kerjasama Desa (Kelurahan)**

   Program ini diarahkan untuk peningkatan kerja sama desa melalui fasilitasi kerja sama antar kelurahan, fasilitasi kerja sama desa dengan pihak ketiga, serta fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan lintas kelurahan.

2. **Program Administrasi Pemerintahan Desa (Kelurahan)**

   Program ini diarahkan untuk administrasi pemerintahan kelurahan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan .

3. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

   Program ini diarahkan untuk pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan lembaga adat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan hukum adat.

4.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengendalian Penduduk**

   Program ini diarahkan untuk pengendalian penduduk melalui pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana**

   Program ini diarahkan untuk pembinaan keluarga berencana melalui advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB, pengendalian dan pendistribusian alat serta obat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan KB, serta pemberdayaan dan peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

3. **Program Pemberdayaan dana Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

   Program ini diarahkan untuk pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung upaya tersebut.

4.1.2.9 Perhubungan

Rencana program urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**, yang diarahkan untuk pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk penetapan rencana induk jaringan, penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin parkir, pengujian kendaraan, manajemen lalu lintas, persetujuan Andalalin, inspeksi keselamatan, penyediaan angkutan umum, penetapan trayek, serta penetapan tarif angkutan.

4.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Rencana program urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

   Program ini diarahkan untuk mengelola informasi dan komunikasi publik di tingkat Pemerintah Daerah, dengan fokus pada penyediaan layanan informasi antar perangkat daerah melalui jaringan intra, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengelolaan *data center* yang efektif.

2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

   Program ini diarahkan untuk mengelola nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta subdomain di lingkup Pemerintah Daerah, serta mengelola sistem *e-government* untuk mendukung layanan publik yang efisien dan terintegrasi di tingkat daerah.

4.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

   Program ini diarahkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap koperasi, koperasi simpan pinjam, dan unit simpan pinjam koperasi, guna memastikan kepatuhan dan kinerja yang baik.

2. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

   Program ini diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola koperasi.

3. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

   Program ini diarahkan untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi, guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan koperasi.

4. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

   Program ini diarahkan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai kegiatan, seperti pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Program ini juga mencakup penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang bersumber dari APBD untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, serta dukungan bagi pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, program ini memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.

4.1.2.12 Penanaman Modal

Rencana program urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Penanaman Modal**

   Program ini diarahkan untuk menyelenggarakan promosi penanaman modal dan menyediakan pelayanan perizinan serta non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, guna mempermudah investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

   Program ini diarahkan untuk mengelola data dan informasi perizinan serta non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien dan transparan dalam penanaman modal.

3. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

   Program ini diarahkan untuk mengembangkan iklim penanaman modal melalui berbagai kegiatan, seperti penetapan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pembuatan peta potensi investasi, dan fasilitasi rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur. Program ini juga mendukung hilirisasi investasi strategis, kemitraan usaha nasional, serta koordinasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan penanaman modal.

4. **Program Promosi Penanaman Modal**

   Program ini diarahkan untuk menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, guna menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

5. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

   Program ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, guna memastikan investasi berjalan sesuai peraturan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

   Program ini diarahkan untuk menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan pemuda melalui pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, serta pemuda kader, sekaligus memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah tersebut.

2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

   Program ini diarahkan untuk membina dan mengembangkan olahraga pendidikan di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah, serta membina olahraga prestasi, rekreasi, dan organisasi olahraga.

4.1.2.14 Statistik

Rencana program urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** yang diarahkan untuk menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup daerah, guna menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan dan kebijakan daerah.

4.1.2.15 Persandian

Rencana program urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** yang diarahkan untuk menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, guna memastikan keamanan dan kerahasiaan data serta informasi pemerintah.

4.1.2.16 Kebudayaan

Rencana program urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**

   Program Pengembangan Kebudayaan diarahkan untuk membina, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan lokal melalui pengelolaan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, serta pembinaan lembaga adat.

2. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

   Program Pengembangan Kesenian Tradisional diarahkan untuk membina dan mengembangkan kesenian yang melibatkan masyarakat pelakunya, guna melestarikan dan memperkuat kesenian tradisional daerah.

3. **Program Pembinaan Sejarah**

   Program Pembinaan Sejarah diarahkan untuk membina dan mengembangkan pemahaman tentang sejarah lokal, guna memperkuat identitas dan pengetahuan sejarah daerah.

4. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

   Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diarahkan untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya melalui pengelolaan, penerbitan izin, penetapan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, serta penetapan sistem zonasi untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah.

5. **Program Pengelolaan Permuseuman**

   Program Pengelolaan Permuseuman diarahkan untuk mengelola museum guna memperkuat fungsi edukasi, pelestarian, dan penyajian koleksi sejarah serta budaya daerah.

4.1.2.17 Perpustakaan

Rencana program urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Perpustakaan** yang diarahkan untuk mengelola perpustakaan, membudayakan gemar membaca, serta meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat untuk memperkuat budaya literasi daerah.

4.1.2.18 Kearsipan

Rencana program urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Arsip**

   Program pengelolaan arsip diarahkan untuk menjamin penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara efektif dan efisien termasuk di dalamnya pengelolaan simpul jaringan informasi nasional (JIKN) serta melakukan pembinaan kepada BUMD, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, organisasi politik dan masyarakat. Disamping itu, dilakukan pengawasan kearsipan kepada perangkat daerah melalui sistem kearsipan internal terkait tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tatalaksana kearsipan, ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan, serta ketersediaan dan pengembangan sumber daya aparatur kearsipan perangkat daerah.

2. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

   Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip diarahkan untuk melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun, melindungi dan menyelamatkan arsip akibat bencana, menyelamatkan arsip perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan, serta mengautentikasi arsip statis dan hasil alih media, dan melakukan pencarian arsip statis yang hilang.

4.1.3 Urusan Pilihan

4.1.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

   Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk mengelola perikanan budidaya melalui penerbitan izin usaha perikanan, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan daerah.

2. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

   Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan untuk mengelola pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui penerbitan tanda daftar usaha, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyediaan bahan baku, serta fasilitasi akses pasar dan peningkatan daya saing produk perikanan, dengan fokus pada usaha mikro dan kecil.

4.1.3.2 Pariwisata

Rencana program urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

   Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diarahkan untuk mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata, serta menetapkan tanda daftar usaha pariwisata dan rencana induk pariwisata guna meningkatkan potensi pariwisata daerah.

2. **Program Pemasaran Pariwisata**

   Program Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk memasarkan daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata, baik di dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan potensi pariwisata daerah.

3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

   Program ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan dan melindungi hak kekayaan intelektual, serta meningkatkan persentase ketersediaan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif.

4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

   Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mengembangkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di tingkat dasar, guna memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

4.1.3.3 Pertanian

Rencana program urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

   Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan pengembangan pertanian perkotaan (*urban farming*)

2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

   Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian diarahkan untuk mengembangkan dan membangun prasarana pertanian kota (*urban Farming*).

3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

   Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diarahkan untuk menjamin kesehatan hewan, mengawasi pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan, mengelola pelayanan jasa laboratorium dan medis veteriner, serta menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner guna melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

4. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

   Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian diarahkan untuk mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian kota (*urban farming*) dan memastikan ketahanan pangan daerah.

5. **Program Perizinan Usaha Pertanian**

   Program Perizinan Usaha Pertanian diarahkan untuk menerbitkan izin usaha pertanian, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, serta izin untuk fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah potong hewan, dan usaha pengecer obat hewan, guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan daerah.

6. **Program Penyuluhan Pertanian**

   Program Penyuluhan Pertanian diarahkan untuk melaksanakan penyuluhan pertanian perkotaan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas kelompok tani perkotaan dalam mengelola sektor pertanian perkotaan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

4.1.3.4 Perdagangan

Rencana program urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

   Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, mengendalikan harga dan stok barang tersebut di pasar, serta mengawasi distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan di daerah.

2. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

   Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan untuk membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan, serta melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, guna meningkatkan efisiensi dan kelancaran distribusi barang.

3. **Program Pengembangan Ekspor**

   Program Pengembangan Ekspor diarahkan untuk menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan, guna meningkatkan akses pasar internasional dan mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

4. **Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**

   Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diarahkan untuk melaksanakan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, guna memastikan akurasi alat ukur dan melindungi hak konsumen.

4.1.3.5 Perindustrian

Rencana program urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

   Program Perencanaan dan Pembangunan Industri diarahkan untuk menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi rencana pembangunan industri, guna mendorong pertumbuhan sektor industri yang terencana dan berkelanjutan di daerah.

2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota**

   Program Pengendalian Izin Usaha Industri diarahkan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), guna memastikan perkembangan industri yang terstruktur dan sesuai regulasi daerah.

3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

   Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diarahkan untuk menyediakan informasi industri terkait IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI, guna mendukung pengelolaan dan pengembangan industri yang terintegrasi dan efisien di daerah.

4.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1 Sekretariat Daerah

Rencana program pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diarahkan untuk melaksanakan administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat, serta fasilitasi dan koordinasi hukum, termasuk kerja sama daerah, guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Program Perekonomian dan Pembangunan**

   Program Perekonomian dan Pembangunan diarahkan untuk melaksanakan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, serta pemantauan kebijakan sumber daya alam, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan melalui berbagai kegiatan yang memperkuat kapasitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.4.2 Sekretariat DPRD

Rencana program pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

   Program ini diarahkan untuk mendukung pembentukan peraturan daerah, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan aspirasi masyarakat, pelaksanaan kode etik DPRD, dan fasilitasi kerja sama daerah.

4.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1 Perencanaan

Rencana program pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

   Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan dan pendanaan pembangunan, menganalisis data dan informasi pemerintahan daerah, serta mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan perkembangan bidang perencanaan pembangunan daerah, termasuk implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang tersebut.

2. **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

   Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah diarahkan untuk mengkoordinasikan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan, guna memastikan keselarasan dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

4.1.5.2 Keuangan

Rencana program pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

   Program Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran daerah, mengelola perbendaharaan daerah, serta melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, mendukung kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan mengelola data serta implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.

2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

   Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan untuk mengelola barang milik daerah dengan efektif dan efisien, guna memastikan pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang optimal terhadap barang milik daerah.

3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

   Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk mengelola pendapatan daerah dengan efektif dan efisien, guna memastikan tercapainya target pendapatan daerah yang mendukung pembangunan.

4.1.5.3 Kepegawaian

Rencana program unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan untuk mengelola pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, guna meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara.

4.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur dan tenaga kerja guna mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan berdaya saing melalui pengembangan kompetensi teknis, sertifikasi, kelembagaan, serta penguatan manajerial dan fungsional.

4.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pembangunan daerah melalui penelitian serta inovasi di berbagai bidang, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

4.1.6.1 Inspektorat Daerah

Rencana program pada unsur pengawasan inspektorat daerah adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

   Program Penyelenggaraan Pengawasan diarahkan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan melalui pengawasan internal serta pengawasan dengan tujuan tertentu guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja aparatur daerah.

2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

   Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan melalui perumusan kebijakan teknis serta pendampingan dan asistensi, guna memastikan kepatuhan dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

4.1.7 Unsur Kewilayahan

4.1.7.1 Kecamatan

Rencana program pada unsur kewilayahan kecamatan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat kecamatan serta optimalisasi pelayanan publik melalui koordinasi, pemeliharaan sarana, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan.

2. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib melalui koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, penegakan peraturan daerah, serta sinkronisasi kebijakan hukum di tingkat lokal.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

   Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi pemberdayaan kelurahan, penguatan lembaga kemasyarakatan, serta sinkronisasi kebijakan yang mendukung ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diarahkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah serta fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

4.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

4.1.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program pada unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut:

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

   Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diarahkan untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara melalui perumusan kebijakan serta pemantapan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan.

2. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

   Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diarahkan untuk memperkuat ketahanan daerah melalui perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan strategi di bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

   Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik diarahkan untuk memperkuat demokrasi dan

partisipasi politik melalui perumusan kebijakan, pendidikan politik, serta pemantapan etika dan budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai demokratis.

4. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

   Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diarahkan untuk memperkuat peran serta organisasi kemasyarakatan melalui perumusan kebijakan, pemberdayaan, dan pengawasan guna mendukung ketertiban serta partisipasi dalam pembangunan daerah.

5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

   Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diarahkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah melalui perumusan kebijakan serta pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial secara efektif.

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Kota Magelang yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2025-2030

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**														
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**														
	Meningkatnya angka partisipasi anak sekolah			**35.823.628.180**		**23.140.143.301**		**25.125.400.000**		**26.828.000.000**		**29.500.000.000**		**32.050.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pendidikan**
		Angka Partisipasi Sekolah (5 - 6 Th) PAUD	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka Partisipasi Sekolah (7 - 12 Th) SD	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka Partisipasi Sekolah (13 - 15 Th) SMP	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka Partisipasi Sekolah (7 - 18 Th) Kesetaraan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	81,05		83,55		86,05		88,55		91,05		93,55		
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	67,85		70,75		73,65		76,55		79,45		82,35		
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	89,37		90,47		91,57		92,67		93,77		94,87		
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	76,51		78,01		79,51		81,01		82,51		84,01		
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**														
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan			**94.334.800**		**119.999.800**		**135.500.000**		**145.500.000**		**165.000.000**		**170.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pendidikan**
		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**														
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan			**7.006.800**		**17.489.500**		**20.000.000**		**25.000.000**		**30.000.000**		**35.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pendidikan**
		Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik	50,00		52,50		55,00		57,50		60,00		65,00		
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah / seni budaya dan mengarus-utamakan kebudayaan	21,28		26,59		31,92		37,23		42,55		47,87		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**														
	Meningkatnya kualitas dan distribusi satuan pendidikan			**0**		**47.200.000**		**47.200.000**		**47.200.000**		**47.200.000**		**47.200.000**	**PD Pengampu Urusan Pendidikan**
		Persentase usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan / diperbarui	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**														
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**														
	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit			**1.249.267.200**		**752.474.200**		**863.845.330**		**991.922.130**		**1.139.210.449**		**1.308.592.016**	**PD Pengampu Urusan Kesehatan**
		Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi kasus TBC)	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	90,00		90,00		90,00		91,00		91,00		91,00		
		Persentase depresi yang mendapatkan layanan	1,00		1,50		2,00		2,00		2,00		2,00		
		Persentase merokok penduduk 10-19 tahun	13,40		12,40		11,40		10,40		9,40		8,40		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	95,00		96,00		97,00		98,00		99,00		100,00		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau			**19.327.870.460**		**25.096.937.514**		**29.458.793.141**		**33.865.814.612**		**33.865.814.612**		**33.865.814.612**	**PD Pengampu Urusan Kesehatan**
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	90,00		90,00		90,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99,00		99,00		99,00		99,00		99,00		99,00		
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**														
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan			**87.127.370**		**53.029.630**		**53.825.074**		**54.632.451**		**55.451.937**		**56.283.716**	**PD Pengampu Urusan Kesehatan**
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	17,27		17,27		17,31		17,35		17,39		17,43		
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**														
	Meningkatnya pengawasan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman			**226.469.700**		**99.468.400**		**100.960.426**		**102.474.832**		**104.011.955**		**105.572.134**	**PD Pengampu Urusan Kesehatan**
		Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		75,00		
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**														
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan			**15.316.800**		**2.430.967.272**		**2.456.492.428**		**2.482.285.599**		**2.508.349.598**		**2.534.687.268**	**PD Pengampu Urusan Kesehatan**
		Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	98,40		98,50		98,60		98,70		98,80		98,90		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**														
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**														
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi kualitas jaringan irigasi perkotaan			**1.256.364.740**		**1.561.879.030**		**1.655.591.772**		**1.754.927.279**		**1.860.222.916**		**1.971.836.291**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	58,75		59,58		60,36		61,15		61,93		62,72		
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**														
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum			**2.386.603.600**		**1.139.677.600**		**1.316.684.324**		**1.289.685.383**		**1.418.653.921**		**1.449.090.496**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	74,99		75,08		76,17		77,27		78,36		79,45		
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota	77,69		80,42		83,15		85,88		88,61		91,34		
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	89,10		89,64		90,18		90,72		91,26		91,80		
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**														
	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional			**235.856.800**		**900.000.000**		**1.250.000.000**		**1.400.000.000**		**750.000.000**		**500.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan (PSP)	20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**														
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah			**5.255.976.557**		**2.439.098.040**		**22.379.985.021**		**21.744.551.423**		**42.598.257.808**		**23.310.489.877**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	58,25		66,60		74,95		83,30		91,65		100,00		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	79,79		83,83		87,88		91,92		95,96		100,00		
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	17,22		20,00		25,00		30,00		40,00		50,00		
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**														
	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan			**1.657.748.723**		**1.575.861.030**		**1.670.412.691**		**1.770.637.452**		**1.876.875.698**		**1.989.488.239**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase saluran drainase primer dalam kondisi baik	35,05		35,34		35,63		35,92		36,21		36,50		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**														
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung			**47.611.329.265**		**22.650.420.514**		**34.104.355.744**		**25.339.709.087**		**26.861.402.031**		**28.474.659.132**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG	26,85		26,95		27,05		27,15		27,25		27,35		
		Persentase Bangunan Gedung yang memiliki SLF	0,45		0,55		0,65		0,75		0,85		0,95		
		Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**														
	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata			**314.770.000**		**6.477.022.400**		**6.865.643.744**		**7.277.582.368**		**7.714.237.309**		**8.177.091.547**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase Dokumen RTBL Yang Tersusun	42,50		50,00		57,50		67,75		78,75		91,25		
		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai RTBL	3,33		21,67		28,33		35,00		41,67		48,33		
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**														
	Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman			**13.860.322.860**		**8.208.102.420**		**12.169.839.439**		**35.771.787.031**		**59.173.763.837**		**57.675.770.294**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	85,77		85,86		85,95		86,03		86,12		86,20		
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	38,78		39,28		39,78		40,28		40,78		41,28		
		Persentase Panjang Drainase Jalan dalam Kondisi Baik	33,66		34,16		34,66		35,16		35,66		36,16		
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	81,73		83,23		84,73		86,23		87,73		89,23		
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**														
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi			**105.316.300**		**104.921.600**		**123.216.896**		**131.089.909**		**139.483.303**		**148.433.100**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi			**93.613.000**		**150.810.000**		**159.858.600**		**169.450.115**		**179.617.121**		**190.394.147**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase tenaga konstruksi tersertifikasi	66,67		70,00		73,00		76,67		80,00		83,33		
	Berkembangnya Badan Usaha Jasa Konstruksi			**44.164.000**		**21.500.000**		**23.650.000**		**26.015.000**		**28.616.500**		**31.478.150**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Aktif dan Berkembang	39,20		39,70		40,60		41,10		41,60		42,10		
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**														
	Meningkatnya regulasi penataan ruang yang diterbitkan			**226.428.500**		**263.682.100**		**330.000.000**		**0**		**0**		**120.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase regulasi terkait penataan ruang yang diterbitkan	44,25		45,00		56,25		59,88		69,88		77,13		
	Meningkatnya perwujudan pola penataan ruang			**87.246.800**		**38.279.600**		**131.707.014**		**139.609.434**		**147.985.999**		**156.865.158**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase perwujudan pola ruang	83,40		83,50		83,60		83,70		83,80		83,90		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya perwujudan struktur ruang			**0**		**49.619.000**		**52.596.000**		**155.751.000**		**59.097.000**		**62.642.000**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase perwujudan struktur ruang	20,00		20,00		25,00		30,00		35,00		40,00		
	Meningkatnya pengendalian penataan ruang			**169.984.600**		**95.225.000**		**114.808.000**		**121.696.000**		**128.998.000**		**136.736.880**	**PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
		Persentase pengendalian penataan ruang	50,00		50,00		51,00		51,00		52,00		52,00		
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**														
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**														
	Meningkatnya pengembangan perumahan yang layak huni bagi korban bencana			**55.679.500**		**216.479.625**		**2.718.137.863**		**2.424.044.756**		**2.785.246.993**		**2.582.009.342**	**PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya pengembangan perumahan yang layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten/ kota			**0**		**0**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**		**2.500.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**														
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman			**232.902.200**		**332.148.800**		**2.839.203.000**		**825.863.000**		**864.626.000**		**900.675.000,00**	**PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditata	30,22		60,43		90,65		100,00		100,00		100,00		
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**														
	Meningkatnya kualitas dan kawasan permukiman yang layak huni			**2.380.662.700**		**7.192.500.000**		**5.500.000.000**		**8.500.000.000**		**11.520.000.000**		**1.750.000.000,00**	**PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	10,00		25,60		20,90		26,40		100,00		100,00		
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**														
	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar permukiman melalui pembangunan dan peningkatan PSU			**14.310.082.542**		**17.187.700.000**		**18.633.270.000**		**23.446.597.000**		**25.033.756.700**		**23.279.132.370**	**PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
		Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	97,67		98,64		99,61		100,00		100,00		100,00		
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**														
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**														
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.			**3.106.737.720**		**2.603.762.500**		**5.824.822.000**		**6.407.250.211**		**7.047.975.231**		**7.752.772.754**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya penegakan perda			**584.899.960**		**315.077.960**		**533.504.300**		**520.931.230**		**596.342.853**		**637.032.838**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase penegakan perda	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**														
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			**1.814.415.000**		**747.026.428**		**724.280.200**		**1.022.200.000**		**1.151.200.000**		**1.051.200.000**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	0,98		0,98		0,98		0,98		0,98		0,98		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pascabencana			**490.000.000**		**116.408.900**		**482.800.003**		**279.880.003**		**297.068.003**		**297.068.003**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana			**1.209.000.000**		**265.318.640**		**354.930.500**		**394.675.000**		**476.259.500**		**476.259.500**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase penanganan tanggap bencana darurat	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**														
	Meningkatnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			**1.144.574.190**		**697.940.912**		**2.564.018.000**		**2.821.320.000**		**3.102.463.000**		**3.412.709.000**	**PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
		Persentase pelayanan dan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**														
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**														
	Meningkatnya peran PSKS dalam kesejahteraan sosial			**190.212.269**		**223.761.492**		**246.137.640**		**270.751.404**		**297.826.584**		**327.609.202**	**PD Pengampu Urusan Sosial**
		Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	97,67		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**														
	Meningkatnya layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS			**5.618.974.392**		**10.121.332.606**		**11.178.465.700**		**12.296.312.200**		**13.525.493.700**		**14.878.044.200**	**PD Pengampu Urusan Sosial**
		Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**														
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS			**374.320.746**		**2.067.509.328**		**2.509.568.000**		**2.982.875.000**		**3.429.260.000**		**3.494.858.500**	**PD Pengampu Urusan Sosial**
		Persentase PMKS/PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
		Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0,33		0,40		0,50		0,60		0,75		0,90		
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**														
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana			**110.885.600**		**143.208.500**		**123.000.000**		**145.000.000**		**177.500.000**		**185.000.000**	**PD Pengampu Urusan Sosial**
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**														
	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan			**82.900.692**		**131.825.556**		**145.008.200**		**159.508.900**		**175.459.900**		**193.005.800**	**PD Pengampu Urusan Sosial**
		Persentase luas taman makam pahlawan yang dikelola	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**														
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**														
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja			**2.464.614.800**		**1.953.043.147**		**2.060.200.000**		**2.007.500.000**		**2.113.500.000**		**2.113.500.000**	**PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja**
		Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan	13,00		14,00		14,00		14,00		14,00		15,00		
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**														
	Meningkatnya Kesempatan Kerja Daerah			**300.320.200**		**376.621.850**		**398.500.000**		**416.700.000**		**437.500.000**		**451.800.000**	**PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja**
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	98,00		98,25		98,40		98,65		98,85		99,05		
	Meningkatnya Pencari Kerja yang Berwirausaha			**1.150.453.602**		**3.944.261.420**		**1.900.000.000**		**1.150.000.000**		**1.150.000.000**		**1.050.000.000**	**PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja**
		Pencari kerja yang berwirausaha	80,00		180,00		100,00		80,00		80,00		60,00		
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**														
	Meningkatnya Perlindungan terhadap tenaga kerja			**120.630.500**		**120.630.500**		**120.630.500**		**120.630.500**		**120.630.500**		**126.662.025**	**PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja**
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah/ terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	39,39		42,42		45,45		53,03		54,55		57,58		
	Meningkatnya Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan			**482.385.000**		**482.385.000**		**484.065.000**		**485.745.000**		**487.425.000**		**542.865.000**	**PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja**
		Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	46,53		47,78		49,03		50,28		51,53		52,68		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**														
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**														
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan			**1.117.752.100**		**772.926.900**		**838.500.000**		**883.000.000**		**924.630.000**		**935.750.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	6,50		6,80		7,10		7,40		7,70		8,00		
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**														
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan			**356.246.246**		**220.115.860**		**225.500.000**		**237.700.000**		**251.250.000**		**265.350.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	85,71		88,57		88,57		91,43		91,43		94,28		
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**														
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak			**45.000.000**		**305.909.700**		**300.000.000**		**260.000.000**		**220.000.000**		**180.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Persentase kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (KRPPA)	17,65		35,29		52,94		70,59		88,24		100,00		
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**														
	Meningkatnya pengelolaan data gender dan anak			**11.312.100**		**4.680.500**		**35.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**		**15.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola data gender dan anak	39,29		39,29		42,86		42,86		46,43		46,43		
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**														
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif			**212.083.200**		**167.932.200**		**168.000.000**		**176.400.000**		**185.200.000**		**195.500.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	65,32		66,32		67,32		68,32		69,32		70,32		
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**														
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak			**425.428.465**		**257.305.750**		**460.000.000**		**467.500.000**		**477.500.000**		**487.500.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	82,80		84,20		85,60		87,00		88,40		89,50		
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**														
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**														
	Terjaminnya keanekaragaman pangan masyarakat			**343.900.000**		**346.500.000**		**376.000.000**		**391.000.000**		**402.000.000**		**429.500.000**	**PD Pengampu Urusan Pangan**
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	94,30		94,35		94,40		94,45		94,50		94,55		
		Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	86,15		86,20		86,30		86,40		86,50		86,60		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**														
	Terlaksananya penanganan kerawanan pangan			**89.400.000**		**95.000.000**		**100.000.000**		**106.000.000**		**112.000.000**		**118.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pangan**
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	41,18		35,29		29,41		23,53		11,76		0,00		
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**														
	Terjaminnya keamanan pangan masyarakat			**77.800.000**		**79.000.000**		**80.500.000**		**82.000.000**		**83.500.000**		**85.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pangan**
		Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**														
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**														
	Terwujudnya tertib administrasi pada pencatatan aset tanah milik pemerintah daerah			**123.000.000**		**23.500.000**		**50.000.000**		**60.000.000**		**70.000.000**		**70.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pertanahan**
		Persentase Luas Tanah Aset Pemerintah Kota yang telah bersertifikat	62,47		62,52		62,57		62,62		62,67		62,72		
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**														
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**														
	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk memitigasi dampak KRP			**103.048.600**		**0**		0		**150.000.000**		**95.000.000**		**98.000.000**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	25,00		0,00		0,00		50,00		75,00		100,00		
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**														
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			**315.551.600**		**412.475.000**		**412.000.000**		**440.000.000**		**438.000.000**		**467.000.000**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Kadar Pencemaran Dalam Air	58,33		58,33		50,00		50,00		50,00		41,67		
		Konsentrasi Polutan Udara (SO2)	8,89		8,87		8,85		8,83		8,81		8,79		
		Konsentrasi NO2	9,12		9,10		9,08		9,06		9,04		9,02		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	38,55		38,56		38,57		38,58		38,59		38,60		
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**														
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			**11.101.645.205**		**7.834.610.145**		**9.109.071.159**		**9.574.878.275**		**10.276.529.925**		**10.701.268.737**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Angka Keanekaragaman Hayati	147,00		152,00		167,00		177,00		187,00		197,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**														
	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			**10.999.500**		**12.099.450**		**13.309.395**		**14.640.335**		**16.104.368**		**17.714.805**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	70,00		73,33		80,00		86,67		93,33		100,00		
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**														
	Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan			**63.817.900**		**70.199.690**		**77.219.659**		**84.941.625**		**93.435.787**		**102.779.366**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	46,67		50,00		53,33		56,67		60,00		63,33		
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**														
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan Hidup			**203.130.100**		**223.443.110**		**245.787.421**		**270.366.163**		**297.402.779**		**327.143.057**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Peningkatan Kelompok Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan yang meningkat kapasitasnya di bidang Lingkungan Hidup	99,00		110,00		121,00		132,00		143,00		154,00		
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**														
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup			**210.421.600**		**325.621.600**		**254.610.136**		**280.071.150**		**308.078.265**		**338.886.091**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18,7500		21,8750		25,0000		28,1250		31,2500		34,3750		
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**														
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup			**10.999.500**		**10.999.500**		**13.309.395**		**14.640.335**		**16.104.368**		**17.714.805**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**														
	Meningkatnya tata kelola persampahan			**11.356.671.594**		**17.160.307.146**		**18.538.956.950**		**20.193.336.715**		**18.978.592.433**		**21.360.899.294**	**PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup**
		Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan Sampah	19,95		20,33		21,09		21,85		22,62		26,10		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**														
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**														
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk			**392.922.468**		**441.515.876**		**450.667.000**		**495.733.100**		**625.716.550**		**599.839.305**	**PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Persentase Penduduk Usia Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP-EL	99,95		99,98		99,98		99,98		99,98		99,98		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	36,00		36,50		36,75		37,00		37,25		37,50		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**														
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil			**204.891.390**		**257.184.856**		**371.707.030**		**408.877.733**		**449.765.505**		**494.742.053**	**PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**														
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan			**39.974.600**		**97.336.200**		**220.235.130**		**237.328.333,00**		**266.564.616,00**		**288.549.777,00**	**PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Persentase ketersediaan data agregat kependudukan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase OPD yang mengajukan PKS pemanfaatan data	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**														
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan			**4.327.000**		**13.560.300,00**		**14.917.030**		**16.408.833**		**18.049.816**		**19.855.097**	**PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**														
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**														
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			**2.564.512.719**		**2.523.653.200**		**2.776.027.000**		**3.053.669.000**		**3.359.016.900**		**3.694.928.600**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
		Persentase Kelurahan yang difasilitasi dalam program pemberdayaan masyarakat	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**														
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan kelurahan			**29.017.100**		**25.847.825**		**28.600.000**		**31.500.000**		**34.800.000**		**38.500.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
		Persentase kelurahan di Kota Magelang yang meningkat nilai EPDESKELnya	35,29		52,94		70,59		88,23		100,00		100,00		
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**														
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			**781.726.525**		**1.576.730.025**		**1.467.208.400**		**1.534.929.000**		**1.608.422.000**		**1.703.192.000**	**PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
		Indeks Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan (IKLKP)	0-1,99		2-2,99		3-3,99		3-3,99		3-3,99		4-4,49		
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**														
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**														
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk			**311.704.346**		**505.836.660**		**455.000.000**		**455.000.000**		**455.000.000**		**455.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
		Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 th)	14,80		13,90		13,20		12,50		11,90		11,40		
		Total fertility rate (TFR)	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**														
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)			**860.451.000**		**112.706.996**		**115.000.000**		**120.000.000**		**125.000.000**		**130.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	71,05		71.06		71.07		71.08		71.09		71.10		
		Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	6,60		6.55		6.50		6.45		6.40		6,35		
		Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	88,00		88,70		89,30		89,90		90,40		90,9		
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**														
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sejahtera (KS)			**862.130.563**		**425.124.500**		**430.000.000**		**440.000.000**		**450.000.000**		**460.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	60,00		63,00		65,00		67,00		69,00		70,00		
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**														
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**														
	Meningkatnya kinerja lalu lintas perkotaan			**2.043.365.679**		**7.430.000.000**		**7.663.000.000**		**7.888.000.000**		**8.209.000.000**		**8.480.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perhubungan**
		Indeks Kinerja Lalu lintas (IKL)	0,28		0,28		0,29		0,29		0,29		0,30		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya pengguna moda transportasi umum perkotaan			**788.545.340**		**1.220.000.000**		**1.346.000.000**		**1.475.900.000**		**1.620.850.000**		**1.770.487.000**	
		PPTUK	8,30		8,30		8,31		8,31		8,32		8,32		
	Terpenuhinya standar kelengkapan jalan pada jalan kabupaten/kota			**8.662.473.867**		**13.380.000.000**		**14.705.000.000**		**16.030.000.000**		**17.355.000.000**		**18.580.000.000**	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	86,00		86,25		86,50		86,75		87,00		87,25		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**														
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**														
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			**1.138.768.691**		**1.163.030.100**		**1.337.484.615**		**1.538.107.308**		**1.768.823.404**		**2.034.146.914**	**PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika**
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	91,50		92,00		92,50		93,00		93,50		94,00		
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**														
	Terwujudnya Pengelolaan TIK yang terintegrasi, andal, dan responsif guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien			**8.105.553.101**		**9.473.929.750**		**17.514.948.469**		**13.756.614.581**		**15.331.325.609**		**17.567.388.293**	**PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika**
		Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	14,29		14,29		17,86		21,43		25,00		28,57		
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**														
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**														
	Meningkatnya koperasi aktif			**21.773.500**		**21.636.000**		**31.000.000**		**34.100.000**		**37.510.000**		**41.261.000**	**PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1,85		1,86		1,91		1,97		1,99		2,04		
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**														
	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian			**26.013.600**		**34.976.000**		**37.584.400**		**38.301.000**		**42.131.000**		**46.344.000**	**PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	13,70		17,10		20,50		23,90		27,40		30,80		
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**														
	Meningkatnya pengelolaan koperasi modern			**20.000.000**		**23.000.000**		**25.000.000**		**27.500.000**		**29.450.000**		**32.875.000**	**PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Persentase koperasi modern	4,70		6,10		7,50		8,90		10,20		11,60		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya produktivitas koperasi			**15.000.000**		**17.000.000**		**20.000.000**		**22.000.000**		**25.000.000**		**27.000.000**	**PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	11,40		13,16		14,91		16,67		18,42		20,17		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**														
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri			**325.573.100**		**9.027.392.444**		**9.291.183.258**		**9.368.923.894**		**9.509.338.643**		**9.663.694.887**	**PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
		Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	53,95		59,71		65,46		71,21		76,96		82,72		
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**														
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**														
	Terwujudnya realisasi investasi pada th bersangkutan			**82.720.900**		**268.165.325**		**260.000.000**		**115.000.000**		**245.000.000**		**205.820.000**	**PD Pengampu Urusan Penanaman Modal**
		Realisasi Total terhadap Target Investasi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**														
	Meningkatnya investor yang berinvestasi di Kota Magelang			**158.183.923**		**230.290.000**		**240.053.023**		**247.558.325**		**397.314.157**		**299.545.572**	**PD Pengampu Urusan Penanaman Modal**
		Persentase Investor yang berinvestasi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**														
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada masyarakat			**365.230.445**		**432.651.793**		**475.916.973**		**523.508.670**		**575.859.717**		**633.445.689**	**PD Pengampu Urusan Penanaman Modal**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	94,75		94,90		95,00		95,25		95,40		95,50		
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**														
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap kewajiban PM			**149.826.223**		**159.823.866**		**172.206.724**		**186.187.821**		**204.806.603**		**225.287.263**	**PD Pengampu Urusan Penanaman Modal**
		Persentase Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban PM	20,00		22,00		25,00		27,00		30,00		32,00		
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**														
	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal			**73.209.600**		**21.251.000**		**113.751.000**		**31.251.000**		**33.751.000**		**38.000.000**	**PD Pengampu Urusan Penanaman Modal**
		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	N/A		1,10		1,20		1,30		1,40		1,50		
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**														
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**														
	Meningkatnya daya saing kepemudaan			**1.486.900.600**		**2.539.397.725**		**2.793.337.498**		**3.072.671.247**		**3.379.938.603**		**3.717.932.694**	**PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
		Persentase Pemuda Berprestasi	0,07		0,08		0,08		0,09		0,10		0,10		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**														
	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga			**8.347.734.664**		**14.378.684.525**		**15.816.552.978**		**17.398.208.275**		**19.138.029.103**		**21.051.832.013**	**PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga**
		Persentase Atlet Berprestasi	24,50		25,50		26,50		27,50		28,50		29,50		
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**														
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**														
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			**417.000.000**		**400.000.000**		**450.000.000**		**500.000.000**		**550.000.000**		**600.000.000**	**PD Pengampu Urusan Statistik**
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**														
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**														
	Terwujudnya pengamanan informasi pemerintah daerah			**189.220.170**		**219.959.830**		**252.953.805**		**290.896.875**		**334.531.406**		**384.711.117**	**PD Pengampu Urusan Persandian**
		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	48,00		49,00		50,00		51,00		52,00		53,00		
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**														
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**														
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan			**3.057.886.836**		**3.022.828.880**		**3.100.000.000**		**3.150.000.000**		**3.250.000.000**		**3.500.000.000**	**PD Pengampu Urusan Kebudayaan**
		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	63,00		63,00		63,00		63,00		63,00		63,00		
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**														
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional			**848.271.700**		**200.000.000**		**225.000.000**		**250.000.000**		**275.000.000**		**300.000.000**	**PD Pengampu Urusan Kebudayaan**
		Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**														
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah			**294.610.600**		**294.290.600**		**300.000.000**		**325.000.000**		**350.000.000**		**375.000.000**	**PD Pengampu Urusan Kebudayaan**
		Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**														
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan			**228.805.000**		**120.524.000**		**125.650.000**		**145.500.000**		**165.250.000**		**200.000.000**	**PD Pengampu Urusan Kebudayaan**
		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	43,00		49,00		55,00		60,00		64,00		69,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**														
	Meningkatnya tata kelola museum			**456.835.412**		**344.243.044**		**350.000.000**		**365.000.000**		**375.000.000**		**400.000.000**	**PD Pengampu Urusan Kebudayaan**
		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	20,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**														
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**														
	Meningkatnya mutu layanan perpustakaan			**831.095.485**		**914.211.634**		**1.005.632.797**		**1.100.196.076**		**1.214.815.686**		**1.316.942.257**	**PD Pengampu Urusan Perpustakaan**
		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	32,59		33,22		33,86		34,49		35,13		35,76		
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	2,91		2,99		3,07		3,14		3,22		3,30		
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**														
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**														
	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan OPD			**377.894.415**		**183.055.890**		**192.775.685**		**202.414.468**		**212.535.193**		**223.161.951**	**PD Pengampu Urusan Kearsipan**
		Audit Sistem Kearsipan Internal	81,19		81,52		81,82		82,17		82,5		82,83		
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**														
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			**368.607.426**		**516.596.050**		**548.952.794**		**571.169.858**		**599.728.351**		**629.714.769**	**PD Pengampu Urusan Kearsipan**
		Audit Sistem Kearsipan Eksternal	90,53		90,85		91,18		91,5		91,83		92,15		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**														
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**														
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya			**838.390.000**		**854.000.000**		**956.000.000**		**967.500.000**		**979.200.000**		**991.120.000**	**PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan**
		Produksi Perikanan Budi Daya	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**														
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat			**293.925.000**		**298.992.000**		**304.059.000**		**309.126.000**		**273.868.000**		**278.930.000**	**PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan**
		Angka konsumsi ikan	24,26		24,50		24,75		25,00		25,30		25,50		
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**														
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**														
	Meningkatnya kualitas dan daya tarik destinasi wisata			**211.168.200**		**56.631.000**		**180.635.500**		**62.000.000**		**64.000.000**		**70.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pariwisata**
		Rata-Rata Lama Menginap (RLM)	1,25		1,26		1,27		1,28		1,29		1,30		
		Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	39,00		39,20		39,40		39,60		39,80		39,90		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**														
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata daerah			**1.255.996.760**		**1.155.693.210**		**1.308.022.331**		**1.438.824.564**		**1.582.707.021**		**1.740.977.723**	**PD Pengampu Urusan Pariwisata**
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	2.796		3.761		5.105		6.955		9.558		13.145		
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Nusantara	13,13		13,54		13,95		14,36		14,77		15,00		
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**														
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif			**11.780.000**		**80.000.000**		**40.800.000**		**11.800.000**		**12.800.000**		**14.800.000**	**PD Pengampu Urusan Pariwisata**
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	5,31		7,89		10,37		12,69		14,88		16,75		
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**														
	Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang berdaya saing			**171.365.900**		**333.811.000**		**352.541.000**		**380.000.000**		**405.000.000**		**435.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pariwisata**
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	4,95		6,94		8,65		10,02		11,07		11,74		
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**														
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**														
	Meningkatnya Distribusi dan kualitas sarana pertanian			**1.108.916.345**		**1.196.521.717**		**1.514.295.264**		**1.804.462.611**		**2.148.794.257**		**2.557.936.144**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Peningkatan produksi tanaman pangan	3,97		4,01		4,04		4,19		4,37		4,37		
		Peningkatan Produksi Hortikultura	25,33		27,16		28,06		28,86		31,40		31,40		
		Peningkatan produksi peternakan	2,50		2,60		2,70		2,80		3,00		3,00		
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**														
	Meningkatnya kualitas Prasarana Pertanian serta Pelayanan Kesehatan, Keamanan dan Kualitas Daging ASUH			**229.571.811**		**250.421.125**		**320.003.500**		**511.687.200**		**392.076.240**		**786.148.288**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Peningkatan pemanfaatan prasarana pertanian	69,57		70,43		71,57		72,57		73,57		74,57		
		Peningkatan Skor SKM	0,58		0,58		0,58		0,58		0,58		0,58		
		Penurunan penyimpangan persyaratan teknis pencapaian NKV RPH	27,27		24,68		22,08		19,48		16,88		14,29		
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**														
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner			**806.795.455**		**1.252.664.275**		**1.322.012.073**		**1.397.523.166**		**1.479.337.441**		**1.567.968.391**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Peningkatan pangan asal hewan yang ASUH	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
		Persentase produksi daging asal RPH yang ASUH	99,85		99,86		99,86		99,87		99,87		99,88		
		Penurunan jumlah kasus Penyakit hewan	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		
		Persentase jumlah kasus penyakit hewan di Puskeswan yang Tertangani	80,90		82,00		83,00		84,00		85,00		86,00		
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**														
	Terkendalinya bencana pertanian			**25.556.000**		**10.714.350**		**29.123.200**		**34.947.840**		**41.937.408**		**50.324.890**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		
		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**														
	Terfasilitasinya Izin Usaha Pertanian			**62.000.000**		**65.000.000**		**68.000.000**		**71.000.000**		**74.000.000**		**77.000.000**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Persentase peningkatan unit usaha yang mempunyai izin usaha	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**														
	Meningkatnya implementasi pertanian perkotaan			**33.357.400**		**302.452.900**		**560.664.400**		**732.125.900**		**792.679.400**		**944.543.800**	**PD Pengampu Urusan Pertanian**
		Persentase implementasi sistem pertanian perkotaan	11,76		17,65		17,65		17,65		17,65		17,65		
		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk	0,00		33,33		33,33		66,66		66,66		100,00		
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**														
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**														
	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa perdagangan			**5.872.792.448**		**5.381.000.132**		**6.813.993.000**		**8.313.999.000**		**10.014.002.000**		**11.113.043.000**	**PD Pengampu Urusan Perdagangan**
		Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	33,04		45,22		59,57		61,74		63,91		66,09		
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**														
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			**50.000.000**		**55.016.000**		**60.000.000**		**65.000.000**		**70.000.000**		**75.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perdagangan**
		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75,00		78,26		80,00		82,61		83,50		86,96		
	Menurunnya disparitas harga			**30.873.000**		**0**		**40.000.000**		**47.000.000**		**54.000.000**		**60.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perdagangan**
		Disparitas harga	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**														
	Meningkatnya kontribusi ekspor barang terhadap PDRB			**462.975.278**		**536.738.625**		**610.000.000**		**740.000.000**		**800.000.000**		**885.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perdagangan**
		Nilai ekspor barang	3.150.000		3.300.000		3.500.000		3.750.000		3.950.000		4.150.000		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**														
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk			**156.002.264**		**163.473.700**		**183.000.000**		**188.000.000**		**188.000.000**		**189.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perdagangan**
		Persentase kepatuhan pelaku usaha yang menggunakan alat UTTP	75,38		76,95		78,52		80,09		81,66		83,23		
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**														
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**														
	Meningkatnya daya saing IKM			**1.353.774.759**		**1.545.981.903**		**2.152.500.000**		**2.377.500.000**		**2.617.000.000**		**2.830.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perindustrian**
		Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	34,00		36,00		38,00		40,00		40,00		40,00		
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**														
	Meningkatnya kepastian hukum bagi pelaku usaha IKM			**5.000.000**		**7.500.000**		**10.000.000**		**15.000.000**		**20.000.000**		**25.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perindustrian**
		Persentase peningkatan jumlah IKM yang memiliki legalitas usaha	11,05		11,16		11,17		11,20		11,24		11,26		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**														
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri			**10.000.000**		**23.000.000**		**15.000.000**		**20.000.000**		**25.000.000**		**30.000.000**	**PD Pengampu Urusan Perindustrian**
		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**														
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														
	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola perangkat daerah			**35.526.533.747**		**33.959.133.663**		**36.961.313.089**		**40.601.902.298**		**44.563.354.578**		**48.860.684.675**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,25		85,30		85,35		85,40		85,45		85,50		
		Nilai KOD Perangkat Daerah	39,05		39,10		39,15		39,20		39,25		39,30		
		Nilai Kearsipan Perangkat Daerah	B		B		BB		BB		A		A		
		MRI Perangkat Daerah	3,000		3,000		3,002		3,003		3,004		3,005		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan penunjang urusan pemerintahan			**1.980.559.124**		**1.997.519.438**		**2.197.271.382**		**2.416.998.520**		**2.658.698.372**		**2.924.568.209**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Umum)	85,00		86,00		86,50		86,80		87,00		87,50		
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik			**290.691.900**		**641.641.200**		**705.000.000**		**740.000.000**		**775.000.000**		**810.000.000**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Sistem Kerja	5		5		5		5		5		5		
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (SP)	99,61		99,62		99,63		99,64		99,65		99,66		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88, 22		88,72		89,22		89,72		90,22		90,72		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
		Nilai SAKIP (Aspek Pelaporan Kinerja)	11,35		11,38		11,42		11,45		11,48		11,50		
		Nilai KOD	37,50		37,75		38,00		38,25		38,50		38,75		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan penunjang urusan pemerintahan			**1.454.223.236**		**1.545.164.441**		**1.914.000.000**		**2.133.000.000**		**2.368.000.000**		**2.622.000.000**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Indeks Kepuasan Pimpinan (Bagian Prokompim)	85,00		86,00		86,50		86,80		87,00		87,50		
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**														
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi tata pemerintahan			**715.012.900**		**1.114.137.300**		**1.225.551.030**		**1.348.106.133**		**1.482.916.746**		**1.631.208.421**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Persentase Kebijakan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kerjasama daerah yang terfasilitasi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat			**2.489.331.962**		**3.135.633.395**		**3.098.310.040**		**3.100.039.017**		**3.101.854.443**		**3.103.760.641**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Persentase kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat yang terpenuhi	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Indeks Zakat Nasional	0,69		0,71		0,73		0,75		0,77		0,79		
	Meningkatnya kualitas kepuasan layanan hukum, kualitas kebijakan, dan reformasi hukum			**651.305.012**		**741.240.400**		**815.364.500**		**896.901.000**		**986.591.000**		**1.085.249.000**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Indeks Reformasi Hukum	96,10		96,25		96,50		96,75		97,00		97,25		
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**														
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan SDA			**454.715.260**		**684.534.800**		**905.000.000**		**965.000.000**		**1.020.000.000**		**1.100.000.000**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksanakan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Return on Asset (ROA) BUMD	1,42		1,57		1,71		1,86		2,00		2,15		
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	16,67-16,87		17,05-17,70		17,42-18,52		17,80-19,35		18,17-20,17		18,55-21,00		
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	47,72		47,42		47,12		46,83		46,53		46,23		
	Meningkatnya akses keuangan keuangan masyarakat			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	6,56		6,57		6,57		6,57		6,58		6,58		
	Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan			**485.216.125**		**605.221.125**		**665.743.238**		**732.317.561**		**805.549.317**		**886.104.249**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Persentase progres fisik seluruh OPD	98,60		98,70		98.80		98,90		99,00		99,10		
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa			**154.392.960**		**261.815.946**		**289.489.380**		**308.930.159**		**330.315.015**		**353.838.355**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah**
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**														
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**														
	Meningkatnya Kualitas Dukungan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			**10.007.902.000**		**12.240.493.000**		**12.882.185.000**		**13.581.205.000**		**14.264.324.000**		**14.799.026.000**	**PD Pengampu Unsur Sekretariat DPRD**
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Difasilitasi Pembahasannya	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.01	**PERENCANAAN**														
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**														
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah			**595.544.323**		**232.267.530**		**278.721.036**		**334.465.243**		**501.358.292**		**709.653.139**	**PD Pengampu Unsur Perencanaan**
		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		95,00		
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**														
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			**413.131.223**		**195.994.130**		**215.593.543**		**237.152.897**		**266.648.926**		**459.567.174**	**PD Pengampu Unsur Perencanaan**
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75,60		80,30		84,30		88,20		90,60		92,90		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA			**135.916.253**		**81.849.500**		**85.941.975**		**90.239.074**		**94.751.027**		**137.488.579**	**PD Pengampu Unsur Perencanaan**
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	76,25		77,38		80,25		82,50		84,63		85,38		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			**162.256.523**		**91.446.630**		**96.018.962**		**100.819.910**		**105.860.905**		**131.153.950**	**PD Pengampu Unsur Perencanaan**
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	75,56		76,56		79,06		81,25		83,00		83,90		
5.02	**KEUANGAN**														
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**														
	Terpenuhinya penganggaran daerah sesuai ketentuan			**1.120.137.275**		**1.232.151.003**		**1.355.366.103**		**1.490.902.713**		**1.639.992.984**		**1.803.992.283**	**PD Pengampu Unsur Keuangan**
		Persentase rancangan dokumen penganggaran sesuai standar (tepat waktu, sesuai Standar Harga Satuan, dan Analisis Standar Belanja)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Terpenuhinya penatausahaan keuangan sesuai ketentuan			**245.096.200**		**269.605.820**		**296.566.402**		**326.223.042**		**358.845.346**		**394.729.881**	**PD Pengampu Unsur Keuangan**
		Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Ketentuan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Terpenuhinya pelaporan keuangan sesuai ketentuan			**251.398.706**		**276.538.577**		**304.192.434**		**334.611.678**		**368.072.845**		**404.880.130**	**PD Pengampu Unsur Keuangan**
		Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan (Tepat Waktu, SAP, Kebijakan Akuntansi, BAS)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**														
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah			**2.424.517.836**		**27.366.969.620**		**67.170.366.582**		**4.227.033.240**		**4.549.736.564**		**4.904.710.220**	**PD Pengampu Unsur Keuangan**
		Persentase Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) sesuai Ketentuan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**														
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			**2.725.899.108**		**2.998.489.019**		**3.298.337.921**		**3.628.171.713**		**3.990.988.884**		**4.390.087.772**	**PD Pengampu Unsur Keuangan**
		Laju Pertumbuhan PAD	3,18		3,28		3,50		3,74		4,03		4,09		
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB	0,70		0,67		0,63		0,60		0,56		0,53		
5.03	**KEPEGAWAIAN**														
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**														
	Meningkatnya capaian aspek sistem merit dalam kepegawaian daerah			**1.289.695.700**		**1.351.057.500**		**1.518.585.970**		**1.670.444.567**		**1.837.489.024**		**2.021.237.926**	**PD Pengampu Unsur Kepegawaian**
		Persentase capaian nilai aspek Sistem Merit	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**														
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**														
	Meningkatnya kompetensi ASN			**2.153.671.950**		**1.935.739.200**		**2.152.591.320**		**2.367.850.452**		**2.604.635.497**		**2.865.099.047**	**PD Pengampu Unsur Pendidikan dan Pelatihan**
		Persentase cakupan pengembangan kompetensi ASN	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**														
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**														
	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi daerah dalam pembangunan			**750.135.446**		**715.892.460**		**940.283.500**		**1.035.283.500**		**1.095.283.500**		**998.494.500**	**PD Pengampu Unsur Penelitian dan Pengembangan**
		Persentase Hasil penelitian yang berkontribusi pada pembangunan	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**														
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**														
	Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan			**918.488.800**		**1.011.307.249**		**1.090.103.059**		**1.174.061.085**		**1.266.783.309**		1.345.692.124	**PD Pengampu Unsur Pengawasan**
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	96,020		96,025		96,030		96,035		96,040		96,045		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah komponen evaluasi			**708.526.200**		**780.348.389**		**836.048.313**		**894.600.865**		**959.377.067**		**1.022.915.570**	**PD Pengampu Unsur Pengawasan**
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,1950		17,2000		17,2100		17,2200		17,2300		17,2400		
		Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**														
	Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan			**27.032.300**		**29.735.530**		**32.709.083**		**35.979.991**		**39.577.990**		**43.535.789**	**PD Pengampu Unsur Pengawasan**
		Persentase OPD & BLUD yang memperoleh predikat Zona Integritas	11,42		14,28		17,14		20,00		22,85		25,71		
	Meningkatnya kinerja pencegahan korupsi			**3.608.729.600**		**5.455.967.750**		**6.030.256.483**		**6.580.523.641**		**7.203.054.683**		**7.593.234.825**	**PD Pengampu Unsur Pengawasan**
		Indeks Integritas Nasional	82,34		82,34		83,97		83,97		85,60		85,60		
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**														
	KECAMATAN MAGELANG UTARA														
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**283.437.580**		**234.107.190**		**364.000.000**		**394.000.000**		**417.000.000**		**445.000.000**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Utara**
		Persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**														
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**3.665.637.495**		**10.953.300.149**		**12.218.066.198**		**12.918.214.733**		**13.548.214.733**		**14.236.214.733**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Utara**
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif (RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**														
	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum			**432.027.600**		**551.309.600**		**550.000.000**		**560.000.000**		**580.000.000**		**600.000.000**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Utara**
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			**13.990.400**		**12.990.400**		**13.990.400**		**14.000.000**		**14.500.000**		**15.000.000**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Utara**
		Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	KECAMATAN MAGELANG TENGAH														
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**285.179.600**		**230.389.100**		**253.428.010**		**278.770.811**		**306.647.892**		**337.312.681**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Tengah**
		Persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**														
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**12.002.933.223**		**13.997.279.794**		**15.397.007.773**		**16.936.708.551**		**18.630.379.406**		**20.493.417.346**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Tengah**
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif (RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**														
	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum			**690.478.690**		**551.309.600**		**606.440.560**		**667.084.616**		**733.793.078**		**807.172.385**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Tengah**
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			**12.470.400**		**12.470.400**		**13.717.440**		**15.089.184**		**16.598.102**		**18.257.913**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Tengah**
		Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	KECAMATAN MAGELANG SELATAN														
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**223.410.600**		**112.909.900**		**116.039.000**		**118.937.000**		**121.315.000**		**124.490.500**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Selatan**
		Persentase pelayanan publik tata pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**														
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**4.387.872.930**		**11.798.415.500**		**12.022.289.100**		**22.947.125.200**		**23.406.066.800**		**24.198.370.140**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Selatan**
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif (RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**														
	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum			**542.051.500**		**518.526.500**		**531.490.000**		**544.800.000**		**555.696.000**		**569.588.400**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Selatan**
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

No	Urusan / Program / Outcome	Indikator	2025		2026		2027		2028		2029		2030		OPD Penanggungjawab
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**														
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			**17.235.000**		**19.850.000**		**20.346.500**		**20.823.000**		**21.239.500**		**21.770.000**	**PD Pengampu Unsur Kewilayahan Kecamatan Magelang Selatan**
		Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**														
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**														
	Meningkatnya Nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa			**1.282.488.100**		**913.594.055**		**929.943.100**		**947.014.100**		**964.844.900**		**983.470.200**	**PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum**
		Persentase peserta pembinaan yang meningkat pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	70,00		70,00		70,25		70,50		70,75		71,00		
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**														
	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat			**1.225.690.500**		**1.177.047.750**		**1.250.123.100**		**8.938.285.432**		**15.057.953.598**		**1.273.505.200**	**PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum**
		Persentase Pendidikan Politik Pemilih Pemula	15,00		15,00		17,50		17,50		20,00		20,00		
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**														
	Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan Ormas, serta Meningkatnya partisipasi dan peran aktif Ormas dalam pembangunan daerah			**313.703.200**		**236.975.300**		**334.745.400**		**337.455.620**		**342.286.500**		**344.247.400**	**PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum**
		Nilai Kinerja Ormas	61,00		61,00		61,50		62,00		62,50		63,00		
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**														
	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya, serta terciptanya kerukunan sosial.			**364.023.400**		**319.983.860**		**351.982.100**		**387.180.280**		**425.848.200**		**468.488.000**	**PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum**
		Persentase Pemahaman Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	70,00		70,00		70,25		70,50		70,75		71,00		
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**														
	Menciptakan Lingkungan yang Lebih Kondusif dan Harmonis			**611.922.900**		**479.201.500**		**479.201.500**		**479.201.500**		**479.201.500**		**479.201.500**	**PD Pengampu Unsur Pemerintahan Umum**
		Persentase Konflik yang berhasil dicegah	80,00		80,00		80,00		85,00		85,00		90,00		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, selaras dengan visi dan misi kepala daerah. IKU ditentukan berdasarkan analisis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta hasil penjenjangan kinerja untuk memastikan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2025-2029. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, IKU untuk 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kota Magelang Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
1	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa dalam Skala Regional	Persen	19,62	19,63	19,65	19,66	19,67	19,69
2	Kontribusi PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	65,86	66,07	66,29	66,52	66,77	66,89
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25
4	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	82,63	83,09	83,57	84,05	84,53	85,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10
6	Rasio Gini	Angka	0,447	0,432	0,417	0,402	0,387	0,372
7	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Angka	0	0	0	0	0	0
8	Nilai Livable City	Nilai	73,40	73,76	74,12	74,48	74,84	75,20
9	Nilai Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	3,05	3,10	3,16	3,20	3,25	3,30
10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	92,32-90,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45
11	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74
12	Kontribusi Penurunan emisi GRK kumulatif	Ton CO_2eq	34.978,84	114.342,81	193.706,78	273.070,75	352.434,72	431.798,69
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	92,25	92,50	92,75	93	93,25	94
14	SAKIP	Angka	80,01	80,3	80,5	80,6	80,8	82,49
15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,6100	4,6150	4,6200	4,6250	4,6300	4,6300

*Keterangan: *) Tahun 2030 merupakan kinerja kepala daerah periode berikutnya*

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja

Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Penetapan IKD beserta targetnya telah mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mandat dalam pencapaian kinerja pada urusan pemerintahan daerah. Selain itu, potensi daerah juga dipandang sebagai modal dalam pencapaian kinerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, setiap OPD dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Berikut IKD yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	8,54	8,40	8,26	8,12	7,98	7,84
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,22	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00
5	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO_2eq	34.978,84	114.342,81	193.706,78	273.070,75	352.434,72	431.798,69
6	Indeks Risiko Bencana	Angka	92,32 - 89,10	90,02 - 88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,14 - 5,68	5,15 - 5,70	5,16 - 5,74	5,17 - 5,76	5,18 - 5,79	5,23 - 5,81
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	98,58 - 104,62	109,09 - 113,97	119,59 - 123,31	130,10 - 132,66	140,60 - 142,00	153,18 - 155,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10
5	Rasio Gini	Angka	0,4470	0,4320	0,4170	0,4020	0,3870	0,3720
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	82,63	83,09	83,57	84,05	84,53	85,00
7	Prevalensi Stunting	%	14,80	13,50	12,30	11,40	10,25	9,26
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	46,53	47,78	49,03	50,28	51,53	52,68
10	Indeks Perlindungan Anak	Angka	69,39	70,39	71,39	72,39	73,39	74,39
11	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,137 - 0,131	0,136 - 0,124	0,135 - 0,118	0,134 - 0,111	0,133 - 0,105	0,132 - 0,099
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,52	16,57	16,62	16,65	16,69	16,73
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	6,60	6,67	6,87	7,01	7,27	7,30
3	Rasio Kewirausahaan	%	4,95	5,55	6,15	6,75	7,35	7,95
4	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,58	3,61	3,62	3,64	3,66	3,68
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	78,85	79,44	80,02	80,61	81,19	81,77
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,71	0,77	0,83	0,88	0,93	0,96

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	96,59	96,72	96,93	97,34	97,69	97,84
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,10	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,70	3,72	3,73	3,75	3,76	3,78
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,6100	4,6150	4,6200	4,6250	4,6300	4,6300
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,34	82,34	83,97	83,97	85,60	85,60
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	94,00
	INDIKATOR KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH							
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	61,69	63,50	66,50	69,50	72,50	72,50
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	81,05	83,55	86,05	88,55	91,05	93,55
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67,85	70,75	73,65	76,55	79,45	82,35
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	89,37	90,47	91,57	92,67	93,77	94,87
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,51	78,01	79,51	81,01	82,51	84,01
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	63,29	64,00	64,00	64,80	64,80	64,80
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	80,06	81,50	82,50	83,50	84,50	84,50
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	79,06	80,56	82,06	83,56	85,06	85,06
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	75,34	76,54	77,74	78,94	79,14	79,14
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	75,51	75,71	75,91	76,11	76,31	76,31
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,00
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	62,96	63,96	64,96	65,96	66,96	66,96
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	65,31	67,50	69,50	71,50	73,50	73,50
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	0	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	14,80	13,40	12,30	11,40	10,25	9,26
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	58,75	59,58	60,36	61,15	61,93	62,72
2	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	74,99	75,08	76,17	77,27	78,36	79,45
3	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	59,32	66,60	74,95	83,30	91,65	100,00
4	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota)	%	85,77	85,86	85,95	86,03	86,12	86,20

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
6	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/ analis	%	39,60	45,60	51,60	57,60	63,60	69,60
7	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/ dilayani Pemerintah Daerah	Hari	60,00	58,00	56,00	54,00	52,00	50,00
9	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	45,00
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	10,00	25,60	20,90	26,40	100,00	100,00
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,40	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43
9	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,33	0,40	0,50	0,60	0,75	0,90
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	kali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta / kapita	123,91	129,55	135,45	141,63	148,12	154,97
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	39,39	42,42	45,45	53,03	54,55	57,58
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	98,00	98,25	98,40	98,65	98,85	99,05
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,09	97,45	97,81	98,17	98,53	98,89
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,137 - 0,131	0,136 - 0,124	0,135 - 0,118	0,134 - 0,111	0,133 - 0,105	0,132 - 0,099
3	Persentase ARG Daerah	%	6,50	6,80	7,10	7,40	7,70	8,00
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85,71	88,57	88,57	91,43	91,43	94,28
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/ Kota	Skor	86,15	86,20	86,30	86,40	86,50	86,60
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	62,47	62,52	62,57	62,62	62,67	62,72
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/ Kota	Nilai	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	46,67	50,00	53,33	56,67	60,00	63,33
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	36,00	36,50	36,75	37,00	37,25	37,50
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR)	%	71,05	71,06	71,07	71,08	71,09	71,10

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	6,60	6,55	6,50	6,45	6,40	6,35
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Angka	14,80	13,90	13,20	12,50	11,90	11,40
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	66,45 - 67,10	67,86 - 67,90	68,63 - 68,70	69,41 - 69,50	70,19 - 70,30	70,97 - 71,10
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	41,00	45,00	48,00	52,00	55,00	59,00
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10,71	14,29	17,86	21,43	25,00	28,57
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	4,48	4,53	4,58	4,63	4,68	4,73
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	53,95	59,71	65,46	71,21	76,96	82,72
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat	%	0,67	1,52	2,19	2,85	3,52	4,19
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0,70	0,70	0,70	0,80	0,80	0,80
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3,26	3,26	3,27	3,27	3,28	3,28

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	49,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	43,00	49,00	55,00	60,00	64,00	70,00
2	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	32,00
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	88,45	88,47	88,49	88,51	88,53	88,55
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	86,80	87,12	87,44	87,77	88,10	88,42
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Produksi Perikanan Budi Daya	%	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	28,02	34,51	35,74	36,24	37,43	37,53
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	5,31	7,89	10,37	12,69	14,88	16,75
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	3,97	4,01	4,04	4,19	4,37	4,37
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	25,33	27,16	28,06	28,86	31,40	31,40
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
4	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
5	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *surveilance* penyakit dari 5 PHMS)	%	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	98,93	98,99	99,00	99,00	99,01	99,03
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00	40,00
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	9,41	9,42	9,43	9,44	9,45	9,46
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik'	%	23,11	24,77	25,86	26,86	27,78	28,63
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	28,40	28,50	28,60	28,70	28,90	29,00
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Nilai	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.01	**PERENCANAAN**							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11
5.02	**KEUANGAN**							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	35,56	35,89	35,92	35,95	35,96	35,98
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	35,98	37,70	37,75	37,81	37,86	37,90
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	94,12	94,50	95,00	95,10	95,30	95,40
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1,70	1,73	1,75	1,80	1,84	1,88
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6	Persentase Penurunan SILPA	%	6,02	6,32	6,44	6,56	6,66	6,74

No	Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030*
5.03	**KEPEGAWAIAN**							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	85,01	87,00	90,00	92,00	94,00	95,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,3400	3,3420	3,3440	3,3450	3,3470	3,4000
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,40	3,40	3,40	3,41	3,41	3,41
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	96,0250	96,0300	96,0350	96,0400	96,0450	96,0500
7.01	**KECAMATAN**							
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	99,61	99,62	99,63	99,64	99,65	99,66
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							

*Keterangan: *) Tahun 2030 merupakan kinerja kepala daerah periode berikutnya*

4.2.3 Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Tabel 4.4 Indikator Utama Pembangunan Kota Magelang Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Tingkat Kemiskinan**	%	5,53 - 5,80	5,11 - 5,38	4,70 - 5,09	4,29 - 4,81	3,80 - 4,50	3,47 - 4,25	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	8,54	8,40	8,26	8,12	7,98	7,84	PD Pengampu Urusan Pangan
3	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	Angka	91,56	91,80	92,03	92,27	92,50	92,74	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,83	77,94	78,16	78,39	78,62	79,01	PD Pengampu Urusan Kesehatan
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	0	0	0	PD Pengampu Urusan Kesehatan
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	14,80	13,50	12,30	11,40	10,25	9,26	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	%	90,00	90,30	90,50	90,80	91,00	91,20	PD Pengampu Urusan Kesehatan
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	PD Pengampu Urusan Kesehatan
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (Seluruh Jenjang):								
	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	81,05	83,55	86,05	88,55	91,05	93,55	PD Pengampu Urusan Pendidikan
	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	89,37	90,47	91,57	92,67	93,77	94,87	PD Pengampu Urusan Pendidikan
	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	67,85	70,75	73,65	76,55	79,45	82,35	PD Pengampu Urusan Pendidikan
	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	76,51	78,01	79,51	81,01	82,51	84,01	PD Pengampu Urusan Pendidikan
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	11,13	11,22	11,32	11,41	11,50	11,59	PD Pengampu Urusan Pendidikan
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,85	15,07	15,30	15,52	15,75	15,89	PD Pengampu Urusan Pendidikan
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	22,61	22,73	22,85	22,97	23,09	23,53	PD Pengampu Urusan Pendidikan
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	95,38	96,25	96,75	97,00	97,25	97,50	PD Pengampu Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	21,28	26,59	31,92	37,23	42,55	47,87	PD Pengampu Urusan Pendidikan
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	26,42	27,08	28,16	29,08	30,16	31,42	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	440.000	462.500	485.000	507.500	530.000	552.500	PD Pengampu Urusan Pariwisata
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam Satu Tahun Terakhir	%	27,36	27,95	28,54	29,13	29,72	30,31	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	2,91	3,06	3,20	3,35	3,49	3,64	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
20	**Jumlah Kejadian Konflik SARA**	Kali	0	0	0	0	0	0	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
21	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	66,45-67,10	67,86 - 67,90	68,63 - 68,70	69,41 - 69,50	70,19 - 70,30	70,97 - 71,10	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,137-0,131	0,136 - 0,124	0,135 - 0,118	0,134 - 0,111	0,133 - 0,105	0,132 - 0,099	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,52	16,57	16,62	16,65	16,69	16,73	PD Pengampu Urusan Perindustrian
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,60	6,67	6,87	7,01	7,27	7,30	PD Pengampu Urusan Pariwisata
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2.796	3.761	5.105	6.955	9.558	13.145	PD Pengampu Urusan Pariwisata
26	Rasio Kewirausahaan	%	4,95	5,55	6,15	6,75	7,35	7,95	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,85	1,86	1,91	1,97	1,99	2,04	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
28	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,42	1,57	1,71	1,86	2,00	2,15	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
29	Disparitas Harga	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	47,72	47,42	47,12	46,83	46,53	46,23	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,71	0,67	0,63	0,6	0,56	0,53	PD Pengampu Unsur Keuangan
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten Per PDRB	%	0,019	0,020	0,021	0,022	0,024	0,025	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,021	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,58	3,61	3,62	3,64	3,66	3,68	PD Pengampu Urusan Riset dan Inovasi
35	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	%	4,20 - 4,80	4,12 - 4,66	4,04 - 4,52	3,96 - 4,38	3,88 - 4,24	3,80 - 4,10	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
36	*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	%	59,86	59,97	60,08	60,19	60,30	60,41	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	46,53	47,78	49,03	50,28	51,53	52,68	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
38	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	96,59	96,72	96,93	97,34	97,69	97,84	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
39	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	78,85	79,44	80,02	80,61	81,19	81,77	PD Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman
40	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	85,77	85,86	85,95	86,03	86,12	86,20	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
41	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,25	PD Pengampu Urusan Perhubungan
42	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	17,22	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	89,10	89,64	90,18	90,72	91,26	91,80	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,44	71,48	71,53	71,57	71,62	71,62	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
45	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	19,95	20,33	21,09	21,85	22,62	26,10	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
46	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	Angka	92,32-89,10	90,02-88,80	89,05 - 87,46	88,07 - 86,13	87,10 - 84,79	86,12 - 83,45	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
47	**Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif**	Ton CO2eq	34.979,00	114.342,81	193.706,78	273.070,75	352.434,72	431.798,69	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
48	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Angka	92,25	92,50	92,75	93,00	93,25	94,00	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
49	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,10	96,25	96,50	96,75	97,00	97,25	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
50	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,70	3,72	3,73	3,75	3,76	3,78	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
51	**Indeks Pelayanan Publik**	Angka	4,6100	4,6150	4,6200	4,6250	4,6300	4,6300	PD Pengampu Unsur Sekretariat Daerah
52	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,34	82,34	83,97	83,97	85,60	85,60	PD Pengampu Unsur Pengawasan
53	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kota	Juta Rupiah	98,58 - 104,62	109,09 - 113,97	119,59 - 123,31	130,10 - 132,66	140,60 - 142,00	153,18 - 155,50	PD Pengampu Unsur Perencanaan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					PD Koord
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
54	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	16,67-16,87	17,05-17,70	17,42-18,52	17,80-19,35	18,17-20,17	18,55-21,00	PD Pengampu Unsur Perencanaan

Dalam perencanaan pembangunan daerah, kesinambungan program dan arah kebijakan menjadi kunci penting untuk memastikan visi dan misi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan pada periode RPJMD saat ini, tetapi juga untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Program pembangunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun sebagai rangkaian kerja yang berkesinambungan. Tahun 2030, sebagai tahun terakhir RPJMD periode ini, memiliki peran strategis sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. Dengan demikian, program-program pada tahun 2030 tidak hanya menjadi bagian penutup periode RPJMD ini, tetapi juga menjadi landasan penting untuk memastikan transisi yang mulus menuju tahap pembangunan daerah selanjutnya.

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang menjadi acuan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Dalam perjalanannya, RPJMD ini mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan global.

RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029 dirancang untuk mendukung pencapaian visi: **"Magelang Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman dan Berkelanjutan"**, dengan menjabarkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK dan perlindungan sosial adaptif.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing dengan memperkuat potensi perdagangan dan jasa, meningkatkan inovasi sektor pariwisata, serta memastikan pembangunan ekonomi yang stabil dan inklusif.
3. Meningkatkan ketahanan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan dengan menjaga kualitas lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan ketahanan sosial budaya, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Mewujudkan infrastruktur yang adaptif dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas, konektivitas yang lebih baik, serta optimalisasi pelayanan dasar dan hunian.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi layanan publik berbasis digital dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
6. Keberhasilan pembangunan Kota Magelang dalam periode ini bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar RPJMD dapat diimplementasikan secara efektif, maka pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan: RPJMD harus dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen anggaran tahunan seperti KUA-PPAS dan APBD.
2. Sinergi dan Kolaborasi: Pembangunan Kota Magelang memerlukan sinergi antar-perangkat daerah serta kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
3. Berbasis Data dan Bukti: Setiap kebijakan dan program pembangunan harus berdasarkan data yang akurat dan analisis yang komprehensif agar keputusan yang diambil tepat sasaran.

4. Fleksibilitas dan Adaptasi: Dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan, RPJMD harus dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi yang berkembang dengan tetap mengacu pada tujuan utama pembangunan daerah.
5. Partisipasi Masyarakat: Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan harus terus ditingkatkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan warga.
6. Dalam perencanaan pembangunan daerah, kesinambungan program dan arah kebijakan menjadi kunci penting untuk memastikan visi dan misi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan pada periode RPJMD saat ini, tetapi juga untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.
7. Program pembangunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 disusun sebagai rangkaian kerja yang berkesinambungan. Tahun 2030, sebagai tahun terakhir RPJMD periode ini, memiliki peran strategis sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034. Dengan demikian, program-program pada tahun 2030 tidak hanya menjadi bagian penutup periode RPJMD ini, tetapi juga menjadi landasan penting untuk memastikan transisi yang mulus menuju tahap pembangunan daerah selanjutnya.
8. Memperhatikan pengarusutamaan pembangunan daerah yaitu Gender dan Inklusi Sosial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(SDGs), Transformasi Digital, Pembangunan Rendah karbon, dan Pembangunan Berketahanan Iklim.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja: Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Pelaporan Berkala: Pemerintah Kota Magelang wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta laporan evaluasi pembangunan daerah lainnya.
3. Forum Evaluasi dan Umpan Balik: Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan terhadap efektivitas kebijakan dan program pembangunan.
4. Rekomendasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan program yang belum optimal,
5. Pengawasan oleh DPRD dan Masyarakat: DPRD dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan RPJMD guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

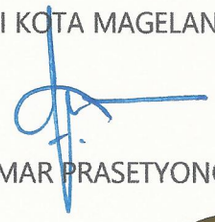
5.4 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Manajemen Risiko Pembangunan Daerah menjadi aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembangunan. Kompleksitas program dan kegiatan prioritas menuntut adanya pengelolaan risiko yang sistematis, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penerapan manajemen risiko di tingkat daerah mencakup langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi risiko utama yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah, baik dari aspek kebijakan, anggaran, maupun kondisi eksternal yang berpengaruh.
2. Pengukuran dan mitigasi risiko dengan menentukan strategi yang tepat guna mengurangi dampak risiko terhadap pencapaian target pembangunan.
3. Integrasi pengelolaan risiko dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen risiko melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi bagi pegawai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko pembangunan.

Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang terstruktur, diharapkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan semakin meningkat.

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

